PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

BAPPEDA
KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Panjang Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Rakortekbang adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk menyelaraskan dan menyinkronkan rencana pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga terkait.
15. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
   b. prioritas pembangunan Daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
   d. program strategis nasional; dan
   e. kesepakatan bersama Rakortekbang nasional tahun 2025

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPA; dan
c. bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2026.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
f. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
g. penutup.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal RKPD menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, dapat dilakukan Perubahan RKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan tahun anggaran tahun sebelumnya, harus sisa digunakan untuk tahun berjalan.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pasal5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 04 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 04 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 15

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1
I.1 Latar Belakang I-1
I.2 Dasar Hukum I-3
I.3 Hubungan Antar Dokumen I-6
I.4 Maksud dan Tujuan I-9
I.5 Sistematika Dokumen RKPD I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
II.1 Kondisi Umum Daerah II-1
II.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
II.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-26
II.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-59
II.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-227
II.2 Capaian Indikator Pembangunan Daerah II-230
II.2.1 Capaian Indikator Kinerja Makro II-230
II.2.2 Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal II-231
II.2.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci II-235
II.3 Evaluasi II-253
II.3.1. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan II-253
II.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Tahun 2024 ..... II-319
II.3.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2025 ..... II-440
II.4 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II-442
II.5 Isu Strategis II-456
II.6 Inovasi Kota Makassar II-461
`

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
III.1 Arah Kebijakan Ekonomi III-1
III.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III-1
III.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan III-2
III.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2026 ..... III-3
III.1.4 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah III-5
III.1.4.1 Prospek Perekonomian Daerah III-5

III.1.4.2 Tantangan Perekonomian III-7

III.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-24

III.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan III-24

III.2.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2026 ..... III-25

III.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-29

III.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-42

III.2.5 Pendanaan Pembangunan Lainnya III-45

III.2.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).... III-45

III.2.5.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha(KPBU).. III-46

III.2.5.3 Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab dan Lingkungan (TJSL) III-46

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026 ..... IV-1

IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026..... IV-1

VI.1.1 VISI IV-1

VI.1.2 MISI IV-3

IV.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026..... IV-11

IV.2.1 Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026..... IV-11

IV.2.2 Sasaran Pembangunan dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2026 IV-11

IV.2.3. Kebijakan Kewilayahan Sulawesi Selatan Tahun 2026 ..... IV-14

IV.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ..... IV-16

IV.2.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026 ..... IV-22

IV.2.5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 ..... IV-28

IV.2.5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026 ..... IV-40

IV.2.6 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi dan Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... IV-58

IV.3 Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar IV-157

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

V.I Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2026..... V-1

V.2 Program Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 .. V-2

V.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026..... V-26

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

VI.1 Indikator Makro..... VI-1

VI.2 Indikator Kinerja Utama..... VI-1

VI.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) VI-4

VI.4 Indikator Kinerja Daerah..... VI-21

BAB VII PENUTUP VII-1

VII.1 Kaidah Pelaksanaan..... VII-1

VII.2 Kesimpulan VII-2

LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB II

Tabel II.1 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-20
Tabel II.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-22
Tabel II.3 Sebaran dan Kepadatan Jumlah Rumah Tangga menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-24
Tabel II.4 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-26
Tabel II.5 Berdasarkan Harga Berlaku Dan Harga Konstan (Triliun Rupiah) Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-29
Tabel II.6 PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2024 ---------- II-29
Tabel II.7 Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dengan Wilayah Setaranya ---------- II-31
Tabel II.8 Perbandingan Laju dan Rata-Rata Inflasi Kota Makassar, Provinsi Sul-Sel, . Nasional Tahun 2020 s.d 2024---------- II-33
Tabel II.9 Capaian Gini Ratio Kota Makassar dengan Wilayah Setaranya Tahun 2020 s.d 2024---------- II-35
Tabel II.10 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) perkapita per hari Tahun 2020 s.d 2024 Kota Makassar---------- II-36
Tabel II.11 Angka partisipasi angkatan kerja (usia 15 tahun keatas) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-36
Tabel II.12 Tingkat partisipasi angkatan kerja (usia 15 - 65 tahun) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-37
Tabel II.13 Tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --------- II-37
Tabel II.14 Rasio penduduk yang bekerja Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-38
Tabel II.15 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-38
Tabel II.16 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-39
Tabel II.17 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 -------- II-39
Tabel II.18 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024---------- II-40
Tabel II.19 Persentase penduduk miskin Kota Makassar dengan daerah setara dikawasan Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-40

Tabel II.20 Persentase penduduk miskin Kota Makasar dengan daerah setara Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-41
Tabel II.21 Garis Kemiskinan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-41
Tabel II.22 Garis Kemiskinan di Kota Makassar dan Kota Setaranya di Luar kawasan Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-42
Tabel II.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024---------- II-42
Tabel II.24 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar dengan daerah setaranya Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-43
Tabel II.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar dengan daerah setaranya setaranya Di luar Kawasan Tahun 2020 s.d 2024---------- II-43
Tabel II.26 Indeks Pendidikan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-44
Tabel II.27 Indeks Kesehatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-44
Tabel II.28 Komponen Pembentuk IPM Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-44
Tabel II.29 Angka melek huruf Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-47
Tabel II.30 Angka rata-rata lama sekolah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-48
Tabel II.31 Angka usia harapan hidup Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-48
Tabel II.32 Persentase balita gizi buruk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-49
Tabel II.33 Presentase balita gizi kurang Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-49
Tabel II.34 Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024-- II-50
Tabel II.35 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-51
Tabel II.36 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-51
Tabel II.37 Persentase PAD terhadap pendapatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 II-52
Tabel II.38 Opini BPK Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-53
Tabel II.39 Penguatan Cadangan Pangan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-53
Tabel II.40 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 II-54
Tabel II.41 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-56
Tabel II.42 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-56
Tabel II.43 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-57
Tabel II.44 Produksi Sektor Pertanian Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-58
Tabel II.45 Kontribusi produksi kelompok pertanian terhadap PDRB Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-58
Tabel II.46 Pendidikan Anak Usia Dini Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-59
Tabel II.47 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-60
Tabel II.48 Angka Pendidikan yang ditamatkan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---- II-61
Tabel II.49 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-62

Tabel II.50 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-63
Tabel II.51 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-63
Tabel II.52 Angka Partisipasi Sekolah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-63
Tabel II.53 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-64
Tabel II.54 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-65
Tabel II.55 Angka Putus Sekolah (APS) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-65
Tabel II.56 Angka Kelulusan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-66
Tabel II.57 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTS ke SMA/MA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-66
Tabel II.58 Sekolah SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-67
Tabel II.59 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-68
Tabel II.60 Rasio Ketersediaan Guru/Murid Pendidikan Dasar Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-68
Tabel II.61 Rasio ketersediaan guru/murid pendidikan dasar Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-69
Tabel II.62 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-69
Tabel II.63 Angka melek huruf penduduk usia 15 - 29 Tahun Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-70
Tabel II.64 Penduduk usia < 15 tahun yang melek huruf Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-70
Tabel II.65 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV Tahun 2020 s.d 2024 Kota Makassar ---------- II-71
Tabel II.66 Jumlah Penerima Beasiswa Anak Lorong Berprestasi ---------- II-71
Tabel II.67 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-72
Tabel II.68 Angka Kelangsungan hidup bayi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ------- II-72
Tabel II.69 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-73
Tabel II.70 Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-73
Tabel II.71 Hasil Survey Status Gizi (SSGI) Stunting Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota II-74
Tabel II.72 Angka Prevalensi Balita Stunting Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024-------- II-74

Tabel II.73 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-74
Tabel II.74 Rasio Posyandu persatuan balita Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ----- II-75
Tabel II.75 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-75
Tabel II.76 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-76
Tabel II.77 Rasio Dokter per satuan penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 -- II-76
Tabel II.78 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-77
Tabel II.79 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-77
Tabel II.80 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-78
Tabel II.81 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Makassar Tahun 2024---------- II-78
Tabel II.82 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki komptensi kebidanan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-79
Tabel II.83 Cakupan kelurahan Unversal Child Immunization (UCI) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-79
Tabel II.84 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-79
Tabel II.85 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-80
Tabel II.86 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-81
Tabel II.87 Cakupan balita pneumonia yang ditangani Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-81
Tabel II.88 Cakupan penemuan dan pananganan penderita penyakit TBC BTA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-82
Tabel II.89 Tingkat Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-82
Tabel II.90 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-83
Tabel II.91 Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-83
Tabel II.92 Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-84
Tabel II.93 Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-84
Tabel II.94 Penderita diare yang ditangani Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-85
Tabel II.95 Angka kejadian Malaria Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-85

Tabel II.96 Prevelensi HIV/AIDS dari total populasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-86
Tabel II.97 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-86
Tabel II.98 Cakupan kunjungan bayi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-87
Tabel II.99 Cakupan puskesmas Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-87
Tabel II.100 Cakupan pembantu puskesmas Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ------- II-88
Tabel II.101 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ----- II-88
Tabel II.102 Cakupan pelayanan nifas Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-89
Tabel II.103 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-89
Tabel II.104 Cakupan pelayanan anak balita Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024------- II-90
Tabel II.105 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-91
Tabel II.106 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-91
Tabel II.107 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-92
Tabel II.108 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-92
Tabel II.109 Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-93
Tabel II.110 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat 24 jam Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-93
Tabel II.111 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-93
Tabel II.112 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-94
Tabel II.113 Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40Km/Jam) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-94
Tabel II.114 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-95
Tabel II.115 Persentase rumah tinggal bersanitasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 II-95
Tabel II.116 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Kota Makassar 2020 s.d 2024---------- II-96
Tabel II.117 Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-96
Tabel II.118 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-97
Tabel II.119 Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Kota Makassar Tahun 2019 s.d 2023---------- II-97

Tabel II.120 Persentase penduduk berakses air minum Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-98
Tabel II.121 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-98
Tabel II.122 Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-99
Tabel II.123 Jumlah Rumah Ibadah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-99
Tabel II.124 Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-99
Tabel II.125 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses berkelanjutan terhadap air
minum layak perkotaan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-100
Tabel II.126 Presentase Area Kawasan Kumuh Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024--- II-100
Tabel II.127 Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-101
Tabel II.128 Rasio bangunan ber-IMB persatuan banguan Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-102
Tabel II.129 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RT RW Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-102
Tabel II.130 Rasio rumah layak huni Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-103
Tabel II.131 Cakupan ketersediaan rumah layak huni Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-103
Tabel II.132 Persentase lingkungan pemukiman kumuh Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-103
Tabel II.133 Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-104
Tabel II.134 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-104
Tabel II.135 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-105
Tabel II.136 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-105
Tabel II.137 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-106
Tabel II.138 Angka Kriminalitas Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-106
Tabel II.139 Cakupan penyelenggaraan bencana kebakaran Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-107
Tabel II.140 Respon Time Rate Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-108
Tabel II.141 Potensi luas wilayah rawan bencana Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024-- II-108
Tabel II.142 Persentase Korban Bencana Kota Makasssar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-109
Tabel II.143 Persentase penegakan Perda Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-110

Tabel II.144 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-110
Tabel II.145 Persentase PMKS yang tertangani Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --- II-111
Tabel II.146 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-112
Tabel II.147 Persentase Panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-112
Tabel II.148 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-113
Tabel II.149 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana palayanan kesejahteraan sosial Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-113
Tabel II.150 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-114
Tabel II.151 Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana prasarana tangap darurat lengkap Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-115
Tabel II.152 Persentase Penyandang Disabilitas Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Serta Lansia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-115
Tabel II.153 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-116
Tabel II.154 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-116
Tabel II.155 Besaran pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-117
Tabel II.156 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-117
Tabel II.157 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-118
Tabel II.158 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-118
Tabel II.159 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-119
Tabel II.160 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-119
Tabel II.161 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-120
Tabel II.162 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-121

Tabel II.163 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-121
Tabel II.164 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-122
Tabel II.165 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Pengaduan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-123
Tabel II.166 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-124
Tabel II.167 Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-126
Tabel II.168 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-127
Tabel II.169 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-127
Tabel II.170 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-128
Tabel II.171 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-129
Tabel II.172 Pembangunan Gender dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 s.d 2024 II-129
Tabel II.173 Ketersediaan Pangan Utama Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-130
Tabel II.174 Ketersedian energi dan protein perkapita Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-131
Tabel II.175 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-133
Tabel II.176 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --- II-134
Tabel II.177 Penyelesaian Izin Lokasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-134
Tabel II.178 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Aset Pemerintah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-134
Tabel II.179 Tersusunnya RPPLH Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-135
Tabel II.180 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-136
Tabel II.181 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Provinsi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-136
Tabel II.182 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 II-136
Tabel II.183 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-137

Tabel II.184 Pembinaan dan Pengawasan ketaatan terhadap izin lingkungan (PPLH dan PUULH) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-137
Tabel II.185 Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLHD) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-138
Tabel II.186 Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-138
Tabel II.187 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisioanal Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-139
Tabel II.188 Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-139
Tabel II.189 Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat Tahun 2020 s.d 2024 Kota Makassar---------- II-139
Tabel II.190 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-140
Tabel II.191 Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-140
Tabel II.192 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-141
Tabel II.193 Terlaksananya pemberian pengharagaan lingkungan hidup Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-141
Tabel II.194 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-142
Tabel II.195 Timbunan sampah yang ditangani Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ----- II-142
Tabel II.196 Persentase cakupan area pelayanan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024- II-143
Tabel II.197 Persentase Sampah Yang Tertangani Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 II-143
Tabel II.198 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ----- II-144
Tabel II.199 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-144
Tabel II.200 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-144
Tabel II.201 Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-145
Tabel II.202 Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024------ II-145
Tabel II.203 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-145
Tabel II.204 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-146
Tabel II.205 Jumlah penduduk Kota Makassar dirinci Per kecamaatanTahun 2020 s.d 2024 II-146
Tabel II.206 Jumlah Penduduk Wajib Ktp-El Tahun 2020 s.d 2024---------- II-147
Tabel II.207 Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tahun 2020 s.d 2024--- II-147

Tabel II.208 Rasio bayi berakte kelahiran Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-148
Tabel II.209 Rasio pasangan berakte nikah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024--------- II-148
Tabel II.210 Ketersediaan database kependudukan Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-149
Tabel II.211 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-149
Tabel II.212 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-150
Tabel II.213 Cakupan penerbitan akte kelahiran Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024--- II-151
Tabel II.214 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan dalam
kondisi baik Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-151
Tabel II.215 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-152
Tabel II.216 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-152
Tabel II.217 Persentase LSM Aktif Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-152
Tabel II.218 Persentase LPM Berprestasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-153
Tabel II.219 Persentase PKK Aktif Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-154
Tabel II.220 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-154
Tabel II.221 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-154
Tabel II.222 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-155
Tabel II.223 Total Fertility Rate Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-155
Tabel II.224 Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek Kota
Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-155
Tabel II.225 Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembagunan yang
berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembagunan
Berwawasan Kependudukan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-156
Tabel II.226 Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan
Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-156
Tabel II.227 Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan
Induk Pengendalian Penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --------- II-157
Tabel II.228 Jumlah Kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas
dan kualitas penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-158
Tabel II.229 Jumlah sektor yang meyepakati dan memanfaatkan data profil untuk
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Tahun 2020 s.d 2024
Kota Makassar---------- II-158

Tabel II.230 Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan Formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan --- Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-159
Tabel II.231 Rata-rata Jumlah anak perkeluarga Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --- II-159
Tabel II.232 Angka pemakai kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-160
Tabel II.233 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-160
Tabel II.234 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 tahun Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-161
Tabel II.235 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-161
Tabel II.236 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-162
Tabel II.237 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-162
Tabel II.238 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-162
Tabel II.239 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-163
Tabel II.240 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-163
Tabel II.241 Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-164
Tabel II.242 Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-164
Tabel II.243 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-165
Tabel II.244 Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-165
Tabel II.245 Rasio petugas pembantu pembina KB Kelurahan di setiap Kelurahan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-165
Tabel II.246 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ----- II-166
Tabel II.247 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-166
Tabel II.248 Cakupan Faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan palayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-167
Tabel II.249 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-167

Tabel II.250 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-168
Tabel II.251 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-168
Tabel II.252 Rata-rata usia kawin pertama wanita Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024-- II-169
Tabel II.253 Persentase pembiayaan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-169
Tabel II.254 Rasio Akseptor Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-170
Tabel II.255 Jumlah arus penumpang angkutan umum Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-170
Tabel II.256 Rasio ijin trayek Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024---------- II-171
Tabel II.257 Jumlah uji kir angkutan umum Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-171
Tabel II.258 Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-172
Tabel II.259 Persentase layanan angkutan darat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 -- II-172
Tabel II.260 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-172
Tabel II.261 Pemasangan rambu - rambu Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-173
Tabel II.262 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-173
Tabel II.263 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-173
Tabel II.264 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-174
Tabel II.265 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --- II-174
Tabel II.266 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --- II-175
Tabel II.267 Persentase koperasi aktif Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-175
Tabel II.268 Persentase UKM non BPR/LKM aktif Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 II-176
Tabel II.269 Persentase BPR/LKM aktif Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-177
Tabel II.270 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 -- II-177
Tabel II.271 Jumlah nilai investor berskala nasional (PMDN/PMA) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-179
Tabel II.272 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-180
Tabel II.273 Rasio daya serap tenaga kerja Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 -------- II-180
Tabel II.274 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-181
Tabel II.275 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-182

Tabel II.276 Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ------- II-182
Tabel II.277 Persentase Wirausaha Muda Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-183
Tabel II.278 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 -- II-183
Tabel II.279 Cakupan pembinaan atlet muda Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ------ II-184
Tabel II.280 Jumlah atlet berprestasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-184
Tabel II.281 Jumlah prestasi olahraga Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-185
Tabel II.282 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-185
Tabel II.283 Buku ”Daerah Dalam Angka” Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-185
Tabel II.284 Buku ”PDRB” Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-186
Tabel II.285 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 -------- II-186
Tabel II.286 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-186
Tabel II.287 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-187
Tabel II.288 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-187
Tabel II.289 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-188
Tabel II.290 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-188
Tabel II.291 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-189
Tabel II.292 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-190
Tabel II.293 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-190
Tabel II.294 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-191
Tabel II.295 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-191
Tabel II.296 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-192
Tabel II.297 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-193
Tabel II.298 Produksi Perikanan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-193
Tabel II.299 Konsumsi Ikan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-194
Tabel II.300 Cakupan bina kelompok nelayan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---- II-194
Tabel II.301 Produksi perikanan kelompok nelayan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-195

Tabel II.302 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-195
Tabel II.303 Kunjungan Wisatawan Nusantara Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --- II-196
Tabel II.304 Angka Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-197
Tabel II.305 Angka Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara Kota Makassar Berdasarkan Perbulan Selama Tahun 2023 s.d 2024 ---------- II-198
Tabel II.306 Kunjungan Wisata Manca Negara Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --- II-199
Tabel II.307 Angka Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-200
Tabel II.308 Lama Kunjungan Wisatawan Nusantara Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 II-201
Tabel II.309 Persentase PAD Sektor pariwisata Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --- II-202
Tabel II.310 Data Destinasi Wisata Wisata Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --------- II-203
Tabel II.311 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-203
Tabel II.312 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 `---------- II-204
Tabel II.313 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-205
Tabel II.314 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-206
Tabel II.315 Cakupan bina kelompok petani Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ------- II-206
Tabel II.316 Ekspor bersih perdagangan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-207
Tabel II.317 Cakupan bina kelompok Pengrajin Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 --- II-207
Tabel II.318 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-208
Tabel II.319 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-209
Tabel II.320 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-210
Tabel II.321 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-211
Tabel II.322 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-212
Tabel II.323 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-213
Tabel II.324 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-214
Tabel II.325 Opini BPK terhadap laporan keuangan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-215

Tabel II.326 Persentase SILPA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-215
Tabel II.327 Persentase belanja Pendidikan (20%) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 II-216
Tabel II.328 Persentase belanja kesehatan (10%) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 - II-217
Tabel II.329 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-218
Tabel II.330 Penetapan APBD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-218
Tabel II.331 Rata-rata lama pengawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-219
Tabel II.332 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-219
Tabel II.333 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural Kota Makassar 2020 s.d 2024 ---------- II-220
Tabel II.334 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-220
Tabel II.335 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-221
Tabel II.336 Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-221
Tabel II.337 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-222
Tabel II.338 Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-223
Tabel II.339 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-224
Tabel II.340 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-224
Tabel II.341 Persentase tindak lanjut temuan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ------ II-225
Tabel II.342 Persentase pelanggaran pegawai Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---- II-226
Tabel II.343 Jumlah temuan BPK Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-226
Tabel II.344 Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-226
Tabel II.345 Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan -- fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-227
Tabel II.346 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-227

Tabel II.347 Produktivitas Total Daerah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-228
Tabel II.348 Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-228
Tabel II.349 Rasio ketergantungan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ---------- II-229
Tabel II.350 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Makro Kota Makassar Tahun 2024 ---------- II-231
Tabel II.351 Capaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal Kota Makassar Tahun 2024 ---------- II-232
Tabel II.352 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Makassar Tahun 2024 ---------- II-235
Tabel II.353 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2024 ---------- II-253
Tabel II.354 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2024 ---------- II-255
Tabel II.355 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024---------- II-261
Tabel II.356 Evaluasi Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024---------- II-265
Tabel II.357 Evaluasi Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 ---------- II-268
Tabel II.358 Evaluasi Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 ---------- II-269
Tabel II.359 Realisasi Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar Tahun 2024---------- II-270
Tabel II.360 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2024---------- II-274
Tabel II.361 Realisasi Pencapaian SPM Dinas SosialKota Makassar ---------- II-275
Tabel II.362 Capaian Realisasi SDGs Kota Makassar Tahun Anggaran 2024---------- II-280
Tabel II.363 Realisasi Kinerja dan Keuangan Triwulan 1---------- II-440
Tabel II.364 Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Makassar Tahun 2025---------- II-441
Tabel II.365 Data Inovasi dan Aplikasi Makaverse Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2026---------- II-461

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH---------- III-1
Tabel III.1. PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2020 - 2024 ---------- III-10
Tabel III.2. PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2020 - 2024 ---------- III-12
Tabel III.3. Realisasi dan Target / Proyeksi Pendapatan Kota Makassar Tahun 2023 s.d Tahun 2026 ---------- III-27

Tabel III.4. Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2023 s.d Tahun 2026 ---------- III-31
Tabel III.5. Alokasi APBD dan RKPD Kota Makassar Tahun 2023-2026 terhadap Urusan Wajib ---------- III-34
Tabel III.6. Proyeksi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2026 -------- III-40
Tabel III.7. Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Makassar Tahun 2023 s.d. 2027 ---------- III-43

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tahun 2026 ------ IV-1
Tabel IV.1 Penjelasan Visi RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Makassar ---------- IV-2
Tabel IV.2 Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 Kota Makassar ---------- IV-4
Tabel IV.3 Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ---------- IV-16
Tabel IV.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 IV-17
Tabel IV.5 Sasaran Pembangunan Kawasan Makassar dan Sekitarnya Tahun 2026 ----- IV-21
Tabel IV.6 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026 --- IV-22
Tabel IV.7 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 ----- IV-31
Tabel IV.8 Program Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026---------- IV-41
Tabel IV.9 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 ---------- IV-59
Tabel IV.10 Kesesuaian Sasaran Indikator Makro Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 Terhadap Target Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ---------- IV-62
Tabel IV.11 Keselarasan Sasaran Pembangunan Kota Makassar terhadap Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi-Selatan dan Prioritas Nasional/AstaCita --- IV-62
Tabel IV.12 Keselaranan Asta Cita/Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026 ---------- IV-66
Tabel IV.13 Keselaranan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi-Selatan Dengan Sasaran dan Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026 ------ IV-68
Tabel IV.14 Keselaranan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 ---------- IV-83
Tabel IV.15 Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kota Makassar Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional ---------- IV-128
Tabel IV.16 Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan Kota Makassar Tahun 2026 ---------- IV-148
Tabel IV.17 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Maakssar Tahun 2026---------- IV-158

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ---------- V-1
Tabel V.1 Rincian Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2026 ---------- V-1
Tabel V.2 Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha 2020-2024 ---------- V-2
Tabel V.3 Program Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026---------- V-3

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH---------- VI-1
Tabel VI.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kota makassar Tahun 2026-------- VI-I
Tabel VI.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kota Makassar Tahun 2026 ------- VI-2
Tabel VI.3 Penetapan Target Indikator SPM Kota Makassar Tahun 2026 ---------- VI-4
Tabel VI.4 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kota Makassar Tahun 2026 ----- VI-21
Tabel VI.5 Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci Kota Makassar Tahun 2026--------- VI-25
Tabel VI.6 Target Pencapaian Indikator TPB Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun Kota Makassar ---------- VI-36
Tabel VI.7 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan---------- VI-39
Tabel VI.8 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia --- VI-42
Tabel VI.9 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua ---------- VI-46
Tabel VI.10 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan---------- VI-51
Tabel VI.11 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan ---------- VI-54
Tabel VI.12 Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGS 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua ---------- VI-57
Tabel VI.13 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi ---------- VI-60
Tabel VI.14 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 11, Membangun Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan---------- VI-62
Tabel VI.15 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 12 Memastikan Pola Konsumsi dan Produksi Yang Berkelanjutan ---------- VI-67
Tabel VI.16 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 13 Mengambil Aksi Segera Untuk Memerangi Perubahan Iklim Dan Dampaknya---------- VI-69
Tabel VI.17 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 15 Memastikan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati---------- VI-70
Tabel VI.18 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 16 Mendukung Masyarakat yang Damai dan Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Terhadap Keadilan Bagi Semua dan Membangun Institusi-Institusi yang Efektif Akuntabel dan Inklusif di Semua Level ---------- VI-72
Tabel VI.19 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 17, Menguatkan Ukuran Implementasi dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan ---------- VI-75

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
BAB I		**I-1**
Gambar I.1	Bagan Proses Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah	I-3
Gambar I.2	Hubungan antar Dokumen RKPD Kota Makassar Tahun 2026	I-7
Gambar I.3	Hubungan antar dokumen perencanaan spasial dan a-spasial dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar	I-8
Gambar I.4	Hubungan antar dokumen perencanaan spasial dan a-spasial dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar	I-9
BAB II		**II-1**
Gambar II.1	Peta Administrasi Kota Makassar	II-2
Gambar II.2	Peta Sebaran Pulau-pulau Kota Makassar	II-3
Gambar II.3	Distribusi Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 2023	II-13
Gambar II.4	Kondisi Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 2023	II-14
Gambar II.5	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Makassar Tahun 2024-2043	II-16
Gambar II.6	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Makassar Tahun 2024-2043	II-17
Gambar II.7	Peta Rencana Ruang Kawasan Budidaya Kota Makassar Tahun 2024-2043	II-18
Gambar II.8	Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kota Makassar Tahun 2024-2043	II-19
Gambar II.9	Peta Kepadatan Penduduk Kota Makassar	II-24
Gambar II.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020- 2024	II-28
Gambar II.11	Laju Inflasi Rata-rata Kota Makassar Tahun 2020 - 2024	II-32
Gambar II.12	PDRB Per Kapita (Rp. Juta) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024	II-34
Gambar II.13	Perbandingan Indeks Gini Tahun 2020 s.d 2024 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, dan Nasional	II-35
Gambar II.14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024	II-45
Gambar II.15	Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	II-46
Gambar II.16	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (WISNUS) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024	II-197
Gambar II.17	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (WISMAN) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024	II-200
Gambar II.18	Grafik Kontribusi Pariwisata terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024	II-203
BAB IV		**IV-1**
Gambar IV.1	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026	IV-11
Gambar IV.2	Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026	IV-12
Gambar IV.3	Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi Tahun 2026	IV-15

DAFTAR GRAFIK

BAB III **III-1**

Grafik III.1 Pertumbuhan Ekonomi Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024, Perkiraan 2025, Target 2026 III-14

Grafik III.2 Pendapatan Per Kapita Kota Makassar Capaian 2024, Perkiraan Tahun 2025, dan Target 2026 III-16

Grafik III.3 Perkembangan Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024, Realisasi TW I 2025, Target 2026 III-17

Grafik III.4 Tingkat Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024, Realisasi TW I 2025, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 III-18

Grafik III.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020- 2024 III-19

Grafik III.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026 III-19

Grafik III.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024, Perkiran Capaian 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 III-21

Grafik III.8 Perkembangan Gini Rasio Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2024 III-22

Grafik III.9 Gini Rasio Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 III-23

Grafik III.10 Proporsi Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2023 – 2026 III-39

BAB 1

Pendahuluan

Lampiran I
Peraturan Wali Kota Makassar
Nomor 15 Tahun 2025 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Makassar Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dimana Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dengan target kinerja yang terukur, maka diperlukan perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Guna menjabarkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2025 Nomor 3). Untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Kota Makassar menyusun RKPD tahun 2026 sebagai periodisasi pertama pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen RKPD 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan RKPD dimulai 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana, yang dimulai dari tahap persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal dan

penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Rancangan awal RKPD Kota Makassar disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, serta pedoman penyusunan RKPD. Sebagai bagain dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kota Makassar juga harus mempedomani rencana pembangunan nasional, dimana pemerintah pusat telah menerbitkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Meengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan Rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) seluruh Perangkat Daerah Kota Makassar yang telah diverifikasi, hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinir oleh BAPPEDA dengan menghadirkan para pemangku kepentingan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan Daerah, menyepakati prioritas pembangunan Daerah, menyepakati program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan klarifikasi program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD. Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan. Peraturan Walikota tentang RKPD dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS). KUA dan PPAS disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Dalam proses penyusunan RKPD seperti diuraikan diatas, perlu memperhatikan pendekatan-pendekatan perencanaan yang meliputi: teknokratik, partisipatif, politis; dan atas-bawah dan bawah-atas. Secara substansi, penyusunan Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan: holistik-tematik, integratif; dan spasial (THIS). Dalam penyusunan RKPD harus juga memuat indikator kinerja yang dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*time-bound*), yang disingkat SMART.

Proses perumusan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 dapat dilihat pada bagan alir berikut:

Gambar I.1. Bagan Proses Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah

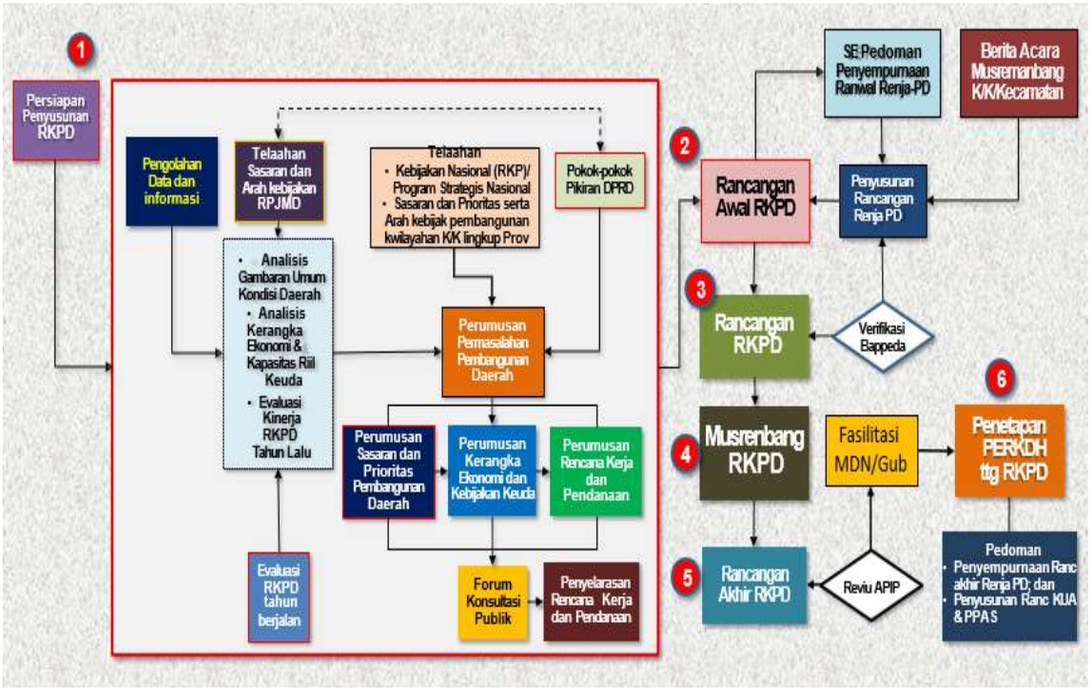

Sumber: PMDN 86 Tahun 2018, Data Diolah

RKPD menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dibahas Bersama DPRD untuk selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757));
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 112);

21. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 12);
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota

Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yaitu 20 tahunan, jangka menengah yakni 5 (lima) tahun dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan. Sedangkan berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD Kota Makassar tahun 2026 disusun sebagai penjabaran periodisasi ke-1 (pertama) pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perengkat Daerah (SKPD), di mana Renja Perangkat Daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Renja SKPD Kota Makassar tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD.

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2026, dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Gambar I.2. Hubungan Antar Dokumen RKPD Kota Makassar Tahun 2026

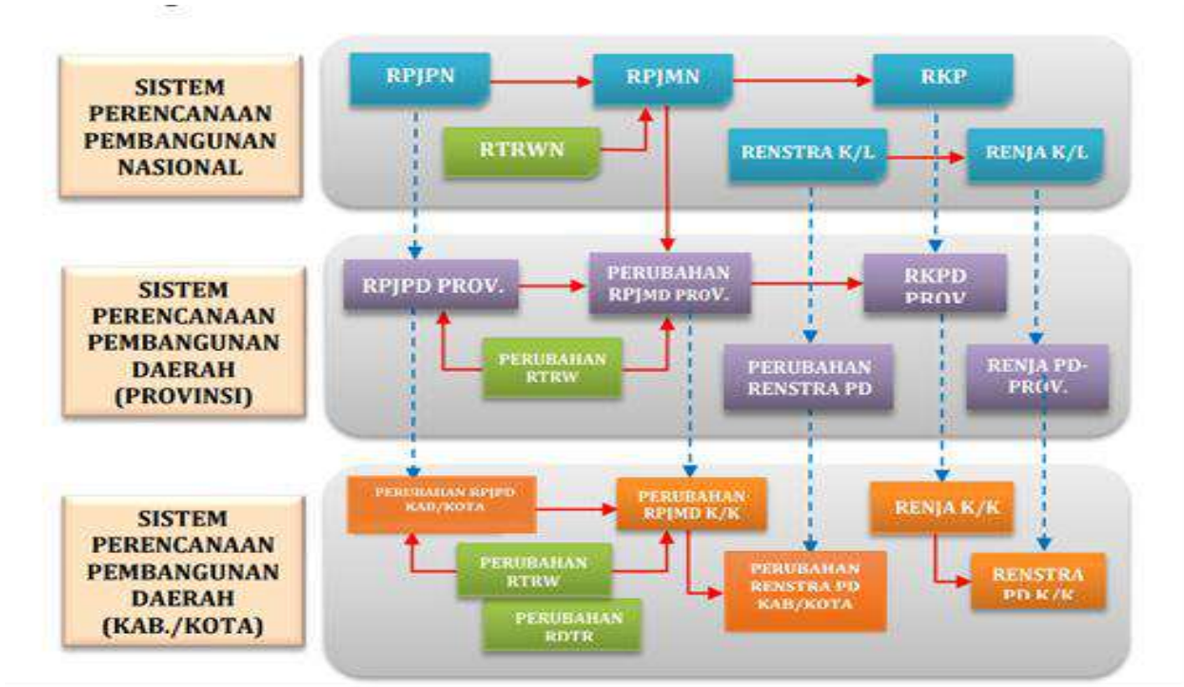

SumbeSumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Di samping itu, dokumen-dokumen perencanan sebagaimana tersebut diatas yang bersifat a-spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR dan Peraturan Zonasi, serta RDTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan dengan Dokumen-dokumen RDTR dari Daerah sekitarnya. Fokus utama RTRW adalah pada pengaturan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan memberikan arah dan pedoman dalam pengembangan ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu konsistensi, integrasi, sinkronisasi serta sinergi antara dokumen RKPD dan RTRW merupakan hal yang sangat penting. RKPD sebagai penjabaran RPJMD dan dokumen perencanaan tahuan daerah harus mempedomani pemanfaatan ruang agar terwujud ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di Kota Makassar. Aspek spasial dalam penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2026, dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar I.3. Hubungan antar dokumen perencanaan spasial dan a-spasial dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar

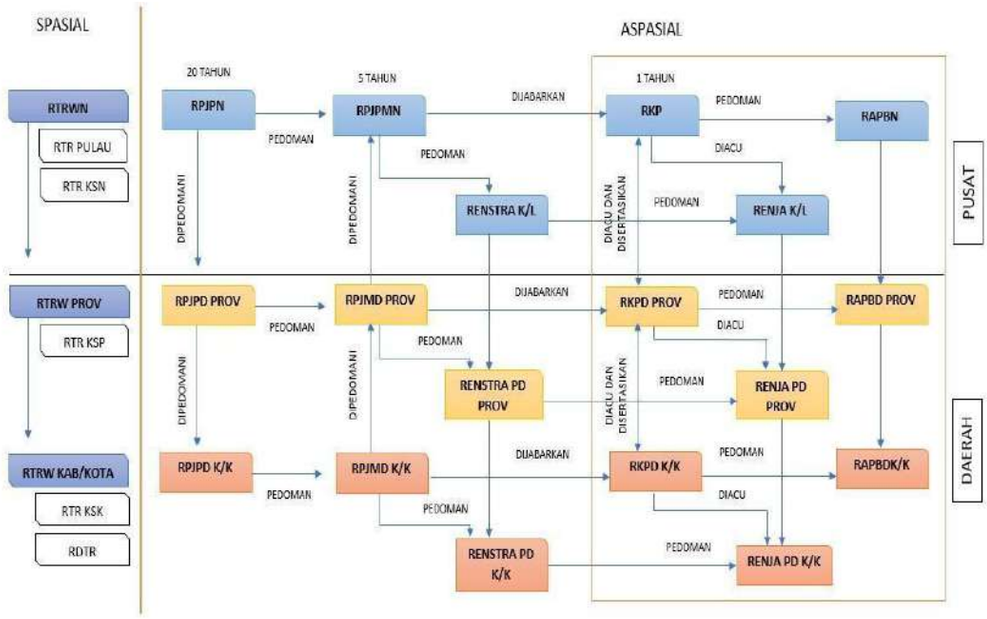

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

Selain itu dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Kota Makassar 2025-2045 dan RPJMD Kota Makassar 2025-2029 yang menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar serta disinkronisasikan dengan dokumen RTRW Kota Makassar Tahun 2015-2034. Selanjutnya dokumen RKPD Kota Makassar Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2026. Dokumen KUA dan PPAS tersebut merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Makassar Tahun 2026 yang merupakan dokumen penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan. Dengan demikian, dokumen RKPD Tahun 2026 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun 2026. Hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.4. Hubungan antar dokumen perencanaan spasial dan a-spasial dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar

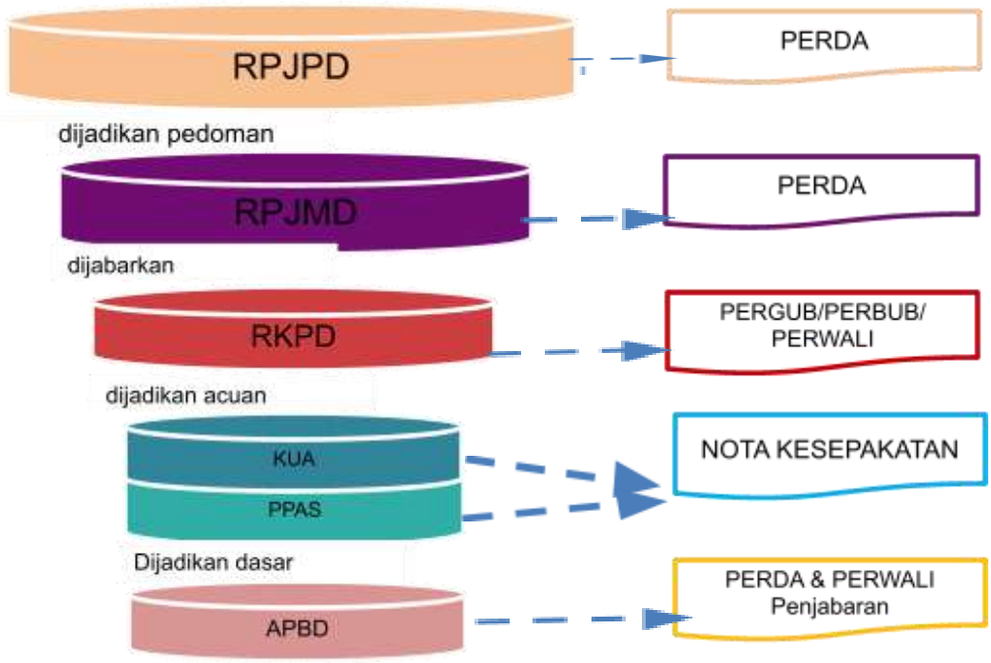

Sumber: Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 2017, diolah

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahuan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran periode tahunan ke-1 (pertama) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026;

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah;
3. mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan tahunan Kota Makassar dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Makassar;
4. menjaga kesesuaian dan keselaranan antara prioritas dan sasaran rencana pembangunan Kota Makassar dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional;
5. sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan target kinerja Perangkat Daerah guna menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan;
6. sebagai instrumen dalam pengukuran kinerja untuk setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui target kinerja yang ditetapkan;
7. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2026 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang

senajutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassa Tahun 2026;

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026, disusun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN:

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal, termasuk bila di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Memuat uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD ditahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Memuat permasalahan pembangunan akibat pelaksanaan setiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kota Makassar. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun bila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB 2

Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1. Kondisi Umum Daerah

Kotamadya Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kotamadya Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Kotamadya Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 km2 dengan memasukkan sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada perkembangannya, nama Ujung Pandang dikembalikan lagi menjadi Makassar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar.

Tahun 2023 Kota Makassar telah berusia 416 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan *edu-entertainment,* pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

II.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

II.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Luas Wilayah indikatif Kota Makassar tercatat 176.852 km persegi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Kota Makassar secara geografis memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Maros
Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros
Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, terdapat 9 (Sembilan) kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Mariso, Ujung Pandang, Wajo, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarrang, Tallo, Biringkanaya, dan Tamalanrea. Kota Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi. Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas dengan 48,22 km2 sedangkan terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan 1,54 km2 dari Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya terkait Luas wilayah dan jumlah kelurahan menurut kecamatan di Kota Makassar sebagaimana pada tabel berikut. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

Dengan melihat posisi geografis wilayah, Kota Makassar memiliki lokasi yang strategis di Kawasan Indonesia sehingga memungkinkan Kota Makassar dapat berfungsi

sebagai pusat pelayanan, baik Kawasan Timur Indonesia maupun skala internasional. Pelayanan tersebut mencakup perdagangan, transportasi darat, laut, udara, pendidikan, pendayagunaan tenaga kerja, pelayanan dan pengembangan kesehatan, penelitian, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut, air payau, tambak, kepariwisataan bahkan potensial untuk pengembangan lembaga keuangan dan perbankan.

Secara administratif Kota Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, serta berdasarkan uraian dalam Materi Teknis Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024 – 2043, terdiri atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar II. 1.
Peta Administrasi Kota Makassar

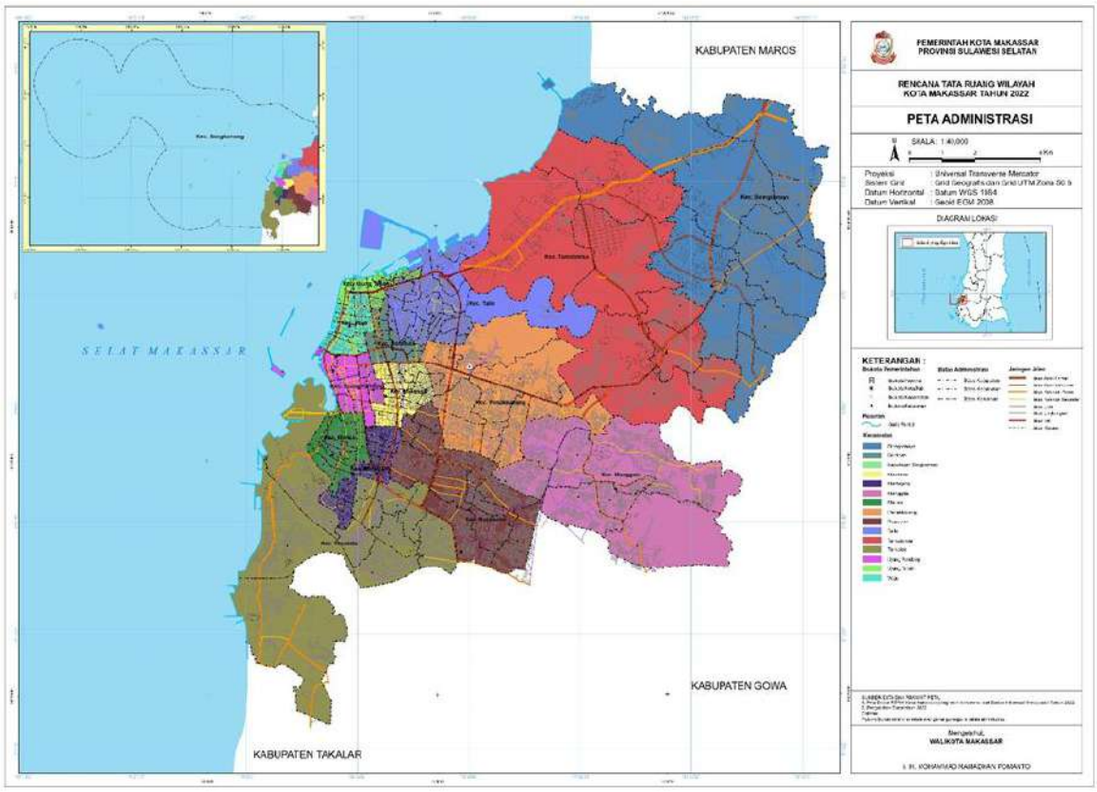

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024-2043

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 13 (tigabelas) pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau *sangkarrang*, atau disebut juga pulau-pulau *pabbiring*, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan *Spermonde*. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingaren, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Kolokoloang, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Ulau Gusung dan Pulau Kayangan. Wilayah Kepulauan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar II.2.
Peta Sebaran Pulau-Pulau Kota Makassar

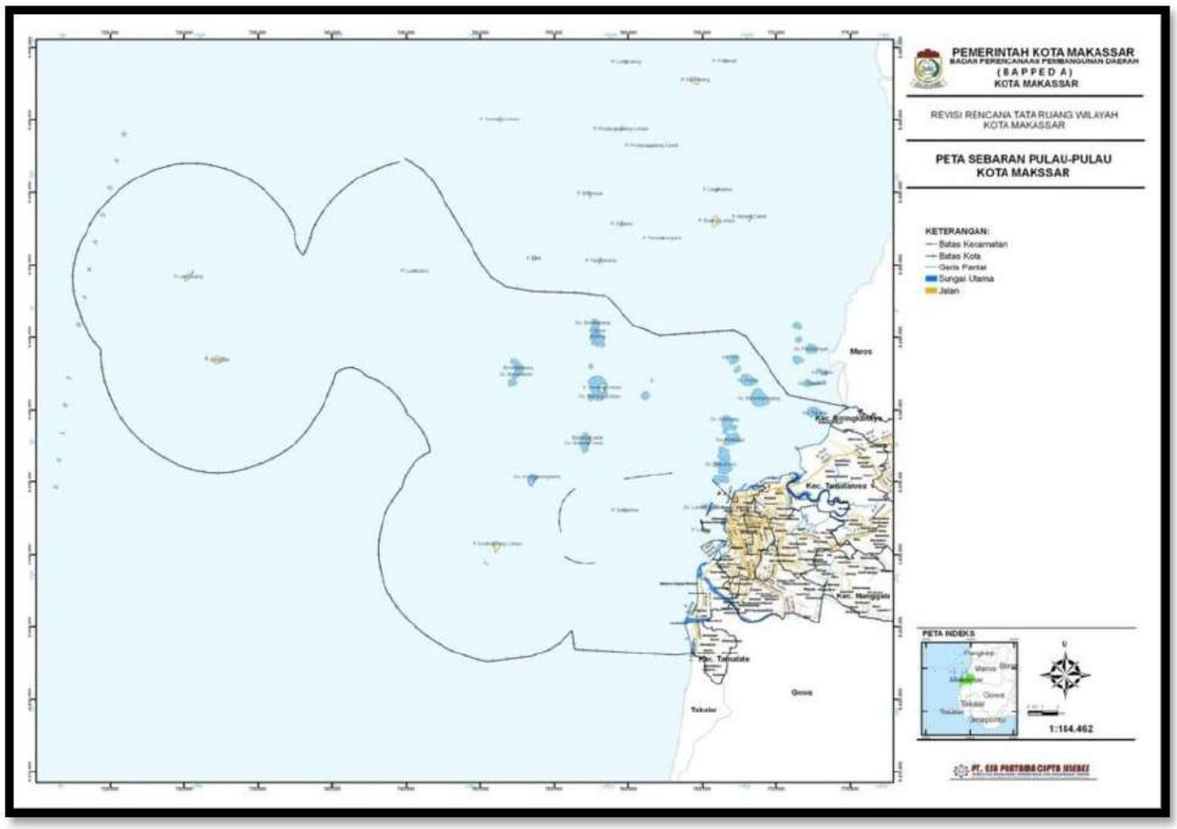

Sumber : RTRW Kota Makassar,2015-2034

II.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Makassar terletak di Pantai Barat Pulau Sulawesi berada pada titik koordinat 119° 18’ 29,038" - 119°32'35,781" BT dan 5°8’6' 19" LS. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut ini deskripsi wilayah tiap kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya 48,22 km2 atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2024, jumlah kelurahan pada Kecamatan Biringkanaya sebanyak 11 (sebelas), Kelurahan terluas di Kecamatan Biringkanaya adalah Kelurahan Sudiang dengan luas 9,82 km persegi. Sedangkan, kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Paccerakang dengan luas 2,17 km persegi. Sementara penduduk Kecamatan Biringkanaya sebesar 216.704 jiwa.Terdiri dari 107.869 laki laki dan 108.835 perempuan. Untuk kepadatan penduduk Kecamatan Biringkanaya merupakan terendah kedua setelah Kecamatan Tamalanrea yaitu sebesar 4,476 per Km². Wilayah Biringkanaya merupakan gerbang utama masuk ke Kota Makassar melalui jalur utara Kota Makassar yang berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Biringkanaya merupakan kota Aerocity dan merupakan satu-satunya akses masuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Profesi warga Kecamatan Biringkanaya didominasi oleh Pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Pedagang, dan Petani, sedangkan suku warga Kecamatan Biringkanaya didominasi Bugis, Makassar, Jawa, Toraja, dan suku lainnya.

Potensi sumber daya alam yang ada di kecamatan ini antara lain di sektor pertanian

dan perikanan. Secara umum, Pantai Kecamatan Biringkanaya sebagian besar merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Hanya sebagian kecil pantai ini tergolong cadas. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, namun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi dari Sungai Mandai. Di samping itu juga tampak adanya gejala abrasi sepanjang sekitar 30m di perkampungan nelayan Kelurahan Untia.

2. Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas kedua sesudah Kecamatan Biringkanaya, dengan luas 31,84 Km^2 Luas tersebut menempati ± 18,2% dari luas Kota Makassar. Di bagian utara dan timur, Kecamatan Tamalanrea berbatasan dengan Kecamatan Biringkanaya. Bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar dan bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang. Kecamatan Tamalanrea merupakan wilayah sub-urban Kota Makassar bersama dengan Kecamatan Biringkanaya. Kedua kecamatan ini berada di wilayah timur Kota Makassar, dan didukung dengan 8 (delapan) kelurahan. Berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 melalui BPS Kota Makassar, Jumlah penduduk Kecamatan Tamalanrea sebesar 106.202 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 3.353 jiwa/km^2. Topografi wilayah kecamatan di mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 0 - 2 meter di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkotaan, pertokoan, hingga gedung pendidikan. Salah satu adalah Universitas Hasanuddin sebagai universitas terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo sehingga kawasan tambak juga ditemukan di sungai memiliki tambak. Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan tambak juga ditemukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula pantai cadas di sebelah selatan lantebung (Kelurahan Parangloe). Di liat dari segi Stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relative stabil dan tenang, sekalipun juga tampak adanya gejala abrasi dalam skala kecil sepanjang sekitar 20 meter di lantebung (Kelurahan Bira). Potensi sumber daya alam yang masih dapat di temukan di kecamatan ini adalah tambak. Secara keseluruhan luas lahan tambak di Kecamatan Tamalanrea yaitu 588 ha, dengan produksi perikanan darat (tambak) yaitu 190,10 ton. Kecamatan Tamalanrea merupakan kawasan pendidikan dimana terdapat Lembaga Perguruan Tinggi Negeri dan swasta dan salah satu diantaranya adalah Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea juga merupakan kawasan pergudangan, pabrik dan industri yang terletak di Kelurahan Bira dan Kelurahan Parangloe.

3. Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Kecamatan Manggala dibatasi oleh beberapa wilayah yaitu pada wilayah utara : Kec.Tamalanrea, Selatan : Kabupaten Gowa, Barat : Kec.Panakukang, Timur : Kabupaten Maros. Luas wilayah sebesar 24,14 km^2 atau sekitar 13,73% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, Kecamatan Manggala memiliki 8 (delapan) kelurahan. Kelurahan terluas di Kecamatan Manggala adalah Kelurahan Tamangapa dengan luas 7,62 km persegi. Sedangkan, kelurahan dengan

luas terkecil adalah Kelurahan Biring Romang dengan luas 0,88 km persegi. Berdasarkan data Makassar Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS Kota Makassar Tahun 2024, Jumlah penduduk 161.827 Jiwa dan kepadatan penduduk 6.740 jiwa/ km^2. Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 0 - 2 di atas permukaan laut.

4. Kecamatan Tamalate

Berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 Kota Makassar menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 11 (sebelas) Kelurahan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 189.222 jiwa. Luas wilayah kecamatan ini 20,21 km^2 atau 11,50% sehingga kepadatan penduduk berkisar 9.363 jiwa/km^2. Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi ketinggian 0 - 5 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Pada umumnya pantai di kecamatan ini bertipe pantai berpasir dengan lebar pantai sekitar 10-30 meter serta kelandaiannya 3%. Secara umum pantai ini dapat dikatakan relatif stabil sekalipun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi pasir halus dari Sungai Jeneberang maupun dari arah selatan. Dengan kondisi pantai tersebut, maka sebagian besar pantai ini digunakan sebagai areal pariwisata pantai.

5. Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Panakukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km^2 atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, wilayah administrative ini di dukung oleh 11 (sebelas) Kelurahan, di Kecamatan Panakkukang Kelurahan terluas adalah Kelurahan Pampang dengan luas 2,63 km persegi. Sedangkan, kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Sinrijala dengan luas 0,17 km persegi, berdasarkan Makassar Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Kota Makassar bahwa jumlah penduduk sebanyak 144.376 jiwa dengan kepadatan penduduk 8.468 jiwa/km^2, dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kelurahan Sinrijala dengan 21.811 jiwa/km^2. Sedangkan kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kelurahan Karuwisi Utara yaitu 4.881 jiwa/km^2. Topografi wilayahnya memliki elevasi 0 - 2 meter di atas permukaan laut (mdpl). Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman serta aktifitas perdagangan jasa.

6. Kecamatan Rappocini

lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km^2 atau sekitar 5,25% dari luas keseluruhan Kota Makassar.

Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 0 - 2 m di atas permukaan laut (mdpl) sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman yang ditopang dengan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai pendukung kegiatan. Berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Rappocini sebesar 150.869 jiwa dengan tingkat kepadatan 16.346 jiwa/km^2. Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan ini merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Tamalate yang dibentuk pada tanggal

7 Januari 1998 berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1242/PUOD Tanggal 3 Mei 1996 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 539/VI/1996 Tahun 1996 Tanggal 27 Juni 1996 yang berbatas wilayah sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala, Sebelah Timur dengan Kecamatan Manggala dan Kabupaten Gowa, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tamalate dan Kabupaten Gowa, Sebelah Barat dengan Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Tamalate. Kecamatan Rappocini di topang oleh 11 (sebelas) wilayah kelurahan yang tersebar.

7. Kecamatan Ujung Tanah

Kecamatan Ujung Tanah dengan luas wilayahnya 4,40 km^2 atau 2,50% dari luas keseluruhan Kota Makassar, berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Kota Makassar jumlah penduduk sebesar 36.721 jiwa serta kepadatan penduduk 8.346 jiwa/km^2. Kecamatan Ujung Tanah di dukung 9 (Sembilan) kelurahan. Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini terdiri atas dua kelompok, yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat nelayan, dari segi wilayah hukum dilengkapi oleh kepolisian kawasan sektor Ujung Tanah dan sektor Pelabuhan Paotere. Dan fasilitas pelayanan Kesehatan terdiri dari 1 Rumah Sakit AL dan 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Pattingalloang dengan Puskesmas Tabaringan.
Salah satu icon sejarah adalah Pelabuhan Paotere yang pernah dimiliki oleh kerajaan Gowa-Tallo pada abad 14 yang pengelolaanya sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan dan TPI serta kapal muatan komoditi ekspor keberbagai wilayah provinsi. Termasuk pabrik penggilingan terigu terbesar ke-4 didunia yang berada di wilayah Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah yaitu PT. Eastern Pearl Flour Mills. Batas Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Sebelah Utara : Selat Makassar, Sebelah Selatan : Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Wajo, Sebelah Timur : Kecamatan Tallo, Sebelah Barat : Selat Makassar. Di sisi lain guna menjaga kestabilan pantai di Kecamatan Ujung Tanah, sebagian besar sudah mengalami pengerasan dengan tembok yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Hal ini mengingat pantai tersebut mempunyai nilai penting karena perairan pantainya dimanfaatkan untuk pangkalan pendaratan ikan (TPI Paotere), pelabuhan dan *docking* kapal TNI AL, Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari. Kecamatan ini berada pada wilayah pesisir bagian utara Kota Makassar. Potensi wisata yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Tanah ini hampir keseluruhannya berbasis laut, mulai dari wisata pelelangan ikan Paotere, Pelabuhan Paotere, serta restoran yang menghidangkan aneka seafood.

8. Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah Kelurahan terbanyak yaitu 15 (limabelas) Kelurahan, dengan luas wilayahnya 5,83 km^2 atau 3,32% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Kota Makassar Jumlah penduduk 148.008 jiwa, dengan kepadatan penduduk 25.387 jiwa/km^2. Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi 0 - 2 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kecamatan Tallo juga mempunyai Potensi yang besar, ditandai dengan adanya Makam Raja-RajaTallo, dan Makam Datuk Ribandang di Sinassara sebagai tanda awal berdirinya atau menyebar Agama Islam pertama di Makassar sekitar Tahun 1670-an, sebagai Potensi Pariwisata sejarah, serta Daerah Lakkang sebagai Kelurahan Wisata dan Daerah Pusat penelitian lingkungan serta Hutan Mangrove di Makassar, yang telah di Canangkan oleh

Pemerintah Kota Makassar melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar dan telah direspon oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Potensi bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan Sungai Tallo ke pemukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrove-nya sangat minim serta merupakan pantai yang landai. Dilihat dari segi stabilitas pantai dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling barat Kelurahan Tallo.

9. Kecamatan Mamajang

Luas wilayah Kecamatan Mamajang adalah 2,25 km^2 atau 1,28% luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Kota Makassar jumlah penduduk 58.293 jiwa dengan kepadatan penduduk 25.811 jiwa/km^2, Letak Kecamatan Mamajang yang strategis yaitu terletak di bagian selatan Kota Makassar dengan koordinat Geografis berada pada 5˚ 9’ 8” Lintang Selatan dan 119˚ 25’ 1” Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : dengan Kecamatan Makassar, Sebelah Timur : dengan Kecamatan Rappocini, Sebelah Selatan : dengan Kecamatan Tamalate, Sebelah Barat : dengan Kecamatan Mariso. Dengan jumlah kelurahan sebanyak 13 (tigabelas) wilayah Kelurahan. dengan topografi wilayah yang merupakan dataran rendah dengan elevasi 0–5 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang memungkinkan pengembangan lahan kecamatan sebagai kawasan pemukiman. Kecamatan Mamajang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju infiltrasi tinggi sehingga potensi ancaman banjir sangat kecil.

10. Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang dijadikan sebagai tempat area publik karena adanya Pantai Losari yang menjadi ikon Kota Makassar. Luas wilayahnya 2,63 km^2 atau 1,50% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Kota Makassar Jumlah penduduk sebesar 24.876 jiwa dengan kepadatan penduduk berkisar 9.459 jiwa/km^2. Merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar dimana wilayahnya sebagai pusat Kota dan Pusat Pemerintahan di Kota Makassar dan mempunyai batas-batas antara lain: Sebelah Barat : Selat Makassar, Sebelah Timur : Kecamatan Makassar, Sebelah Utara : Kecamatan Wajo, Sebelah Selatan : Kecamatan Mariso. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan. Sebanyak 4 Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang merupakan daerah pesisir pantai termasuk 1 Kelurahan merupakan kepulauan dengan wilayah pulau Lae-lae, Pulau Gusung, Pulau Khayangan, dan Pulau Samalona yang letaknya beberapa mil dari Pantai Losari serta 6 Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pesisir dengan topografi ketinggian di bawah 0 - 5 meter dari permukaan laut (mdpl). Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota Kecamatan berkisar 0-2 km, dan Kelurahan Lae-Lae adalah kelurahan yang harus dijangkau dengan sarana transportasi laut.

Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Ujung Pandang dilaksanakan oleh aparat/Pegawai Negeri/ASN dan non ASN dibawah pimpinan Camat yang terdiri dari beberapa tenaga administrasi, tenaga teknis 24 jam dan tenaga kebersihan. Tingkat klasifikasi kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang menunjukkan bahwa dari 10 Kelurahan, yang memiliki kategori kelurahan swasembada. Dengan demikian saat ini tidak terdapat lagi kelurahan yang termasuk swadaya dan swakarya. Lembaga dan organisasi tingkat kelurahan yang terbentuk di Kecamatan dengan jumlah anggotanya diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan. Ancaman terhadap bahaya abrasi sangatlah besar sehingga diperlukan bangunan pemecah ombak di depan pantai. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Ujung Pandang umumnya juga sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, khususnya pada Daerah Rekreasi Pantai Losari dan sekitarnya. Hanya sebagian lokasi di sebelah utara pantai kecamatan ini merupakan kompleks perhotelan (Hotel Pantai Gapura Makassar Hotel dan Makassar Golden Hotel) serta dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa ke Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan dan pulau-pulau lainnya di wilayah Kota Makassar. Selain itu, Kecamatan Ujung Pandang juga berpotensi terhadap pencemaran air laut dan air tanah karena penggunaan lahan yang lebih diarahkan pada pembangunan hotel. Selain itu juga restoran merupakan usaha paling besar memberikan kontribusi terhadap pencemaran air di kecamatan ini.

11. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 32.530 jiwa/km^2, berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Kota Makassar jumlah penduduk 81.976 jiwa dengan luas wilayah 2,52 km^2 atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah Kota Makassar, Kecamatan Makassar memiliki 14 (empat belas) kelurahan. Kelurahan terluas di Kecamatan Makassar adalah Kelurahan Maccini dengan luas 0,26 km persegi. Sedangkan, kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Maradekaya Selatan dengan luas 0,11 km persegi. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan dan perkantoran. Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan (tambak).

12. Kecamatan Bontoala

Luas wilayah Kecamatan Bontoala adalah 2,10 km^2 atau 1,19% dari keseluruhan luas Kota Makassar yang terdiri atas 12 (duabelas) kelurahan. Berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Kota Makassar jumlah penduduk 55.244 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 26.307 jiwa/km^2. Topografi di kecamatan ini dataran rendah dengan elevasi 0 – 2 meter di atas permukaan laut (mdpl), sebagian daerah di kecamatan ini berpotensi banjir utamanya daerah yang dialiri anak Sungai Tallo. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diperuntukkan sebagai pemukiman, sehingga kecamatan ini tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan. Bontoala adalah sebuah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Di Kecamatan Bontoala terdapat 2 buah bangunan masjid terbesar yaitu masjid Masjid Al-Markaz Al-Islami dan Masjid Raya Makassar.

13. Kecamatan Wajo

Salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah

pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum dan Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km atau 1,13% dari luas keseluruhan wilayah Kota. Dengan jumlah wilayah Kelurahan Sebanyak 8 (delapan). Berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo 29.391 jiwa dengan kepadatan 14.769 jiwa/km^2. Secara topografi, kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi 0 - 2 meter di atas permukaan laut (mdpl) sehingga berpotensi terjadi abrasi. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Wajo umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang sebagai pelindung pantai. Potensi pengembangan Wisata Kota Tua Makassar serta pengembangan Kawasan Budaya Etnis Tinghoa. Kawasan Kecamatan Wajo juga merupakan pintu gerbang Angkutan Laut antar Pulau dan antar negara yang ada ditandai dengan keberadaan Pelabuhan Penumpang dan Peti Kemas yang ada.

14. Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 1,82 km^2, Berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Mariso sebanyak 58.797 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 32.306 jiwa/km^2. Kecamatan Mariso merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kota Makassar, dan merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian wilayah 0 – 2 meter dari permukaan laut (mdpl). Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke Ibukota Kecamatan berkisar 1-2 km. Batas-batas Kecamatan Mariso adalah sebagai berikut: Sebelah Utara Kecamatan Ujung, Pandang Kota Makassar, Sebelah Timur Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Sebelah Selatan Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Sebelah Barat Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Kecamatan Mariso memiliki 9 (Sembilan) kelurahan. Kelurahan yang paling luas adalah Kelurahan Panambungan yaitu 0,31 km2, sedangkan kelurahan yang memiliki luas terkecil di Kecamatan Mariso adalah Kelurahan Tamarunang dengan luas 0,12 km2. Potensi sumber daya alam di Kecamatan ini yaitu subsektor perikanan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini berupa abrasi pantai. Oleh karena itu pantai di Kecamatan Mariso pada umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, karena sebagian besar pantai di kecamatan ini merupakan daerah pangkalan pendaratan ikan (TPI Rajawali) dan permukiman pantai.

15. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kecamatan Sangkarrang merupakan Kecamatan pemekaran Kelurahan dan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tercatat 1,54 km persegi atau sekitar 0,88 persen dari luas Kota Makassar secara keseluruhan. Kecamatan Kep. Sangkarrang memiliki tiga kelurahan. Kelurahan terluas di Kecamatan Kep. Sangkarrang adalah Kelurahan Barang Caddi dengan luas 0,57 km persegi. Sedangkan, kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Kodingareng dengan luas 0,48 km persegi. Berdasarkan data Makassar Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Kota Makassar memiliki jumlah penduduk di sebanyak 15.007 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 9.745 jiwa/km^2. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki 9 Pulau dengan, yang terdiri dari : Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau

Barrang Lompo Pulau Lumu-lumu, Pulau Langkai, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Kolokoloang dan Pulau Lanjukang. Potensi yang terdapat pada Kecamatan Sangkarrang ini adalah hasil laut dan kepariwisataan berbasis kemaritiman. Kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kelurahan Barang Lompo dengan 10.402 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kelurahan Barang Caddi yaitu 8.056 per kilometer persegi.

A. Topografi dan kelerengan

Topografi wilayah Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tanah relatif datar, bergelombang, berbukit. Wilayah Kota Makassar berada pada bentuk permukaan lahan yang relatif datar dan bergelombang. Kota Makassar merupakan daerah dataran dengan ketinggian 0-8 meter diatas permukaan laut (mdpl) dimana terdata 11 kecamatan memiliki ketinggian wilayah 0-5 mpdl. Selebihnya kecamatan dengan ketinggian 0-8 mpdl. Untuk lebih jelasnya terkait ketinggian wilayah di Kota Makassar, dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15º. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, menunjukkan bahwa kemiringan 0-2º sebesar 85%, 2-3º sebesar 10% dan 3-15º sebesar 5%. Dengan melihat kondisi topografi di Kota Makassar yang di dominasi oleh wilayah datar, maka dapat dilakukan pembangunan dengan mudah karena di dukung oleh kondisi topografi yang datar, pada pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, industri, rekreasi, pelabuhan laut, dan fasilitas penunjang lainnya.

B. Geologi

Kondisi geologi umum Kota Makassar disusun atas 3 satuan batuan:

1. Satuan Aluvial

Satuan batuan alluvial mendominasi seluruh wilayah kota dengan luas 11.693,83 ha yang penyebaran di sekitar daratan sampai ke pantai. Daerah yang mengandung kandungan alluvial cocok untuk pengembangan daerah pertanian. Hal ini karena alluvial banyak mengandung mineral dan miskin basa sehingga alluvial sangat subur.

2. Satuan Basal

Satuan batuan basal terdapat di Kota Makassar hanya terdapat di dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tamalanrea dengan luas 3,201 ha dan di Kecamatan Biringkanaya dengan luas 25,027 ha.

3. Satuan Tufa dan Breksi

Satuan tufa dan breksi terdapat di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Manggala. Sedangkan Stratigrafi berupa endapan alluvium, rawa dan pantai. Dibawahnya ada batuan gunung api Lompobatang (QW), sedangkan batuan tertua adalah batuan sedimen flysch kapur atas yang dipetakan sebagai formasi Marada (Km). Batuan gunung api Lompobatang tersusun atas konglomerat, lava, breksi, endapan lahar dan tufa.

A. Geologi Wilayah

Karakteristik litologi Kota Makassar dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

a) Daerah Aliran Sungai Jeneberang

Bagian hulu daerah aliran Sungai Jeneberang disusun oleh batuan gunung api yang terdiri dari aglonmerat, breksi, lava, endapan lahar dan tufa. Batuan gunung api tersebut termasuk dalam batuan gunung api Battrape-Cindako dan batuan gunung api Lompobattang. Beberapa diantara batuan gunung api tersebut tidak mengalami kompaksi yang sempurna, sehingga sangat mudah mengalami longosoran dan erosi

sehingga perlu di antisipasi Ketika di rencanakan adanya pembangunan di atasnya.

Bagian tengah daerah aliran Sungai Jeneberang, selain batuan gunung api, dijumpai juga batuan sedimen laut dari formasi Camba yang terdiri dari batupasir, batulempung, napal, batu gamping, konglomerat dan breksi gunung api. Bagian hilir Sungai Jeneberang tersusun atas endapan fluvial yang terdiri dari kerikil, pasir, lempung, lumpur dan batu gamping koral. Batuan yang menyusun daerah perairan pantai di sekitar muara Sungai Jeneberang sebagai endapan alluvial pantai terdiri dari pasir, lempung dan lumpur.

b) Daerah Pantai Kota Makassar

Batuan alas yang menyusun pada Pantai Kota Makassar berasal dari formasi Camba yang berumur miosen tengah sampai miosen akhir, batuan alas ini terdiri dari satuan batupasir, batu lempung, tufa dan breksi.

Bagian atas batuan alas yang berbentuk cekungan diisi oleh endapan pasir kasar dari Sungai Jeneberang dan endapan pasir halus dari Sungai Tallo. Sedangkan di sepanjang daerah pantai, ditemukan pasir berbutir kasar dan halus yang berwarna abu abu hingga kehitaman.

B. Geologi Permukaan

Berdasarkan peta jenis tanah menunjukkan bahwa secara geologi Makassar tersusun oleh jenis tanah inceptisol dan ultisol, Jenis tanah inceptisol dominan

berada di bagian barat dan selatan Kota Makassar. Jenis tanah ini terdiri dari tanah alluvial, andosol, regosol dan gleihumus. Daerah bagian barat dan selatan berpotensi untuk pengembangan pemukiman, bisnis dan pariwisata. Hal ini disebabkan karena jenis tanah inceptisol memiliki tingkat porositas yang rendah dan permeabilitas yang tinggi sehingga kemungkinan terjadinya erosi kecil bila

dilihat dari segi geologinya. Sebagai contoh, Kecamatan Mariso yang potensial sebagai kawasan pariwisata yang ditunjang dengan adanya ”land mark” Kota Makassar di daerah tersebut yaitu Pantai Losari.

Sebaliknya jenis tanah ultisol dominan berada di bagian sebelah utara Kota Makassar. Jenis tanah ini termasuk didalamnya podzolik merah kuning, latosol dan hidromorf kelabu. Daerah utara tidak cocok dijadikan sebagai Kawasan pertanian dan pertambakan karena jenis tanah ini banyak mengandung lapisan tanah liat dan bersifat asam serta miskin unsur hara. Daerah ini lebih diarahkan pada pengembangan pemukiman. Hal ini ditunjang oleh masih luasnya areal yang belum terbangun dan jumlah penduduknya masih sedikit, sehingga tidak terjadi konsentrasi penduduk di pusat kota. Bagian timur Kota Makassar jenis tanahnya merupakan kombinasi kedua jenis tanah. Pengembangan kawasan di daerah ini lebih beragam mulai dari Kawasan pendidikan, kawasan pemukiman hingga kawasan riset. Daerah ini juga merupakan jalur lingkar baru Kota Makassar sehingga dapat mengurangi kemacetan dari pusat kota.

C. Hidrologi

Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang 32 km dengan kondisi hidrologi Kota Makassar dipengaruhi oleh 2 (dua) sungai besar yang bermuara di pantai sebelah barat kota. Sungai Jene’berang yang bermuara di sebelah selatan dan Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara. Sungai Je’neberang misalnya, mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di bagian Selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m^3/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan

Pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m^3/detik di musim kemarau. Selain itu, dipengaruhi juga oleh sistem hidrologi saluran perkotaan, yakni kanal-kanal yang hulunya di dalam kota dan bermuara di laut.

D. Klimatologi

Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis. Iklim di Kota Makassar pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sepanjang tahun 2021 bulan April sampai Oktober memiliki suhu rata-rata paling tinggi yang mencapai 28^0C, sedangkan bulan Januari memiliki suhu rata-rata paling terendah sebesar $26,97^0$C. Kelembaban Kota Makassar pada bulan November memiliki kelembaban paling rendah yaitu 45% dan bulan Januari mencapai kelembaban tertinggi yaitu 67%. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terlama pada bulan Desember yaitu sebesar 924 mm^3 yang berlangsung sebanyak 29 hari. Penyinaran matahari tertinggi pada bulan Agustus mencapai 91%, sedangkan yang terendah ialah bulan Desember mencapai 29%. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya genangan air di sejumlah wilayah kota ini. Selain itu, kurangnya daerah resapan dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik memicu timbulnya bencana banjir.

II.1.1.3. Penggunaan Lahan

A. Kawasan Lindung

Kondisi penggunaan lahan wilayah Kota Makassar sebagian besar merupakan kawasan permukiman dengan persentase mencapai 57,49% dari total luas kota. Tutupan lahan atau penggunaan lahan yang juga masih cukup besar persentasenya adalah tambak, sebagai daerah pesisir wilayah Kota Makassar di kelilingi oleh kawasan perikanan budi daya yang secara bertahap terinvasi oleh pertumbuhan fisik kota sehingga mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman. Luas area tambak berdasarkan Dokumen Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024-2043 seluas 2.724,44 ha dengan persentase 15,24% dari luas Kota Makassar. Selain sebagai kawasan perikanan budidaya, Sebagian wilayah Kota Makassar merupakan lahan pertanian tanaman pangan khususnya lahan perswahan, kondisi penggunaan lahan ini juga terus tergerus oleh pertumbuhan kota, sehingga cukup luas yang beralih fungsi menjadi lahan perumahan atau permukiman. Data Tahun 2023 menunjukkan luas lahan

persawahan yang ada di Kota Makassar yakni 1.963 ha. Dengan persentase 10,98% dari total luas wilayah Kota Makassar. Jenis penggunaan lahan lainnya yang cukup luas adalah tegalan atau ladang, luas tegalan atau ladang adalah 1.428,16 ha atau 7,99% dari Luas Kota Makassar. Secara utuh data terkait luas dan jenis penggunaan lahan di Kota Makassar di uraikan dalam Gambar berikut:

Gambar II.3.
Distribusi Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 2023

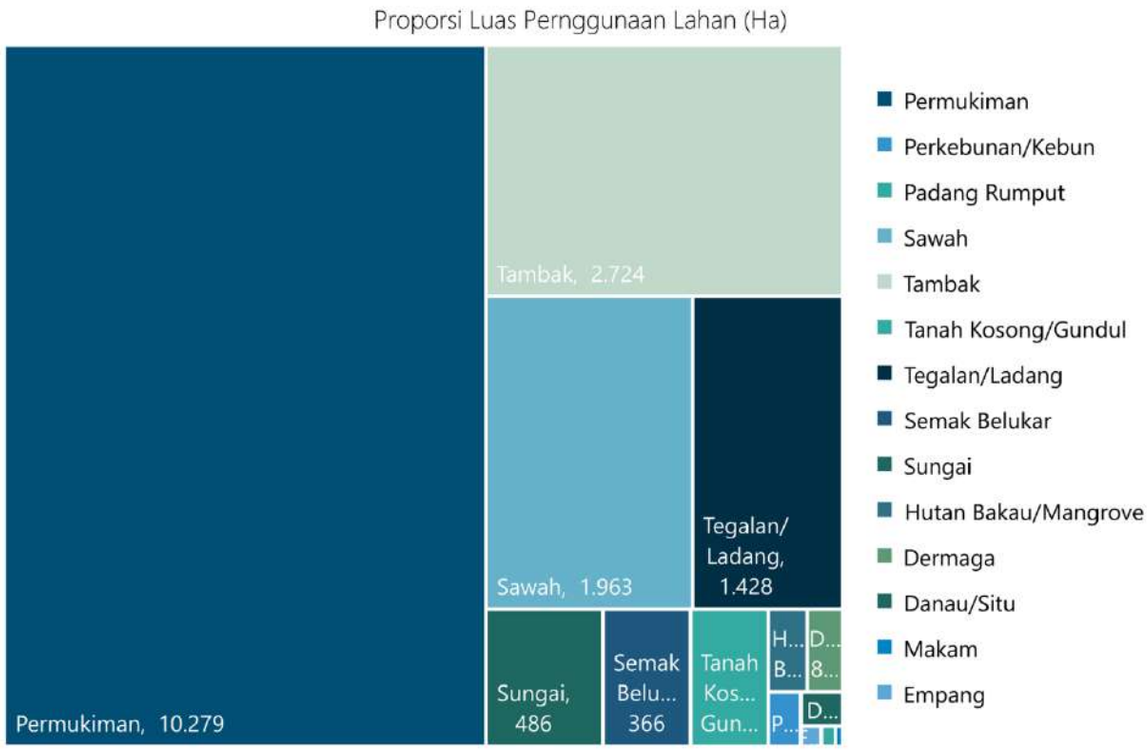

Sumber: Dokumen Master Plan RTH Kota Makassar Tahun 2023.

Secara spasial penggunaan lahan di Kota Makassar yang didominasi oleh kawasan permukiman seluas 10.279 ha tersebar hampir di seluruh wilayah administrasi kota. Hal ini menunjukkan kurangnya ruang terbuka baik hijau maupun biru di Kota Makassar. Namun demikian, Kota Makassar masih memiliki potensi ruang untuk difungsikan maupun dialihfungsikan menjadi RTH maupun RTB. Keberadaan area tambak seluas 2.724 ha yang sebagian besar berada di daerah Lakkang. Begitu halnya dengan kawasan pertanian sawah, tegalan atau ladang, berikut semak belukar dan tanah kosong yang potensial untuk RTH.

Gambar II.4.
Kondisi Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 2023

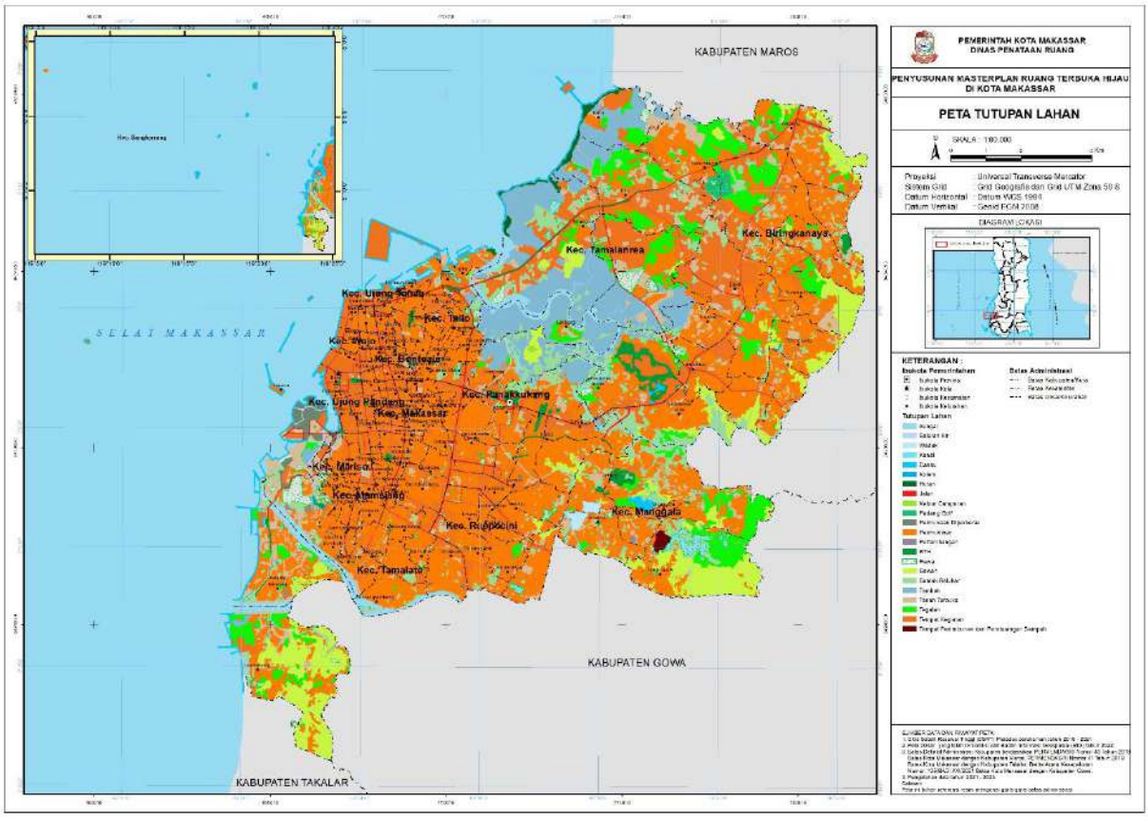

Sumber: Dokumen Master Plan RTH Kota Makassar Tahun 2023.

II.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah dan Rencana Pemanfaatan Ruang.

Dalam perkembangannya, Kota Makassar tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan Regional dan nasional bahkan sudah dalam pengembangan skala internasional, yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta Sarana Prasarana Perkotaan lainnya yang memadai dan mudah diakses. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Kota Makassar akan diuraikan kedalam beberapa hal yaitu: kebijakan penataan ruang dan Rencana Sistem Pusat Pelayanan yang merupakan salah satu Perwujudan Struktur Ruang Kota Makassar serta Rencana Perwujudan Kawasan Strategis yang telah tertuang dalam draft revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024-2043.

Kebijakan Penataan Ruang Kota Makassar

Kebijakan penataan ruang dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a. pengembangan ruang Kota Makassar yang terintegrasi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi lainnya;
b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar kawasan dan antar wilayah;
c. pengembangan simpul jasa transportasi yang terintegrasi;
d. pengembangan aksesibilitas antar kawasan dan antar wilayah;
e. pengembangan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan wilayah sekitar untuk mendukung produktivitas ekonomi dan aktivitas perkotaan;
f. pengembangan ruang yang ramah untuk semua dengan mengutamakan disabilitas;
g. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum yang berbasis teknologi

untuk meningkatkan pelayanan public;

h. pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang prima, termasuk perizinan berusaha yang inklusif dan transparan;
i. pengembangan kawasan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional & regional;
j. pengembangan kawasan strategis sebagai simpul jasa terpadu untuk mendukung Kota Makassar sebagai kota perdagangan dunia;
k. pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui mekanisme pemanfaatan ruang yang adil untuk semua;
l. pengembangan ruang peruntukan usaha ekonomi kerakyatan yang tertata dan terintegrasi;
m. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan berkelanjutan; dan
n. pengembangan kota dengan pendekatan solusi berbasi alam (SBA).

Arahan pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan rencana pemanfaatan ruang, dalam hal ini mengacu pada Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang. Arahan pemanfaatan ruang perlu mengatur mekanisme dalam perwujudan ruangnya, mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya rencana program sektoral, rencana pengisian ruang yang diatur dalam bentuk mekanisme perizinan pemanfatan ruang sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaannya. Dalam hal ini bab ini akan menguraikan tentang ketentuan pelaksanaan kesesuaian (KKPR), indikasi program utama, serta pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Dalam Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024 – 2043, telah dirumuskan dan diatur mengenai Rencana Pemanfaatan Ruang yang diuraikan secara sinfgkat dan terdiri atas :

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana sistem pusat pelayanan, sistem jaringan transportasi dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota, dan mengintegrasikan wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah Kota Makassar dirumuskan dan digambarkan secara spasial yaitu dalam gambar berikut:

Gambar II.5.
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Makassar Tahun 2024 – 2043

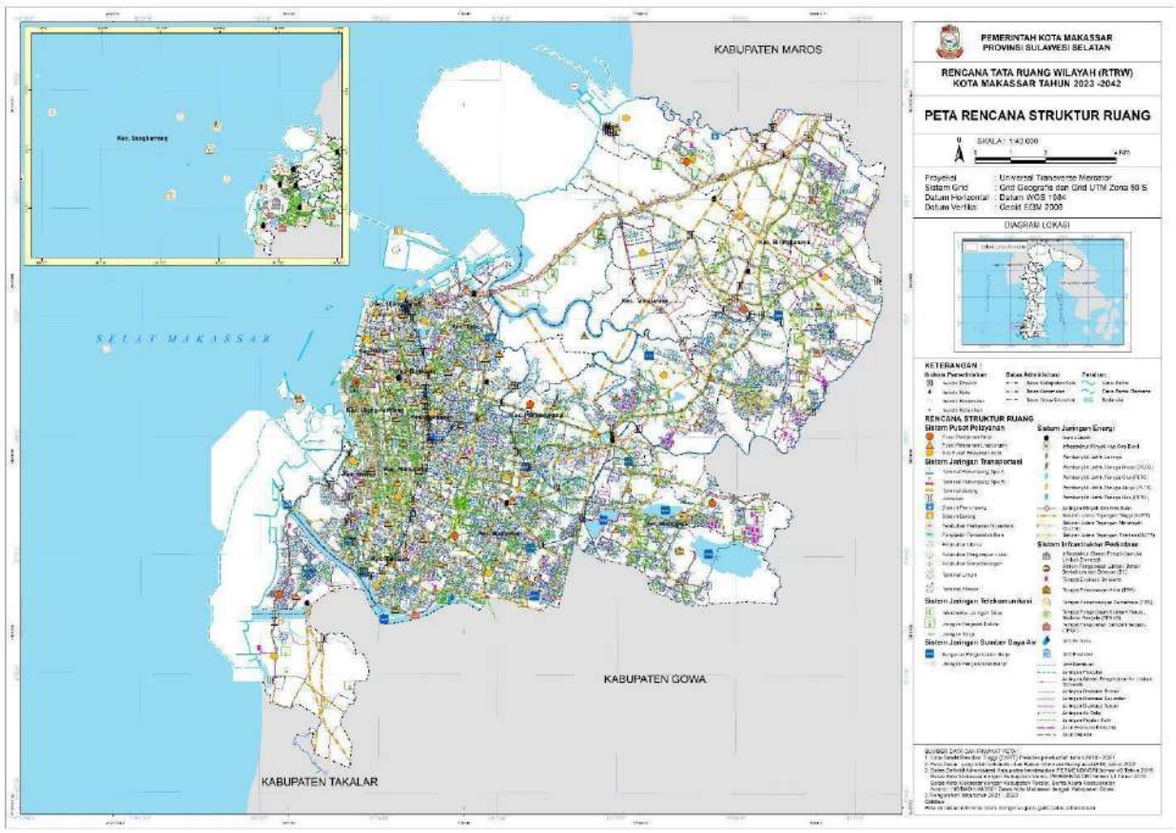

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024 - 2043

a) Rencana Pola Ruang

Rencana Kawasan pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi:

- sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;
- mengatur keseimbangan dan kesserasian peruntukan ruang;
- sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

Dalam Dokumen Materi Teknis Rencana Pola Ruang RTRW Kota Makassar Tahun 2024 - 2043 membahas terkait Kawasan lindung dan Kawasan budidaya dengan rincian pembahasan sebagai berikut.

b) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung yang terdapat dalam suatu wilayah merupakan bagian dari ekosistem alami yang memiliki fungsi utama sebagai pelindung kawasan lainnya yang berada di bawahnya. Pengelolaan kawasan lindung memiliki fungsi dan tujuan sebagai pencegahan kerusakan lingkungan hidup terutama dalam melindungi fungsi ekosistem alamiah terhadap keadaan air, tanah, udara/iklim, flora dan fauna yang hidup dalam suatu ekosistem dan berkaitan sebagai suatu proses

dari adanya rantai makanan yang merupakan bagian dari ekosistem tersebut. rencana pemanfaatan ruang dalam Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Makassar digambarkan secara spasial yaitu sebagai berikut:

Gambar II.6.
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
Kota Makassar Tahun 2024 - 2043

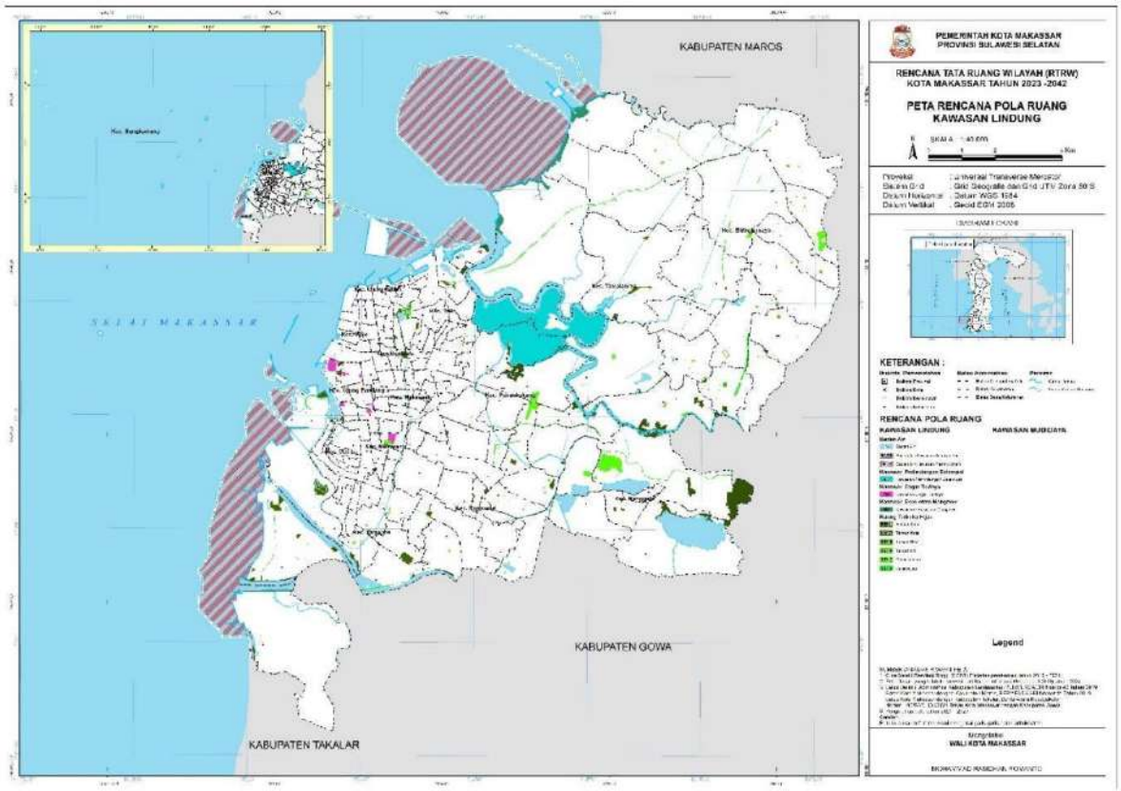

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024 – 2043

c) Kawasan Budidaya

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pengembangan kawasan budi daya di Kota Makassar dilakukan secara efektif dan efisien serta sinergis, agar pemanfaatan ruang dan sumberdaya dapat dilakukan secara optimal. dalam pengembangan kawasan budi daya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya terkait rencana Kawasan budidaya di Kota Makassar, sebagaimana digambarkan secara spasial sebagai berikut:

Gambar II.7.
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
Kota Makassar Tahun 2024 - 2043

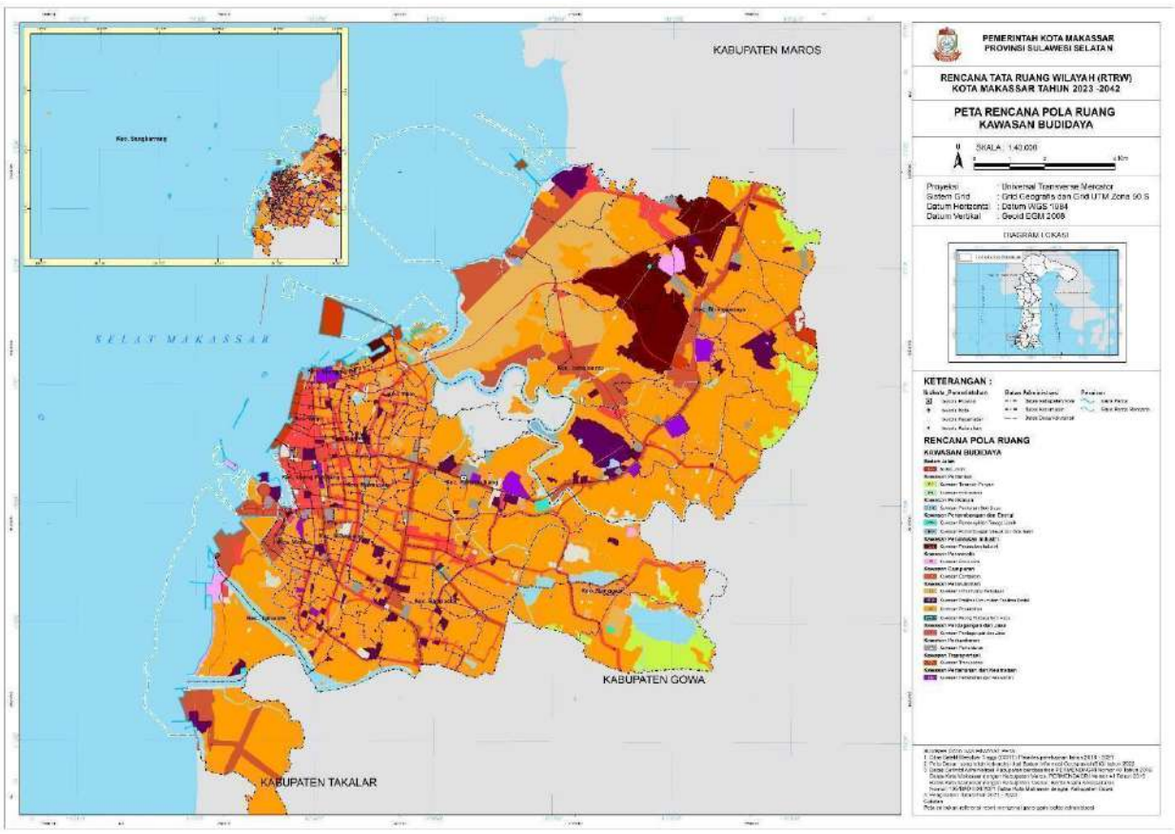

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024 – 2043

d) Rencana Kawasan Strategis

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Makassar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota dibidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Berdasarkan pembagian kawasan strategis yang tercantum dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, maka kebijakan dan penetapan kawasan strategis di Kota Makassar diarahkan dan mengacu pada undang-undang tersebut serta pola perkembangan kota, secara umum tergambarkan secara spasial sebagai berikut:

Gambar II.8.
Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kota Makassar Tahun 2024 - 2043

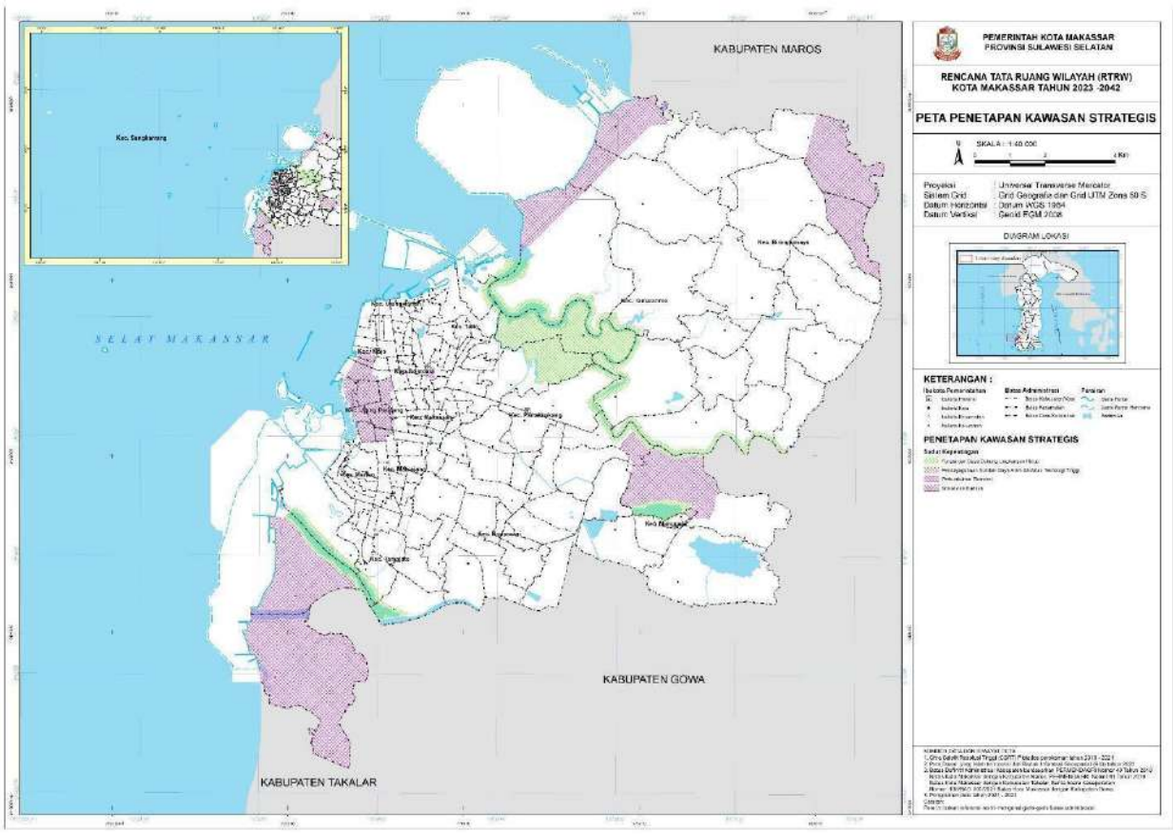

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024 - 2043

II.1. 1. 5. Aspek Demografi

Kota Makassar kini berkembang tidak lagi sekedar gateway namun diposisikan sebagai ruang keluarga (*living room*) di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, salah satunya adalah jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

B. Demografi

Kota Makassar kini berkembang tidak lagi sekedar gateway namun diposisikan sebagai ruang keluarga (*living room*) di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, salah satunya adalah jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1.
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020			2021			2022			2023			2024**)			Laju Pertumbuhan *)
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Biringkanaya	105.929	105.566	211.495	105359	105551	210910	106,287	106,947	213,234	107,463	108,357	215,820	107.869	108.835	216.704	0.79
2	Bontoala	28.751	29.064	57.815	27950	28219	56169	27,591	27,853	55,444	27,409	27,792	55,201	27.414	27.830	55.244	-3.80
3	Makassar	42.693	43.499	86.192	41310	42295	83605	40,758	41,567	82,325	40,771	41,466	82,237	40.638	41.338	81.976	-2.12
4	Mamajang	29.453	30.490	59.943	28682	29687	58369	28,559	29,619	58,178	28,632	29,661	58,293	28.516	29.559	58.075	-1.31
5	Manggala	76.803	76.749	153.552	76705	77237	153942	78,379	79,123	157,502	79,753	80,713	160,466	80.434	81.393	161.827	1.50
6	Mariso	30.087	30.155	60.242	29427	29485	58912	29,177	29,324	58,501	29,246	29,484	58,730	29.316	29.481	58.797	-1.30
7	Panakkukang	73.266	73.494	146.760	71834	72492	144326	71,462	72,462	143,924	71,640	72,564	144,204	71.682	72.694	144.376	-0.13
8	Rappocini	75.322	77.947	153.269	73858	76886	150744	73,388	76,557	149,945	73,548	77,065	150,613	73.744	77.125	150.869	-0.17
9	Tallo	76.873	75.414	152.287	74651	73502	148153	74,306	73,260	147,566	74,581	73,474	148,055	74.560	73.448	148.008	-0.39

No	Kecamatan	2020			2021			2022			2023			2024**)			Laju Pertumbuhan *)
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
10	Tamalanrea	52.290	52.151	104.441	51712	51948	103660	52,097	52,490	104,587	52,878	53,384	106,262	53.074	53.694	106.768	0.77
11	Tamalate	94.718	94.117	188.835	93115	93034	186149	93,248	93,601	186,849	94,013	94,419	188,432	94.368	94.854	189.222	0.32
12	Ujung Pandang	12.566	13.300	25.866	12270	13039	25309	12,107	12,804	24,911	12,058	12,793	24,851	12.071	12.805	24.876	-2.60
13	Ujung tanah	19.092	18.915	38.007	18662	18486	37148	18,429	18,335	36,764	18,401	19,344	36,745	18.381	18.340	36.721	-0.55
14	Wajo	15.845	15.754	31.599	15216	15319	30535	14,717	15,065	29,782	14,512	14,991	29,503	14.440	14.951	29.391	-5.03
15	KepSangkarrang	7.272	7.337	14.609	7219	7292	14511	7,433	7,456	14,889	7,486	7,495	14,981	7.501	7.506	15.007	0.90
Jumlah		740.960	743.952	1.484.912	727.970	734.472	1.462.442	727.938	736.463	1.464.401	732,391	741,002	1,474,393	734.008	743.853	1.477.861	-0.29

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun 2025
**) Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data BPS Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2025.*
***) Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tahun 2024 Semester pertama*

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah penduduk dari tahun ke tahun berfluktuasi disebabkan karena adanya mutasi penduduk (pindah datang dan pindah keluar, meninggal, data baru dan kelahiran). Pada Tahun 2023, Jumlah penduduk terbesar ada pada Kecamatan Biringkanaya yaitu sebesar 215,820 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil terdapat pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yaitu 14,981 Jiwa. Hal ini memberi gambaran bahwa distribusi penduduk yang terjadi di Kota Makassar tidak merata, dimana luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk, dalam artian bahwa luas wilayah yang besar tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang besar demikian pula sebaliknya luas wilayah yang kecil tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang kecil.

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2021 sebesar 1.462.442, tahun 2022 menjadi 1.464.401, kemudian pada tahun 2023 mengalami perubahan menjadi 1.474.393. Sepanjang periode 2019 sampai dengan 2022 mengalami laju pertumbuhan rata rata sebesar 0,26%, dimana laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada Kecamatan Manggala yaitu sebesar 0,57 % dan terendah pada Kecamatan Mamajang sebesar 0,02%. namun pada tahun 2023 mengalami penurnan laju pertumbuhan rata - rata untuk kota makassar sebesar -0.29% laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi dari menurunya pertumbuhan penduduk di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Mariso (-1,30), Kecamatan Mamajang (-1,31), Kecamatan Rappocini (-0,17), Kecamatan Makassar (-2,12), Kecamatan Bontoala (-0,55), Kecamatan Tallo (-0,90), Kecamatan Panakkuang (0,13) dan yang terbesar terjadi di Kecamatan Ujung Pandang (-5,03).

Tahun 2023 jumlah penduduk Kota Makassar sebesar 1,474,393 jiwa terjadi peningkatan sebanyak 9,992 jiwa jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 1.464.401, hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kelahiran, pindah masuk (migrasi) penduduk.

Tabel II.2.
Sebaran dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)
1	BIRINGKANAYA	213,234	4,822	44.22	215,820	4,822	44.8	216.704	4,822	4508
2	BONTOALA	55,444	210	264.02	55,201	210	262.9	55.244	210	26276
3	MAKASAR	82,325	252	326.69	82,237	252	326.3	81.976	252	32471
4	MAMAJANG	58,178	225	258.57	58,293	225	259.1	58.075	225	25846
5	MANGGALA	157,502	2,414	65.25	160,466	2,414	66.5	161.827	2,414	6766

No	Kecamatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)
6	MARISO	58,501	182	321.43	58,730	182	322.7	58.797	182	32423
7	PANAKUKKANG	143,924	1,705	84.41	144,204	1,705	84.6	144.376	1,705	8481
8	RAPPOCINI	149,945	923	162.45	150,613	923	163.2	150.869	923	16364
9	TALLO	147,566	583	253.11	148,055	583	254.0	148.008	583	25408
10	TAMALANREA	104,587	3,184	32.85	106,262	3,184	33.4	106.768	3,184	3376
11	TAMALATE	186,849	2,021	92.45	188,432	2,021	93.2	189.222	2,021	9410
12	UJUNG PANDANG	24,911	263	94.72	24,851	263	94.5	24.876	263	9461
13	UJUNG TANAH	36,764	440	83.55	36,745	440	83.5	36.721	440	8394
14	WAJO	29,782	199	149.66	29,503	199	148.3	29.391	199	14646
15	KEPULAUAN SANGKARRANG	14,889	154	96.68	14,981	154	97.3	15.007	154	9805
	Jumlah	1,464,401	176.852	8331	1,474,393	176.852	8336	1.482.354	176.852	8433

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tahun 2025

Berdasarkan Tabel II.2, dapat dilihat kepadatan penduduk terbesar pada tahun 2021 terdapat pada Kecamatan Makassar yaitu sebesar 331 jiwa/hektar dan kepadatan terendah sebesar 32 jiwa/hektar terdapat pada Kecamatan Tamalanrea. Pada tahun 2022, sedangkan untuk kepadatan penduduk terbesar di Kota Makassar sebesar 326 jiwa/hektar terdapat pada Kecamatan Makassar, dan kepadatan terendah terdapat pada Kecamatan Tamalanrea sebesar 32 jiwa/hektar. Pada tahun 2023 kepadatan penduduk terbesar di Kota Makassar sebesar *326* jiwa/hektar terdapat pada Kecamatan Makassar, dan kepadatan terendah terdapat pada Kecamatan Tamalanrea sebesar *33* jiwa/hektar. Pada tahun 2023 kepadatan penduduk di Kota Makassar sebesar *8388* jiwa/hektar. Hal tersebut diperkuat dengan gambaran spasial mengenai kepadatan penduduk di kota makassar, seperti diperlihatkan dalam gambar berikut:

Gambar II.9.
Peta Kepadatan Penduduk Kota Makassar

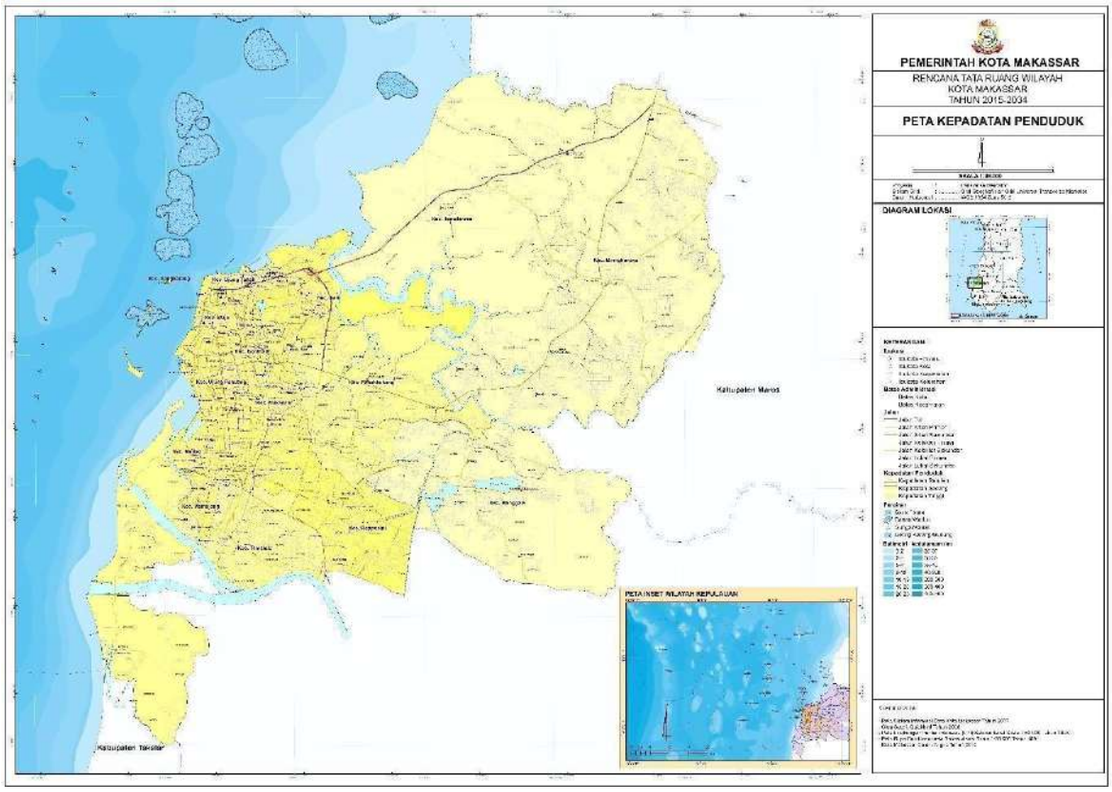

Sumber: Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024 – 2042

Dari table II.6 yang tersaji diketahui jumlah Rumah tangga tersebut didapatkan terjadi penurunan angka jumlah Rumah Tangga dari Tahun 2020 ke tahun 2021 hal ini disebabkan karena memakai dua sumber data dengan metode yang berbeda dalam penentuan jumlah rumah Tangga yang ada di Kota Makassar, dimana pada Tahun 2018 hingga Tahun 2020 Menggunakan Data dan Analisa Proyeksi jumlah Rumah Tangga Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sedangkan Data yang tersaji tahun 2021 hingga tahun 2022 memakai metode Proyeksi Interim menggunakan Parameter hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, menurut sumber Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2023.

Tabel II.3.
Sebaran dan Kepadatan Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2020-2024

NO	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Makassar				
		2020	2021	2022	2023*)	2024*)
1	Bir ingkanaya	46,335	47570	47,831	64.755	65.342
2	Bontoala	12,447	12,477	12,509	16.946	17.018
3	Kepulauan. Sangkarang	3,176	3,213	3,229	4.406	4.426
4	Makassar	19,168	18,601	18,628	25.828	25.945
5	Mamajang	14,586	12,694	12,702	18.269	18.317
6	Manggala	29,736	33,412	33,618	47.077	47.689
7	Mariso	13,596	13,041	13,086	18.198	18.359

NO	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Makassar				
		2020	2021	2022	2023*)	2024*)
8	Panakukkang	37,968	31,619	31,648	44.191	44.405
9	Rappocini	38,686	32,748	32,774	46.276	46.603
10	Tallo	30,833	32,925	33,040	43.881	44.085
11	Tamalanrea	35,241	23,373	23,397	32.605	32.829
12	Tamalate	47,786	41,107	41,292	57.866	58.369
13	Ujung Pandang	6,321	5,554	5,557	8.078	8.132
14	Ujung Tanah	7,381	8,140	8,181	10.765	10.818
15	Wajo	6,680	6,801	6,818	9.768	9.760
	JUMLAH TOTAL	349,940	323,275	324,310	448.909	452.097

Sumber : BPS 2025, (Proyeksi Rumah Tangga Hasil SP 2010 dan Proyeksi Interim menggunakan Parameter hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015).

II.1.1.6. Kawasan Risiko Bencana Kota Makassar.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, terdapat 8 (delapan) potensi bencana yaitu Gempa Bumi, banjir, kekeringan, Cuaca Ekstrim, Tsunami, Gelombang Ekstrim, Epidemi dan Wabah Penyakit dan Kegagalan Teknologi.

Untuk risiko bencana gempa bumi Kota Makassar masuk kedalam kategori tinggi dan sedang sampai rendah. Kategori rendah hanya di Kecamatan Sangkarang. Di Kota Makassar untuk resiko bencana Banjir masuk kedalam kategori tinggi, sedang dan rendah. Kategori sedang berada di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Rappocini, Tamalate. Untuk risiko bencana kekeringan Kota Makassar masuk kedalam kategori tinggi, sedang sampai rendah. Kategori sedang berada di 13 (tigabelas) Kecamatan yaitu Mariso, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung pandang, Panakkukang, Rappocini, Makassar, Biringkanaya, Tamalanrea, Tamalate, Mamajang dan Bontoala. Risiko bencana cuaca ekstrim Kota Makassar masuk kedalam kategori tinggi dan sedang. Kategori sedang berada di 2 (dua) Kecamatan yaitu Biringkanaya dan Panakkukang. Risiko bencana tsunami Kota Makassar masuk kedalam kategori tinggi dan sedang. Kategori sedang berada di 4 (empat) Kecamatan yaitu Mariso, Tallo, Ujung Tanah dan Wajo, sedangkan kategori tinggi berada pada wilayah kecamatan kepulauan sangkarrang, Tamalanrea, Tamalate dan Ujung Pandang. Risiko gelombang ekstrim dan abrasi Kota Makassar masuk kedalam kategori tinggi dan sedang. Kategori sedang berada di 2 (dua) Kecamatan yaitu Tamalanrea, Tamalate, Untuk kategori tinggi berada di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Kepulauan Sangkarang, Mariso, Tallo, Ujung Pandang dan Wajo. Risiko wabah penyakit dan epidemi di Kota Makassar masuk kedalam kategori tinggi dan sedang. Kategori sedang berada di 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, tamalate, Ujung Pandang, Wajo, Mariso, Panakkukang, Untuk kategori tinggi berada di 2 (dua)) Kecamatan yaitu Rappocini dan Tamalanrea, untuk kategori rendah berada di 3 (tiga) kecamatan yaitu, Kepulauan Sangkarrang, Tallo dan Ujung Tanah. Kota Makassar untuk risiko bencana kegagalan teknologi masuk kedalam kategori rendah yang berada di 13 (tigabelas) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Manggala, Mariso, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah dan Wajo.

Berdasarkan data uraian risiko bencana di atas di Kota Makassar tergolong dalam wilayah yang memiliki potensi risiko bencana dari kategori rendah sampai tinggi

berdasarkan kategori risiko. Dengan melihat potensi bencana yang terdapat pada Kota Makassar, maka upaya mitigasi bencana sangat perlu dilakukan agar dapat menghindari atau meminimalisir dampak yang nantinya akan ditimbulkan dari bencana tersebut.

II.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat disini terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga, dimana Pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil akan mendorong peningkatan kemampuan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa sehingga dapat memacu berkembangnya perekonomian dalam skala yang lebih besar dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, yang tercermin melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terus menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang solid, didukung oleh penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Kontribusi signifikan Kota Makassar terhadap perekonomian provinsi menjadi indikator penting dalam upaya pemerataan hasil pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Tabel II.4.
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB sektor perdagangan terhadap PDRB	23.777.629,39	25.119.554.41	26.747.839.19	28.032.656.01	29.532,24
2	Total PDRB	122.465.829,07	126.312.827,6	133.132.598,14	140.197.903,47	147.989.199,96
3	Persentase PDRB sektor perdagangan (1/2 x 100)	20,53	19.88	20.09	18.56	20,03

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa sektor perdagangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai PDRB sektor perdagangan tercatat sebesar 23.777,63 miliar rupiah, berkontribusi 19,62% terhadap total PDRB sebesar 122.905,75 miliar rupiah. Pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 25.119,55 miliar rupiah dengan kontribusi 19,84% dari total PDRB 126.312,83 miliar rupiah. Pertumbuhan berlanjut pada tahun 2022, dengan sektor perdagangan menyumbang 26.747,84 miliar rupiah atau 20,10% dari total PDRB 133.132,60 miliar

rupiah. Pada tahun 2023, sektor ini mencatat nilai 28.032,66 miliar rupiah, berkontribusi 20,03% terhadap total PDRB 140.197,90 miliar rupiah. Pada tahun 2024, nilai PDRB sektor perdagangan mencapai 29.532,24 miliar rupiah, tetap memberikan kontribusi 20,03% dari total PDRB yang meningkat menjadi 147.989,20 miliar rupiah. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan peran penting sektor perdagangan dalam perekonomian Makassar, dengan kontribusi yang konsisten di kisaran 20% meskipun ada sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Ini mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pentingnya penguatan sektor perdagangan untuk mendukung pembangunan ekonomi kota di masa depan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di kota makassar mengalami dinamika yang mencerminkan tantangan global maupun upaya pemulihan pascapandemi. Pada tahun 2020, ekonomi Makassar sempat terkontraksi akibat dampak pandemi COVID-19, namun sejak tahun 2021 mulai menunjukkan tren pemulihan yang positif. Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi Makassar kembali meningkat secara bertahap, didorong oleh sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, dan informasi-komunikasi. Memasuki tahun 2021, terjadi perbaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,47%, menandai awal dari proses pemulihan. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan meningkat menjadi 5,40%, yang tidak hanya menunjukkan percepatan pemulihan, tetapi juga melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Di tahun 2025, perekonomian Makassar diproyeksikan tumbuh sebesar 5,62%, dengan penguatan pada sektor-sektor strategis seperti perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa keuangan. Tahun 2024 menjadi tonggak penting, di mana pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,56%, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang mencapai kontribusi lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta meningkatnya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator optimisme investasi dan pembangunan fisik. Secara sektoral, struktur ekonomi Kota Makassar selama lima tahun terakhir didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, serta Konstruksi, yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Di samping itu, sektor jasa lainnya, seperti akomodasi, transportasi, dan informasi komunikasi, turut memperkuat basis perekonomian kota. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan arah kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ke depan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi ekonomi melalui peningkatan kualitas belanja publik, fasilitasi investasi, pengembangan UMKM, serta penguatan sektor-sektor ekonomi kreatif dan berbasis teknologi.

Gambar II.10.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024

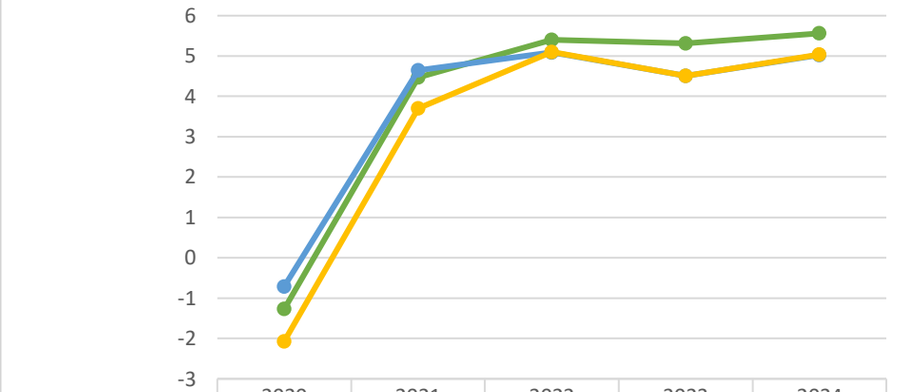

	2020	2021	2022	2023	2024
MAKASSAR	-1.27	4.47	5.40	5.31	5.56
SULSEL	-0.71	4.65	5.09	4.51	5.02
INDONESIA	-2.07	3.70	5.10	4.51	5.03

Sumber : BPS Kota Makassar dan diolah oleh BAPPEDA Kota Makassar, Tahun 2025

Berdasarkan data pada diatas Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika pemulihan yang konsisten setelah terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, perekonomian Makassar mengalami kontraksi sebesar -1,27 persen. Meskipun lebih dalam dibandingkan pertumbuhan Sulawesi Selatan yang terkontraksi -0,71 persen, penurunan tersebut masih lebih ringan dibandingkan nasional yang mencatat -2,07 persen. Hal ini mencerminkan dampak signifikan pandemi terhadap struktur ekonomi Makassar yang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan mobilitas tinggi.

Pada tahun 2021, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,47 persen sebagai awal pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ini menunjukkan respons positif dari sektor ekonomi terhadap kebijakan pemulihan dan adaptasi masyarakat terhadap kondisi kenormalan baru. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai 5,40 persen—lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Provinsi Sulsel (5,09 persen) maupun nasional (5,10 persen). Capaian ini menandakan pemulihan ekonomi Makassar berlangsung lebih cepat dan kuat, terutama ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta jasa lainnya.

Tahun 2023 mencatat pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Meskipun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik, terlebih karena pertumbuhan tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Selatan (4,51 persen) dan nasional (5,03 persen). Hal ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga momentum pemulihan dan mengarahkan pertumbuhan ke jalur yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024, ekonomi Makassar kembali menguat dengan pertumbuhan sebesar 5,56 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi dibandingkan Sulsel (5,02 persen) dan Indonesia secara keseluruhan (5,03 persen). Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi, yang masing-masing memberi kontribusi signifikan terhadap struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Kota Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan

arah pemulihan dan pertumbuhan yang stabil, menjadikan Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan kompetitif di Kawasan Timur Indonesia

Tabel II.5.
Berdasarkan Harga Berlaku Dan Harga Konstan (Triliun Rupiah)
Tahun 2020 sampai dengan 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	178,33	190,32	208,94	226,90	243,06
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	120,91	126,31	133,13	140,20	147,98

Sumber : BPS Kota Makassar dan diolah oleh BAPPEDA Kota Makassar, tahun 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, kinerja perekonomian Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sebagaimana tergambarkan dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB meningkat dari Rp178,33 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp243,06 triliun pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan nilai ekonomi secara nominal yang mencakup pengaruh inflasi dan perubahan harga. Sementara itu, pertumbuhan PDRB ADHK dari Rp120,91 triliun menjadi Rp147,98 triliun pada periode yang sama menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil yang mencerminkan peningkatan volume produksi barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Tren positif ini mengindikasikan adanya penguatan aktivitas produksi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sekaligus menjadi landasan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk mendorong pemerataan kesejahteraan, peningkatan produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan

Tabel II.6.
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2024

No	Kategori/Sub kategori	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	840,92	905,36	1007,22	998,21	985,21
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	31.925,72	34.200,06	38.892,74	42.720,21	46.173,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	51.90	57,15	63,19	69,81	70,61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	323,62	341,52	368,88	379,15	398,27
6	Konstruksi	33.290,65	36.191,95	38.870,36	41.301,43	42.033,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	34.983.12	37.753.71	41.997.95	45.443,61	48.680,75

No	Kategori/Sub kategori	2020	2021	2022	2023	2024
	dan Sepeda Motor					
8	Transportasi dan Pergudangan	3.928,66	4.323,53	5.480,41	6.565,49	7.226,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.292,66	3.407,19	4.233,26	4.863,29	5.294,28
10	Informasi dan komunikasi	17.944,24	19.207,64	20.159,26	22.206,26	23.881,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.592,32	10.636,61	11.514,82	12.331,65	13.711,98
12	Real Estate	6.425,25	6.628,57	7.088,39	7.527,68	8.076,84
13	Jasa Perusahaan	1.957,20	2.104,35	2.513,01	2.857,30	3.131,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6.193,19	6.516,96	6.733,07	7.333,21	7.506,25
15	Jasa Pendidikan	16.337,46	16.859,34	17.439,13	18.260,20	19.574,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.813.68	6.387,49	7.054,41	7.772,84	9.033,62
17	Jasa lainnya	4.432,41	4.856,62	5.519,70	6.272,45	7.283,59
PDRB		**178.332,99**	**190.318,07**	**208.935,79**	**226.902,79**	**243.062,72**

Sumber : BPS Kota Makassar dan diolah oleh BAPPEDA Kota Makassar, tahun 2025

Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Makassar tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan transformasi sektor ekonomi yang cukup dinamis. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor secara konsisten menjadi penyumbang utama, meningkat dari Rp34,98 triliun pada 2020 menjadi Rp48,68 triliun pada 2024, mencerminkan tingginya aktivitas konsumsi dan perputaran barang di Kota Makassar sebagai pusat perdagangan regional. Disusul oleh sektor industri pengolahan yang juga tumbuh signifikan dari Rp31,92 triliun menjadi Rp46,17 triliun, menandakan adanya penguatan sektor manufaktur dan hilirisasi industri. Sektor konstruksi turut berperan besar dengan pertumbuhan dari Rp33,29 triliun menjadi Rp42,03 triliun, menunjukkan tingginya dinamika pembangunan infrastruktur fisik kota. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta jasa keuangan dan asuransi juga memperlihatkan pertumbuhan yang stabil, menggambarkan pergeseran ke arah penguatan sektor tersier yang berbasis jasa dan pelayanan publik. Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meskipun relatif kecil dalam struktur ekonomi kota, tetap menunjukkan peran stabil dalam mendukung ketahanan pangan lokal. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB ADHB dari Rp178,33 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp243,06 triliun pada 2024 mencerminkan ketahanan dan daya saing ekonomi Kota Makassar yang semakin kuat serta peran strategisnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Tabel II.7.
Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dengan Wilayah Setaranya

Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Makassar	-1.27	4.47	5.40	5,31	5,56
Kota Surabaya	-4.85	4.29	7.17	5,70	5,76
Kota Semarang	-1.85	5.16	5.73	5,79	5,62
Kota Bandung	-2.28	3.76	5.41	5,07	4,99
Kota Medan	-1.98	2.62	4.71	5,04	5,07

Sumber : BPS Kota Makassar dan diolah oleh BAPPEDA Kota Makassar, tahun 2025

Jika dibandingkan dengan beberapa kota besar lainnya di Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan kompetitif. Setelah mengalami kontraksi sebesar -1,27% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi, perekonomian Kota Makassar berhasil pulih secara konsisten dengan mencatat pertumbuhan positif hingga mencapai 5,56% pada tahun 2024. Kinerja ini relatif sejalan bahkan lebih stabil dibandingkan beberapa kota besar lainnya. Kota Surabaya memang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,17% pada 2022, namun mengalami fluktuasi yang lebih tajam. Sementara Kota Semarang, meskipun sempat tumbuh tinggi di tahun 2023, menunjukkan penurunan pada 2024. Kota Bandung dan Kota Medan juga menunjukkan tren pemulihan, namun pertumbuhannya cenderung lebih moderat dibandingkan Makassar. Konsistensi pertumbuhan Kota Makassar ini mencerminkan ketahanan struktur ekonominya serta efektivitas pengelolaan sektor-sektor penggerak utama, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berdaya saing di kawasan Indonesia timur.

Dalam konteks perencanaan RKPD, tren ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi ke depan. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan akses terhadap pembiayaan dan investasi. Selain itu, perlu dilakukan integrasi perencanaan lintas sektor dan wilayah agar pertumbuhan yang tinggi ini dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan mempertahankan dan memperkuat kinerja ekonomi yang telah dicapai, Kota Makassar berpeluang besar untuk terus memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Oleh karena itu, perencanaan RKPD ke depan perlu bersifat visioner, inklusif, dan berbasis data, guna memastikan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan

3. Laju inflasi

Inflasi merupakan ind ikator ekonomi sangat penting karena berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Daerah dengan tingkat kenaikan harga barang dan jasa yang tinggi, dapat menekan daya beli sehingga menurunkan permintaan output. Selain itu, inflasi juga berkaitan dengan angka kemiskinan, sebab dalam menentukan garis kemiskinan, variabel inflasi menjadi indikator utama. Artinya, inflasi yang tak terkendali bisa menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin. Lazimnya, Indikator untuk menghitung tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), sebuah indeks yang

mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Karena itu, perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam hal ini BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang dan jasa.

Gambar II.11.
Laju Inflasi Rata-Rata Kota Makasar Tahun 2020-2024

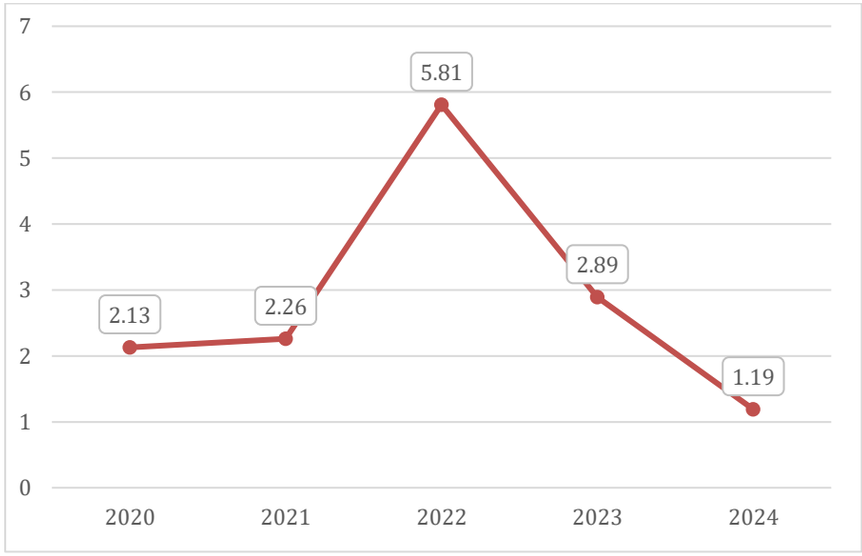

Sumber: BPS Kota Makassar, tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, laju inflasi rata-rata Kota Makassar menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 hingga 2021, inflasi relatif terkendali masing-masing sebesar 2,13% dan 2,26%, mencerminkan stabilitas harga di tengah situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Memasuki tahun 2022, inflasi mengalami lonjakan tajam hingga mencapai 5,81% yang mencerminkan adanya tekanan harga, baik dari sisi kelompok bahan makanan, energi, maupun penyesuaian harga global yang berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat. Namun demikian, upaya stabilisasi harga yang dilakukan melalui pengendalian pasokan, penguatan sinergi pengendalian inflasi daerah (TPID), serta koordinasi antar sektor berhasil menurunkan laju inflasi menjadi 2,89% di tahun 2023 dan kembali terkendali di angka 1,19% pada tahun 2024.

Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Makassar untuk mengendalikan laju inflasi, dimana diharapkan ada kesinambungan dari program-program pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Makassar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan upaya stabilisasi, seperti operasi pasar murah dan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok.

Tabel II.8.
Perbandingan Laju dan Rara-Rata Inflasi Kota Makassar, Provinsi Sul-Sel, Nasional Tahun 2020 s.d 2024

Inflasi	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata-Rata (%)
Kota Makassar	2,13	2,1	5,81	2.89	1.19	2.82
Provinsi Sul-Sel	2,04	2,4	5,83	2.81	1.23	2.86
Nasional	1,68	1,87	3,36	2.61	1.57	2.22

Sumber: BPS Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan data perbandingan laju inflasi Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa inflasi di tingkat daerah cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Rata-rata inflasi di Kota Makassar selama lima tahun tersebut tercatat sebesar 2,82%, sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 2,86%, namun masih di atas rata-rata nasional yang hanya 2,22%. Puncak inflasi terjadi pada tahun 2022, baik di Kota Makassar (5,81%), Provinsi Sulsel (5,83%), maupun secara nasional (3,36%). Kenaikan ini dipicu oleh berbagai faktor eksternal dan internal seperti kenaikan harga BBM, peningkatan permintaan pasca pandemi, serta terganggunya rantai pasok logistik. Setelah tahun 2022, tren inflasi menunjukkan penurunan signifikan. Pada tahun 2023 dan 2024, inflasi mulai terkendali, bahkan di Kota Makassar turun drastis hingga 1,19% pada tahun 2024, sementara di Provinsi Sulsel sebesar 1,23%, dan nasional 1,57%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian harga dan distribusi barang, serta pulihnya aktivitas ekonomi yang lebih stabil. Meskipun begitu, perbedaan inflasi antara daerah dan nasional mencerminkan bahwa faktor lokal seperti biaya distribusi, ketersediaan bahan pokok, dan kondisi pasar turut memengaruhi fluktuasi harga secara spesifik di masing-masing wilayah. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan koordinasi antar sektor dalam menjaga kestabilan harga di daerah khususnya di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kota Makassar

PDRB merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan. Namun demikian yang secara rutin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penghitungan dari sisi produksi dan pengeluaran/penggunaan.

Gambar II.12.
PDRB Per Kapita (Rp. Juta) Kota Makassar
Tahun 2020-2024

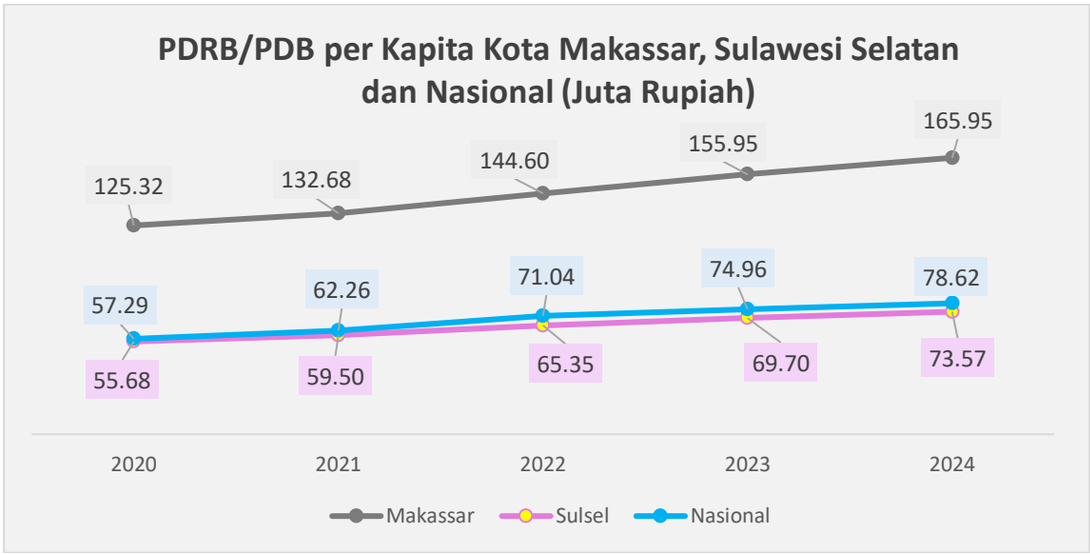

Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2025

Pencapaian PDRB per Kapita Kota Makassar dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja peningkatan yang menakjubkan. Meningkat dari hanya Rp 125,32 juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp165,95 juta pada tahun 2024. Kinerja peningkatan PDRB Kota Makassar jauh melampaui kinerja Provinsi Sulsel dan Nasional, sehingga *gap*-nya akan semakin nampak melebar. Kondisi ini harus terus dipertahankan dan perlu terus ditingkatkan hingga Kota Makassar mampu mendorong peningkatan PDRB Provinsi Sulsel dapat melampaui capaian PDB per Kapita Nasional dalam jangka panjang yang akan datang.

5. Gini Ratio

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia. Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada gini ratio menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai gini ratio, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Indeks gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan gini ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,

- 0,4 <GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),
- GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Gambar II.13.
Perbandingan Indeks Gini Tahun 2020 s.d 2024
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional

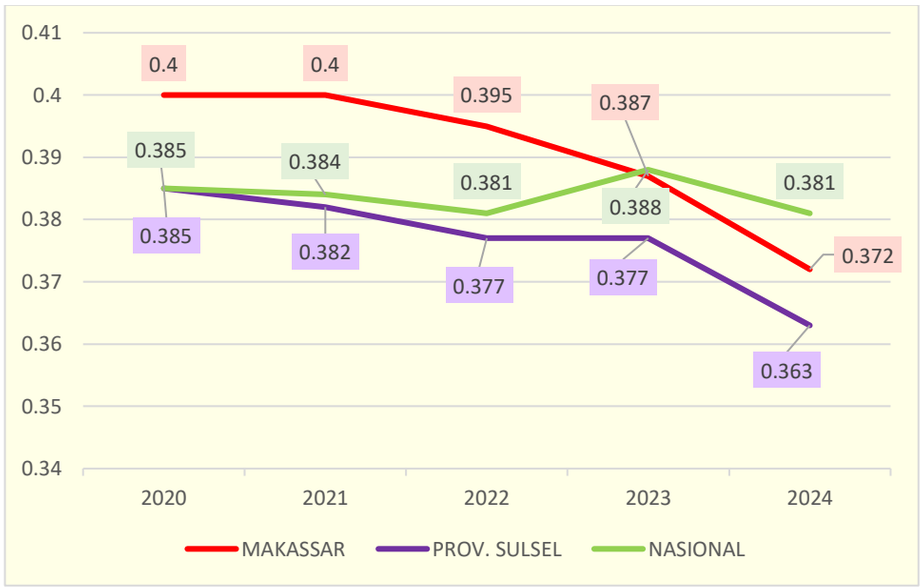

Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian Indeks Gini Kota Makassar menunjukkan tren penurunan yang positif dari 0,400 pada tahun 2020 menjadi 0,372 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan dalam pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, Indeks Gini Kota Makassar pada awal periode berada sedikit lebih tinggi, namun secara konsisten mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan kedua level agregat tersebut. Provinsi Sulawesi Selatan tercatat menurun dari 0,385 menjadi 0,363, sedangkan nasional relatif lebih stabil dengan fluktuasi kecil di kisaran 0,385 hingga 0,381. Penurunan Indeks Gini di Kota Makassar menunjukkan adanya perbaikan distribusi hasil pembangunan, penguatan program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, serta peran intervensi kebijakan sosial yang efektif dalam menekan kesenjangan pendapatan. Capaian ini menjadi indikator penting bahwa upaya pemerataan ekonomi di Kota Makassar berjalan ke arah yang positif dibandingkan dengan kondisi regional dan nasional.

Tabel II.9.
Capaian Gini Ratio Kota Makassar dengan Wilayah Setaranya
Tahun 2020 s.d 2024

Kab/Kota	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Kota Makassar	0,4	0,4	0,395	0,387	0,372
Kota Bandung	0,402	0,427	0,370	0,370	0,445
Kota Surabaya	0,34	0,35	0,371	0,423	0,381

Sumber : BPS Sulawesi Selatan BPS Jawa Timur dan BPS Jawa Barat Tahun 2025

Berdasarkan data capaian gini rasio Kota Makassar dengan kota setaranya Tahun 2020 sebesar 0,400 untuk Kota Bandung sebesar 0,402 dan Kota Surabaya 0,340 artinya angka ketimpangan di Kota Makassar masih lebih rendah dibandingkan dengan dua kota tersebut. Demikian pula pada tahun 2023 tingkat ketimbangan Kota Makassar masih lebih rendah dari kedua kota setaranya. Namun tahun 2022 Gini rasio Kota Makassar berada pada 0,395 diatas kedua kota setaranya yaitu Kota Bandung di angka 0,370 dan Kota Surabaya diangka 0,371 artinya tahun 2023 Kota Makassar merupakan tertinggi ketimpangannya dibanding kedua kota tersebut. Tahun 2024 Gini asio Kota Makassar berada pada angka 0,372, Kota Bandung 0,445 dan Kota Surabaya 0,381. Bila diandingkan dengan kedua kota tersebut Kota Makassar merupakan tertingi ketimpangannya.

3. Fokus Kesejahteraan Sosial

Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP)

Tabel II.10.
Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk miskin dengan pendapatan di bawah $ 1 PPP	64.644	74.690	71.830	80.320	79,53
2	Jumlah Penduduk	1.423.877	1.427.619	1.432.189	1.436.626	1.464,64
3	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari (1/2 x 100)	4,54	5,23	5,02	5,59	4,97

Sumber: BPS. diolah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Kondisi proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari Kota Makassar selama periode tahun 2020 s.d 2024 cenderung mengalami kenaikan namun fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari Kota Makassar menunjukkan angka sebesar 4,54 persen dan mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen menjadi 4,97 persen di tahun 2024.

Angka partisipasi angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas)

Tabel II.11.
Angka partisipasi angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan kerja 15 tahun ke Atas	696.158	725.529	729.635	651.832	696.851
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	1.199.282	1.215.291	1.230.996	1.110.014	1.123.229
3	Angka partisipasi angkatan kerja (1/2 x100)	58,05	59,70	59,27	58,72	62,04

Sumber : Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Angka partisipasti angkatan kerja (APAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (PUK) dikalikan dengan 100 persen. APAK merupakan indikator untuk melihat besarnya persertase PUK yang masuk ke dalam angkatan kerja atau penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, ataupun sedang mencari pekerjaan di kota Makassar.

Angka partisipasi angkatan kerja Kota Makassar selama periode 2020 s.d 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,99 persen. Dimana pada tahun 2020 tercatat angka partisipasi angkatan kerja kota Makassar menunjukkan angka sebesar 58,05 persen meningkat di tahun 2024 menjadi 62,04 persen.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (usia 15-64 tahun)

Tabel II.12.
Tingkat partisipasi angkatan kerja (usia 15-65 tahun)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk angkatan Kerja	696.158	725.529	729.635	651.832	696.851
2	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)	1.199.282	1.215.291	1.230.996	1.110.014	1.123.229
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (1 / 2 x 100)	58,05	59,70	59,27	58,72	62,04

Sumber : Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Beberapa indikator yang dapat mengambarkan partisipasi angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Makassar selama periode tahun 2020 s.d 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,04 persen. Dimana pada tahun 2020 tercatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Makassar menunjukkan angka sebesar 58,05 persen, meskipun terdapat fluktuasi dibeberapa tahun, dan akhirnya meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 62,04 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel II.13.
Tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja	110.833	95.596	86.267	69.124	67.668
2	Jumlah penduduk angkatan Kerja	696.158	725.529	729.635	651.832	696.851
3	Tingkat pengangguran terbuka (1/2 x 100)	15,92	13,18	11,82	10,60	9,71

Sumber : Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dihasilkan dari pengangguran terbuka yang dibagi dengan jumlah angkatan kerja lalu dikali 100. TPT diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah pengangguran berbanding dengan angkatan kerja.

Kondisi TPT di kota Makassar selama periode tahun 2020 s.d 2024 mengalami penurunan Dimana di tahun 2020 TPT Kota Makassar menunjukkan angka sebesar 15,92 menurun sebesar minus 6,21 persen menjadi 9,71 persen di tahun 2024.

Rasio penduduk yang bekerja

Tabel II.14.
Rasio penduduk yang bekerja Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk yang bekerja	585.325	629.933	643.368	582.708	629.183
2	Angkatan kerja	696.158	725.529	729.635	651.832	696.851
3	Rasio penduduk yang bekerja (1/2 x 100)	84.08	86,82	88,18	89,40	90,29

Sumber : Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Kondisi Rasio Penduduk yang Bekerja kota Makassar selama periode tahun 2020 s.d 2024 mengalami peningkatan sebesar minus 6,21 persen. Dimana pada tahun 2020, Rasio Penduduk yang Bekerja menunjukkan angka sebesar 84,08 persen dan sebanyak 90,29 persen di tahun 2024.

Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Tabel II.15.
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024
1	Produk domestik bruto	120.905	126.313	133.133	140.197	147.989
2	Jumlah tenaga kerja	585.325	629.933	643.368	582.708	629.183
3	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (1/2 x 100)	20,66	20,05	20,69	24.06	23,52

Sumber: Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Laju Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) per tenaga kerja, yang dipergunakan untuk memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran kunci dari kinerja ekonomi, yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan suatu negara dalam menciptakan kesempatan kerja yang layak disertai dengan kompensasi yang adil. Laju Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (harga konstan) (Miliar Rupiah) terhadap jumlah penduduk yang bekerja.

Selama periode tahun 2020 s.d 2024 perkembangan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 4.06 persen. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja tercatat sebesar 20,66 persen menjadi sebesar 23,52 persen pada tahun 2024.

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Tabel II.16.

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Penduduk yang bekerja	585.325	629.933	643.368	582.708	629.183
2	Jumlah angkatan kerja	696.158	725.529	729.635	651.832	696.851
3	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15+ (1 / 2 x 100)	84,08	86,82	88,18	89,40	90,29

Sumber: Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, indikator ini mencerminkan tingkat penyerapan tenaga kerja terhadap total penduduk usia kerja, dengan asumsi bahwa jumlah kesempatan kerja yang tersedia adalah sama dengan jumlah penduduk yang bekerja.

Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja Kota Makassar selama periode tahun 2020 s.d 2024 mengalami Peningkatan sebesar minus 6,21 persen. Dimana pada tahun 2020, Rasio Kesempatan Kerja Kota Makassar menunjukkan angka sebesar 84,08 persen dan sebanyak 90,29 persen di tahun 2024.

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Tabel II.17.

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas Keluarga	190.492	203.998	241.183	191.226	253.585
2	Total kesempatan kerja	585.325	629.933	643.368	582.708	629.183
3	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (1/2 x 100)	32,54	32,38	37,49	32,82	40,30

Sumber: Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja merupakan perbandingan antara tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga dengan total kesempatan kerja. Indikator ini menunjukan berapa persen penduduk yang bekerja di dalam kegiatan pekerja rentan. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

Kondisi proporsi pekerja rentan Kota Makassar selama periode tahun 2020 s.d 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,76 persen. Dimana pada tahun 2020, proporsi pekerja rentan menunjukkan angka sebesar 32,54 persen dan meningkat menjadi 40,30 persen di tahun 2024.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kota Makassar pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,49 dari 95,42 turun menjadi 94,93 % pada Tahun 2023 dan tahun 2024 naik menjadi 95,03% artinya persentase penduduk miskin Kota Makassar mengalam penurunan 0,1%. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan lebih rendah dibandingkan Kota Makassar sebesar 92,23% atau selisih 2,8%.

Tabel II.18.
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Kota Makassar	95,72	95,46	95,42	94,93	95,03
Provinsi Sulawesi Selatan	91,44	91,04	91,37	91,30	92,23
Nasional	90,29	90,45	90,64	90,97	91,43

Sumber: Bappeda Kota Makassar (Data diolah), tahun 2025

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)

Tabel II.19.
Persentase penduduk miskin Kota Makassar
dengan daerah setara dikawasan
Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Kota Makassar	4,54	4,82	4,58	5,07	4,97
Gowa	7,38	7,54	7,36	7,42	6,85

Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Takalar	8,44	8,25	8,25	8,29	7,75
Maros	9,74	9,57	9,43	9,65	9,32
Pangkep	13,96	14,28	13,92	13,40	12,41

Sumber: Bappeda Kota Makassar (Data diolah), tahun 2025

Persentase penduduk miskin Kota Makassar bila dibandingkan dengan 4 kabupaten dikawasan yang sama, Kota Makassar merupakan paling rendah selama 5 tahun berturut-turut namun fluktuatif dan tertinggi tahun 2023 sebesar 5,07%. Untuk tahun 2024 turun menjadi 4,97%, sementara 4 kabupaten setara dikawasan juga mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu Kabupaten Gowa 6,85%, Kabupaten Takalar 7,75%, Kabupaten Maros 9,32% dan Kabupaten Pangkep 12,41%.

Tabel II.20.
Persentase penduduk miskin Kota Makassar dengan daerah setara Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Kota Makassar	4,54	4,82	4,58	5,07	4,97
Kota Bandung	3,38	4,37	4,25	3,96	3,87
Kota Palembang	10,89	11,34	10,48	10,22	10,90
Kota Surabaya	5,02	5,23	4,72	4,65	3,96

Sumber: Bappeda Kota Makassar (Data diolah), tahun 2025

Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar mengalami penurunan 0,1 dengan jumlah penduduk miskin 79,53 ribu bandingkan 3 (tiga) Kota Lainnya hanya Kota Palembang yang mengalami kenaikan dari 10,22% menjadi 10,90% sementara dua Kota lainnya mengalami penurunan di tahun 2024. Kota Bandung pada 2023 sebesar 3,96% menjadi 3,87% atau turun 0,09% di Tahun 2024 ,Kota Palembang dari angka 10,22% di Tahun 2023 naik menjadi 10,99% di Tahun 2024, Untuk Kota Surabaya turun 2,49% sehingga di Tahun 2024 menjadi 3,96%.

Tabel II.21.
Garis kemiskinan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Kota Makassar	442.513	475.444	511.081	570.286	592.753
Sulawesi Selatan	362.031	384.455	422.952	436 025	459.226
Nasional	458.947	486.168	505.469	550.458	595.242

Sumber: Bappeda Kota Makassar (Data diolah), tahun 2025

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan non makanan yang harus dipenuhi. Untuk garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebesar Rp. 459.226 per kapita per bulan, lebih rendah dibandingakan garis kemiskinan Kota Makassar dengan nilai minimum pengeluaran Rp. 592.753 per kapita per bulan. Dan

untuk nasional garis kemiskinan sebesar Rp. 550.458,-. Lebih tinggi dari Kota Makassar.

Tabel II.22.
Garis kemiskinan di Kota Makassar dan Kota Setaranya di Luar Kawasan Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Kota Makassar	442.513	475.444	511.081	570.286	592.753
Kota Bandung	500.452	515.396	545.675	591 124	614.707
Kota Palembang	548.563	567.518	597.136	643.356	660.932
Kota Surabaya	592.137	611.466	460.909	718.370	742.678

Sumber: Bappeda Kota Makassar (Data diolah), tahun 2025

Untuk garis kemiskinan Kota Makassar Tahun 2024 berada pada Rp 592.753 perkapita perbulan mengalami kenaikan sebesar Rp 22,467 dari tahun 2023.Bila dibandingkan dengan tiga kota setara di luar kawasan Kota Makassar berada di urutan terendah setelah Kota Bandung sebesar Rp 614.707. Kota Surabaya adalah yang tertinggi yaitu sebesar Rp 742.678.

Tabel II.23.
Indeks Kedalaman kemiskinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Makassar	0,58	0.76	0.80	0,62	0,81
Sulawesi Selatan	1,65	1,40	1,50	1,57	1,39
Nasional	1,75	1,67	1,56	1,53	1,46

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), tahun 2025

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Untuk Indeks kedalam kemiskinan Kota Makassar pada tahun 2023 sebesar 0,62 turun menjadi 0,81%, Indeks kedalaman kemiskinan Kota Makassar 5 tahun terakhir jauh lebih kecil dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Tahun 2024 Indeks Kedalam kemiskinan Kota Makassar berada pada 0,81, Sulawesi Selatan 1,39 dan Nasional berada pada 1,46.

Bila dibandingkan dengan kota setara kawasan, maka Kota Makassar merupakan terkecil kedua setelah Gowa (0,67). Dan teretinggi adalah Pangkep sebesar 1,78.

Tabel II.24.
Indeks Kedalaman kemiskinan
Kota Makassar dengan daerah setaranya Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Kota Makassar	0,58	0,76	0,80	0,62	0,81
Gowa	1,18	1,38	1,13	0,72	0,67
Takalar	1,09	1,03	1,88	0,81	1,22
Maros	1,45	1,61	1,77	1,89	1,06
Pangkep	2,52	2,78	2,09	2,15	1,78

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), tahun 2025

Tabel II.25.
Indeks Kedalaman kemiskinan
Kota Makassar dengan daerah setaranya di luar Kawasan Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Kota Makassar	0,58	0.76	0,80	0,62	0,81
Kota Bandung	0,61	0,78	0,70	0,57	0,61
Kota Palembang	1,67	1,86	2,25	2,06	2,06
Kota Surabaya	0,87	0,75	0,69	0,71	0,65

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), tahun 2025

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Makassar dan 3 Kota besar lainnya Tahun 2024 merupakan urutan ke 2 terbesar. Terkecil adalah Kota Bandung dari 0,57 pada Tahun 2023 menjadi 0,61 tahun 2024. Kota Palembang indeks kedalam kemiskinan turun dari 2,25 Tahun 2022 menjadi 2,06 Tahun 2023 atau turun sebesar 0.19%, bertahan di 2,06 Tahun 2024. Sementara Kota Surabaya Tahun 2023 diangka 0,71 turun menjadi 0,65 % dan Kota Makassar dari 0,62 tahun 2023 menjado 0,81 Tahun 2024.

Indeks Pendidikan

Pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan. Indeks pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (literacy rate) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama sekolah (means-years of schooling) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi

sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.

Tabel II.26.
Indeks Pendidikan Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Harapan Lama Sekolah	15,57	15,58	15,59	15,61	11,62
2	Rata-Rata Lama Sekolah	11,21	11,43	11,55	11,56	11,57
3	Indeks Pendidikan	80,62	81,38	81,81	81,89	81,96

Sumber : BPS Makassar Dalam Angka tahun 2025

Indeks Kesehatan

Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kesehatan dipandang sebagai sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, sehingga sehat sebagai suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Indeks Kesehatan merupakan dan atau menggambarkan kemajuan kesehatan.

Tabel II.27.
Indeks Kesehatan Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,67	74,71	74,96	75,15	75,33
2	Indeks Kesehatan	84,11	84,17	84,55	84,85	85,12

Sumber : BPS Makassar Dalam Angka Tahun 2025

Dari tabel tersebut tabel tersebut menggambarkan Indeks Kesehatan Kota Makassar semakin meningkat dari tahun ke tahun, 79,54 pada tahun 2018 naik 1,08 point pada tahun 2022 menjadi 80,62 dan pada tahun 2023 menjadi 80,6.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, dimana komponen yang digunakan sangat berbasis dengan komponen kualitas hidup misalnya Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Pendekatan yang digunakan oleh IPM melalui 3 dimensi dasar seperti : 1). Umur yang Panjang dan sehat; 2) Pengetahuan dan 3) kehidupan yang layak. Dimensi Kesehatan di ukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), Dimensi Pendidikan digunakan menggunakan indikator Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama Sekolah (RLS) Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel II.28.
Komponen Pembentuk IPM Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

Indiaktor satuan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PENDIDIKAN						
Harapan lama sekolah	Tahun	15,57	15,58	15,59	15,61	11,62
Rata-rata Lama sekolah	Tahun	11,21	11,43	11,55	11,56	11,57
KESEHATAN						
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,67	74,71	74,96	75,15	75,33

Indiaktor satuan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
STANDAR HIDUP LAYAK						
Pengeluaran per kapita	Rp/Orang	16.873	17.0978	17.406	17.889	18.386
Indek Pembangunan Manusia		81,73	82,25	82,66	84,85	85,23

Sumber : BPS Kota Makassar, tahun 2025

IPM Makassar secara konsisten mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dimana tahun 2020 mencapai 81,73 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 85,23 atau mengalami pertumbuhan 3,74 dalam lima tahun. Pertumbuhan IPM Kota Makassar juga lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebesar 71,93 meningkat menjadi 75,18 pada tahun 2024, artinya pertumubuhan IPM provinsi Sulawesi Selatan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,25 dalam lima tahun. Demikan pula secara nasional IPM pada tahun 2020 berada pada angka 71,94 menjadi 75,02 di Tahun 2024 atau meningkat hanya 3,08 dalam lima tahun. Program-program disektor Pendidikan, kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah. Perbandingan Indek Pembangunan Manusia Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat di lihat pada grafik berikut.

Gambar II.14.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024

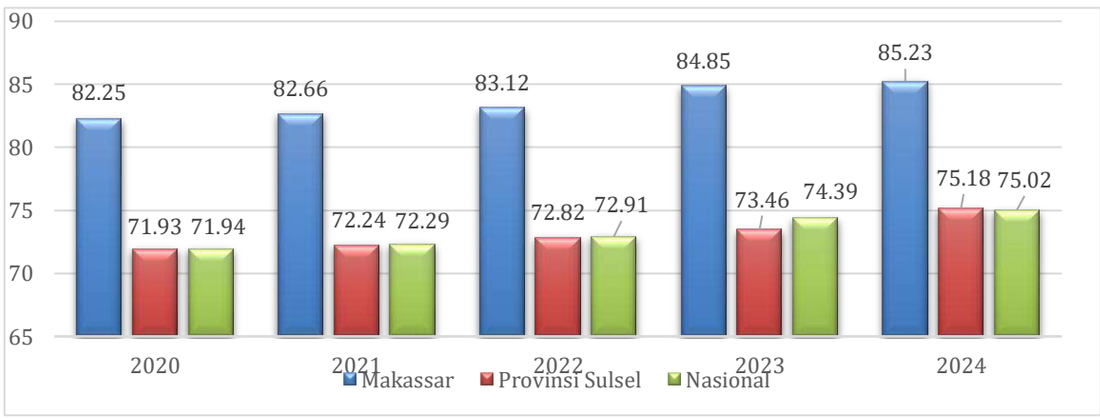

Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2025

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi selatan, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Makassar mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Makassar relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Sebagai kota metropolitan, maka sudah selayaknya IPM Kota Makassar berada di atas level provinsi dan nasional. IPM Kota Makassar juga lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota yang ada dalam wialayah Provinsi Sulawesi Selatn. Berikut grafik Indeks Pembangunan Manusia 2020-2024 Wilayah kabupaten Kota Se wilayah Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa posisi Kota Makassar masih berada pada posisi yang pertama jika dibanding dengan 23 Kab/Kota lainnya.

Gambar II.15.
Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024

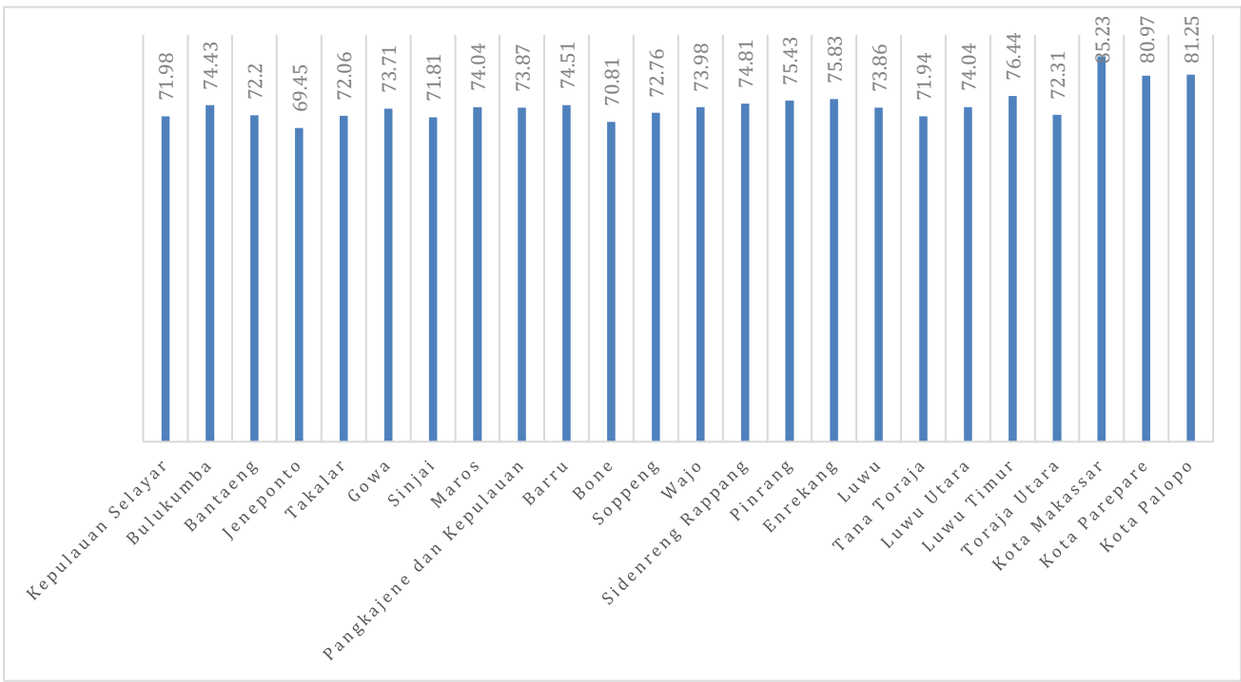

Sumber: BPS Prov, Tahun 2025

Grafik komparasi nilai IPM kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki nilai IPM tertinggi di tahun 2024 dengan niali IPM 85,23. IPM tertinggai dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti Kota Palopo pada angka 81,23 dari 24 Kabupaten Kota, sedangkan TPM terendah dicapai oleh Kabupaten Jeneponto dengan angka 69,45. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang harus diupayakan untuk dapat tetap mempertahankan tingkat daya saing yang semakin dinamis.

Badan Program Pembangunan PBB. UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB yang bekerja untuk membantu negara-negara mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). UNDP bekerja di berbagai bidang, termasuk pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-69 kategori sedang. Berdasarkan standar ini maka Kota Makassar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori sangat tinggi dan Sulawesi Selatan dan Nasional masih berada pada kategori tinggi. Demikian pula diantara kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dan yang masih berada pada kategori sedang adalah Kabupaten Jenneponto diangka 69.

Angka melek huruf

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dapat terlihat dari tiga indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Dalam indikator pendidikan dapat diukur dari Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta Rata-rata Lama Sekolah.

Kemampuan membaca dan menulis atau tingkat buta huruf terutama untuk

penduduk yang berumur 15 tahun ke atas merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan. Sebab kalau di suatu wilayah masih cukup banyak penduduk yang buta huruf, jelas merupakan indikator ketertinggalan, sebab seseorang yang buta huruf relatif akan lebih sulit untuk menerima informasi dan pengetahuan baru.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kebutuhan mendasar, tanpa kepandaian tersebut sulit rasanya untuk mengikuti perkembangan informasi sosial ekonomi global. Ukuran ini merupakan indikator dasar mutu sumber daya manusia yang di ukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi sumber daya manusia suatu masyarakat.

Melek huruf yang dimaksud adalah jika seseorang yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis/Makassar, Jawa, Cina dan sebagainya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf.

Analisa atas data sebaran Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas dan kondisi sosial ekonomi berpengaruh pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf. Peningkatan yang cukup signifikan AMH dan RLS terjadi di wilayah perkotaan

Tabel II.29.
Angka Melek Huruf Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia > 15 th yang bisa membaca dan menulis	1.095.417	1.048.520	1.053.399	1.072.745	1123903
2	Jumlah penduduk usia > 15 th	1.112.889	1.063.408	1.072.380	1.081.723	1.114.013
3	Penduduk usia > 15 tahun yang melek huruf (1 / 2 x 100)	98,43	98,60	98.17	99,15	99,22

Sumber: BPS Kota Makassar, tahun 2025

Sedangkan dalam perhitungan metode baru, Angka melek huruf yang merupakan komponen dalam menghitung IPM tidak digunakan lagi, namun Angka harapan lama sekolah merupakan komponen dalam menghitung IPM yang setiap tahun mengalami kontraksi peningkatan setiap tahun. Pada periode 2020– 2023 AMH mengalami naik turun disebabkan Kota Makassar merupakan kota tujuan untuk mencari pekerjaan oleh sebagian penduduk Kota/Kabupaten lain. Sementara pada tahun 2024, angka melek huruf naik sebesar 0,07% dari tahun lalu menjadi 99,22%.

Angka rata-rata lama sekolah

Kontribusi indeks pendidikan dipengaruhi oleh dua komponen yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf metode lama yang saat ini untuk melakukan perhitungan IPM telah diganti dengan metode baru dengan menggunakan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dimana setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Makassar setiap tahunnya menunjukkan

kenaikan. Hal ini dapat dilihat bahwa. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Makassar dari tahun 2018-2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.30.
Angka rata-rata lama sekolah Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,21	11,43	11,55	11,56	11,57

Sumber: BPS Kota Makassar, tahun 2025

Rata-rata lama sekolah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor Pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah adalah dengan memperkecil angka putus sekolah atau mengembalikan anak putus sekolah ke bangku sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang Pendidikan. Pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 11,55 dan mengalami kenaikan hanya sedikit pada tahun 2023 menjadi 11,56. Sedangkan pada tahun 2024 menjadi 11,57. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat perkotaan mengalami peningkatan bila dibandingkan daerah wilayah pedesaan dimana kemampuan ekonomi sangat mendorong upaya lama sekolah bagi masyarakat di Kota Makassar.

Angka usia harapan hidup

Angka harapan hidup adalah data yang menggambarkan usia kematian pada suatu populasi. Data ini merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. AHH dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari status sosial ekonomi hingga kondisi psikologis. Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di Indonesia menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal itu berdasarkan atas penghitungan angka harapan hidup sendiri dengan menggunakan rata-rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata-rata anak yang masih hidup pada periode sensus. Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah, begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itu Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Berikut angka Harapan Hidup Kota Makassar dalam Periode 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel II.31.
Angka usia harapan hidup Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka usia harapan hidup	74,67	74,71	74,96	75,15	75,33

Sumber: BPS Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan Berdasarkan tabel II.33 di atas, menunjukkan bahwa perhitungan pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) dalam periode 2020–2024 mengalami peningkatan setiap tahun dimana pada 2020 sebesar 72,09% meningkat menjadi 72,78% hingga pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar senantiasa memberikan kontribusi dalam komponen Indeks Pembangunan Manusia seperti pembangunan di bidang Kesehatan melalui program pelayanan Kesehatan termasuk perhatian pemerintah terhadap program pembinaan kesehatan olahraga khususnya bagi lansia pada program upaya kesehatan masyarakat, serta program kegiatan pengendalian penyakit tidak menular (PPTM) pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Persentase balita gizi buruk

Tabel II.32.
Persentase balita gizi buruk
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Balita gizi buruk	1445	1276	988	249	911
2	Jumlah Balita	90.129	129.283	73.720	87.165	7.550
3	Persentase balita gizi buruk (1/2 x 100)	1,60	0,99	1,34	0,29	12.07

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Body Mass Index (BMI) atau yang dikenal dengan Index Berat Badan adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penilaian status gizi Balita. Untuk memperoleh nilai BMI dilakukan dengan pengukuran tubuh(BB, TB) atau anthropometri untuk dibandingkan dengan umur, misalnya : BB/U atau gka yang paling sering digunakan adalah indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Adapun hasil perhitungan yang diperoleh dikategorikan ke dalam 4 kelompok yaitu : gizi lebih (z-score > +2 SD); gizi baik (z-score –2 SD sampai +2 SD); gizi kurang (z-score < -2 SD sampai –3 SD); dan gizi buruk (z- score < -3SD).

Berdasarkan tabel II.34 di atas menunjukkan bahwa Persentase balita gizi buruk di Kota Makassar sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan grafik yang fluktuatif. Pada tahun 2024 meningkat, hal ini disebabkan karena pada beberapa kasus, masih ditemukan adanya balita dengan status gizi buruk yang merupakan warga pendatang atau bukan penduduk asli Makassar, mereka merupakan penduduk musiman yang orang tuanya bekerja sementara di Makassar seperti tukang atau buruh bangunan, sehingga balitanya ikut diukur status gizinya dan tercatat dalam pelaporan.

Presentase balita gizi kurang

Tabel II.33.
Presentase balita gizi kurang Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Balita gizi kurang	5811	4240	4157	1591	7.550

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Balita	90.129	129.283	73720	87.165	7.550
3	Persentase balita gizi kurang (1/2 x 100)	6,45	3,28	5,64	1,83	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Gizi pada balita terutama diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Kurang terpenuhinya gizi pada anak akan menghambat sintesis protein DNA sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan sel otak yang selanjutnya akan menghambat perkembangan otak.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Prevalensi balita gizi kurang di Kota Makassar pada tahun 2020 s.d 2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Prevalensi terendah adalah pada tahun 2023 (1,83%) sedangkan prevalensi tertinggi terjadi pada tahun 2024 (100%).

Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

Tabel II.34.
Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa/Kelurahan siaga aktif	153	153	153	153	153
2	Jumlah desa/Kelurahan siaga	153	153	153	153	153
3	Cakupan desa siaga aktif (1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua Kelurahan di Kota Makassar Tahun 2020 sampai 2024 jumlah kelurahan menjadi 153 dan semuanya masuk kelurahan siaga aktif. Kelurahan siaga merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). UKBM yang ada di Kelurahan menjadi ciri khas bahwa kelurahan tersebut telah menjadi Kelurahan Siaga Aktif, dimana penduduk Kelurahan tersebut dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM serta melaksanakan surveilans berbasis masyarakat. Seluruh Kelurahan di Kota Makassar telah terbentuk Forum Kelurahan Siaga dengan kegiatan utamanya yakni Pembinaan Model Operasional Desa Siaga (MODS).

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs). Sedangkan Keluarga Sejahtera I (KSI) yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga. Pemaknaan batasan Pengertian tersebut di Gunakan oleh Kementerian BKKBN RI atau Dinas/Badan yang ada di Provinsi atau Kab/Kota yang ada di daerah yang bertugas dalam melakukan Pengendalian Penduduk dan KB yang senantiasa melakukan pemutakhiran data dengan menggunakan 21 Indikator keluarga sejahtera yang digunakan dalam mendata. Adapun Data Keluarga Pra

Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel II.35.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	90.943	17.146	17.146	17.146	17.146
2	Jumlah keluarga	285.417	275.362	282.167	282.167	282.167
3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (1/2 x 100)	31,86	6,23	6,08	6,08	6,08

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar, tahun 2025

Capaian Pendataan Keluarga (PK) 2022 yang tersedia di aplikasi BKKBN Pusat adalah data Keluarga Prasejahtera sedangkan Data untuk sejahtera 1 sudah tidak tersedia, sehingga untuk capaian tahun 2023 hanya menggunakan data prasejahtera sebanyak 17.146 Keluarga, dimana tahun 2023 capaian sebesar 6,07% atau menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 6,23% atau terjadi penurunan sebesar 0,16%.

Pada Tahun 2023 Capaian Pendapatan Keluarga (PK), tentang data Keluarga Prasejahtera dan keluarga Sejahtera I Kota makassar sudah ditiadakan dan digantikan dengan program Resiko Stanting dan Tidak Berisiko Stanting.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Tabel II.36.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,66	78,96	80,37	88,03	
1.1	IKM Urusan Wajib – Pelayanan Dasar	77,50	79,49	80,47	-	-
1.2	IKM Urusan Wajib – Non Pelayanan Dasar	77,342	78,99	80,37	-	-
1.3	IKM Urusan Pilihan	77,763	78,92	80,40	-	-
1.4	IKM Urusan Pendukung	79,12	79,51	80,15	-	-
1.5	IKM Urusan Penunjang	78,14	80,00	80,69	-	-
1.6	IKM Urusan Pemerintahan	77,66	78,99	80,34	-	-
1.7	IKM Urusan Pengawasan	78,8	80,19	80,88	-	-

Sumber : Laporan Akhir Survey IKM, tahun 2023

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung berdasarkan urusan. Pada tahun 2023 IKM mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 88,03 yang artinya bahwa responden merasa puas terhadapan pelayanan yang diberikan oleh SKPD. Sedangkan untuk nilai.

Persentase PAD terhadap Pendapatan

Tabel II.37.
Persentase PAD terhadap pendapatan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAD	1.078.328.561.269,15	1.140.328.483.697,93	1.387.904.746.600,23	1.568.234.972.336,92	1,605,016,943,364.19
2	Jumlah pendapatan daerah	3.323.662.286.602,28	3.286.048.497.393,93	3.587.333.929.542,50	4.049.344.772.471,05	4,204,813,238,565.19
3	Persentase PAD terhadap pendapatan (1/2 x 100)	32,44	34,70	38,69	38,73	38.17

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Tren persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kota Makassar menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Secara umum, semakin tinggi persentase pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Menurut Mahmudi (2007), kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dikategorikan ***sangat baik*** jika nilai rasio kemandiriannya di atas 50%, ***baik*** jika nilai rasio 40-50%, ***cukup*** jika nilai rasio 30-40%, ***sedang*** jika nilai rasio 20-30%, ***kurang*** jika nilai rasio 10-20% dan ***sangat kurang*** jika nilai rasionya antara 0-10%.

Berdasarkan tabel di atas, dari sisi pencapaian PAD, terlihat adanya pertumbuhan yang konsisten dan signifikan dari Rp 1,078 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 1,605 triliun di tahun 2024. Tren positif ini mengindikasikan keberhasilan strategi penggalian potensi pendapatan daerah yang telah diimplementasikan. Peningkatan total pendapatan daerah dari Rp 3,323 triliun (2020) menjadi Rp 4,204 triliun (2024) memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk perencanaan program pembangunan. Hal ini memungkinkan untuk merencanakan proyek-proyek strategis jangka panjang dengan skala yang lebih besar.

Rasio PAD terhadap total pendapatan yang meningkat dari 32,44% menjadi 38,17% menunjukkan penguatan kemandirian fiskal. Namun, masih terdapat ruang untuk optimalisasi PAD mengingat proporsinya yang masih di bawah 50%. Ini menjadi catatan penting dalam perencanaan strategi peningkatan PAD ke depan.

Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan pendapatan serta potensi-potensi pendapatan daerah, Pemerintah Kota Makassar masih dapat memaksimalkan pendapatan antara lain dengan cara :

1) Mengoptimalkan pendataan wajib pajak dengan cara pemanfaatan digitalisasi;
2) Mendorong inovasi proses pengelolaan dan pemungutan PAD serta perbaikan struktur Pendapatan Daerah dalam pemanfaatan potensi PDRB, Perusda dan sumber- sumber pendapatan potensial lainnya;
3) Perlunya penyusunan roadmap peningkatan PAD dengan target spesifik;

Mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian pengelolaan PDRB dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan dan akuntabilitas pemungutan

Pendapatan Asli Daerah.

Opini BPK terhadap laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK yang merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah dengan hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang "Tingkat Kewajaran Informasi" yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. BPK dalam memberikan opini mendasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Aturan tersebut menganut basis *Cash towards Accrual*, dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana diakui dengan basis akrual, sedangkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan menggunakan basis kas. Terdapat empat jenis opini BPK yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*) (TMP). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel II.38.
Opini BPK Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa ditahun 2020, opini BPK terhadap laporan keuangan daerah adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian), yang menunjukkan adanya beberapa catatan atau pengecualian dalam laporan keuangan tersebut. Pada tahun 2022, target kinerja adalah mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Realisasi pada tahun tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu opini WTP, dengan capaian 100%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Target kinerja yang ditetapkan adalah WTP, dan realisasi pada kedua tahun tersebut juga mencapai opini WTP dengan capaian 100%.

Penguatan Cadangan Pangan

Tabel II.39.
Penguatan Cadangan Pangan Kota Makassar
Tahun 2019 s.d 2023

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cadangan pangan kabupaten/ kota (ton)	3	3	22	37	20
2	Penguatan cadangan pangan 1/2 x 100	3	3	22	47	20

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, tahun 2025

Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak

harga. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Makassar dimaksudkan untuk mendorong tersedianya cadangan pangan daerah tingkat kota dalam menghadapi keadaan darurat serta melindungi petani/produsen pangan strategis dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

Berdasarkan data cadangan pangan, pada tahun 2020 hingga 2021, jumlah cadangan pangan berada pada level yang relatif rendah yaitu 3 ton. Rendahnya cadangan pangan di tahun 2020-2021 (3 ton) menunjukkan kerentanan sistem ketahanan pangan pada periode tersebut. Memasuki tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan dimana cadangan pangan meningkat menjadi 22 ton, menunjukkan adanya upaya pemerintah Kota Makassar dalam penguatan sistem ketahanan pangan. Selanjutnya di Tahun 2023 jumlah cadangan pangan berada di angka 37ton yang menunjukkan pencapaian tertinggi. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program penguatan cadangan pangan.

Namun pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 20 ton. Fluktuasi yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kendala infrastruktur penyimpanan, masalah dalam rantai pasok, atau mungkin perubahan kebijakan yang mempengaruhi manajemen cadangan pangan. Fluktuasi dalam jumlah cadangan pangan dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghadapi potensi krisis pangan atau situasi darurat. Untuk itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, termasuk kajian tentang kapasitas penyimpanan, efektivitas distribusi, dan kebijakan pengelolaan cadangan pangan secara keseluruhan.

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Tabel II.40.
Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Makassar
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Penanganan kerawanan pangan	29,41%	75%	23.52 %	17,64%	11,76%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, tahun 2025

Tahun 2020 cakupan penanganan kerawanan pangan sebesar 29,41% hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ada 17 kelurahan yang teridentifikasi kelurahan rawan pangan dan 5 kelurahan telah di intervensi yang tersebar di 15 kecamatan dalam beberapa kegiatan intevensi yaitu kegiatan P2KP , KRPL, pembinaan pangan produktif pada lahan pekarangan, dan sosialisasi pangan lokal LCM/B2SA.

Tahun 2021 realisasi 75%, ada 10 kelurahan yang teridentifikasi kelurahan rawan pangan yaitu Kel. Kodingareng, Kel. Barranglompo, Kel. Barrangcaddi, Kel. Kapasa, Kel. Lakkang, Kel. Sudiang, Kel. Barombong, Kel. Cambaya, Kel. Paccerakkang, dan Kel. Untia. Jadi Kelurahan rawan pangan sampai saat ini yang telah teridentifikasi yaitu 20 kelurahan rawan pangan dan 15 kelurahan yang telah di intervensi. Kegiatan intervensi berupa kegitan P2L, pembinaan pangan produktif pada lahan pekarangan, penganekaragaman pangan berbahan baku lokal.

Tahun 2022 Berdasarkan hasil analisis data ketahanan pangan komposit tahun 2022 di 153 Kelurahan yang berada di 15 Kecamatan, menunjukkan bahwa terdapat 1 (0,56%) Kelurahan yang terindikasi prioritas 1 atau terindikasi sangat rentan terhadap kerawanan pangan, 7 (4,58%) Kelurahan di 5 Kecamatan yang terindikasi prioritas 2 atau terindikasi rentan terhadap kerawanan pangan, 8 (5,23%) Kelurahan yang

tersebar di 6 Kecamatan terindikasi prioritas 3 atau Kelurahan terindikasi agak rentan terhadap kerawanan pangan, 22 (14,38%) Kelurahan di 10 Kecamatan terindikasi prioritas 4 atau Kelurahan agak tahan terhadap kerawanan pangan, 49 (32,03%) Kelurahan di 14 Kecamatan yang terindikasi prioritas 5 atau terindikasi tahan terhadap kerawanan pangan, dan 66 (43,14%) Kelurahan yang tersebar di 13 Kecamatan terindikasi masuk kedalam prioritas 6 atau Kelurahan yang sangat tahan terhadap kerawanan pangan.

Tahun 2023 distribusi dan cadangan pangan melalui program penanganan kerawanan pangan dengan target tahun 2023 yaitu 17,64 % dan realisasi 17,64 %. pencapaian kinerja tersebut telah dilakukan dengan pendekatan intervensi kepada KWT/KT yang berada di lorong wisata yang masuk ke dalam daerah rawan pangan. Dengan kegiatan optimalisasi pekarangan untuk ketahanan pangan maka kebutuhan rumah tangga terhadap ketersediaan pangan dapat tercapai gizi keluarga sehinggga kesehatan masyarakat dapat tercapai. Dengan aktivitas KWT/KT mampu berperan dalam mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Tahun 2024 penanganan kerawanan pangan tahun 2024 adalah 11,76% atau sebanyak 2 kelurahan dari 17 kelurahan. Pencapaian kinerja tersebut telah dilakukan dengan pendekatan intervensi kepada KWT/KT yang berada di lorong wisata yang masuk ke dalam daerah rawan pangan. Dengan kegiatan optimalisasi pekarangan untuk ketahanan pangan maka kebutuhan rumah tangga terhadap ketersediaan pangan dapat tercapai gizi keluarga sehinggga kesehatan masyarakat dapat tercapai. Dengan aktivitas KWT/KT mampu berperan dalam mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Adapun bentuk intervensi yang telah dilakukan dinas ketahanan pangan tahun 2024 yaitu peningkatan penyediaan pangan yang berada di lorong wisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan yang berbasis sumberdaya lokal. Selain itu terdapat bantuan bahan pangan pokok berupa intervensi pembagian cadangan pangan beras yang bersumber dari Penganggaran APBN oleh Badan Pangan Nasional melalui distribusi Cadangan Pangan Pemerintah Pusat untuk masyarakat Miskin berdasarkan data DTKS.

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola Pangan Harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi serta kebutuhan dan penyediaan pangan suatu wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi.

Saat ini skor PPH telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja di bidang ketahanan pangan yang tercantum dalam RPJMN. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan, dan gizi seimbang dengan indikator Pola Pangan Harapan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan

mencapai 100, maka wilayah tersebut dikategorikan tahan pangan. Skor PPH Kota Makassar dalam lima tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel II.41.
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan	78,80	83,60	84,13	85,2	89,73

Sumber : Dinas Ketahanan pangan Kota Makassar, tahun 2025

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keseimbangan dan keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Skor PPH mencerminkan seberapa baik pola konsumsi pangan masyarakat dibandingkan dengan pola konsumsi ideal yang dianjurkan.

Di tahun 2020, Skor pola pangan harapan skor PPH berada di angka 78,80. Penyebabnya dikarenakan terbatasnya kegiatan diversifikasi pangan, daya beli masyarakat yang menurun dikarenakan pandemi dan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pola konsumsi beragam gizi seimbang sehat dana aman.

Hasil pengolahan skor PPH Tahun 2022 sebesar 84,13. Kelompok yang belum mencapai skor maksimal adalah kelompok bahan pangan padi-padian, umbi-umbian, sayuran dan buah. Kelompok pangan yang juga mengalami penurunan skor PPH kelompok sayuran dan buah-buah, penurunan tersebut disebabkan juga oleh penurunan ketersediaan dalam hal ini jumlah impornya yang mengalami penurunan.

Tahun 2023, Skor PPH terealisasi sebesar 85,2. Hasil di atas didapatkan berdasarkan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner pada responden berdasarkan karakteristik wilayahnya, yaitu kecamatan yang mewakili wilayah pertanian, perikanan dan wilayah lainnya. Perhitungan PPH berdasarkan Data Susenas.

Tahun 2024, Pemerintah Kota Makassar tahun 2024 telah melampaui target skor pola pangan harapan 2024 pada skor 89,73. Walaupun secara nasional masih sedikit lebih rendah. Angka Kecukupan Energi (AKE) kota Makassar mencapai 2.041 Kkal/kapita/hari yang masih lebih rendah dari target nasional. Namun hal ini menandakan ketahanan pangan penduduk kota Makassar berada pada level keberagaman atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi dan budaya.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Tabel II.42.
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	123.103.963.805	238.856.855.161	146.655.604.955	105.923.451.080	115.240.000.000
2	Jumlah PDRB (Miliar Rupiah)	178.332,99	190.318,07	208.935,79	226.902,79	243.062,72

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (1/2 x 100) (persen)	0.069	0,125	0,070	0,046	0,047

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

PDRB sektor pertanian sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, namun secara kumulatif mengalami penurunan. Peningkatan disebabkan oleh meningkatnya produktivitas pertanaman, sedangkan penurunan disebabkan oleh konversi lahan sawah menjadi penggunaan non sawah. Pada tahun 2020, kontribusi dari sektor pertanian/perkebunan sebesar 0,069%, lalu mengalami peningkatan menjadi 0,125% di tahun 2021. Namun, setelah itu kontribusinya menurun, menjadi 0,070% pada 2022, lalu semakin turun menjadi 0,046% di 2023, dan hanya sedikit naik menjadi 0,047% pada 2024. Meskipun nilai nominal PDRB sektor ini masih besar, tren penurunan persentase menunjukkan bahwa sektor pertanian/perkebunan semakin kecil kontribusinya terhadap total PDRB Makassar. Hal ini dapat mencerminkan adanya pergeseran struktur ekonomi kota ke sektor-sektor lain yang lebih dominan seperti jasa, perdagangan, atau industri..

Kontribusi PDRB pertanian terhadap PDRB Kota Makassar sepanjang tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan, sebagai konsekuensi dari meningkatnya sektor jasa dan manufaktur. Hal ini menyebabkan angka kontribusi PDRB pertanian terhadap kota mengecil. Hal ini juga dapat dipahami, karena olahan lanjutan pertanian sudah tidak lagi dihitung sebagai kontribusi sektor pertanian, melainkan bergeser menjadi kontribusi sektor jasa, terutama perhotelan, restoran dan industri yang sebagiannya berasal dari turunan produk pertanian. Meski demikian pada tahun 2021 dan 2022, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota meningkat, hal ini disebabkan masih lambannya pergerakan sektor lain akibat pembatasan aktivitas warga sebagai efek pandemi covid19, sehingga meningkatkan nilai kontribusi sektor pertanian.

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Tabel II.43.
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap
PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Kota Makassar

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	PDRB sektor Pertanian (palawija)	4,962	4,763	5,197	2,886	4.107
2	Jumlah PDRB Pertanian/perkebunan	157,306	238,856	146,655	105.923	115.240
3	Kontribusi sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB (1/2x100%)	3,15	1,99	3,54	2,57	3,56

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi sub sektor palawija terhadap PDRB pertanian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sepanjang tahun 2020-2024.

Fluktuasi ini disebabkan oleh pilihan komoditi petani setelah pertanaman padi, sebagian petani memilih padi sebagai tanaman, sebagian memilih palawija dan sebagian lainnya memilih tanaman hortikultura. Pada tahun 2020 kontribusi palawija adalah sebesar 3,15% berkurang menjadi 1,99% pada tahun 2021, pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,54%, kemudian berkurang di tahun 2023 menjadi 2,57% dan kembali meningkat menjadi 3,56% pada tahun 2024. Pada tahun 2021 kontribusi palawija mengalami penurunan menjadi 1,99%, hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas panen palawija, pada tahun 2021 sebesar 90,6 hektar dan juga karena meningkatnya kontribusi sektor non palawija pada sektor pertanian. Pada tahun 2022 kontribusi palawija mengalami peningkatan kontribusi, hal ini karena meningkatnya produksi jagung dan ubi kayu dibandingkan pada tahun 2021. Demikian pula peningkatan pada tahun 2024 disebabkan oleh peningkatan produksi jagung dan ubi kayu.

Produksi sektor pertanian

Tabel II.44.
Produksi Sektor Pertanian Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah produksi komoditas pertanian (ton)	24.845,87	27.990,50	21.897,00	17.962,55	17.166,00

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah produksi komoditas utama pertanian sepanjang tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Tercatat sepanjang 2021-2024 produksi terus mengalami penurunan. Berdasarkan pemutakhiran data luas baku sawah pada tahun 2020 adalah 2035 hektar (BPS, 2020) yang sebelumnya adalah 2636 hektar. Pada tahun 2023 luas lahan sawah di Kota Makassar tersisia 1463 hektar berdasarkan data ATR BPN. Adapun peningkatan yang terjadi di awal periode, 2020-2021 adalah terutama disebabkan oleh intensitas pengelolaan lahan selama masa pandemi yang masih berdampak hingga awal tahun 2021, produksi pada tahun 2021 adalah 27.990 ton meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 24.845 ton. Setelah itu selanjutnya berturut-turut menjadi 21.897 ton, 17.962 ton dan 17.166 ton sepanjang 2022, 2023 dan 2024.

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Tabel II.45.
Kontribusi produksi kelompok pertanian terhadap PDRB
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok pertanian (Ton)	20.344	19.344	19.241	16.173	15.614
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (Ton)	20.364	19.350	19.241	16.173	15.614
3	Persentase PDRB kelompok pertanian (1 / 2 x 100)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, tahun 2025

Tabel tersebut menunjukkan kontribusi produksi kelompok petani terhadap

produksi padi atau bahan pangan utama di Kota Makassar selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah produksi kelompok petani hampir identik dengan total produksi daerah setiap tahunnya, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh produksi padi di Kota Makassar berasal dari kelompok petani lokal. Meskipun volume produksi mengalami penurunan dari 20.344 ton pada tahun 2020 menjadi 15.614 ton pada tahun 2024, kontribusi kelompok petani terhadap produksi daerah tetap konsisten di angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan produksi terjadi secara merata di semua lapisan, tanpa perubahan peran kelompok petani dalam keseluruhan produksi.

II.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

II.1.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel II.46.
Pendidikan Anak Usia Dini
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	26.566	20.569	23.508	26.128	26.238
2	Jumlah anak 4 – 6 Tahun	52.847	66.845	66.073	66.167	76.517
3	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) (1/2 x 100)	50.27	30.77	35.58	39.49	34,29

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah peserta didik pada jenjang PAUD di Kota Makassar pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020, ini disebabkan karena pandemi covid-19 sehingga diberlakukan pembelajaran jarak jauh. Pada tahun 2023 persentase anak usia 4-6 tahun yang bersekolah pada jenjang PAUD mengalami peningkatan mencapai 39,49%, sedangkan tahun 2024 persentase anak usia 4-6 tahun yang bersekolah pada jenjang PAUD mengalami penurunan diangka 34,29% ini dapat disebabkan oleh beberapa factor seperti Keterbatasan Akses: Ketersediaan dan aksesibilitas PAUD yang tidak merata di seluruh wilayah, selain itu juga Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD dalam perkembangan anak, serta factor ekonomi, seperti

biaya pendidikan yang terlalu tinggi, sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, Data jumlah siswa, jumlah anak 4-6 tahun, serta persentase anak yang bersekolah di PAUD di Kota Makassar untuk tahun 2020 s.d 2024 secara rinci dilihat pada Tabel II.49.

Angka partisipasi kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa semua usia yang sedang bersekolah pada jenjang Pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang Pendidikan tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Adapun APK Kota Makassar pada jenjang SD/MI dan SMP/MTS periode tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel II.47.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022*	2023	2024
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A	149.218	144.992	146.488	147.528	147.300
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	144.114	146.931	143.197	139.830	158.233
	APK SD/MI	103.54	98.68	102.30	105.51	93,09
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B	72.781	70.945	69.668	68.836	69.349
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	77.615	79.363	77.785	75.769	80.335
	APK SMP/MTs	93.77	89.39	89.56	90.85	86,32

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Berdasarkan tabel II.49 diatas menunjukkan bahwa Pada tahun 2023, APK pada jenjang SD/MI sebesar 105,51%, APK pada jenjang SMP/MTs sebesar 90,85% dan tahun 2024, APK pada jenjang SD/MI sebesar 93,09%, APK pada jenjang SMP/MTs sebesar 86,32% Untuk lebih jelasnya informasi jumlah siswa dan penduduk kelompok usia 7-12 dan 13-15 tahun, serta persentase APK masing-masing jenjang pendidikan di Kota Makassar untuk tahun 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel di atas.

Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka Pendidikan yang ditamatkan merupakan persentase jumlah penduduk baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi menurut Pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Angka Pendidikan yang Ditamatkan digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas Pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya sebagai bahan analisis pasar kerja. Nilai angka tamat berkisar 0-100. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh Sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel II.48.
Angka Pendidikan yang ditamatkan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	11,61	13,65	12,66	13,09	13.47
2	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	20,91	20,57	18,4	19,85	20.74

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Angka Pendidikan yang ditamatkan digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya sebagai bahan analisis pasar kerja.

Nilai angka tamat berkisar antara 0-100. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan tabel II.51 di atas menunjukkan bahwa Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A Kota Makassar pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu sebesar 0,38% menjadi 13,47%, sementara Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B mengalami peningkatan sebesar 0.89% menjadi 20.74%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Makassar lebih banyak yang bersekolah sampai jenjang SMP daripada jenjang SD.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni di Kota Makassar untuk SD/MI mengalami penurunan dimulai dari tahun 2018 sampai pada tahun 2023 hingga APM di tahun 2023 naik sebesar 98,06% kemudian pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena banyaknya peserta didik yang bersekolah tidak sesuai dengan umur, upaya pemerintah Kota Makassar untuk menuntaskan program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun dan menuju program wajib belajar 12 tahun. Untuk APM SMP/MTS juga mengalami fluktuasi penurunan di tahun 2018 hingga tahun 2021 dan Kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 hingga tahun 2023 mencapai 79,51%. Gambaran mengenai APM di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.49.
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	139.490	132.160	132.332	137.124	142.293
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	144.114	146.931	143.197	139.830	158.233
	APM SD/MI	96.79	89,95	92,41	98.06	85.36
2.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	62.299	56.543	56.052	60.243	59.436
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	77.615	79.363	77.785	75.769	80.335
	APM SMP/MTs	80.27	71,25	72,06	79.51	73.99

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang Pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat Pendidikan tertentu.

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni untuk jenjang Pendidikan SD/MI (umur 7-12 tahun) di Kota Makassar mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Pada tahun 2024, sebesar 85,36% penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD. APM untuk jenjang SMP/MTs/Paket B, juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024, jumlah total penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 80.335 orang, yang bersekolah di jenjang SMP/MTs/Paket B adalah 59.436 orang atau 73.99%. Untuk lebih jelasnya, informasi jumlah siswa dan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, serta persentase APM di Kota Makassar untuk masing-masing jenjang Pendidikan pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di atas.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Tabel II.50.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Paket A					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	139.490	132.160	132.332	37.124	135.064
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	144.114	146.931	143.197	139.830	158.233
1.3.	APM SD/MI	96,79	89,95	92,41	98,06	85,36

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Tabel II.51.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	62.299	54356.	56.052	60.243	59.436
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	77.615	79.363	77.785	75.769	80.335
2.3.	APM SMP/MTs	80,27	71,25	72,06	79,51	73,99

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Angka partisipasi sekolah

Salah satu indikator kemajuan Pendidikan suatu daerah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses Pendidikan secara umum. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap Lembaga Pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas Pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Data jumlah siswa, jumlah penduduk kelompok usia serta persentase APS di Kota Makassar menurut jenjang Pendidikan pada tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.52.
Angka Partisipasi Sekolah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	jumlah siswa usia 7 – 12 tahun	140.994	144.803	144.049	143.394	142.293
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	144.114	146.931	143.197	139.830	158.233
	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (1.1/1.2 x 1000)	978.35	985,52	1005,95	1025,5	899,26

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.	jumlah siswa usia 13-15 tahun	72.451	72.327	69.327	75.721	76.621
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	77.615	79.363	77.785	75.769	80.335
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (2.1/2.2 x 1000)	933.47	911.34	891,26	99,94	949,29

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pada tahun 2024 APS penduduk usia 7-12 tahun di Kota Makassar sebesar 158.233. Pada periode 2020 s.d 2024, APS jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2023 sebesar 949,29. Tingginya APS SD dan SMP salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya siswa yang berasal dari luar Makassar yang bersekolah di Kota Makassar.

Data jumlah siswa, jumlah penduduk kelompok usia, serta APS di Kota Makassar menurut jenjang pendidikan pada tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel diatas.

Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Tabel II.53.
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Paket A					
1.1.	jumlah siswa usia 7 – 12 tahun	140.994	144.705	144.049	143.394	142.293
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	144.114	146.931	143.197	139.830	158.233
1.3.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (1.1/1.2 x 1000)	978.35	984.85	1005,95	1025,5	899,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Salah satu indikator kemajuan pendidikan suatu daerah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pada tahun 2024 APS penduduk usia 7-12 tahun di Kota Makassar sebesar 158.233. Tingginya APS SD salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya siswa yang berasal dari luar Makassar yang bersekolah di Kota Makassar. Data jumlah siswa, jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun, serta APS SD/MI di Kota Makassar pada tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel diatas.

Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Tabel II.54.
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No.	SMP/MTs/Paket B	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.	jumlah siswa usia 13-15 tahun	72.451	72.327	69.327	75.721	76.261
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	77.615	79.363	77.785	75.769	80.335
2.3.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (2.1/2.2 x 1000)	933.47	911.34	891,26	99,94	949,29

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 APS penduduk usia 13-15 tahun di Kota Makassar sebesar 80.335. Secara rinci Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B dapat dilihat pada tabel di atas.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs

Tabel II.55.
Angka Putus Sekolah (APS) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Paket A					
1.1.	jumlah capaian kinerja APS SD/MI	639	623	192	2018	873
1.2.	jumlah seluruh APS SD/MI	149.274	144.876	146.488	147.528	147.300
1.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (1.1/1.2 x 100)	0.43	0.43	0.13	1.37	0,59
2	SMP/MTs/Paket B					
2.1.	Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs	898	897	359	3327	2.289
2.2.	Jumlah seluruh APS SMP/MTS	73.057	70.945	69.668	68.836	69.349
2.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (1.1/1.2 x 100)	1.23	1.26	0.52	4.83	3,30

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Angka Putus Sekolah (APS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Berdasarkan tabel II.58 di atas menunjukkan bahwa APS pada jenjang pendidikan SD/Mi/Paket A di Kota Makassar pada tahun 2024 sebesar 0,59%, pada jenjang SMP/MTs/Paket B nilai APS sebesar 3,30%. Data jumlah capaian kinerja APS, jumlah seluruh APS dan angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan di Kota Makassar sejak tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel di atas. Data APS pada tahun 2023 dan 2024 diambil dari website pd.data.kemdikbud.go.id/ATS sehingga terjadi perbedaan yang cukup jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang

datanya bersumber dari kelurahan.

Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

Tabel II.56.
Angka Kelulusan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Paket A					
1.1.	jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	25.150	23.795	22.406	22.836	23.924
1.2.	jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI	25.150	23.795	22.406	22.836	23.924
1.3.	Angka Kelulusan SD/MI (1.1/1.2 x 100)	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs/Paket B					
2.1.	jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	23.349	23.193	21.672	22.924	22.044
2.2.	jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs	23.349	23.193	21.672	22.924	22.044
2.3.	Angka Kelulusan SMP/MTs (2.1 / 2.3 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Data tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Kelulusan Kota Makassar untuk tingkat SD sederajat mencapai 100% dalam lima tahun terakhir yang artinya seluruh siswa SD/MI yang masuk sekolah dasar, dapat menamatkan pendidikannya. Untuk SMP sederajat, Pada tabel di atas dapat dilihat angka kelulusan tahun 2024 sebesar 100%, Ujian Nasional jenjang SMP/MTs pada tahun 2020 sampai dengan 2024 100% menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Kelulusan untuk tingkat SMP pada tahun 2024 mencapai 100%. Pada tahun 2023 Ujian nasional ditiadakan sehingga masing-masing sekolah menyelenggaran ujian sekolah secara mandiri.

Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs

Tabel II.57.
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTS ke SMA/MA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Paket A					
1.1.	Jumlah siswa baru pada tingkat I pada jenjang SMP/MTs	24.611	22.150	22.479	23.966	22.634
1.2.	jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	25.150	23.795	22.406	22.836	23.924
1.3.	Angka Kelulusan SD/MI ke SMP/MTs (1.1/1.2 x 100)	97.86	93.09	100.33	104,95	94,61
2	SMP/MTs/Paket B					

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.	Jumlah siswa baru pada tingkat I pada jenjang SMA/SMK	24.210	23.810	21.557	23.983	22.525
2.2.	jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	23.349	23.193	21.672	22.924	22.044
2.3.	Angka Kelulusan SMP/MTs ke SMA/MA (2.1 / 2.3 x 100)	103.69	102.66	92.10	104.62	102,18

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan tabel II.60 di atas dapat dilhat Angka melanjutkan sekolah di Kota Makassar pada tahun 2024 untuk SD/MI ke SMP/MTs 94,61%. Pada tahun 2024 siswa dari luar Kota Makassar yang bersekolah di SMP/MTs yang berada di Kota Makassar berkurang di bandingkan dengan 3 - 4 tahun sebelumnya. Sedangkan untuk peserta didik yang melanjutkan pendidikannya dari jenjang pendidikan Menengah Pertama ke Menengah Atas mencapai angka 102,18% di tahun 2024, salah satu faktor yang mempengaruhi capaian ini adalah seperti dengan tahun lalu banyaknya lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah Tahfidz yang Sebagian diantaranya belum terdaftar di Dinas Pendidikan maupun di Departemen Agama.

Sekolah SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Tabel II.58.
Sekolah SD/MI dan SMP/MTs kondisi
bangunan baik Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Paket A					
1.1.	Jumlah sekolah SD/MI Kondisi bangunan baik	492	494	501	527	-
1.2.	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	529	528	544	543	547
1.3.	Persentase sekolah SD/MI kondisi bangunan baik (1.1/1.2 x 100)	93.01	93.56	92,10	97,05	-
2	SMP/MTs/Paket B					
2.1.	Jumlah sekolah SMP/MTs Kondisi bangunan baik	257	262	259	268	-
2.2.	Jumlah seluruh sekolah SMP/Mi	276	280	281	274	280
2.3.	Persentase sekolah SD/MI kondisi bangunan baik (2.1/2.2 x 100)	93.12	93.57	92,17	97,81	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Kondisi sarana pendidikan yang baik dan memadai sangat mempengaruhi penyelenggaraan proses belajar mengajar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. Pada tabel II.61 di atas Kondisi bangunan sekolah di Kota Makassar yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2023 mencapai 97,05% untuk SD/Mi dan SMP/MTs 97,81%. Angka ini sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan agar kualitas proses belajar mengajar dapat berkualitas.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

Tabel II.59.
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
	SD/MI					
1.	Jumlah sekolah (SD/MI + SMP/MTs	805	808	825	817	827
2.	Jumlah penduduk usia (7 s/d 12) thn + (13 s/d 15) thn	221.729	226.294	220.982	215.599	238.568
3.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (1/2 x 10.000)	36.31	35.71	37.33	37,89	34,67

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Tabel II.61 di atas menunjukkan bahwa Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah (7 s/d 12 Tahun) untuk Pendidikan Dasar di Kota Makassar mencapai 34,67 sekolah untuk 10.000 siswa usia 7 s/d 15 atau dengan kata lain satu sekolah untuk melayani 264 siswa (238.568/827). Angka ini masih harus ditingkatkan karena ketersediaan sekolah belum cukup memadai yakni angka ideal yakni SD/Mi, 60 sekolah untuk 10.000 siswa usia 7 s/d 12 tahun dan 35 sekolah untuk 10.000 siswa usia 13 s/d 15 tahun.

Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar

Tabel II.60.
Rasio Ketersediaan Guru/Murid Pendidikan Dasar
Kota Makassar Tahun 2019 s.d 2023

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
	SD/MI					
1.	Jumlah guru (SD/MI + SMP/MTs)	11.989	11.685	10.887	11.031	-
2.	Jumlah murid (SD/MI + SMP/MTs)	222.331	215.821	216.156	216.364	216.649
3.	Rasio Guru/Murid pendidikan dasar (1 / 2 x 10.000)	539.24	541.42	503.66	509,84	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Rasio guru-murid adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan. Indikator ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Tabel II.62 di atas dapat kita ketahui bahwa Sejak 2020 s.d 2024, rasio guru murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Makassar telah mengalami peningkatan. Tingginya rasio guru murid ini disebabkan karena banyaknya tenaga pendidik honorer, kontrak maupun guru tetap Yayasan. Tingginya rasio guru murid ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di bangku SD/MI sehingga mutu pengajaran cenderung semakin meningkat. Tahun 2023 rasio guru Pendidikan Dasar menunjukkan angka 510 orang per 10.000 murid, atau dengan kata lain satu orang guru berbanding 20 orang murid, angka ini sudah sesuai standar nasional yaitu satu guru untuk melayani 20 orang murid untuk Pendidikan Dasar.

Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar

Tabel II.61.
Rasio ketersediaan guru/murid pendidikan dasar
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah guru (SD/MI + SMP/MTs)	11.989	11.685	10.887	11.031	-
2.	Jumlah murid (SD/MI+SMP/MTs)	222.331	215.821	216.156	216.364	216.649
3.	Rasio Guru/Murid pendidikan dasar (1 / 2 x 10.000)	539.24	541.42	503.66	509,84	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran.

Tabel II.63 di atas menunjukkan bahwa Rasio guru/murid Pendidikan Dasar di Kota Makassar mengalami fluktuasi dimana tahun 2023 rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs adalah setiap 10.000 murid dilayani oleh 510 guru atau rata-rata 20 murid untuk setiap guru.

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar

Tabel II.62.
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan
sekolah dasar Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Banyaknya lulusan SD/MI/Paket A	24.852	23.795	22.406	22.836	23.924
2.	Banyaknya penduduk usia 12 th	23.046	26.526	25.718	24.672	26.576
3.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (1/2 x 100)	107.84	89.70	87.12	92,56	90,02

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/Mi mencerminkan peserta didik terus bersekolah sampai menamatkan pendidikannya. Data menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir peserta didik SD/Mi yang berhasil menamatkan sekolah sudah melampaui angka 100%. Ini menunjukkan bahwa lulusan SD/Mi/Paket A sudah lebih

besar dari penduduk Kota Makassar yang berusia 12 tahun, hal ini dimungkinkan karena banyak penduduk usia sekolah yang berasal dari Kabupaten tetangga yang memilih bersekolah di Kota Makassar. Pada satu sisi hal ini menunjukkan kualitas pendidikan di Makassar dinilai sudah lebih baik dari daerah sekitar sehingga menjadi pilihan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya, namun disisi lain hal ini menjadi beban tersendiri bagi Kota Makassar yang harus diperhatikan oleh Dinas teknis.

Pada tahun 2024 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar sebesar 90,02% hal ini disebabkan karena banyaknya siswa yang bersekolah tidak sesuai dengan umur. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah kelulusan sebanyak 23.924 dari jumlah anak yang berusia 12 tahun sebanyak 26.576 dengan proporsi kelulusan 90,02% Selengkapnya data Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD sederajat dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel II.65 di atas.

Angka melek huruf penduduk usia 15-29 tahun, perempuan dan laki-laki

Tabel II.63.
Angka melek huruf penduduk usia 15-29 tahun
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia di atas 15-29 Tahun yang bisa membaca dan menulis	363.132	389.588	388.300	387.149	264.773
2	Jumlah penduduk usia 15-29 Tahun keatas	363.132	389.588	388.300	387.149	265.091
3	Angka Melek Huruf	100	100	100	100	99,88

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Angka melek huruf menunjukkan kualitas manusia pada umumnya, aksesibilitas serta kondisi ekonomi suatu daerah. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan melek huruf penduduk usia 15-29 tahun di Kota Makassar pada tahun 2023 adalah 100% yang artinya semua penduduk Kota Makassar yang berusia 15-29 tahun dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Sedangkan data sementara untuk 2024 Triwulan 3 bahwa perkembangan melek huruf penduduk usia 15-29 tahun di Kota Makassar pada tahun 2024 adalah 99,88%.

Penduduk yang berusia <15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Tabel II.64.
Penduduk usia < 15 tahun yang melek huruf
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk usia > 15 th yang bisa membaca dan menulis	1.095.417	1.048.520	1.053.399	1.072.745	1.092.145
2.	Jumlah penduduk usia > 15 th	1.112.889	1.063.408	1.072.380	1.081.723	1.103.957

3.	Penduduk usia > 15 tahun yang melek huruf (1/2 x 100)	98,43	98,60	98,23	99,17	98,93

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Penduduk yang berusia 15 tahun yang melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf menunjukkan kualitas manusia pada umumnya, aksesibilitas serta kondisi ekonomi suatu daerah Perkembangan AMH di Kota Makassar menunjukkan bahwa pada periode tahun 2020-2024 AMH mengalami naik turun disebabkan Kota Makassar merupakan kota tujuan untuk mencari pekerjaan oleh sebagian penduduk Kota/Kabupaten lain. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Makassar periode tahun 2020-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk tahun 2023 menjadi 99,17% dan pada tahun 2024 Triwulan III menjadi 98,93%.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Tabel II.65.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/ D IV	11.581	11.353	10.887	11.517	11.427
2.	Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTs	11.989	11.685	10.887	11.614	11.596
3.	Guru yang berkualifikasi S1/D IV (1/2 x 100)	96.59	97,16	99,12	99,16	98,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2025

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mensyaratkan bahwa guru wajib memiliki latar belakang akademis strata satu (S1) atau diploma empat (D-IV). Tabel II.15 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2024 guru jenjang pendidikan dasar di Kota Makassar yang sudah berkualifikasi S1/D-IV sebanyak 11.427 orang atau 98,54%, sebanyak 97 Orang pendidik SD di Kota Makassar yang belum berkualifikasi S1/D-IV. Sesuai Undang- undang Guru dan Dosen, yang belum berkualifikasi S1/D-IV ini harus sudah dituntaskan paling lambat akhir 2015, yang berati Makassar telah memenuhinya. Berikut data guru Kota Makassar yang berkualifikasi S 1/D-IV tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel II.68 di atas.

Tabel II.66.
Jumlah Penerima Beasiswa Anak Lorong Berprestasi

Tahun	Jumlah penerima beasiswa
2021	400 orang
2022	200 orang
2023	2.000 orang
2024	400 orang

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dalam mendukung program prioritas Pemerintah Kota Makassar bahwa pemerintah memberikan beasiswa kepada anak lorong pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak masing-masing 400 orang terdiri Sekolah Dasar (SD) 200 orang dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 200 orang, sedangkan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2.000 orang yeng terdiri dari Sekolah Dasar (SD) 1.400 orang dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 600 orang, Untuk tahun 2024, Dinas Pendidikan Kota Makassar menargetkan pemberian 1000 beasiswa. Program ini difokuskan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun yang terealisasi hanya sampai pada angka 400 Orang

B. Urusan Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Tabel II.67.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
kelahiran hidup Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	43	69	167	181	188
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	27.191	27.097	26.636	24.782	25.166
3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (1/2 x 1000)	0,16	0,25	6,34	7,3	7,47

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi. Secara umum faktor penyebab meningkatnya angka kematian bayi dapat dibagi menjadi 2 yaitu langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari faktor kesehatan ibu, faktor kondisi bayi dan faktor lingkungan. Sedangkan faktor tidak langsung terdiri dari faktor pelayanan kesehatan faktor sosial ekonomi, faktor penyakit dan infeksi.

Untuk tahun 2023 angka kematian bayi adalah 7,3 dari 1000 kelahiran hidup dan untuk tahun 2024 adalah sebesar 7,47 dari 1000 kelahiran hidup. Terjadinya kenaikan pada angka kematian bayi, dengan penyebab kematian antara bayi berat badan rendah (BBLR) dan premature, asfiksia, infeksi, kelainan kongenital serta faktor lain-lain.

Angka kelangsungan hidup bayi

Tabel II.68.
Angka Kelangsungan hidup bayi
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	1,58	2,55	6,34	7,3	7,47
2.	Angka kelangsungan hidup bayi (1000 – AKB)	998,42	997,45	993,66	992,7	992,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Untuk tahun 2024 angka kelangsungan hidup bayi adalah sebesar 992,53 bayi dari 1000 kelahiran hidup. Angka kelangsungan hidup bayi adalah indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan efektivitas sistem kesehatan. Masih diperlukan upaya peningkatan angka ini sebagai salah satu pengukuran kinerja dalam

upaya mengurangi kematian bayi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Tabel II.69.
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	43	71	169	85	188
2.	Jumlah kelahiran hidup	27.191	27.097	26.636	24.782	25.166
3.	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup (1 / 2 x 1.000)	1,58	0,26	6,34	3,43	7,47

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Terjadinya peningkatan jumlah kematian balita (AKBA) dari tahun 2021 ke 2022 karena adanya perbaikan pencatatan dan pelaporan, dimana fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit melaporkan lewat aplikasi secara online. Serta mengalami penurunan angka kematian balita pada tahun 2023 menjadi 3,43. Untuk tahun 2024 terjadi peningkatan pada angka AKBA sebesar 7,47 dimana penyebabnya adalah BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), penyakit infeksi (Pneumonia, diare, malaria, campak).

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Tabel II.70.
Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan)	33	47	154	85	188
2.	Jumlah kelahiran hidup	27.191	24.792	26.636	24.782	25.166
3.	Angka kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup (1/2 x 1.000)	1,21	1,90	5,78	3,43	7,47

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Terjadinya peningkatan jumlah kematian neonatal dari tahun 2021 ke 2022 karena adanya perbaikan pencatatan dan pelaporan, dimana fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit melaporkan lewat aplikasi secara online. Serta mengalami penurunan angka kematian neonatal pada tahun 2023 menjadi 3,43 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 7,47. Penyebabnya adalah kelahiran premature, asfiksia neonatal atau kurangnya oksigen selama proses kelahiran, infeksi neonatal seperti sepsis atau meningitis yang terjadi pada minggu pertama kehidupan dan kelainan kongenital yang serius.

Angka Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak, sehingga dalam jangka panjang mengakibatkan

terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun

Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4%. Di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2021 di angka 27,4 turun pada tahun 2022 menjadi 27,2 , demikian halnya di Kota Makassar angka prevalensi stunting hasil survey SSGI dari tahun 2021 di angka 18,8 mengalami penurunan menjadi 18,4 atau sebesar 0,4 %.Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.71.
Hasil Survey Status Gizi (SSGI)
Stunting Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota

No	Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Kota Makassar	18,8%	18,4%	25,6%	22,9%
2	Sulawesi Selatan	27,4%	27,2%	27,4%	23,3%
3	Nasional	24,4%	21,4%	21,5%	19,8%

Sumber : Buku Saku Hasil SSGI 2023 dan 2024

Sedangkan dari hasil analisis situasi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut angka prevalensi stunting di Kota Makassar terjadi penurunan yang signifikan dengan jumlah balita pada tahun 2021sebanyak 9.552 orang dengan prevalensi stunting sebanyak 5.413 orang sedangkan pada tahun 2023 jumlah balita 81.638 orang dengan prevalensi stunting sebanyak 3.333 orang atau berkurang sebanyak 2.080 orang.

Tabel II.72.
Angka Prevalensi Balita Stunting Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Balita	9.552	149.106	74.533	81.638	94.804
2	Balita Prevalensi Stunting	5.413	7.804	3.902	3.333	-

Sumber : Master Ansit Aplikasi Aksi Bangda tahun 2025

Di samping itu untuk memenuhi informasi status gizi berdasarkan individu menggunakan sistem aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Dengan aplikasi ini, kebutuhan intervensi dalam penguatan surveilans gizi melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) dapat dilakukan by name by address. Pada penggunaan aplikasi ini diperoleh informasi prevalensi stunting Kota Makassar tahun 2021 sebesar 5, 33 % turun menjadi 4,08% pada tahun 2022 atau turun sebesar 1,25%.

Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Tabel II.73.
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	12	14	21	19	20
2.	Jumlah kelahiran hidup	27.191	27.097	26.636	27.782	25.166
3.	Angka kematian Ibu (1/2 x 100.000)	44,13	51,66	78,84	76,67	79,47

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Terjadinya peningkatan jumlah kematian ibu dari tahun 2020 ke 2021 karena adanya perbaikan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan saat ini dilakukan secara online, dimana fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit melaporkan lewat aplikasi secara online. Selain itu, Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) belum berjalan maksimal dan juga perlunya peningkatan kapasitas petugas dalam menangani pasien yang akan dirujuk misalnya melakukan stabilisasi sebelum dirujuk. Tahun 2024 jumlah kematian ibu meningkat dari 76,67 tahun 2023 meningkat menjadi 79,47 tahun 2024, adapun penyebab kematian yang paling sering terjadi adalah Ganguan hipertensi, perdarahan, adanya infeksi dan/atau sepsis (komplikasi berbahaya akibat respons tubuh terhadap infeksi).

Rasio posyandu per satuan balita

Tabel II.74.
Rasio Posyandu persatuan balita
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Posyandu	1.010	1.012	1.012	1.012	1013
2.	Jumlah Balita	140.393	138.929	127.232	102.196	94.804
3.	Rasio Posyandu (1/2 x 1.000)	7,19	7,28	7,95	9,9	10,68

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang merupakan bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat. Pada tabel diatas, jumlah posyandu di Kota Makassar pada tahun 2023 sebanyak 1.012 unit untuk melayani 102.196 balita atau dengan rasio 9,9 per-1.000 balita. Atau dengan kata lain di tahun 2023, 1 (satu) posyandu di Kota Makassar melayani rata-rata 100 (102.196/1.012) balita. Sedangkan untuk tahun 2024 rasio posyandu adalah sebesar 10,68 dimana sebanyak 1013 unit posyandu melayani 94.806 balita, yang artinya tahun 2024 1 posyandu melayani rata-rata 94 balita.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Tabel II.75.
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Puskesmas, poliklinik, pustu	262	346	260	260	234	288
2.	Jumlah Penduduk	1.508.154	1.526.667	1.462.442	1.463.809	1.470.261	1.458.725
3.	Rasio Puskesmas, poliklinik pustu persatuan penduduk (1/2 x 1.000)	0,17	0,23	0,18	0,18	0,16	0,19

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan pustu untuk melihat fasilitas kesehatan pertama yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan serta pembinaan peran serta

masyarakat dalam bidang kesehatan serta pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dengan rasio ini dapat melihat penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat.

Tahun 2023 terdapat 234 Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu di Kota Makassar, untuk melayani 1.470.261 penduduk atau dengan rasio 0,16 per 1.000 penduduk. Dengan kata lain satu Puskesmas, Poliklinik dan Pustu untuk melayani rata-rata 6283 penduduk Makassar.

Sedangkan untuk tahun 2024 terdapat 288 Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu di Kota Makassar yang melayani 1.458.725 penduduk atau dengan rasio 0,19 per 1000 penduduk. Nilai ini artinya setiap satu Puskesmas, Poliklinik dan Pustu melayani 5.065 penduduk kota Makassar.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Tabel II.76.
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Sakit	50	50	48	51	52	52
2.	Jumlah Penduduk	1.508.154	1.526.677	1.462.442	1.463.809	1.470.261	1.458.725
3.	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk (1/2 x 1.000)	0.033	0,032	0.03	0,035	0,035	0,035

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Rasio Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk juga untuk melihat ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk melayani masyarakat. Jumlah Rumah Sakit yang ada di Kota Makassar pada tahun 2023 sebanyak 52 unit baik swasta maupun pemerintah. 52 Rumah Sakit ini untuk melayani 1.470.261 orang, atau 1000 : 0,035 atau dengan kata lain 1 Rumah Sakit untuk melayani rata-rata 28.702 orang penduduk Makassar. Sedangkan untuk tahun 2024 dari sejumlah 52 rumah sakit untuk melayani 1.458.725 orang rasio yang didapatkan adalah 0,035 yang artinya setiap 1 rumah sakit melayani 28.052 penduduk kota Makassar.

Rasio dokter per satuan penduduk

Tabel II.77.
Rasio Dokter per satuan penduduk
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Dokter	718	1.065	1.005	3.237	3.283	3.530
2.	Jumlah Penduduk	1.508.154	1.526.677	1.462.442	1.463.809	1.470.261	1.458.725
3.	Rasio Dokter persatuan penduduk (1/2 x 1.000)	0,48	0,7	0,73	2,21	2,23	2,42

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam percepatan pembangunan kesehatan. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 3.283 tenaga dokter di Makassar untuk melayani 1.470.261. Hal ini berarti 1 orang dokter untuk mencakup kurang lebih 452 penduduk Makassar. Sedangkan untuk tahun 2024

jumlah dokter sebanyak 3.530 orang sedangkan jumlah penduduk kota Makassar adalah 1.458.725 jiwa sehingga rasio tenaga dokter adalah sebesar 2,42, yang artinya setiap 1 dokter melayani 413 penduduk.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tabel II.78.
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Tenaga Medis	2.150	2.003	2.003	7758	8.162	9.481
2.	Jumlah Penduduk	1.508.154	1.526.677	1.462.442	1.463.809	1.470.261	1.458.725
3.	Rasio Tenaga medis persatuan penduduk (1 / 2 x 1.000)	1,43	1,31	1,37	5,30	5,55	6,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Rasio tenaga medis menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Rasio tenaga medis di Kota Makassar terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 8.162 tenaga medis di Makassar untuk melayani 1.470.261 Hal ini berarti 1 orang tenaga medis untuk mencakup kurang lebih 180 penduduk Makassar. Tahun 2024 jumlah tenaga medis adalah sebanyak 9.481 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 1.458.725 jiwa sehingga rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah sebesar 6,50, yang artinya setiap 1 tenaga medis melayani 154 penduduk.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Tabel II.79.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	5.837	6.080	6.010	5.694	5.882	5548
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	6.199	6.209	6.074	5.698	5.802	5548
3.	Cakupan komplikasi kebidanan (1/2 x 100)	94.16	97,92	98,95	99,93	101,38	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah ibu hamil, bersalin, nifas yang berkunjung ke fasilitas kesehatan merupakan ibu kelompok risiko yang mendapatkan pelayanan. Komplikasi yang sering ditangani adalah KEK (Kekurangan Energi Kronik), anemia, perdarahan, pre eklampsia, infeksi, penyakit (TBC, HIV, Hepatitis, sifilis), diabetes. Untuk tahun 2024 jumlah cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah sebesar 100% dari sejumlah 5.548 jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan. Jumlah ini menurun dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 101,38.

Fasilitas Kesehatan

Tabel II.80.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

Jenis Fasilitas Kesehatan	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	29	28	26	28	28	28
Rumah Sakit Bersalin	21	24	27	16	16	16
Poliklinik	51	52	57	186	152	191
Puskesmas	47	47	47	47	47	47
Puskesmas Pembantu	30	35	25	33	35	35
Apotik	105	114	115	797	816	200

Sumber BPS Makassar dalam Angka, tahun 2024

Berasarkan fasilitas kesehatan di tahun 2018 -2022 yang berada di Kota Makassar sudah memenuhi ratio jumlah penduduk dan kewilayahan di Kota Makassar, yang perlu dimaksimalkan yaitu wilayah-wilayah yang berada di Kepulauan. Untuk tahun 2024 jumlah fasilitas kesehatan jika dibandingkan dengan rasio penduduk adalah sebanyak 2821yang artinya setiap 1 fasilitas kesehatan melayani 2.821 penduduk. Sedangkan jika dibandingkan dengan rasio kewilayahan adalah sebesar 0,33, yang artinya setiap 1 fasilitas kesehatan mengcover 0,3 km2.

Tabel II.81.
Jumlah Tanaga Kesehatan Kota Makassar Tahun 2024

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah (orang)
1	Psikologi Klinis	8
2	Tenaga Keperawatan	6.674
3	Tenaga Kebidanan	1.488
4	Tenaga Kefarmasian	1.091
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	581
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	236
7	Tenaga Gizi	400
8	Tenaga Keterapian Fisik	193
9	Tenaga Keteknisan Medis	516
10	Tenaga Teknis Biomedika	964
11	Tenaga Kesehatan Tradisional	3
12	Tenaga Medis	3.271
Jumlah		15.425

Sumber BPS Makassar dalam Angka, Tahun 2025

Data BPS yang terbaru adalah Makassar dalam Angka Tahun 2023. Tahun 2024 belum dirilis/publikasi. Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas, standar ketenagaan puskesmas, jumlah tenaga kesehatan masyarakat minimal untuk puskesmas non rawat inap di wilayah perkotaan adalah sebanyak 2 orang, maka Kota Makassar masih kekurangan tenaga kesehatan, Jumlah tenaga kesehatan di Kota Makassar dengan ratio jumlah penduduk Kota Makassar dan jumlah tenaga kesehatan yaitu 1 orang tenaga kesehatan melayani 100 orang pasien.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Tabel II.82.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan	29.580	27.192	27.090	26.639	24.777	25147
2.	Jumlah seluruh ibu bersalin	26.957	29.513	29.513	28.434	24.777	25147
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (1 / 2 x 100)	109.73	92.14	91,79	93,69	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Data sasaran merupakan data proyeksi yang dilihat dari jumlah penduduk. Data ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan merupakan data yang berdasarkan laporan dari Puskesmas yang telah mengambil seluruh data dari fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Kota Makassar adalah berdasarkan data di atas. Untuk tahun 2023-2024 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan di kota Makassar adalah 100%.

Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Tabel II.83.
Cakupan kelurahan Unversal Child Immunization (UCI) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kelurahan UCI	153	137	138	153	153
2.	Jumlah seluruh Kelurahan	153	153	153	153	153
3.	Cakupan Kelurahan UCI (1/2 x 100)	100	89,54	90,20	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, I dosis campak dan 2 dosis TT. Pada Tahun 2022 diperoleh 90,20%, juga dikatakan mencapai target karena target nasional adalah 79,1%. Untuk tahun 2023 diperoleh 100% dengan target nasional sebesar 92,5%.

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Tabel II.84.
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	41	40	39	20	23	911

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah seluruh gizi buruk yang Ditemukan	41	40	39	20	23	911
3.	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan (1/2 x 100)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Balita gizi buruk adalah kondisi ketika berat badan balita lebih rendah dari tinggi badannya, kondisi ini juga dikenal dengan sebagai severe wasting. Gizi buruk pada balita terjadi karena kekurangan zat gizi, seperti energy dan protein, dalam jangan waktu yang lama. Kondisi dapat berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak.

Semua balita yang mengalami gizi buruk di Kota Makassar mendapatkan perawatan (100%) pada sarana pelayanan kesehatan. Penanganan balita gizi kurang dilakukan melalu Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT Pemulihan) terdiri atas PMT Gizi Kurang dan PMT Gizi Buruk.

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Tabel II.85.
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi Campak	28.905	27.318	27.795	27.850	23.465	26.613
2.	Jumlah anak usia 1 tahun	28.171	38.190	28.559	27.086	24.734	25.212
3.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi Campak (1 / 2 x 100)	102,61	96,91	97,32	102.82	100,96	105,56

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Penyakit campak dikenal juga sebagai morbili atau measles, merupakan penyakit yang sangat menular (infeksius) yang disebabkan *paramyxoviridae* (RNA) yaitu jenis morbilivirus yang mudah mati karena panas dan cahaya. Cara penularan penyakit ini adalah melalui udara terutama melalui batuk, bersin atau sekresi hidung, ditandai dengan munculnya bintik merah (ruam), terjadi pertama kali saat anak-anak yang ditandai dengan demam, korisa, konjungtivitis, batuk disertai enanthem spesifik (Koplik's Spot) diikuti ruam *maculopapular* menyeluruh. Komplikasi campak cukup serius seperti diare, pneumonia, malnutrisi, otitis media, kebutaan, encephalitis. Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak usia pra sekolah dan usia SD. Adapun cakupan pemberian imunisasi campak pada tahun 2023 adalah 100,96%, sedangkan untuk tahun 2024 cakupan anak yang mendapat imunisasi campak meningkat menjadi 105,56%.

Peningkatan cakupan imunisasi campak akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Beberapa dampak peningkatan cakupan diantaranya : Penurunan kasus campak, pengurangan angka kematian bayi, pencegahan komplikasi, herd immunity, dan kemungkinan timbulnya wabah penyakit campak.

Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Tabel II.86.
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus AFP non polio yang Dilaporkan	10	4	8	11	10	15
2.	Jumlah penduduk < 15 tahun	382.976	379.278	384.716	376.388	384.656	384.656
3.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (1/2 x 100)	0.0026	0,0010	0,0021	0,0029	0,0026	0,039

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Penyakit polio adalah penyakit lumpuh yang disebabkan oleh virus polio yang menyerang sistem syaraf hingga penderita mengalami kelumpuhan yang datangnya mendadak. Penyakit ini umumnya menyerang anak usia 0-3 tahun. AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau layuh (bukan kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot, dan terjadi secara akut (mendadak). Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus Polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus Polio.

Adapun rumus AFP adalah 2/100.000. Jumlah penduduk di bawah 15 tahun pada tahun 2023 adalah 384.656 maka diperoleh target kasus AFP sebanyak 10. Sedangkan pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun sebanyak 384.656 di laporkan jumlah kasus AFP non polio adalah sebanyak 15 kasus maka rate yang didapatkan adalah 3,89 per 100.000 penduduk.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Non Polio AFP rate diantaranya : Kualitas surveilans, pelaporan dalam hal ini kesadaran dari tenaga kesehatan dan masyarakat untuk melaporkan kasus AFP, faktor lingkungan dan kesehatan serta cakupan imunisasi.

Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Tabel II.87.
Cakupan balita pneumonia yang ditangani
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah balita penderita pneumonia yang ditangani	574	370	349	867	329	578
2.	Jumlah perkiraan balita penderita pneumonia	5.675	5.529	5.671	5.667	4.440	5489
3.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani Non Polio AFT rate per 100.000 penduduk (1 / 2 x 100)	10.11	6.69	6,15	15,3	7,41	10,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli). Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli). Terjadinya pneumonia pada anak sering kali bersamaan dengan proses infeksi akut pada bronkus (biasa disebut bronchopneumonia). Gejala penyakit ini berupa napas cepat dan napas sesak, karena paru meradang secara mendadak. Batas napas cepat adalah frekuensi pernapasan sebanyak 60 kali per menit pada anak usia < 2 bulan, 50 kali per menit atau lebih pada anak usia 2 bulan sampai kurang dari 1 tahun, dan 40 kali per menit atau lebih pada anak usia 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun. Infeksi

dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Terdapat beberapa faktor risiko yang meningkatkan insiden (morbiditas) maupun mortalitas pneumonia yaitu status gizi (gizi kurang dan gizi buruk memperbesar risiko), pemberian ASI (ASI eksklusif mengurangi risiko), suplementasi vitamin A (mengurangi risiko), suplementasi zinc (mengurangi risiko), BBLR (meningkatkan risiko), vaksinasi (mengurangi risiko), dan polusi udara dalam kamar terutama asap rokok dan asap bakaran dari dapur (meningkatkan risiko). Adapun rumus perkiraan kasus pneumonia adalah 3,79% dari jumlah balita.

Untuk tahun 2023, balita penderita pneumonia yang ditangani adalah sebanyak 329 dari 4.440 perkiraan balita penderita pneumonia, sedangkan untuk tahun 2024 jumlah balita penderita pneumonia yang ditangani adalah sebanyak 578 dari perkiraan sebanyak 5489 balita.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Tabel II.88.
Cakupan penemuan dan pananganan penderita penyakit TBC BTA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan	2.415	2.519	2.493	3.569	3.860	8134
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	5412	5993	4.345	6.677	4.889	7984
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (1 / 2 x 100)	44,62	25.73	57,38	51,95	25,91	101,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Penemuan dan penanganan dini pasien TB menular (TB BTA positif) harus merupakan prioritas utama, dengan demikian pasien dapat diobati sebelum mereka menularkan lebih lanjut ke orang lain. Di tahun 2023, jumlah penderita baru TBC BTA (+) adalah 3.860 orang dari perkiraan 4.889 orang dengan cakupan penemuan dan penanganan sebesar 25,91%. Untuk tahun 2024 jumlah penderita TBC BTA (+) adalah sebanyak 8.134 dari perkiraan sebesar 7.984. Penemuan ini akan sangat membantu dalam proses untuk menurunkan jumlah penderita TB hal ini disebabkan penanganan penyakit TBC di kota Makassar berhasil menemukan penderita penyakit TBC BTA sebelum mereka menularkan ke orang lain.

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tabel II.89.
Tingkat Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	5.412	3.250	3.897	5.849	6.640	9561
2.	Jumlah penduduk	1.508.154	1.526.677	1.462.442	1.463.809	1.470.261	1.458.725
3.	Tingkat prevelensi TBC (1/2 x 100)	358.85	212.88	266.47	399,57	449,44	655,44

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit yang mudah menular dimana dalam tahun-tahun terakhir memperlihatkan peningkatan dalam jumlah kasus baru maupun jumlah angka kematian yang disebabkan oleh TB. Pada tahun 2023, kasus penderita TBC (baru dan lama) sebanyak 6.640 kasus dengan tingkat prevalensi 0,4 per 100 kasus. Mulai tahun ini, dibentuk Forum Multi Sektor Eliminasi TB (FMS-TB) Kota Makassar dengan ketuanya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar dengan melibatkan beberapa SKPD, pihak swasta/dunia usaha, organisasi profesi, komunitas/LSM/CSO, akademisi/perguruan tinggi/asosiasi, serta media. Dengan adanya FMS-TB ini diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian TB yaitu eliminasi TB di Tahun 2030.

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tabel II.90.
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pasien TB yang meninggal	231	156	126	170	222	261
2.	Jumlah penduduk	1.508.154	1.526.677	1.462.442	1.463.809	1.470.261	1.458.725
3.	Tingkat prevalensi TBC (1 / 2 x 100.000)	15,32	10,22	8,62	11,61	15,10	17,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

TB merupakan salah satu penyebab terbesar kematian tertinggi di dunia yang disebabkan oleh penyakit infeksi. Pada tahun 2023 jumlah pasien TB yang meninggal berjumlah 222 orang atau 15,10 dari tingkat prevalensi per 100.000 orang. Untuk tahun 2024 jumlah kasus pasien TB yang meninggal adalah sebanyak 261 orang yang jika di bandingkan dengan jumlah penduduk yang sebanyak 1.458.725 orang maka prevalensi TB di kota Makassar untuk tahun 2024 adalah 0,6 per 100.000 orang.

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Tabel II.91.
Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam
program DOTS Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pasien TB paru BTA yang mendapt pengobatan melalui DOTS	2.415	1.741	2.493	3.469	3.169	3.921
2.	Jumlah pasien baru TB paru BTA	2.415	1.741	2.493	3.469	3.169	3.921
3.	Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS (1 / 2 x 100)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Upaya pencegahan dan pemberantasan TB-Paru dilakukan dengan pendekatan *Directly Observe Treatment Shortcource* (DOTS) atau pengobatan TB-Paru dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO). Dalam penanganan TB, semua penderita yang ditemukan ditindaklanjuti dengan paket pengobatan intensif

secara gratis di seluruh puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya atau rumah sakit. Semua pasien baru TB paru BTA di Kota Makassar mendapatkan pengobatan melalui DOTS.

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Tabel II.92.
Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pasien TB paru BTA yang Sembuh	1.517	808	2.757	1.416	2.720	2555
2.	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diobati	2.415	1.741	3.250	3.469	3.169	3.921
3.	Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS (1 / 2 x 100)	62,82	46,41	84,83	40,82	85,83	65,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2023 adalah sebanyak 85,83% atau dari 3.169 pasien TB paru BTA yang diobati, yang berhasil sembuh sebanyak 1.416 pasien TB paru BTA. Untuk tahun 2024 Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS tahun 2024 adalah sebanyak 65,16 % atau dari pasien baru TB paru BTA yang diobati sebanyak 3.921 orang berhasil sembuh adalah 2.555 orang.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Tabel II.93.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	268	175	583	520	506	797
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	268	175	583	520	506	797
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (1 / 2 x 100)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti,* yang ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa uji tourniqet positiv, petekie, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis dan/atau melena, dsb ditambah trombositopenia (trombosit=100.000/mm^3) dan hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit=20%) dan kesadaran menurun atau renjatan. Demam berdarah dengue tidak menular melalui kontak manusia dengan manusia. Virus dengue sebagai penyebab demam berdarah hanya dapat ditularkan melalui nyamuk. Cakupan penemuan dan penanganan penerita DBD di kota Makassar pada tahun 2023 – 2024 adalah 100% dengan jumlah penderita DBD yang ditangai sesuai SOP sebanyak 506 untuk tahun 2023 dan 797 orang untuk tahun 2024.

Penderita diare yang ditangani

Tabel II.94.
Penderita diare yang ditangani
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader	19.591	8.454	7.410	7.734	18.711	26.957
2.	Jumlah penderita diare	19.591	8.454	7.410	7.734	18.711	26.957
3.	Penderita diare yang ditangani (1 / 2 x 100)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Diare adalah buang air besar dengan bertambahnya frekuensi yang lebih dari biasanya 3 kali sehari atau lebih dengan konsistensi cair. Semua penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Pada tahun 2023, jumlah penderita diare yang dilayani sebanyak 18.711 untuk tahun 2024 jumlah penderita diare adalah sebanyak 26.957 dimana semuanya terlayani di sarana kesehatan. Penyebab penderita diare meningkat terkait faktor lingkungan yang kurang sehat serta sanitasi yang buruk, dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang tidak disiplin (khususnya di daerah kumuh miskin).

Angka kejadian Malaria

Tabel II.95.
Angka kejadian malaria Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk menderita malaria	173	114	141	135	199	295
2.	Jumlah penduduk	1.508.154	1.526.677	1.462.442	1.463.809	1.470.261	1.458.725
3.	Angka kejadian malaria (1/2 x 100.000)	0,11	0,08	0,1	0,01	0,14	0,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit plasmodium, ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Tingkat keparahan malaria bervariasi berdasarkan spesies plasmodium. Gejala berupa menggigil, demam, dan berkeringat, biasanya terjadi beberapa minggu setelah digigit. Meski memiliki gejala yang hampir mirip, malaria dan demam berdarah disebabkan oleh nyamuk yang berbeda. Nyamuk penyebab demam berdarah adalah *Aedes aegypti* dan menyerang pada siang hari. Sementara nyamuk *Anopheles* penyebab malaria menyerang pada pagi dan sore hari. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Makassar yang menderita malaria adalah 199 orang dan jumlah penduduk kota Makassar adalah 1.470.261 sehingga diperoleh angka kejadian malaria sebesar 0,14. Sedangkan tahun 2024, jumlah penduduk kota Makassar adalah 1.458.728 jumlah penduduk yang menderita malaria adalah sebanyak 295 sehingga diperoleh angka kejadian malaria adalah sebesar 0,20.

Peningkatan angka kejadian malaria dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan memiliki dampak signifikan pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sistem kesehatan. Berikut adalah analisis penyebab, dampak, dan strategi penanganan terkait peningkatan kasus malaria: perubahan iklim, resistensi obat dan insektisida, perilaku masyarakat.

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Tabel II.96.
Prevelensi HIV/AIDS dari total populasi
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS	862	675	784	1.083	1.015	925
2.	Jumlah penduduk	1.508.154	1.526.677	1.462.442	1.463.809	1.470.261	1.458.725
3.	Prevelensi HIV/AIDS (1/2 x 100)	0,06	0,04	0,05	0,07	0,07	0,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. *Acquired Immune Deficiency Syndrom* (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Pada tahun 2023, jumlah pasien HIV dan AIDS di kota Makassar adalah 1.015 orang dan jumlah penduduk kota Makassar 1.470.261 sehingga diperoleh prevalensi sebesar 0,07. Meningkatnya capaian prevalensi HIV dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari 0,05 menjadi 0,07 adalah banyaknya kasus ditemukan dengan adanya upaya tambahan berupa kegiatan pemeriksaan skrining HIV secara mobile yang dilakukan di tempat-tempat berisiko (hotspot) seperti tempat hiburan malam, panti pijat, dll.

Tahun 2024 jumlah pasien HIV dan AIDS adalah sebanyak 925 orang dengan jumlah penduduk kota Makassar sebanyak 1.458.725 orang sehingga prevalensi HIV dan AIDS di kota Makassar adalah sebesar 0,06. Penurunan angka prevalensi stunting adalah merupakan indicator positif yang menunjukkan keberhasilan upaya pencegahan, pengobatan dan pengendalian penyakit HIV dan AIDS ini.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Tabel II.97.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1	215.910	128.190	162.125	105.752	137.184	191.783
2.	Jumlah penduduk miskin	170.106	255.894	253.230	253.579	228.895	229.787
3.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (1/2 x 100)	126,93	50,09	64,02	41,70	59.93	83,46

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja penduduk Pencapaian indikator kinerja penduduk yang memiliki asuransi jaminan kesehatan didukung oleh adanya kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis oleh Pemerintah Kota Makassar dan Program Nasional melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Sasaran pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini adalah seluruh komponen mulai dari pemerintah (pusat dan daerah), BPJS, fasilitas kesehatan,

peserta dan pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tahun 2024 jumlah kunjungan pasien miskin di saranan kesehatan strata 1 meningkat dari tahun sebelumnya dimana tahun 2023 adalah sebanyak 137.184 orang menjadi 191.783 orang di tahun 2024, meskipun jumlah penduduk miskin kota Makassar juga meningkat dimana tahun 2023 berjumlah 228.895 orang menjadi 229.787 untuk tahun 2024 akan tetapi cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat jauh dari 59,93 di tahun 2023 menjadi 83,46 ditahun 2024.

Keberhasilan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor diantaranya: ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai terutama yang mudah di jangkau oleh masyarakat, sistem rujukan yang efektif terutama faskes pertama ke lanjutan, sosialisasi yang berhasil kepada masyarakat terkait hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan sehingga mereka sadar akan pentingnya fasilitas kesehatan yang ada mulai dari pertama sampai lanjutan. Selain itu kebijakan pemerintah kota Makassar dalam menyiapkan fasilitas kesehatan dasar contohnya puskesmas dan pustu serta ketersediaan anggaran bagi masyarakat miskin juga sangat membantu meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat miskin.

Cakupan kunjungan bayi

Tabel II.98.
Cakupan kunjungan bayi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	26.937	26.515	25.201	25.569	24.782	25.166
2.	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	26.957	27.191	28.105	26.636	24.782	25.166
3.	Cakupan kunjungan bayi (1 / 2 x 100)	100	97,52	89,67	96,33	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Belum mencapai 100% disebabkan karena ada beberapa bayi baru lahir yang mengalami komplikasi sehingga belum mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu adanya mobilitas penduduk, serta usia bayi yang belum memungkinkan mendapatkan layanan tersebut dan akan mendapatkan layanan kesehatan di bulan berjalan. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 24.782 sedangkan jumlah seluruh bayi lahir hidup adalah 24.782 sehingga diperoleh cakupan kunjungan bayi sebesar 100%. Untuk tahun 2024 jumlah bayi lahir hidup adalah 25.166 sedangkan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar sejumlah 25.166 yang artinya cakupan kunjungan bayi untuk tahun 2025 juga mencapai 100%.

Cakupan puskesmas

Tabel II.99.
Cakupan puskesmas Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah puskesmas	47	47	47	47	47	47

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah seluruh kecamatan	15	15	15	15	15	15
3.	Cakupan puskesmas (1 / 2 x 100)	313.33	313,33	313,33	313,33	313,33	313,33

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan puskesmas di Kota Makassar sudah sangat memadai dimana rata-rata satu Kecamatan di Kota Makassar memiliki 3 Puskesmas. Dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar terdapat 47 Puskesmas, sehingga cakupan puskesmas di Kota Makassar mencapai 313,33%.

Cakupan pembantu puskesmas

Tabel II.100.
Cakupan pembantu puskesmas
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pembantu puskesmas	32	33	32	35	35	35
2.	Jumlah seluruh kelurahan	153	153	153	153	153	153
3.	Cakupan pembantu puskesmas (1 / 2 x 100)	20.91	21,57	20,92	22,88	22,88	22,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan berfungsi untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dasar ke wilayah yang lebih kecil atau terpencil. Pustu didirikan untuk memudahkan akses masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau daerah yang jauh dari Puskesmas induk, dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar.

Untuk cakupan Pembantu Puskesmas di Kota Makassar pada tahun 2024 terdapat 35 Pustu untuk meng-*cover* 153 Kelurahan sehingga cakupan pembantu puskesmas mencapai 22,88%. Angka ini tidak terlalu menganggu layanan kesehatan tingkat pertama di Kota Makassar karena cakupan pelayanan dapat dicover oleh Puskesmas yang rata-rata setiap kecamatan dilayani oleh 3 Puskesmas. Selain itu Kota Makassar merupakan kota meteropolitan dimana jalur trasportasi sudah sangat baik menghubungkan seluruh wilayah Kota, sehingga dapat menjamin setiap penduduk Makassar bias mengakses unit-unit pelayanan kesehatan.

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Tabel II.101.
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ibu hamil yang mem-peroleh pelayanan antenatal K4	28.731	28.628	28.670	28.285	27.999	26.240
2.	Jumlah sasaran ibu hamil	30.990	31.021	31.021	29.789	27.999	27.254
3.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (1/2 x 100)	92.71	92.29	92,42	94,95	100	96,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan ibu hamil K4 adalah persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali selama masa kehamilan. Pelayanan antenatal ini harus memenuhi standar pelayanan.

Distribusi kunjungan antenatal K4

- Minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 1-12 minggu)
- Minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 13-24 minggu)
- Minimal 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan > 24 minggu)

Tujuan kunjungan antenatal K4 Mendeteksi komplikasi yang dapat mengancam jiwa, Mempersiapkan kelahiran, Memberikan pendidikan, Memfasilitasi hal yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya.

Tahun 2023, jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 adalah sebanyak 27.999 dengan jumlah sasaran ibu hamil adalah 27.999 sehingga diperoleh cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah sebesar 100%. Sedangkan tahun 2024 jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 adalah sebanyak 26.240 dengan jumlah sasaran ibu hamil adalah 27.254 sehingga diperoleh cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah sebesar 96,28%.

Cakupan pelayanan nifas

Tabel II.102.
Cakupan pelayanan nifas Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	24.595	25.157	26.022	26.639	24.777	24391
2.	Seluruh ibu nifas	29.580	29.513	29.513	28.434	24.777	25145
3.	Cakupan pelayanan nifas (1 / 2 x 100)	83.14	85.24	88,17	93,69	100	97

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2024

Sasaran ibu nifas/ibu bersalin merupakan data proyeksi. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mau memeriksakan diri pada saat masa nifas. Tapi capaian yang belum 100% disebabkan karena sasaran proyeksi yang terlalu tinggi. Jumlah peserta ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar adalah 24.777 orang sedangkan jumlah seluruh ibu nifas adalah 24.777 orang sehingga cakupan pelayanan nifas adalah sebesar 100%.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Tabel II.103.
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	3.682	3.395	2.787	1.950	3.151	3239
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	4.038	4.079	30.43	1.950	3.722	3775
3.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (1/2 x 100)	91.18	83.23	91,59	100	84,66	85,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Pada tahun 2023, Jumlah bayi yang baru lahir atau usianya 0-28 hari dengan komplikasi yang ditangani adalah 3.722 sehingga diperoleh cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani sebesar 84,66%.

Cakupan pelayanan anak balita

Batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12-59 bulan. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan pada anak balita sesuai standar, meliputi

1) Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan minimal delapan kali setahun)yang tercatat dalam Buku KIA/KMS.
2) Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus
3) Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)balita minimal dua kali dalam setahun. Pelayanan SDIDTK meliputi pemantauan perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa,sosialisasi dan kemandirian minimal 2 kali setahun (setiap 6 bulan). Pelayanan SDIDTK diberikan di dalam gedung (sarana pelayanan kesehatan) maupun di luar gedung.

Pelayanan Anak Balita sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Cakupan pelayanan anak balita

Batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12-59 bulan. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan pada anak balita sesuai standar, meliputi

1) Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan minimal delapan kali setahun)yang tercatat dalam Buku KIA/KMS.
2) Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus
3) Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)balita minimal dua kali dalam setahun. Pelayanan SDIDTK meliputi pemantauan perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa,sosialisasi dan kemandirian minimal 2 kali setahun (setiap 6 bulan). Pelayanan SDIDTK diberikan di dalam gedung (sarana pelayanan kesehatan) maupun di luar gedung.
4) Pelayanan Anak Balita sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Tabel II.104.
Cakupan pelayanan anak balita
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah anak balita yang memperoleh palayanan pemantauan minimal 8 th	126.184	108.136	110.820	117.203	1112.196	94.806
2.	Jumlah seluruh anak balita	139.539	140.393	138.927	127.232	1112.196	94.806
3.	Cakupan palayanan anak balita (1/2 x 100)	90,42	77,02	79,77	92,12	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Sasaran anak balita merupakan data proyeksi. Adanya mobilitas penduduk yang sangat padat dan cepat, juga belum semua masyarakat datang ke fasilitas kesehatan memeriksakan balitanya untuk memantau tumbuh kembang disebabkan karena aktifitas dan kesibukan serta kurangnya pengetahuan merupakan penyebab capaian

yang belum 100%. Pada tahun 2023, jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali setahun adalah 112.196 anak sedangkan jumlah seluruh anak balita di Kota Makassar adalah 112.196 sehingga diperoleh cakupan pelayanan anak balita sebear 100%.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Tabel II.105.
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP- ASI	14.806	14.840	14.885	15.037	16.702	59484
2.	Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	14.806	14.840	14.885	15.037	16.702	63.822
3.	Cakupan pemberian MP-ASI anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin (1/2 x 100)	100	100	100	100	100	93,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin di Kota Makassar sepanjang lima tahun terakhir konsisten mencapai angka 100%, dimana seluruh anak kurang mampu mendapatkan tambahan makanan pendamping ASI.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Pelayanan kesehatan pada siswa SD dan setingkat dilakukan melalui penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara dini masalah- masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk pada siswa SD kelas I, SMP, SMA serta sekolah MI/MA/MTS juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah, maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan penjaringan kesehatan terdiri dari :

1. Pemeriksaan tinggi badan
2. Pemeriksaan berat badan
3. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
4. Pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran)
5. Pemeriksaan kesehatan jasmani

Tabel II.106.
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah murid SD/sederajat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	26.901	10.210	21.988	24.251	18.828	32.381
2.	Jumlah murid SD/sederajat	27.078	24.453	95.561	24.635	15.828	31.664

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat (1/2 x 100)	99,35	41,75	23,01	98,44	100	97,79

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Pelayanan kesehatan pada siswa SD dan setingkat dilakukan melalui penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk pada siswa SD/sederajat juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah, maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan dengan cepat dan tepat diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat.

Tabel II.107.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes starata 1	215.910	128.190	162.125	105.752	137.184	191.783
2.	Jumlah seluruh masyarakat miskin	170.106	255.894	253.230	253.579	228.895	229.787
3.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (1/2 x 100)	126,93	50,09	64,02	41,70	59,93	83,46

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Tabel miskin dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 terdapat 105.752 jumlah kunjungan pasien miskin ke sarana kesehatan strata 1 dari 253.579 masyarakat miskin atau dengan cakupan 41,70%. Pada tahun 2023, sebanyak 137.184 kunjungan dari 228.895 jumlah masyarakat miskin. Angka ini meningkat dari tahun 2021 yang cakupannya 59,93%. Untuk tahun 2024 jumlah kunjungan sebanyak 191.783 dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 229.787 sehingga cakupan yang didapatkan adalah sebesar 83,46%. Selengkapnya data cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Tabel II.108.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No.	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan gawat darurat level 1	50	50	48	51	51	52
2.	Jumlah RS	50	50	48	51	51	52
3.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus	100	100	100	100	100	100

No.	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	diberikan sarana kesehatan (1/2 x 100)						

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Pada tahun 2023 di Kota Makassar beroperasi sebanyak 51 Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta, yang ke semua rumah sakit tersebut memiliki pelayanan gawat darurat level 1, atau dengan kata lain cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan sudah mencapai 100%.

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Tabel II.109.
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah KLB Kelurahan yang ditangani < 24 jam	13	7	11	14	22	14
2.	Jumlah KLB di Kelurahan yang terjadi	13	7	11	14	22	8
3.	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (1 / 2 x 100)	100	100	100	100	100	175

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir Kota Makassar secara konsisten mencapai 100% untuk cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 jam.

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat

Tabel II.110.
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat 24 jam Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam1 tahun	3	-	-	-	-
2.	Jumlah penderita positif dalam 1 tahun	4	-	-	-	-
3.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	75	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2025
Catatan : Program tersebut tidak dilakukan di Kota Makassar, karena Makassar bukan merupakan daerah endemis Malaria

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Pekerjaan Umum

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Tabel II.111.
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan dalam kondisi baik	1.552,96	1.557,41	1.571,04	1.575,59	1.582,91
2	Panjang seluruh jalan (Km)	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (1/2 x 100)	97,46	97,86	98,59	98,88	99,34

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2020 s.d 2024. Hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran, tersedianya ruas-ruas jalan yang perlu ditangani, peralatan yang memadai dan juga didukung oleh program gerakan sapu lubang Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dimana satuan tugas (satgas) sapu lubang yang selalu siap melakukan penanganan pada jalan-jalan yang berlubang dan pemeliharaan jalan dalam kondisi apapun.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Tabel II.112.
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan (km)	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46
2	Jumlah penduduk (jiwa)	1.423,877	1.484.912	1.462.442	1.463.809	1.477.861
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (1/2)	1 :929	1: 932	1 : 918	1 : 918	1 : 927

Sumber:Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2020 s.d 2024 terlihat peningkatan, hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya (data Disdukcapil), sedangkan jumlah panjang jalan di Kota Makassar tetap sepanjang 1593.46.

Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Tabel II.113.
Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40Km/Jam)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	1.418,32	1.480,21	1.497,84	1.521,91	1.411,90
2.	Jumlah seluruh jalan Kota	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.595,75
3.	Persentase jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) (1/2 x 100)	88,05	89,01	92,89	94	88,48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 Km/jam) dari tahun 2020 s.d 2024 mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun. Adapun yang menjadi faktor pendorong adalah anggaran yang tersedia serta peralatan yang memadai juga satgas sapu lubang Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang selalu siap siaga melakukan pemeliharaan jalan dalam kondisi apapun.

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Tabel II.114.
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	641,205	641,915	643,015	643,015	643,015
2.	Panjang seluruh jalan (Km)	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.595,75
3.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 m) (1 / 2 x 100)	40,28	40,35	40,35	40,35	40,30

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5) tahun 2020 s.d 2024 mengalami peningkatan dari 40% - 40,35% dari total panjang jalan 1.595,75 Km, belum ada pertambahan jalan yang memiliki trotoar dan drainase.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Tabel II.115.
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	389.595	389.595	389.852	389.902	258.103
2.	Jumlah rumah tinggal	444.154	435.033	441.384	446.723	287.974
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (1/2 x 100)	87,72%	89,56	88,32	87,73%	89,63%

Sumber Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2023 sebesar 391.902 rumah tinggal yang berakses sanitasi dari keseluruhan rumah tinggal di kota Makassar sejumlah 446,723, sehingga diperoleh capaian persentase rumah tinggal bersanitasi adalah sebesar 87,73% hal ini turun sebanyak 0,59 % dari tahun 2022 disebabkan penambahan jumlah RT lebih tinggi dibanding penambahan jumlah RT yang terakses Sanitasi (Tangki septik + IPAL Komunal + MCK) jadi sekitar 12,17% rumah tinggal yang belum berakses sanitasi. Akses sanitasi di kota Makassar sebagian besar menggunakan tangki septik dan sisanya masih menggunakan IPAL komunal yang tersebar di beberapa kecamatan kota Makassar.

Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

Tabel II.116.
Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang sempadan sungai sungai yang dipakai bangunan liar (Km)	1,5 Km	3,45 Km	4,15 KM	4,15 KM	4,15 KM
2	Panjang seluruh sempadan sungai (Km)	23,10 Km	23,10 Km	23,10 KM	23,10 KM	23,10 KM
3	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (1/2 x 100)	6,49%	14,94%	17,97 %	17,97 %	17,97 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tahun 2025
Berlokasi di sungai tallo kelurahan buloa kecamatan tallo.

Dari table diatas terlihat persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dari tahun 2019 s.d 2022 terus meningkat disebabkan karena lahan yang semakin terbatas, akhirnya masyarakat mencari lokasi yang paling mudah untuk diakses baik secara legal maupun illegal di wilayah sungai tallo, sungai je'neberang dan sungai pampang. namun di tahun 2023 & tahun 2024 tidak ada peningkatan lagi.

Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat.

Tabel II.117.
Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2022	2022	2023	2024
1.	Panjang drainase dalam kondisi baik (Km)	2.629.652.1	2.742.175.25	2.759.435.48	3.463.385.18	3.496.475.30
2.	Panjang seluruh drainase (Km)	3.234.424,00	3.233.424,00	3.233.424.00	3.850.544,009	3.850.544,009
3.	Persentase drainase dalam kondisi baik (1/2x 100)	81,33	84,81	85,34	89,95	90.80

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tahun 2025

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Persentase drainase dalam kondisi baik /pembuangan aliran air tidak tersumbat tahun 2020 s.d 2024, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dan yang menjadi faktor pendorong adalah proses pelaksanaan yang berlangsung dengan baik dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat (lurah dan LPM setempat), kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan saluran drainase yang semakin meningkat, anggaran yang tersedia serta peralatan yang memadai juga didukung oleh satgas pemeliharaan drainase dalam kondisi apa pun. Sedangkan kendala/faktor penghambat dalam

pelaksanaan pencapaian target adalah Banyaknya drainase yang tidak menggunakan main hole (lubang-lubang kontrol, sehingga menyulitkan pekerja untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Adanya kondisi cuaca yang ekstrim juga dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun

Tabel II.118.
Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas daerah yang tergenang (Ha)	55,07	88,75	108,12	82,13	82,11
2.	Luas daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (Ha)	449,83	483,51	307,72	157,8	157,8
3.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (1 / 2 x 100)	12,24%	18,36%	35,14%	52,05%	52,03%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tahun 2025

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa luas daerah yang tergenang dari tahun 2020 – 2024 nilainya berfluktuasi. Faktor yang berpengaruh adalah selain curah hujan juga adanya perbaikan atau rehabilitasi jalan yang kondisinya rusak ringan.

Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor.

Tabel II.119.
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung
dan aliran sungai rawan longsor Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	0 lokasi
2.	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor	11 titik (5,6 Km)	11 titik (5,6 Km)	11 titik (5,6 Km)	11 titik (5,6 Km)	11 titik (5,6 km)
3.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (1/2 x 100)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tahun 2025

Untuk tahun 2019 pembangunan turap masih menjadi kewenangan balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang, pembangunan turap di wilayah rawan longsor yang tidak dilaksanakan sepanjang tahun 2020-2022. Pada tahun 2023 jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor hanya ada 1 lokasi.dan pada tahun 2024 tidak ada lokasi.

Persentase penduduk berakses air minum

Tabel II.120.
Persentase penduduk berakses air minum
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penduduk berakses air minum	1.074.339	1.110.660	1.093.050	1.093.050	1.058.880
2.	Jumlah penduduk	1.462.442	1.462.442	1.463.809	1.470.261	1.477.861
3.	Persentase penduduk berakses air minum (1/2 x 100)	72,35%	73,46	75,87	74,34%	71.65 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tahun 2025.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, persentase penduduk berakses air minum mengalami penurunan sebesar 34.170 menjadi 1.058.880 jiwa dari keseluruhan penduduk kota Makassar sejumlah 1.477.861 jiwa, Jumlah penduduk terakses air minum berfluktuatif karena adanya penduduk yang memutus sambungan akses air minumnya sehingga diperoleh capaian persentase penduduk berakses air minum adalah sebesar 71.65%. Penyediaan air minum di kota Makassar dibedakan atas sistem perpipaan dan non perpipaan. System perpipaan sebagian besar dikelola oleh PDAM sedangkan sistem non perpipaan berupa sumur dalam yang dibiayai oleh APBD kota Makassar.

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Tabel II.121.
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah
di perkotaan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Volume sampah yang di guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	11.481,27	4.009,73	22.362,59	14.629,22	8.118,50
2.	Total Volume Sampah	363,801	363,800.57	365.712,74	375.651,69	388.381,87
3.	Persentase ketersediaan fasilitas pengurangan sampah perkotaan (1 / 2 x 100)	3,16	1,10	6,11	3,89	2,09

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Pada Tahun 2024, terdapat 7.601,70 ton volume sampah yang diguna ulang, daur ulang, pengelolaan sampah sebelum masuk TPA atau sebesar 2,09**%** dari total volume sampah di Kota Makassar sebesar 388**.**381,87 Ton. Menurunnya volume sampah ini disebabkan karena kurangnya partisipasi usaha dan/atau kegiatan di Kota Makassar yang melakukan pengurangan sampah .

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Tabel II.122.
Rasio tempat pemakaman umum
persatuan penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah daya tampung Tempat pemakaman umum	183.726	93.196	183.726	170.961	183,73
2.	Jumlah Penduduk	1.423.877	1.462.442	1.463.809	1.436.626	1.477,86
3.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (1 / 2 x 1.000)	129	125,63	125,51	119,00	124,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Pada Tahun 2024, Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk di kota makassar sebesar 124.32 dimana jumlah daya tampung tempat pemakaman umum di kota makassar yang tersedia sebesar 183.726 m2 dari 1.477.861 jiwa Jumlah Penduduk Kota Makassar,. hal ini disebabkan karena kurang memadainya lahan TPU saat ini dan Meningkatnya jumlah penduduk, sehingga Pemerintah Kota berupaya melakukan perluasan/penambahan Lahan TPU.

Jumlah Rumah Ibadah di Kota Makassar

Tabel II.123.
Jumlah Rumah Ibadah Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Ibadah Agama Islam	1377	1395	1467	1483	1507
2.	Rumah Ibadah Agama Kristen	149	152	153	157	152
3.	Rumah Ibadah Agama Katolik					
4.	Rumah Ibadah Agama Hindu	2	2	2	2	2
5.	Rumah Ibadah Agama Budha	22	22	22	24	21
Total Rumah Ibadah		1550	1571	1644	1666	1682

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kota Makassar tahun 2025

Data tabel diatas menunjukkan jumlah rumah ibadah Kota Makassar dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari 1550 rumah ibadah menjadi 1682 rumah ibadah.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Tabel II.124.
Rasio tempat ibadah persatuan penduduk
Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah tempat ibadah	1550	1571	1644	1666	1682
2.	Jumlah Penduduk	1.484.912	1.462.442	1.463.809	1.463.809	1 477.861
3.	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk (1/2 x 1.000)	1,04	1,07	1,12	1,14	1,14

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kota Makassar, tahun 2025

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan

Tabel II.125.
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan Kota Makassar Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dan berkelanjutan	1.061.959.00	1.070.359.00	1,110,660.00	1,093,050.00	1,058,880.00
2	Jumlah seluruh penduduk	1,423,877.00	1,462,442.00	1,463,809.00	1,470,261.00	1,477,861.00
3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan (1/2 x 100)	74,58	73,19	75.87	74.34	71.65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2023, jumlah penduduk dengan akses terhadap air minum yang terlindungi dan berkelanjutan 1.110.660 jiwa dari keseluruhan capaian persentase penduduk berakses air minum adalah sebesar 75,87% penyediaan air minum di kota Makassar dibedakan atas sistem perpipaan dan non perpipaan.

Persentase Area Kawasan Kumuh

Tabel II.126.
Persentase Area Kawasan Kumuh
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh (ha)	423,85	398	403,20	299,36	299.36
2	Luas Wilayah (ha)	17.577	17.577	17.577	17.577	17.577
3	Persentase kawasan kumuh (1/2 x 100)	2,43	2,27	2,29	1.70	1,70

Sumber: Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman Kota Makassar, tahun 2025

Dari data di atas menunjukkan bahwa sepanjang 4 tahun terakhir mulai tahun 2020-2024 persentase area kawasan kumuh mengalami penurunan dari 423,85 Ha Menjadi 299,36 Ha. pada tahun 2020 angkanya mencapai 423,85 Hektar. Hal ini disebabkan adanya wabah pandemi virus corona yang pada tahun tersebut, anggaran intervensi bidang permukiman kumuh di relokasikan atau dirasionalisasi dan pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023 karena Indikator penilaian kawasan kumuh berubah seiring hadirnya pemutakhiran data kawasan kumuh di perkotaan. Penangan kumuh hanya menyisakan penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022.

D. Penataan Ruang :

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada tahun 2030 (RTRW Kota Makassar Tahun 2015-2034).

Kegiatan identifikasi Ruang Terbuka Hijau adalah kegiatan menentukan titik atau lokasi lahan peruntukan Ruang Terbuka Hijau baik lahan privat maupun lahan publik secara geospatial berdasarkan peta citra satelit serta menghitung luas dan akumulasi dari luasan tersebut. jadi kegiatan ini hanya menghitung dan menjumlahkan lahan existing RTH Kota Makassar. Target yang ditetapkan kepada kegiatan tersebut diharapkan setiap tahunnya luas dan persentase luas RTH Kota Makassar bertambah, hal ini tidak lah sejalan dan dengan kegiatan yang dilaksanakan yang hanya menghitung luas existing, untuk mendapatkan penambahan luas dan persentase luas RTH Kota, utamanya RTH Publik, harus di lakukan pembebasan lahan atau pengadaan lahan dari lahan Non RTH menjadi lahan RTH Publik yang dimiliki dan di kelola oleh pemerintah Kota.

Tabel II.127.
Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	1.314,57	1.482,00	1.129,00	1.129,00*	984,34
2.	Luas Wilayah	17.577 Ha	17.577 Ha	17.577 Ha	17.577 Ha*	17.577
3.	Luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (1/2 x 100)	7,48%	8,39%	6,42%	6,42%*	5,54

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan DLH Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas angka persentase RTH Publik YoY, mengalami peningkatan dari tahun 2020 - 2021, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan persentase pada tahun 2020 sebesar (1,05%%) dari tahun sebelumnya, penurunan terjadi pada tahun 2022 sebesar (-2,03%) dari tahun 2021. Pada tahun 2024 luasan RTH Publik sebesar 5,54% berdasarkan data perhitungan luas dan persentase RTH Publik dan Privat di Kota Makassar.

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 akibat adanya lahan ruang terbuka hijau yang belum teridentifikasi serta belum terjadinya penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Makassar. Sementara pada tahun 2024 terjadi penurunan dikarenakan adanya alih fungsi lahan RTH dan tidak tersedianya rencana pengembangan RTH Publik Kota Makassar karena keterbatasannya Ruang lahan yang dapat ditetapkan menjadi RTH Publik.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan.

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber- IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.

Tabel II.128.
Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah bangunan ber-IMB	5.224	3.690	2.210	2.503	1.817
2.	Jumlah Bangunan	274.852	278.542	280.752	283.255	285.576
3.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (1 / 2)	0,019	0,013	0.007	0,009	0,006

Sumber: Dinas Penataan Ruang & DPMPTSP Kota Makassar, tahun 2025

Data jumlah bangunan ber-IMB dihitung berdasarkan jumlah IMB yang dikeluarkan tiap tahun. Terkait data jumlah bangunan ber-IMB keseluruhan bangunan di Kota Makassar belum pernah dilakukan pendataan. Pada Tahun 2024 rasio mengalami penurunan karena masih rendahnya kesadaran pemohon / pemilik bangunan yang belum mengerti mekanisme peralihan IMB menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) berbasis sistem informasi (web) dan masih banyaknya pemilik bangunan yang tidak membayarkan retribusi serta saat ini permohonan IMB hanya karena adanya kebutuhan mendesak untuk keperluan komersil semata.

Kesesuaian Rencana pembangunan dengan RTRW

Tabel II.129.
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RT
RW Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	100	100	100	100	100
2.	Dokumen RTRW	100	100	100	100	100
3.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, tahun 2025

Semua program dan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan berpedoman kepada RTRW Kota Makassar yaitu rencana pola ruang dan rencana struktur ruang sehingga untuk kesesuaiannya mencapai 100%.

E. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Rasio rumah layak huni

Tabel II.130.
Rasio rumah layak huni Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah rumah layak huni (unit)	258.268	262.027	280.001	279.681	279.844
2.	Jumlah penduduk (jiwa)	1.484.912	1.462.442	1.463.809	1.470.261	1.474.393
3.	Rasio rumah layak huni (1/2)	1 : 5,75	1 : 5,72	1:5.23	1:5.25	1:5.26

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, tahun 2025

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah seluruh rumah yang ada. Pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni di kota Makassar sebanyak 258.268 berbanding jumlah penduduk sebanyak 1.484.912 jiwa dengan rasio rumah layak huni 1 : 5,75. Pada tahun 2024 rumah layak huni di Kota Makassar meningkat menjadi 279.844 berbanding jumlah penduduk sebanyak 1.474.393 jiwa dengan rasio 1:5,26. Terjadi kenaikan rasio sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya disebabkan kenaikan jumlah penduduk di tahun 2024.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Tabel II.131.
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah seluruh rumah layak huni	253.748	257.507	280.001	279.681	279.844
2.	Jumlah rumah	254.397	268.678	301.107	279.975	287.974
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (1 / 2 x 100)	99.74	95.84	92.99	98.89	97.17

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, tahun 2025

Pada tahun 2020 jumlah rumah terjangkau layak huni sebanyak 253.748 rumah dengan cakupan ketersediaan rumah layak huni 99,74% sedangkan untuk tahun 2024 mengalami peningkatan rumah layak huni sebesar 279.844 rumah dengan cakupan ketersediaan rumah layak huni 97.17%.

Persentase lingkungan pemukiman kumuh

Tabel II.132.
Persentase lingkungan pemukiman kumuh
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luasan lingkungan pemukiman kumuh	382,29	423,85	403,20	299,36	299,36
2.	Luas wilayah	175.77	175.77	175.77	175.77	175.77
3.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (1 / 2 x 100)	217.49	241.14	229.39	170,31	170,31

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, tahun 2025

Luas wilayah pemukiman kumuh Kota Makassar tahun 2020 adalah 382,29 ha yang berarti dari luas total wilayah Kota Makassar sebesar 2,17% wilayah di Kota Makassar merupakan lingkungan permukiman kumuh. Namun jumlah itu menurun menjadi 1,70% pada tahun 2024, dari luas pemukiman kumuh di Kota Makassar tinggal 299,36 ha. Persentase permukiman kumuh relatif menurun sejak tahun 2022 yang juga bersamaan dengan berakhirnya masa pandemi covid-19.

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Tabel II.133.
Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani	268.46	393.26	393.26	20,72	23,98
2.	Luas pemukiman kumuh	382.29	423.85	403.20	299,36	299,36
3.	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (1/2 x 100)	70.22	92.78	97.53	6,92	8,01

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, tahun 2025

Luasan permukiman kumuh yang tertangani berdasarkan luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani dari 7 kecamatan (Tamalate, Mariso, Tallo, Biringkanaya, Panakukang, rappocini, Manggala).

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Tabel II.134.
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	2.649	2.641	1.996	20.626	20.463
2.	Jumlah seluruh rumah	253.397	268.678	275.950	275.975	287.974
3.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (1 / 2 x 100)	1.05	0.98	0.72	7,37	7,10

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan kota Makassar pada tahun 2020 sebesar 2.649 rumah kumuh dari jumlah seluruh rumah sebesar 252.386 rumah dengan persentase 1,05%. Lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan peningkatan terjadi pada tahun 2024 sebesar 20.463 rumah kumuh dari jumlah keseluruhan 287. 974 rumah dengan persentase 7,11%. Data diatas berdasarkan Persentase (4,58%) Penduduk Miskin Kota Makassar dikalikan dengan Jumlah KK.

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Tabel II.135.
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau	253.748	254.914	254.778	279.681	279.681
2.	Jumlah rumah tangga MBR	254.397	254.498	256.774	279.975	279.975
3.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (1/2 x100)	99.74	99,77	99.22	99.89	99.89

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, tahun 2025

Pada tahun 2020 rumah terjangkau layak huni sebanyak 253.748 rumah atau 99,74%, kemudian terjadi peningkatan jumlah rumah terjangkau layak huni pada tahun 2024 Sebanyak 279.681 atau 99.89% (Data Belum tersedia). Kenaikan tersebut sebanyak 28.045 atau 10.02% dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yang disebabkan karena para pengembang membangun beberapa kawasan perumahan dan pembangunan rumah swadaya oleh masyarakat

F. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tabel II.136.
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Petugas perlindungan masyarakat di Kota Makassar	300	300	300	300	1.300
2.	1 Wilayah kerja Kota Makassar	153	153	153	153	153
3.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (1 / 2 x 100)	1,96	1,96	1,96	1,96	100

Sumber: Satpol PP Kota Makassar, tahun 2025

Pada tahun 2024, upaya peningkatan kapasitas dan jumlah petugas Linmas mengalami kemajuan yang signifikan. Satpol PP Kota Makassar berhasil merekrut tambahan 1.000 orang Linmas, yang membawa jumlah keseluruhan petugas Linmas menjadi 1.300 orang. Dengan penambahan ini, rasio petugas Linmas di setiap kelurahan meningkat menjadi rata-rata 8 orang per kelurahan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif dalam memperkuat keberadaan petugas perlindungan masyarakat di tingkat kelurahan dan RT/RW, yang dapat lebih responsif terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kelurahan.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)

Tabel II.137.
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(Ketenteraman, Ketertiban, Keindahan)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	534	344	209	375	353
2.	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP	645	360	209	375	353
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (1 / 2 x 100)	82,79	95,56	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah kasus gangguan ketertiban umum yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol pp termasuk penanganan massa aksi unjuk rasa. kasus ganguan ketertiban umum tersebut bukan hanya dari laporan masyarakat tetapi termasuk juga kegiatan patroli rutin wilayah di semua kecamatan yang menangani ganguan ketertiban umum, keamanan dan keindahan. dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah kasus gangguan dan peningkatan persentase tingkat penyelesaian.

Angka Kriminalitas

Indikator angka kriminalitas adalah indikator untuk mengukur tingkat kejahatan di suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran tingkat kriminalitas atau kasus kejahatan yang terjadi disuatu wilayah. Permasalahan kriminalitas merupakan suatu fonemena sosial di tengah-tengah masyarakat luas. Adanya fenomena sosial tersebut dilatarbelakangi dari berbagai fakrtor yang membuat suatu gejolak di dalam tubuh masyarakat khususnya pada kota-kota besar atau metropolitan tidak terkecuali Kota Makassar

Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia yang juga menjadi pusat industri, perdagangan, jasa dan pendidikan di Indonesia Timur menjadikannya sebagai salah satu kota tujuan urbanisasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kehidupan lebih baik sehingga Pemerintah Kota Makassar harus siap menanggung seluruh resiko sosial termasuk gangguan keamanan aksi kriminalitasnya. Angka kriminalitas ini sendiri dihitung dari jumlah kasus kejahatan/kriminalitas dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah pada tahun berkenaan dikali 100.000 penduduk. Adapun data Jumlah aksi kriminalitas di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.138.
Angka Kriminalitas Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Jenis Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Jumlah kasus narkoba	475	252	373	374	0
2.	Jumlah kasus pembunuhan	9	1	10	9	0
3.	Jumlah kejahatan seksual	3	6	45	84	91
4.	Jumlah kasus penganiayaan	89	281	1791	1358	1061
5.	Jumlah kasus pencurian	463	173	1696	1972	1749

No	Jenis Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024*
6.	Jumlah kasus penipuan	105	81	1093	398	463
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	1	2	3	0	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	1145	796	7,432	4,195	3364
9.	Jumlah penduduk	1,500,000	1,423,887	1,463,809	1,463,809	1,464,640
10.	**Angka kriminalitas (8)/(9)**	**76**	**56**	**508**	**287**	**230**

Sumber : Badan KesbangPol Tahun 2025

Dari tabel diatas yang menampilkan angka kriminalitas di Kota Makassar secara umum berfluktuatif setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun terakhir 2020-2024. Data tersebut dapat diuraikan, dimana angka kriminalitas Kota Makassar pada tahun 2020 rerata sebesar 75 kasus per 100.000 penduduk *(crime rate)* dari total kasus sebanyak 1145 kasus *(crime total)* dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 56 kasus per 100.000 penduduk *(crime rate)* dari total kasus sebanyak 796 kasus dengan jumlah penduduk 1.423.887 jiwa, kemudian mengalami kenaikan kasus kriminalitas pada tahun 2022 sebesar 508 kasus per 100.000 penduduk *(crime rate)* dari total kasus sebanyak 4.195 kasus *(crime total)* dengan jumlah penduduk 1.463.809 jiwa, pada tahun 2023 angka kriminalitas mengalami penurunan dengan rerata kasus sebesar 287 kasus per 100.000 penduduk *(crime rate)* dari total kasus sebanyak 4.195 kasus *(crime total)* dengan jumlah penduduk 1.463.809 jiwa, penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024 yaitu rerata kasus sebesar 230 kasus per 100.000 penduduk *(crime rate)* dari total kasus sebanyak 3.364 kasus *(crime total)* dengan jumlah penduduk 1.464.640 jiwa

Persoalan gangguan keamanan aksi kriminalitas merupakan salah satu masalah cukup krusial yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia yang dapat mengganggu rasa aman warga dalam melakukan aktivitasi termasuk Kota Makassar sendiri. Pencegahan dan penanganan gangguan keamanan aksi kriminalitas di Kota Makassar senantiasa terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan berkolaborasi dengan pihak aparat keamanan (Polrestabes Makassar) dengan menggunakan beberapa program strategis yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu salah satunya adalah pengadaan CCTV disetiap lorong dan titik-titik strategis jalan dalam Kota Makassr serta pembenahan infrastruktur lampu jalan disetiap lorong demi mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban dalam Kota Makassar.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Tabel II.139.
Cakupan penyelenggaraan bencana kebakaran
Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	50 unit	50 unit	60 unit	61 unit	71 unit
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.423.877 Jiwa	1.427.619 Jiwa	1.432.189 Jiwa	1.432.189 jiwa	1.477.861 jiwa
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) (1/2 x 100)	0,0035	0,0035	100	100	92,50

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, tahun 2025

Untuk tahun 2021 jumlah mobil sebanyak 50 unit dan pada tahun 2022 terdapat tambahan pengadaan unit berjumlah 2 unit yaitu mobil rescue dan mobil rantis dan

selisih dari jumlah keseluruhan adalah 3 unit yaitu mobil komando operasional ditempatkan dibeberapa posko. Sedangkan jumlah keseluruhan pada tahun 2024 berjumlah 71 unit.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tabel II.140.
Respon Time Rate Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Makassar Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jangkauan kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	142 kasus	139 kasus	151 kasus	395 kasus	303 kasus
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	142 kasus	139 kasus	151 kasus	395 kasus	303 kasus
3	*Respon Time Rate* daerah layanan WMK (1 / 2 x 100)	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, tahun 2025

Dari jumlah kebakaran ditahun 2023 berjumlah 395 kebakaran , waktu tanggap Kurang dari 1 jam setelah pengaduan berjumlah 395 Pengaduan dan semuanya terlanyani dengan ketetapan waktu Respon Time 15 Menit. Terjadi peningkatan Kasus Kejadian Kebakaran di tahun 2023 sebanyak 395 kejadian kebakaran dari tahun 2022 yang sebanyak 151 kejadian kebakaran, ini di karenakan kemarau panjang.

Wilayah Rawan Bencana
Data luas wilayah rawan bencana (Daerah terdampak bencana)

Tabel II.141.
Potensi Luas wilayah rawan bencana Kota Makassar Tahun 2022 - 2024

No	Jenis Bancana	Tahun (Luas)		
		2022 (ha)	2023 (ha)	2024 (ha)
1	Bencana Banjir	6.496,72	18.305,93	6.354.,63
2	Bencana Kekeringan	18.229,95	18.229,95	17.703,77
3	Bencana Gelombang ekstrim dan abrasi	1.263,50	1.263,50	660,24
4	Bencana Tsunami	1.854,35	1.854,35	1.854,35
5	Epidemi dan wabah penyakit	18.305,93	18.305,93	18.305,93
6	Cuaca ekstrim	17.827,81	17.827,81	17.703,77

Sumber : BPBD Kota Makassar, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat luasan potensi wilayah rawan bencana Kota Makassar Tahun 2022 s/d Tahun 2024. Untuk tahun 2024 potensi luasan wilayah rawan banjir adalah 6354,63 Ha yang berada pada kelas tinggi, Luasan wilayah rawan kekeringan 17.703,77 Ha berada pada kelas sedang , Bencana Gelombang Ekstrim dan abrasi luasnya adalah 660,24 Ha berada pada kelas Tinggi, Bencana Tsunami

adalah 1854,35 Ha yang berada pada Kelas tinggi, Epidemi dan wabah penyakit adalah 18.305,93 Ha yang berada pada kelas sedang, dan cuaca ekstrem yang berada pada kelas ekstrim tinggi.

Tabel II.142.
Persentase Korban Bencana Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (1.1/1.2 x 100)**	100	100	100	100	100	100
1.1	Jumlah Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	6098	3340	11.628	11.018	6.605	4907
1.2	Jumlah Korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	6098	3340	11.628	11.018	6.605	4907
2	**Persentase Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (2.1/2.2 x 100)**	100	100	100	99,97	99,99	99,83
2.1	Jumlah korban yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	2337	2037	5679	9114	45859	6743
2.2	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	2337	2037	5679	9116	45862	6745

Sumber : Dinas sosial dan BPBD Kota Makassar, Tahun 2025

Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap hingga tahun 2024 mencapai 99,83% dari jumlah total korban bencana alam yang seharusnya di evakuasi. Dilihat dari jumlahnya, pada tahun 2023 jumlah korban bencana lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2024, pada tahun 2024 korban bencana yang di evakuasi adalah korban banjir/genangan air yang terjadi di kecamatan Manggala, Panakkukang dan Tamalate dengan jumlah korban 6734 jiwa. Korban bencana tersebut yang

dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Jumlah ini mengalami penurunan dari jumlah korban bencana tahun 2023 dikarenakan jumlah kejadian bencana mengalami penurunan sehingga jumlah korban bencana mengalami penurunan.

Persentase Penegakan PERDA

Tabel II.143.
Persentase penegakan Perda Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penyelesaian penegakan Perda	4603	542	250	185	153
2.	Jumlah pelanggaran Perda	5559	674	250	185	153
3.	Persentase penegakan Perda (1 / 2 x 100)	82,80	80,42	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Makassar, tahun 2025

Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 153 kasus penanganan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berhasil ditangani oleh Satpol PP Kota Makassar. Angka tersebut berasal dari total 477 laporan pengawasan selama tahun 2024, yang menunjukkan adanya pengawasan intensif terhadap pelaksanaan peraturan daerah di berbagai sektor. Proses pengawasan ini melibatkan pemantauan terhadap berbagai aspek, mulai dari ketertiban umum, pengendalian peredaran barang, hingga penegakan aturan yang berkaitan dengan lingkungan dan keindahan kota.

G. Urusan Sosial

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Untuk tahun 2024 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial telah mencapai 100% yang artinya bahwa semua PMKS yang patut mendapat bantuan, telah mendapatkan bantuan. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Makassar pada tahun 2020 s.d 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II.144.
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PMKS yang diberikan Bantuan	115.988	80.810	77.260	23.365	7693
2.	Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	115.988	80.810	77.260	23.365	7693

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Persentase PMKS yang Memperoleh bantuan sosial (1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, tahun 2025

Persentase PMKS yang tertangani

Pada tahun 2023, jumlah PMKS yang terdata pada Dinas Sosial berjumlah 23.365 orang. Dari data tersebut, persentase PMKS yang tertangani yaitu 100% yang mencakup PMKS mendapatkan bantuan melalui APBD Pokok sebanyak 2.177 orang, penerima bantuan APBN PKH sebanyak 21.188 Orang dengan rincian bantuan melalui Pos sebanyak 735 KK dan Himbara sebanyak 20.453 KK

Penurunan jumlah PMKS dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebanyak 53.895 KK atau 69,,8% yang dikarenakan pada tahun 2022 masyarakat baru pulih dari dampak pandemi covid-19 yang diberikan bantuan sosial. Persentase PMKS Kota Makassar yang tertangani di Kota Makassar disajikan pada Tabel berikut:

Tabel II.145.
Persentase PMKS yang tertangani
Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PMKS yang tertangani	115,988	159,316	77,260	23,365	23.714
2.	Jumlah PMKS yang ada	115,988	159,316	77,260	23,365	23.714
3.	Persentase PMKS yang tertangani (1 / 2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, tahun 2025

Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

PMKS skala meliputi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, dan korban bencana alam dan atau sosial. Pada tahun 2023, jumlah PMKS skala yang terdata pada Dinas Sosial yaitu 23.365 orang dengan persentase yang memperoleh bantuan sosial yaitu 100%. Jumlah PMKS Skala yang diberikan bantuan mencakup bantuan melalui APBD Pokok sebanyak 2.177 orang, penerima bantuan APBN PKH sebanyak 21.188 Orang dengan rincian bantuan melalui Pos sebanyak 735 KK dan Himbara sebanyak 20.453 KK.

Tabel II.146.

Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	115,988	159,316	76,160	23.365	24.714
2.	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	115,988	159,316	76,160	23.365	24.714
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (1 / 2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, tahun 2025

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

Tabel II.147.

Persentase Panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PMKS dalam 1 thn yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	-	-	10 KUBE APBD Provinsi	21 KUBE APBD Provinsi	0
2.	Jumlah PMKS dalam 1 thn yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi Sejenis	-	-	10 KUBE APBD Provinsi	21 KUBE APBD Provinsi	0
3.	Persentase Panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (1/2 x 100)	-	-	100	100	0

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, tahun 2025

Pada tahun 2024, PMKS yang mendapatkan program pemberdayaan sosial melalui KUBE tidak ada.

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Jumlah Panti Sosial 150 Lembaga diantaranya yaitu LKSA berjumlah 105 lembaga, TAS berjumlah 7 lembaga, Disabilitas 3 lembaga, Napza/HIV AIDS 16 lembaga, Sosial Keagamaan Kemanusiaan 11 lembaga, Pendidikan 2 lembaga, SDM 1 lembaga, NAPI 1 lembaga, AMPK 2 lembaga, dan Pemulung 2 lembaga.

Tabel II.148.
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah panti sosial dalam 1 thn yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial	93	144	168	168	168
2.	Jumlah panti sosial dalam 1 thn yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	93	144	168	168	168
3.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial (1/2x100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, tahun 2025

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) merupakan sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya yang mana seharusnya berada pada tingkat kelurahan. Namun karena pelayan sosial pada tingkat kelurahan seperti TKSK, karang taruna dan pekerja sosial masyarakat dalam posisi yang tidak aktif sehingga WKSBM juga tidak berjalan dengan seharusnya.

Tabel II.149.
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana palayanan kesejahteraan sosial Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah WKBSM dalam 1 thn yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	153	153	0	0	0
2.	Jumlah WKBSM dalam 1 thn yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	153	153	153	153	153

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (1/2 x 100)	100	100	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, tahun 2025

Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial pada tahun 2024 yaitu 4.907 jiwa dengan persentase korban yang menerima bantuan sosial yaitu 100%. Bantuan korban bencana berupa makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, kebutuhan permakanan kelompok rentan dan dukungan psikososial. Jumlah penerima bantuan dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sekitar 1.698 jiwa dikarenakan jumlah data yang seharusnya menerima bantuan juga menurun, sehingga walaupun jumlah berkurang namun persentase tetap 100%. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Kota Makassar pada tahun 2017 s.d 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.150.
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tangap darurat	3340	11628	11018	6605	4907
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tangap darurat	3340	11628	11018	6605	4907
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, tahun 2025

Pada Tahun 2024 Jumlah Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap merupakan tupoksi dari instansi lain. Jumlah penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2024, sebanyak Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti sebanyak 756 Orang dengan Jumlah PMKS yang menerima jaminan sosial untuk Panyandang Disabilitas 564 orang, Anak terlantar 107 Orang, dengan Gangguan Jiwa 6 Orang, Orang Lanjut Usia terlantar 38 Orang

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Tabel II.151.

Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana prasarana tangap darurat lengkap Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	2037	5679	9114	45859	6734
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	2037	5679	9116	45862	6745
3.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (1/2 x 100)	100	100	99,97	99,99	99,83

Sumber: BPBD Kota Makassar, tahun 2025

Pada Tahun 2024 Jumlah Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap berjumlah 6734 orang, dan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sebesar 6745 orang sehingga persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap adalah 99,83%.

Tabel II.152.

Persentase Penyandang Disabilitas Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Serta Lansia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa serta lansia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	3357	104738	8404	105	570
2.	Jumlah penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa serta lansia yang tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	3357	104738	8404	105	570
3.	Persentase penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial (1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, Tahun 2025

Jumlah penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2024, sebanyak 570 Orang terdiri dari Penyandang disabilitas terlantar 1 Orang, Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang menerima jaminan sosial sebanyak 38 orang dan jumlah lanjut usia.

2.1.3.2. LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR

A. Urusan Tenaga Kerja

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Tabel II.153.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	326	212	222	214	164
2.	Jumlah perusahaan	4.787	4.787	5.273	5.084	5.808
3.	Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun (1/2 x 1.000)	6,81	4,43	4,21	4,21	2,82

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha-pekerja yang dilaporkan dengan jumlah perusahaan.

Kondisi Angka sengketa pengusaha-pekerja Kota Makassar periode 2020 s.d 2024 mengalami penurunan sebesar minus 3,99 persen, hal ini teridentifikasi positif dimana terjadinya penurunan kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja. Pada tahun 2020 angka sengketa pengusaha-pekerja menunjukkan angka sebesar 6,81 persen menurun di tahun 2024 menjadi 2,82 persen. Dimana dari 5.808 perusahaan di Kota Makassar tercatat sebanyak 164 kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja.

kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Tabel II.154.

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	190	158	139	134	104
2.	Jumlah kasus yang dicatatkan	326	212	222	214	164
3.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (1 / 2 x 100)	58,28	74,53	62,61	62,62	63,41

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama merupakan perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dengan jumlah kasus yang dilaporkan.

Selama periode 2020 s.d 2024 besaran kasus yang diselesaikan Perjanjian Bersama mengalami peningkatan sebesar 5,13 persen dimana pada tahun 2020 kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama menunjukkan angka sebesar 58,28 persen menjadi 63,41 persen di tahun 2024.

Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

Tabel II.155.
Besaran pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	831	1.070	4.482	3.138	2.368
2.	Jumlah pencari kerja terdaftar	1.651	4.475	8.131	5.315	3.758
3.	Besaran pencari kerja yang ditempatkan (1/2 x 100)	50,33	23,91	55,12	59,04	63,01

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Besaran pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja terdaftar dikalikan 100.

Untuk besaran penempatan tenaga kerja selama periode 2020 s.d 2024 menunjukkan angka peningkatan sebesar 12,68 persen. Pada tahun 2020 tercatat angka penempatan tenaga kerja sebesar 50,33 persen sedangkan tahun 2024 tercatat sebesar 63,01 persen.

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Tabel II.156.
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program
Jamsostek Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Jumlah pekerja/buruh peserta Jamsostek	264.739	269.208	278.559	263.415	286.371
2.	Jumlah pekerja/buruh	565.122	425.935	629.933	582.708	629.183
3.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (1/2 x 100)	46,85	63,20	44,22	45,21	45,51

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Kondisi besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kota Makassar selama periode 2020 s.d 2024 mengalami penurunan sebesar minus 1,34

persen. Pada tahun 2020 besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek menunjukkan angka sebesar 46,85 persen menurun di tahun 2024 menjadi sebesar 45,51 persen.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Tabel II.157.
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	0	0	0	0	0
2.	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha	0	0	0	0	0
3.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (1/2 x 100)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tidak terdapat perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Adapun kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat merupakan perselisihan hak, kepentingan (perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama) dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Tabel II.158.
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	500	240	834	640	603
2.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	1.643	646	2.045	2.559	3.175
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (1 / 2 x100)	30,43	37,15	40,78	25,01	18,99

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Selama periode 2020 s.d 2024 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kota Makassar menurun sebesar minus 11,44 persen dimana

di tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 30,43 persen menjadi sebesar 18,99 persen di tahun 2024.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

Tabel II.159.
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	360	620	260	192	136
2.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	825	1.047	602	818	907
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (1/2 x 100)	43,64	59,22	43,19	23,47	14,99

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Selama periode 2020 s.d 2024 Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 2021, terjadi peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, namun jumlah tersebut menurun kembali pada 2022 dan terus menurun hingga 2024. Meskipun jumlah pendaftar terus meningkat dari 2020 hingga 2024, persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan relatif menurun secara konsisten, dari sekitar 43,64% di 2020 menjadi hanya 14,99% di 2024, menunjukkan efisiensi pelatihan yang menurun meskipun minat pendaftar meningkat.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Tabel II.160.
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	90	60	205	130	123
2.	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	357	236	621	587	572
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (1/2 x 100)	25,21	25,42	33,01	22,15	21,50

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Selama periode 2020 s.d 2024 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kota Makassar menurun sebesar minus 3,71 persen dimana di tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 25,21 persen menjadi sebesar 21,50 persen di tahun 2024.

Rasio lulusan S1/S2/S3

Tabel II.161.
Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	229.188	209.880	245.782	160.615	622.773
2.	Jumlah penduduk	1.423.877	1.427.619	1.432.189	1.436.626	1.464,660
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2 x 10.000)	16,10	14,70	17,16	11,18	42,52

Sumber : Data Susenas, tahun 2025

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan Si, S2 dan S3. Dimana selama 5 (lima) tahun ke belakang rasio ini mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 16,10 persen lulusan S1/S2/S3 meningkat pada tahun 2024 tercatat sebesar 42,52 persen.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I - IV. Data persentase perempuan di lembaga pemerintah, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.162.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ASN perempuan di Lembaga pemerintah di Kota Makassar	6.838	6.910	7.679	7.454	9.552
2.	Jumlah seluruh ASN di Lembaga pemerintah di Kota Makassar	10.385	10.585	11.168	11.030	13.874
3.	Persentase partisipasi ASN perempuan di lembaga pemerintah di Kota Makassar (1/2 x 100)	65,84	65,77	68,76	67,58	68,85

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah ASN perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Makassar tahun 2020 sebesar 6.838 orang dan meningkat di tahun 2021 menjadi 6.910 serta tahun 2022 menjadi 7.679 orang, dan tahun 2023 berkurang sebanyak 225 orang menjadi 7.454 orang karena adanya pegawai pindah keluar dan juga pegawai yang Pensiun dan Meninggal Dunia.

Di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 28% dari tahun 2023 yaitu menjadi 9.552 orang, yang disebabkan karena banyaknya ASN Perempuan yang mutasi dan pindah masuk dari pemerintah daerah ke pemerintah kota makassar.

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

Pemenuhan kuota perempuan belum maksimal di Tingkat DPRD Kota Makassar. Persentase proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD Kota Makassar masih sangat kecil dibanding jumlah total kursi keanggotaan DPRD yang ada. Data dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.163.
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	12	12	13	13	8
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	50	50	50	50	50
3.	Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD (1 / 2 x 100)	24	24	26	26	16

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2024

Pada Data diatas persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD sampai tahun 2023 mengalami peningkatan dimana indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya.

Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan.

Perlu kita ketahui bahwa proporsi keterwakilan perempuan di DPRD targetnya 30% namun sampai tahun 2023 belum mencapai target tapi dari tahun ke tahun

keterwakilan perempuan di DPRD mengalami peningkatan. Dan di Tahun 2023 persentase keterwakilan perempuan di DPRD masih sama di Tahun 2022 yaitu 26%. Namun di tahun 2024 keterwakilan perempuan di DPRD mengalami penurunan dari 13 orang menjadi 8 orang atau sebanyak 16% dari jumlah total kursi di keanggotaan.

Rasio KDRT

Tabel II.164.
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah KDRT	1.034	1551	314	56	44
2.	Jumlah rumah tangga	435.033	435.033	441384	464.816	452.097
3.	Rasio KDRT (1 / 2 x 100)	0,24	0,35	0,07	0,01	0,01

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2025

Tracking kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Makassar 5 (lima) tahun terakhir yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi yang signifikan. Dapat dilihat perbandingan data tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan 517 kasus KDRT, hal disebabkan beberapa faktor yang relevan saat itu, adanya Pandemi Covid 19 berdampak pada system kehidupan di dalamnya.

Aturan-aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membatasi ruang gerak seseorang secara ekonomi atau istilah dirumahkan, sehingga pendapatan finansial yang menurun yang melatarbelakangi meningkatnya tingkat perceraian. Perceraian tersebut salah satu faktornya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut mempengaruhi keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga bisa dikatakan apabila seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya merasa nyaman, tenang, bahagia dan merasa saling melindungi satu sama lain.

Pada tahun 2022 data KDRT menurun drastis dari 1.551 tahun 2021 menjadi 314 kasus yang terlaporkan pada UPTD PPA Kota Makassar. Pengalaman tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020 pemerintah berupaya membuat strategi yang cepat dan tepat untuk menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga, dengan giat melakukan sosialisasi secara komprehensif walaupun terbatas akibat pandemic Covid 19. Strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengoptimalkan layanan konsultasi masalah keluarga yang dilakukan oleh Unit Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) serta sosialisasi yang massif terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada sasaran tingkat kecamatan dan kelurahan yang tinggi angka kekerasannya.

Seiring tahun, pemerintah pusat telah mencabut status Covid 19 pada tahun 2023, perekonomian mulai kembali bangkit. Hal tersebut mempunyai pengaruh sangat besar turunnya angka kekerasan dalam rumah tangga. Dapat dilihat pada tabel di tahun 2023, UPTD PPA melayani laporan KDRT berjumlah 56 pengaduan. Secara signifikan jumlah tersebut tidak lagi didominasi akibat faktor ekonomi namun beberapa hal terjadi Kasus KDRT seperti perselingkuhan dan kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat sehingga menjadi tantangan baru bagi pemerintah Kota Makassar khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Tahun terakhir di 2024, Kasus KDRT semakin mengerucut pada laporan pengaduan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Data yang telah dihimpun oleh Tim UPTD PPA berjumlah 44 Kasus KDRT yang didominasi bentuk kekerasan fisik dan Psikis. Dari data tersebut dapat disimpulkan, jumlah kasus tahun 2022 sampai dengan 2024 adanya komperasi menurun yang berkolerasi dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kota Makassar.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Tabel II.165.
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Pengaduan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	617	481	488	634	520
2.	Jumlah pengaduan/pelaporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	617	481	488	634	520
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (1/2 x100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2025

UPTD PPA Kota Makassar yang merupakan unit dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Makassar, memiliki tenaga yang profesional dalam menyelenggarakan layanan perlindungan perempuan dan anak. Didasari dengan kualifikasi pengetahuan dan keterampilan yang telah dilatih, melalui seleksi penerimaan tenaga ahli yang ketat oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Tahun 2020 unit ini masih berbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan kolaborasi pemerintah dan non pemerintah dalam melaksanakan layanan perlindungan perempuan dan anak. Pada tahun 2021 peralihan dari P2TP2A menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang merupakan satuan layanan pemerintah yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan layanan khusus yang berdiri sendiri dengan Surat Keputusan Walikota Makassar.

Salah satu jenis layanan UPTD PPA adalah layanan masyarakat, pada tahun 2020 petugas layanan menerima dan menindaklanjuti laporan sebanyak 617 pengaduan, tingginya laporan masyarakat disebabkan oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga pada masa Pandemi Covid 19. Tahun 2021 meskipun masih masa Pandemi Covid 19, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berupaya menurunkan angka kekerasan menjadi 481 dengan gencar melakukan sosialisasi atau edukasi terkait pencegahan kekerasan perempuan

dan anak,

Namun usaha menurunkan kasus kekerasan pada tahun 2022 belum maksimal, trend kasus tahun sebelumnya didominasi oleh KDRT beralih dengan trend kasus Kekerasan Anak tahun 2022 dengan jumlah 488. Permasalahan juga dirasakan pada tahun 2023, laporan masyarakat masih meningkat dan didominasi jenis kasus kekerasan terhadap anak, secara spesifik bentuknya kekerasan seksual. Pada tahun 2024, Tim UPTD PPA menerima laporan masyarakat sebanyak 520 pengaduan, masih didominasi kekerasan terhadap anak dengan bentuk kekerasan seksual dan fisik yang hampir sama angkanya.

Jenis layanan pengaduan ini terbagi menjadi dua bagian, layanan masyarakat langsung datang ke kantor UPTD PPA juga melalui WA Center dan Media Sosial. Tersosialisasinya kontak pengaduan ke masyarakat, tentunya akan terintegrasi dengan layanan lanjutan yang diberikan, sehingga berpengaruh pada capaian 100% cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan.

Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kota Makassar dari Tahun 2020-2024 berhasil dilayani secara keseluruhan sehingga capaian setiap tahunnya 100%. Secara rinci perkembangan dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.166.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A	617	202	21	8	44
1.2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan di Puskesmas	617	202	21	8	44
1.3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A (1.1 /1. 2 x 100)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih mampu tatalaksana PPT/PKT di RS	129	186	161	182	185
2.2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan di RS	129	186	161	182	185
2.3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	100	100	100	100	100

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih mampu tatalaksana PPT/PKT di RS (2.1 /2.2 x 100)					

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2025

UPTD PPA memiliki layanan integrasi ke lembaga jejaring dengan melakukan rujukan ke lembaga atau unit layanan termasuk pada layanan kesehatan di Kota Makassar, seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, serta layanan kesehatan non pemerintah. Kerjasama UPTD PPA dengan layanan kesehatan pemerintah dan non pemerintah telah dilaksanakan sejak masih terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Tahun 2020 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi oleh P2TP2A telah merujuk 617 korban di beberapa Puskesmas di Kota Makassar, dan ditangani oleh tenaga terlatih, saat itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjalankan program Puskesmas Ramah Anak yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, hal ini merupakan salah satu indikator dari Kota Layak Anak.

Salah satu jenis layanan dari P2TP2A adalah pendampingan korban kekerasan, pada tahun 2021 petugas P2TP2A merujuk korban ke layanan kesehatan pada tingkatan Puskesmas sebanyak 202 korban. Setelah perubahan status P2TP2A menjadi UPTD PPA, Tim Pendamping Kasus lebih mengintensifkan lagi pendampingan penanganan kasus sehingga tahun 2022 dengan gencarnya sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak, korban kekerasan turun yang dirujuk ke layanan kesehatan.

Tahun 2023 UPTD PPA intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan layanan kesehatan non pemerintah, salah satunya Lembaga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan, rata-rata korban eksploitasi seksual komersial anak atau diistilahkan Open BO di rujuk ke PKBI. Lembaga PKBI memiliki layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi yang sangat dibutuhkan oleh UPTD PPA dalam mengidentifikasi Korban yang terdampak Infeksi Menular Seksual, sehingga pelayanan kesehatan yang dirujuk di Puskesmas menurun menjadi 8 Korban.

Tahun terakhir di 2024, kasus kekerasan terhadap anak dengan bentuk kekerasan seksual dan fisik mendominasi rekap kasus UPTD PPA, rujukan layanan kesehatan sebagai salah satu layanan pemulihan fisik menjadi hal penting bagi korban kekerasan seksual dan fisik. Selain lembaga PKBI, tim pendamping juga merujuk kelayanan Puskesmas sebanyak 44 korban. Dari kesimpulan tabel data tersebut bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang terlatih di Puskesmas sebanyak 100%.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Tabel II.167.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	109	291	198	165	145
2.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial	875	909	237	346	145
3.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh Petugas Resos terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada unit pelayanan terpadu (1/2 x 100)	12,46	79,24	83,54	47,68	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2025

Kewenangan UPTD PPA Kota Makassar selain penanganan, pemulihan dan juga perlindungan. Syarat dari pembentukan UPTD PPA di Kabupaten/Kota diwajibkan memiliki Rumah Perlindungan Sementara atau RPS, sebagai tempat penampungan sementara atau layanan rehabilitasi. RPS sebagai layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Secara umum dalam rentang lima tahun terakhir rata-rata rasio cakupan layanan rehabilitasi sosial dari tahun 2020-2024 berfluktuatif, tahun 2020 perbandingan data mencapai 12,46%, Tahun 2021 sebesar 79,24%, Tahun 2022 sebesar 83,54%, Tahun 2023 sebesar 47,68%, dan data terakhir tahun 2024 mencapai 100%.

Dari berbagai kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hampir seluruhnya memerlukan layanan rehabilitasi sosial. Hanya saja, keterbatasan Lembaga-lembaga layanan rehabilitasi sosial yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Makassar menjadi kendala, terutama bagi kasus-kasus yang memerlukan rehabilitasi jangka Panjang, seperti kasus narkoba dan rehabilitasi bagi disabilitas.

Walaupun dalam jejaring yang dibangun oleh UPTD PPA Kota Makassar telah melibatkan balai rehabilitasi milik Kementerian Sosial RI, namun keterbatasan waktu dan kapasitas yang tidak berimbang antara kasus yang terus bertambah secara signifikan. Belum lagi keterbatasan kapasitas SDM terlatih dan bersertifikasi yang dimiliki oleh Lembaga layanan yang tidak berimbang dengan jumlah kasus yang ada.

UPTD PPA selama lima tahun ini selain rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak, juga konsen pada rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan juga anak yang menjadi saksi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ABH tersebut dari titipan Polres dan

Polsek yang ada di Kota Makassar yang dapat di restoratif justice.

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tabel II.168.
Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah perkara yang diputus pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang terkai dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	85	339	98	68	51
2.	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	92	339	99	68	51
3.	Cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan Perempuan dan Anak (1 / 2 x 100)	92.39	100	98,99	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2025

Keterangan : Data Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kota Makassar Tahun 2024 terdapat pada Pengadilan Negeri Makassar (Sementara Proses Permintaan Data)

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar dimana jumlah perkara yang diputus pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Tahun 2020 sebesar 85 perkara dan meningkat pada Tahun 2021 menjadi 339 perkara. Pada tahun 2022 ada 98 perkara dan pada tahun 2023 menurun menjadi 68, sedangkan data terkini tahun 2024 sebesar 51 perkara dari cakupannya 5 (lima) tahun terakhir hampir mencapai 100% tiap tahunnya.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Tabel II.169.
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	460	650	420	508	520
2.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan bantuan hukum	659	918	470	634	520
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum (1/2 x 100)	69,80	86,46	89,36	80,13	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2025

Data Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kota Makassar, terkait Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum di UPTD PPA pada Tahun 2020 sebesar 460

korban, sedangkan ada 659 korban yang membutuhkan bantuan hukum, sehingga cakupan hanya mencapai 69,80%. Tahun 2021 Perempuan dan Anak mendapatkan layanan bantuan hukum di UPTD PPA sebesar 650 korban sedangkan yang membutukan 918 korban, sehingga mendapat cakupan 86,46 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 UPTD PPA melaksanakan pendampingan hukum kepada korban sebesar 420 korban, sedangkan yang membutuhkan 470 korban, sehingga cakupannya mencapai 89,36%.

Ditahun 2023 terjadi peningkatan pendampingan kasus sebesar 508 korban, namun yang membutuhkan bantuan hukum sebesar 634, sehingga cakupannya turun menjadi 80,13% dari tahun sebelumnya. Pada tahun terakhir 2024 UPTD PPA melaksanakan pendampingan hukum 348 korban, dari 457 korban yang seharusnya didampingi, sehingga capaiannya turun 76,14%. Cakupan pendampingan hukum oleh UPTD PPA dari 5 (lima) tahun fluktuatif disebabkan pendamping hukum atau konselor hukum hanya berjumlah 2 orang dan dibantu oleh tim Pekerja Sosial Tim Reaksi Cepat UPTD PPA, sehingga capaian tidak maksimal.

Selain SDM masih terbatas, korban yang membutuhkan bantuan hukum di rujuk ke lembaga jejaring atau mitra yang melaksanakan pelayanan pendampingan hukum seperti LBH Makassar, LBH APIK, Peradi, dan lembaga hukum lainnya yang peduli perempuan dan anak. Sedangkan data yang tidak mendapatkan bantuan hukum, itu disebabkan karena urgensi kasus yang dianggap bisa diselesaikan dengan aparat penegak hukum yang sudah memiliki komitmen baik terhadap anak dan perempuan, yang selama ini menjalin kerja sama baik dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel II.170.
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan
Dan Anak Korban Kekerasan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan pemulangan	1.034	1.550	416	634	520
2.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan tercatat di UPT	1.034	1.551	416	634	520
3.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (1/2 x 100)	100	99,93	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2025

Kasus yang telah diterminasi oleh Pendamping Kasus UPTD PPA diwajibkan oleh pendamping untuk melakukan pemulangan dengan menyatukan ke keluarga dan lingkungan korban. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan rata-rata telah terlaksana 100%. Pemutusan atau pengakhiran layanan yang telah diberikan oleh UPTD PPA melalui proses yang panjang. Korban yang telah mendapatkan haknya diberikan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan menjadi indikator pemulangan. Dari tabel data tersebut diatas, jumlah kasus yang ditangani hampir keseluruhan mendapatkan layanan, sehingga menunjukkan penanganan kasus kekerasan terhadap

anak dan perempuan relatif mendapatkan pelayanan sampai tuntas.

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Data cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Makassar Tahun 2020-2024 cakupan berhasil mencapai 100% setiap tahunnya. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan Kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya pada Tahun 2020 sebesar 1.034 dan Tahun 2021 naik sedikit menjadi 1.554, pada tahun 2022 turun menjadi 293, pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 634 dan pada Tahun 2024 mengalami penurunan penanganan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak sebesar 520 kasus.

Secara rinci perkembangan dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.171.
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga penganti dan masyarakat lainya	1034	1550	293	634	520
2.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan reintegrasi sosial	1.034	1551	293	634	520
3.	Cakupan layanan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan (1/2 x 100)	100	99,74	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya adalah korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPTD PPPA untuk disatukan kembali ke keluarga atau keluarga penggantinya atau lingkungan masyarakatnya yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban, cakupannya mencapai 100%.

Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender

Tabel II.172.
Pembangunan Gender dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenis Pembangunan Gender	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Indeks Pembanguan Gender (IPG) Kota Makassar	94,47	94,44	94,52	94,65	94,99
2	Indeks Pembanguan Gender (IPG) Provinsi	92,86	92,85	98, 09	93,19	93,53
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Makassar	77,61	76,59	78,15	78,13	71,04
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi	76,32	74,76	76,37	75,24	75,25

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun, 2025

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Namun, kita perlu perhatikan level pencapaian IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah yaitu apakah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. Selanjutnya, IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknis

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa baik Indek Pembangunan Gender (IPG) maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Makasaar berada diatas Indek Pembangunan Gender (IPG) maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan dengan selisih rata – rata 2% (dua persen).

C. DINAS KETAHANAN PANGAN

Ketersediaan Pangan Utama

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman. Untuk itu diperlukan ketersediaan pangan pada suatu wilayah ini sangat penting. Data ketersediaan pangan utama di Kota Makassar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.173.
Ketersediaan pangan Utama
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024
1.	Rata-rata jumlah Ketersediaan pangan utama pertahun (Kg)	485.260	2.026.150	1.265.500	1.877.230	2.019.440
2.	Jumlah penduduk	1.526.667	1.423.877	1.427.619	1.436.626	1.454.960
3.	Ketersediaan pangan utama (1/2 x 100)	31.79	142.30	88.64	130,67	138,80

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, tahun 2025

Ketersediaan pangan utama selama Tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi, hal ini ditunjukkan adaanya penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020,

hal ini dikarenakan adanya kesulitan akses distribusi pangan utama baik impor maupun antar daerah diakibatkan dampak Covid-19 dan adanya penerapan PPKM menyebabkan supply distribusi pangan utama. Namun di tahun 2021 telah mengalami peningkatan dari angka 31,79 kg/kapita/tahun menjadi 142,30 kg/kapita/tahun dikarenakan mulainya dibuka beberapa akses distribusi untuk memenuhi pangan utama Masyarakat Kota Makassar, akan tetapi di akhir tahun 2022, ketersediaan pangan utama mengalami penurunan lagi sebesar 88.64 kg/kapita/hari, hal ini terjadi karena adanya isu perang Rusia dan Ukraina dimana Rusia menarik partisipasinya dalam pemenuhan ketersediaan pangan utama melalui Black Sea Grain Initiative yang mengguncang pasar komoditas pangan dunia karena memicu kenaikan harga.

Tahun 2024, Ketersediaan pangan utama di Makassar tahun 2024 tercukupi dan stabil. Pemerintah pusat juga memastikan bahwa empat komoditas pangan utama tidak lagi diimpor, yaitu beras, garam, gula, dan jagung.

Ketersediaan energi dan protein per kapita

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/Ot.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan analisis Ketersediaan energi dan protein per kapita melalui Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan energi dan protein per kapita per hari. Ketersediaan energi dan protein per kapita dihitung melalui ketersediaan pangan per kapita per hari, kandungan kalori, Bagian yang dapat dimakan (BDD), ketersediaan energi (kkal/kapita/hari), ketersediaan pangan/kapita/hari serta kandungan protein. Ketersediaan energi dan protein per kapita Kota Makassar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.174.
Ketersediaan energi dan protein per kapita
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Ketersediaan pangan/kapita/hari	23.95	12.37	9.97	11.25	10.05
1.2	Kandungan Kalori	106.04	207.16	272.53	247.49	279.81
1.3	BDD	100	100	100	100	100
1.4	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	2,540	2,562	2.716	2.782	2.812
2.1	Ketersediaan Pangan gram/kapita/hari	23.95	12.37	9.97	11.25	10.05
2.2	Kandungan Protein	5.34	5.44	7.16	7.17	8.77
2.3	BDD	100	100	100	100	100

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.4	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	5.34	5.44	7.16	80.69	88,13

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan neraca bahan makanan (NBM), bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi dalam bentuk energi dari tahun 2020 – 2024 cenderung mengalami peningkatan, peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan ketersediaan energi dari kelompok makanan nabati dibandingkan tahun-tahun sebebelumnya (Komoditas yang mengalami peningkatan ketersediaan adalah kelompok padi-padian).Untuk ketersediaan protein dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, namun ditahun 2021 ketersediaan protein mengalami penurunan. Menurunnya kontribusi kelompok bahan makanan asal hewani terhadap ketersediaan protein menjadi salah satu penyebab ketersediaan protein pada Tahun 2021, utamanya pada saat Penerapan PPKM Level-3 yang menyebabkan terbatasnya distribusi pangan. Walaupun angka ketersediaan protein Tahun 2021 mengalami penurunan, namun ketersediaan protein secara umum kurun waktu 5 tahun masih lebih tinggi dari angka kecukupan protein (63 gram/kapita/hari) berdasarkan rekomendasi Widyakarsa Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI.

Ketersediaan energi dan protein Kota Makassar Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan serta nilainya sudah melebihi standar WNPG. Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan energi dan protein Tahun 2023 lebih banyak bersumber dari nabati dibandingkan dengan hewani. Kenaikan nilai ketersediaan energi dan protein didukung oleh;

Pada Tahun 2024, menunjukkan bahwa, kelompok padi-padian merupakan penyumbang terbesar pada ketersediaan energi Tahun 2024. Sedangkan ketersediaan protein, kelompok yang paling berkontribusi juga kelompok padi-padian. Berbeda dengan ketersediaan lemak , kelompok yang paling berkontribusi adalah kelompok minyak & lemak. Pada kelompok minyak & lemak, komditi yang paling besar andilnya adalah minyak goreng kelapa. Pada ketersediaan energi, protein dan lemak kelompok yang paling sedikit kontribusinya adalah kelompok buah-buahan, rendahnya kontribusi kelompok tersebut dikarenakan Kota Makassar bukan sentra produksi buah-buahan.

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan berjalan berdampingan. Pengawasan bersifat kontrol dan evaluasi, sedangkan pembinaan bersifat pendampingan dan pemberdayaan. Keduanya penting untuk menjamin bahwa makanan yang sampai ke masyarakat aman dikonsumsi serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun Angka Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Makassar dalam kurun lima tahun terakhir ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel II.175.
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul sesuai standar yang berlaku	20	20	120	120	200
2.	Jumlah total sampel pangan yang di perdagangkan pengumpul menurut ukuran yang telah ditetapkan	20	20	120	120	200
3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, tahun 2025

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tahun 2020 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan sampel pangan segar (PSAT) yang diambil secara random/acak dari pasar-pasar tradisional dan modern (12 pasar tradisional dan 12 pasar modern) yang ada di Kota Makassar aman dari cemaran pestisida, logam berat dan formalin berdasarkan hasil uji rapid test kit dan uji laboratorium.

Tahun 2023, Berdasarkan tabel hasil analisis uji Laboratorium menunjukkan hasil yang negatif /tidak terdeteksi untuk Daun Bawang, Kol, dan Kacang panjang. Sedangkan untuk Tomat hasil uji laboratoriumterdeteksi Chlorpyriphos 0,0409 mg/kg. Namun hasil ini masih di bawah BMR yaitu 0,5 mg/kg (SNI 7313. 2028). Untuk Uji Logam Berat (Timbal dan Kadmium) pada Cabe Keriting, Daun Bawang, Tomat, Kol dan Kacang Panjang menunjukkan hasil yang negatif / tidak terdeteksi. Dalam hal ini sayur dan buah yang diambil dari pasar Tradisional dan Moderen masih aman untuk dikonsumsi.

Tahun 2024, Kegiatan pengawasan keamanan pangan dilaksanakan melalui pengambilan sampel pangan terhadap produk pangan asal tumbuhan (PSAT) sebanyak 200 sampel di peredaran, yakni di pasar tradisional dan modern di Kota Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode random sampling (acak proporsional) dengan kriteria buah dan sayuran yang diambil sebagai sampel adalah yang banyak diproduksi, banyak dikonsumsi dan dicurigai memiliki ketidakamanan untuk dikonsumsi.

D. PERTANAHAN

Penyelesaian kasus tanah Negara

Penyelesaian kasus tanah negara yang dikerjakan oleh Dinas Pertanahan berasal dari pengaduan atau pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat dengan penanganan yang diselesaikan melalui fasilitas dan mediasi yang dilakukan oleh beberapa pihak. Berikut akan disajikan data penyelesaian kasus tanah negara pada Tahun 2020 hingga tahun 2024 yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel II.176.
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan	7	12	7	15	12
2.	Jumlah kasus yang terdaftar	7	12	7	15	12
3.	Persentase kasus tanah negara (1 / 2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian jumlah kasus tanah negara pada tahun 2020 hingga tahun 2024 telah terselesaikan 100 persen. Hal tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang terdaftar dengan jumlah kasus yang diselesaikan memiliki jumlah yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus tanah negara tiap tahunsampai 2024 dapat diselesaikan semua.

Penyelesaian izin lokasi

Penyelesaian izin lokasi yang telah diselesaikan oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar terhitung diselesaikan berdasarkan Keputusan Walikota Makassar. Data untuk penyelesaian izin lokasi mulai tahun 2020 hingga 2024 akan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II.177.
Penyelesaian Izin Lokasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah izin lokasi	0	0	0	0	0
2.	Permohonan izin lokasi	0	0	0	0	0
3.	Penyelesaian izin lokasi (1/2 x 100)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Makassar, tahun 2025

Mulai Tahun 2020 sampai tahun 2024 Penyelesaian Izin Lokasi tidak lagi menjadi tupoksi pada Dinas Pertanahan. Izin lokasi sudah menjadi kewenangan pusat berdasarkan UU cipta kerja.sehingga persentase penyelesaian izin lokasi 0 persen.

Presentasi Luas Lahan bersertifikat Kota Makassar

Persentase luas lahan bersertifikat yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar berdasarkan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel II.178.
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Aset Pemerintah Kota Makassar Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah luas lahan bersertifikat Non Jalan	0	10.229	227.190	297.633	192.975
2.	Jumlah luas wilayah Non Jalan	332.019	332.019	332.019	321.790	321.790
3.	Persentase luas lahan bersertifikat (1/2 x 100)	0	3.08	70.60	92.49	59.96

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan persentase luas lahan bersertifikat. Hal ini disebabkan karena adanya penyederhanaan syarat baku untuk pengajuan sertifikat.

Pada Tahun 2022 sampai dengan triwulan IV sebanyak 52 sertifikat yang terbit diantarany 35 Sertifikat sekolah, 3 sertifikat Kantor Lurah, 3 Sertifikat Posyandu , dan lainnya telah disajikan pada tabel dibawah.

Pada tahun 2020 tidak ada penerbitan sertifikat. Adapun Faktor penghambat yaitu SDM yang kurang dan penyederhanaan syarat baku bagi pengajuan sertifikat bagi lahan pemerintah. Faktor pendukungnya yaitu tidak ada lagi pembebanan biaya sertifikat tanah bagi pemerintah. Dan Pada Tahun 2023 sampai dengan semester 2 telah terselesaikan Sertifikat tanah sebanyak 7 sertifikat dan ada sebanyak 43 Bidang yang sementara proses penerbitan sertifikat untuk tahun 2023. Pada Tahun 2023 Telah diajukan ke BPN Sejumlah 85 Bidang dan yang telah terbit sertifikatnya sebanyak 21 Bidang

Pada Tahun 2024 sampai Triwulan IV telah terselesaikan 23 Bidang diantaranya, 19 Sertifikat Sekolah, 1 Lapangan Hasanuddin, 1 Taman Hasanuddin, 1 Rumah Sakit Daya, 1 Rumah Dinas Puskesmas Kassi-Kassi dan 1 TPA Tamangapa.

E. Lingkungan Hidup

Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Dokumen RPPLH sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dimana dokumen RPPLH harus disusun secara berjenjang mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota. Sedangkan Dokumen RPPLH Nasional dan Provinsi belum tersedia, sebagai acuan. Menjadi kewajiban pemerintah Kota untuk menyusun RPPLH sebagai acuan perencanaan Lingkungan Hidup tingkat Kota Makassar, namun belum ada RPPLH Provinsi sebagai acuan untuk menyusun RPPLH Kota. Belum tersusunnya karena keterbatasan anggaran.

Tabel II.179.

Tersusunnya RPPLH Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (Ada/ Tidak)	2024 (Ada/ Tidak)
1.	Tersusunya Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPHL)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

PENYUSUNAN DOKUMEN RPPLH TELAH SELESAI DAN DOKUMEN RPPLH TELAH TERSEDIA.

Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota

Penyusunan RPPLH pada tahun 2023 masih pada tahap penyusunan Naskah Materi Teknis pada tahun 2024 dokumen RPPLH Kota Makassar telah rampung disusun dan diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Tabel II.180.
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (Ada/ Tidak)	2024 (Ada/ Tidak)
1.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Dokumen RPPLH Telah Tersedia dan terintegrasi dalam rancangan pembangunan.

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi

Tabel II.181.
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah
Provinsi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (Ada/ Tidak)	2024 (Ada/ Tidak)
1.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah menyediakan KLHS dan menjadi dasar dokumen RPJMD untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana dan program pembangunan selama 5 tahun.

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air

Tabel II.182.
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (Ada/ Tidak)	2024 (Ada/ Tidak)
1.	Hasil pengukuran indeks kualitas air	57,11	57,70	56,67	51,74	58,70

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kota Makassar Tahun 2024 diperoleh angka sebesar 58,70. Nilai ini merupakan hasil verifikasi akhir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan

Pengukuran indeks kualitas tutupan lahan dilakukan, karena mengingat output kegiatannya jumlah pohon yang tertanam dan terpelihara bukan berdasarkan

luas wilayah yang tertanami. Adapun hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.183.
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	44,87	34,42	34,37	26,97	28,82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Terdapat 6 kelas tutupan lahan dengan overall accuracy sebesar 11,20% Luas RTH di Kota Makassar mencapai 17.547.00 ha atau 17,05% dan telah tidak mencukupi dari standar yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008. Tipe RTH teridentifikasi adalah Sabuk Hijau, Hutan Kota, Sempadan Sungai. Cara menghitung IKTL 100-[(84,3-(TLx 100)]x 50/54,3. Rekomendasi tindak lanjut yaitu meminimalisir pengalihan fungsi RTH (sesuai data IKLH). Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Makassar Tahun 2024 diperoleh angka sebesar 28,82. Peningkatan perolehan angka IKTL di kota makassar karena maksimalnya upaya pengembangan RTH di kota makassar.

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel II.184.
Pembinaan dan Pengawasan ketaatan terhadap izin lingkungan
(PPLH dan PUULH) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan (PPLH dan PUU LH)	51	14	69	106	106
2.	Total penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi	90	37	170	106	106
3.	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan terhadap izin lingkungan (1 / 2 x 100)	56,67	37,84	40,59	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya Pejabat Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan sarana pengawasan penaatan lingkungan hidup. Sedangkan faktor eksternal antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan, sarana pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki dan masih kurangnya kepedulian pelaku dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dan pada tahun 2023 hal tersebut dapat dimaksimalkan sehingga capaiannya sampai dengan 100%.

Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait pengawasan

lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, maka diperlukan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Tabel II.185.
Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLHD) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/dibina	1 Orang	0	14	14	0
2.	Jumlah sarana dan Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimal	Ada	Ada	-	-	-

Sumber: Dinas lingkungan hiidup Kota Makassar, tahun 2025

Untuk meningkatkan kinerja pengawasan lingkungan hidup maka dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan seperti kendaraan operasional, alat pelindung diri, dan lain-lain. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tidak memiliki kendaraan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan pengawasan. Namun pada tahun anggaran 2024 mengalami rasionalisasi anggaran sehingga tidak ada realisasi.

Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA

Kegiatan pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) belum pernah dilaksanakan mengingat uraian tugas mengenai MHA baru ada berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan belum ada dalam Renstra. Setelah dilaksanakan revisi renstra barulah dimasukkan kegiatan MHA dan kegiatan tersebut telah berjalan beberapa tahun terakhir ini. Pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) penting guna meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan, meningkatnya perlindungan terhadap sumber daya alam, meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Untuk Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Survei yang dilakukan maka dijelaskan tidak tersedia data MHA di Kota Makassar disebabkan MHA hanya ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel II.186.
Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Masyarakat Hukum Ada yang diakui	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

Belum ada Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi oleh Kota Makassar mengingat Urusan Lingkungan Hidup

yang memuat kewenangan kabupaten/Kota tentang MHA baru ada pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Kegiatan mengenai MHA belum pernah dilaksanakan mengingat uraian tugas mengenai MHA baru ada berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 / 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup terkait hal tersebut belum ada dalam Renstra.

Tabel II.187.
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional

Belum ada Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi oleh Kota Makassar mengingat Urusan Lingkungan Hidup yang memuat kewenangan kabupaten/Kota tentang MHA baru ada pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Kegiatan mengenai MHA belum pernah dilaksanakan mengingat uraian tugas mengenai MHA baru ada berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 / 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup terkait hal tersebut belum ada dalam Renstra.

Tabel II.188.
Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Sampai dengan tahun 2024 berdasarkan hasil survei yang dilakukan maka dijelaskan tidak tersedianya data MHA di Kota Makassar disebabkan MHA tidak terdapat di Kota Makassar dan hanya ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penetapan hak MHA

Tabel II.189.
Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penetapan hak Masyarakat Hukum Adat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Sampai dengan tahun 2024 berdasarkan hasil survei yang dilakukan maka dijelaskan tidak tersedianya data MHA di Kota Makassar disebabkan MHA tidak terdapat di Kota Makassar dan hanya ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan

Tabel II.190.
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah MHA yang difasilitasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Jumlah total MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (1 / 2 x 100)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Sampai dengan tahun 2024 berdasarkan hasil survei yang dilakukan maka dijelaskan tidak tersedianya data MHA di Kota Makassar disebabkan MHA tidak terdapat di Kota Makassar dan hanya ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana

Tabel II.191.
Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Jumlah total MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana (1/2 x 100)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Sampai dengan tahun 2024 berdasarkan hasil survei yang dilakukan maka dijelaskan tidak tersedianya data MHA di Kota Makassar disebabkan MHA tidak terdapat di Kota Makassar dan hanya ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat

Pemerintah Kota Makassar belum melaksanakan pemberian pelatihan secara spesifik untuk pelestarian lingkungan hidup kepada kelompok masyarakat atau Lembaga kemasyarakatan.

Tabel II.192.
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan	Tidak ada	Tidak ada	7	6	5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Diklat/penyuluhan Lingkungan Hidup yang telah diberikan kepada masyarakat pada tahun 2024 sbb : 1.Bimbingan teknis Kader peduli dan berbudaya LH di Sekolah 2.Bimbingan Teknis Jakstrada Diklat/Penyuluhan Pengembangan Kapasitas SDM : a. Capacity Building Lingkungan Kota b. Capacity Building Persampahan c. Bimtek Pengembangan SDM Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Secara rutin Pemerintah Kota Makassar melaksanakan pemberian penghargaan kepada masyarakat seperti pemilihan Duta Lingkungan Hidup, Lomba Makassar Bersih Lorong, Lomba Kebersihan Kelurahan serta penghargaan kepada RT/RW berupa insentif bagi mereka yang biasa memenuhi kriteria-kriteria tertentu diantaranya adalah kebersihan lingkungan.

Tabel II.193.
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (Ada/ Tidak)	2024 (Ada)
1.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Telah dilaksanakan pemberian penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota Makassar.

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

Pos pengaduan dan penyelesaian sengketa LH berpedoman pada Permen LHK No. P.22/MenLHK/Setjen/Set.1/3/2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH dan/atau perusakan Hutan serta Perwali Kota Makassar No. 26 Tahun 2017 tentang tata cara pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH.

Tabel II.194.
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	21	13	15	17	16
2.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang ter registrasi	21	13	15	17	16
3.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, PUU LH (1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Pengaduan Masyarakat terkait izin Lingkungan , Izin PPLH dan PPU LH berpedoman pada Peraturan Walikota Makassar No. 26 Tahun 2017 tentang tata cara Pengaduan Dan Penanganan Pegaduan akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah menindaklajuti seluruh pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , Izin PPLH,PPU LH sebanyak 24 pengaduan atau sebesar 100%

Timbunan sampah yang ditangani

Tabel II.195.
Timbunan sampah yang ditangani Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Volume sampah yang ditangani	255.565	279.955,87	274,912.30	313.855,17	298.386,50
2.	Total timbunan sampah	379.395	379.395,02	365,712.74	375.651,69	388.381,87
3.	Timbunan sampah yang tertangani (1/2 x 100)	67,36	73,79	75.17	83,55	76,83

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Volume sampah yang tertangani merupakan jumlah timbulan sampah yang dikelola baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses pengelolaan sampah. Pada tahun 2024 Volume Timbulan sampah yang telah ditangani sebesar 298.386,50 Ton atau 76.83%. dimana total timbulan sampah yang dihasilkan sepanjang tahun 2024 sebesar 388.381,87 Ton/ tahun. Semakin besarnya laju timbulan sampah akan berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan (Bau, Mengganggu kesehatan, merusak estetika lingkungan dan kerusakan lingkungan). untuk itu upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan pengurangan sampah di sumber sampah.

Persentase cakupan area pelayanan

Bahwa luas wilayah pelayanan persampahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik langsung ataupun tidak langsung. Dengan pertambahan Kecamatan

Sangkarrang yang berada pada pulau-pulau secara operasional belum tertangani, namun demikian penanganan akan disesuaikan pada kondisi wilayah.

Tabel II.196.
Persentase cakupan area pelayanan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km/ha)	175,77	123,39	168,00	168,00	168,00
2.	Luas area Kota Makassar (km/ha)	175,77	175,77	17.680	175,77	175,77
3.	Persentase cakupan aera pelayanan pengelolaan sampah (1/2 x 100)	100	70,29	95.02	95.58	95.58

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025
**Jumlah Penduduk 1.484.218*

Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah kota Makasar Tahun 2024 yaitu sebesar 95,58%. dimana Luas area pelayanan pengelolaan sampah Kota Makassar tahun 2024 mencapai 168 km dari luas kota makassar 175,77 km2. . bertambahnya kecamatan kepulauan sangkarrang yang berada di pulau-pulau secara operasional belum tertangani dan juga Kurangnya sarana/prasarana pengangkutan sampah di tiap kecamatan dan sampah yang belum terpilah namun demiklian penanganan akan terus diupayakan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Persentase jumlah sampah yang tertangani

Volume sampah yang tertangani adalah merupakan jumlah timbulan sampah yang dikelola baik langsung maupun tidak langsung.

Tabel II.197.
Persentase Sampah Yang Tertangani
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	255.565	279.955,87	274,912.30	328,484.39	298.386,50
2.	Total jumlah sampah (ton)	379.395	379.395,02	365,712.74	375.651,69	388.381,87
3.	Persentase sampah yang tertangani (1/2 x 100)	67,36	73,79	75.17	87,44	76,83

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Volume sampah yang tertangani merupakan jumlah timbulan sampah yang dikelola baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses pengelolaan sampah. pada tahun 2024 Persentase Penanganan timbulan sampah menurun menjadi sebesar 76,83 dari tahun sebelumnya 87,44%. Jumlah sampah yg tertangani sebesar 298.386,50 Ton dimana total timbulan sampah yang dihasilkan sepanjang tahun 2024 sebesar 388.881,8769 Ton/ tahun. Faktor penghambat : Lahan TPA yang

sudah penuh, Alat berat banyak yang rusak Rekomendasi Tindak Lanjut : Pengadaan lahan TPA, pengadaan Alat berat serta memaksimalkan Bank Sampah Unit.

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota

Tabel II.198.
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 70	KLHK menghentikan sementara akibat pandemi covid	KLHK menghentikan sementara akibat pandemi covid	69	72,80	72,80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Data yang tersaji merupakan data capaian tahun 2023, dan pelaksanaan tahun penilaian ADipura tahun 2024 Belum ada keputusan dari KLHK terkait Hasil pelaksanaan penilaian Adipura.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Tabel II.199.
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	62,57	60,25	58,83	57,53	81,51

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Kabupaten/Kota mulai menghitung IKLH pada tahun 2020-2021 dengan metode perhitungan sesuai surat edaran KLHK no.s.318/ppkl/set/Ren.O/12/2020, dan pada tahun 2022-2024 perhitungan IKLH sesuai Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021. Data yang tersaji telah melalui hasil verifikasi oleh Kemen LHK.

Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

Tabel II.200.
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R (bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan)	579,16 ton	481,43 ton	22.395, 77	14.629,22	8.118,50
2.	Jumlah sampah seluruhnya	379.395 ton	379.395, 02 ton	365712. 74	375.651,6 9	388.381,87
3.	Persentase sampah yang terkurangi melalui 3 R (1/2 x 100)	0,15	0,13	0,13	3,89	2.09

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Pada tahun 2024, Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (bank sampah, pusat daur ulang, pengkomposan) Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 8.118,50 Ton atau sebesar 2,09 % dari Total Timbulan sampah 388.381,87 ton .

Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan

Tabel II.201.

Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit	43	46	42	43	41
2.	jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun	45	52	63	73	54
3.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (1/2 x 100)	95,56	88,46	66.67	58,90	75,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah Izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit sebanyak 41 pelaku usaha dari Jumlah Izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam 1 tahun sebanyak 54 pelaku usaha, sehingga persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan hingga tahun 2024 mencapai 75,93%**.**

Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Dari persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta di atas, yang taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan sama besar persentasenya sehingga dapat dikatakan semua pengelola sampah taat terhadap peraturan yang berlaku.

Tabel II.202.

Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan	43	46	42	43	41
2.	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta	45	52	63	73	30
3.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (1/2 x 100)	95,56	88,46	66.67	58,90	136,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Ini terkait dengan target yang ditetapkan dengan kinerja yang dicapai berkaitan dengan ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Pengelolaan Sampah Limbah B3 di Kota Makassar sedangkan Izin Pengelolaan Sampah Domestik oleh Swasta di Makassar

belum ada karena regulasinya belum ada.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tabel II.203.
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Hasil pengukuran indeks kualitas Lingkungan Hidup	62,57	60,25	58,83	57,53	61,41

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tahun 2025

Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 – 2019 adalah kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menghitung. Mulai tahun 2020 Kabupaten/Kota diminta untuk menghitung sesuai surat edaran KLHK no.s.318/ppkl/set/Ren.O/12/2020. Hasil pengukuran IKLH ada 3 indikator yang menentukan, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel II.204.
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	971.311	978,546	987.754	1.057.136	1.027.292
2.	Jumlah Penduduk usia > 17 atau telah menikah	625.812	612.264	636.577	642.346	645.241
3.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (1/2 x 100)	155,21	160	155	165	159,21

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tahun 2025

Ini berarti bahwa di tahun 2024 terdapat 1.027.292 penduduk yang telah memiliki KTP el, faktor pencapaian kepemilikan ini karena kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP el sdh sangat tinggi, kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan rasio berKTP el ini dengan melakukan kegiatan pelayanan mobile dukcapil ke kelurahan- kelurahan, dan diadakan pelayanan weekend service setiap sabtu minggu serta menyasar penduduk pemilih pemula dengan mengadakan mobile perekaman KTP el di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel II.205.
Jumlah penduduk Kota Makassar dirinci Per Kecamatan
Tahun 2020 s.d 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	2023	2024
1	MARISO	60.242	60.242	58.716	58.596	58.797
2	MAMAJANG	59.943	59.943	58.073	58.238	58.075
3	MAKASAR	86.192	86.192	82.761	82.291	81.976
4	UJUNG PANDANG	25.866	25.866	25.006	24.906	24.876
5	WAJO	31.599	31.599	30.051	29.730	29.391

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	2023	2024
6	BONTOALA	57.815	57.815	55.804	55.420	55.244
7	TALLO	152.287	152.287	147.831	25.365	148.008
8	UJUNG TANAH	38.007	38.007	37.002	36.751	367.721
9	PANAKUKKANG	146.760	146.760	144.232	144.365	144.376
10	TAMALATE	188.835	188.835	186.428	187.765	189.222
11	BIRINGKANAYA	211.495	211.495	212.591	214.656	216.704
12	MANGGALA	153.552	153.552	156.110	158.949	161.827
13	RAPPOCINI	153.269	153.269	150.346	150.342	150.869
14	TAMALANREA	104.441	104.441	104.114	105.438	106.768
15	KEP .SANGKARRANG	14.609	14.609	14.744	14.934	15.007
	Jumlah	1.484.912	1.484.912	1.463.809	**1.470.261**	1.477.861

Sumber: BPS, tahun 2025

Tabel II.206.
Jumlah Penduduk Wajib Ktp-El
Tahun 2020 s.d 2024

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	1.011.748
2	2020	1.042.846
3	2021	1.032.102
4	2022	1.049.243
5	2023	1.057.136
6	2024	1.069.438

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tahun 2025

Tabel II.207.
Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tahun 2020 s.d 2024

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	MARISO	40.323	40,338	40.325	41.166	41368
2	MAMAJANG	40.717	40,445	40.496	41.456	41492
3	MAKASSAR	57.659	57,256	56.891	58.220	58245
4	UJUNG PANDANG	18.794	18,764	18.519	18.877	18917
5	WAJO	22.657	22,348	21.994	22.175	21955
6	BONTOALA	37.858	37,749	37.793	38.429	38421
7	TALLO	95.538	95,578	96.241	99.577	99978
8	UJUNG TANAH	24.183	24,161	24.240	24.751	24904
9	PANAKKUKANG	96.232	96,415	97.140	99.849	100557
10	TAMALATE	120.657	121,576	123.273	127.630	129403
11	BIRING KANAYA	135.098	138,794	141.944	147.536	149595
12	MANGGALA	100.238	102,389	104.770	109.076	111117
13	RAPPOCINI	103.538	103,461	103.698	106.158	106977
14	TAMALANREA	68.6876	69,882	70.818	73.230	74268
15	KEP SANGKARRANG	9.132	9,390	9.612	10.041	10095
	JUMLAH	971.311	978.546	987.754	1.018.171	1027292

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tahun 2025

Dari data di atas terlihat bahwa pelayanan pemerintah Kota terhadap penerbitan KTP el untuk penduduk Kota Makassar sudah baik dimana di tahun 2024 menjadi 1,069.438 jiwa penduduk Makassar yang wajib KTP, sebanyak 1.027.292 yang telah

melakukan perekaman, tidak terdapat kendala yang berarti dalam pencapaian target kepemilikan KTP el di tahun. Kendala lain yaitu faktor jaringan yang sangat mempengaruhi proses perekaman dan ketersediaan blanko KTP el yang penyediaannya masih di pusatkan di kementerian adminduk sehingga kepemilikan KTP el secara fisik masih belum dapat di realisasikan.

Rasio bayi berakte kelahiran

Tabel II.208.
Rasio bayi berakte kelahiran
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah bayi berakte kelahiran	32.720	127.221	142.998	117240	116.013
2.	Jumlah bayi	134.258	127.221	142.998	118090	116.602
3.	Rasio bayi berakte kelahiran (1/2 x 100)	0,99	1,00	1,00	0,99	0,99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tahun 2025

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 semua bayi yang diajukan permohonan akte kelahirannya 99% terselesaikan akte kelahirannya, kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan kepemilikan akta kelahiran ini : 1) Pelayanan langsung akte kelahiran di kelurahan-kelurahan 2) dengan aplikasi KUCATATKI mempermudah pelaporan akte kelahiran dengan bekerjasama dengan rumah sakit bersalin.

Rasio pasangan berakte nikah

Tabel II.209.
Rasio pasangan berakte nikah
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pasangan berakte nikah	103.488	131.980	330.480	347405	370.746
2.	Jumlah seluruh pasangan nikah	344.411	306.132	636.577	642345	645.130
3.	Rasio pasangan berakte nikah (1/2 x 100)	0,30	43,11	52	54	57,46

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2024 jumlah pasangan yang mempunyai akte nikah baru sebesar 57,46%, faktor penghambatnya karena yang dibuatkan akte nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya yang beragama selain islam dan tidak semua pasangan non muslim yang telah menikah itu melaporkan pencatatan perkawinannya. Tindak lanjut yang dilakukan adalah akan diadakan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan akte nikah bagi pasangan non muslim, bekerjasama dengan kantor urusan agama di 15 kecamatan untuk pencatatan status perkawinan.

Ketersediaan database kependudukan

Tabel II.210.
Ketersediaan database kependudukan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (ada/ Tidak)	2024 (ada/ Tidak)
1.	Ketersediaan database kependudukan	ada	ada	ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tahun 2025

Ketersediaan data base kependudukan sudah tersedia di Dukcapil makassar dengan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Database kependudukan Dukcapil Kota Makassar dilakukan pembaharuan melalui perekaman data hasil layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh operator/petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik dilakukan diseluruh Kecamatan maupun Dinas. Perekaman data di Kantor Kecamatan dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang terhubung dan tersambung dengan server data base kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Database kependudukan skala kabupaten yang dimiliki oleh Kota Makassar merupakan bagian dari subsistem database kependudukan nasional.

Updating data kependudukan dengan Pemerintah Pusat pada tahun 2024 sebanyak 2 kali, yaitu semester I dan II, sehingga pada tahun 2024 menghasilkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I dan II tahun 2024. Melalui output data tersebut, dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan, perencanaan, penganggaran, dll sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Capaian realisasi indikator ketersediaan database kependudukan skala kabupaten sebesar 100% mulai dari 2017 sd 2024, sehingga target yang ditetapkan pada tahun 2013 maupun target jangka menengah dalam dalam Renstra OPD telah tercapai dan tersedia. Upaya yang dilakukan untuk dapat menghasilkan database kependudukan skala kabupaten adalah melalui updating perekaman data pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil maupun pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilakukan secara harian dan berkala semesteran untuk konsolidasi data bersih di tingkat nasional.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Tabel II.211.
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (ada/ Tidak)	2024 (ada/ Tidak)
1.	Ketersediaan database kependudukan	Ada	ada	ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tahun 2025

ketersediaan data base kependudukan sudah tersedia di Dukcapil makassar dengan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Database kependudukan Dukcapil Kota Makassar dilakukan pembaharuan melalui perekaman data hasil layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh operator/petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik dilakukan diseluruh Kecamatan maupun Dinas. Perekaman data di Kantor Kecamatan dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang terhubung dan tersambung dengan server data base kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Database kependudukan skala kabupaten yang dimiliki oleh Kota Makassar merupakan bagian dari subsistem database kependudukan nasional.

Updating data kependudukan dengan Pemerintah Pusat pada tahun 2024 sebanyak 2 kali, yaitu semester I dan II, sehingga pada tahun 2024 menghasilkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I dan II tahun 2024. Melalui output data tersebut, dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan, perencanaan, penganggaran, dll sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Capaian realisasi indikator ketersediaan database kependudukan skala kabupaten sebesar 100% mulai dari 2017 sd 2024, sehingga target yang ditetapkan pada tahun 2013 maupun target jangka menengah dalam dalam Renstra OPD telah tercapai dan tersedia. Upaya yang dilakukan untuk dapat menghasilkan database kependudukan skala kabupaten adalah melalui updating perekaman data pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil maupun pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilakukan secara harian dan berkala semesteran untuk konsolidasi data bersih di tingkat nasional.

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel II.212.
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (ada/ Tidak)	2024 (ada/ Tidak)
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	ada	ada	ada	ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tahun 2025

Artinya bahwa pada tahun 2024 cakupan penerbitan e-KTP sebesar 95,21% atau sebanyak 1.027.292 penduduk yang telah memiliki e-KTP, dari 1.069.438 penduduk wajib e-KTP, capaian indikator ini sudah sangat tinggi, karena 1) kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan e-KTP sdh sangat tinggi, 2) pelayanan mobile e-KTP ke seluruh kelurahan.

Cakupan penerbitan akta kelahiran

Tabel II.213.
Cakupan penerbitan akte kelahiran
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	971.311	978.546	987.754	1006466	1.027.292
2.	Jumlah penduduk wajib KTP	1.042.846	1.032.102	1.049,24	1.057.136	1.069.438
3.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (1/2 x 100)	93,14	94.81	94,14	95,21	96,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tahun 2025

Realisasi indikator kinerja kepemilikanakte kelahiran tahun 2023 sebesar 99,35% , terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,65% karena masih penduduk yang belum melaporkan peristiwa kelahirannya, atau disebabkan karena kendala administrasi pelaporan kelahiran.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik

Tabel II.214.
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan
dalam kondisi baik Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kantor pemerintahan kelurahan yang baik	146	146	153	153	153
2.	Jumlah seluruh kelurahan	153	153	153	153	153
3.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan dalam kondisi baik (1 /2 x 100)	95,42	95,42	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 cakupan sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik di Kota Makassar sebesar 100,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua kantor lurah dianggap baik karena semua pelayanan yang dilakukan dikantor lurah sudah berjalan sesuai prosedur layanan yang ada.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Dari 153 Kelurahan di Kota Makassar semuanya telah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ke semuanya memiliki kelompok binaan LPM, sehingga setiap LPM memiliki kelompok binaan atau rata-rata satu LPM memiliki satu kelompok binaan masyarakat di kelurahannya. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel II.215.
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	153	153	153	153	612
2.	Jumlah LPM	153	153	153	153	153
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM (1 / 2)	1	1	1	1	4

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2020 hingga 2023 rata-rata jumlah kelompok binaan LPM sebesar 1 dan di tahun 2024 setiap LPM Kelurahan memiliki 4 kelompok binaan sehingga perlu adanya koordinasi yang instensif antara Pemerintah Kota Makassar dengan LPM selaku mitra pemerintah.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pada tahun 2023 ada 153 jumlah PKK di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar, dan terdapat 18.934 kelompok binaan PKK yang terdiri dari 13.462 Kelompom Dasawisma, 1012 Kelompok Posyandu, 3678 Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), 672 Kelompok PAUD, 110 Kelompok UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). Kelompok binaan PKK dilakukan dalam bentuk Pembinaan PKK Kelurahan. Data kelompok binaan PKK Kota Makassar dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.216.
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok binaan PKK	734	153	153	18.934	18.934
2.	Jumlah PKK	168	153	153	153	153
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (1/2)	4,37	1	1	123,75	123,75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2025

Persentase LSM aktif

Data Persentase LSM Aktif dalam kurun waktu lima tahun yaitu mulai tahun 2017 hingga 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.217.
Persentase LSM Aktif
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah LSM Aktif	5	63	31	49	29
2.	Jumlah LSM	43	63	31	49	29
3.	Persentase LSM Aktif (1/2x100)	12	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Indikator persentase LSM Aktif di Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir Tahun 2020-2024 rata-rata telah mencapai 100%, walaupun pada tahun 2020 persentase LSM yang aktif hanya

sebesar 12% dengan rincian dari 43 LSM yang terdaftar di Pemerintah Kota Makassar hanya 5 LSM yang aktif menjalankan program dan kegiatan dalam mendukung pembangunan di Kota Makassar, sedangkan pada tahun 2021 persentase LSM aktif di Kota Makassar meningkat jadi 100% dengan rincian 63 LSM yang terdaftar di Kota Makassar semuanya aktif menjalankan program dan kegiatannya. Begitu pula untuk tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 31 LSM, realisasi persentase LSM Aktif mencapai target sebesar 100% yang berarti keseluruhan LSM tersebut aktif melaksanakan serta melaporkan program dan kegiatannya. Untuk tahun 2023 sebanyak 53 LSM yang terdata di Pemerintah Kota Makassar dan semuanya aktif melaksanakan serta melaporkan program dan pelaksanaan kegiatannya sehingga realisasi dan capaiannya juga mencapai target 100%. Sedangkan untuk tahun 2024 terdata 29 LSM di Pemerintah Kota Makassar yang aktif melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan ke Pemerintah Kota Makassar sehingga realisasi dan pencapaianya juga 100%.

Dengan banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif sangat berperan penting dalam mendukung dan memperkuat usaha pemerintah dalam berbagai bidang. Meskipun LSM beroperasi secara independen dari pemerintah, kolaborasi antara LSM dan pemerintah dapat memperkuat upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara LSM aktif dan pemerintah dapat memperkuat upaya untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan menggabungkan kekuatan dari kedua belah pihak. Dengan memanfaatkan kekuatan LSM dalam hal fleksibilitas, inovasi, dan keterlibatan masyarakat, serta kapasitas pemerintah dalam hal kebijakan dan regulasi, dapat dihasilkan hasil yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Persentase LPM Berprestasi

Data persentase LPM Berprestasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu mulai tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.218.
Persentase LPM Berprestasi
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	153	153	153	153	612
2.	Jumlah LPM	153	153	153	153	153
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM (1 / 2)	1	1	1	1	4

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2020 hingga 2023 rata-rata jumlah kelompok binaan LPM sebesar 1 dan di tahun 2024 setiap LPM Kelurahan memiliki 4 kelompok binaan sehingga perlu adanya koordinasi yang instensif antara Pemerintah Kota Makassar dengan LPM selaku mitra pemerintah.

Persentase PKK aktif

Jumlah Jumlah PKK di Kota Makassar pada tahun dari tahun 2020 sebanyak 168, dari tahun 2021 ke tahun 2023 sebanyak 169 PKK. dan pada tahun 2022 jumlah PKK aktif sama dengan tahun 2021 sebanyak 169 Semua PKK yang ada di Kota Makassar

adalah organisasi yang aktif bergerak di kemasyarakatan. Data persentase PKK aktif di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir tersaji pada table berikut ini :

Tabel II.219.
Persentase PKK Aktif Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PKK Aktif	169	168	169	169	169
2.	Jumlah PKK	169	168	169	169	169
3.	Persentase PKK Aktif (1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, tahun 2025

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Tabel II.220.
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	3	4	4	4	4
2.	Total program pemberdayaan masyarakat	3	1	1	4	4
3.	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (1/2x 100)	100	400	400	100	100

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kota Makassar, tahun 2025

Pada tahun 2024 terdapat 4 program pemberdaayaan masyarakat dan sebanyak 4 swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat di 153 Kelurahan yaitu Gotong Royong, Pengajianrutin, sabtu bersih kerja bakti dasn rembuk warga.

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

Tabel II.221.
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Kota Makassar 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	3	5	1	4	5
2.	Total pasca program pemberdayaan Masyarakat	3	3	1	4	4
3.	Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (1 / 2 x 100)	100	166,67	100	100	100

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kota Makassar, tahun 2025

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju

pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik, perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu apakah bertambah atau berkurang dan dipengaruhi oleh Mortalitas, Fertilitas dan Urban. LPP diharapkan tiap tahun menurun. LPP di kota Makassar dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan, ini sangat relevan dengan program Pemerintah Pusat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui Program KKBPK. Pertumbuhan penduduk Makassar untuk Tahun 2024 sebesar -0,29 data BPS (Badan Pusat Statistik).

Tabel II.222.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,23	1,23	0,26	0,26	-0,29

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

*Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2023 dengan realisasi sebesar 0,26 masih menggunakan data BPS tahun 2022 karena data LPP 2024 masih menunggu data dari BPS sekitar pertengahan tahun 2024 yang tertuang dalam makassar dalam angka

Rate (TFR)

Tabel II.223.
Total Fertility Rate Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,11	2,10	2,13	2,02	2,01

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Capaian TFR Kota Makassar untuk tahun 2024 dicapai sebesar 2,01 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 2,02 terjadi penurunan sebesar 0.01. Indikator ini merupakan target menurun, dimana penurunan capaian ini di karenakan adanya peningkatan KIE, advokasi serta peningkatan pelayanan KB Baru dan pelayanan KB ulangan sehingga meningkatkan capaian peserta kb aktif dan penurunan Unmetneed danTFR Kota Makassar juga menurun. TFR yang ideal berada di 2,01 disebut juga dengan istilah penduduk tumbuh seimbang. TFR di bawah angka 2,1 akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk, sedangkan TFR di atas angka 2,1 akan menyebabkan pertumbuhan penduduk.

Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek

Tabel II.224.
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
dengan 5 Aspek Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kota Makassar, tahun 2025

Capaian untuk tahun 2024 sama dengan capaian 2023 kegiatan Penyusunan Dokumen rancangan induk Pengendalian Penduduk terdiri dari Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), dan Perumusan Parameter Kependudukan.

Persentase Sektor yang Tersosialisasi Konsep Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK / Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)

Tabel II.225.
Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang Terpapar	20	30	30	34	39
2.	Jumlah Perangkat Daerah yang Ada	51	51	51	51	51
3.	Persentase Sektor yang Tersosialisasi Konsep Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK / Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) (1 / 2 x 100)	39,22	58,82	58,82	66,67	76,47

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar, Tahun 2025

Capaian untuk tahun 2024 sebesar 76,47% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 66,67% terjadi peningkatan sebesar 9,8% dimana terdapat Penambahan 4 SKPD yang tepapar terhadap konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks pembagunan berwawasan kependudukan) yang terdiri dari 15 Kecamatan, Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Kerjasama, Bagian Kesra, Dinas Lingkungan Hidup, DUKCAPIL, Dinas Koperasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Kemenag, dan BPS.

Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang menyusun dan Pemanfaatan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Tabel II.226.
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	27	27	30	34	39
2.	Jumlah semua perangkat Daerah	51	51	51	51	51

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (1/2 x 100)	52,94	52,94	58,82	66,67	76,47

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Persentase perangkat daerah yang berperan aktif penyusunan dan Pemanfaatan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk tahun 2024 sebesar 76,47% capaian meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 66,67% adapun SKPD yang terlibat terdiri dari 15 Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, DUKCAPIL, Dinas Koperasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pertanahan, Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Ketahanan pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Bagian Hukum, dan Bagian Pemerintahan, statistic, Dinas Perhubungan, Bagian Kesra, Bagian Kerjasama. Pemanfaatan rancangan Induk yaitu Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah merupakan dasar pelaksanaan perencanaan dalam pergerakan mobilitas penduduk serta perencanaan berwawasan kependudukan.

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar perangkat daerah yang berpartisipasi dan yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB adalah: 15 Kecamatan ditambah Dinas Kebudayaan, Sekretariat Daerah Kota Makassar, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, BAPPEDA Kota Makassar, BKKBN /Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta GUBERNUR/WALIKOTA dan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Makassar serta Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar dalam pergerakan dan Pembangunan daerah melalui Kampung KB. Dalam hal ini mengalami kenaikan karena dengan adanya INPRES RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Tabel II.227.
Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	27	27	27	34	39
2.	Jumlah semua perangkat Daerah	51	51	51	51	51
3.	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (1/2 x 100)	52,94	52,94	52,94	64,70	76,47

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Persentase perangkat Daerah yang berperan aktif dalam program Kampung KB tahun 2023 sebesar 64,70% dan capaian tahun 2024 yaitu terdapat 76,47% SKPD yang terdiri dari Lima belas Kecamatan ditambah Dinas Kebudayaan, Sekretariat Daerah Kota Makassar, Kementerian Agama,Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Bangan, BAPPEDA Kota Makassar , BKKBN / Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar serta GUBERNUR/WALI KOTA dalam penggerakan dan Pembangunan daerah melalui Kampung KB. Dalam hal ini mengalami kenaikan karena dengan adanya INPRES RI NOMOR 3 TAHUN 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Sampai dengan tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Jumlah Perda/perkada yang dihasilkan dalam hai ini adalah Peraturan Walikota Nomor : 64 Tahun 2019 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.

Tabel II.228.
Jumlah Kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk	0	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Pada tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Makassar telah membuat satu kebijakan Peraturan Wali Kota tahun 2024 tentang pemamfaatan grand Desain pembangunan kependudukan (GDPK) dan kebijakan peratuaran Walikota Makassar akan ditindak lanjuti dengan Surat peturasan Walikota Makssar tentang Tim Koordinasi pelaksanaan Grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kota Mkassar untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan GDPK dengan para pemangku kepentingan

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Tabel II.229.
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Sektor	6	32	32	34	34

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Capaian untuk tahun 2024 sebanyak 34 sektor yang tetap menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembagunan adalah 15 Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, DUKCAPIL, Dinas Koperasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pertanahan, Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan , Bagian Kerja Sama, BPS, dan Kementerian Agama. Pemanfaatan profil ini adalah hal yang sangat penting karena berhubungan lansung dengan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta dengan kampung berkualitas.

Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

Tabel II.230.
Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan Formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kerja sama pendidikan Kependudukan	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar tahun 2025

Untuk tahun 2024 jumlah kerjasama pendidikan formal, non formal dan informal yang melalukan pendidikan kependudukan masih sama dengan tahun 2023 sebayak 8 (delapan), capaian untuk tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2021, hal ini disebabkan pada tahun 2021 DPPKB tidak melaksanakan penambahan kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal sama dengan tahun 2022 dan sementara dalam tahap sosialisasi kepada semua SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dan sekolah yang menyelenggarakan SSK MTSN 1 Makassar, SMPN 5 Makassar, SMPN 22 Makassar, SMPN 1 Makassar, SMPN 6 Makassar, SMPN 13 Makassar, SMPN 20 Makassar, dan SMPN 24 Makassar dimana didalamnya memuat tentang komitmen penyelenggaraan sekolah siaga kependudukan (SSK) di Kota Makassar.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

Relevan dengan data pertumbuhan penduduk Kota Makassar yang menunjukkan angka terus menurun, rata-rata jumlah anak per keluarga dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.231.
Rata-rata Jumlah anak per keluarga
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah anak	425.269	336.249	349.859	380.458	403.685
2.	Jumlah Keluarga	285.417	275.362	282.167	286.130	287.141

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,49	1,22	1,24	1,32	1,41

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2024 sebanyak 1,41 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 1,32 dengan melihat data tersebut lima tahun terakhir rata- rata jumlah anak dalam keluarga antara 1,22 sampai dengan 1,49 anak.

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

Tabel II.232.
Angka pemakai kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah peserta KB Aktif	118.962	119.866	82.188	109.519	114.748
2.	Jumlah pasangan usia subur	174.434	176.387	142.170	159.966	163.454
3.	Rasio Pemakai kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 thn (1/2 x 100)	68,20	67,96	57,81	68,46	70,20

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Peserta KB tahun 2024 capaian sebesar 70,20% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 68,46% terjadi peningkatan sebesar 1,74%, meningkatnya capaian peserta KB aktif disebabkan meningkatnya KIE dan pelayanan KB di tingkat lini lapangan.

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

Capaian Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) tahun 2024 sebesar 18,00% dibandingkan tahun 2023 sebesar 23,80% terjadi penurunan angka kelahiran remaja sebesar 5,8%, hal ini disebabkan pendampingan

dan konseling terhadap pasangan usia subur umur 15-19, peningkatan sosialisasi pendewasaan perkawinan, peningkatan pembinaan PIK-Remaja, pembinaan sekolah siaga kependudukan dan peningkatan pembinaan kelompok keluarga remaja sehingga terjadi penurunan kelahiran pada umur pasangan usia subur 15-19 tahun pada tahun 2024.

Tabel II.233.
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19	1.716	1.078	1365	1107	841
2.	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19	51.197	46.973	47.007	46.522	46.721
3.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 -19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19) (1/2 x 100)	33.52	22,95	29,04	23,80	18,00

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun

Tabel II.234.
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 tahun Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun	983	25.173	22.365	23.370	19.974
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	174.434	176.387	142.170	159.966	163.454
3.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun	0,56	14,27	15,73	14,60	12,22

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Capaian Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) tahun 2024 sebesar 14,91% dibandingkan tahun 2023 sebesar 14,60% terjadi peningkatan angka kelahiran remaja sebesar 0,31%, hal ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan mengenai pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan oleh karena itu ditahun selanjutnya kami akan melaksanakan pendampingan dan konseling terhadap pasangan usia subur usia umur 15 - 19 Tahunn, peningkatan sosialisasi pendewasaan perkawinan, peningkatan pembinaan PIK-Remaja, pembinanaan sekolah siaga kependudukan dan peningkatan pembinaan kelompok bina keluarga remaja untuk penurunan kelahiran pada umur Pasangan usia subur 15-19 tahun pada tahun selanjutnya.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Tabel II.235.
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	16.046	15.883	36.750	14.499	8.585
2.	Jumlah pasangan usia subur	174.434	176.387	142.170	159.966	163.454
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) (13.1/13.2 X 100)	9,20	9,00	25,85	9.06	5,25

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) berasarkan capaian tahun 2024 sebesar 5,25% dibandingkan tahun 2023 sebesar 9,06% terjadi Penurunan capaian 3,81% capaian ini merupakan target menurun, dari data yang ada terjadi peningkatan dari tahun sebelumya (Unmeet need merupakan target yang semakin rendah realisasinya dari target, semakin tinggi pencapian kinerja). Hal ini di sebabkan meningkatnya peserta KB aktif.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Tabel II.236.
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	36.493	39.091	23.776	30393	35.833
2.	Jumlah akseptor KB	118.962	119.866	82.188	109.519	114.748
3.	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (14.1/14.2 X 100)	30,68	32,61	28,93	27,75	31,23

Sumber: Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 31,23% dibandingkan tahun 2023 sebesar 27,75% terjadi peningkatan pengunaan Kontrasepsi jangka panjang sebesar 3.81%. Hal ini disebabkan oleh adanya dukungan lintas sektor dan mitra kerja dalam upaya mendukung pelaksanaan penggunaan alat kontrasepsi Jangka Panjang melalui pelayanan KB yang melibatkan Mitra Kerja.

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Tabel II.237.
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	55.472	56.261	59.982	50,447	48.706
2.	Jumlah akseptor KB	118.962	119.866	82.188	109.519	114.748
3.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (15.1/15.2 x 100)	46,63	47,15	72,98	46,06	42,45

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi tahun 2023 sebesar 46,06% dan pada tahun 2024 sebesar 42,45 % terjadi penurunan sebesar 3,61 % hal ini disebabkan meningkatnya peserta kb aktif dan mengakibatkan menurunnya unmetneed serta peningakatan untuk sosialisasi KIE bagi PUS.

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Tabel II.238.
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	8.840	8.617	4.146	2.601	6.197

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah anggota kelompok BKB	11.783	11.517	4.889	5.895	10.403
3.	Cakupan anggota Bina Kelompok Balita (BKB) ber-KB (16.1/16.2 x 100)	75,02	74,82	84,80	44,16	59,57

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) dari tahun 2024 sebesar 59,57% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 44,16% terjadi peningkatan capaian sebesar 15,41%, Peningkatan ini disebabkan pembinaan di kelompok Bina Keluarga Balita serta peran serta dari PLKB dan Kader.

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Tabel II.239.
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja
(BKR) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	6.386	6.248	870	1.648	2.918
2.	Jumlah anggota kelompok BKR	9.001	8.860	5115	6.997	8.579
3.	Cakupan anggota Bina Kelompok Remaja (BKL) ber-KB (17.1/17.2 X 100)	70,95	70,52	17.01	23,55	34,01

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) dari tahun 2024 sebesar 34,01% dibandingkan tahun 2023 sebesar 23,55% terjadi Peningkatan sebesar 10,46% . peningkatan ini disebabkan terlaksananya pembinaan langsung terhadap anggota kelompok BKR di wilayah masing-masing.

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia tahun 2023 sebesar 11,10% dan terjadi peningkatan sebesar 2,9% sehingga menjadi 14,00% di tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan terlaksananya pembinaan di kelompok secara berkala dan intens, meningkatnya peran aktif kelompok serta SDM yang makin kompeten di lapangan.

Tabel II.240.
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	4.641	4.464	240	515	740
2.	Jumlah anggota kelompok BKL	7.501	7.303	3.435	4.638	5.284
3.	Cakupan anggota Bina Kelompok Lansia (BKL) ber-KB (18.1/18.2 x 100)	61,87	61,13	6.99	11,10	14,00

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Tabel II.241.
Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PPKS	3	12	10	11	12
2.	Jumlah Kecamatan	15	15	15	15	15
3.	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (1 / 2 x100)	20	80	66,67	73,33	80

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Capaian untuk tahun 2023 sebesar 73,33% dan terjadi peningkatan sebesar 6,67% sehingga menjadi 80% di Tahun 2024 yang disebabkan karena adanya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) yang terlapor pada K0 Aplikasi Siga.

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Tabel II.242.
Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PIKR/M	119	129	128	130	135
2.	Jumlah Kecamatan	15	15	15	15	15
3.	Cakupan remaja dalam PIKR/M (20.1/20 x 100	793.33	860.00	853.33	866,66	900

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa pada tahun 2023 adalah 866,66% dan terjadi peningkatan sebesar 33,34% pada tahun 2024 sehingga menjadi 900%, hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah remaja yang dijangkau untuk menyebarkan informasi tentang KESPRO (Kesehatan Reproduksi), dan adanya kelompok yang terbentuk di sekolah karena rutinnya pembinaan dan sosialisasi penyuluh lapangan dengan anggota Genre. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi dan respon yang baik dari sekolah- sekolah sebagai mitra dari kelompok PIK Remaja/Mahasiswa sehingga dapat terbentuk PIK di sekolah masing-masing dan kelompok PIK dari Jalur Masyarakat, serta telah dibentuknya Duta Genre tingkat kecamatan dan adanya pemilihan Duta Genre tingkat kota setiap tahunnya.

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 100% dikarenakan semua PKB/PLKB yang ada Pada DPPKB diberdayakan Semua.

Tabel II.243.
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PKB/PLKB yang Didayagunakan	102	124	109	105	115
2.	Jumlah PKB/PLKB	102	124	109	105	115
3.	Cakupan PLKB/LKB yang didayagunakan (1 / 2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 100% dikarenakan semua PKB/PLKB yang ada Pada DPPKB diberdayakan Semua. Yang terdiri dari 99 PKB ASN dan 16 PLKB Non ASN.

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Tabel II.244.
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berKB mandiri	1.028	1.238	741	863	1.521
2.	Jumlah anggota kelompok UPPKS	2.628	2.678	2.884	3.791	4.087
3.	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri (1/2 x 100)	38,33	46,23	25,69	22,76	37,22

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Capaian Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri pada tahun 2023 adalah 22,76% dan terjadi peningkatan sebesar 14,46% di tahun 2024 sehingga cakupan menjadi 37,22% hal ini di sebabkan meningkatnya jumlah anggota kelompok UPPKS yang berKB mandiri dibandingkan tahun sebelumnya.

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Tabel II.245.
Rasio petugas pembantu pembina KB Kelurahan di setiap Kelurahan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan	153	153	153	160	153
2.	Jumlah Kelurahan	153	153	153	153	153
3.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB setiap Kelurahan (1 / 2 x 100)	100	100	100	104,57	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Rasio Petugas pembantu pembina KB kelurahan di setiap kelurahan mengikuti jumlah kelurahan yang ada di Kota Makassar sebanyak 153 kelurahan sehingga jumlah kader PPKBD di Kota Makassar sebanyak 153 kader atau 100%.

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Gudang Kabupaten / Kota

Tabel II.246.
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	14.918	12.203	17.210	23.046	9.725
2.	Rata-rata Pemakaian Alat dan Obat Kontrasepsi per Bulan	3.968	3.379	3.447	3.169	6.166
3.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Gudang Kabupaten / Kota (1 / 2 x 100)	375,96	361,14	499,27	727,23	157,72

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar tahun 2025

Untuk tahun 2023 capaian cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi sebesar 727,23% dan pada tahun 2024 sebesar 157.72% terdapat penurunan ketersediaan obat sebesar 569,51% hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan pemakaian Alat dan Obat Kontrasepsi oleh masyarakat.

Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes

Tabel II.247.
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	29.770	23.800	23.432	34.968	29.995
2.	Rata-rata Pemakaian Alat dan Obat Kontrasepsi per Bulan	3.968	3.516	3.447	3.169	6.813
3.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (1/2 x 100)	750,25	676,91	679,78	1.103,44	440,26

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Capaian Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes pada tahun 2024 sebesar 440,26% dan pada tahun 2023 sebesar 1103,44%,capaian mengalami penurunan sebesar 663,18%. hal ini disebabkan karena pada tahun sebelumnya pil kb dan suntik kb mengalami over stok di faskes.

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Tabel II.248.
Cakupan Faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS	109	104	101	107	116
2.	Jumlah Faskes dan Jejaring	112	132	124	140	159
3.	Persentase Faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dalam memberikan pelayanan KBKR (1 / 2 x 100)	97,32	78,79	81,45	76,43	72,96

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Capaian Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes pada tahun 2024 sebesar 72,96% dan pada tahun 2023 sebesar 76,43%,capaian mengalami penurunan sebesar 3,47%. Hal ini disebabkan karena jumlah faskes mengalami penambahan 19 Unit.

Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Tabel II.249.
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	285.417	275.362	282.167	286.130	287.141
2.	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	285.417	275.362	282.167	286.130	287.141
3.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan (1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Capaian untuk tahun 2024 sebesar 100% dimana jumlah data mikro sebanyak 287141 KK, pada tahun 2024 jumlah data mikro bertambah sebanyak 1.011 jika di bandingkan pada tahun 2023 yang berjumlah 286.130.

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Cakupan kelompok kegiatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana capaian pada tahun 2024 terdapat 1.365 kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan 8 fungsi keluarga (fungsi Agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan).

Tabel II.250.
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok kegiatan yang melalkukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	1.352	1.232	1.232	1.359	1.365
2.	Jumlah kelompok kegiatan	1.352	1.232	1.232	1.359	1.365
3.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga dimana capaian pada tahun 2023 terdapat 1359 kelompok sedangkan di tahun 2024 jumlah kelompok kegiatan sebanyan 1365, terjadi peningkatan sbanyak 6 Kelompok kegiatan hal ini di sebabkan adanya strategi baru di lapangan sehingga terjadi penambahan dan peningkatan jumlah kelompok. Kelompok Kegiatan ini melakukan pembinaan 8 fungsi keluarga (fungsi Agama,fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan).

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Tabel II.251.
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	11.783	11.517	4.373	2.714	6.076
2.	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	16.931	16.178	4.889	5.895	12.089
3.	Cakupan Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (1/2 x 100)	69,59	71,19	89,45	46,04	50,26

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak pada tahun 2023 sebesar 46,04% dibandingkan tahun 2024 sebesar 50,26% sehingga terjadi peningkatan sebesar 4,22% , capaian ini diakibatnya adanya upaya penurunan stunting dan sosialisasi 1000 HPK (hari Pertama Kehidupan) pada keluarga yang memiliki balita dan anak.

Rata-rata usia kawin pertama wanita

Tabel II.252.
Rata-rata usia kawin pertama wanita
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)	1.396.983	3.420.164	3.421.610	3.056.193	2.946.216
2.	Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	66.523	164.885	164.805	145.533	140.296
3.	Rata-rata usia kawin pertama wanita (1/2)	21	20,74	20,76	21,00	21,00

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Rata-rata usia kawin pertama wanita pada umur 20 tahun yaitu 21,00 dan pada tahun 2024 rata-rata usia kawin pertama wanita adalah 21 tahun dan merupakan usia pernikahan yang ideal untuk Wanita menurut BKKBN.

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Pembiayaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dilihat dari jumlah dana tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan kemudian turun di Tahun 2021 terjadi penurunan alokasi anggaran disebabkan adanya Covid-19, tingginya alokasi anggaran untuk Pembiayaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui APBD disebabkan kepedulian dan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap Program-program Kependudukan dan keluarga berencana dengan harapan agar jumlah penduduk di Kota Makassar dapat terkendalikan serta tumbuh seimbang serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa akan datang capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.253.
Persentase pembiayaan program
kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
melalui APBD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	27.439.862.000	22.204.000.000	35.125.933.079	38.380.504.547	37.298.581.525
2.	Jumlah APBD	4.217.870.000.000	4.227.834.375.000	4.699.859.144.499	5.262.232.822.463	4.997.480.596.068
3.	Persentase pembiayaan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (1/2 x 100)	0,65	0,53	0,75	0,73	0,75

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah Anggaran untuk Urusan Pembiayaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Kota sebesar Rp. 37.298.581.525 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 0,75% dari Jumlah APBD di Kota Makassar Tahun 2024.

Ratio Akseptor KB

Data sampai dengan tahun 2024 dari jumlah PUS yang ada di Kota Makassar berdasarkan laporan Pengendalian Lapangan tingkat kota, jumlah peserta KB Aktif sebesar 114.748 Akseptor atau 70,20% terhadap PUS sebesar 163.454 pasangan usia subur, ini artinya dari 100 PUS yang ada di Kota Makassar terdapat 69 orang ber KB angka ini adalah angka yang cukup ideal karena sebagian dari PUS yang belum ber-KB (29,08%) adalah terdiri dari PUS yang hamil, PUS yang belum mempunyai anak/Ingin anak segera (IAS), PUS ingin anak ditunda dulu (IAT), PUS tidak ingin anak lagi (TIAL), PUS yang mengalami komplikasi serta alasan lainnya. Data ratio akseptor KB Kota Makassar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.254.
Rasio Akseptor Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Akseptor KB	118.962	119.866	84.500	109.519	114.748
2.	Jumlah pasangan usia subur	174.434	176.387	149.016	159.966	163.454
3.	Rasio Akseptor (1/2 x 100)	68,20	67,96	56,71	68,46	70,20

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Makassar tahun 2025

Rasio Akseptor KB tahun 2024 sebesar 70,20% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 68,46% terjadi peningkatan sebesar 1.74%, disebabkan karena peningkatan pelayanan KB dan bertambahnya faskes pelayanan KB.

I. Urusan Perhubungan

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Tabel II.255.
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah arus penumpang bis	544.431	619.618	410.062	137.742	937.099
2.	Jumlah arus penumpang kereta api	-	-	-	-	-
3.	Jumlah arus penumpang kapal laut	104.926	129.185	677.223	916.210	890.731
4.	Jumlah arus penumpang pesawat udara	6.097.074	5.926.798	9.716.893	8.791.424	-
5.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (1+2+3+4)	6.746.431	6.675.601	10.804.178	9.845.376	1.827.830

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, tahun 2025

Data merupakan kondisi sampai bulan Desember 2024 dari instansi yang terkait PD Terminal, Otoritas Pelabuhan Makassar (Per Desember 2024). Sedangkan untuk Jumlah arus penumpang pesawat udara datanya masuk wilayah Maros bukan wilayah Kota Makassar.

Rasio ijin trayek

Tabel II.256.
Rasio ijin trayek Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	948	502	417	367	0
2.	Jumlah penduduk	1.480.480	1.484.912	1.543.373	1.463.809	5.865.820
3.	Rasio Ijin trayek (1/2)	0.0006	0.0003	0.0003	0.0003	0,0000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah izin trayek yang dikeluarkan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan berkurangnya angkutan kota atau pete-pete yang beroperasi. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan peremajaan pete-pete sejak tahun 2017, maraknya kendaraan-kendaraan online, adanya bantuan "Teman Bus" dari Kementerian Perhubungan serta meningkatnya pemakaian kendaraan roda dua.

Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Uji KIR yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Makassar terdiri dari : uji KIR terhadap mobil penumpang umum, bus, mobil angkutan barang, dan kereta tempelan (truk).

Tabel II.257.
Jumlah uji kir angkutan umum
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Jumlah uji kir angkutan umum	40.152	2524	25.559	27.172	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah Pelabuhan yang ada di Kota Makassar sebanyak 3 pelabuhan. Yang dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu Kayu Bangkoa. Dan yang dikelola oleh PT. Pelindo adalah Pelabuhan Soekarno Hatta dan Pelabuhan Paotere. Sedangkan jumlah terminal bis di Kota Makassar sebanyak 2 unit yaitu Terminal Malengkeri Tipe B dan Terminal Daya Tipa A. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.258.
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pelabuhan laut	3	3	3	3	3
2.	Jumlah pelabuhan udara	0	0	0	0	0
3.	Jumlah terminal bis	2	2	2	2	2
4.	Jumlah (1+2+3)	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara dan Terminal Bis yang ada di Kota Makassar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlahnya masih tetap.

Persentase layanan angkutan darat

Tabel II.259.
Persentase layanan angkutan darat
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah angkutan darat	948	502	417	725	643
2.	Jumlah penumpang angkutan darat (1 / 2 x 100)	11,944,800	5,951,880	4,953,960	8.613.000	14.283.654
3.	Persentase layanan angkutan darat (1 / 2 x 100)	0.0079	0.0084	0.0084	0.0084	0.0045

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, tahun 2025

Persentase layanan angkutan darat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan disebabkan jumlah angkutan darat (pete-pete) semakin menurun, diikuti dengan jumlah penumpang yang semakin menurun pula.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Tabel II.260.
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR	502	417	367	367	
2.	Jumlah angkutan umum	502	417	367	367	
3.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (1 / 2 x 100)	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, tahun 2025

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 semua angkutan umum (pete-pete) memiliki buku KIR berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Pemasangan Rambu-rambu

Tabel II.261.
Pemasangan rambu - rambu
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pemasangan rambu – rambu	81	83	0	330	490
2.	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	3,160	3,072	53,164	4,192	4280
3.	Pemasangan rambu – rambu (1 / 2 x 100)	2.56	2.70	0	7.87	11.45

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah rambu-rambu yang terpasang masih sangat minim dibanding kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari data di atas persentase pemasangan rambu-rambu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 bervariasi tiap tahun.Pada tahun 2022 tidak ada pemasangan rambu.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Tabel II.262.
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang jalan (km)	1593,46	1593,46	1593,46	1593,46	1593,46
2.	Jumlah kendaraan (unit)	1.139.068	1.584.161	1.217.413	1.210.767	2.085.628
3.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km/unit)	0.00140	0.00101	0.00131	0.00132	0.00076

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, tahun 2025

Data yang teregistrasi di Samsat dan kedepannya akan diusahakan data wajib pajak (Per Desember 2024).

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Tabel II.263.
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan
umum Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	20201	2022	2023	2024
1.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	9,939,600	4,953,960.00	8,613,000	1,436,400	16,111,484
2.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	0	0	861,300	143,640	1,866,781
3.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (1 + 2)	9,939,600	4,953,960	9,474,300	1,580,040	17,978,265

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Tabel II.264.
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2025

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2025
1.	Jumlah orang melalui dermaga	46,766	60,000	69,852	75,000	68,726
2.	Jumlah barang melalui dermaga	0	0	7,871,240	7,500,000	3,102,948
3.	Jumlah orang melalui bandara	6,097,074	5,926,798	8,613,000	0	0
4.	Jumlah barang melalui bandara	38,155	45	88	0	0
5.	Jumlah orang melalui terminal	369,719	853,555	499,286	118,068	614,222
6.	Jumlah barang melalui terminal	0	0	499,286	118,068	614,222
7.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal (1+2+3+4+5+6)	6,551,714	6,840,398	17,552,752	7,811,136	4,400,118

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal mengalami penurunan dari tahun 2019-2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 karena kondisi sudah normal Kembali.

J. Komunikasi dan Informatika

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah suatu Lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

KIM dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel II.265.
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah KIM	19	19	20	20	21
2.	Jumlah kecamatan yang ada	15	15	15	15	15
3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan (1/2 x 100)	127	127	133	133	140

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Makassar, tahun 2025

Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan layanan informasi yang bermanfaat dan memiliki nilai guna, Pemerintah

Kota Makassar terus mendorong terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Makassar. Saat ini dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar, tercatat sudah terbentuk 21 Kelompok Informasi Masyarakat. Selain mendorong terbentuknya KIM, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga berkolaborasi dengan sejumlah stakeholder dalam meningkatkan kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Kota Makassar melalui kegiatan pelatihan pembuatan konten, pelatihan pembuatan artikel atau release dan kegiatan kreatif lainnya.

Pada tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menunjuk Makassar sebagai tuan rumah Festival Komunitas Informasi Masyarakat (KIM Fest) 2024. Kegiatan ini diikuti 50 KIM dari sembilan provinsi, yakni, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.

Cakupan Layanan Telekomunikasi

Tabel II.266.
Cakupan Layanan Telekomunikasi
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas wilayah yang tercoverage	175,77	175,77	175,77	175,77	175,77
2.	Luas wilayah keseluruhan	175,77	175,77	175,77	175,77	175,77
3.	Cangkupan Layanan Telekomunikasi(1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Makassar, tahun 2025

Untuk di Wilayah Pemerintah Kota Makassar yang terdiri atas daratan dan kepulauan untuk cakupan layanan telekomunikasi sampai dengan tahun 2024 sudah tidak ada lagi area blank spot (cakupan layanan telekomunikasi sudah 100%). Hal ini di dukung oleh beroperasinya 5 provider telekomunikasi di Kota Makassar yaitu: Indosat Ooredoo, Smartfren, Telkomsel, XL Axiata, dan Tri Indonesia.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Persentase koperasi aktif

Tabel II.267.
Persentase koperasi aktif
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah koperasi aktif	1118	1124	1028	1059	727
2.	Jumlah seluruh koperasi	1606	1612	1945	1976	1636
3.	Persentase koperasi aktif (1 / 2x 100)	69,61	69,73	52,85	53,59	44,43

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kota Makassar, tahun 2025

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Jumlah koperasi aktif tahun 2024 sebesar 727 koperasi mengalami penurunan dibandingkan Jumlah koperasi aktif tahun lalu di tahun 2023 sebesar 1.059 koperasi

sedangkan jumlah koperasi aktif tahun 2022 sebesar 1,028 koperasi. Jumlah koperasi aktif tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 31 koperasi atau 53.59% dibandingkan dengan tahun 2022.

Penurunan jumlah Koperasi aktif di Makassar pada tahun 2024 disebabkan oleh :

1. Data koperasi aktif tahun 2023 (1059) merupakan jumlah total Koperasi aktif di Makassar termasuk koperasi primer kabupaten, koperasi primer provinsi dan primer nasional. kemudian dilakukan penyesuaian data dengan hanya mengambil data koperasi primer kabupaten/kota Makassar yaitu sebanyak 805 koperasi.
2. Terbitnya SK Pembubaran Koperasi dari Kementerian Koperasi No. 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 tanggal 24/07/2017 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Dari sebanyak 393 koperasi yang dibubarkan, diantaranya terdapat beberapa koperasi yang berstatus aktif sebanyak 86 koperasi. Hal tersebut menyebabkan jumlah koperasi aktif menurun sebanyak 86 Koperasi.

Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Usaha Kecil adalah peluang ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per seorangan atau badan usaha yang bukan merupakan usaha perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan :

Tabel II.268.
Persentase UKM non BPR/LKM aktif
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	13.265	25.718	25.718	25.718	25.610
2.	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	13.277	25.730	25.730	25.730	26.000
3.	Persentase UKM non BPR/LKMaktif (1/2 x 100)	99,91	99,95	99,95	98,00	98,50

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kota Makassar, tahun 2025

Persentase UKM non BPR/LKM pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 98,50% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, semakin banyak UKM yang kini memanfaatkan platform fintech, peer-to-peer lending, atau sumber pembiayaan lainnya, yang tidak terikat dengan BPR atau LKM. Hal ini memberikan mereka akses yang lebih mudah untuk mendapatkan modal usaha.

Persentase BPR/LKM aktif

Tabel II.269.
Persentase BPR/LKM aktif
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah BPR/LKM aktif	12	12	14	15	15
2.	Jumlah seluruh BPR/LKM	29	29	29	29	29
3.	Persentase BPR/LKM aktif (1 / 2 x 100)	41,38	41,38	48,27	51,72	51,72

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kota Makassar, tahun 2025

Badan Perkreditan Rakyat (BPR) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya dilakukan melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Persentase BPR/LKM aktif pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan sebesar 3% dari tahun sebelumnya (tahun 2022) yaitu dari angka 48,27% menjadi 51,72%, jumlah Koperasi yang terfasilitasi izin usaha kantor cabang, cabang pembantu dan kas sebanyak 385 Koperasi dari 1.973 Jumlah Koperasi berdasar dari Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi.

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Tabel II.270.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	9.958	25.730	18.775	27.130	32.260
2.	Jumlah seluruh UKM	13.277	25.730	18.815	27.407	32.739
3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (1/2 x 100)	75,01	100	99,78	98,99	98,53

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kota Makassar, tahun 2024

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2020 dengan realisasi kinerja sebesar 75,01%,tahun 2021 mengalami kenaikan daripada tahun lalu dengan realisasi kinerja sebesar 100%, tahun 2022 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja

sebesar 99,78% dan tahun 2023 sebesar 98,99% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 98,53%.

L. Urusan Penanaman Modal

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor PMDN berskala nasional di Makassar menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah investor tercatat sebanyak 975, kemudian meningkat menjadi 1.051 pada 2021, dan melonjak drastis menjadi 2.129 pada 2022. Pertumbuhan ini semakin pesat pada 2023 dengan jumlah investor mencapai 7.394, sebelum akhirnya mencapai angka tertinggi sebesar 11.337 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan daya tarik investasi yang semakin kuat di Makassar, didorong oleh faktor-faktor seperti kebijakan pro-investasi, infrastruktur yang berkembang, serta pertumbuhan sektor industri dan jasa yang pesat. Selain itu, stabilitas ekonomi regional serta dukungan pemerintah dalam penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif bagi investor domestik juga berkontribusi terhadap lonjakan jumlah investor ini.

Kenaikan jumlah investor PMDN juga dipengaruhi oleh perkembangan sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dan Perdagangan dan Reparasi. Adapun sektor terbesar penyumbang nilai investasi dan investor PMDN berasal dari sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, karena sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur, Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Urbanisasi yang meningkat menciptakan permintaan tinggi terhadap perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, baik untuk hunian maupun bisnis. Proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara mempercepat aksesibilitas dan konektivitas dan Pengembangan transportasi massal dan infrastruktur pendukung membuat kawasan industri dan perkantoran semakin menarik bagi investor. Penyumbang nilai investasi terbesar lainnya berasal dari sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi mengingat Makassar berfungsi sebagai hub logistik utama untuk wilayah Indonesia Timur, menjadikannya pusat transit barang dan jasa dari berbagai daerah, sehingga Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang utama distribusi ke kawasan timur Indonesia meningkatkan kebutuhan akan gudang dan fasilitas logistik, demikian pula Bandara Sultan Hasanuddin yang terus berkembang mendukung pengiriman barang dan transportasi udara. Selain itu, meningkatnya transaksi *e-commerce* meningkatkan permintaan layanan logistik, pergudangan, dan transportasi pengiriman barang, sehingga perusahaan ekspedisi dan jasa pengiriman berlomba-lomba membangun pusat distribusi di Makassar, dan Digitalisasi layanan transportasi dan logistik, termasuk aplikasi *ride-hailing* dan jasa kurir, menarik lebih banyak investasi di sektor ini.

Jumlah investor PMA berskala nasional di Makassar mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan tren pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan PMDN. Pada tahun 2020, jumlah investor PMA tercatat sebanyak 339, kemudian meningkat menjadi 411 pada 2021. Namun, pada 2022 terjadi penurunan menjadi 323 investor, yang dapat disebabkan oleh faktor global seperti ketidakpastian ekonomi akibat pandemi serta kebijakan investasi yang lebih selektif. Kendati demikian, tahun 2023 menunjukkan pemulihan signifikan dengan jumlah investor melonjak ke 772, dan terus meningkat ke angka 1.103 pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan kepercayaan investor asing yang semakin meningkat terhadap stabilitas ekonomi Makassar serta

daya tarik sektor-sektor unggulan seperti infrastruktur, perdagangan, dan pariwisata. Faktor pendorong lainnya mencakup upaya pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berbisnis, insentif investasi, serta perbaikan ekosistem investasi yang lebih transparan dan kompetitif. Meskipun demikian, tantangan utama dalam menjaga pertumbuhan investasi asing di Makassar meliputi peningkatan daya saing tenaga kerja, keberlanjutan regulasi yang kondusif, serta stabilitas politik dan hukum yang dapat memberikan kepastian jangka panjang bagi investor asing. Untuk realisasi investasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berdasarkan asal negara, Singapura merupakan negara dengan realisasi tertinggi nilai investasi sebesar Rp. 513 Milliar, kemudian Malaysia Rp. 502 Milliar, Kepulauan Virgin Rp. 62 Milliar, Republik Rakyat Tiongkok Rp. 53 Milliar, dan Inggris Rp. 42 Milliar.

Potensi investasi yang saat ini menjadi daya Tarik untuk dikembangkan di Kota Makassar yaitu beberapa pembangunan lingkungan perkantoran pesisir serta tempat wisata pesisir terutama pada wilayah sekitar pantai Losari. Pengembangan Kota Makassar menjadi kota maju dan modern tahap demi tahap mulai dijalankan salah satunya perbaikan jalan-jalan utama sebagai salah satu sarana transportasi mobilitas masyarakat sehari-hari. Pada Tahun 2024 diharapkan jumlah investor PMA/PMDN berskala nasional semakin meningkat untuk meningkatkan perekonomian Kota Makassar dan menjadikan Kota Makassar sebagai destinasi wisata ramah investasi.

Tabel II.271.
Jumlah nilai investor berskala nasional
(PMDN/PMA) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah investor PMDN berskala nasional	975	1.051	2.129	7.394	11.337
2.	JUMLAH Investor PMA berskala nasional	339	411	323	772	1.103
3.	Jumlah Total PMA dan PMDN	1.314	1.462	2.452	8.166	12.440

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, tahun 2025

Peningkatan jumlah investor PMA dan PMDN di Tahun 2022 disebabkan oleh pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha yang telah terintegrasi secara langsung melalui OSS (*One Single Submittion*). Secara tidak langsung *database* pelaku usaha telah dirincikan melalui sistem terbagi menjadi UMKM dan PMA/PMDN. Sehingga data yang sebelumnya tercatat oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar hanya mendata PMA dan PMDN yang terdaftar pada aplikasi perizinan sekarang bertambah melalui data online dari aplikasi OSS. Kenaikan angka yang cukup drastis disebabkan seluruh perizinan perusahaan PMA dan PMDN yang sebelumnya diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus didaftarkan ulang melalui aplikasi OSS terkait seluruh jenis perizinan apa saja yang telah dimohonkan oleh perusahaan PMA dan PMDN.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel II.272.
Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah investasi PMDN berskala nasional (Rp)	Rp. 7,453,875,500,000	Rp. 7.571.355.700.000	Rp. 3.483.455.700.000	Rp. 5.238.910.600.000	Rp. 3.286.368.281.251
2.	Jumlah investasi PMA berskala nasional (US$)	US$ 19,295,100	US$ 50.298.400	US$ 31.650.000	US$ 44.110.690	US$ 36.104.195

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, tahun 2025

Realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp. 3.827.931.439.043 dengan nilai investasi PMA sebesar US$ 36.104.195 atau Rp. 541.563.157.792 sedangkan nilai investasi PMDN sebesar Rp. 3.286.368.281.251. Dibandingkan dengan Tahun 2023, Total Realisasi Investasi Kota Makassar Tahun 2024 mengalami Penurunan yang sangat signifikan, yaitu pada Tahun 2023 Total Realisasi Investasi Kota Makassar sebesar Rp. 5.891.748.347.931,- sedangkan Pada Tahun 2024, Nilai Realisasi Investasi sebesar Rp. 3.827.931.439.043,- (Januari-Desember 2024). Mengalami Penurunan sebesar Rp. 2.063.816.908.888,- atau 35,03 %. Turunnya nilai investasi dipengaruhi oleh faktor makro. Misalnya pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah hingga kejadian global seperti perang Ukraina vs Rusia dan wilayah Timur Tengah. Selain itu, tidak adanya proyek strategis nasional (PSN) dari pemerintah pusat pada tahun 2024 menjadi salah satu pengaruh besar turunnya capaian realisasi investasi. Berbeda dengan tahun 2023, ada pembangunan jalan tol dan Makassar New Port (MNP) dibawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun 2024 terdapat Proyek PSEL namun pembangunannya belum bisa diukur karena belum berjalan.

Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan daya serap tenaga kerja terhadap nilai investasi pada PMA dan PMDN suatu daerah. Rasio daya serap tahun 2020 berada pada 3,34% dimana pencapaian jumlah tenaga kerja Indonesia dan asing yang ada pada perusahaan PMA dan PMDN akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah investasi PMA PMDN di Kota Makassar.

Tabel II.273.
Rasio daya serap tenaga kerja
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	4,412.00	3.035.00	4.319.00	6,194.00	11,285

2.	Jumlah seluruh PMA / PMDN	1,314.00	1,462.00	4.287.00	7,532.00	12,440
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (1 / 2)	3.36	2.07	1.01	0.82	0.91

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, tahun 2025

Rasio daya serap tenaga kerja di Makassar mengalami tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2023, sebelum mengalami sedikit peningkatan pada 2024. Pada tahun 2020, rasio daya serap tenaga kerja mencapai 3,36%, yang menunjukkan bahwa setiap perusahaan PMA/PMDN rata-rata menyerap lebih dari tiga tenaga kerja. Namun, rasio ini terus menurun menjadi 2,07 pada 2021 dan turun drastis menjadi 1,01% pada 2022, yang berarti jumlah tenaga kerja yang terserap hampir setara dengan jumlah perusahaan yang beroperasi. Tren ini semakin melemah pada 2023 dengan rasio 0,82%, yang dapat mengindikasikan peningkatan jumlah investasi yang tidak secara proporsional diikuti oleh pertumbuhan tenaga kerja, kemungkinan karena meningkatnya otomatisasi, investasi di sektor padat modal, atau perubahan dalam pola bisnis. Meskipun demikian, pada 2024, rasio ini sedikit meningkat menjadi 0,91%, sebanding dengan meningkatnya jumlah proyek yang dikerjakan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Salah satu sektor usaha yang mendukung peningkatan jumlah tenaga kerja adalah sektor konstruksi, sektor jasa lainnya, dan sektor perdagangan dan reparasi. Pemerintah dan swasta semakin banyak berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, serta proyek perumahan dan perkantoran. Meningkatnya intensitas kegiatan Konstruksi di Kota Makassar menuntut tersedianya tenaga kerja yang memadai untuk sektor tersebut.

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Tabel II.274.
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi PMDN dan PMA tahun evaluasi	Rp. 7.453.875.500.000	Rp. 7.571.355.700.000	Rp. 3.483.455.700.000	Rp. 5.238.910.600.000	Rp. 3.827.931.439.043
2.	Realisasi PMDN dan PMA tahun sebelum evaluasi	Rp. 3.067.061.000.000	Rp. 7.453.875.500.000	Rp. 7.571.355.700.000	Rp. 3.483.455.700.000	Rp. 5.238.910.600.000
3.	Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) (1/2x100%)	2.43	1.02	0.46	1.50	0.65

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, tahun 2025

Realisasi investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tahun 2024 di kota Makassar mengalami penurunan menjadi Rp. 3.286.368.281.251,- dibandingkan di tahun 2023 Rp. 5.238.910.600.000,-. Penurunan investasi penanam modal dalam negeri ini disebabkan karena pengaruh faktor makro. Misalnya pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah hingga kejadian global seperti perang Ukraina vs Rusia dan wilayah Timur Tengah. Selain itu, tidak adanya proyek strategis nasional (PSN) dari pemerintah pusat pada tahun 2024 menjadi salah satu pengaruh besar turunnya capaian realisasi investasi. Berbeda dengan tahun 2023, ada pembangunan jalan tol dan Makassar New Port (MNP) dibawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun 2024 terdapat Proyek PSEL namun pembangunannya belum bisa diukur karena belum berjalan.

Pada aspek Penanaman Modal Asing (PMA) terjadi penurunan pertumbuhan realisasi investasi di tahun 2024 di kota Makassar dari US$ 44.110.700 di tahun 2023 menjadi US$ 36.104.195 di tahun 2024 dengan jumlah proyek sebanyak 1.103 proyek.

M.Kepemudaan dan Olahraga

Persentase organisasi pemuda yang aktif

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Persentase organisasi pemuda yang aktif dari Tahun 2019-2023 adalah 100% yaitu dari 147 organisasi pemuda yang ada. Secara rinci perkembangannya dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.275.
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	147	51	63	141	174
2.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	147	55	114	144	174
3.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (1 / 2 x 100)	100%	93%	5,26%	92%	100%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, tahun 2024

Indikator kinerja tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan merupakan indikator yang telah ditetapkan pada renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 2021-2026. Pada tahun 2023 realisasi indikator tersebut mencapai 92% atau 63 organisasi aktif dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 144 organisasi pemuda.

Cakupan Pembinaan Olahraga

cabang olahraga yang dibina dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan rata-rata cakupan sekitar 46%. Secara rinci perkembangannya dari Tahun 2018-2022dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.276.
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah cabang olaraga yang dibina	14	39	19	17	31

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah seluruh cabang olaraga yang ada/ terdaftar	26	39	19	25	31
3.	Cakupan pembinaan olahraga (1 / 2 x 100)	54	10 0	100	68	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, tahun 2024

Target indikator Cakupan Pembinaan Olahraga 48,43% (31 cabang olahraga binaan/31 jumlah cabang olahraga *100) realisasi pada triwulan IV sebesar 31 cabang olahraga dan Induk organisasi Olahraga Binaan/31 jumlah cabang olahraga *100)) atau 100%. Uraian kegiatan yang mendukung indikator ini dilaksanakan dalam Sub kegiatan Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait.

Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha Pemuda merupakan Pemuda yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan menjalankan Kewirausahaan. Dalam Ekosistem Kewirausahaan, interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.

Jumlah seluruh wirausaha muda mengalami kenaikan pesat dari tahun 2022 sampai 2024, secara rinci dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.277.
Persentase Wirausaha Muda
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah wirausaha muda	250	250	1128	9650	19.595
2.	Jumlah seluruh wirausaha	1500	1500	5380	31962	32.246
3.	Persentase Wirausaha Muda (1 / 2 x 100)	17%	17%	20,96 %	30,19 %	61%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, tahun 2024

Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Jumlah pelatih yang bersertifikat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.278.
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi
Kota Makassar Tahun 2019 s.d 2023

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pelatih yang bersertifikat	40	421	138	110	69
2.	Jumlah seluruh pelatih	516	604	516	516	110
3.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (1 / 2 x 100)	7,75%	69,70%	26,74	21,32	62,73

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, tahun 2025

Tahun 2024 Realisasi Indicator Tersebut Mencapai 62,73% Atau 69 Pelatih Bersertifikat Dari Jumlah Seluruh Pelatih. Pelatih Yang Bersertifikat Merupakan Pelatih Yang Terdata Pada Bidang Prestasi Olahraga Dan Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Yang Telah Di Input Kedalam Data Sistem Informasi Dan Olahraga Sulawesi Selatan.

Cakupan Pembinaan Atlet Berprestasi

pencapaian prestasi di bidang olahraga merupakan salah satu pilar menuju kejayaan bangsa yang dilakukan melalui pembinaan olahraga prestasi secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Pembinaan olahraga prestasi secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah sebagai salah satu upaya untuk memajukan olahraga prestasi.

Olahragawan Pelajar adalah pelajar yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi.

Jumlah atlet pelajar terdiri dari atlet muda di bawah u-17, yang dibina melalui kejuaraan, pengiriman, dan bentuk pembinaan lainnya. Atlet pelajar Kota Makassar yang dibina merupakan hasil dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Selatan 2024.Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.279.
Cakupan pembinaan atlet muda
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah atlet pelajar yang dibina	208	8726	567	110	31
2.	Jumlah seluruh atlet pelajar	1400	8726	1500	1500	75
3.	Cakupan pembinaan atlet muda (1 / 2 x 100)	14,86	100	37,80	7,33	41,33

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, tahun 2025

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Jumlah atlet muda yang memenangi kejuaraan taekwondo, atletik, sepakbola, tenis lapangan, balap sepeda, bridge, dayung, judo, karate, pencak silat dan kejuaraan lainnya di beberapa kompetisi ditingkat nasional dan internasional. Atlet pelajar Kota Makassar yang dibina merupakan hasil dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Selatan 2024.sebagai berikut.

Tabel II.280.
Jumlah atlet berprestasi
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam 1 tahun	19	19	5	19	15

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah atlet berprestasi

Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dihitung dari jumlah atlet yang mendapatkan juara di tiap Kejuaraan yang diselenggarakan.

Tabel II.281.
Jumlah prestasi olahraga
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam 1 tahun	8	28	15	11	8

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, tahun 2025

N. Statistik dan Persandian

Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Tabel II.282.
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, tahun 2025

Sistem data dan statistik yang terintegrasi di Kota Makassar telah ada sejak Tahun 2019. Sistem data yang terintegrasi memudahkan metode penyajian informasi sehingga seluruh data yang telah terdokumentasikan dapat menghasilkan informasi yang dapat diakses oleh stakeholder dengan cara yang mudah dan cepat, salah satunya melalui website. Dengan tersedianya data dan informasi ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perkembangan pembangunan di Kota Makassar.

Buku ”kabupaten dalam angka”

Tabel II.283.
Buku ”Daerah Dalam Angka”
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Buku ”Daerah dalam Angka” (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Makassar, tahun 2025

Buku Profil Kota Makassar adalah salah satu output dari buku daerah dalam angka. Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya Bidang Pengolahan Data Elektronik dapat menyelenggarakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk memperoleh data dilakukan dengan cara survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Buku Profil Kota Makassar berisi data data sektoral mengenai Kota Makassar. Baik Data umum, sosial budaya, sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang, infrastruktur, pariwisata, perhubungan, IKM, ekonomi dan politik. Buku ini dikeluarkan tiap tahunnya sejak tahun 2017 untuk melihat gambaran perkembangan kemajuan

pembangunan dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kota Makassar.

Buku ”PDRB”

Buku ”PDRB” Kota Makassar telah tersedia dari Tahun 2017-2021. Datanya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II.284.
Buku ”PDRB” Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (Ada/ Tidak)	2024 (Ada/ Tidak)
1.	Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, tahun 2025

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB Kota Makassar terus mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024.

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi

Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah adalah telah mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa sebanyak 51 Perangkat Daerah telah menggunakannya.

Tabel II.285.
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	51	51	51	51	51
2.	jumlah total perangkat daerah	51	51	51	51	51
3.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (1 / 2 x 100)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, tahun 2025

O. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Tabel II.286.
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	3	3	3	3

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya Tahun 2024 di targetkan 3 Festival dan terealisasi 3 festival. Festival budaya yang di laksanakan tahun 2024 adalah festival bulan budaya, Festival Kelong dan Festival gerakan cinta budaya.

Kegiatan yang di laksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja program pengembangan kesenian tradisional adalah kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ Kota.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Tabel II.287.
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20	26	32	32	40
2.	Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	138	153	162	162	162
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (1/2 x 100)	14	17	20	20	24

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2024 Adalah sebagai berikut : Situs Bastion Karabbaka, Komp. Makam Raja Bone, Basttion Mangara bombang, Benda Parang, Benda Tombak, Benda Badik, Benda Keris, Struktur Bungung Lompo, Badik Luwu, Tombak, Badik Gecong, Badik Lompo Battang, Komp Makam Karaeng Katinting, Kareng Tanralili, Bunker Tallo, Badik Luwu, Badik Sakking, Struktur Batu Manggala, Keris Lamba Tujuh, Cegele (Tombak Gengam), Badik Raja, Keris, Tombak, Parang, Badik Luwu, Keris, Badik Luwuk, Keris Sapukalla, Keris Luwu Luk 3, Kerik Lamba 13, Badik Luwu, Badik Bugis, Menara Mercusuar.

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Tabel II.288.
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi	0	0	9	10	100
2.	Jumlah karya budaya yang diinventarisasi	50	25	14	50	25
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (1+2)	50	25	23	60	35

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi tahun 2024 sebanayak 10 karya budaya seperti: Lontara Silsilah, Lontara Jangang-jangan, Lontara Bilang, Sinrilig I Toloq Daeng Magassing, Anggaru, I Maddi Daeng Ri Makka, Cerita Pelanduk, Buaya, A' Cini Wattu, A' Jene Sapara Accera Kalompoang,Jumlah karya budaya yang di inventarisasi di tahun 2024 sebayak 25 yaitu: Manuskrip (Lontara Silsilah, Lontara Jangang-jangan, Lontara Bilang, Lontara Kutika), Tradisi Lisan (Sinrilig I Toloq Daeng Magassing, Anggaru, I Maddi Daeng Ri Makka, Cerita Pelanduk dan Buaya, Kelong, Cerita Si Lumpuh dan Si Buta, Kondo Buleng, Cerita Monyet dan Kura-Kura, Sinrlik Poosi Tianunung, Sigajang Lalang Lipa). Adat Istiadat (A' Cini Wattu, A' Jene Sapara, Antama Balla, Menre Bola, Appakaramulla), Ritus (Accera Kalompoang, Akbarasanji, Appasili, Maulud), Thenologi Tradisional, Pembuatan Badik, Bumbu), Tahun 2024 jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi sebanyak 35.

Tabel II.289.
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Kota Makassar Tahun 2020-2024

N0	Uraian	2020	2021	2022*	2023	2024
1.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	-	1	0	0

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu tahun 2024 belum ada karena belum adanya Pengelolaan Secara terpadu yang di tandai dengan kesepakatan atau kerja sama dengan pemilik/pengelola Objek Cagar Budaya.

P. Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Tabel II.290.
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Kota Makassar Tahun 2020-2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun (umur >5, n-1)	186.527	780.007	785.029	645.900	660.994
2.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	1.388.531	1.307.923	1.311.350	1.315.791	.368.481
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan (1/2) x 100	0,134	0,596	0,599	0,491	0,483

Sumber: Dinas Perpustakaan, Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah kunjungan ke perpustakaan di Kota Makassar menunjukkan variasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan turun drastis menjadi 186.527 akibat pandemi Covid-19. Namun, tren positif mulai terlihat pada tahun 2021 dengan peningkatan jumlah kunjungan hingga 780.007, yang terus berlanjut pada tahun 2022 mencapai 785.029. Meski demikian, pada tahun 2023, jumlah kunjungan menurun menjadi 645.900 akibat beberapa sarana perpustakaan mengalami kerusakan khususnya di Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 sebesar 2,3 % menjadi 660.994 kunjungan.

Populasi yang harus dilayani (usia lebih dari 5 tahun) juga menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun sesuai data penduduk Kota Makassar dari BPS. Pada tahun 2020, jumlah populasi yang harus dilayani sebanyak 1.388.531 jiwa, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 1.307.923 dan meningkat kembali di tahun 2022 dan di tahun 2023 menjadi masing-masing 1.311.350 dan 1.315.791 jiwa. Pada tahun 2024, jumlah populasi yang harus dilayani meningkat kembali menjadi 1.368.481 jiwa.

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun terhadap populasi yang harus dilayani menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio jumlah pengunjung hanya mencapai 0,134 akibat pandemi Covid-19. Rasio tersebut kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 0,596 dan di tahun 2022 mencapai angka 0,599. Namun, pada tahun 2023, rasio ini menurun menjadi 0,491, dan sedikit turun lagi pada tahun 2024 menjadi 0,483 akibat dari bertambahnya jumlah populasi yang dilayani.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Tabel II.291.
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	111.681	112.365	113.293	114.293	116.111
2.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	251.872	252.624	254.515	269.293	271.073
3.	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (1/2)	0,443	0,445	0,445	0,424	0,428

Sumber: Dinas Perpustakaan, Kota Makassar, tahun 2025

Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Makassar menunjukkan peningkatan Jumlah Judul dan Jumlah Eksemplar dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah Koleksi Judul Buku tercatat sebanyak 111.681, kemudian bertambah menjadi 112.365 pada tahun 2021, tahun 2022 bertambah 113.293 selanjutnya tahun 2023 bertambah 114.293 dan tahun 2024 bertambah lagi menjadi 116.111.

Jumlah Eksemplar Buku juga mengalami Kenaikan setiap tahun dari 251.872 pada tahun 2020 menjadi 252.624 pada tahun 2021, kemudian tahun 2022 naik menjadi 254.515 dan tahun 2023 naik kembali menjadi 269.293, dan pada tahun 2024 bertambah lagi menjadi 271.073.

Namun, jika dilihat dari Rasio Koleksi Buku yang tersedia, terjadi sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, Rasio Koleksi tercatat sebesar 0,443, yang meningkat sedikit menjadi 0,445 pada tahun 2021 dan tetap stabil hingga tahun 2022. Pada tahun 2023, Rasio ini turun menjadi 0,424, sebelum kembali naik menjadi 0,428 pada tahun 2024. Hal ini terjadi karena penambahan exemplar buku lebih banyak dibandingkan judul buku.

Penambahan koleksi ini sebagian besar berasal dari kegiatan pengadaan buku serta sumbangan atau donasi dari masyarakat dan penulis. Meskipun Rasio Koleksi sempat menurun, secara keseluruhan koleksi judul dan eksemplar buku terus bertambah dari tahun ke tahun, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat.

Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Tabel II.292.
Rasio perpustakaan persatuan penduduk Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah perpustakaan	342	444	911	559	567
2.	Jumlah penduduk (n-1)	1.526.677	1.423.877	1.427.619	1.432.189	1.474.393
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (1/2 x 1000)	0,224	0,312	0,638	0,390	0,385

Sumber: Dinas Perpustakaan, Kota Makassar, tahun 2025

Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk di Kota Makassar dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Perpustakaan dengan Jumlah Penduduk. Pada tahun 2020, Jumlah Perpustakaan tercatat sebanyak 342, dengan jumlah penduduk sebesar 1.526.677 jiwa. Rasio perpustakaan per 1.000 penduduk pada tahun tersebut adalah 0,224, menunjukkan bahwa setiap perpustakaan melayani rata-rata 22 orang.

Pada tahun 2021, Jumlah Perpustakaan meningkat menjadi 444, sementara Jumlah Penduduk menurun menjadi 1.423.877 jiwa. Hal ini menyebabkan rasio Perpustakaan Meningkat menjadi 0,312, menunjukkan peningkatan akses Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, di mana Jumlah Perpustakaan melonjak signifikan menjadi 911. Rasio Perpustakaan terhadap penduduk mencapai 0,638 per 1.000 penduduk, menunjukkan Peningkatan signifikan dalam cakupan Layanan Perpustakaan.

Namun, pada tahun 2023, Jumlah Perpustakaan mengalami Penurunan menjadi 559, dengan jumlah penduduk sebesar 1.432.189 jiwa. Penurunan ini mengakibatkan rasio perpustakaan terhadap penduduk turun menjadi 0,390. Pada tahun 2024, Jumlah Perpustakaan kembali meningkat menjadi 567, menghasilkan rasio Perpustakaan sebesar 0,385 per 1.000 penduduk, dengan setiap perpustakaan melayani rata-rata 39 orang.

Perubahan rasio ini mencerminkan dinamika pertumbuhan Jumlah Perpustakaan dan Penduduk, serta upaya berkelanjutan dalam meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas Layanan Perpustakaan di Kota Makassar.

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun

Tabel II.293.
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	15.543,92	65.000,58	65.419,08	53.825	55.082,83

Sumber: Dinas Perpustakaan, Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Makassar menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Jumlah rata-rata Pengunjung tercatat sebanyak 15.543,92, mengalami penurunan yang signifikan akibat dampak pandemi Covid-19 yang membatasi akses ke Perpustakaan.

Namun, pada tahun 2021, Jumlah rata-rata Pengunjung kembali meningkat

menjadi 65.000,58, dan tren Positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan sedikit kenaikan menjadi 65.419,08. Pada tahun 2023, Jumlah Pengunjung mengalami penurunan menjadi 53.825, namun kembali meningkat pada tahun 2024 dengan Jumlah rata-rata Pengunjung sebesar 55.082,83.

Meningkatkan Jumlah Pengunjung melalui inovasi dan kegiatan Pembinaan Perpustakaan, meskipun ada tantangan seperti pandemi yang mempengaruhi angka kunjungan dan sarana prasarana perpustakaan.

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Tabel II.294.
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	111.681	112.962	113.293	114.881	116.111

Sumber: Dinas Perpustakaan, Kota Makassar, tahun 2025

Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah koleksi judul buku tercatat sebanyak 111.681, dan jumlah ini terus meningkat secara bertahap setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah koleksi judul meningkat menjadi 112.365, dan pada tahun 2022 bertambah menjadi 113.293 judul. Pada tahun 2023, jumlah koleksi judul buku bertambah lagi menjadi 114.293, dan meningkat lagi menjadi 116.111 pada tahun 2024.

Peningkatan Jumlah Koleksi Judul Buku ini mencerminkan Komitmen Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam pengembangan koleksi untuk memperkaya sumber informasi dan pengetahuan yang dapat diakses oleh Masyarakat Kota Makassar.

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Tabel II.295.
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang
memiliki sertifikat Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat	17	16	19	17	20
2.	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai	970	988	11.502	1.701	4.749
3.	Jumlah tenaga teknis	1,75%	1,62%	1,19%	0,99%	0.24%

Sumber: Dinas Perpustakaan, Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat di Kota Makassar menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis bersertifikat tercatat sebanyak 17 Orang, dan pada tahun 2021 jumlah tersebut sedikit menurun menjadi 16 Orang. Pada tahun 2022, jumlahnya meningkat menjadi 19 Orang, namun pada tahun 2023, jumlah pustakawan yang memiliki sertifikat kembali turun menjadi 17 Orang, akibat Pensiun dan Meninggal Dunia. Kemudian pada tahun 2024 Jumlah Pustakawan yang memiliki sertifikat

meningkat menjadi 20 Orang.

Meski Jumlah Pustakawan Bersertifikat mengalami Fluktuasi, Jumlah seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai mengalami kenaikan yang signifikan khususnya Pustakawan dan tenaga teknis selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 970 Orang, meningkat menjadi 988 pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 11.502 orang pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah total Pustakawan dan Tenaga Teknis mengalami penurunan menjadi 1.701 Orang, dan bertambah lagi menjadi 4.749 Orang pada tahun 2024. Penurunan terjadi seiring dengan pendataan ulang jumlah tenaga perpustakaan khususnya tenaga teknis binaan Dinas Perpustakaan Kota Makassar.

Persentase Pustakawan Bersertifikat terhadap Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai menunjukkan penurunan dari 1,75% pada tahun 2020 menjadi 0,42% pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan Jumlah Tenaga Teknis dan Pustakawan yang tidak seluruhnya memiliki Sertifikasi.

Q. Kearsipan

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Tabel II.296.
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku. Arsip secara baku	21 SKPD	26 SKPD	31 SKPD	36 SKPD	46 SKPD
2.	Jumlah perangkat daerah	51	51	51	51	51
3.	Persentase perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (1/2 x100)	41%	51%	61%	71%	91,12%

Sumber: Dinas Kearsipan, Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah Perangkat Daerah Kota Makassar sebanyak 51 SKPD,Target Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku sampai pada tahun 2024 adalah 41 SKPD (80.39%), realisasi kinerja 46 SKPD atau 91,12%%. Realisasi capaian yang mengelolah arsip secara baku adalah 46 SKPD (91,12%) atau sebesar 113%. Adapun usaha yang dilakukan sehinga realisasi capaian melebihi dari target adalah Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar intens melakukan rapat dan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan memberikan arahan dalam percepatan pelaksanaaan kegiatan, kerjasama yang baik dengan Tim Pelaksanana Kegiatan dan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD teknis terkait,. Namun masih terdapat kendala di Dinas Kearsipan yaitu tenaga fungsional arsiparis yang ada di SKPD sebagian besar yang terangkat jadi PPPK kompotensinya bukan arsiparis, belum ada Perda terkait Kearsipan.Tabel di atas memberikan gambaran Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku setiap tahunnya dari Tahun 2019-2024 mengalami peningkatan. Di Tahun 2019 persentasenya mencapai 31% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 91,12%. Secara rinci perkembangan persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Makassar Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table diatas.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Tabel II.297.
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan	9	4	1	9	11

Sumber: Dinas Kearsipan, Kota Makassar, tahun 2025

Kegiatan peningkatan SDM Pengelola kearsipan dari Tahun 2019 – 2024 mengalami peningkatan. Di Tahun 2019 dilaksanakan 9 Kegiatan kemudian menurun pada tahun 2020 turun menjadi 4 dan tahun 2021 menurun menjadi 1 dikarenakan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid 19, tahun 2022 sebanyak 9 kegiatan dan pada tahun 2023 dan 2024 adalah 11 kegiatan, dapat dilihat pada table daiatas.

Selama Tahun Anggaran 2024 (Triwulan I sampai dengan Triwulan IV), Dinas Kearsipan telah melaksanakan 4 program (16 kegiatan).Terdiri dari : 1 (satu) program penunjang/pendukung (7 kegiatan) dan 3 (Tiga) program utama (9 kegiatan) pada Renja Tahun 2024 sesuai dengan Renstra Dinas Kearsipan Kota Makassar 2021-2026.

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan

Tabel II.298.
Produksi Perikanan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah produksi ikan (Ton)	18.761	18.922	19,616	20.772,5	20,590.6
2.	Target Daerah (Ton)	20.341	19.136,2	19,519.0	19.909	20,307.0
3.	Produksi perikanan (1/2 x 100)	92,23	98,88	100.50	103,3	101,4

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

Kota Makassar merupakan kota pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 13,6 km, dan memiliki Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang. Makassar juga memiliki 13 pulau dengan potensi kebaharian yang tersebar di sekitar Selat Makassar : Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng Keke, Lae-Lae, Samalona, Lakkang, Kayangan, Bonetambung, Kayangan, Bonetambung, Lanjukang, Lumu-Lumu, Bonebatang. Perkembangan produksi ikan dari Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena kondisi cuaca yang tidak menentu setiap tahunnya, kondisi pandemi covid-19 yang membuat pembatasan sosial sehingga nelayan jarang yang melaut serta masih perlu lebih dioptimalkan sarana prasarana penangkapan. Tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan seiring dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap keadaan berangsur-angsur membaik dari pasca covid 19 sehingga hasil penangkapan perikanan mulai meningkat.

Konsumsi ikan

Tabel II.299.

Konsumsi Ikan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah konsumsi ikan (Kg)	61.03	68.3	69,5	71,1	-
2.	Target Daerah (Kg)	56.10	61.03	62.02	63.01	72.48
3.	Konsumsi ikan (1 / 2 x 100)	108,78	111,91	112.06	112,83	-

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

Persentase konsumsi ikan di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah konsumsi ikan per kapita. Pada tahun 2020, konsumsi ikan mencapai 61,03 kg, namun mengalami penurunan shingga 29,16 kg pada tahun 2022. Meski demikian, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 36,96 kg dan 48,55 kg. Jika dibandingkan dengan target daerah, konsumsi ikan selalu berada di bawah target dari tahun 2021 hingga 2024. Persentase capaian konsumsi terhadap target juga menunjukkan tren yang menurun drastis dari 108,79% pada tahun 2020 menjadi hanya 47,02% pada 2022, lalu sedikit membaik menjadi 66,98% pada 2024. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi ikan sesuai target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Cakupan bina kelompok nelayan

Tabel II.300.

Cakupan bina kelompok nelayan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok nelayan yang Mendapatkan bantuan pemda	73	64	87	93	0
2.	Jumlah kelompok nelayan	73	140	147	147	206
3.	Cakupan bina kelompok nelayan (1/2 x 100)	100	45.71	59,18	63.27	0

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

Pada tahun 2020, seluruh kelompok nelayan yang terdaftar (73 kelompok) mendapatkan bantuan, sehingga cakupan bina kelompok mencapai 100%. Namun, di tahun-tahun berikutnya terjadi fluktuasi. Jumlah kelompok nelayan meningkat dari tahun ke tahun, tetapi proporsi yang mendapatkan bantuan tidak selalu sebanding. Misalnya, pada tahun 2021 hanya 64 dari 140 kelompok yang dibantu (cakupan 45,71%), dan pada 2024 hanya 65 dari 206 kelompok yang menerima bantuan (cakupan turun menjadi 31,55%). Penurunan ini dijelaskan oleh adanya kelompok baru yang belum sempat dibina dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, yang pada tahun 2024 tidak mampu menyediakan bantuan sarana dan prasarana seperti tahun-tahun sebelumnya.

Produksi perikanan kelompok nelayan

Tabel II.301.
Produksi perikanan kelompok nelayan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	4.625	6.462	2,866	2,908	6,808
2.	Jumlah produksi ikan di daerah	15,628	18,922	19,300	19,909	20,307
3.	Produksi perikanan kelompok nelayan (1 / 2 x 100)	24.65	34.15	14.85	14,6	33,52

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah produksi ikan oleh kelompok nelayan mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, Jumlah produksi ikan mencapai 4.625 ton dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 6.462 ton. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan drastis masing-masing menjadi 2.866 ton dan 2.908 ton. Pada tahun 2024, produksi kembali meningkat tajam menjadi 6.808 ton. Jika dibandingkan dengan total produksi ikan daerah, kontribusi kelompok nelayan pada tahun 2020 dan 2021 cukup besar, yakni 24,65% dan 34,15%. Tetapi pada tahun 2022 dan 2023, kontribusinya menurun drastis hingga hanya sekitar 14%. Kemudian di tahun 2024, kontribusi naik lagi menjadi 33,52%. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan peran kelompok nelayan dalam pembangunan sektor perikanan daerah.

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Tabel II.302.
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis
yang aman Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah tangkapan ikan	18.761	18.922	19,616	19,909	20,589
2.	80% dari tangkapan maksimum lestari	37.522	37.844	39232	39,818	33,209
3.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman (1/2 x 100)	50.00	50.00	50.00	50	61.99

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2023, proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batas aman tetap konsisten di angka 50%, menunjukkan bahwa setengah dari batas lestari digunakan dalam praktik penangkapan ikan. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 61,99%, menunjukkan bahwa meskipun jumlah tangkapan ikan meningkat, total tangkapan masih berada dalam batas yang lebih aman karena batas lestari tahun tersebut menurun menjadi 33.209 ton. Selama empat tahun pertama, Kota Makassar menjaga praktik penangkapan ikan tetap stabil dalam batas biologis yang aman. Peningkatan proporsi menjadi 61,99% pada tahun 2024 menunjukkan praktik perikanan yang lebih berkelanjutan karena tangkapan tetap berada jauh di bawah batas maksimum lestari, meskipun batas tersebut menurun.

B. Pariwisata

Kunjungan wisata

Tabel II.303.
Kunjungan Wisatawan Nusantara
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisnus	1.540.468	1.695.183	3.471.893	4.414.466	5.524.000
2	Target Kunjungan Wisnus	5.550.847	925.147	1.657.929	3.690.375	4.767.623
3	Capaian Kunjungan Wisnus (%) (1/2 x 100)	27,75%	183,23%	209,41%	119,62%	115,86%

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2025

Data kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) di Kota Makassar menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah kunjungan Wisnus tumbuh dari 1,54 juta pada tahun 2020 menjadi 5,52 juta pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi COVID-19. Peningkatan tajam pada tahun 2022 terlihat dengan jumlah kunjungan yang melampaui target secara signifikan, mencapai 209,41% dari target. Hal ini mengindikasikan adanya daya tarik wisata Makassar yang semakin kuat dan strategi promosi yang efektif. Peningkatan kunjungan wisnus ini tentu berdampak positif bagi perekonomian kota, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Namun, perlu diperhatikan bahwa persentase capaian kunjungan wisnus di tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Meskipun masih melampaui target, namun jika dibiarkan hal ini dapat menjadi isu pariwisata kedepannya. Faktor yang mempengaruhi penurunan capaian kunjungan wisata ini, dapat berasal dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional atau adanya destinasi wisata baru di daerah lain, sedangkan faktor internal dapat berupa kurangnya inovasi dalam pengembangan atraksi wisata atau permasalahan infrastruktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah wisatawan nusantara tersebut, perlu dianalisa secara mendalam guna menjaga momentum pertumbuhan pariwisata di Makassar dan mencapai target yang lebih tinggi di masa mendatang.

Berikut jumlah kunjungan wisatawan nusantara selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam grafik di bawah ini:

Gambar II.16.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)
Kota Makassar Tahun 2020 s/d 2024

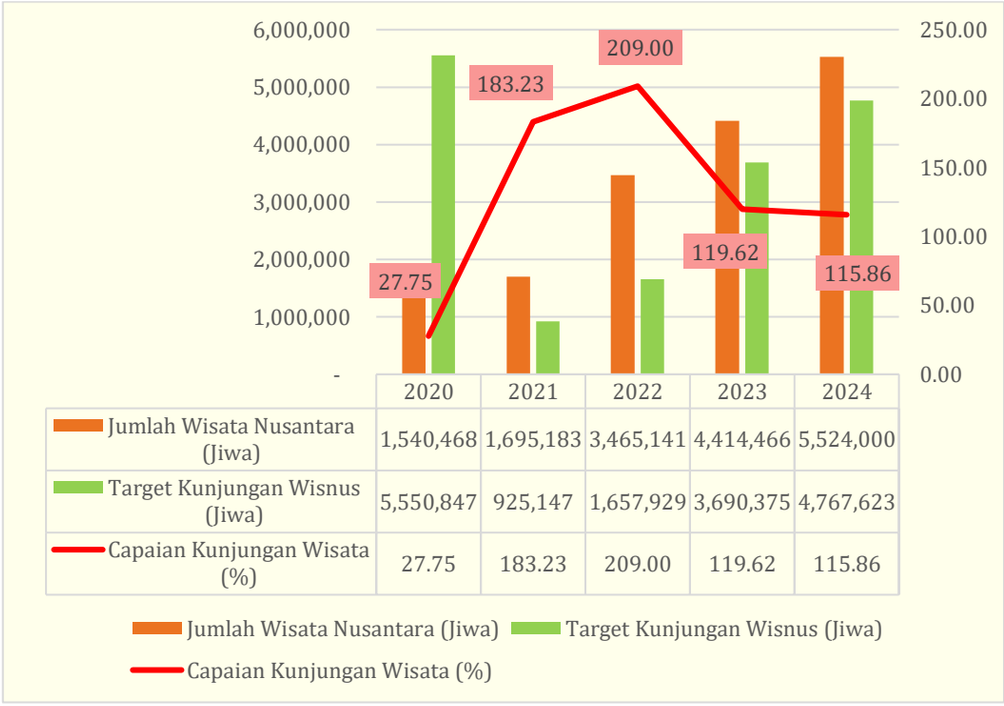

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2025, diolah Bappeda

Perkembangan angka kunjungan wisatawan nusantara selama Tahun 2020 s/d 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel II.304.
Angka Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)
Kota Makassar Tahun 2020 s/d 2024

Tahun	Jumlah Wisata Nusantara (Wisnus)	Persentase Peningkatan (%)
2020	1.540.468	-65,46
2021	1.695.183	10,04
2022	3.465.141	104,41
2023	4.414.466	27,40
2024	5.524.000	25,13

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2025

Data pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara (Wisnus) dari 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang signifikan setelah dampak pandemi COVID-19. Pada 2020, jumlah Wisnus mengalami penurunan drastis sebesar -65,46%, mencerminkan pembatasan perjalanan dan penutupan destinasi wisata akibat pandemi. Namun, pemulihan mulai terlihat pada 2021 dengan peningkatan 10,04%, meskipun kenaikannya relatif moderat karena masih adanya ketidakpastian pandemi. Lonjakan signifikan terjadi pada 2022, di mana jumlah Wisnus tumbuh sebesar 104,41%, menandakan pemulihan besar-besaran yang didorong oleh pelonggaran pembatasan, kampanye promosi wisata, dan peningkatan kepercayaan masyarakat untuk bepergian kembali. Pada 2023 dan 2024, pertumbuhan jumlah Wisnus melanjutkan tren positif dengan kenaikan masing-masing sebesar 27,40% dan 25,13%.

Meskipun kenaikannya tidak setajam 2022, ini mencerminkan stabilitas dan keberlanjutan dalam sektor pariwisata:

Tabel II.305.
Angka Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)
dan Wisatawan Mancanegara Kota Makassar
Berdasarkan Per bulan Selama Tahun 2023 dan 2024

Bulan	2023		2024	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
Januari	348.759	6.566	466.238	8.232
Februari	320.196	7.281	397.799	9.167
Maret	359.066	7.743	440.550	9.309
April	351.957	4.013	560.136	5.940
Mei	398.736	7.197	454.331	3.608
Juni	395.605	7.261	481.940	5.264
Juli	423.722	4.467	516.549	11.032
Agustus	358.593	8.010	466.598	11.765
September	344.566	6.816	428.852	9.262
Oktober	369.762	8.361	333.428	6.603
November	370.200	8.801	401.126	6.937
Desember	373.304	9.098	576.453	8.477
TOTAL	**4.414.466**	**85.614**	**5.524.000**	**95.596**
PROSENTASE	**27,40**	**19,93**	**25,13**	**11,66**

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2025

Data menunjukkan adanya pertumbuhan yang konsisten dalam jumlah wisatawan nusantara (Wisnus) dari 2023 ke 2024 dengan peningkatan tahunan sebesar 25,13%, sementara wisatawan mancanegara (Wisman) tumbuh lebih moderat sebesar 11,66%. Pertumbuhan Wisnus sepanjang tahun 2024 terlihat signifikan, dengan bulan-bulan tertentu seperti April (560.136 kunjungan), Juli (516.549 kunjungan), dan Desember (576.453 kunjungan) menunjukkan puncak aktivitas wisata domestik. Peningkatan ini mencerminkan adanya momen libur panjang seperti libur lebaran, libur kenaikan kelas, dan libur akhir tahun, yang secara tradisional memicu lonjakan kunjungan wisata domestik. Kontribusi dari upaya promosi wisata dan infrastruktur domestik yang lebih baik juga terlihat memperkuat daya tarik destinasi lokal di Kota Makassar.

Sementara itu, meskipun Wisman menunjukkan pertumbuhan, kontribusi mereka terhadap total kunjungan wisata masih relatif kecil dibandingkan Wisnus. Tingginya angka Wisman pada Juli (11.032 kunjungan) dan bulan Agustus (11.765 kunjungan) dikarenakan libur musim panas di negara asal mereka yang bertepatan dengan diadakannya berbagai event yang diselenggarakan di Kota Makassar antara lain F8

dan *Makassar Investment Forum* (MIF).

Persentase pertumbuhan yang lebih rendah untuk Wisman (11,66%) dibandingkan Wisnus dapat mencerminkan beberapa tantangan, seperti ketatnya regulasi visa atau persaingan dengan negara lain sebagai destinasi wisata. Secara keseluruhan, diperlukan strategi khusus untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, misalnya dengan meningkatkan promosi di negara-negara target, mengembangkan paket-paket wisata yang menarik, serta memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata.

Tabel II.306.
Kunjungan Wisata Manca Negara
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisman	29.358	3.669	73.495	85,614	95.596
2	Target Kunjungan Wisman	110.884	18.484	30.844	73.887	89.039
3	Capaian Kunjungan Wisman (%) (1/2 x 100)	26,48%	19,85%	238,28%	115,87	107,36

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2025

Data kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) dari 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang menggambarkan pemulihan bertahap pasca-pandemi COVID-19. Pada 2020, jumlah Wisman hanya mencapai 29.358 atau 26,48% dari target, mencerminkan dampak signifikan dari pembatasan perjalanan global. Kondisi memburuk pada 2021 dengan capaian hanya 19,85% dari target, yaitu 3.669 kunjungan, yang merupakan titik terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, pada 2022, terjadi lonjakan luar biasa dengan kunjungan mencapai 238,28% dari target. Peningkatan ini mencerminkan kelonggaran regulasi perjalanan internasional, pembukaan kembali perbatasan, serta daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata yang berhasil menarik minat wisatawan global setelah pandemi.

Pada 2023 dan 2024, pertumbuhan kunjungan Wisman tetap positif meskipun tidak setajam tahun sebelumnya, dengan capaian masing-masing sebesar 115,87% dan 107,36% dari target. Meski jumlah kunjungan terus meningkat, persentase pencapaian yang sedikit menurun dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena penetapan target jumlah kunjungan Wisman tahun 2023 naik sebesar 240% dibanding tahun 2022, dan begitupun dengan penetapan target di tahun 2024 yang naik sebesar 120% dari tahun sebelumnya. Peningkatan target ini mencerminkan optimisme dan ambisi dalam sektor pariwisata. Faktor seperti promosi wisata bertaraf internasional, peningkatan kualitas pelayanan, dan penyelenggaraan event internasional dapat berkontribusi pada pertumbuhan ini. Namun, masih ada tantangan seperti persaingan dari destinasi negara lain dan kebijakan perjalanan internasional yang dapat mempengaruhi jumlah kunjungan Wisman. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata internasional telah pulih secara signifikan, meskipun masih memerlukan strategi inovatif untuk mempertahankan momentum pertumbuhan.

Berikut jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam grafik di bawah ini.

Gambar II.17.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)
Kota Makassar Tahun 2020 s/d 2024

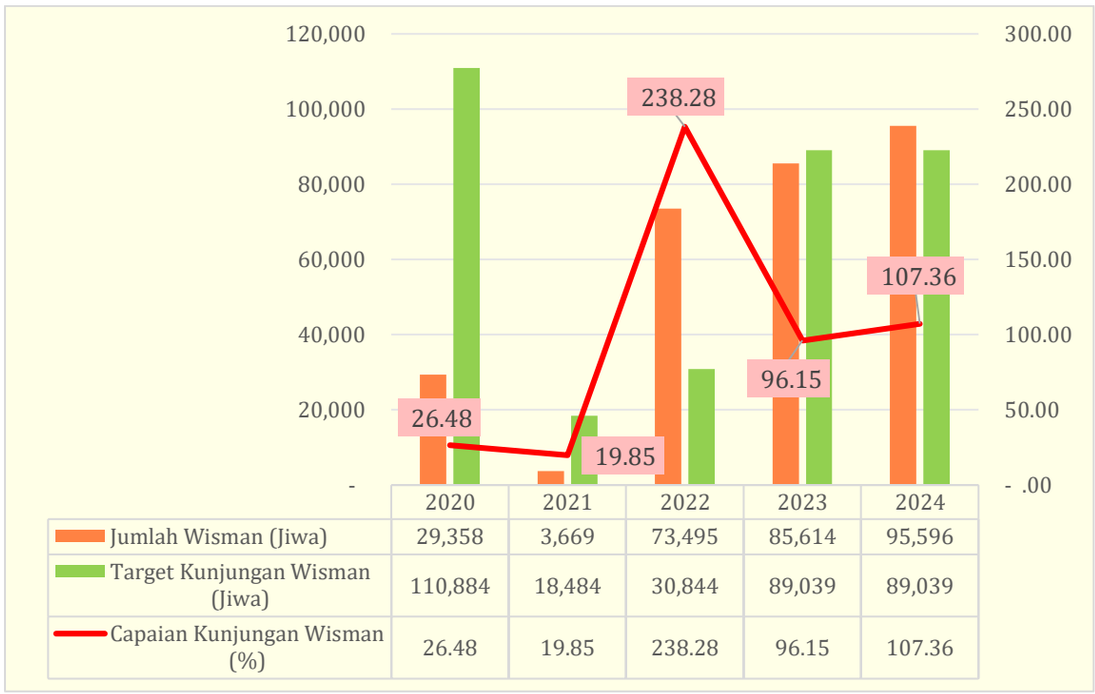

Tabel II.307.
Angka Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)
Kota Makassar Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Tahun	Jumlah Wisata Mancanegara (Wisman)	Prosentase Peningkatan (%)
2020	29.358	-73,59
2021	3.367	-88,53
2022	71.388	2.020,23
2023	85.614	19,93
2024	95.596	11,66

Sumber : Data telah diolah tahun 2025

Data di atas menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) selama lima tahun terakhir. Tahun 2020 terjadi penurunan drastis jumlah kunjungan wisman, kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi perjalanan internasional. Tren penurunan ini berlanjut pada 2021, dengan hanya 3.367 wisman dan penurunan lebih tajam sebesar 88,53%, yang menandakan dampak pandemi masih sangat terasa. Namun, pemulihan luar biasa terjadi pada 2022, dengan jumlah wisman melonjak drastis hingga 71.388, meningkat sebesar 2.020,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelonggaran pembatasan perjalanan dan pemulihan ekonomi global.

Pada akhir 2023 dan sepanjang 2024, pertumbuhan jumlah wisman melambat tetapi tetap positif. Jumlah wisman meningkat menjadi 85.614 pada akhir 2023, dengan kenaikan sebesar 19,93%. Angka ini kembali naik pada 2024 menjadi 95.596, dengan peningkatan sebesar 11,66%. Meski kenaikan tidak secepat tahun sebelumnya, ini menunjukkan tren pemulihan yang stabil dan berkelanjutan dalam sektor pariwisata internasional. Faktor-faktor seperti promosi pariwisata, peningkatan kepercayaan

wisatawan terhadap keamanan perjalanan, dan normalisasi aktivitas global berkontribusi terhadap peningkatan ini. Namun, tantangan seperti ketidakpastian ekonomi dan potensi gangguan global tetap perlu diantisipasi untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor pariwisata. Selain itu perlu dikaji lebih lanjut profil wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Makassar, seperti negara asal, lama tinggal, dan tujuan wisata. Data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan strategi pemasaran pariwisata yang lebih tepat sasaran.

Lama kunjungan Wisata

Tabel II.308.
Lama Kunjungan Wisatawan Nusantara
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata lama kunjungan wisatawan Manca Negara dalam satu tahun	2-3 Hari	1,41 Hari	2,43 Hari	1,60 Hari	1,66 Hari

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2025

Data rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan kondisi global dan dinamika sektor pariwisata selama periode 2020–2024. Pada 2020, rata-rata lama kunjungan berkisar antara 2–3 hari. Ini masih dalam batas normal sebelum dampak pandemi dirasakan secara penuh. Namun, pada 2021, rata-rata lama kunjungan turun drastis menjadi hanya 1,41 hari. Penurunan ini mencerminkan pembatasan ketat perjalanan internasional serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang mengurangi durasi tinggal wisatawan. Banyak perjalanan yang bersifat mendesak atau dengan tujuan spesifik, tanpa adanya insentif untuk kunjungan yang lebih lama.

Setelah pembatasan mulai dilonggarkan pada 2022, rata-rata lama kunjungan kembali meningkat menjadi 2,43 hari. Ini menandakan awal pemulihan sektor pariwisata, di mana wisatawan mulai merasa nyaman untuk berlibur lebih lama, didukung oleh promosi pariwisata yang agresif. Namun, pada 2023 dan proyeksi 2024, rata-rata lama kunjungan kembali menurun sedikit menjadi 1,60 hari dan 1,66 hari. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi wisatawan yang mungkin lebih memilih perjalanan singkat tetapi lebih sering, didorong oleh perubahan pola kerja, seperti meningkatnya tren *work-from-anywhere*, atau tekanan ekonomi yang membatasi pengeluaran wisatawan. Langkah yang dapat ditempuh untuk mendukung peningkatan durasi kunjungan, pelaku industri pariwisata perlu menciptakan paket wisata yang menarik, mempromosikan destinasi alternatif, dan memastikan infrastruktur mendukung pengalaman yang lebih lama dan berkualitas.

PAD sektor pariwisata

Tabel II.309.
Persentase PAD Sektor pariwisata
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024*
1	PAD Sektor Pariwisata	205.968.247.154	226.367.754.265	349.314.225.780	401.324.776.615	411.488.337.921
2	Total PAD	868.604.339.302	932.577.669.719	1.358.227.689.591	1.568.234.972.336	1.568.234.972.337
3	Persentase PAD Sektor Pariwisata (1 / 2 x 100)	23,71%	24,27%	25,72%	25,59%	26,24%

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2025

Data di atas menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang terus meningkat dalam periode 2020–2024, meskipun di tengah tantangan pandemi dan pemulihan ekonomi global. Pada 2020, PAD sektor pariwisata tercatat sebesar Rp. 205,97 miliar, menyumbang 23,71% dari total PAD. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata menghadapi tekanan akibat pembatasan perjalanan, kontribusinya terhadap perekonomian daerah tetap signifikan. Pada 2021, kontribusi sektor pariwisata naik menjadi 24,27%, didukung oleh adaptasi sektor melalui digitalisasi, promosi kreatif, dan pembukaan kembali destinasi secara bertahap.

Tren positif ini berlanjut pada 2022 dengan kontribusi sebesar 25,72%, mencerminkan pemulihan kuat sektor pariwisata seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dan pelonggaran pembatasan. Pada 2023 dan 2024, kontribusi sektor pariwisata sedikit berfluktuasi namun tetap berada di kisaran 25–26%, dengan angka tertinggi pada 2024 sebesar 26,24%. Peningkatan ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang mendukung sektor pariwisata, misalnya menyelenggarakan beberapa event yang diselenggarakan di Kota Makassar antara lain F8 dan *Makassar Investment Forum* (MIF), serta *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) tingkat nasional dan internasional yang dilaksanakan setiap bulannya. Meski demikian, pertumbuhan ini menunjukkan perlunya strategi berkelanjutan, seperti diversifikasi destinasi dan peningkatan kualitas layanan, agar kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD terus meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan pada destinasi unggulan tertentu.

Gambar II.18.
Grafik Kontribusi Pariwisata terhadap PAD
Kota Makassar Tahun 2020 s/d 2024

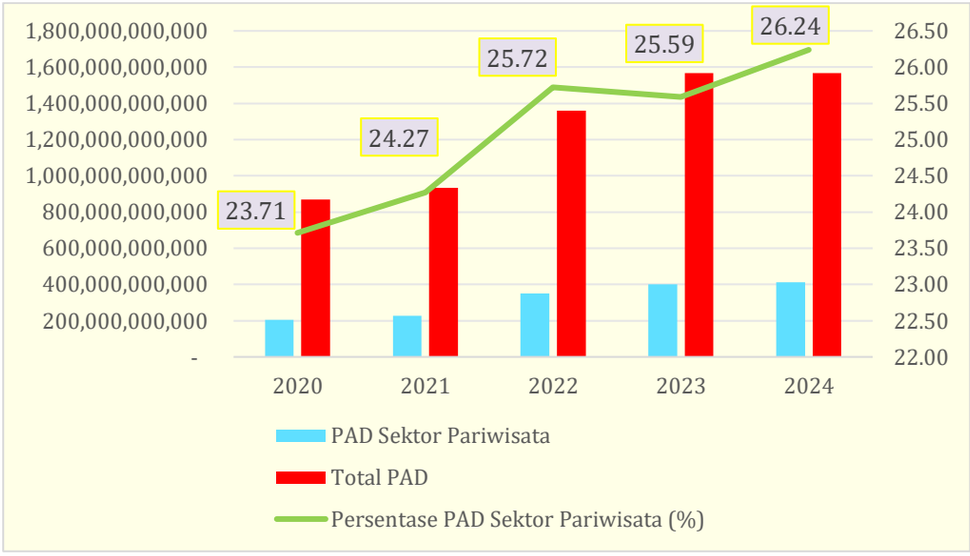

Destinasi Wisata

Tabel II.310.
Data Destinasi Wisata
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Destinasi Wisata	0	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2025

Pada tahun 2020, pengembangan destinasi wisata di Kampung Budaya Paropo tidak terealisasi sesuai apa yang telah ditargetkan karena gagal tender. Tahun 2021 pembenahan sarana pariwisata dilakukan di Pantai Losari. Sementara di tahun 2022, pembangunan destinasi berstandar nasional telah dilaksanakan di Lakkang berupa pembangunan dermaga wisata, plaza, T*ourism Information Centre* (TIC), dan *Boardwalk* (Titian Kayu). Tahun 2023 destinasi wisata yang dikembangkan yakni di Lantebung sebagai desa wisata mangrove, sementara di tahun 2024 lokasi destinasi wisata yang telah dikembangkan yakni di Pantai biru dan Layar Putih dengan membangun Gazebo dan pengadaan Jetski.

C. Pertanian

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Tabel II.311.
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap
PDRB Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	123.103.963.805	238.856.855.161	146,655,604,955	105,923,451,080	115,240,000,000

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah PDRB	178.332.992.000,77	178.332.992.000,77	208,935,000,000,79	226,900,000,000,00	226,900,000,000,00
3.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (1/2 x 100)	0,06	0,13	0,09	0,05	0,05

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

PDRB sektor pertanian sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, namun secara kumulatif mengalami penurunan. Peningkatan disebabkan oleh meningkatnya produktivitas pertanaman, sedangkan penurunan disebabkan oleh konversi lahan sawah menjadi penggunaan non sawah. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan PDRB pertanian mencapai Rp. 238.856.855.161,00 terutama disebabkan oleh kontribusi florikultura (tanaman hias) yang menjadi alternatif aktivitas warga kota di tengah pembatasan pandemi, dan semakin meningkat seiring dengan pelonggaran aktivitas ekonomi warga.

Kontribusi PDRB pertanian terhadap PDRB Kota Makassar sepanjang tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan, sebagai konsekuensi dari meningkatnya sektor jasa dan manufaktur, sehingga angka PDRB Kota terus meningkat. Hal ini menyebabkan angka kontribusi PDRB pertanian terhadap kota mengecil, meskipun PDRB pertanian secara umum meningkat. Hal ini juga dapat dipahami, karena olahan lanjutan pertanian sudah tidak lagi dihitung sebagai kontribusi sektor pertanian, melainkan bergeser menjadi kontribusi sektor jasa, terutama perhotelan, restoran dan industri yang sebagiannya berasal dari turunan produk pertanian. Meski demikian pada tahun 2021 dan 2022, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota meningkat, hal ini disebabkan masih lambannya pergerakan sektor lain akibat pembatasan aktivitas warga sebagai efek pandemi covid19, sehingga meningkatkan nilai kontribusi sektor pertanian. Pada tahun 2024 kontribusi sektor pertanian secara nominal meningkat, namun presentrase relatif sama.

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Tabel II.312.

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kota Makassar Tahun 2020-2024

N0	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija)	4,962	4,763	5,197	2,886	4,107
2.	Jumlah PDRB sektor pertanian / perkebunan	157,306	238,856	146,655	105,923	115,240
3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija)	3,15	1,99	3,54	2,57	3,56

N0	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
	terhadap PDRB (1/2 x 100)					

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi sub sektor palawija terhadap PDRB pertanian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sepanjang tahun 2020-2023. Fluktuasi ini disebabkan oleh pilihan komoditi petani setelah pertanaman padi, sebagian petani memilih padi sebagai tanaman, sebagian memilih palawija dan sebagian lainnya memilih tanaman hortikultura. Pada tahun 2020 kontribusi palawija adalah sebesar 3,15% berkurang menjadi 1,99% pada tahun 2021, pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,54%, kemudian berkurang di tahun 2023 menjadi 2,57% dan kembali meningkat menjadi 3,56% pada tahun 2024. Pada tahun 2021 kontribusi palawija mengalami penurunan menjadi 1,99%, hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas panen palawija, pada tahun 2021 sebesar 90,6 hektar dan juga karena meningkatnya kontribusi sektor non palawija pada sektor pertanian. Pada tahun 2022 kontribusi palawija mengalami peningkatan kontribusi, hal ini karena meningkatnya produksi jagung dan ubi kayu dibandingkan pada tahun 2021. Demikian pula peningkatan pada tahun 2024 disebabkan oleh peningkatan produksi jagung dan ubi kayu.

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Tabel II.313.
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024
1.	Jumlah produksi padi / bahan pangan utama local hasil kelompok petani (ton)	20.344	19.344	19.241	16.173	15.614
2.	Jumlah produksi padi / bahan pangan utama di daerah (ton)	20.364	19.350	19.241	16.173	15.614
3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (1 / 2 x 100)	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

Tabel tersebut menunjukkan kontribusi produksi kelompok petani terhadap produksi padi atau bahan pangan utama di Kota Makassar selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah produksi kelompok petani hampir identik dengan total produksi daerah setiap tahunnya, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh produksi padi di Kota Makassar berasal dari kelompok petani lokal. Meskipun volume produksi mengalami penurunan dari 20.344 ton pada tahun 2020 menjadi 15.614 ton pada tahun 2024, kontribusi kelompok petani terhadap produksi daerah tetap konsisten di angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan produksi terjadi secara merata di semua lapisan, tanpa perubahan peran kelompok petani dalam keseluruhan produksi.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Tabel II.314.
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi tanaman padi / bahan pangan utama local lainnya (ton)	20.344	19.344	17,266	16.751	12.907
2.	Luas areal tanaman padi / bahan pangan utama local lain nya (ha)	3.063	2.914,7	2,727	2.587	2.475
3.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar (1 / 2 x 100)	6.6	6,7	6,3	6,48	5,2

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

Dari tabel diatas, Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren penurunan baik dari sisi produksi maupun luas areal tanam. Produksi mengalami penurunan dari 20.344 ton pada tahun 2020 menjadi hanya 12.907 ton pada tahun 2024. Demikian pula, luas areal tanam menyusut dari 3.063 hektar menjadi 2.475 hektar dalam periode yang sama. Produktivitas per hektar juga menunjukkan penurunan, dari 6,6 ton per hektar pada tahun 2020 menjadi 5,2 ton per hektar pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap upaya peningkatan hasil produksi dan efisiensi penggunaan lahan pertanian di Kota Makassar.

Cakupan Bina Kelompok Petani

Tabel II.315.
Cakupan bina kelompok petani
Kota Makassar Tahun 2020-2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda	50	177	90	232	230
2.	Jumlah kelompok petani	80	288	228	382	390
3.	Cakupanbinakelompok petani (1 / 2 x 100)	62,50	77,63	40,35	60,37	58,97

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar, tahun 2025

Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan dari Pemda mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terdapat 50 kelompok yang dibina, jumlah ini meningkat tajam menjadi 177 pada tahun 2021, namun menurun kembali menjadi 90 kelompok pada tahun 2022. Kemudian, bantuan kembali meningkat menjadi 232 kelompok pada 2023 dan sedikit menurun menjadi 230 pada tahun 2024. Jumlah keseluruhan kelompok petani juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 80 kelompok pada 2020 menjadi 390 kelompok pada 2024. Persentase cakupan bina kelompok petani menunjukkan variasi yang serupa, dengan angka tertinggi pada tahun 2021 sebesar 77,63% dan terendah pada 2022 sebesar 40,35%. Data ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen Pemda dalam mendukung kelompok petani, meskipun dengan variasi dalam cakupannya setiap tahun.

D. Urusan Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan

Tabel II.316.
Ekspor bersih perdagangan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai ekspor	373.090.000	298.280.000	490.898.953	221 847.000	1.035.861.278
2.	Nilai Impor	750.860.000	551.280.000	719.716.169	108.520.000	1.001.160.670
3.	Eskpor bersih perdagangan (1 – 2)	-377.770.000	-253.000.000	-228.817.216	113.327.000	34.700.608

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Makassar, tahun 2025

Dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang perdagangan terkait dengan Pengembangan Ekspor dilaksanakan Program yang diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang Nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan, peningkatan citra produk ekspor; serta Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor. Program ini diarahkan pada peningkatan Nilai Ekspor yang dilihat dari pencapaian indikator nilai ekspor non migas.

Tabel menunjukkan Nilai Ekspor bersih perdagangan, pada tahun 2020 mengalami sebesar -377.770.000 us$, pada tahun Tahun 2021 Nilai Ekspor bersih perdagangan mengalami penurunan sebesar -253.000.000 us$ hal ini disebabkan nilai ekspor dan nilai impor tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020. Untuk Tahun 2022 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan terjadi penurunan dari Tahun 2021 sebesar -228.817.216 $ hal ini disebabkan Nilai ekspor dan Nilai Impor mengalami kenaikan dari Tahun 2021, Tahun 2023 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan sebesar 113.327.000 $ hal ini disebabkan Ekonomi di Kota Makassar tahun 2023 tumbuh sebesar 5.31 persen lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022. untuk Tahun 2024 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan sebesar 34.700.608 $ untuk Tahun 2024 nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor hal ini disebabkan pada sektor ekonomi pertumbuhan tercatat sebesar 5.26 persen hal ini menunkukkan stabilitas yang terus meningkat Impor , Adapun faktor yang mempengaruhi sehingga nilai ekspor bersih perdagangan meningkat adalah selera dari konsumen terhadap suatu barang yang diproduksi didalam negeri dan Harga Produk terjangkau dan Kualitas terjamin.

E. Perindustrian

Cakupan bina kelompok pengrajin

Tabel II.317.
Cakupan bina kelompok Pengrajin
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	350	350	500	400	150
2.	Jumlah kelompok pengrajin	1288	1288	1288	1288	1288

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin (1 / 2 x 100)	27,174	27.174	38.820	31.05	11.64

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Makassar, tahun 2025

Dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang perindustrian terkait dengan Perencanaan dan Pembangunan Industri yang diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri, juga melalui kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat. Program ini diarahkan pada Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah melalui peningkatan cakupan Bina Kelompok Pengrajin.

Tabel II menunjukkan cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2020 untuk jumlah kelompok pengrajin yang dibina sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 350 IKM, untuk tahun 2021 jumlah kelompok pengrajin yang dibina masih sama dengan tahun 2020 sebanyak 350 IKM untuk tahun 2022 Jumlah kelompok pengrajin yang dibina sebanyak 500 IKM terjadi penambahan sebanyak 150 IKM dari Tahun 2021 sedangkan Tahun 2023 jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan sebanyak 400 IKM. untuk IKM yang mendapatkan pembinaan sampai dengan Tahun 2023 sebesar 1600 IKM. Untuk Tahun 2024 jumlah kelompok pengrajin yang mendapat pembinaan sebesar 150 IKM. Jadi Total IKM yang mendapat pembinaan sampai dengan Tahun 2024 sebesar 1750 IKM. Hal ini disebabkan masih banyak pelaku usaha industry yang diikutkan pada kegiatan pelatihan dan tersedianya Anggaran untuk kegiatan tersebut.

2.1.3.4. LAYANAN PENUNJANG URUSAN

A. Fungsi Perencanaan

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tabel II.318.
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (Ada/ Tidak)	2024 (Ada/ Tidak)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir 2020-2024, dokumen RPJPD Kota Makassar telah ada/tersedia yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025, hal ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 264 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dipertegas kembali dalam Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah

dan berfungsi sebagai pedoman utama untuk pencapaian visi dan misi daerah, selain itu RPJPD juga berfungsi sebagai alat perencanaan strategis yang efektif, mendukung pembangunan yang terencana dan berkelanjutan di daerah.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Tabel II.319.
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (Ada/ Tidak)	2024 (Ada/ Tidak)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 belum ada/tersedia dokumen perencanaan RPJMD, hal ini diakibatkan adanya kekosongan kepala daerah definitif pada tahun 2020 yang disebabkan periodisasi Pemerintahan Kota Makassar berakhir pada tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan pada tahun 2020 tidak menghasilkan kepala daerah definitif tetapi memenangkan “Kota Kosong”. Untuk mengisi kekosongan kepimpinan Wali Kota Makassar maka Pemerintahan Kota Makassar pada tahun tersebut dilaksanakan oleh Penjabat Sementara Wali Kota sehingga dasar penetapan pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Makassar tahun 2020 berdasarkan Rencana Kerja (Renja) yang disusun menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Setelah Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar yang dilaksanakan kembali pada tahun 2021 dan terpilihnya Muhammad Ramdhan Pomanto sebagai Wali Kota Makassar yang ke 2 (dua) kalinya maka disusunlah dokumen RPJMD berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 sesuai dengan amanat Pasal 264 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Dearh serta Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Indikator "Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah" adalah salah satu indikator dari kinerja pembangunan daerah yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan, dimana indikator tersebut merujuk pada ukuran atau parameter yang memastikan bahwa dokumen perencanaan RKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, serta dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efesien dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun hasil evaluasi dari indikator tersebut dapat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.320.
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (Ada/ Tidak)	2024 (Ada/ Tidak)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kota Makassar telah memiliki dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sejak dari tahun 2020. Dokumen perencanaan RKPD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2020. Dokumen perencanaan RKPD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021. Dokumen perencanaan RKPD pada tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022, dokumen perencanaan RKPD tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 dan dokumen perencanaan RKPD tahun 2024 dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024.

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD Kota Makassar yang ditetapkan oleh Perkada sudah sesuai dengan amanat Pasal 264 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan dipertegas kembali dalam Pasal 12 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Indikator “Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)” adalah salah satu indikator dari kinerja pembangunan daerah yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan, dimana indikator tersebut merujuk pada ukuran atau parameter yang memastikan bahwa dokumen RTRW telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, serta dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan tata ruang wilayah yang efektif dan berkelanjutan. Adapun hasil evaluasi dari indikator tersebut dapat dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II.321.
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020 (Ada/ Tidak)	2021 (Ada/ Tidak)	2022 (Ada/ Tidak)	2023 (Ada/ Tidak)	2024 (Ada/ Tidak)
1.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, Pemerintah Kota Makassar telah memiliki dokumen RTRW yang telah ditapkan dengan Perda sejak dari tahun 2020. Dokumen RTRW Kota Makassar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 26 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” dan dipertegas kembali dalam Pasal 1 Ayat 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RTRWK/K, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran RTRWP, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Penetapan RTRW dengan Perda bertujuan untuk menciptakan perencanaan tata ruang yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dapat dilakukan secara terencana dan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator “Penjabaran Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah” adalah salah satu indikator dari kinerja pembangunan daerah yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan, dimana indikator tersebut merujuk pada ukuran atau parameter yang memastikan bahwa program-program yang direncanakan dalam RPJMD diimplementasikan secara efektif melalui RKPD. Konsistensi ini memastikan bahwa tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat

direalisasikan melalui kegiatan tahunan yang dirinci dalam RKPD. Adapun hasil evaluasi dari indikator tersebut dapat dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II.322.
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	388	251	244	244	247
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Tidak Ada	251	246	245	248
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Tidak Ada	konsisten	konsisten	konsisten	konsisten

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2020 Kota Makassar tidak memiliki dokumen RPJMD dikarenakan berakhirnya periodisasi Pemerintahan Kota Makassar yang dipimpin oleh Muhammad Ramdhan Pomanto pada tahun 2019 dan tidak adanya kepala daerah definitif terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah di tahun 2020 sehingga dasar penetapan pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Makassar tahun 2020 berdasarkan Rencana Kerja (Renja) yang disusun menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar yang dilaksanakan kembali pada tahun 2021 dan terpilihnya Muhammad Ramdhan Pomanto sebagai Wali Kota Makassar yang ke 2 (dua) kalinya maka disusunlah dokumen RPJMD berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2021 konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Makassar berada dalam kategori “konsisten” dimana ada sebanyak 251 program dalam RPJMD dan keseluruhannya dituangkan ke dalam RKPD Kota Makassar tahun 2021, Sedangkan pada tahun 2022 konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Makassar juga berada dalam kategori “konsisten”, dimana ada sebanyak 243 program RKPD pada tahun berkenan dari 245 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenan sehingga terdapat 2 program yang tidak dijabarkan ke dalam RKPD, adapun program tersebut adalah program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dan program penanggulangan bencana pertanian, untuk program penanggulangan bencana pertanian tidak dilaksanakan karena Kota Makassar tidak mengalami bencana pertanian yang mengharuskan atau mewajibkan melaksanakan program tersebut.

Untuk tahun 2023 konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Makassar juga berada dalam kategori “konsisten”, dimana ada sebanyak 247 program RKPD pada tahun berkenan dari 248 program RPJMD yang juga harus dilaksanakan pada tahun berkenan sehingga hanya tersisa 1 program RPJMD yang tidak dijabarkan ke dalam RKPD, adapun program tersebut adalah Program Pengelolaan Izin Lokasi yang tidak dijabarkan ke dalam RKPD disebabkan Program Pengelolaan Izin Lokasi telah berubah nomenklatur menjadi Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(KKPR) dan pelaksanaannya/pengajuan izinnya melalui OSS (*Online Single Submission*) yang dikelola langsung oleh Kementerian ATR, keterlibatan perangkat daerah terkait program tersebut yaitu dinas pertanahan hanya sebatas koordinasi kesesuaian RTRW. Sedangkan untuk tahun 2024 konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD juga masih tetap berada dalam kategori "konsisten", dimana sebanyak 247 program RKPD pada tahun berkenan yang dilaksanakan dari 248 program RPJMD, adapun program RPJMD yang tidak dijabarkan ke dalam RKPD adalah program yang sama tidak dijabarkan pada tahun 2023 yaitu program pengelolaan izin lokasi. Dari pengukuran indikator ini, Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat secara umum dapat memastikan bahwa program-program dan kegiatan dalam RKPD secara konsisten telah mendukung dan merealisasikan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta memastikan bahwa seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Indikator "Penjabaran Konsistensi Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)" adalah salah satu indikator dari kinerja pembangunan daerah yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan, dimana indikator tersebut merujuk pada ukuran atau parameter yang mengukur sejauh mana program-program yang telah direncanakan dalam RKPD diimplementasikan dalam APBD. Ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah selaras dan konsisten, sehingga efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran dapat terjamin. Adapun hasil evaluasi dari indikator tersebut dapat dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II.323.
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	388	251	244	247	247
2	Jumlah program APBD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	388	251	244	247	247
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (1/2 x 100)	konsisten	konsisten	konsisten	konsisten	konsisten

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, tahun 2024

Dapat dilihat data pada tabel diatas, Indikator penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD pada tahun 2020 berada dalam kategori "konsisten". Dan pada tahun 2021 penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Kota Makassar juga berada dalam kategori "konsisten", dimana ada sebanyak 244 program APBD pada tahun berkenan dan 244 program RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenan. Untuk tahun 2023 penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD

Kota Makassar juga tetap berada dalam kategori “konsisten”, dimana ada sebanyak 247 program APBD pada tahun berkenan dan 247 program RKPD yang juga harus dilaksanakan pada tahun berkenan. Sedangkan untuk tahun 2024 penjabaran program RKPD ke dalam APBD tetap dalam kategori “konsisten” dimana ada sebanyak 247 program RKPD yang dijabarkan keseluruhannya dalam APBD. Dengan mengukur indikator ini, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat lebih mudah mengidentifikasi perbedaan atau ketidaksesuaian antara rencana dan anggaran, serta membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan hasil program-program yang dilaksanakan.

Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Tabel II.324.
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kesesuaian Program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
2	dokumen RTRW	1	1	1	1	1
3	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Dapat dilihat data pada tabel diatas, kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kota Makassar sudah dalam kategori “sesuai” pada kondisi awal tahun 2020. Begitupula untuk tahun 2021 hingga tahun 2024, indikator kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kota Makassar telah “sesuai”, dimana semua program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan telah berpedoman dan memperhatikan rencana pola dan struktur ruang dalam RTRW Kota Makassar, Namun berdasarkan hasil review/peninjauan kembali terhadap RTRW pada tahun 2020, dari 3 aspek penilaian yaitu kualitas RTRW, kesesuaian dengan peraturan perundangan dan kesesuaian pemanfaatan ruang, diperoleh nilai untuk RTRW sebesar 62,60. Dengan mengukur indikator ini, Pemerintah Kota Makassar melalui perangkat daerah terkait perencanaan dan teknis tata ruang harus dapat memastikan bahwa rencana pembangunan yang diusulkan dan dilaksanakan dapat konsisten dengan tata ruang wilayah yang ada, serta dapat mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam pelaksanaannya.

B. Fungsi Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan

Tabel II.325.
Opini BPK terhadap laporan keuangan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK yang merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah dengan hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang "Tingkat Kewajaran Informasi" yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria ia yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. BPK dalam memberikan opini mendasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Aturan tersebut menganut basis *Cash towards Accrual*, dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dengan basis akrual, sedangkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan menggunakan basis kas. Terdapat empat jenis opini BPK yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*) (TMP).

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa ditahun 2020, opini BPK terhadap laporan keuangan daerah adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian), yang menunjukkan adanya beberapa catatan atau pengecualian dalam laporan keuangan tersebut. Pada tahun 2022, target kinerja adalah mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Realisasi pada tahun tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu opini WTP, dengan capaian 100%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Target kinerja yang ditetapkan adalah WTP, dan realisasi pada kedua tahun tersebut juga mencapai opini WTP dengan capaian 100%.

Persentase SILPA

Tabel II.326.
Persentase SILPA Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021*	2022*	2023*	2024
1.	Total SILPA	592.870.317.920,12	766.284.249.263	1,461,228,990,555.56	752.535.768.676,81	294.185.698.653,19
2	Total APBD	3.008.270.709.339,68	4.170.165.032.352	4,699,859,144,499.65	5.262.232.822.463,81	5.291.666.294.721,19
3	Persentase	1,97	18.38	31.09	14,30	5,56

	SILPA (1/2 x 10)					

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, tahun 2025

SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode. SILPA merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Berdasarkan tabel di atas, dinamika SILPA dan APBD menunjukkan pola yang menarik dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2020, SILPA tercatat sebesar Rp 592,87 miliar dengan total APBD Rp 3,008 triliun, menghasilkan persentase SILPA 1,97%. Hal ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang cukup baik di tahun tersebut.

Memasuki tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan dimana SILPA mencapai Rp 766,28 miliar dengan APBD sebesar Rp 4,17 triliun, menyebabkan persentase SILPA naik menjadi 18,38%. Peningkatan ini berlanjut ke tahun 2022 dengan SILPA mencapai Rp 1,46 triliun dari total APBD Rp 4,69 triliun, menghasilkan persentase tertinggi sebesar 31,09%. Namun, terjadi perbaikan di tahun 2023 dimana persentase SILPA turun menjadi 14,30% dengan nilai SILPA Rp 752,53 miliar dari total APBD Rp 5,26 triliun. Tren positif ini berlanjut ke tahun 2024 dengan persentase SILPA turun drastis menjadi 5,56%.

Tren penurunan SILPA ini merupakan indikator positif yang menunjukkan perbaikan dalam efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Persentase belanja pendidikan (20%)

Tabel II.327.
Persentase belanja Pendidikan (20%)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024
1.	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	860.797.592.650,00	932.156.576.001	1,008,033,061,227.00	1.022.848.085.370,00	1.305.072.854.819,00
2	Total APBD	3.008.270.709.339,68	4.170.165.032.352	4,699,859,144,499.65	5.262.232.822.463,81	5.291.666.294.721,19
3	Persentase belanja pendidikan (20%) (1/2 x 100)	28,61	22.35	21.45	19,44	24,66

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Tren alokasi anggaran pendidikan di Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, belanja pendidikan mencapai 28,61% dari total APBD, namun mengalami penurunan bertahap hingga tahun 2023, dimana persentasenya mencapai titik terendah sebesar 19,44%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pergeseran prioritas anggaran daerah, dampak pandemi COVID-19, serta efisiensi dalam pengelolaan dana

pendidikan.

Penurunan alokasi ini perlu menjadi perhatian, mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk sektor pendidikan. Penurunan ini berpotensi berdampak pada keterbatasan pembangunan infrastruktur sekolah, kesejahteraan tenaga pendidik, serta program peningkatan kualitas pendidikan. Namun, pada tahun 2024, persentase belanja pendidikan kembali meningkat menjadi 24,66%, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sektor pendidikan.

Peningkatan anggaran pendidikan di tahun 2024 diharapkan dapat berdampak positif terhadap mutu pendidikan di Kota Makassar. Menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan secara efektif dan tepat sasaran, baik untuk peningkatan fasilitas, kesejahteraan guru, maupun program pendidikan yang berdampak langsung bagi peserta didik. Selain itu, keberlanjutan peningkatan anggaran juga perlu dipastikan agar sektor pendidikan dapat terus berkembang dan memenuhi standar nasional. Dengan pengelolaan yang baik, peningkatan anggaran ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Persentase belanja kesehatan (10%)

Tabel II.328.
Persentase belanja kesehatan (10%)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	375.479.075.567,82	572.274.000.000,00	610.224.940.362,00	619.405.516.485,00	623.440.273.626,19
2	Total APBD	3.008.270.709.3369,68	4.227.834.375.000	4.701.694.460.499,00	5.262.232.822.463,81	5.291.666.294.721,19
3	Persentase belanja kesehatan (10%) (1 / 2 x 100)	12,48	13,54	12,98	11,77	11,78

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Alokasi anggaran untuk sektor kesehatan di Kota Makassar dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase belanja kesehatan terhadap total APBD tercatat sebesar 12,48%**,** kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 13,54%**.** Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan bertahap, yakni 12,98% pada 2022, 11,77% pada 2023, dan 11,78% pada 2024. Meskipun terdapat sedikit kenaikan dari tahun 2023 ke 2024, persentase ini masih menunjukkan tren yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021.

Fluktuasi belanja kesehatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan fiskal daerah, pergeseran prioritas anggaran akibat pandemi, serta efisiensi dalam pengelolaan dana kesehatan. Penurunan persentase anggaran kesehatan dapat berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada

masyarakat, termasuk ketersediaan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta penyediaan obat dan alat kesehatan. Oleh karena itu, meskipun nominal anggaran kesehatan meningkat dari tahun ke tahun, persentasenya terhadap total APBD menunjukkan kecenderungan menurun, yang dapat berimplikasi pada keterbatasan dalam pengembangan sektor kesehatan.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi dana untuk sektor kesehatan tetap memenuhi standar yang diperlukan guna menjamin pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah dianjurkan untuk mengalokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk sektor kesehatan. Dengan persentase anggaran kesehatan yang masih berada di atas batas minimal ini, pemerintah tetap memiliki ruang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana guna memperbaiki infrastruktur kesehatan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberlanjutan kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala agar sektor kesehatan di Kota Makassar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

Tabel II.329.
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Jumlah Belanja Langsung	1.521.641.679.152,68	2.577.174.624.998	3.034.653.090.301,00	3.601.267.218.687,00	5.018.405.623.441,19
1.2	Total APBD	3.008.270.709.339,68	4.227.834.375.000	4.701.694.460.499,00	5.262.232.822.463,81	5.291.666.294.721,19
1.3	Belanja langsung (1.1 / 1.2 x 100)	50,58	60,96	64,54	68,44	94,84
2.1	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.486.629.030.187,00	1.645.659.750.000	1.667.041.379.199,00	1.660.965.603.776,81	273.260.671.280,00
2.2	Total APBD	3.008.270.709.339,68	4.227.834.375.000	4.701.694.460.499,00	5.262.232.822.463,81	5.291.666.294.721,19
2.3	Belanja tidak langsung (2.1 / 2.2 x 100)	49,42	38,92	35,45	31,56	5,16

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Penetapan APBD

Tabel II.330.
Penetapan APBD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Penetapan APBD Kota Makassar dalam lima tahun terakhir selalu tepat waktu dimana kesepakatan antara eksekutif dan legislative terhadap RAPBD telah tercapai sebelum bulan Desember tahun berkenaan. Penetapan APBD tepat waktu tersebut sangat penting agar tahun pelaksanaan anggaran dapat berjalan diawal tahun terutama untuk kegiatan- kegiatan bersifat fisik dan memerlukan lelang.

C. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Gambaran umum Aparatur Sipil Negara Kota Makassar untuk persentase rata-rata lama pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat dijelaskan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun terakhir yang bervariatif, Jika dilihat dari tabel di bawah rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan jumlah jam yang cukup signifikan pada tahun 2024, hal ini disebabkan perubahan kebijakan penyelenggaraan diklat yang wajib memenuhi 20JP dalam setahun.

Tabel II.331.
Rata-rata lama pengawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan	0	25,43	22.6	41	48

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, tahun 2025

Hingga akhir tahun 2024 pelaksanaan PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional) sebanyak 2 orang, PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) sebanyak 38 orang, dan PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) sebanyak 80 orang. pelatihan kepemimpinan sudah kembali dilaksanakan dikarenakan ada beberapa pejabat eselom II, III, dan IV yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. selain diklat kepemimpinan, pada tahun 2024 BKPSDMD Kota Makassar juga sudah kembali mengadakan orientasi PPPK dengan jumlah peserta sebanyak 909 orang dan telah mengadakan bimbingan teknis serta pelatihan formal kepada 650 orang.

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Tabel II.332.
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (2.1 / 2.2 * 100)	0	4,97	3,18	6,95	11,20
2.1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0	525	360	820	1559
2.2	Jumlah total ASN	10.385	10.571	11.313	11.803	13.917

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pegembangan SDM Daerah, tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2020-2024 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami peningkatan. namun pada tahun 2020 terjadi pandemic covid sehingga tidak diadakan kegiatan Latsar CPNS dan Latpim. pada tahun 2021 kembali diadakan Latsar CPNS dan Latpim yang

sebelumnya tertunda pelaksanaannya pada tahun 2020 sehingga Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada Tahun 2021 sebanyak 4,97% pada tahun 2022 kembali diadakan Latsar CPNS dan Latpim dengan persentase 3,18%, pada tahun 2023 persentase meningkat menjadi 6,95% disebabkan meningkatnya jumlah pengiriman peserta diklat, serta pada tahun 2024 menjadi 11,20% dengan rincian orientasi : 909 orang; ESQ : 200 orang; budaya kerja : 150 orang; dan capacity building : 300 orang.

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Tabel II.333.
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kota Makassar 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	0	0	1425	1327	1447
2.	Jumlah total jabatan	1763	7977	1398	980	1128
3.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (1/2 x 100)	0	0	89,06	135,41	128,28

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2020 hingga 2021 kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan refocusing anggaran karena anggaran diklat tersebut dialihkan untuk penanganan covid-19. pada tahun 2022 BKPSDMD kembali mengadakan Diklat Struktural sebanyak 1245 peserta dan tahun 2023 menjadi 1327 serta pada tahun 2024 jumlah peserta sebanyak 1447 orang.

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Tabel II.334.
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi	42	42	42	42	43

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, tahun 2025

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah Kota Makassar pada tahun 2020 hingga 2023 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 42 orang. data tahun 2020 hingga 2023 Jumlah pimpinan tinggi Perangkat daerah ini telah menyesuaikan dengan struktur organisasi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Perda Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Makassar. pada tahun 2024 jumlah jabatan pimpinan tinggi sebanyak 43 orang dikarenakan Direktur RSUD Daya telah beralih dari jabatan fungsional menjadi jabatan Eselon II.b dengan rincian 31 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, dibandingkan dengan tahun 2023 laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan 10 orang.

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

hingga akhir tahun 2020 Jumlah jabatan administrasi yang ada pada struktur Pemerintah Kota Makassar sebanyak 1.718. Sampai akhir tahun 2021 Jumlah jabatan administrasi yang ada pada struktur Pemerintah Kota Makassar sebanyak 1.209 serta pada tahun 2022 terjadi penyetaraan jabatan dari jabatan pengawas ke jabatan fungsional di Lingkup Pemerintah Kota Makassar sehingga jumlah jabatan administrasi pada tahun 2022 sebanyak 1000. pada tahun 2023 jumlah jabatan administrasi kembali mengalami perampingan menjadi 938 jabatan, serta pada tahun 2024 berjumlah 1095. jumlah jabatan administrasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan karena adanya perubahan nomenklatur kepegawaian.

Tabel II.335.
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah jabatan administrasi	1.718	1.209	1000	938	1095

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, tahun 2025

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Tabel II.336.
Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pemangku jabatan fungsional	6.745	6.726	7.651	8.959	10.558

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, tahun 2025

Pemangku jabatan fungsional di Kota Makassar selama 5 tahun terakhir berfluktuasi cenderung meningkat. pada tahun 2020 jumlah pemangku jabatan fungsional sebanyak 6.745 orang, pada tahun 2021 sebanyak 6.726 orang. pada tahun 2022 sebanyak 7.651 dan diperkirakan akan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya melalui Promosi Jabatan fungsional dan Inpassing/penyesuaian Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Tahun 2018 s.d 2023 Kota Makassar. pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah pejabat fungsional dikarenakan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sehingga jumlah pemangku jabatan fungsional di Lingkup Pemerintah Kota Makassar menjadi sebanyak 8.959 orang. pada tahun 2024 jumlah pemangku jabatan fungsional di lingkup Pemerintah Kota Makassar sebanyak 10. 558. hal ini disebabkan oleh jumlah jabatan administrasi mengalami kenaikan pada tahun 2024 karena adanya perubahan nomenklatur kepegawaian.

D. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar adalah perangkat daerah yang terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar. Pada pasal 39, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar adalah :

A. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
B. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
C. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
D. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Fungsi kelitbangan pada Balitbangda Kota Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 adalah mengatur fungsi kelitbangan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) unsur pelaksanaan kegiatan yaitu: kelitbangan utama, kelitbangan pendukung, dan kegiatan penunjang.

Kegiatan Kelitbangan Utama adalah pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang mencakup penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, Kegiatan Pendukung dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Kelitbangan Utama, antara lain pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Tabel II.337.
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	5 judul penelitian	8 judul penelitian	5 judul penelitian	5 judul penelitian	4 judul penelitian
2.	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	14 judul penelitian	8 judul penelitian	5 judul penelitian	5 judul penelitian	4 judul penelitian
3.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	35,71%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh pemangku

kepentingan, meskipun setiap tahunnya *policy brief* atau rekomendasi hasil penelitian telah disampaikan kepada Perangkat Daerah. Jika dilihat dalam tabel II.339 di atas bahwa mulai tahun 2021 sampai denga di tahun 2024 persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 100%. hal ini mengindikasikan komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim riset dengan pihak Balitbangda dalam menyesuaikan perubahan *action plan* dan pentahapan kegiatan riset, kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi Balitbangda dan tim peneliti dalam berkomunikasi dan berbagi informasi terkait pelaksanaan penelitian, adanya komitmen antara Badan Penelitian dan Lembaga Penelitian di setiap Universitas dalam melaksanakan Penelitian sesuai dengan visi misi Wali Kota serta adanya dukungan lingkungan sekolah yang kompetetif terhadap kebijakan inovasi.

Adapun faktor pendukungnya yaitu :

1. Adanya Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan dengan memberikan ruang kepada tim peneliti untuk membuat analisa sesuai fakta dan data. Tidak dalam posisi mengarahkan ke hal-hal yang memberi legitimasi kebijakan. Independensi hasil merupakan rekomendasi merumuskan kebijakan, program, kegiatan berbasis riset.
2. Kerjasama tim yang terlibat dalam penelitian ataupun pengkajian terjalin dengan amat baik.
3. Penyusunan Laporan akhir yang dibuat bersamaan dengan selesainya kegiatan

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

Gambaran kondisi umum Kota Makassar untuk persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2023 terdapat 51 Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Pada tahun 2024 menjadi 52 Perangkat Daerah dimana untuk RSUD menjadi sasaran tersendiri yang terpisah dari Dinas Kesehatan terkait ekosistem layanan publik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.338.
Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perangkat daerah yang difasilitasi	51	51	51	51	52
2.	Jumlah Total Perangkat Daerah	51	51	51	51	52
3.	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah (1/2 x 100)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kota Makassar, tahun 2025

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Kegiatan Balitbangda lainnya yang telah dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir adalah melakukan fasilitasi terhadap penerapan Inovasi Daerah di masing-masing perangkat daerah. Pada tahun 2020, terdapat 214 inovasi daerah yang diusulkan dan diterapkan di masing-masing perangkat daerah. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 247 inovasi daerah yang diusulkan dan diterapkan di masing-masing perangkat daerah. Sedangkan pada tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat 232 inovasi daerah yang diusulkan dan diterapkan ke masing- masing perangkat daerah dan pada tahun 2024 sebanyak 207 inovasi daerah dan 184 jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.339.
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	214 inovasi daerah	247 inovasi daerah	105 inovasi daerah	116 inovasi daerah	184 inovasi daerah
2.	Jumlah inovasi yang diusulkan	214 inovasi daerah	247 inovasi daerah	232 inovasi daerah	232 inovasi daerah	207 inovasi daerah
3.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (1/2 x 100)	100%	100%	45%	50%	89%

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kota Makassar, tahun 2025

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Tabel II.340.
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	13 kegiatan kelitbangan	12 kegiatan kelitbangan	5 kegiatan kelitbangan	5 kegiatan kelitbangan	5 kegiatan kelitbangan
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	13 kegiatan kelitbangan	12 kegiatan kelitbangan	5 kegiatan kelitbangan	5 kegiatan kelitbangan	14 kegiatan kelitbangan
3.	Persentase implementasi rencana kelitbangan (1 /2 x 100)	100%	100%	100%	100%	36%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, tahun 2025

Sesuai dengan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa persentase implementasi rencana kelitbangan setiap tahunnya memberikan capaian 100%. Artinya bahwa jumlah kelitbangan dalam RKPD sama dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD. Pada Tahun 2024 terdapat 5 kegiatan kelitbangan yang sesuai anatara RKPD dan RPJMD hal tersebut dapat terjadi karena adanya faktor pendukung yaitu ingginya stakeholder yang mematuhi protokol kesehatan dalam mengikuti setiap kegiatan sehingga pelaksanaan

kegiatan dapat dilaksanakan secara tatap muka. Oleh karena itu, tingkat pencapaian kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dapat tercapai secara maksimal.

Fungsi Pendukung

E. Pengawasan

Persentase tindak lanjut temuan

Tabel II.341.
Persentase tindak lanjut temuan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	4.598	4.774	89	4.909	5432
2.	Jumlah total temuan	8.040	5.215	72	5.816	8390
3.	Persentase tindak lanjut temuan (1/2 x 100)	57,19	91,54	124,29	84,41	64,74

Sumber: Inspektorat Kota Makassar, tahun 2025

Rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bermanfaat untuk memperbaiki kinerja organisasi audit (perangkat daerah). Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas audit (perangkat daerah) dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Penertiban LHP merupakan akhir dari kegiatan pemeriksaan, padahal hasil atau manfaat penuh dari proses audit sendiri berupa perbaikan berdasarkan kesalahan yang telah diidentifikasikan baru akan dirasakan oleh audit jika ditemukan audit telah ditindaklanjuti. Pada 2024 terdapat 659 rekomendasi temuan dengan jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 5432 atau persentase tindaklanjut temuan menurun menjadi 47,34%. Persentase tindak lanjut temuan BPK-RI dan APIP dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel diatas.

Persentase pelanggaran pegawai

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dalam kurun waktu 2016-2020 peraturan yang telah diterbitkan pemerintah dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS. Pada Tahun 2020 jumlah ASN yang dikenai sanksi hanya sebanyak 32 orang. pada tahun 2021 jumlah ASN yang dikenai sanksi meningkat yaitu sebanyak 100 orang. hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugas, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan pelanggaran disiplin pegawai, dilakukan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih intensif.

Tabel II.342.

Persentase pelanggaran pegawai
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	32	100	13	14	12
2.	Jumlah total ASN	10.385	10.571	11.313	11.803	13.917
3.	Persentase pelanggaran pegawai (1 / 2 x 100)	0,31	0,95	0,11	0,12	0,09

Sumber: Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, tahun 2025

Jumlah temuan BPK

Tabel II.343.
Jumlah temuan BPK
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah temuan BPK	24	16	15	16	48

Sumber: Inspektorat Kota Makassar, tahun 2025

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan ragam rekomendasi yang berisi saran perbaikan atas berbagai temuan audit, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara. Temuan tersebut dapat berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, maupun penyimpangan administrasi. Tindak Lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 terdapat temuan sebanyak 16 temuan

F. Sekretariat Dewan

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Makassar dalam lima tahun terakhir telah bersedia.

Tabel II.344.

Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedia rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Makassar, tahun 2025

Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Untuk gambaran umum kondisi Kota Makassar Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) dalam lima tahun terakhir telah

terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel II.345.
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Makassar, tahun 2025

Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Tabel II.346.
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Makassar, tahun 2025

II.1.4.1. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

A. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk menunjukkan seberapa produktif angkatan kerja pada setiap sektor terhadap tingkat pertumbuhan dan nilai tambah sektor pada PDRB. Tingkat produktivitas Kota Makassar dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung meningkat, namun produktivitas sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mengalami fluktuasi.

Tabel II.347.
Produktivitas Total Daerah
Kota Makassar Tahun 2020 s.d. 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai tambah daerah sektor ke-i	120.905,75	126.312,83	133.132,60	140.197	147.989,20
2.	Jumlah angkatan kerja	696.158	725.529	729.635	582708	629.183
3.	Produktifitas total daerah	17,37	17,41	18,25	24,06	23,52

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2025

Produktivitas merupakan kemampuan input untuk menghasilkan output. Kalau kita pandang input dalam perekonomian adalah tenaga kerja dan barang modal, maka produktivitas adalah bagaimana kemampuan tenaga kerja dan barang modal tersebut menghasilkan barang dan jasa. Semakin tinggi nilai barang dan jasa yang dihasilkan per satuan input, semakin produktif input tersebut. Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah yang merupakan jumlah PDRB dibagi dengan jumlah angkatan kerja.

Selama selama periode tahun 2020 s.d 2024 Nilai tambah daerah sektor ke-i mengalami peningkatan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, menandakan pertumbuhan aktivitas ekonomi di sektor tersebut. Meskipun terjadi fluktuasi jumlah angkatan kerja, dengan penurunan signifikan pada tahun 2023, tren tersebut menunjukkan adanya dinamika yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun pada tahun 2024 angka tersebut kembali membaik. Sementara itu, produktivitas total daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun sedikit menurun di tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam jumlah tenaga kerja, kinerja ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah dan produktivitas terus menunjukkan perkembangan positif, yang menjadi indikator keberhasilan dalam mengelola pertumbuhan ekonomi dan efisiensi sumber daya di daerah tersebut.

B. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)

Keterbukaan ekonomi berjalan searah dengan ancaman gejolak nilai tukar dan defisit neraca transaksi berjalan. Menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),yaitu rasio perdagangan terhadap PDB (trade-to-GDP) atau sering disebut Trade Openness ratio, sering digunakan untuk mengukur pentingnya hubungan transaksi internasional terhadap transaksi domestik. Untuk Kota Makassar tapat kita lihat pada berikut.

Tabel II.348.
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ekspor dan impor	14.961,86	14.252,31	29.766,66	30.205,77	32.922,35

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	barang dan jasa					
2.	PDRB	120.905 ,75	126.312,83	133.132,6	140.197,9	147.989,2
3.	Rasio ekspor + Impor terhadap PDRB (Indikator keterbukaan ekonomi)	12.37%	11,28%	22,36%	21.55%	22.25%

Sumber: Dinas Perdagangan, tahun 2025

Perkembangan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Makassar pada periode 2020 – 2024 dapat dilihat dari Tabel di atas. Pada periode tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan atas Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB sebesar 1.09 % hal ini disebabkan terjadi kenaikan Nilai Impor atas PDRB Perdagangan . untuk tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan atas Rasio Ekspor + Impor terhadp PDRB sebesar 11.08% hal ini disebabkan nilai ekspor dan impor mengalami kenaikan. Untuk tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi penurunan atas Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB sebesar 0.81 % sedangakan untuk Tahun 2023 ke Tahun 2024 terjadi kenaikan atas Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB sebesar 0.7% hal ini disebabkan Nilai Ekspor dan Impor mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya hal ini menunjukkan pendapatan daerah yang meningkat.

C. Rasio ketergantungan

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan besarnya tingkat kelahiran yakni dengan melihat perubahan persentase penduduk usia muda. Indikator turunan lainnya yang dapat digambarkan dari komposisi kelompok umur adalah angka beban ketergantungan (ABK) yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas yang dianggap sebagai usia tidak produktif terhadap penduduk umur 15-64 tahun yang dianggap sebagai usia produktif.

Tabel II.349.
Rasio ketergantungan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

N0	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Penduduk usia <15th + usia>64	434.829	432.219	430.240	428891	436.980
2.	Penduduk usia 15-64	989.048	1.423.877	1.001.949	1007735	1.027.680
3.	Rasio ketergantungan	43,96	30,36	42,94	42,56	42.52

Sumber: Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Dari Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (depencency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Semakin tingginya

prosentase Dependency Ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Kondisi Rasio Ketergantungan Kota Makassar selama selama periode tahun 2020 s.d 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio ini sebesar 43,96%, kemudian menurun signifikan menjadi 30,36% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, rasio kembali meningkat menjadi 42,94%, dan tetap relatif stabil di angka 42,56% pada tahun 2023, serta sedikit menurun menjadi 42,52% di tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan adanya variasi dalam struktur usia penduduk, terutama terkait dengan proporsi penduduk usia produktif dan non-produktif selama periode tersebut.

II.2. Capaian Indikator Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat diukur dengan memuat hasil penyelenggaraan urusan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diukur melalui berberapa indicator kinerja diantaranya: Capaia Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

II.2.1. Capaian Indikator Makro

Indikator kinerja makro merupakan salah satu dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat indicator ekonomi dan indikator sosial budaya yang diantarnya meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2022, rata-rata capaian Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kota Makassar mencapai 104,71%, dengan 9 (Sembilan) indicator kinerja. Indikator kinerja makro yang tertinggi capaiannya adalah inflasi, dimana realisasi tahun 2022 inflasi Kota Makassar, dari target pertumbuhan 2,10%, meningkat 3,71%, menjadi 5,81% atau dengan capaian 276,66%. Sedangkan yang terendah adalah capaian indikator tingkat pengangguran terbuka, dimana terget yang di tetapkan adalah 12,50%, menurun 0,68% menjadi menjadi 11,82%, atau dengan capaian 94,56%.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja dari Permendagri Nomo 86 tahun 2017, maka realisasi kinerja indikator kinerja makro Pemerintah Kota Makassar secara keseluruhan masih berada pada kategori Sangat Tinggi (interval nilai 91% ≤ 100%), dengan rata-rata nilai realisasi kinerja sebesar 102,13%. Adapun capaian indikator kinerja makro Kota Makassar tahun 2023, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.350.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Makro
Kota Makassar Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Persentase Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	83.67	85.23	101.86
2	Penduduk Miskin	%	4.2	4.97	118.33
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11	9.71	88.27
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.8	5.36	92.41
5	PDRB Per Kapita	Juta	137.3	165.95	120.87
6	PDRB ADHB	Ribu	227.8	243.06	106.70
7	PDRB ADHK	Triliun	143.8	147.99	102.91
8	Inflasi	%	2	1.19	59.50
9	Gini Ratio	Indeks	0.39	0.372	95.38
	Rata-Rata Capaian				98.47

Sumber: Bappeda Kota Makassar (Data diolah), Tahun 2025

II.2.2. Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemenuhan pelayanan dasar merupakan prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018. SPM merupakan salah satu dari prioritas pembangunan Pemerintahan Kota Makassar yang memuat indicator 6 (enam) indikator pelayanan dasar yang meliputi Bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Trantibunlinmas dan Sosial. Pada tahun 2021. rata-rata capaian Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kota Makassar mencapai 90,27%, dari 6 sub bidang pelayanan dasar, dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Indikator kinerja SPM yang terendah adalah bidang Kesehatan, pelayanan Kesehatan orang dengan ganguan jiwa berat, dengan indikator Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan, dimana terget yang di tetapkan adalah 100%, hanya terealisai 60,26% (kategori kinerja Rendah).

Berdasarakan skala nilai peringkat kinerja dari Permendagri Nomo 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka realisasi kinerja SPM Pemerintah Kota Makassar secara keseluruhan masih berada pada kategori Sangat Tinggi (interval nilai 91% ≤ 100%), dengan rata-rata nilai realisasi kinerja sebesar 90,27%. Capaian kinerja indikator SPM Kota Makassar tahun 2024, tercantum pada table berikut:

Tabel II.351.
Capaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kota Makassar Tahun 2024

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator	Satuan	target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
Bidang Urusan Pendidikan						
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	100	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUDD)	%	100	100	100
Bidang Urusan Kesehatan						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	%	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	97,89	97,89
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	101,43	101,43
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	85,40	85,40
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	94,59	94,59
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	86,58	86,58

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator	Satuan	target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	118,72	118,72
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	122,07	122,07
11	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	118.53	118.53
12	pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Imunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
Bidang Urusan Pekerjaan Umum						
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	73,75	73,75
Bidang Urusan Perumahan						
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator	Satuan	target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100	94,93	94,93
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
5	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	percentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
Bidang Urusan Sosial						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
2	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	100

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator	Satuan	target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
5	perlindungan dan jaminan sosial pad saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100
	Rata-Rata Capaian					90,27

Sumber: Bappeda Kota Makassar (Data diolah), Tahun 2024

II.2.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. IKK meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Tabel II.352.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kota Makassar Tahun 2024

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB				
	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Triliun	227,858	243,06	>
	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Triliun	143,879	147,98	>
2	Laju Inflasi	%	2,00	1,19	<
3	PDRB Per Kapita	Rp (Juta)	137,3	165,95	>
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.80	5,56	<
5	Indeks Gini	%	0,390	0,372	<
6	Presentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	95,58	95,03	<
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	83,67	85,23	>
8	Angka melek huruf	%	99,06	99,22	>
9	Angka rata-rata lama sekolah	%	12,66	11,57	<
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,000 (PPP) per kapita per hari	%	4,42	4,97	>
11	Angka usia harapan hidup	%	72,85	75,33	>
12	Persentase balita gizi buruk	%	1,43	12,07	>
13	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,51		
14	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	=
15	Angka partisipasi angkatan kerja	%	58,97	62,04	>

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja (usia 15-65 thn)	%	64,41	67,81	>
17	Tingkat pengangguran terbuka	%	11	9,71	<
18	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	87,01	90,29	>
19	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	22,30	Belum dapat dihitung	-
20	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Rasio	87,01	90,29	>
21	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.	%	33,45	40,30	>
22	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	27,57	6,08	<
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,25	-	-
24	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	38,28		
25	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	=
26	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85	89,73	>
29	Penguatan cadangan pangan	Ton	5	20	>
30	Penanganan daerah rawan pangan	%	72,42	11,76	<
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	0,063	0,05	<
32	Kontribusi sector pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	4,36	3,56	<
33	Produksi sektor pertanian	Ton	34.304	17.166	<
34	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	=
35	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	1,32		
36	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,56		
37	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	15,52		
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. (Juta)	18,58		
2	Nilai Tukar Petani	%	100,97		
3	Persentase Pengeluaran konsumsi non pangan per Kapita	%	61		
4	Produktivitas total daerah	Rp. (Juta)	202,22		

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rp. (Juta)	82,91 85,84		
6	Rasio Pinjaman terhadap simpanan di bank umum	%	1,172		
7	Angka kriminalitas yang tertangani	%	0,0004		
8	Rasio ketergantungan	%	39,17		
III	ASPEK PELAYANAN UMUM				
III.1	Layanan Urusan Wajib Dasar				
1.	Pendidikan				
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	52,87	39,49	<
1.2	Angka partisipasi kasar	%	SD : 100	SD : 105,51	>
			SMP : 98,29	SMP : 90,85	<
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) (PAUD)	%	36,93	98,06	>
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85,50	79,51	<
1.6	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	%	12,30	13,09	>
1.7	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	%	23,39	19,85	<
1.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,76	1025,5	>
1.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	95,37	99.94	>
1.10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,08	1,37	>
1.11.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,31	4,83	>
1.12.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	=
1.13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	=
1.14.	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,08	104,95	>
1.15.	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	%	100	104,62	>
1.16	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan	%	94,78	97.05	>
1.17.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	94,56	97.81	>
1.18	Rasio ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	/10.000 pddk	38,31	37.89	>
1.19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	/10.0000 murid	566,80	509,84	<

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
1.20	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100	92,56	<
1.21	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100	100	=
1.22.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	98,79	99,17	>
1.23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	97,21	99,16	>
2.	Kesehatan				
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000KH	1,39	7,3	>
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000AKB	999,09	992,7	<
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000KH	1,25	3,43	>
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000KH	0,925	3,43	>
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100.000KH	35,40	76,67	>
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	/1000 B	7,56	9,9	>
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/1000 pddk	0,253	0,16	<
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 pddk	0,033	0,035	>
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 pddk	0,48	2,23	>
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 pddk	1,35	5,55	>
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	97,55	101,38	>
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	94,07	100	>
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	=
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	=
2.15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	99,53	100,96	>
2.16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	0	0,0026	>
2.17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	11,38	7,41	<

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
2.18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	28,14	25,91	<
2.19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,20	449,44	>
2.20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,01	15,10	>
2.21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	=
2.22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	34,024	85,83	>
2.23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	85,83	<
2.24	Penderita diare yang ditanganI	%	100	100	=
2.25	Angka kejadian Malaria	/100.000 pddk	6,65	0,14	<
2.26	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,038	0,07	>
2.27	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	120,405	59,93	<
2.28	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	=
2.29	Cakupan puskesmas	%	319,47	313,33	<
2.30	Cakupan pembantu puskesmas	%	22,199	22,88	>
2.31	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	94,18	100	>
2.32	Cakupan pelayanan nifas	%	87,284	100	>
2.33	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	85,724	84,66	<
2.34	Cakupan pelayanan anak balita	%	78,22	100	>
2.35	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	=
2.36	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingka	%	100	100	=
2.37	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	84,99	59,93	<
2.38	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	=

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
2.39	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	=
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1.	Pekerjaan Umum				
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	98,89	98,88	<
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	km/Jiwa	1 : 997	1 : 918	<
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	92,72	95,51	>
3.1.5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	40,37	40,35	<
3.1.7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	90,81	87,73	<
3.1.8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	5,59	17,97	>
3.1.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	88,06	89,95	>
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	19,86	52,05	>
3.1.11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	2,27	0	<
3.1.12.	Persentase penduduk berakses air minum	%	73,38	74,34	>
3.1.13.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	73,38	75,87	>
3.1.14.	Persentase areal kawasan kumuh	%	1,99	1,70	<
3.1.15.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	89,96	3,89	<
3.1.16.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	/1000 pddk	151,48	119,00	<
3.1.17.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	/1000 pddk	1,06	1,14	>
3.2.Penataan Ruang					
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	7,031	6,42	<

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
3.2.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	0,021	0,009	<
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
4.1.	Rasio rumah layak huni	Unit/Jiwa	1:6,34	1:5,25	<
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	100	99,89	<
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	100	99,89	<
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	1,78	1,70	<
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	33,66	6,92	>
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	0,84	7,37	<
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	21,21	1,96	<
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan	%	90,57	100	>
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	34,08	0,0038	<
5.4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	=
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	87,64	100	>
6	Sosial				
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	=
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	=
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	=
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	=
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	100	100	=

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	=
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	=
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	99,99	<
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	=
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1.	Tenaga Kerja				
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	3,82	4,21	>
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	63,41	62,62	<
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	59,20	59,04	<
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	31,72	45,21	>
1.5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Jumlah	0	0	=
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	34,26	25,01	<
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	46,04	23,47	<
1.8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	28,78	22,15	<
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	63,79	67,58	>
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	31	26	<
2.3.	Rasio KDRT	%	3,40	0,01	<

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
2.4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	100	100	=
2.5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	=
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	=
2.7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	17,94	47,68	>
2.8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	96,79	100	>
2.9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	86,96	80,13	<
2.10.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	=
2.11.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	=
3.	Pangan				
3.1.	Ketersediaan pangan utama	%	90	88,64	<
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/kap/hr	E: 2.600	E; 2.716	>
			P: 126	P: 67	<
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	99,36	100	>
4.	Pertanahan				
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	4,49	92,49	>
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	=
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	%	6,80	0	<

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
5.	Lingkungan Hidup				
5.26.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	=
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	=
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Dok	Ada	Ada	=
5.29.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Mutu Air	ada	Ada (51,74)	=
5.30.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	%	ada	ada (79,44)	=
5.31.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	%	21,29	26,97	>
5.32.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	30,52	100	>
5.33.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Tersedia	ada	Tidak Ada	<
5.34.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tersedia	ada	Tidak Ada	<
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Tersedia	tidak ada	Tidak Ada	=
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Tersedia	tidak ada	Tidak Ada	=
5.37.	Penetapan hak MHA	Tersedia	ada	Tidak Ada	<
5.38.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Tersedia	ada	Tidak Ada	<
5.39.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Tersedia	ada	Tidak Ada	<
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Tersedia	ada	Tidak Ada	<
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jenis	ada	Tidak Ada	<
5.42.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah	%	100	100	=

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.				
5.43.	Timbunan sampah yang ditangani	%	71,86	83,55	>
5.44.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	27	3,89	<
5.45.	Persentase cakupan area pelayanan	%	100	95,58	<
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	70,34	87,44	>
5.47.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai Adipura	71,62	72,80	>
5.48.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	99,45	58,90	<
5.49.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	99,45	58,90	<
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	100	165	>
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	0,99	<
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	38,27	54	>
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Database	ada	ada	=
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Database	sudah	sudah	=
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	95,21	<
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	95,21	<
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	96,21	100	>
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	100	1	<
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	51,58	123,75	>
7.4.	Persentase LSM aktif	%	100	100	=
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	2,12	0	<
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100	100	=
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	=

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100	0,65	<
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100	0,65	<
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,21	0,26	<
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,10	2,02	<
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	54,90	64,70	>
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	41,17	66,67	>
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Peraturan	1	1	=
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	22	34	>
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	13	8	<
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2	1,32	<
8.9.	Ratio Akseptor KB	%	68,30	68,46	>
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	68,30	68,46	>
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	29,53	23,80	<
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,54	23,80	>

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,30	9,06	>
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	33,44	27,75	<
8.15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	48,51	46,06	<
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	76,82	44,16	<
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	72,80	23,55	<
8.18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	63,47	11,10	<
8.19.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	833,33	866,66	>
8.20.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	=
8.21.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	38,39	22,76	<
8.22.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	104,57	>
8.23.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	39,43	727,23	>
8.24.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	97,36	76,43	<
8.25.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	=
8.26.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan	%	100	100	=

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	keluarga melalui 8 fungsi keluarga				
8.27.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	70,19	46,04	<
8.28.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	21	21	=
8.29.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,712	0,73	>
9.	Perhubungan				
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	6.955.970	9.845.376	>
9.2.	Rasio ijin trayek	Unit / jiwa	1 : 850	0,0001	<
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	2.860	27.172	>
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	5	5	=
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	1 : 2.125	725/8613000	>
9.6.	Pemasangan Rambu-rambu	%	3,45	0	<
9.7.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km/unit	1 : 773	827/1217413	
9.8.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	18.505.000	8.613.000	<
9.9.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	8.673.137	9.182.226	>
10	Komunikasi dan Informatika				
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	128,68	133	>
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100	100	=
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan menengah				
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	76,19	53,59	<
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	99,95	<
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	%	43,51	51,72	>
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	77,09	98,99	>
12.	Penanaman Modal				
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	PMDN:1.455 PMA: 499	PMDN : 7.394	>

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				PMA : 772	
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		PMDN: 1.900.000.000.000	PMDN : 5.238.910.600.000.000	>
		Rp.	PMA: 75.000.00.000	PMA: 44.110.690.00	<
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	%	4,89	0,82	<
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	56,69	150,40	>
13	Kepemudaan dan Olah Raga				
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	92	<
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	17	30,19	<
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	57	68	>
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	7,75	21,32	>
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	18,41	7,33	<
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	19	19	=
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	25	11	<
14	Statistik				
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Data terintegrasi	Ada	Ada	=
14.2.	Buku ”kabupaten dalam angka”	Buku	Ada	Ada	=
14.3.	Buku ”PDRB”	Buku	Ada	Ada	=
15.	Persandian				
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	100	100	=
16	Kebudayaan				
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	4	3	<
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	161	20	<
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	Diinventarisasi 55	Diinventarisasi 60	>
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	55	0	<
17.	Perpustakaan				
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Pengunjung /Penduduk	0,409	0,483	>

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah Judul/Jumlah Eksamplar	#DIV/0! atau ∞	0,428	<
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	‰ (Permil)	0,117	0,385	>
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Pengunjung /Tahun (12 Bulan)	46.666,67	55.082,83	>
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Koleksi	29.212	116.111	>
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	1,39	0,42	<
18.	Kearsipan				
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80.39	80.39	=
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	10	10	=
	Layanan Urusan Pilihan				
1.	Pariwisata				
1.1.	Kunjungan wisata	%	51,84	119,62	>
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	3,25	1,6	<
1.3.	PAD sektor pariwisata	%	24,48	29,11	>
2.	Pertanian				
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	0,081	0,07	<
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	11,07	1,87	<
2.3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	99,38	100	>
2.4.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	57,55	6,48	<
5.	Perdagangan				
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp	1.386.945	1.133.27	<
6.	Perindustrian				
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	32,22	31,05	<
8.	Perikanan				
8.1.	Produksi perikanan	%	97,06	103,3	>
8.2.	Konsumsi ikan	Ton	100	-	-
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	&	100	63,27	<

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	18,45	14,6	<
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	100	50	<
	Penunjang Urusan				
1.	Perencanaan Pembangunan				
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	=
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	=
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	=
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	=
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	Konsisten	=
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	Konsisten	=
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	Sesuai	Sesuai	=
2.	Keuangan				
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	=
2.2.	Persentase SILPA	%	3,05	14,30	>
2.3.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	19,44	<
2.4.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	11,77	>
2.5.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
3.	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan				
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	20 JPL	48	>
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,55	9,08	>
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	97	128	>

No	ASPEK / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	42	43	>
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	1.095	1.095	=
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	6.850	10.558	>
3.7	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0	0,09	<
4.	Penelitian dan Pengembangan				
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	=
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	43,97	<
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100	50	<
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	43,97	<
5.	Pengawasan				
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan(Tahun 2022 indikator jumlah temuan BPK digabung dengan jumlah Temuan APIP)	%	57,87	84,41	>
5.2	Jumlah temuan BPK	Jumlah	22	16	<
6.	Sekretariat Dewan				
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	Ada	Ada	=
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada	Ada	=
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	Ada	Ada	=

Sumber: Bappeda Kota Makassar (Data diolah), Tahun 2025

II.3. Evaluasi

II.3.1. Evaluasi Capaian Idikator Pembangunan

A. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 322 indikator yang diukur, terdapat 117 Indikator yang telah melampui target yang telah ditetapkan, 72 Indikator yang sesuai target, 118 Indikator yang belum mencapai target, serta 15 Indikator lainnya masih belum ada interpretasi.

B.Evaluasi SPM

Berdasarkan pencapaian target indikator berdasarkan bidang urusan dapat dijelaskan bahwa :

a.Bidang Urusan Pendidikan.

Jenis pelayanan dasar penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dimana jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan terdiri dari tiga pelayanan dasar yaitu Pelayanan Pendidikan Dasar, Pelayanan Pendidikan Kesetaraan dan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini. Evaluasi hasil capaian target SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Makassar tahun 2024 yaitu pada tabel II.357 berikut.

Tabel II.353.
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2024
				Penerima Layanan Dasar (80%)		Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
1.	Pendidikan Dasar	100%	100%	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS)	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20%	**100%**
2.	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	JumlahWarga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikandasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20%	**100%**
3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20%	**100%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kota Makassar Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pencapaian SPM			
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/ MTs)	214.369	214.369	0	100%
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	7.419	7.419	0	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	35.026	35.026	0	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar, Tahun 2025

Realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar yang terdiri dari 3 indikator dengan target penerima layanan dasar 80% dan mutu layanan dasar 20%.

1. **Pendidikan Dasar,** Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar/Menengah (SD/MI, SMP/MTs), dimana target 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi persentase pencapaian penerima layanan dasar sebesar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani 214.369 dan jumlah yang terlayani **214.369** dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.
2. **Pendidikan Kesetaraan**, Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, dimana target 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi persentase pencapaian penerima layanan dasar sebesar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani **7.419**

dan jumlah yang terlayani sebesar 7.419 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.

3. **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**, Jumlah Warga Negara Usia 5-6 TAHUN yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD dimana target 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi persentase pencapaian penerima layanan dasar sebesar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani 35.026 dan jumlah total yang terlayani **35.026** dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Bidang Urusan Pendidikan yang berkaitan dengan pelayanan dasar SPM sebesar Rp.494.405.998.598,- dengan realisasi Rp.292.778.047.048 atau sebesar 59,22%. Terdapat sebesar 40,78% anggaran yang tidak terserap, dimana disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Adanya proses lelang pengadaan barang/jasa yang lambat di mulai pada akhir bulan April tahun 2024, serta pelaksanaan lelang yang gagal atau tidak terlaksana dengan baik
- Kemampuan SDM yang masih kurang pengetahuan dalam memahami proses pengelolaan anggaran keuangan dan proses lelang barang jasa
- Adanya perubahan anggaran

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penerapan SPM urusan Bidang Pendidikan antara lain adalah

- Pemerintah daerah dalam penerapan SPM melakukan pengintegrasian indikator SPM kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta di perlukan adanya pemahaman yang sama dari perangkat daerah dan TAPD terhadap urgensi penerapan SPM
- Perlunya monitoring secara berkala oleh masing-masing kementerian pembina dan tim penerapan SPM Prov/kab/kota PD pengampu SPM karena fungsi Monev sangat penting dalam upaya melakukan perbaikan berkelanjutan

b. Bidang Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan terdiri dari 12 jenis pelayanan dasar Bidang urusan Kesehatan. Evaluasi hasil capaian target SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2024 yaitu pada tabel II.358 berikut

Tabel II.354.
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2024
				Penerima Layanan Dasar (80%)		Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan	80%	Jumlah barang dan/atau jasa,	20%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2024
				Penerima Layanan Dasar (80%)	Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
				pelayanan kesehatan		sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan		
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	17.89%	97.89%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	20%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	100%	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	20%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	20.17%	101.43%
6	Pelayanan kesehatan	100%	100%	Jumlah Warga Negara usia produktif yang	80%	Jumlah barang	19.10%	85.40%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2024
				Penerima Layanan Dasar (80%)	Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
	pada usia produktif			mendapatkan pelayanan kesehatan		dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	Jumlah Warga Negara usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	19.70%	94.59%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	100%	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi usia15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	19.73%	86.58%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	100%	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	21.10%	118.72%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	21.16%	122.07%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%	100%	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	80%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya	20,47%	118.53%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2024
				Penerima Layanan Dasar (80%)		Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
				kesehatan		manusia dan tata cara pemenuhan		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici en cy Virus)	100%	100%	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuhmanusia (Human Immunodeficienc y Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	20%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2024

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar terdiri dari 12 indikator dengan target penerima layanan dasar sebesar 80% dan mutu layanan dasar sebesar 20%.

1. **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**, Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani 27.254 ibu hamil dan jumlah yang terlayani 27.254 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.
2. **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**, Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah ibu bersalin yang harus dilayani 25.145 dan jumlah Ibu bersalin yang terlayani sebesar 25.145 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 17,89%.
3. **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**, Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah bayi baru lahir yang harus dilayani 25.166 dan jumlah total yang terlayani 25.166 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.
4. **Pelayanan Kesehatan Balita**, Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah balita yang harus dilayani 94.804 dan jumlah total yang terlayani 94.804 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.
5. **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**, Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan, dimana target

tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 101,43% yang terdiri dari realisasi persentase penerima layanan dasar 81,26% dengan pencapaian jumlah usia pendidikan dasar yang harus dilayani 194.719 dan jumlah total yang terlayani 197.768 dan terdapat selisih 3.049 yang terlayani dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20,17%.

6. **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**, Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 85,40% yang terdiri dari realisasi persentase penerima layanan dasar 66,30% dengan pencapaian jumlah usia produktif yang harus dilayani 969.234 dan jumlah total yang terlayani 803.272 dan terdapat selisih 165.962 usia produktif yang belum terlayani dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 19,10%.
7. **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**, Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 94,59% yang terdiri dari realisasi persentase penerima layanan dasar 74,89% dengan pencapaian jumlah usia lanjut yang harus dilayani 138.998 dan jumlah total yang terlayani 130.113 dan terdapat selisih 8.885 usia lanjut yang belum terlayani dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 19,70%.
8. **Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi,** Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 86,58% yang terdiri dari realisasi persentase penerima layanan dasar 66,85% dengan pencapaian jumlah penderita hipertensi yang harus dilayani 327.224 dan jumlah total yang terlayani 273.452 dan terdapat selisih 53.772 penderita hipertensi dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 19,73%.
9. **Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus**, Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 118,72% yang terdiri dari realisasi persentase penerima layanan dasar 97,62% dengan pencapaian jumlah penderita diabetes mellitus yang harus dilayani 26.710 dan jumlah total yang terlayani 32.595 terdapat selisih sebesar 5.885 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 21,10%.
10. **Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**, Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatannya, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 122,07% yang terdiri dari realisasi persentase penerima layanan dasar 100,91% dengan pencapaian jumlah ODGJ yang harus dilayani 3.374 dan jumlah total yang terlayani 4.256 terdapat selisih sebesar 882 ODGJ dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 21,16%.
11. **Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**, Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 118,53% yang terdiri dari realisasi persentase penerima layanan dasar 98,06% dengan pencapaian jumlah orang terduga tuberkulosis yang harus dilayani 43.119 dan

jumlah total yang terlayani 52.852 terdapat selisih sebesar 9.733 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20,47%.

12. **Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**, Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi persentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani 42.475 dan jumlah total yang terlayani 42.475 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Bidang Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar SPM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp.174.347.202.276,- dengan realisasi Rp.162.788.293.312,- atau sebesar 93,37%.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.434.135.024.150,19,- dengan realisasi Rp.361.906.302.616,- atau sebesar 83,36%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.2.464.376.100,- dengan realisasi Rp.1.078.234.690,- atau sebesar 43,75%.
4. Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan anggaran sebesar Rp.397.582.300,- dengan realisasi Rp.295.784.240,- atau sebesar 74,40%.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.12.096.088.800,- dengan realisasi Rp.10.491.609.364,- atau sebesar 86,74%.

a. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Terdapat dua jenis layanan dasar urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Layanan dasar Urusan Pekerjaan Umum yang dimaksud meliputi Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Dari kedua jenis layanan tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan target pencapaian SPM Tahun 2023, masing-masing sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari ditargetkan pencapaian 100% dengan jumlah warga yang harus dilayani ditargetkan memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebanyak 7.640 orang. Hingga akhir tahun 2023 terelaisasi sebesar
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik ditargetkan pencapaian 100% dengan jumlah warga yang harus dilayani ditargetkan memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebanyak 8.875 orang.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan kedua jenis layanan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 sebesar Rp. 22.984.938.145,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 dan DAK Terintegrasi. Total pencapaian SPM sebesar 100% dengan kategori indeks pencapaian SPM *Tuntas Paripurna*, disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.355.
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2024
				Penerima Layanan Dasar (80%)		Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	**100%**	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80%	Jumlah barang dan jasa	20%	**100%**
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	**100%**	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80%	Jumlah barang dan jasa	20%	**73,75%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2024

Hasil pencapaian penerima layanan dasar dan pencapaian mutu minimal layanan dasar disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**80%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	Orang	7.640	7.640	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU		**Jumlah Mutu yang**	**Jumlah Mutu yang terlayani**	**Jumlah Mutu yang**	**20%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian Output			Total Pencapaian
	MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**harus dilayani**		**belum terlayani**	
	B.Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM					*100%*
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah	1.072	1.072	0	100%
	2.Rehabilitasi rumah bagi korban bencanaJumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah /SR	1.072	1.072	0	100%
	3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah	456	456	0	100%
	4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah	456	456	0	100%
2	**Penyediaan Pelayanan**					**100%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian Output			Total Pencapaian
	Pengolahan Air Limbah Domestik					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**80%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	Orang	8.875	8.875	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu yang harus dilayani**	**Jumlah Mutu yang terlayani**	**Jumlah Mutu yang belum terlayani**	**20%**
	B.Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM					*100%*
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPAL D-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	300	300	0	100%
	2.Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat/SPALD-S terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga	300	300	0	100%
	3.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan	Rumah Tangga	1.325	1.325	0	100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian Output			Total Pencapaian
	seluruh wilayah perkotaan					
	4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat / SPALD-T terhadap kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	150	150	0	100%
	5. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat/SPALD-T terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	150	150	0	100%

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum, diantaranya sebagai berikut :

1. *Pengumpulan data,* masih menyesuaikan dengan format Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. *Penghitungan kebutuhan* :
   Belum tersedia data komprehensif tingkat kelurahan terkait jumlah rumah tangga yang belum mempunyai sarana air bersih baik yang bersumber dari PDAM, sumur gali, sumur bor/sumur dalam atau sumber air bersih lainnya. Demikian pula data terkait jumlah unit pengolahan setempat individual dan unit pengolahan setempat komunal;
3. *Perencanaan dan Penganggaran* :
   Ketersediaan lahan untuk Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan air limbah, terkendala status kepemilikan asset.
4. *Pelaksanaan :*
   - Dalam pelaksanaan masih ada penolakan dari oknum masyarakat penerima manfaat terhadap program, sehingga pembangunan sarana dan prasarana air minum dan air limbah pada lokasi yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan;
   - Adanya gagal tender pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan fisik.

a. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terdapat 2 jenis layanan dasar bidang urusan perumahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan target SPM tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan target pencapaian SPM 100% jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, dan target warga yang harus dilayani sebanyak 4045 orang;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintadaerah kabupaten/kota. dengan target pencapaian SPM 100% jumlah warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, dan target warga negara yang harus dilayani sebanyak 365 orang.
3. Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan kedua jenis layanan Bidang Perumahan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.455.923.800,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.
4. Total pencapaian SPM sebesar 100% dengan kategori indeks pencapaian SPM *Tuntas Paripurna*, disajikan pada tabel berikut

Tabel II.356.
Evaluasi Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2024
				Penerima Layanan Dasar (80%)		Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	**100%**	100%	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	80%	Jumlah barang dan jasa	20%	**100%**
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	**100%**	100%	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah	80%	Jumlah barang dan jasa	20%	**100%**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Tahun 2024.

Hasil pencapaian penerima layanan dasar dan pencapaian mutu minimal layanan dasar disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**80%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	Orang	4045	4045	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu yang harus dilayani**	**Jumlah Mutu yang terlayani**	**Jumlah Mutu yang belum terlayani**	**20%**
	B.Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM					*100%*
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	486	486	0	100%
	2.Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	100	100	0	100%
	3.Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	146	146	0	100%
	4. Pembangunan baru di lokasi baru / relokasi bagi korban bencana	Rumah	77	77	0	100%
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**80%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	Orang	365	365	0	100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu yang harus dilayani**	**Jumlah Mutu yang terlayani**	**Jumlah Mutu yang belum terlayani**	**20%**
	B.Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM					*100%*
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	1	1	0	100%
	2.Subsidi Uang Sewa	Rumah	1	1	0	100%
	3.Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	73	73	0	100%

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum, diantaranya sebagai berikut:

1. *Pengumpulan data,* pendataan terkait korban bencana terlambat/membutuhkan waktu yang lama, dan masih terdapat data korban bencana yang tidak valid;
2. *Penghitungan kebutuhan* : Penghitungan kebutuhan material terlambat dirampungkan akibat keterlambatan data;
3. *Perencanaan dan Penganggaran* :
   - Perencanaan dan penganggaran sangat bergantung dari ketersediaan data korban bencana dan perhitungan kebutuhan material. Sehingga jika data awal terlambat maka berdampak pula pada perencanaan dan penganggaran menjadi tidak tepat waktu.
   - Masih kurang dukungan pendanaan APBD/APBN untuk membiayai penerapan SPM terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
4. *Pelaksanaan :*tertundanyan pelaksanaan pekerjaan fisik yang sangat bergantung pada tahapan sebelumnya yaitu pendataan, perhitungan kebutuhan dan perencanaan serta penganggaran.

d. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat 5 jenis pelayanan dasar, sebagai berikut:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Dari kelima jenis pelayanan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran melaksanakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan capaian kinerja SPM yang dilaksanakan Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.357.
Evaluasi Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2024
				Penerima Layanan Dasar (80%)		Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
SATPOL PP								
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**100%**	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten /kota	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	**100%**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Tahun 2024.

Realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang terdiri dari 1 indikator dengan target penerima layanan dasar sebesar 80% dan mutu layanan dasar sebesar 20% terdiri dari:

1. **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten/kota, dimana target 2024 sebesar 100% dan realisasi tahun 2024 sebesar 94,93% yang terdiri dari realisasi persentase pencapaian penerima layanan dasar sebesar 80% (pencapaian jumlah yang harus dilayani 299 dan jumlah yang terlayani 299) dan realisasi persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar sebesar 14,93%

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Bidang Trantibunlinmas yang berkaitan dengan pelayanan dasar SPM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.10.442.217.328,- dengan realisasi Rp.957.546.750,- atau sebesar 95,36%.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp.30.645.254.100,- dengan realisasi Rp.3.481.575.900,-

Permasalahan yang sering didapatkan dalam pelayanan dasar Bidang Penanggulangan Bencana disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Tidak semua warga negara yang berada di radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda memberikan data-data lengkap seperti NIK dan nomor KK
- Tidak ada pengaduan layanan ganti rugi materil maupun pengaduan layanan pengobatan akibat penegakan perda dan perkada
- Belum adanya adata awal yang valid sehingga sulit melakukan perhitungan kebutuhan khususnya data pengaduan ganti rugi materil dan layanan pengobatan

- Sulit menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan karena belum ada warga negara yang mengalami kerugian materil atas dampak penegakan perda

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penerapan SPM urusan Bidang Pendidikan antara lain adalah

- Melakukan identifikasi data baik dengan verifikasi dan validasi ke lokasi pelanggaran gangguan ketertiban umum atau konfirmasi kepada masyarakat
- Melakukan perkiraan anggaran ganti rugi materiil dan layanan pengobatan atas dampak akibat penegakan perda dan perkada
- Melakukan analisa kebutuhan dan jumlah orang yang membutuhkan untuk di ajukan pada saat perencanaan dan penganggaran
- Melaksanakan patroli rutin wilayah dalam hal mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel II.358.
Evaluasi Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024

PENANGGULANGAN BENCANA								
No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Indikator Kinerja dan Realisasi				**Capaian 2024**
				Penerima layanan dasar (80%)		Mutu minimal layanan dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	**100%**	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20%	**100%**
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100**%**	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20%	**100%**
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**100%**	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20%	**100%**

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2025

Tabel II.359
Realisasi Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota Makassar Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pencapaian SPM			
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian (%)
1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	**440.498**	**440.498**	**0**	**100%**
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	**6.380**	**6.380**	**0**	**100%**
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**6.734**	**6.734**	**0**	**100%**

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2025

Realisasi pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar yang terdiri dari 3 indikator dengan target penerima layanan dasar sebesar 80 % dan mutu layanan dasar sebesar 20%.

1. **Pelayanan Informasi Rawan Bencana**, Persentase warga negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani 440.498 dan jumlah yang terlayani 440.498 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.
1. **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**, Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani 6.380 dan jumlah yang terlayani sebesar 6.380 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.

2. **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**, Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani 6.734 dan jumlah total yang terlayani 6.734 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana yang berkaitan dengan pelayanan dasar SPM sebesar Rp.9.328.178.700,- dengan realisasi Rp.8.895.394.300,- atau sebesar 95,36%. Permasalahan yang sering didapatkan dalam pelayanan dasar Bidang Penanggulangan Bencana disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Belum optimalnya pemanfaatan ruang terbuka hijau pada wilayah rawan bencana
- Studi kajian mitigasi bencana pada wilayah pesisir dan pulau-pulau perlu lebih di tingkatkan
- Kurangnya sarana dan prasarana bencana pada lorong dan wilayah pada penduduk yang ada di Kota Makassar
- Minimnya koordinasi kebencanaan pada tingkat kelurahan hingga RT/RW
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas sesuai standar kebutuhan
- Belum adanya data infrastruktur yang layak dipakai

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penerapan SPM urusan Bidang Pendidikan antara lain adalah

- Meningkatkan kapasitas SDM yang memiliki kualitas dalam melakukan penanggulangan bencana
- Meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan berbagai multi sektor yang mampu mendukung dalam penanggulangan bencana di Kota Makassar

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (DAMKAR)**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**80%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	Orang	8.844	8.844	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu yang harus dilayani**	**Jumlah Mutu yang terlayani**	**Jumlah Mutu yang belum terlayani**	**20%**
	B.Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM					*100%*
	1. Tingkat Waktu Tanggap (response time)15 menit sejak		964	964	0	100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.					
	2.Prosedur Operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi		1	1	0	100%
	3.Sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi		46	46	0	100%
	4.Kapasitas Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumberdaya Manusia		173	173	0	100%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran		51	51	0	100%
	6.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran		700	700	0	100%

Untuk jenis pelayanan dasar ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Penerima layanan dasar (80%) sebesar 80% dimana dari jumlah 8.844 warga negara yang harus diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi, terlayani sebanyak 8.844 orang atau 100%.
- Mutu minimal layanan dasar (20%) sebesar 20% terdiri dari komponen mutu layanan dengan nilai rerata capaian 100%, dengan uraian mutu minimal layanan sebagai berikut:
  a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi terdiri dari layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Dan penyelamatan kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar;
  b. Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi meliputi SOP pemadaman MKKG, pemadaman di permukiman;
  c. Sarana dan prasarana kebakaran meliputi mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, helm dan jaket petugas penyelamatan;
  d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yaitu SDM Damkar yang telah mengikuti pelatihan minimal pemadaman I;

e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran yaitu korban jiwa langsung;
f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran yaitu korban jiwa mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran..

Meskipun pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran 100%, teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
   - Belum adanya system informasi untuk melakukan pengumpulan data kebakaran dan bencana lainnya;
   - Tidak adanya pusat data dan kendali operasi penanggulangan kebakaran.
2. Penghitungan Kebutuhan
   - Masih kurangnya personal pemadam kebakaran serta kurangnya peralatan yang dimiliki sehingga terkadang penanganan penuh resiko yang dihadapi oleh petugas penyelamatan;
   - Jumlah mobil pamadam belum memenuhi standar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tercover dalam wilayah management kebakaran (WMK). Disamping terdapat kendaraan yang sudah melewati batas umur pemakaian kendaraan.
3. Perencanaan dan Penganggaran
   - Belum maksimalnya koordinasi antar bidang dalam perencanaan dan penganggaran;
   - Penyusunan rencana kerja yang mengacu pada pendapaian target SPM masih rendah;
   - Keterbatasan lahan Pemerintah Kota Makassar untuk membangun Pos Pembantu Sektor bdalam cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), guna memenuhi target Quick Respon Time selama 15 menit.
4. Pelaksanaan

   Posko pemadam masih kurang di Tingkat kecvamatan dan kelurahan.

F. Bidang Sosial

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar terkait bidang Sosial yang terdiri dari indikator rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar pati, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban tingkat kota.

Tabel II.360.
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 20234	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2024
				Penerima Layanan Dasar (80%)		Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100%	100%	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%	100%	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	100%	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan danpengemis di luar panti	100%	100%	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20%	100%
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan	80%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 20234	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2024
				Penerima Layanan Dasar (80%)		Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
				telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				

Sumber : Dinas Sosial kota Makassar, tahun 2025

Tabel II.361
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Sosial
Kota Makassar Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pencapaian SPM			
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar pant	614	614	0	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.	140	140	0	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar pant	39	39	0	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	Jumlah Warga Negara	80	80	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pencapaian SPM			
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian (%)
	khususnya gelandangan danpengemis di luar panti	gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti				
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	**4907**	**4907**	**0**	**100%**

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025

Realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar yang terdiri dari 5 indikator dengan target penerima layanan dasar sebesar 80% dan mutu layanan dasar sebesar 20%.

1. **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**, Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani 614 dan jumlah yang terlayani 614 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.
2. **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti**, Jumlah anak terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah

anak terlantar yang harus dilayani 140 dan jumlah anak terlantar yang terlayani sebesar 140 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.

3. **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti**, Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani 39 Lanjut Usia dan jumlah total yang terlayani 39 Lanjut Usia dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.
4. **Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar Panti**, Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani 80 dan jumlah total yang terlayani 80 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.
5. **Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**, Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota, dimana target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% yang terdiri dari realisasi peresentase penerima layanan dasar 80% dengan pencapaian jumlah yang harus dilayani 4.907 dan jumlah total yang terlayani 4.907 dan realisasi persentase pencapaian mutu layanan dasar 20%.

Adapun kegiatan yang mendukung ke lima Indikator tersebut terdiri dari :

- Layanan Data dan Pengaduan
- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK
- Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Layanan Rujukan

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Bidang Sosial yang berkaitan dengan pelayanan dasar SPM

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp.2.920.588.650,- dengan realisasi Rp.2.584.129.310,- atau sebesar 88,48%.
2. Program Penanganan Bencana dengan anggaran sebesar Rp.998.507.200,- dengan realisasi Rp.757.477.400,- atau sebesar 75,86%.

Permasalahan yang sering didapatkan dalam pelayanan dasar Bidang Penanggulangan Bencana disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Sulitnya melakukan verifikasi dan validasi data gelandangan dan pengemis karena tempat tinggal yang berpindah-pindah
- Belum adanya pengumpulan dan pengelolaan data penerima pelayanan dasar secara terstruktur
- Belum terpenuhinya data rincian perhitungan barang yang dibutuhkan oleh penerima layanan sehingga belum menghasilkan nilai yang sesuai dengan kebutuhan PPKS/PMKS
- Sulit menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan karena data yang memerlukan rehabilitasi sosial dasar belum ada
- Pembagian tupoksi kerja yang belum dibuat secara spesifik sehingga pelaksanaan belum berjalan dengan efektif

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penerapan SPM urusan Bidang Sosial antara lain adalah

- Melakukan identifikasi data baik melalui DTKS maupun verifikasi dan validasi ke masyarakat
- Melakukan analisis kebutuhan dan jumlah orang yang membutuhkan untuk di ajukan pada saat perencanaan dan penganggaran
- Membuat SK Tim keja yang dituangkan dalam SK bersama dengan instrumen pelaksanaan kegiatannya
- Melakukan identifikasi SDM Kesejahteraan Sosial untuk menghitung kebutuhan pelayanan dasar

B. Evaluasi SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;

7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkatan provinsi. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2014-2019 dari 17 tujuan, 169 target 249 indikator, maka hasil evaluasi terdapat 44 Target 58 indikator yang tercapai. Untuk capaian realisasi tahun 2020 untuk SDGs terkait program dan kegiatannya untuk Kota Makassar kami tidak melaksanakan dikarenakan dokumen RAD SDGs berakhir di tahun 2019, sementara terdapat 2 tahun kekososngan pimpinan daerah dalam hal ini walikota. Sementara penyusunan RAD SDGs harus selaras dengan dokumen RPJMD. Oleh karena itu RAD SDgs Kota Makassar baru tersusun di tahun 2021 setelah adanya Pimpinan daerah (Walikota dan Wakil Walikota) sehingga RPJMD yang disusun di tahun 2021-2026 bisa selaras dengan dokumen RAD SDGs 2021-2026. Capaian target dimaksud dapat dilihat pada Tabel II. 347:

Tabel II.362.
Capaian Realisasi SDGs
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Target 1.2 : mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional						
Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan						
Target 1.4 : Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi bau, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan						
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	5,07%	4,20%	4,97%	
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	99,71%	100%	99,1%	99,1%

1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	21.188KK	24.000KK	31.596KK	131,65%
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	98,53%	100%	101,49%
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)	68,46%	68,46%	70,02%	102,27%
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Dinas PU	83,49%	100%	74,56%	74,56%

1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas PU	94,24%	55,62%	89,63%	161.14%
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan	98,06%	99,63%	85,36%	85,67%
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	79,51%	89,01%	73,99%	83,12%
1.4.1.(j)	Persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	98,55%	98%	98%	100%
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	5,07%	4,20%	4,97%	
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	99,71%	100%	99,1%	99,1%

1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	21.188KK	24.000KK	31.596KK	131,65%
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	98,53%	100%	101,49%
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)	68,46%	68,46%	70,02%	102,27%
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Dinas PU	83,49%	100%	74,56%	74,56%
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	Dinas PU	94,24%	55,62%	89,63%	161.14%

	layanan sanitasi layak dan berkelanjutan					
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan	98,06%	99,63%	85,36%	85,67%
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	79,51%	89,01%	73,99%	83,12%
1.4.1.(j)	Persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	98,55%	98%	98%	100%
1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana						
1.5.1. (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas Sosial	100%	100%	100%	100%
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial	200 Jiwa	100 Jiwa	137 Jiwa	137%
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Dinas Pemadam Kebakaran	395 kebakaran & 569 penanganan penyelamatan	150 Kejadian	150 Kejadian	100%

		Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	94,24%	100%	96,94%	96,94%
1.a : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.						
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Ketahanan Pangan	619 Lorong	300 lorong	283 lorong	94,33%

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan						
2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi , terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	3,81%	5,25%	100%	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	17,64%	11,76%	11,76%	100%
2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang telah disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak	Dinas Kesehatan	25,6 % (SSGI) 3,14% (EPPGBM)	18,00 (SSGI) 3,00 (EPPGBM)	SSGI (Belum di rilis) 3,37 (EPPGBM)	

	dibawah lima tahun/balita					
2.2.2	Prevalensi malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	Dinas Kesehatan	2,37%	5,25%	12,07%	229,90%
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	70,02%	55%	78,81%	143,29%
2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai ; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Ketahanan Pangan	89,60%	85	89,73	105,56%
2.c : Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.						
2.c.1	Indikator anomali harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Energi:2782 Protein: 80,69	Energi:2.700 Protein:127	Energi:2812 Protein: 88,21	Energi : 104,14 Protein : 69,45

2.3 : Pada tahun 2030,menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan,masyarakat penduduk asli,keluarga petani, penggembala dan nelayan,termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumberdaya produktif, dan input lainnya,pengetahuan,jasa keuangan,pasar,dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian						
2.3.1*	NilaiTambah Pertanian di bagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah pertenaga kerja).	Dinas Perikanan dan Pertanian Dinas Perikanan dan Pertanian	6,47 Ton Perhektar Pertahun 6,47 Ton Perhektar Pertahun	7,0 Ton Perhektar Pertahun 6,47 Ton Perhektar Pertahun	6,5 Ton Perhektar Pertahun 6,47 Ton Perhektar Pertahun	92,85% 6,47 Ton Perhektar Pertahun
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.					

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI) .	Dinas Kesehatan	76,67%		76,43%	

3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%
3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000						
3.2.1	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	7.59	0,91%	0,08%	8,79%
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	3.43	0,91%	5,18%	569,23%

3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	7,3	0,91	0,80%	87,91%
3.3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya						
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinas Kesehatan	0.069%	0,035%	0,06%	171,42%
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	0,045	0,188%	0,06%	31,91%
3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	0,01	0,01%	0,05%	500%
3.3.4.(a)	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	0	0	0	0
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin			

3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan						
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Dinas Kesehatan				
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan				
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan				
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	1	1	1	100%
3.5 : Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan						
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Dinas Kesehatan				
3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh	Dinas Kesehatan				

	penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir					
3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)	27,25%	68,4%	31,23%	45,65%
3.8 : mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan askes terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang						
3.8.2.(a	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	100,11%	100%	99,1%	99,1%
3.a : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat						

3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Kesehatan	100	20,06%	19,82%	98,80%
3.b : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua						
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%
3.c : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau keci						
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	5,5	1,51	0,07	4,63%

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 4 : Pendidikan yang berkualitas						
4.1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	79.93%	82,35%	86,47%	105%
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	65,33%	75,20%	72,5%	96,40%
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat kesehatan.	Dinas Pendidikan	105,51	100%	93,09%	93,09%
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Dinas Pendidikan	90,85%	100%	86,32%	86,32%

4.1.1.(f)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan	11,56	12	11,57	96,41%
4.2 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini,pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan	39,49	50,91%	34,29%	67,35%
4.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan						
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Dinas Pemuda dan Olahraga	450	150%	520%	346,66%
4.5 : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan						
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)	Dinas Pendidikan	SD/MI = 99,57 SMP/MTs = 105,30	SD/MI = 100 SMP/MTs = 100	SD/MI = 100,49 SMP/MTs = 105,50	SD/MI = 100,49 SMP/MTs = 105,50

	perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2)SMP/MTs/sederajat					
4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi						
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin	Dinas Perpustakaan	98,93%	100%	98,84%	98,84%
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan	99,17	100%	98,84%	98,84%
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24	Dinas Pendidikan	usia 15-24 (100%) usia 15-59 (100%)	100%	100%	100%

	tahun dan umur 15-59 tahun					
4.a : Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dangender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua						
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dinas Pendidikan	(a) listrik=100% (b) internet untuk tujuan pengajaran=98,14%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 73,93%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=8,6%, (e) air minum layak=100%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=93,27%(g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=100%	(a) listrik=96,5% (b) internet untuk tujuan pengajaran=91,5 %, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 30%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=3,5, (e) air minum layak=82,5%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=65%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air,	(a) listrik=100% (b) internet untuk tujuan pengajaran=98,1 4%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 73,93%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=8,6%, (e) air minum layak=100%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=93,27% (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air,	(a) listrik=103,62% (b) internet untuk tujuan pengajaran= 107,25%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 246,43%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas= 245,71%, (e) air minum layak=121,21%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=143,49% (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=100%

				sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=20%	sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=100%	
4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil						
4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan	PAUD= 46,65% SD= 36,23% SMP= 42%	PAUD= 38.49% SD= 45.83% SMP= 47.03%	PAUD= 34,46% SD= 35,23% SMP= 41,33%	PAUD= 89,26% SD= 76,87% SMP= 87,88%

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 5 : Kesetaraan Gender						
5.1 : mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun						
5.1.1	Jumlah Kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	98%	85%	100%	117,64%

5.2 : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya						
5.2.1.a	Prevelensi kekerasan terhadap anak perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	98%	100%	100%	100%
5.2.2	Proporsi Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	98%	100%	100%	100%
5.2.2.a	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	100%	100%	100%	100%
5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat						
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	26%	31%	13%	41,93%

	daerah dan pemerintah daerah					
5.6 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.						
5.6.1	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)	9,06%%	68,4%	5,25%	7,67%

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak						
6.1 : Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua						
6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	83,49%	100%	74,56%	74.56%

	akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas Kesehatan	98.87			
6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	83,49	100%	74,56%	74.56
6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	83,49	100%	74,56%	74.56
6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan						
6.2.1.(a)	Proporsi Populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Dinas Kesehatan	85.8			
6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	94.24	55,62%	89,63%	161,14%

	akses terhadap layanan sanitasi layak					
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan	100			
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	94.24	55,62%	89,65%	161,18%
6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	94.24	55,62%	89,65%	161,18%
6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas	Dinas Pekerjaan Umum (PU)				

	pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	66,25%	55,62%	60,70%	109,13%
6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	51,74	59.11	58,7	99,30%

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi						
8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang						
8.1.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB per kapita	PTSP	330.24%	100%	68,81%	68,81%

8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif,penciptaan lapangan kerja layak,kewirausahaan,kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro,kecil dan menengah,termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan						
8.3.1	Persentase tenaga kerja formal	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	67,18%	70,00%	59,70%	85.28%
8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan	Dinas Koperasi &UKM	26,52	26,83%		
8.5 : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	10,60	8,81%	9,71%	110,21%
8.9 : Pada Tahun 2030, meyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata	2,14%	1,31%	2,16%	164,88%
8.9.1.(a)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	85,614	33.200	160.295	482,81%

8.9.1.(a)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata	4,414,466	1.906.950	5.684.295	
8.9.1.(b)		Dinas Kebudayaan	1.800% (dari target 4.,500 pengunjung dan terealisasi 82.326 pengunjung) sangat melebihi dari target yang di tentukan karena adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dan KEDUBES Australia dalam bentuk pameran bernama SONGLINE yang berlokasi di Museum Kota Makassar	100 % (5.200)	500% (dari target 5.200 pengunjung dan terealisasi 28.123 pengunjung) sangat melebihi dari target yang di tentukan karena adanya Kunjungan sekolah-sekolah dalam kota dan dari luar kota. Jumlah 500% ini juga dibantu dengan adanya Tata Pamer baru di Museum Kota Makassar	500%
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Dinas Pariwisata	6.165	6.165	6.165	100%

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 9 : Induatri, Inovasi dan Infrastruktur						
9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.2 (b)	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Dinas Perhubungan	2	10	2	
9.2 Mempromosikan Industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya dinegara kurang berkembang						
9.2.1 (a)	Laju Pertumbuhan PDB Industri manufaktur	Dinas Perdagangan	**400**			
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan						

9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Balitbangda	100%	90%	100%	
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Balitbangda	100%	90%	100%	
9.b : Mendukung pengembangan teknologi domestic, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industry dan peningkatan nilai tambah komoditas						
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah	Balitbangda	100%	100%	100%	100%

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan						
11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.						
11.1.1	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses	Dinas Perumahan	99,50%	100%		
		Kecamatan Tallo	73,33%	70%		

	terhadap hunian yang layak dan terjangka	Kecamatan Manggala	54%	68%		
		Kecamatan Biringkanaya	68%	70%	70%	100%
		Kecamatan Tamalanrea	65%	70%		
		Kecamatan Panakukang	68%	70%		
		Kecamatan Rappocini	65%	70%		
		Kecamatan Tamalate	76%	98%		
		Kecamatan Mamajang	89%	70%		
		Kecamatan Wajo	68%	70%	17,8%	
		Kecamatan Ujung Pandang	91%	70%		
		Kecamatan Ujung Tanah	78%	100%	60%	
		Kecamatan Mariso	80%	70%		

		Kecamatan Bontoala	68%	68%	70%	
		Kecamatan Makassar	73%	70%		
		Kecamatan Sangkarrang	68%	70%	70%	100%
11.6 : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota						
11.6.1. (a)	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangan	Kecamatan Tallo	100%	85%		
		Kecamatan Manggala	89%	94%		
		Kecamatan Biringkanaya	99%	85%		
		Kecamatan Tamalanrea	80%	85%		
		Kecamatan Panakukang	85%	83%		
		Kecamatan Rappocini	83%	85%		
		Kecamatan Tamalate	100%	70%		
		Kecamatan Mamajang	70%	85%		

		Kecamatan Wajo	83%	85%	96,67%	
		Kecamatan Ujung Pandang	99%	85%		
		Kecamatan Ujung Tanah	96%%	98%		
		Kecamatan Mariso	95%	85%		
		Kecamatan Bontoala	80%	85%		
		Kecamatan Makassar	77%	85%		
		Kecamatan Sangkarrang	83%	85%	85%	
		Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	87,44%	71%		
11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas						
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	-			

	metropolitan dan kota sedang					
	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Dinas Tata Ruang	12,60%	15,234%		

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 12 : Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab						
12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.						
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) gender mendukung	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	7.333,78 Ton	Limbah B3 = 8.075,52 Ton B3 = 1.636.799,7	Total B3 (2023) = 16.066.503,74 Ton/ Tahun	

	pemberdayaan perempuan.			8 Ton		
12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.						
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	14.629,22 Ton	65.549		
12.b : Mengembangan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal						
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang telah disepakati	Dinas Pariwisata	1	1	1	100%

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 13 : Perubahan Iklim						
13.2 : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional..						
13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	1	1	1	100%

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 15 : Ekosistem Daratan						
15.9 : Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	2	2	2	100%

	keanekaragaman hayati.					

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh						
16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.						
16.2.3.a	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	98%	100%	100%	100%
16.2.1.b	Prevalensi kekerasan terhadap anak lakilaki dan anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	98%	100%	100%	100%
16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua						
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat	Bagian Hukum	**12 perkara**	**12 Perkara**		

	miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.					
16.5 : Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya						
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat	21 Laporan	21 Laporan		
16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat						
16.6.1.(A)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) .	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	WTP	WTP	WTP	100%
16.6.1. (D)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	77,3%	62%		

16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)		71,00		
16.9 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL)	98,55	99%		
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL)	98,55	99%		
16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL)	98,55	99%		
16.10 : Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional						
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan	Dinas Komunikasi dan Informatika	200	800		

	kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	(KOMINFO)				
16.b : Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan						
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	100%	100%	100%	100%

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Baseline Data 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi 2024
Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan						
17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya..						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	RP.4.049.344.772.471,05,-	RP.4.049.344.772.471,05,-	RP.4.205.629.621.340,50	103.85%

17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	Rp1,355,698,501,582.00	RP.1.730.000.000.000,00	RP.1.401.378.637.369,17	81.00%
17.5 : Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang						
17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang	PTSP	295 Investor PMA & 1568 Investor PMDN, US$ 44.110,69 Investasi PMA & Rp. 5.238.910.614.347 Investasi PMDN	720 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000	90 Investor PMA & 280 Investor PMDN,Rp.1,8 Triliun dan US$ 28,4 Juta	

II.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Tahun 2024

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan .
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan daerah tahun lalu yang dikelompokkan menurut katergori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah menyangkut realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

Untuk tahun 2024 ini, total pagu Dinas Pendidikan Kota Makassar sebesar Rp. 1.305.072.854.819,- dan total realisasi termasuk Dana BOS dan Dana BOP Paud dan Nonformal kesetaraan sebanyak Rp.1.054.564.201.042,- (80,81%), yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Total alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah **Rp.810.666.856.221,-** dengan realisasi **Rp. 750.122.801.042,- (92,53%).**

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu:

a. Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam dalam kondisi baik.
   Pada tahun 2024 target kinerja sebesar 9o persen terealisasi sebesar 87,50 persen sehingga capaian kinerja 97,22 persen.
b. Persentase ketersediaan laporan keuangan dan paoran kinerja perangkat daerah. Pada tahun 2024 target kinerja sebesar 100 persen terealisasi sebesar 99,06 persen sehingga capaian kinerja 99,06 persen.
c. Persentase ASN Perangkat Dae rah yang mendapat peningkatan kapasitas.

Pada tahun 2024 target kinerja sebesar 90 persen terealisasi sehingga capaian kinerja 100 persen.

- Faktor Penghambat/Permasalahan Pencapaian Kinerja:
  Anggaran kas yang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan Menentukan penyedia/pihak ketiga membutuhkan waktu verifikasi yang lebih lama
- Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:
  Tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program rutin setiap bulannya.
  Adanya SDM yang mendukung dalam pelaksanaan setiap kegiatan
- Tindak lanjut:
  Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Untuk mencapai target kinerja sasaran pada program Pengelolaan Pendidikan dilakukan melalui tiga Kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,Pengelolaan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar realisasi anggarannya sebesar Rp.169.887.631.313 atau 56,78 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 302.000.668.708.

Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut: persentase rata-rata capaian pada indikator kinerja program APK dan APM SD mencapai angka 101,78 persen dan persentase rata-rata capaian pada indikator kinerja program APK dan APM SMP mencapai angka 85,18 persen ditahun 2023. Hasil capaian tersebut diperoleh dari persentaes capaian realisasi dari indikator kinerja yaitu : APK SD sederajat mencapai 105,51 persen dan APM SD sederajat mencapai 98,06 persen. Sedangkan persentase capaian realisasi untuk APK SMP mencapai 90,85 persen dan APM SMP mencapai 79,51 persen. Sedangkan pada tahun 2024 persentase capaian indikator kinerja pada **APK SD** dan **APM SD** mencapai angka 89,23 persen lebih rendah dari capaian tahun lalu. Angka diperoleh dari capaian **APK SD** yaitu sebesar 93,09 persen dan **APM SD** yaitu sebesar 85,36 persen. Dan untuk **APK SMP** dan **APM SMP,** persentase capaian indikator kinerja mencapai 80,16 persen. Angka ini diperoleh dari capaian **APK SMP** yaitu sebesar 86,32 persen dan **APM SPM** yaitu sebesar 73,99 persen.

Pada tahun 2024 persentase capaian indikator kinerja pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini yaitu mencapai **68,46** persen dengan uraian target APK PAUD yaitu sebesar 50,91 persen. Dilihat dari realisasi yang mencapai 34,29 persen APK PAUD yang lebih rendah dari yang ditargetkan maka capaian persentasenya 67,35 persen. Dan Untuk APM PAUD dengan target 46,33 persen terealisasi 32,23 persen jadi persentase capaiannya 69,57 persen. Angka realisasi APK PAUD didapat dari data jumlah penduduk usia 4 sampai 6 tahun sebanyak 76.517 orang dan sebanyak 24.662 anak telah bersekolah pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Persentase rata-rata capaian pada indikator kinerja Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yaitu sebesar 107,47 persen dengan realisasi setiap paket mencapai 96,99 persen dari target 90,26 persen pada tahun 2023. Sedangkan pada tabel tahun 2024, rata-rata capaian pada indikator kinerja yaitu sebesar 103,89 persen dari realisasi kinerja sebesar 95,85 persen dari target sebesar 92,26 persen. Data pencapaian tersebut diperoleh dari jumlah peserta ujian Paket A, B dan C sebanyak 3.329 orang dan peserta didik yang lulus ujjan juga sebanyak 3.191 0rang.

Persentase rata-rata capaian pada indikator kinerja program Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan mencapai **101,07** persen ditahun 2004 Hasil capaian tersebut diperoleh dari capaian realisasi target dari indikator kinerja yaitu : Sarana dan Prasarana

PAUD mencapai 76,07 persen, Sarana dan Prasarana SD sederajat mencapai 77,14 persen dan Sarana dan Prasarana SMP sederajat mencapai 92,48 persen.

Faktor Penghambat

- Pengadaan solar panel sebanyak 146 set untuk SD dan 55 set untuk SMP tidak dapat dilaksanakan disebabkan waktu pelaksanaan yang sangat sedikit mengingat anggaran solar panel dimasukkan di anggaran perubahan
- Alokasi anggaran untuk Gerakan Cegah Wasting dan Stunting tidak sebanding dengan jumlah anak usia dini yang akan di intervensi
- Ada beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan pelaksanaan karena belum terbitnya SPD dari BPKAD, seperti kegiatan peningkatan bakat minat peserta didik (O2SN) yang mana kegiatan tersebut merupakan mandatori kemendikbudristekdikti yang memiliki waktu pelaksana yang terjadwal
- Kegiatan FL2SN tidak dapat dilaksanakan karena sampai dengan batas waktu pengiriman peserta ke provinsi, seleksi tingkat kota belum dilaksanakan karena terkendala SPD yang belum terbit.
- Beberapa kegiatan yang memerlukan ketelitian dalam merencanakan dan menganggarkan sehingga mengalami kendala ketika akan dilaksanakan seperti alokasi tim ahli/wasit yang tidak sesuai standar dan sebagainya
- Kompetensi pedagogik guru yang masih perlu ditingkatkan Masih kurangnya SDM dengan latar belakang pendidikan yang menunjang pekerjaan sebagai bendahara Dana BOS.
- Kapasitas satuan PNF dan SPNF dalam menyelenggarakan Ujian Pendidikan Kesetaraan secara mandiri terkendala faktor sarana dan prasarana.
- Pengalaman dalam proses pengadaan e-catalogue konstruksi masih sedikit
- Masih ditemukan adanya kepala sekolah yang lambat respon terhadap undangan permintaan peserta kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dikirim ke sekolah
- Masih ditemukan adanya peserta yang diundang, tapi tidak hadir mengikuti kegiatan pengembangan karir pendidik

Faktor Pendorong:

- Dalam pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini terdapat keterlibatan Pokja Bunda PAUD Kota Makassar yang dapat mendukung terselenggaranya layanan PAUD berkualitas serta koordinasi lintas sektor untuk memajukan Pendidikan Anak Usia Dini
- Ketersediaan SDM teknik yang memiliki kompetensi yang mendukung kegiatan
- Ketersediaan SDM yang memiliki pengalaman dalam Pengadaan Barang dan Jasa khususnya e-catalogue konstruksi
- Tersedianya anggaran melalui APBD dan DAK Fisik maupun Nonfisik.
- Tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru
- Tersedianya Narasumber yang memiliki kompetensi yang baik untuk mendukung kelancaran kegiatan pengembangan kompetensi guru.
- Melaksanakan kegiatan lebih awal di tahun anggaran baru untuk mengantisipasi beberapa alasan teknis yang mendukung program.
- Tersedianya data stunting yang ada di Kota Makassar
- Koordinasi lintas sektor antara Bappeda, Dinas kesehatan dan Puskesmas berjalan dengan baik.
- Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah, seperti komite sekolah dan paguyuban orang tua.

Tindak lanjut:

- Peningkatan kompetensi SDM yang ada serta penambahan personil sesuai keahlian yang dibutuhkan

- Melakukan pengusulan penambahan anggaran khususnya untuk pembangunan dan rehabilitasi guna peningkatan SPM
- Menyusun rencana kerja lebih matang untuk penyelesaian pekerjaan
- Meningkatkan kompetensi dan meminta pendampingan pihak yang berkompeten seperti UKPBJ/LKPP
- Melakukan koordinasi inrtensif dengan kepala sekolah.
- Mengkomunikasikan dengan pihak kepala sekolah, agar mengingatkan guru yang ditugaskan untuk datang tepat waktu mengikuti kegiata pengembangan kompetensi.
- Peserta yang diundang dikegiatan berikutnya adalah guru yang sudah menyatakan kesediaan untuk hadir melalui komunikasi lebih awal dengan pihak sekolah.
- Melakukan inventarisasi data anak yang benar-benar memerlukan intervensi spesifik dengan bekerjasama Puskesmas dan Tenaga Gizi di masing-masing Puskesmas.

3. Program Pengembangan Kurikulum

Pada Program ini alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Kurikulum adalah **Rp.90.698.400,-** dengan realisasi **Rp. 86.500.000.- (95,37%).** Program ini dengan indikator persentase rata-rata capaian indikator kinerja program mencapai 88,89 persen yang diperoleh dari hasil realisasi jumlah kurikulum yang dikembangkan yaitu sebanyak 66,67 persen dari target kurikulum sebanyak 50 persen yang ingin dikembangkan. Kurikulum yang dikembangkan di tahun 2024 yaitu sebanyak 2 Kurikulum yaitu Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD dan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Kesetaraan.

Faktor Penghambat/Permasalahan Pencapaian Kinerja :

- Muatan lokal masih belum terintegrasi di dalam muatan kurikulum operasional satuan pendidikan
- Rendahnya alokasi anggaran untuk pengembangan kurikulum muatan lokal Persentase guru yang dapat membuat kurikulum muatan lokal masih rendah

Faktor Pendorong:

- Adanya perubahan struktur kurikulum dari KTSP ke Kurikulum Merdeka
- Guru Penggerak dapat dilibatkan dalam penyusunan kurukulum merdeka dengan mengintegrasikan muatan lokal

Tindak lanjut :

- Melibatkan guru penggerak didalam menyusunan kurikulum *operasional*
- yang mengintegrasikan muatan lokal
- Menyusun program pengembangan kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan pada Pusat Kegiatan Gugus PAUD.

4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program ini alokasi anggaran untuk Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah **Rp.92.704.000,-** dengan realisasi **Rp. 84.000.000,- (90,61%)**. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut: (i) Persentase Guru Yang Bersertifikasi dengan target kinerja PAUD: 38.49%, SD:45.83%, dan SMP:47.03% (ii) Rasio Guru-Murid dengan target kinerja PAUD=1:19, SD=1:33 dan SMP= 1:33. Rata-rata persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 84,76 persen. Angka tersebut didapat dari capaian realisasi pada PAUD sebesar 89,53 persen, SD sebesar 76,87 persen dan SMP sebesar 87,88 persen.

Faktor Penghambat

- Masih adanya Pendidik dengan kualifikasi pendidikan di bawah S1 Masih adanya Pendidik yang tidak lulus seleksi PPG

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :

- Adanya pengangkatan guru PPPK

Terbukanya akses assesmen PPG dalam jabatan untuk menjaring guru sebagai tenaga professional.

Tindak Lanjut :

-Melaksanakan kegiatan yang membimbing tenaga pendidikn dalam mempersiapkan sejak dini dalam mengikuti seleksi PPG dalam jabatan.

2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Pada Program ini alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Perizinan Pendidikan adalah **Rp. 18.024.800,-** dengan realisasi **Rp. 12.800.000.-(71.01%).** Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan indikator kinerja Persentase Lembaga Pendidikan yang Diawasi Perizinannya dengan pada tahun 2024 rata-rata persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 120,03 persen. Persentase rata-rata capaian tersebut berdasarkan capaian dari indikator kinerja dengan realisasi 36,38 persen sehingga tingkat capaian 120,03 persen. Hasil tersebut didapat dari jumlah lembaga pendidikan yang terdaftar didapodik dan juga yang aktif.

Faktot Penghambat:

- Adanya keterlambatan verifikasi lapangan oleh tim teknis karena memerlukan kelengkapan dokumen berupa 1MB.

Faktor Pendorong:

- Mekanisme pengajuan perizinan berbasis online dengan menggunakan sistem Solataboss.

Tindak Lanjut:

- Melakukan penarikan data setiap tiga bulan dan memvalidasi satuan pendidikan yang beroperasi tetapi Dapodiknya tidak aktif.

Melibatkan Penilik dan Pengawas untuk melakukan verifikasi lapangan terkait penyelenggaraan satuan pendidikan baik PAUD maupun PNF. Membuat telaah stat mengenai tidak diperlukannya IMB bagi satuan pendididikan dengan kategori bangunan sosial/pendidikan kemudian diperhadapkan ke DPPTSP untuk menganulir persyaratan penerbitan izin operasional bidang Pendidikan.

1. DINAS KESEHATAN

Pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota makassar melaksanakan sebanyak 5 program terdiri dari 1 program penunjang dan 4 program utama, dengan total anggaran perubahan Tahun 2024 sebesar Rp.623.440.273.626, realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 538.765.875.854.- atau sebesar 86,42 % dan untuk realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 87,05%.

A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Sudah ada PERPRES No.67 tTuhun 2021, PERWALI TB No. 20 tahun 2023, Kegitan Skrining di masyrakat (di puskesmas denagn mengunakan portabel EX Ray)
- Permenkes No 22 Tahun 2022 Ttg Penanggulangan Malaria, Permendagri No 84 Tahun 2022 ttg upaya penanggulangan malaria.
- Pembayaran bantuan iuran PBPU & BP Pemda dan bantuan iuran PBPU mandiri kelas 3 aktif dalam proses pembayaran.
- PERDA No.4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota makassar.
- SK Walikota KTR No.844/188.4.45/2024 tentang Tim Pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok.

- Mamorandum Of Agreement Hasanuddin Centre For Tobacco Control and NCD Prevention dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar Tentang Bentuk kerjasama Penyelenggaraan Pendampingan Imlementasi PERDA No.4 Tahun 2013 tentang KTR Kota Makassar,
- Surat Edaran Dinas Kesehatan No.440/872/DKK/III/2024 tentang layanan Quitlin INa Upaya Berhenti Merokok di Kota Makassar.
- Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar No. 440/2091/DKK/VIII/2024 tentang Pelaksanaan KTR di Klinik dan Rumah Sakit di Kota Makassar dan adanya layanan Konseling UBM di 47 Puskesmas Kota Makassar.

Tindak lanjut:

- Melakukan koordinasi lintas sektor dalam Meningkatkan peran serta TIM SATGAS KTR dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan PERDA KTR.
- Melakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran KTR dan meningkatkan kegiatan implementasi PERDA KTR di 7 tatanan KTR dan berbasis rumah tangga.
- 3 Item Alkes yang tidak dapat direalisasikan tahun ini akan dianggarkan untuk tahun berikutnya.
- Melakukan persiapan lebih awal untuk menganggarkan kembali di tahun berikut sesuai dengan jadwal dan target yang ditetapkan.
- Koordinasi bidang perencanaan untuk memastikan ketersediaan item pekerjaan.
- Menyusun RKA untuk Anggaran Tahun 2025 (Pengadaan dan pemeliharaan Alat Kalibrasi).
- Kegiatan di fokuskan ke sasaran Longwis.
- Memonitoring, mengevaluasi dan merencanakan perubahan rincian rekening pagu anggaran di tahun 2025 (Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan).
- Revisi SK Walikota disesuaikan dengan jumlah Pagu Anggaran yang di DPA Tahun 2025 dan kebutuhan tenaga (Operasional Pelayanan Puskesmas).
- Pembayaran hibah disesuaikan dengan perwali hibah dan prosedur yang berlaku.
- Meningkatkan peran serta TIM TPCB dinkes untuk mengawal pelaksanaan akreditasi puskesmas.
- Terkait ketersediaan bahan baku untuk obat sebaiknya ada penyedia bahan baku yang bisa di sediakan dalam negeri sehinnga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

B. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Pelaksanaan berbagai kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Tahun 2024 didukung alokasi anggaran sebesar Rp.2.464.376.100,00, dengan realisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.078.234.690,00 - atau sebesar 43.75%.

Indikator kinerja program peningkatan kapasitas sumber data manusia kesehatan adalah persentase sumber daya manusia keehatan yang mendapat Pendidikan dan pelatihan teknis. Adapun target capaian dari indikator tersebut adalah 95% sedangkan capaian Tahun 2024 adalah sebesar 100% Capaian tersebut diperoleh dari 54 orang tenaga kesehatan yang mengusulkan untuk melanjutkan pendidikan selama tahun 2024, seluruhnya melanjutkan pendidikan. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga yang bertanggung jawab dan kewenangan harus terus ditingkatkan melalui pembinaan dan pengawasan dengan melakukan monitoring data tenaga kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui kerjasama dengan organisasi profesi dan kredensialing atau proses untuk melihat pemenuhan standar dan mengukur apakah telah memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dilakukan tim Dinas Kesehatan bersama BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial).

C. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Indikator kinerja program terdiri dari :

- Persentase ketersediaan kebutuhan farmasi pada RSUD dan Puskesmas.
- Persentase ketersediaan kebutuhan alat kesehatan pada RSUD dan Puskesmas

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.397.582.300,00, dimana capaian tahun 2024 adalah sebesar Rp.295.784.240,- atau 74.40%.

Terkait persentase ketersediaan kebutuhan farmasi pada RSUD dan Puskesmas selama tahun 2024, RSUD dan puskesmas telah melakukan belanja obat dan Bahan Habis Pakai/BHP untuk memenuhi kebutuhan farmasi baik melalui penganggaran APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mekanisme BLUD dan dana JKN, dengan capaian persentase ketersediaan kebutuhan farmasi (obat dan bahan habis pakai) sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 93.13% dari target 100%, nilai tersebut merupakan rata-rata capaian ketersediaan kebutuhan farmasi di seluruh puskesmas dan pada RSUD dengan rincian : persentase ketersediaan kebutuhan obat di puskesmas sebesar 97.52% dan BMHP sebesar 100%, adapun pada RSUD untuk persentase ketersediaan obat sebesar 93.44% dan BMHP 81.60%. Ketersediaan obat yang direncanakan Dinas Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan puskesmas, terealisasi 118 item jenis obat dari 121 item jenis obat yang direncanakan atau 97.52%. Untuk bahan habis pakai Puskesmas, yang terealisasi 100%. Pada RSUD, di Tahun 2024 dari target sebanyak 488 item jenis obat yang terealisasi sebanyak 456 jenis obat atau 93.44% dan untuk Bahan Medis Habis Pakai/BMHP dari yang direncanakan oleh RSUD sebanyak 375 yang terealisasi atau dapat dipenuhi sebanyak 306 atau 62.58%.

Adapun pengukuran indikator persentase ketersediaan alat kesehatan pada RSUD dan puskesmas dengan target 60%, diperoleh capaian 78.10%. Berdasarkan data pada aplikasi sarana, prasarana dan alat Kesehatan (Aspak), ketersediaan alat kesehatan pada seluruh puskesmas diketahui 76.19% dan persentase ketersediaan alat kesehatan rumah sakit sebesar 80% (sesuai data pada aspak) sehingga jika dihitung rata-rata persentase ketersediaan alat kesehatan pada RSUD dan Puskesmas tahun 2024 adalah 78.10%.

Faktor pendorong:

Berjalan sesuai dengan target dimana capaian realisasi adalah 100%. pada sub kegiatan (Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga)

Tindak lanjut:

Perlu dipikirkan terkait honor panitia pelaksana yang tidak terbayarkan agar kedepannya bisa terbayar, karena hal ini berkaitan dengan realisasi keuangan pada sub kegiatan tersebut.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pencapaian target kinerja program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.096.088.800.00, dimana pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.10.491.609.364,- atau 86.74%.

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mencakup 2 indikator yaitu:

1. Persentase posyandu aktif dengan target 100% realisasi 100%
2. Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif dengan target 65% realisasi 78,81%

Capaian indikator posyandu aktif yaitu 100% dengan jumlah posyandu se kota Makassar adalah 1012 dengan rincian sebanyak 453 posyandu purnama dan 559 posyandu mandiri dengan sejumlah 5060 kader.

Adapun cakupan bayi yang mendapatkan Asi Eksklusif adalah 78.81% dengan sejumlah 15.368 bayi yang masih memperoleh ASI eksklusif dari sejumlah 19.500 bayi yang direcall.

Faktor pendorong:

- Berjalan sesuai dengan yang direncanakan ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 100%.

Tindak lanjut**:**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu:

1) Pemberian izin praktik tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:

- Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan

2) Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan

3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sub kegiatan :

4) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada anggaran tahun 2024 untuk program penunjang adalah sebesar Rp. 174.347.202.276.-(Anggaran Perubahan tahun 2024) dengan capaian sebesar Rp. 162.788.293.312,- atau sebesar 93,37%.

Program penunjang urusan pemerintah daerah mencakup 3 indikator:

1. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas target 90 % dengan Realisasi 100%
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baiktarget 90% deng realisasi 99,99%
3. Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah target dengan dealisasi 100%

Faktor pendukung :

- Koordinasi dengan Puskesmas berjalan dengan baik khususnya terkait pelaporan kinerja, data kepegawaian maupun pelaporan keuangan.
- Terbentuknya tim verifikasi dengan pembagian tugas yang jelas

Tindak lanjut :

- Mengusulkan segera pada tahun berikutnya, pejabat defenitif untuk Puskesmas
- Percepatan proses penambahan daya/instalasi listrik pada beberapa puskesmas
- Pengusulan penghapusan asset untuk yang sudah tidak fungsional atau kendaraan yang sudah tidak beroperasi.

3. DINAS PEKERJAAN UMUM

Pelaksanaan rencana kerja dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2024 yang terdiri dari 8 program, 17 kegiatan, dan 75 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 733.261.060.273.-. Realisasi keuangan sampai ada triwulan IV dengan Capaian sebesar Rp. 527.752.907.498,- atau 79.60 %.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja program terdiri dari persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja 90%, Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% dan indikator Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan Kapasitas dengan target kinerja 90%. Rata-rata capaian kinerja hingga triwulan IV sebesar 100 % yang didukung alokasi anggaran sebesar Rp. 69.485.577.851,- dengan Realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 54.594.110.595,- atau 78.57 %.

Faktor Penghambat yaitu: Sub Kegiatan Pengadaan tidak dapat dilaksanakan disebabkan anggaran di alihkan di Bagian Umum SETDA; Ada item pekerjaan yang SPD-nya tidak keluar. Faktor pendorong yaitu ; anggaran yang tersedia ,Sumber daya manusia yang tersedia, komunikasi dan Koordinasi yang intens antara pejabat teknis dan kerjasama yang baik dari instansi terkait.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah percepatan proses tender pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan kualitas pekerjaan/kegiatan, Komunikasi dan koordinasi yang intens dan kerjasama yang baik dari instansi terkait, pihak pelaksana pekerjaan/kegiatan/pengadaan barang dan jasa.

B. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator kinerja program adalah Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota dengan target kinerja 100%. Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.371.402.900,-. Realisasi kinerja hingga triwulan IV Tahun 2024 sebesar 91.97 %, realisasi anggaran sebesar Rp. 18.736.250.159,-.

Faktor Penghambatnya yaitu:

- Kurangnya lahan fasum/fasos untuk pembangunan sarana air bersih;
- Lokasi permintaan pembuatan sumur bor berada di daerah pesisir di mana kemungkinan besar sulit mendapatkan air tawar (tidak memenuhi standar baku mutu air bersih yang ditetapkan);
- Kondisi tanah yang mengandung batuan sehingga mempengaruhi kelancaran dalam pengeboran;
- Peralatan harus disesuaikan dengan kondisi tanah lokasi pengeboran;
- Kurangnya teknologi ata hasil penelitian geolistrik dan logging test agar sesuai standar baku mutu;
- Masih kurangnya tenaga terampil untuk mengoperasikan peralatan pengeboran;
- Anggaran dialihkan ke dalam program prioritas Pemerintah Kota;
- Banyaknya item pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum sehingga membutuhkan waktu dalam pembentukan etalase harga pada proses e-katalog, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Faktor pendorong yaitu ; Adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat akan kebutuhan air bersih.

Tindak lanjut yaitu:

- Perlu dilakukan percepatan dalam evaluasi penetapan penyedia oleh pihak ULP;
- Mengupayakan teknologi ataupun hasil penelitian geolistrik dan longging test yang lebih akurat untuk memastikan hasil debit air dan kualitas air agar sesuai standar baku mutu;
- Perlunya pengalokasian anggaran dalam pembebasan lahan untuk pembangunan sarana air bersih.

C. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Indikator kinerja program adalah Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target kinerja 100%. Alokasi anggaran sebesar Rp. 19.285.026.700,- Realisasi kinerja hingga triwulan IV sebesar 89.63% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.179.976.908,- atau 78.71 %.

Faktor Penghambatnya yaitu:

- Beberapa lokasi usulan pembangunan tangka septik individual berada di daerah pesisir sehingga membutuhkan konstruksi secara khusus;
- Masih kurangnya tenaga terampul pada pekerjaan air limbah;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya penyedotan lumpur tinja dan permintaan penyedotan lumpur tinja yang masih berskala kebutuhan atau by order;
- Anggaran baik dari segi APBD maupun APBN mempunyai syarat dalam penentuan calon penerima manfaat sehingga penerapan SPM tidak maksimal;
- Anggaran dialihkan ke dalam program prioritas Pemerintah Kota;
- Terdapat 9 perusahaan swasta dengan jumlah 12 Unit Armada yang melakukan jasa penyedotan di Makassar sehingga permintaan jasa layanan penyedotan lumpur tinja UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mengalami pengurangan.

Faktor pendorong yaitu; Adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat terkait pelaksanaan/kegiatan sanitasi.

Tindak lanjut yaitu:

- Mematangkan perencanaan, SDM dan anggaran sehingga semua kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan target.
- Melakukan koordinasi yang intens baik di internal Dinas PU maupun eksternal serta stakeholder terkait percepatan pelakasanaan kegiatan.

D. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator kinerja program terdiri dari persentase drainase dalam kondisi baik dengan target kinerja 92,65 %; dan persentase titik genangan yang dikurangi dengan target kinerja 89,41%; Alokasi anggaran sebesar Rp. 74.387.910.242,- capaian kinerja hingga sampai triwulan IV sebesar 58.38 %, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.003.463.968,- atau sebesar 91.42%, persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 74.56 % dan persentase titik genangan yang dikurangi 42.19%.

Faktor Penghambat yaitu:

- Jumlah satgas yang terbatas sehingga menyebabkan pengerjaan sedikit mengalami kendala;
- Armada mobil pengangkutan satgas yang mengalami kerusakan mengakibatkan penanganan menjadi terhambat.

Faktor pendorong yaitu:

- Adanya kesadaran dan dukungan dari masyarakat akan pentingnya pemeliharaan saluran drainase yang semakin meningkat;
- Perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah tersusun dan terjadwal;
- Kesiapan petugas operasional di lapangan (satgas);
- Pelayanan yang cepat dari setiap aduan masyarakat baik melalui call center maupun media sosial.

Tindak lanjut yaitu;

- Melakukan penambahan jumlah satgas;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama yang intens antar Dinas PU dengan pemerintah setempat;

- melakukan koordinasi yang intens baik di internal Dinas PU maupun eksternal serta stakeholder terkait percepatan pelaksanaan kegiatan.

E. Program Penataan Bangunan Gedung.

Indikator kinerja program yaitu Persentase Kebutuhan Gedung Pemerintah yang Terbangun dengan target kinerja 68.52%. Alokasi anggaran sebesar Rp. 167.285.051.839,- Realisasi kinerja hingga sampai pada triwulan IV sebesar 65.72% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 126.420.055.177,- atau sekitar 75.57%.

Faktor Penghambat pada program ini yaitu:

- Waktu yang tersedia untuk kegiatan APBD Perubahan tidak mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan.
- Kurangnya jumlah tenaga kerja dan kendala pengiriman material on site serta belum ditemukannya titik eksisting untuk pengerjaan utilitas plumbing menjadi penyebab pengerjaan Tower Balaikota Tahap II tidak dapat selesai tepat waktu.

Faktor pendorong yaitu: anggaran yang tersedia; adanya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder terkait.

Tindak lanjut yaitu: Melakukan penganggaran kembali di tahun 2025; dilakukan koordinasi yang intens baik internal dinas pu maupun eksternal serta stakeholder terkait percepatan pelaksanaan kegiatan.

F. Program Penyelenggaraan Jalan.

Indikator kinerja program terdiri dari Tingkat Kemantapan Jalan Kota dengan target kinerja 93,01% dan indikator persentase panjang trotoar terhadap panjang jalan dengan target kinerja 5%. Alokasi anggaran sebesar Rp. 378.506.635.642,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 241.675.970.196,- atau sekitar 63.85 %. Adapun capaian kinerja hingga triwulan IV sebesar 60.75%.

Faktor Penghambat program ini yaitu :

- Adanya lokasi yang sulit untuk diakses sehingga menyulitkan kendaraan proyek untk bermanuver;
- Pada pengerjaan Ducting Sharing masih terkendala lokasi yang belum jelas karena mesti melihat kondisi eksisting jalan dan mengaitkan dengan faktor penghalang seperti adanya jaringan IPAL Losari;
- Belum adanya informasi lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi terkait ketidakjelasan kerjasama dan lokasi pasti pembangunan jalan akses menuju Stadion KOR Sudiang;

Faktor Pendorong yaitu:

- Proses pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung dengan baik karena adanya dukungan dari pihak pelaksana, masyarakat serta stakeholder yang terkait;
- Adanya kesiapan tenaga operasional (satgas) di lapangan;
- Pelayanan yang cepat (Quick respon) dari setiap pengaduan masyarakat baik melalui call center maupun media social.

Tindak lanjut yaitu:

- Melakukan pematangan dalam menyusun dokumen perencanaan SDM dan anggaran sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan,
- Melakukan penganggaran kembali pada pekerjaan yang tidak terlaksana di tahun berikutnya.
- Melakukan koordinasi yang intens baik internal dinas PU maupun eksternal serta stakeholder terkait percepatan pelaksanaan kegiatan.

G. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Indikator kinerja program yaitu Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan target kinerja 29,44 %. Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.434.068.900,-. Realisasi kinerja hingga triwulan IV tahun 2024 sebesar 59.99% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 853.130.767,- atau sekitar 59.49%.

Faktor Penghambatnya yaitu: masih kurangnya SDM tenaga operator/analis/tenaga konstruksi yang terampil bersertifikat, masih kurangnya peserta disebabkan masih adanya tenaga konstruksi yang kurang berminat untuk mengikuti pelatihan.

Faktor Pendorong yaitu:

- Adanya kebutuhan ketersediaan tenaga operator/analisis/tenaga konstruksi yang terampil dan bersetifikat kompetensi;
- Adanya kebutuhan ketersediaan Tim Pengawas Konstruksi yang terampil dan bersetifikat kompetensi;
- Adanya koordinasi yang baik dan dukungan dari pihak Balai Jasa Konstruksi Wil. VI Makassar, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Makassar.

Tindak lanjut yaitu: melakukan sosialisasi yang lebih intens tentang pentingnya peningkatan pengetahuan atau sertifikasi, Dilakukan pelatihan-pelatihan yang lebih menarik peminat bagi tenaga konstruksi, dilakukan koordinasi yang intens baik internal dinas pu maupun eksternal serta stakeholder terkait percepatan pelaksanaan kegiatan.

H. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Indikator kinerja program adalah Persentase Rasio Luas Kawasan permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian Banjir diwilayah sungai kewenangan kota dengan target kinerja 89,15%, dan Rasio Luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, Erosi dan akresi yang terlingdungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai kewenangan kota dengan target kinerja 97,87%. Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.505.386.199,- Realisasi kinerja hingga sampai triwulan IV tahun 2024 sekitar 77.82% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.289.949.728,- atau sekitar 91.40 %.

Faktor Penghambatnya yaitu: Proses/tahapan berjalan dengan baik (terlaksana)

Faktor pendorong yaitu; Respon positif dari masyarakat; Koordinasi dengan pemerintah setempat yang terjalin baik.Tindak lanjut yaitu: Koordinasi lebih intens dengan pemerintah setempat dan stakeholder terkait.

4. DINAS PENATAAN RUANG

A. Program Penataan Bangunan Gedung

Capaian Kinerja pada Program Penataan Bangunan Gedung pada tahun 2024 sebesar 75,00% , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.189.775.370,- dari pagu sebesar Rp 1.287.720.900 atau sebesar 92.39% . Pada Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Capaian Program Penataan Bangunan Gedung dipengaruhi oleh 2 faktor serta tindak lanjut. Yaitu:

Faktor Pendorong: Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tentang Bangunan Gedung, Pelaksanaan PBG dan SLF melalui SIMBG telah dilaksanakan, ketersediaan Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung dalam mendukung PBG dan SLF melalui SIMBG.

Faktor Penghambat:

Masih minimnya informasi mengenai persyaratan PBG dan SLF melalui SIMBG di Masyarakat, Pemohon PBG dan SLF melalui SIMBG masih kesulitan dalam pemenuhan persyaratan sesuai standar teknis serta keterbatasan pemakaian jasa tenaga perancang bangunan (Arsitek) yang berkualifikasi dalam pemenuhan syarat gambar perencanaan, dan minimnya SDM Tenaga Teknis SKPD yang kualified dalam memeriksa permohonan

PBG dan SLF melalui SIMBG.

Tindak Lanjut:

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sosialisasi masyarakat mengenai SIMBG dan persyaratan Administrasi PBG dan SLF, Melakukan pra konsultasi dengan pemohon sebelum mengupload berkas permohonan ke SIMBG, Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM teknis untuk Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) dan Penilik Bangunan Gedung.

B. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Capaian Kinerja pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2024 sebesar 92,75%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.349.712.228,- dari total pagu sebesar Rp 12.341.981.900.- atau sebesar 91.96% . Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dipengaruhi oleh 2 faktor serta tindak lanjut. Yaitu :

- **Faktor Pendorong:** Dukungan Pelaksanaan Aturan dan Perundang-undangan Mulai UU, PP sampai dengan Perda, acuan dalam pelayanan perizinan berbasis (OSS) Online Single Submission, Sumber PAD.

Faktor penghambat: Minimnya SDM dan Tenaga Ahli Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta Penyelenggaraan Penataan Ruang, Minimnya sarana prsarana pendukung pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruangt, masih minimnya informasi ke Masyarakat tentang peralihan KRK menjadi PKKPR yang berbasis Sistem, Masyarakat masih kurang memahami penggunaan system OSS, minimnya tenaga pendampingan teknis terkait OSS, Sistem informasi dinas penataan ruang sebagai wadah informasi dan komunikasi belum terpakai secara umum di Masyarakat maupun SKPD lainnya tentang penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pelanggaran ruang.

Tindak lanjut: Percepatan Penyusunan dan Penetapan Perwali tentang RDTR sebagai bagian kemudahan system dalam OSS, peningkatan SDM dan Tenaga Ahli bidang penyelenggaraan penataan ruang, Koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan penataan ruang, Melakukan Sosialisasi pada kecamatan/kelurahan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai diharapakan bisa melanjutkan informasi tersebut pada masyarakat setempat, Melakukan Sosialisasi pada kecamatan/kelurahan tentang PKKPR dan penggunaan Website/laman OSS, diharapakan bisa melajutkan informasi tersebut pada masyarakat setempat, Melakukan Sosialisasi pada kecamatan/kelurahan tentang keberadaan Sistem Informasi Penataan Ruang.

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebesar 87.80% , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.991.618.286.- dari pagu sebesar Rp 17.313.355.456.- atau sebesar 86,59%. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Faktor pendorong: akuntabilitas dan kuaitas kinerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan meningkat dari tahun sebelumnya. Serta dukungan Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyrakat.

Faktor penghambat:

Masih kurangnya anggaran pelatihan dan Bimtek dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah

Tindak lanjut: memaksimalkan sumber daya yang ada dan menambahkan alokasi anggaran dalam pelaksanaan pelayanan untuk peningkatan kualitas kinerja serta

peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan dalam mendukung administrasi penyelenggaraan urusan penataan ruang.

5. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Tahun 2024 memuat 5 (lima) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.447.264.987,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 29.297.309.035,- atau 90,78%.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.797.054.942,- Realisasi anggaran sebesar 12.870.343.611,- Atau 93.28 dengan capaian Kinerja Program sebesar 107,41%. **Faktor Pendorong:** Bersinerginya manejemen administrasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. **Faktor penghambat:** Perbedaan jenis barang di E-katalog dan daftar barang yang dibutuhkan. **Tindak lanjut:** meningkatkan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan secara optimal, menjaga sinergi manajemen administrasi, menyiapkan dengan segera dokumen kelengkapan kegiatan serta Tetap menjaga sinergi manajemen administrasi yang sudah ada.

B. Program Pengembangan Perumahan

Program ini terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2,947,532,180,- Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 2.639.143.991.- atau 89,54 %. Adapun capaian Program sebesar 71,93%. **Faktor Pendorong:** Adanya koordinasi yang cukup baik dalam SKPD untuk pelaksanaan program Pendataan Rumah Sewa. **Faktor penghambat:** Belum optimal kemampuan dan SDM dalam penanganan masalah sosial di lingkungan rusunawa. **Tindak Lanjut:** Peningkatan Kemampuan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan secara optimal.

C. Program Kawasan Permukiman

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11,335,564,645.-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 11.044.650.824,- atau 97,43 %. Dan Capaian Kinerja sebesar 152,97%. **Faktor penghambat:** Rendahnya Aksesibiltas Informasi Kawasan Permukiman yang terdampak kumuh akibat padatnya penduduk. **Faktor Pendorong:** Adanya Upaya Perangkat Daerah untuk mengurangi area kawasan permukiman kumuh dengan menkoordinasikan dan mensinkronisasikan pengendalian penataan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh. **Tindak lanjut:** Melaksanakan Koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka pengelolaan dan pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.

D. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 614.384.300,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 555.604.642,-atau 90,43% . dengan capaian Kinerja sebesar 144,63%. **Faktor Penghambat:** Belum optimalnya Koordinasi SKPD dengan pejabat setempat dalam pencengahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. **Faktor Pendorong:** Adanya Upaya Pemerintah Kota dalam mengurangi Kawasan kumuh perkotaan melalui DPKP sebagai stakeholder dengan program perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencengahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. **Tindak Lanjut:** Melaksanakan Koordinasi dengan Aparat Setempat dalam mengatasi masalah hak kepemilikan lahan sehingga perbaikan rumah tidak layak huni dapat dilakukan.

E. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.752.728.920,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp.2.187.565.967,- atau sebesar 79,47 %. Dengan capaian kinerja program sebesar 79,60%. **Faktor penghambat:** Mekanisme penyerahan prasana, sarana, dan utilitas perumahan kepada pemerintah kota dari pengembang. **Faktor Pendorong:** Adanya koordinasi yang cukup baik dalam SKPD untuk penyerahan prasana, sarana, dan utilitas perumahan kepada pemerintah kota dari pengembang. **Tindak Lanjut**: Tetap menjaga sinergi manejemen penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang dibebankan APBD pada anggaran Perubahan tahun 2024, sebesar Rp. 41.087.471.428. Realisasi anggaran sampai triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 37.555.602.947,- dengan persentase 91,40% yang terangkum dari 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Untuk melaksanakan semua kegiatan ini telah dianggaran belanja masing – masing yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dianggarkan sebesar Rp.10.442.217.328,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.011.731.249.- atau 86,30% dengan rata-rata capaian kinerja 97,43%.

Indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah : (i) Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas target 90% dengan capaian kinerja 100%. (ii) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah target 100% dengan capaian kinerja 92,3%. (iii) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik target 90% dengan capaian kinerja 100%.

Faktor Pendukung :

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Satpol PP dengan cara pendidikan dan pelatihan formal.
2. Pembinaan fisik mental, etika dan disiplin.
3. Pengadaan pakaian dinas lapangan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur.

Tindak Lanjut:

1. Memaksimalkan SDM yang ada.
2. Menganggarkan bimbingan teknis berdasarkan tugas dan fungsi.
3. Mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp. 30.645.254.100. Realisasi keuangan sebesar Rp. 28.543.871.698,- atau 90,14%.

Indikator program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut :

1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dengan target kinerja 100%. Berdasarkan pendataan di lapangan pada tahun 2023, jumlah warga negara yang berhasil didata yang berada Evaluasi Kinerja Triwulan 4 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar TA.2024 pada radius kurang 50 meter dari lokasi penegakan perda sebanyak 299 warga negara, semuanya harus terlayani dengan menjamin tidak ada warga negara yang mengalami kerugian material atau cidera akibat penegakan perda serta memberikan layanan ganti rugi materil atau pengobatan apabila ada warga negara yang terkena dampak.

2. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dengan target kinerja 100%. Sampai triwulan ke IV jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sebanyak 300 laporan dan terselesaikan dengan persentase 100%.
3. Persentase perda dan perkada yang ditegakkan dengan target kinerja 100%. Jumlah perda dan perkada yang akan ditegakkan tahun 2024 sebanyak 24 Perda dan Perkada. Sampai triwulan ke empat jumlah perda dan perkada yang ditegakkan sebanyak 244 dari 24 perda dan perkada.

Meskipun capaian kinerja program tersebut tinggi, tetapi masih terdapat beberapa catatan, antara lain:

Faktor Penghambat :

1. Belum adanya fasilitas bagi petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ditiap kelurahan seperti pakaian dinas lengkap.
2. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan Perwali yang masih kurang sehingga masih terus terjadi pelanggaran perda maupun perkada.
3. Adanya pembagian kewenangan yang berbasis resiko antara pemerintah kota dan provinsi dalam aturan perizinan OSS (*Online Single Submission*).
4. Kurangnya kesepahaman hukum oleh lembaga–lembaga Non Pemerintah / LSM terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Faktor Pendukung :

1. Pelaksanaan kegiatan adalah adanya kegiatan patroli rutin wilayah di seluruh kecamatan kota makassar untuk meminimalisir gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Tersedianya sarana dan prasarana dengan baik.
3. Adanya kebijakan pimpinan untuk membentuk Tim Penegakan Perda dan Perwali yang melibatkan unsur TNI POLRI
4. Hubungan koordinasi dengan Instansi terkait telah terjalin dengan baik.

7. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu (1) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja sebesar 90% (2) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, (3) Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, dengan target kinerja sebesar 90%.

Tahun 2022, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 90% (100%), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% (100%) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 90% (100%).

- Tahun 2023, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 90% (100%), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% (100%) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 90% (100%).
- Tahun 2024, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 90% (100%), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% (100%) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 90% (100%). Jika dibandingkan terhadap target pada akhir periode RPJMD, tingkat capaian kinerja seluruh indikator mencapai 100%.

B. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran memiliki 2 (dua) indikator, yaitu (1) Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan target kinerja sebesar 100 % dan (2) Waktu tanggap (*respon time*) penanganan kebakaran, dengan target kinerja sebesar 15 menit.

Tahun 2022, realisasi kinerja indikator persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 100% (100%). Realisasi indikator waktu tanggap (*respon time*) penanganan kebakaran sebesar 15 menit (100%).

Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 100% (100%), realisasi kinerja indikator waktu tanggap (*respon time*) sebesar 15 menit (100%). Jika dibandingkan terhadap target pada akhir periode RPJMD, tingkat capaian kinerja seluruh indikator mencapai 100%.

Tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tetap tercatat 100%, dengan waktu tanggap (respon time) sebesar 15 menit, yang juga tercapai 100%.

Tahun 2024 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 70.035.482.445,-, terealisasi sebesar Rp. 65.522.832.500,- atau 93,56 %. Jika dibandingkan terhadap capaian kinerja akhir periode RPJMD (tahun 2026), tingkat realisasi anggaran hingga tahun 2024 sebesar Rp. 156.619.980.071,- atau 11,87 %.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program penunjang dan program pencegahan, penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan non-kebakaran meliputi keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran, dan kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, kemacetan dan kondisi wilayah yang padat serta luasnya area yang harus dijangkau menjadi kendala, terutama dalam memastikan armada dapat sampai tepat waktu ke lokasi kejadian, khususnya di daerah yang jauh atau sulit dijangkau. Sementara itu, faktor pendorong yang ada adalah dukungan dari pemerintah, adanya kebijakan yang mendukung, serta peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, optimisasi anggaran, serta memperbaiki koordinasi antar lembaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Di sisi lain, perlu adanya penambahan armada yang lebih memadai dan peningkatan infrastruktur transportasi guna memperlancar akses ke wilayah yang lebih jauh, sehingga respon terhadap kebakaran dapat lebih cepat dan efektif

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.929.563.510,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 16.914.813.459,- atau (89,36%). Penjelasan Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 diuraikansebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 9.601.384.810,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp 8.019.419.159,- (83,52%). Dan capaian Indikator programnya adalah:

- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik. Rata-rata capaian100% dengan predikat kinerja tinggi.
- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat

Daerah.Rata-rata capaian kinerja 100% dengan predikat kinerja tinggi.
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas. Rata-rata capaian kinerja 100% dengan predikat kinerja tinggi.

Faktor Pendukung :
- Dokumen Perencanaan memiliki jadwal yang dijadikan acuan bagi setiap SKPD untuk menyelesaikan laporan tepat waktu
- Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah merupakan kegiatan yang wajib tepat waktu dilaksanakan

B. Program Penanggulangan Bencana

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 9.328.178.700,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp 8.895.394.300,- (95,36%). Dan capaian kinerja sebesar 100% target yang ditetapkan 100%:
- Jumlah warga Negara Yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Rata- rata capaian kinerja 100% dengan predikat kinerja tinggi.
- Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Rata-rata capaian kinerja 100% dengan predikat kinerja tinggi.
- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana. Rata-rata capaian kinerja 100% dengan predikat kinerja tinggi

Faktor Penghambat: Capaian target kinerja Kegiatan tersebut terealisasi dengan baik disebabkan sub kegiatan yang mendukung kegiatan sudah terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.

9. DINAS SOSIAL

Pada tahun 2024, Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan. Dari keseluruhan total program, terdapat 5 (enam) program utama dan 1 (satu) program penunjang/pendukung. Besaran anggaran setelah yang dikelola Dinas Sosial Kota Makassar yaitu Rp. 20.413.943.112,-. Untuk Triwulan IV realisasi keuangan adalah 86,08% yaitu Rp. 17.572.854.001,-, dengan capaian kinerja sebesar 97,24%.

A. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan indikator capaian yaitu persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan sosial dan target kinerja yaitu 100%. Anggaran pada program ini yaitu sebesar Rp. 2.365.005.650,-. Realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 2.051.314.180,- atau 86,74%. Capaian kinerja hingga triwulan IV yaitu 99,84% dengan rincian sebanyak 10 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang divalidasi oleh tim pengawasan dan validasi kelembagaan dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah ke pusat pertokoan sebagai pelaksana undian gratis berhadiah dari target 30 Dokumen terealisasi (30 Dokumen).

Faktor Pendorong :

1. Terdapat tim validasi dan verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang telah melaksanakan tugas sejak awal tahun.

Tindak Lanjut :

1. Menyelesaikan proses pengadaan barang bantuan
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

B. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 20 sub kegiatan, dengan indikator capaian berupa Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti dengan target kinerja 100%. Anggaran program ini yaitu Rp. 3.457.364.150,-. Realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 3.146.915.910,- atau 91,02%. Adapun capaian kinerja berupa Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti yang diperoleh pada Triwulan II yaitu 100%
.

Faktor Pedukung :

1. Terdapat 4 (empat) reaksi cepat yaitu Tim penertiban ODGJ, tim penertiban anak jalanan dan gelandangan pengemis, tim penjangkauan lansia terlantar dan tim Kupu-kupu Malam (KUMAL).
2. UPTD RPTC telah memiliki 7 (tujuh) orang pekerja sosial yang menangani PMKS terlantar.
3. Telah dilaksanakannya POSKO Anjal dan Gepeng.
4. Semua pengaduan terkait PMKS langsung ditindaklanjuti oleh tim reaksi cepat Dinas Sosial.
5. Saat ini UPTD Rumah Perlindungan dan Trauma Center telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan memiliki pekerja sosial profesional yang bertugas memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada klien serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasan klien seperti makanan dan sandang

Tindak Lanjut:

1. Menambah personil pekerja sosial.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar.
3. Mengoptimalkan kegiatan posko di titik-titik rawan anak jalanan.

C. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini dalam Renja tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp.2.134.149.900,- dan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.1.727.941.594 atau sebesar 80,97%. Adapun rincian yaitu pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota sebanyak 22.366 orang, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan sosial kesejahteraan keluarga sebanyak 907 keluarga, fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat sebanyak 100 keluarga, dan sebanyak 23.714 KK mengalami pemutakhiran pada Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Faktor Penghambat :

1. Untuk kegiatan pemberian bantuan ekonomi produktif masih minim disesuaikan dengan anggaran tersedia.

Faktor Pendukung :

1. Terlaksananya musyawarah kelurahan di seluruh Kelurahan Kota Makassar sehingga dapat dilakukan pemutakhiran DTKS.
2. Pelaksanaan bantuan warung untuk masyarakat miskin berjalan lancar.

Tindak Lanjut :

1. Musyawarah kelurahan akan dilaksanakan secara mandiri oleh Kelurahan dan dapat melakukan usulan perbaikan DTKS setiap bulan.
2. Mengoptimalkan pendataan fakir miskin.

.

D. Program Penanganan Bencana

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan indikator capaian yaitu Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat

dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota dan target kinerja yaitu 100%. Jumlah anggaran pada program ini yaitu Rp.1.256.927.000,- Realisasi anggaran pada triwulan IV yaitu Rp. 915.898.675,- atau 72,87% dengan capaian kinerja hingga triwulan IV yaitu 100%.

Faktor Penghambat : Pada belanja penyediaan permakaman sudah minim sehingga perlu diantisipasi.

Faktor Pendukung : Semua laporan bencana ditindaklanjuti oleh tim sesuai dengan kriteria bencana yang terlaporkan dan masih adanya stok bantuan bencana dari Kementerian Sosia sehingga beberapa belanja bantuan seperti bantuan sandang, perlengkapan penampungan pengungsi dan paket khusus kelompok rentan.

Tindak Lanjut : Mempersiapkan realisasi belanja yang belum direalisasikan.

E. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan indikator capaian yaitu Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik dan target kinerja yaitu 1 Lokasi. Anggaran program ini pada Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 497.893.200,-. Realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 452.269.400,- atau 90,84%.

Faktor Pendukung : Semua kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Tindak Lanjut : Mempersiapkan kegiatan yang sama untuk tahun selanjutnya.

F. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pada APBD 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 10.702.603.012,-. Realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 9.278.514.252,- atau 98,82% dengan capaian kinerja hingga triwulan IV yaitu : (i) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja 90% dan hingga triwulan IV capaian kinerja yaitu 86,67%. (ii) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% dan hingga triwulan IV capaian kinerja 92,50%. (iii) Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dengan target kinerja 90% dan hingga triwulan IV capaian kinerja 87,50%.

Faktor Penghambat : Pelaksanaan belanja modal / aliran kas mengalami perubahan anggaran pada triwulan IV.

Tindak lanjut : Semua proses belanja barang dan jasa sesuai dengan aliran kas perubahan yang tersedia.

10. DINAS KETENAGAKERJAAN

Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dalam 5 Program yang dijabarkan dalam 20 Kegiatan dan 59 subkegiatan. Total dana yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2024 adalah Rp.24.553.916.761,-. Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2024 sebesar Rp.23.127.123.227,- atau 94,19 persen. Rata-rata capaian target kinerja 5 program tahun 2024 sebesar 99,93 persen atau berkinerja sangat tinggi (91≤ 100%).

Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.11.534.696.861,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.841.500.863,- atau sebesar 93,99 persen.

Adapun analisa capaian indikator kinerja program di atas sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Dari target 90 persen Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 90,16 persen atau dengan capaian sebesar 100,18 persen. Dimana dari 61 unit sarana dan prasarana aparatur lingkup Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 55 sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100,00 persen dimana dari 12 laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 12 laporan; dan
- Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 93,44 persen atau dengan capaian sebesar 103,83 persen. Dimana dari 61 ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 57 ASN mendapatkan peningkatan kapasitas.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dalam rangka pemenuhan kebutuhan unit kerja.

Adapun beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

- Ketersediaan anggaran;
- Komitmen pimpinan dan ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

Peningkatan kapasitas aparatur untuk menunjang penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan pelayanan Ketenagakerjaan.

B. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.149.040.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.122.217.815,- atau sebesar 82,00 %.

Adapun analisa capaian indikator kinerja program di atas sebagai berikut :

Dari target 96,77 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja terealisasi sebesar 100 persen. Dimana dari 11 kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Makassar yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja (RTK) terealisasi sebanyak 11 kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Masih minimnya kesadaran perusahaan dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja :

- Telah tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar Tahun 2022-2026; dan
- Terbentuknya Forum HRD.

Adapun tindak lanjut antara lain :

- Lebih melibatkan Forum HRD yang sudah di bentuk dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;

Sosialiasai Kebijakan yang tertuang Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar tahun 2022-2026.

C. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.3.698.283.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.615.917.040,- atau sebesar 97,77 persen.

Adapun analisa capaian indikator kinerja program di atas sebagai berikut :

- Dari target 1,03 persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi terealisasi sebesar 1,40 persen atau dengan capaian sebesar 135,92 persen, dimana sebanyak 8.782 orang tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari 629.183 orang tenaga kerja keseluruhan;
- Dari target 22,00 persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 24,06 persen atau dengan capaian sebesar 109,36 persen, dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp.140.197,90 (dalam milyar rupiah) dari 582.708 jiwa tenaga kerja; dan
- Dari target 1.190 Orang Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan terealisasi sebanyak 862 orang atau dengan capaian sebesar 72,44 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;
- Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja:

- Adanya Program Strategis Wali Kota “10.000 Skill Training Gratis” dengan memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan pengembangan produktivitas.
- Adanya LPK binaan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pelatihan;
- Kerjasama dengan BLK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Adanya Kerjasama dengan ADB pada Program Job Start;

Adapun tindak lanjut :

- Melakukan evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan;
- Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan;
- Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
- Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk peningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna;
- Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP.

D. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.1.803.790.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.553.795.169,- atau sebesar 86,14 persen.

Adapun analisa capaian indikator kinerja program di atas sebagai berikut :

- Dari target 65 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar terealisasi sebesar 63,01 persen atau dengan capaian sebesar 96,94 persen. Dimana dari 3.758 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 2.368 orang; dan
- Dari target 9.555 peluang kerja dan bisnis baru terealisasi sebesar 7.795 peluang kerja atau dengan capaian sebesar 81,58 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Dalam penempatan tenaga kerja belum dilaksanakan secara optimal karena masih kurangnya PNS penjabat fungsional pengantar kerja;
- Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal dan Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor

informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal; dan
- Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja.

Adapun beberapa faktor pendorong :
- Melakukan jemput bola dengan lowongan pekerjaan di perusahaan;
- MoU dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas dalam pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK);
- Pengembangan jejaring informasi pasar kerja melalui aplikasi Info Kerja Makassar yang dapat di unduh pada google playstore.

Adapun tindak lanjut :
- Akan membentuk regulasi tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja dan penggunaan tenaga kerja local;
- Akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan mengoptimalkan kegiatan pelayanan Penempatan Tenaga kerja;

Penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

E. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.7.368.105.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.993.692.340,- atau sebesar 94,92 persen.

Adapun analisa capaian indikator kinerja program di atas sebagai berikut ::
- Dari target 38,50 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak terealisasi sebesar 39,45 persen atau dengan capaian sebesar 102,47 persen. Dimana dari 2.299 perusahaan yang memiliki tenaga kerja melebihi 10 orang yang berada di Kota Makassar sebanyak 907 perusahaan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak (Memiliki PP/PKB. Peserta BPJS dan LKS Tripartit);
- Dari target 3,66 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun terealisasi 2,82 persen atau dengan capaian sebesar 122,85 persen. Perlu diketahui indikator ini bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Dimana sebanyak 164 kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan dari dari 5.808 perusahaan; dan
- Dari target 79 Persen Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 63,41 persen atau dengan capaian sebesar 80,27 persen. Dimana dari 614 kasus yang dilaporkan sebanyak 104 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:
- Tingginya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran menyebabkan angka sengketa hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja masih tinggi;
- Selain itu, dalam penyelesaian kasus hubungan industrial terjadi peningkatan dengan anjuran (tidak terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pekerja yang bersengketa) sehingga kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mengalami penurunan; dan
- Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Hubungan Industrial tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :
- Terbentuknya LKS Tripartit yang setiap bulan melakukan rapat kerja terkait isu-isu Ketenagakerjaan;

- Terbentuknya Dewan Pengupahan.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

a. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
b. Penambahan Pejabat Fungsional Mediator.

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja sebagimana dituangkan kepada DPA Pokok mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 14.952.637.139,- dan mendapat alokasi anggaran di perubahan sebesar Rp 13.287.224.268 adapun target kinerja di Tahun 2024 adalah 100 % dengan Realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 dan sebesar Rp. 12.563.315.249,- adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 94,55 % dengan capaian kinerja 98,43% yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dengan rincian realisasi masing – masing program sebagai berikut.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota beserta kegiatannya dengan Anggaran sebesar Rp 6.226.664.648,- dan target kinerja 100% dan pada triwulan keempat telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 5.783.360.020,- atau capaian realisasi keuangan 92,88 % dan capaian realisasi kinerjanya terdiri dari : (i) persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik capaian kinerja nya ditriwulan keempat 99,79%. (ii) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja di triwulan keempat sebesar 99,29%. (iii) Persentase ASN Perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebesar 100%.

FAKTOR PENDORONG :

1. perencanaan dan pengelolaan yang baik
2. evaluasi dan pemantauan oleh pimpinan
3. pengawasan dan pengendalian
4. pengembangan kemampuan SDM
5. kemampuan adaptasi dengan perubahan yang mana ada nya perubahan sistem dan aplikasi

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Keterbatasan akses internet yang terkadang dapat menghambat pelaporan dan evaluasi kinerja
2. Sarana dan prasarana perkantoran

RENCANA TINDAK LANJUT :

1. Evaluasi program secara berkala
2. pemantauan progres dan hasil
3. melakukan kembali analisis data yang telah dicapai tahun lalu
4. mengembangkan peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan
5. mengadakan fasilitasi sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor

B. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. **1.038.740.400**,- dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. **978.748.900 ,-** dan capaian realisasi keuangan **94,22 %** yang mana ditahun 2024 target kinerja adalah **70 %** dan realisasi kinerja **55 %** dengan capaian kinerja sebesar **75%**

Didalam program pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan yang mana indicator kinerja program tersebut adalah presentase anggaran responsive gender pada belanja langsung APBD yang kegiatan-kegiatannya diarahkan semua OPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar haruslah anggarannya sudah responsive gender yang artinya anggaran yang merespon kebutuhan permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk kesetaraan gender hal ini didukung oleh kegiatan-kegiatan yaitu adanya sosialisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pelaksanaan bimbingan teknis bagi OPD untuk Perencanaan Peanggaran Responsive Gender (PPRG).

Namun dalam hal Anggaran yang responsive gender SPKD telah melakukan coucing clinik yang mana setiap SKPD anggarannya sudah responsive gender dikarenakan renja SKPD telah melakukan analisis gender dalam semua program dan kegiatannya. Di tahun 2024 Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak melakukan Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender dalam hal ini pada tabel dibawah ini menjelaskan adanya alat yang dilakukan SKPD dalam menganalisa program dan kegiatan dengan menggunakan alat analisis GAP/GBS (Gender Analisis Pathyway / Gender budget statement) yang mana hanya sebahagian program dan kegiatan yang dianalisis. Namun dalam segi ARG (Anggran Responsive Gender) dalam hal Renja SKPD telah melakukan keseluruhan program dan kegiatannya .

Program Pengarusutaamaan gender dari segi pemberdayaan perempuan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan pendapatan perempuan yang mengarah kepada edukasi kepada perempuan untuk mengurangi ketimpangan gender.

FAKTOR PENDUKUNG :

1. Pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan
2. Ketersediaan Sumber daya , dan anggaran
3. Perencanaan dan pengelolaan yang baik

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Masih adanya SKPD yang belum semuanya memasukkan Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Analisi Anggaran Responsive Gender

RENCANA TINDAK LANJUT :

1. Tindak lanjutnya hasil dari kegiatan tahun lalu di evaluasi untuk bahan atau dasar dalam melakukan perencanaan
2. Perlunya penguatan pokja PUG
3. Peningkatan Kapasitas berupa Bimtek PPRG dan PUG perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.
4. Merevisi kembali RAD PUG yang ada menjadi RAD Tahunan dan Lima Tahunan
5. Peningkatan Pemberdayaan perempuan di kota makassar dengan melibatkan NGO dan Steakholder di bidang pemberdayaan perempuan kedalam Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP).

C. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.740.631.200,- dan target kinerja adalah 81,18 %. Realisasi anggaran pada triwulan keempat ini sebesar Rp. 1.690.109.000 atau sebesar 97,10% dan realisasi kinerja sebesar 81,18%. Yang mana capaian kinerja sebesar 100%

FAKTOR PENDUKUNG :

1. Kebijakan dan peraturan yang mendukung perlindungan perempuan seperti aturan perundang-undangan dan perda

2. Sumber daya ketersediaan anggaran, fasilitas dan personil yang terlatih
3. Kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program perlindungan perempuan
4. Kemitraan: Kemitraan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan swasta dalam mendukung program perlindungan perempuan
5. Akses layanan oleh unit layanan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPPA

RENCANA TINDAK LANJUT :

1. **Evaluasi dan pemantauan :** melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap program perlindungan perempuan secara berkala
2. **Peningkatan kapasitas:** melakukan pelatihan dan Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas staf dan mitra, mengembangkan kurikulum pelatihan yang efektif, mengadakan workshop dan seminar untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan
3. **Pengembangan jaringan :** mengembangkan jaringan dengan organisasi lain , mengembangkan Kerjasama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, mengadakan pertemuan dan diskusi untuk meningkatkan dan kemampuan
4. **Peningkatan kesadaran masyarakat :** mengembangkan strategi peningkatan kesadaran masyarakat yang efektif, mengadakan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung program, mengembangkan kerja sama dengan media dab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

D. Program Pengelolaan Sistem Data Gender

Dalam mendukung pelaksanaan Program Pengelolaan Sistim Data Gender dan Anak beserta kegiatannya dengan Anggaran sebesar Rp**. 131,604.800,-** dan telah direalisasikan anggaran sebesar **Rp 128.750.000** capaian realisasinya keuangan sebesar 97,83%, dan capaian kinerja sebesar **100%.**

Pada program pengelolaan system data gender dan anak yang mana capaian program adalah Presentase data Pengarusutamaan gender Anak yang tersedia. Dalam program pengelolaan system data gender dan anak yang kegiatannya adalah penguatan forum data, pemyediaan data gender dan anak serta workshop analisis data dan pengelolaan system data gender dan anak

FAKTOR PENGHAMBAT :

Sarana dan prasarana dalam pengelolaan system dan gender dan anak yaitu keterbatasan akses ke tekhnologi seperti computer dan internet

FAKTOR PENDUKUNG :

1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung system pengelolaan data gender dan anak
2. Peningkatan kualitas data di OPD terkait dalam mengelola data gender dan anak
3. Tekhnologi, pennggunaan tekhnologi dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan data

RENCANA TINDAK LANJUT :

1. **Evaluasi dan pemantauan :** melakukan evaluasi dan pemantauan system data gender dan anak secara berkala
2. **Pengembangan kapasitas :** melakukan pengembangan kapasitas dalam hal pelatihan dan Pendidikan untuk meningkatkan staf dan mitra dan melakukan workshop dan seminar untuk kwalitas data gender dan anak.
3. Pengembangan system informasi dan efektif untuk pengelolaan system data gender dan anak dalam memastikan keakuratan data
4. Kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah, organisasi pemerintah dan masyarakat

E. Program Pemenuhan Hak Anak

Dalam mendukung pelaksanaan Program Pemenuhan Hak Anak beserta kegiatannya, anggaran sebesar **Rp 992.606.900** dengan realisasi anggaran **Rp 985.104.000** dengan presentase keuangan 99,24 % dan presentase capaian kinerja nya adalah **100 %**

Pada program pemenuhan hak anak program ini juga menjadi Program Prioritas Walikota Makassar dalam Program Jagai Anak'ta dan adapun indicator kinerjanya adalah presentase kelurahan ramah anak yang mana pada kegiatan-kegiatan pada program pemenuhan hak anak untuk mendukung presentase kelurahan ramah anak adalah pembentukan forum anak di kecamatan dan kelurahan serta peningkatan kapasitas forum anak kecamatan dan kelurahan dan target kelurahan Pada Tahun 2024 adalah 17 Kelurahan dan di kelurahan ini dibentuklah Forum Anak untuk memenuhi indicator dalam Kelurahan Ramah Anak. Adapun 17 kelurahan antara lain:

1. Kelurahan Mangasa
2. Kelurahan Bonto Duri
3. Kelurahan Jongaya
4. Kelurahan Karampuang
5. Kelurahan Panaikang
6. Kelurahan Karuwis Utara
7. Kelurahan Tallo
8. Kelurahan Buloa
9. Kelurahan Lembo
10. Kelurahan Mariso
11. Kelurahan Panambungan
12. Kelurahan Kunjung Mae
13. Kelurahan Karunrung
14. Kelurahan Banta-Bantaeng
15. Kelurahan Bara-Baraya
16. Kelurahan Ende
17. Kelurahan Timungan Lompoa

Dalam presentase kelurahan ramah anak perlunya indicator terhadap kota layak anak yang mana item-itemnya menunjukkan ada 5 lima klister yaitu :

1. Klaster hak sipil dan kebebasan
2. Klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Klaster pendidkan dan pemanfaatan waktu luang
5. Kalster Kegiatan budaya dan perlindungan khusus

Dalam pencapaian indicator kota layak anak Dinas Pemberdayaan dan perlindungan anak Kota Makassar pada Tahun 2024 dalam meningkatkan program pemenuhan hak anak mempunyai beberapa kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain : Bimtek Konveksi hak anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam upaya kebijakan program, adanya kegiatan pencegahan bullying di sekolah dan perekrutan forum anak di 17 kelurahan.

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Sarana dan prasarana
2. Kurangnya koordinasi terkait implementasi program pemenuhan hak

FAKTOR PENDUKUNG :

1. Kualitas layanan dalam segi pemenuhan hak anak
2. Komitmen pemerintah dalam mendukung program pemenuhan hak anak
3. Partisipasi masyarakat dalam hal pemenuhan hak anak
4. Pengawasan dan evaluasi dapat membantu meningkatkan kualitas program
5. Ketersediaan sumber daya alam dan dukungan anggaran

TINDAK LANJUT :

1. Evaluasi dan pemantauan terhadap program pemenuhan hak anak secara berkala
2. Pengembangan kapasitas dalam melakukan pelatihan dan Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas staf dan mitra
3. Mengadakan workshop dan seminar untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan
4. Mengembangkan system informasi manajemen yang efektof untuk program pemenuhan hak anak
5. Kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah, non pemerintah, dan organisasi non pemerintah dalam hal pemenuhan hak anak
6. Mengembangkan rencana aksi dalam hal pemenuhan hak anak.

F. Program Perlindungan Khusus Hak Anak

Dalam mendukung pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak Anak beserta kegiatannya dengan Anggaran sebesar Rp. **2.605.455.920,-** dan telah direalisasikan anggaran sebesar **Rp. 2.473.630.529,-** atau **95,28%** capaian kinerja **100%**

Dalam mendukung indikator Program Perlindungan Khusus Anak yaitu presentase anak korban kekerasan yang terlayani dimana program perlindungan khusus anak ini mencakup ada 15 kriteria yaitu :

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, phisikotropika, dan zat adiktif lainnya
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV AIDS
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
9. Anak korban fisik dan psikis
10. Anak korban kejahatan dan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme
12. Anak penyandang disabilitas
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
14. Anak dengan prilaku sosial menyimpang
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Di tahun 2024 untuk mendukung program perlindungan khusus anak adalah mempunyai beberapa kegiatan antara lain : TOT dalam system perlindungan anak, kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), layanan spesifik untuk pemulihan korban, perlindungan khusus anak dalam situasi darurat, advokasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak disabilitas. Layanan psikososial anak memerlukan perlindungan khusus. Dan adanya layanan UPTD PPPA dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Masih kurangnya dukungan masyarakat dalam mengimplementasikan program perlindungan khusus anak
2. Keterbatasan koordinasi antar instansi
3. Masih terbatasnya pendampingan hukum dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

FAKTOR PENDUKUNG :

1. Komitmen Pemerintah: Komitmen pemerintah untuk mendukung program perlindungan khusus anak dapat membantu meningkatkan alokasi sumber daya dan dukungan politik.
2. Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya, seperti anggaran, personil, dan infrastruktur, dapat membantu mendukung implementasi program.
3. Kerja Sama dan Koordinasi: Kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.
4. Pengembangan Kapasitas: Pengembangan kapasitas staf dan mitra dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk mengimplementasikan program.
5. Teknologi: Penggunaan teknologi, seperti sistem informasi manajemen, dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

RENCANA TINDAK LANJUT :

1. Evaluasi dan Pemantauan: Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap program perlindungan khusus anak secara berkala.
2. Pengembangan Kapasitas: Melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas staf dan mitra.
3. Memperkuat Komitmen pemerintah untuk mendukung program perlindungan khusus anak dapat membantu meningkatkan alokasi sumber daya dan dukungan politik.
4. Memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan mensosialisasikan layanan UPTD PPPA ke masyarakat dan memberikan penguatan kepada korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Mengembangankan system informasi terkait perlindungan khusus anak
6. Menambah SDM dalam sector hukum untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

G. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 551.520.400,-** dengan Realisasi sebesar **Rp.523.612.800,-** realisasi keuangan **94,94 %** dan realisasi kinerja **98,36 %**

Pada program Peningkatan Kualitas Keluarga yang mana indicator programnya adalah Perempuan Kepala Keluarga Yang mendapatkan Pemberdayaan kegiatan-kegiatan yang mendukung indicator program peningkatan kualitas keluarga mempunyai 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Di Program Peningkatan Kualitas Keluarga didalam sub kegiatan adanya perempuan kepala keluarga yang mendapatkan pemberdayaan dalam segi hal edukasi untuk peningkatan ketahanan keluarga , pemberdayaan perempuan kepala keluarga miskin dan adanya juga kegiatan layanan yaitu layanan tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang mana Puspaga ini adalah lembaga yang menyediakan layanan bagi para orang tua agar dapat meningkatkan kualitas keluarga dalam hal mengasuh dan melindungi anak, mencegah terjadinya pernikahan anak , dan memberikan Pendidikan karakter pada anak. Dalam hal pencegahan pernikahan anak Lembaga puspaga ini memberikan Rekomendasi Nikah. Pada data Lembaga puspaga ini pada tahun 2024 untuk permintaan rekomendasi nikah berjumlah 19 orang dan ini permintaan rekomendasi nikah mengalami penurunan yang mana pada tahun 2023 berjumlah 51 orang.

FAKTOR PENGHAMBAT :

Dalam hal factor penghambat untuk pencapaian program peningkatan kualitas keluarga adalah tidak 100% capaian kinerja dikarena kan adanya peserta dalam hal peningkatan keluarga miskin tidak semuanya mengikuti kegiatan.

FAKTOR PENDUKUNG :

1. Pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan
2. Ketersediaan Sumber daya , dan anggaran

3. Perencanaan dan pengelolaan yang baik
4. peran serta masyarakat dalam hal peningkatan kualitas keluarga

RENCANA TINDAK LANJUT :

1. peningkatan SDM dalam hal Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
2. Sumber daya dan anggaran, serta sarana dan prasarana
3. jaringan kerjasama dengan lembaga lain
4. peatihan dan pengembangan pengasuhan positif kepada orang tua
5. Pengembagan kemampuan anak, kepemimpinan keluarga, dan pengembangan kapasitas ekonomi keluarga

12. DINAS KETAHANAN PANGAN

Tahun 2024 Dinas Ketahanan pangan merencanakan pelaksanaan sebanyak 5 (Lima) Program, 4 (Empat) Program utama dan 1 (Satu) Program Penunjang. Evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun 2024 telah melaksanakan 5 (Lima) Program,13 (Tiga Belas) Kegiatan, 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan. Selanjutnya, dari 5 (Lima) Program tersebut terdiri dari 1 (Satu) Program Penunjang/Pendukung yang didalamnya terdapat, 6 (Enam) Kegiatan, 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan dan 6 (Enam) program utama yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) Kegiatan, 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan,.

Dari 5 (Lima) Program yang dianggarkan di Tahun 2024, sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019, maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar mengerjakan 4 (Empat) Program Utama yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 disimpulkan dari 5 (Empat) program, dana yang dianggarkan berjumlah Rp.24.555.363.432 pada APBD Pokok, anggaran yang terealisasi berjumlah Rp.12.871.741.757 dan anggaran yang tersisa berjumlah Rp.3.018.970.913 Total persentase capaian kinerja dan anggaran adalah untuk realisasi kinerja/fisik 90.19 % dan realisasi anggaran 81%.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6 (Enam) Kegiatan dengan capaian kinerja 92,99%, capaian anggaran 82,64 % Dimana Presentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas 91%, Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah 80,10% dan Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 74,20%

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Pencairan Kegiatan yang bersifat rutin belum *on date* mengikuti keluarnya SPD dari BPKAD
- Proses Belanja e-catalogue yang memerlukan waktu dalam proses belanja

Adapun faktor pendorong sebagai berikut :

- Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang sifatnya rutin dikerjakan setiap bulannya.
- Dukungan sumber daya dan stakeholder terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

Adapun tindak lanjut sebagai berikut :

- Perencanaan pemanfaatan anggaran yang *on schedule* dan PPTK melaksanakan percepatan sesuai prosedur

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan capaian kinerja 100%, capaian anggaran 81,15% dan capaian indikator 100%.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Masih dalam tahap pengumpulan data Ketersediaan Pangan Utama

Adapun faktor pendorong sebagai berikut :

- Dukungan data Ketersediaan Pangan Utama dari penggilingan beras yang ada di Wilayah Kota Makassar

Adapun tindak lanjut sebagai berikut :

- Melakukan Koordinasi ke Provinsi Sulawesi Selatan dan ke Bapanas terkait dengan Ketersediaan Pangan Utama

C. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 6 (Enam) Sub Kegiatan dengan capaian kinerja 88,14%, capaian anggaran 80,76% dan capaian indikator 100%.Dimana pada Program ini mencakup Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata 283, Jumlah Skill Training Gratis 0, Ketersediaan Energi 2812, ketersediaan Protein 88,21 dan Skor PPH 0.

D. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan capaian kinerja 81,39%, capaian anggaran 57,13% dan capaian indikator 11,76%.

E. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan capaian kinerja 84,10%, capaian anggaran 68,15 % dan capaian indikator

13. DINAS PERTANAHAN

Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar dengan anggaran sebesar Rp. 11.653.504.767,- dan realisasi sebesar Rp. 8.426.049.061,- .Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 5 program yaitu : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 2) Program Pengelolaan Izin Lokasi, 3) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, 4) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dan 5). Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan. Adapun realisasi tiap program adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar.

Program ini memiliki tiga indikator yaitu :

- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja 90 % terealisasi 90 %.
- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% terealisasi 100%.
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dengan target kinerja 90% terealisasi 90 %.

Rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100 % yang didukung oleh anggaran sebesar Rp. 8.624.877.417,- dan realisasi sebesar Rp. 6.653.368.879,- atau 70,77%.

B. Program Pengelolaan Izin Lokasi.

Dalam program pengelolaan izin lokasi sub kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dalam Renja Pokok Dinas Pertanahan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha. Untuk tahun 2024 program ini tidak dijalankan karena pemberian izin sudah dialihkan ke Lembaga OSS sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi.

C. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Program ini memiliki 1 indikator yaitu Penanganan Sengketa Tanah garapan yang dilakukan melalui Mediasi dengan target kinerja 100% dan terealisasi 60%. Rata-rata tingkat capaian kinerja 60% dengan anggaran Rp. 118.218.150,- terealisasi Rp.65.245.000,- atau 55,19%.

Faktor Penghambat :

- Terdapat asset yang belum lengkap dokumen penguasaan fisiknya.

Tindak Lanjut:

Pembentukan tim penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan.

D. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

Program ini memiliki 1 indikator yaitu Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan dengan target kinerja 25% dan terealisasi 20%. Rata-rata tingkat capaian kinerja 80% dengan anggaran Rp. 155.911.700,- terealisasi Rp. 95.960.500,- atau 61,55%.

Faktor Penghambat :

Dalam proses pelaksanaan ditemui permasalahan sengketa lahan dan kepemilikan.

Faktor Pendorong :

Koordinasi antar stakeholder yang terjalin dengan baik

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan mediasi/pemahaman kepada masyarakat terkait permasalahan pertanahan.

E. Program Penatagunaan Tanah.

Program ini memiliki 2 indikator yaitu :

- Persentase aset tanah Pemerintah Kota yang disertifikatkan dengan target 56% terealisasi 35%.
- Persentase tanah Pemerintah Kota yang diamankan dengan target 64% dan terealisasi 35%.

Rata-rata tingkat capaian kinerja 58,60% dengan anggaran Rp. 2.754.497.500,- dan realisasi Rp. 1.611.474.682,- atau 58,59%.

Faktor Penghambat :

Belum optimalnya pemahaman instansi terkait penyusunan dokumen akan kebutuhan atas tanah

Faktor Pendorong :

Dinas Pertanahan berperan aktif memberikan supervisi kepada instansi terkait yang memiliki kebutuhan atas tanah.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Membangun pemahaman masyarakat terhadap Pengamanan Aset Pemerintah Kota Makassar melalui sosialisasi.

Berperan aktif memberikan supervisi kepada instansi terkait yang memiliki kebutuhan atas tanah.

14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2024 memuat 9 (sembilan) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 205.934.000.053,- (Dua Ratus Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.956.228.627,-

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu (1) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja sebesar 90% (2) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, (3) Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, dengan target kinerja sebesar 90%. Rencana alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp. 22.969.503.502,-dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 19.931.670.346,- Tahun 2022, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 90% (100%), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% (100%) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 90% (100%).Tahun 2023, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 90% (100%), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% (100%) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 90% (100%).

- Tahun 2024, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 90% (100%), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% (100%) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 90% (100%).

B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) indikator yaitu (1) Tersusunnya dokumen RPPLH Kota Makassar dengan target kinerja “ada”, (2) Terintergrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kota Makassar dengan target kinerja pada akhir tahun perencanaan “ada”. Rencana alokasi anggaran pada program ini sebanyak Rp. 943.800.100,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp.887.904.594,-

Tahun 2022 sampai tahun 2024 realisasi kinerja tersusunnya dokumen RPPLH Kota Makassar dan terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kota Makassar belum terealisasi.

Tahun 2022 dilakukan pengumpulan data sumber saya alam dan item-item penyusunnya. Tahun 2023, data-data hasil inventasrisasi dianalisis dan disusun dalam bentuk dokumen dan pemetaan. Tahun 2024, dilakukan asistensi dan verifikasi dokumen RPPLH, dan saat ini masih berada pada propemperda DPRD untuk rancangan peraturan daerah tahun 2025 Faktor penghambat utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah koordinasi dan sinkronisasi data dengan pihak eksternal yang membutuhkan waktu lama, sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Namun, terdapat beberapa faktor pendorong yang mendukung proses ini. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup memberikan dasar hukum yang jelas untuk setiap langkah yang diambil. Selain itu, dokumen Rencana Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sangat dibutuhkan sebagai instrumen hukum untuk perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar. Penyusunan dokumen ini juga merupakan kelanjutan dari kegiatan inventarisasi RPPLH yang telah dilakukan pada tahun 2023, yang memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan lingkungan di masa mendatang.

C. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup memiliki indikator (1) Indeks Kualitas Air dengan target kinerja pada akhir tahun perencanaan sebesar 60,11 dan (2) Indeks Kualitas Udara dengan target kinerja pada akhir tahun perencanaan sebesar 80,22. Rencana alokasi anggaran pada program ini sebanyak Rp. 4.865.399.840,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.027.579.953,-

Tahun 2022, realisasi kinerja Indeks Kualitas Air sebesar 56,67 (98%). Indeks Kualitas Udara 79,33 (101,42%). Tahun 2023, realisasi kinerja Indeks Kualitas Air sebesar 51,74 (88,29%). Indeks Kualitas Udara 79,44 (100,9%). Tahun 2024, realisasi kinerja Indeks Kualitas Air sebesar 58,70 (99,32%). Indeks Kualitas Udara 81,51 (103%).

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi beberapa hal. Pertama, target Indeks Kualitas Air (IKA) yang tidak tercapai disebabkan oleh penurunan kualitas air akibat perubahan iklim, musim kemarau panjang, dan kurangnya curah hujan. Hal ini menyebabkan peningkatan sedimentasi yang relatif tinggi di lokasi sungai serta danau/waduk, yang pada gilirannya mempengaruhi hasil uji kualitas air. Kedua, masih kurangnya pemahaman dan pengawasan terhadap pelaku usaha, khususnya dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik juga menjadi faktor penghambat. Tidak kalah pentingnya, masih kurangnya pelibatan masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga dalam usaha peningkatan kualitas air dan udara. Proses finalisasi perhitungan data IKA, Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) juga memerlukan waktu yang cukup lama, karena harus melalui verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Penyusunan dokumen dan laporan yang dilakukan secara bertahap juga menyebabkan hasil tersebut baru tersedia di akhir tahun.

Namun, terdapat beberapa faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dari KLHK membantu memastikan bahwa data yang diambil dilakukan sesuai prosedur pengambilan dan penentuan titik pemantauan. Selain itu, dukungan dari aplikasi berbasis digitalisasi juga turut mempermudah pelaksanaan pemantauan. Pedoman pelaksanaan perhitungan inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pedoman pelaksanaan pembinaan Kampung Iklim semakin memperkuat langkah-langkah yang diambil. Kerjasama yang baik dan intens antara seluruh stakeholder terkait juga menjadi faktor pendorong yang sangat mendukung. Kegiatan yang telah disusun dan terjadwal dengan baik serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan menjadi aspek yang tak kalah penting.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan, langkah-langkah yang perlu diambil antara lain adalah meningkatkan pemahaman serta peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu adanya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, khususnya untuk masyarakat. Pengawasan terhadap pembuangan air limbah dari kegiatan usaha dan limbah domestik juga harus ditingkatkan. Di sisi lain, pelibatan dan peran aktif masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga dalam usaha peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran udara harus lebih ditingkatkan, baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah dalam perencanaan serta penyiapan data IKA, IKU, dan IKL. Terakhir, pembuatan program inovasi dalam pengendalian pencemaran udara serta pemanfaatan media sosial untuk penyebaran informasi tentang pengendalian pencemaran udara akan sangat membantu dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) memiliki 1(satu) indikator yaitu Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target akhir sebesar 22,79. Rencana alokasi anggaran pada program ini sebanyak Rp. 24.331.183.495,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 18.541.315.159,-

Capaian indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2022 mencapai 34,37, dengan persentase 165,32%. Pada tahun 2023, capaian turun menjadi 26,97 (126,7%), dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 28,92 (133%). Secara keseluruhan, Beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan tutupan lahan di Kota Makassar antara lain adalah terbatasnya lahan yang tersedia untuk pengembangan tutupan lahan. Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi data dengan pihak-pihak eksternal terkait ruang terbuka hijau (RTH) dan pengukuran kualitas tutupan lahan membutuhkan waktu yang lama, yang memperlambat proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Kualitas dan luas tutupan hutan dan RTH di kota Makassar masih sangat minim, yang menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Di samping itu, kurangnya pengawasan serta intervensi kebijakan terhadap alih fungsi lahan semakin memperburuk kondisi tutupan lahan yang ada. Masih rendahnya tingkat publikasi terkait pentingnya menjaga tutupan hutan juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan dan pemeliharaan taman kota dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ke kecamatan juga menjadi salah satu faktor penghambat karena dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan.

Namun, ada beberapa faktor pendorong yang dapat mendukung kegiatan pengendalian dan pengelolaan tutupan lahan. Pertama, sudah ada peraturan dan produk hukum yang mendukung kegiatan ini, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah, yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan RTH dan kemitraan dalam pengelolaannya. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga memberikan dukungan bagi kelancaran kegiatan tersebut. Dukungan serta kerjasama yang baik dan intens antara seluruh stakeholder yang terkait turut menjadi faktor pendorong yang sangat berarti dalam pelaksanaan kebijakan. Kegiatan yang sudah tersusun dan terjadwal dengan baik juga mempermudah implementasi kebijakan dan memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

E. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) memiliki indikator Persentase bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang ditangani dengan target kinerja 0,68 %. Rencana alokasi anggaran pada program ini sebanyak Rp. 600.017.100,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 532.007.880,-

Tahun 2022, capaian persentase bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sebesar 0,021% (5,8%), tahun 2023 0,018 (4,28), tahun 2024 0,067 (!4%). Beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Makassar antara lain adalah kebijakan pembagian kewenangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Provinsi, dan Pemerintah Kota Makassar yang memengaruhi koordinasi dengan penanggung jawab usaha atau kegiatan. Selain itu, data terkait jumlah volume B3 dan limbah B3 yang masih berubah-ubah setiap tahunnya menyulitkan dalam perencanaan dan pengendalian yang tepat. Belum adanya regulasi yang mengatur pengelolaan B3 dan limbah B3 untuk usaha atau kegiatan menengah ke bawah (UMKM) juga menjadi kendala besar dalam implementasi kebijakan yang efektif.

Namun, ada beberapa faktor pendorong yang mendukung pengelolaan limbah B3 yang lebih baik. Salah satunya adalah adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang memberikan landasan hukum yang kuat. Selain itu, meningkatnya kualitas pengolahan limbah B3 oleh pelaku usaha dan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku menunjukkan komitmen yang lebih baik dalam pengelolaan limbah berbahaya ini. Tingkat ketaatan usaha dan kegiatan terhadap peraturan pengelolaan B3 yang semakin baik juga mendorong sinergi antara pembina dan pelaku usaha, yang menjadikan pengelolaan limbah B3 berjalan dengan lebih maksimal. Ditambah dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai, pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Untuk tindak lanjut, langkah yang perlu diambil adalah melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pihak eksternal terkait kebijakan pembagian kewenangan antara KLHK, Provinsi, dan Pemerintah Kota Makassar dalam pengendalian limbah B3. Koordinasi ini akan memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan secara efektif. Selain itu, penting untuk melakukan koordinasi dalam menyusun kajian data terkait jumlah volume B3 dan limbah B3, agar volume yang tercatat setiap tahunnya tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Terakhir, koordinasi dengan stakeholder terkait juga diperlukan untuk menyusun regulasi pengelolaan B3 dan limbah B3, terutama untuk usaha dan kegiatan menengah ke bawah (UMKM), agar mereka juga dapat mengelola limbah B3 dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki indikator ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar, dengan target kinerja pada akhir tahun perencanaan adalah 23%. Rencana alokasi anggaran program ini untuk tahun 2024 sebesar Rp. 481.145.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 358.229.309,-

Tahun 2022, realisasi capaian indikator ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar sebesar 26,67% (130%).

Tahun 2023, realisasi capaian indicator ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar sebesar 44,08% (209,9%)

Tahun 2024, realisasi capaian indicator ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar sebesar 83,61% (389%)

Beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Kota Makassar antara lain adalah kurangnya pemahaman dan kepedulian dari pelaku usaha atau kegiatan, terutama pada perusahaan baru, terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selain itu, sosialisasi terkait peraturan baru di bidang lingkungan hidup masih sangat terbatas, sehingga banyak pihak yang belum memahami perubahan atau aturan yang berlaku. Terlebih lagi, masih minimnya sarana dan prasarana penunjang bagi pengawas lingkungan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif.

Namun, terdapat pula beberapa faktor pendorong yang mendukung upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup memberikan dasar hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Kebijakan dan komitmen pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penataan lingkungan hidup juga menjadi faktor pendorong yang signifikan. Selain itu, Kota Makassar

telah memiliki pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang akan mempermudah koordinasi dan pengawasan. Dukungan dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penataan lingkungan hidup. Penggunaan media sosial yang melibatkan pelaku usaha dan kegiatan dalam koordinasi terkait penataan lingkungan juga menjadi sarana yang efektif untuk mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi.
Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi yang intensif, baik secara internal maupun eksternal, dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, penting untuk melakukan pembinaan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha atau kegiatan, khususnya perusahaan baru, agar mereka dapat lebih memahami dan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, perlu dilakukan penambahan atau pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk pengawasan lingkungan agar proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

G. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat memiliki 2 (dua) indikator, yaitu (1) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat, dengan target kinerja 33 kali (2) Terlaksananya pemberian penghargaan kepada masyarakat, dengan target kinerja “ada”. Rencana alokasi anggaran program ini untuk tahun 2024 sebesar Rp. 1.241.503.500,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 596.805.255,-
Tahun 2022, realisasi capaian kinerja indikator terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat sebanyak 7 kali (116,67%), terlaksananya pemberian penghargaan kepada masyarakat 1 kali.
Tahun 2023, realisasi capaian kinerja indikator terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat sebanyak 6 kali (100%), terlaksananya pemberian penghargaan kepada masyarakat 1 kali.
Tahun 2024, realisasi capaian kinerja indikator terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat sebanyak 6 kali (100%), terlaksananya pemberian penghargaan kepada masyarakat 4 kali.
Beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar antara lain adalah kurangnya pemahaman dan kepedulian dari kelompok masyarakat, lembaga, dan institusi terkait lingkungan hidup. Selain itu, kegiatan sosialisasi terkait peraturan baru di bidang lingkungan hidup masih terbatas, yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai peraturan dan kebijakan yang baru diterapkan.
Namun, terdapat pula beberapa faktor pendorong yang dapat mempercepat tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Salah satunya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup, memberikan landasan hukum yang jelas bagi semua pihak. Dukungan dan kerjasama yang baik serta intens, baik secara internal maupun eksternal, juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder yang terkait menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan. Selain itu, kegiatan yang sudah tersusun dan terjadwal dengan baik

memastikan bahwa program-program lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara terstruktur dan efektif.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis kepada kelompok masyarakat, lembaga, dan institusi terkait, khususnya mengenai Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain itu, koordinasi yang intensif, baik secara internal maupun eksternal, perlu dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kehutanan RI. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan sinergis.

H. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program penanganan pengaduan lingkungan hidup meiliki indikator pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan hidup, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar, lokasi usaha dan dampaknya di Kota Makassar denga target kinerja 100 %. Rencana alokasi anggaran pada program ini untuk tahun 2024 sebesar Rp. 3.342.695.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.029.734.175,-

Pada tahun 2022, realisasi capaian kinerja indikator pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan hidup, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar, serta terkait lokasi usaha dan dampaknya di Kota Makassar, tercatat sebesar 100% (100%). Capaian yang sama juga tercatat pada tahun 2023 dan 2024, yakni 100% (100%). Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Faktor penghambat dalam pengelolaan lingkungan hidup mencakup kesulitan dalam sinkronisasi data dengan pihak eksternal terkait izin lingkungan hidup atau izin PPLH, pengawasan, serta pemberian sanksi bagi pelaku usaha atau kegiatan. Selain itu, seringkali lokasi yang diajukan dalam laporan permasalahan lingkungan tidak jelas, menyulitkan proses verifikasi dan penanganan.

Namun, terdapat beberapa faktor pendorong yang mendukung upaya pengelolaan lingkungan yang lebih efektif. Salah satunya adalah kegiatan yang sudah tersusun dan terjadwal dengan baik, yang memudahkan koordinasi dan pelaksanaan. Dukungan serta kerjasama yang baik, baik secara internal maupun eksternal, bersama dengan partisipasi aktif masyarakat dan seluruh stakeholder yang terlibat, juga mempercepat pencapaian tujuan. Selain itu, pelayanan cepat melalui call center dan media sosial untuk menanggapi pengaduan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan responsivitas dan efisiensi penanganan masalah lingkungan.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait mengenai izin lingkungan hidup, pengawasan, dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha atau kegiatan. Selain itu, sosialisasi terkait penerapan SOP pengaduan juga harus dilakukan, termasuk cara pengisian formulir pengaduan yang memuat informasi lengkap seperti identitas pengadu, lokasi yang diadukan, penyebab, dampak yang dirasakan, serta status pengaduan sebelumnya. Terakhir, sebelum melakukan verifikasi lapangan, koordinasi dengan pemerintah setempat perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan kelancaran proses verifikasi.

I. Program Pengelolaan Persampahan

Program penanganan persampahan memiliki 2 (dua) indikator, yaitu (1) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Makassar dengan target kinerja 100% dan (2) Persentase sampah yang terkurangi melalui 3R dengan target kinerja 30%. Rencana alokasi anggaran pada program pengelolaan persampahan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 147.158.751.716,- dan capaian realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 21.050.981.956,-

Tahun 2022, realisasai capaian kinerja indikator terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Makassar sebesar 81,3% (82,12%), persentase sampah yang terkurangi melalui 3R sebanyak 6,12 (23,53)%.

Tahun 2023, realisasai capaian kinerja indikator terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Makassar sebesar 87,44 % (88,32%), persentase sampah yang terkurangi melalui 3R sebanyak 3,89 % (14,4%).

Tahun 2024, realisasai capaian kinerja indikator terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Makassar sebesar 76,7 (77,47%)%, persentase sampah yang terkurangi melalui 3R sebanyak 2,09 % (7,46%).

Beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai cara mengelola, memilah, dan mendaur ulang sampah. Selain itu, pelaksanaan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat masih kurang, yang menghambat perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah. Di samping itu, kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pengawasan pengelolaan persampahan juga menjadi kendala dalam upaya pengelolaan sampah yang efektif.

Namun, ada beberapa faktor pendorong yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Salah satunya adalah adanya regulasi yang jelas tentang pengelolaan persampahan yang memberikan pedoman hukum yang kuat. Dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder yang terlibat juga sangat berperan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu, penerapan SOP dalam pengawasan pengelolaan persampahan memastikan adanya standar operasional yang jelas dalam setiap kegiatan pengelolaan sampah. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah, yang dulunya dianggap tidak bernilai kini dianggap sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis, juga menjadi faktor positif dalam perubahan perilaku masyarakat.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan kinerja bank sampah di masing-masing kecamatan, untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Sosialisasi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat serta organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengurangi sampah. Selain itu, kinerja UPT Bank Sampah perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam pengelolaan sampah di tingkat kecamatan.

15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Secara keseluruhan, realisasi keuangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota makassar triwulan 4 sejumlah Rp. 17.879.513.888 .dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,40%. Adapun capaian tersebut sudah tinggi dari target capaian yang seharusnya pada 100%. Data yang lebih detail memperlihatkan, bahwa capaian ini sudah berada pada jalur yang tepat.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program : (i) Persentase Ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah target 2024 sebesar 100% dan capaian kinerja sampai triwulan 4 sebesar 100%.

Pagu yang mendukung indikator ini sebesar Rp 8.939.830.035 dengan realisasi sampai dengan triwulan 4 sebesar Rp 7.907.358.957 atau 94,18%. (ii) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target 90%. Jumlah pagu sebesar Rp 3.669.169.000 dan realisasi sampai dengan triwulan 4 sebesar Rp 3.529.578.696 atau sebesar 95,42%. (iii) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas aparatur dengan pagu anggaran Rp. 2.270.002.500 dan realisasi Rp. 2.189.479.438 atau sebesar 100%.

B. Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk memiliki dua indikator yaitu : (i) Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dengan target tahun 2024 sebesar 75%. (ii) Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk dengan target tahun 2024 sebesar 100%. Pagu yang mendukung kedua indikator ini sebesar Rp. 3.549.176.150 dengan realisasi sampai triwulan 4 sebesar Rp. 3.326.574.600 atau 93,73%.

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Beberapa lapisan masyarakat belum memahami pentingnya dokumen kependudukan atau prosedur yang harus dilakukan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitasi yang memadai untuk menangani volume pendaftaran penduduk yang besar.
3. Adanya kendala dalam proses dokumen, misalnya data yang tidak lengkap atau ketidaksesuaian dokumen pendukung.

FAKTOR PENDORONG :

1. Semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya pendaftaran penduduk untuk mendapatkan idenstitas resmi (KTP, KK, dll).
2. Pemerintah memberikan dorongan melalui kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk mendaftar, seperti sistem pendaftaran online atau pelayanan keliling.
3. Adanya inovasi teknologi seperti aplikasi pendaftaran online dan penggunaan sistem digital yang mempercepat proses dan mengurangi antrean.
4. Sudah diberlakukannya penerapan NIK yang digunakan semua layanan (BPJS, perpajakan, perbankan, dll) yang mewajibkan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang mendorong untuk mendaftar.
5. Adanya sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan baik melalui media sosial maupun kegiatan lainnya.

TINDAK LANJUT :

1. Meningkatkan sosialisasi pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan baik penjelasan manfaat dan prosedur pendaftaran penduduk.
2. Mempermudah alur pendaftaran dengan penerapan SOP secara maksimal.
3. Mempermudah alur pendaftaran dengan penerapan SOP secara maksimal.

C. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Program pelayanan pencatatan sipil memiliki dua indikator kinerja : (i) Cakupan penerbitan Akte Kelahiran dengan target di tahun 2024 sebesar 100%. (ii) Rasio Pasangan Berakte Nikah dengan target tahun 2024 sebesar 50%. Pagu yang mendukung kedua indikator diatas sebesar Rp. 751.117.300,- dengan realisasi sampai triwulan 4 sebesar Rp 676.509.100,- atau 90,07%.

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) atau kurangnya tenaga yang terlatih atau kurangnya pengetahuan tentang teknologi baru dalam pengelolaan data kependudukan yang bisa memperlambat pelayanan.

2. Penerapan SOP yang masih kurang maksimal.
3. Adanya pungli

FAKTOR PENDUKUNG :

1. Adanya kebijakan atau peraturan pelaksanaan pencatatan sipil yang diatur oleh PERMENDAGRI.
2. Intensifnya pelaksanaan kegiatan pelayanan langsung akte kelahiran di lokasi-lokasi yang dianggap kepemilikan akte pencatatan sipil masih belum tercapai, serta intensifnya pelayanan ke lokasi yang marginal seperti kepulauan.
3. Dukungan sarana dan prasarana IT yang mempermudah pelaksanaan program ini.
4. tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil.

TINDAK LANJUT :

1. Peningkatan kapasitas SDM yaitu pengembangan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dan manajemen data kependudukan akan mempercepat proses pencatatan dan meningkatkan akurasi pelayanan.
2. untuk meminimalisir pungli diadakan layanan secara online.
3. melibatkan stakeholder seperti Ombutsman dan Inspektorat dalam rangka pengawasan anti korupsi.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator dari program ini adalah Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan target di tahun 2024 sebesar 50%. Pencapaian target indikator kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kepndudukan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.664.900,- dengan realisasi sampai triwulan 4 sebesar Rp. 161.864.500,- atau 87,18%.

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan utamanya yang berkompoten terkait teknologi informasi.
2. Keterbatasan akses data kependudukan bagi instansi yang bekerjasama.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan elemen data kependudukan.

FAKTOR PENDORONG :

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.
2. Dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
3. Penggunaan teknologi dan informasi yang memadai untuk pelayanan di Dukcapil.
4. Kerjasama dengan instansi terkait pemanfaatan data kependudukan.

TINDAK LANJUT :

1. Evaluasi dan monitoring terhadap sumber daya yang ada.
2. Sosialisasi terkait pentingnya perubahan setiap elemen data kependudukan baik melalui sosial media ataupun secara langsung.
3. Koordinasi ke adminduk terkait keterbatasan akses bagi instansi yang kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

E. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Indikator dari program ini adalah persentase ketersediaan profil kependudukan dengan formulasinya dengan target di tahun 2024 sebesar 100%.

16. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan serta 28 Sub Kegiatan Target kinerja Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah target 100 % dengan realisasi sebesar 90,74% atau capaian kinerja 95%, Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas target 90 % dengan realiasi 90,74% atau capaian kinerja 94,44%, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik target 90% dengan realisasi 90,74% atau capaian kinerja 95,%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 12 bulan (1 Tahun) dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kota Makassar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12,521,206,875 (Dua belas milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11,361,728,937,- (Sebelas milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau 93,47%.

Faktor penghambat: Ada kegiatan yang tidak terlaksana diakibatkan tidak terpenuhinya waktu pelaksanaan pengadaan

Faktor Pendorong: Terjalinya kerjasama yang baik antara sesama pemangku kepentingan.

B. Program Pengendalian Penduduk

Program pengendalian penduduk, data dan informasi diukur menggunakan 2 (Dua) indikator kinerja: (i) Indikator Persentase SKPD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 92,22 % atau mencapai 147,79% dari target tahun 2024 sebesar 45,09%. Dari capaian Persentase SKPD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk ini menunjukkan capaian melebihi target, hal ini menunjukan kepedulian SKPD dalam menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk sebab laju perkembangan penduduk sangat berdampak pada perencanaan dan anggaran yang harus digelontorkan untuk menangani permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.(ii) Indikator Jumlah Rata-rata Anak Perkeluarga tahun 2024 ditargetkan 2 tercapai dengan realisasi 92,22% atau mencapai 100 Capaian Jumlah Rata-rata Anak Perkeluarga harus menurun. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.561,177,200,- (Satu milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,439,663,900.00,- (satu milyar empat ratustiga puluh Sembilan juta enam ratus enam puluhtiga ribu Sembilan ratus rupiah) atau sebesar 92.22 %

Faktor Penghambat: Ada kegiatan yang tidak terlaksana diakibatkan adanya refocusing anggaran

Faktor Pendorong: Terjalinnya kerja sama singkronisasi kebijakan dengan pemangku kepentingan satuan perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah daerah Kota Kota Makassar dan mitra kerja

Tindak lanjut: Peningkatan kerja sama dan sigkronisasi kebijakan kepada para pemangku kebijakan dan mitra kerja serta mengefektifkan anggaran yang tersedia.

C. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diukur dengan dua indikator yaitu persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi target tahun 2024 sebesar 49,48% dan Rasio akseptor KB target tahun 2024 sebesar 68.35 % dengan anggaran sebesar Rp 16,869,135,550,-

Sasaran Menurunnya Kebutuhan ber-KB yang Tidak terpenuhi (UnmetNeed) berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 25,85% dibandingkan tahun 2023 sebesar 9% terjadi peningkatan capaian 16,85 % capaian ini merupakan target menurun, dari data yang ada terjadi peningkatan dari tahun sebelumya (Unmeet need merupakan target yang semakin rendah realisasinya dari target, semakin tinggi pencapian kinerja). Hal ini di sebabkan rendahnya peserta kb aktif.

Faktor Penghambat: Ada kegiatan yang tidak terlaksana diakibatkan adanya refocusing anggaran

Faktor pendorong: Terjalinnya kerja sama singkronisasi kebijakan dengan pemangku kepentingan satuan perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah daerah Kota Kota Makassar dan mitra kerja

Tindak Lanjut: penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang tersedia.

D. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sasaran Meningkatnya ketahanan dan kesejaheraan keluarga diukur menggunakan 2(dua) indikator kinerja yaitu Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL yang ber-KB dan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB Anggota usahawan Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri.

Anggaran program ini sebesar Rp 6,347,061,900,- dan terealisasi sebesar Rp 6,224,822,500. Atau 98.07 % dan capaian kinerja 45.21%. kegiatan ini terlaksana karena peran aktif mitra kerja, Adanya Pembinaan kader POKTAN (kelompok kegiatan) kepada keluarga sasaran, Adanya Orientasi terhadap kader dan keluarga sasaran untuk meningkatan pengetahuan kader poktan. Sementara kendalanya masih kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan POKTAN KB, Kurangnya tenaga PLKB, Terkait Belanja Paket Data, masih kurangnya pemahaman teknis pelaksanaan BOKB dan kurangnya Pemahaman Penyedia pada Aplikasi LPSE, dan Masih belum maksimalnya pelaksanaan pengadaan BOKB.

Faktor Penghambat: terjadinya refoccusing anggaran dan kegiatan

Faktor Pendorong: koordinasi internal bidang, dalam pengawalan target kineja dan realisasi kinerja serta anggaran

Tindak Lanjut: Evaluasi realisasi kinerja dan anggaran agar dalam pelaksanaan program kegiatan tetap memperhatiakan dokumen DPA dan anggaran kas demi ketepan waktu.

17. DINAS PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan anggaran sebesar Rp. 119.149.390.293,- dan realisasi sebesar Rp.107.857.632.184,- .Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 3 program yaitu: 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 2) Program

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 3) Program Pengelolaan. Pelayaran. Adapun realisasi tiap program adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar

Program ini memliki 3 indikator kinerja yaitu:

- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja 90 % terealisasi 100 %.
- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% terealisasi 100%.
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dengan target kinerja 90% terealisasi 90 %.

Rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100 % yang didukung oleh anggaran sebesar Rp. 16.516.947.129,- dan realisasi sebesar Rp. 14.235.585.141,- atau 86,19%.

Faktor Pendorong :
Adanya kesadaran dari ASN dan Non ASN untuk melaksanakan kegiatan administrasi secara efektif.
Faktor Penghambat :
Peralatan kantor atau mesin kantor yang kurang memadai.
Rencana Tindak Lanjut:
1. Perlu adanya peningkatan kapasitas ASN dan Non ASN; dan
2. Perlu menambah alat-alat kantor sebagai penunjang kegiatan kesekretariatan.

B. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan(LLAJ)
Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
• Rasio Konektivitas Kota dengan target 40 % terealisasi 35 %
• Kinerja Lalu Lintas Kota dengan target 60% terealisasi 60 %

Rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100% yang didukung oleh anggaran sebesar Rp. 102.198.964.064,- dan realisasi Rp. 93.222.434.366,- atau 91,22%.
Faktor Pendorong :
1. Belanja operasional rutin sudah berjalan sesuai dengan waktunnya.
2. Adanya konsultasi pengawasan oleh inspektorat dan monitoring dan evaluasi dan deputi pengawasan dan tindak pencegahan KPK.

Faktor penghambat :
1. Karena tidak adanya dokumen perencanaan berupa gambar teknis dan spesifikasi teknis secara detail.
2. Tidak memiliki dokumen perencanaan yang dipersyaratkan seperti gambar teknis secara detail dan spesifikasi teknis secara detail serta dokumen persiapan dan metode pengadaan dan jasa.

Rencana Tindak Lanjut :
1. Perlunya dokumen perencanaan disusun diawal berupa gambar teknis, RAB dan spesifikasi teknis secara detail
2. Bila dikemudian hari dianggarkan akan dipersiapkan dokumen perencanaan dan dokumen persiapan serta menggunakan metode pengadaan barang dan jasa yang tepat.

C. Program Pengelolaan Pelayaran
Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
- Jumlah orang yang melalui dermaga penyebrangan dengan target 60.000 orang terealisasi 68.726 org.
- Jumlah barang yang melalui dermaga pertahun dengan target 4.735.902 ton terealisasi 3.102,94 ton.

Rata-rata tingkat capaian kinerja 57,305% yang didukung oleh anggaran sebesar Rp. 433.479.100 terealisasi Rp. 399.612.677,- atau 92,19%.
Faktor Pendorong :
1. Belanja operasional rutin sudah berjalan sesuai dengan waktunnya.
2. Dokumen pendukung pembangunan dermaga telah disusun dukumen FS. Dokumen pendukung pembangunan tambatan sungai telah disusun dokumen HPS,BOQ,RAB,spesifikasi teknis, DED tahun 2023 dan persetujuan penggunaan sumber daya.
3. Terciptanya kerjasama yang baik dengan para stakeholder, regulasi yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor Penghambat :

1. Kegiatan ini awalnya terdapat Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal tetapi tidak termuat dalam RKPD sehingga kegiatan ini tidak dijalankan dan pada DPA Perubahan 2024 dirasionalkan.
2. Pada indikator jumlah barang melalui dermaga seharusnya satuan indikatornya Kg (Kilogram) bukan Ton sehingga membuat realisasi kinerja sangat rendah. Untuk penyeberangan di atas air yang dihitung adalah jumlah orang yang melintas/ menyeberang di dermaga berdasarkan karcis penyeberangan dan pembatasan kewenangan terkait kepelabuhanan.

Rencana Tindak Lanjut :

Menjalin koordinasi dengan para stakeholder eksternal khususnya masyarakat transportasi Angkutan Laut di Kota Makassar dan diusulkan untuk penyusunan PERDA Perhubungan

18. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dengan anggaran sebesar Rp. 80.229.859.802,- dan realisasi sebesar Rp. 66.019.887.535,- Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 3 programyaitu: 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 3) Program Pengelolaan Pelayaran. Adapun realisasi tiap program adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memliki 3 indikator kinerja yaitu :

- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja 90 % terealisasi 100 %.
- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% terealisasi 100%.
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dengan target kinerja 90% terealisasi 90 %.

Rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 103,70 % yang didukung oleh anggaran

- sebesar Rp. 9.864.646.058,- dan realisasi sebesar Rp. 8.859.236.821,- atau 89,81%.

B. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Terdapat 3 indikator kinerja dalam program ini yaitu:

- Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kota Makassar dengan target 82,5% realisasi 82,5%.
- Persentase peningkatan data pertahun yang terupdate pada open data pemerintah kota Makassar dengan target 60% realisasi 0%.
- Persentase peningkatan pengunjang pertahun pada website Pemerintah Kota Makassar dengan target 80% realisasi 235%.

Rata-rata tingkat capaian 131,25% dengan pagu Rp. 35.507.652.050,- dan realisasi Rp. 34.241.025.833,- atau 96,43%.

Faktor Penghambat:

1. SK Kegiatan terlambat terbit.
2. Jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik terbatas.
3. Kapasitas SDM OPD yang mendukung pelaksanaan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum memadai.

4. Uji Konsekuensi informasi dikecualikan terlambat ditetapkan.
5. Banyak OPD terlambat merespon permintaan informasi publik.
6. Masyarakat belum memahami mekanisme pelaporan pengaduan melalui SP4N Lapor.
7. Adanya pengantian petugas layanan PPID pelaksana OPD dan Admin SP4N Lapor.

Faktor Pendorong :

1. Adanya arahan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Tersedianya tenaga ahli kehumasan dan media kreatif.
3. Terjalinnya kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dengan media lokal dan nasional dalam mendukung program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mengusulkan penambahan ASN melalui seleksi penerimaan PPPK.
2. Mengusulkan kegiatan BIMTEK peningkatan kapasitas SDM OPD yang mendukung pelaksanaan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
3. Mempercepat pelaksaan kegiatan uji konsekuensi paling lambat pada triwulan ke III Tahun 2025.

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pelaksanaan indikator pada program ini yaitu:

- Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 100% realisasi 100%.
- Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan target sebesar 65% realisasi 100%.

Rata rata capaian kinerja sebesar 100% didukung alokasi anggaran sebesar Rp.34.857.561.694,- dengan realisasi 22.919.624.881,- atau 65,75%.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja program yaitu :

- Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah, dengan target 78,43 % realisasi 76%.
- Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan, dengan target 78,43% realisasi 76%.

Rata-rata tingkat capaian 97% dengan anggaran Rp. 1.005.657.300,- dan terealisasi Rp. 950.944.400,-

Faktor Penghambat :

1.Belum ditetapkannya daftar data prioritas Forum Satu Data Tingkat Kota Makassar.
2.Ketidakkonsistenan data yang diberikan oleh Produsen Data. Sehingga, perlu validasi ulang untuk menjamin kesesuaian data sebelum didiseminasikan.

Faktor Pendukung :

1. Mengikuti kebijakan dan arahan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan pelatihan peningkatan SDM Sektoral.
3. Terjalinnya kolaborasi intensif dengan BPS Kota Makassar sebagai Pembina data statistik sektoral.
4. Tersedianya tenaga ahli IT yang mahir dalam pengelolaan database dan integrasi portal data.
5. Tersedianya Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Makassar

6. Terlaksananya Diseminasi data statistik sectoral.

Rencana Tindak Lanjut :
1. Mengikuti kebijakan dan arahan pimpinan dalam melakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan bidang.
2. Melakukan koordinasi dengan Produsen Data untuk kesesuaian data.
3. Melakukan penguatan Forum SDI Kota Makassar dalam rangka peningkatan capaian Indeks Pembangunan Statistik.

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dalam mendukung program ini yaitu :
- Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, dengan target sebesar 100% terealisasi 100%.
- Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan target sebesar 46,59% realisasi 80%.

Rata-rata tingkat capaian 135,86% dengan anggaran Rp. 603.862.240,- dan terealisasi Rp. 437.277.600,- atau 72,41%.
Faktor Penghambat :
Kurangnya SDM yang mempunyai Keahlian khusus di Bidang Keamanan Siber
Faktor Pendorong :
1. SDM yang mendukung Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk realisasi belanja.

Rencana Tindak Lanjut :
1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar untuk penerbitan SPD Kegiatan program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
2. Menyiapkan dokumen administrasi lebih awal untuk kegiatan.
3. Mengadakan Pelatihan Dan Pendidikan di Bidang Keamanan Siber

19. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 direncanakan dalam 8 Program terdiri dari 7 Program utama dan 1 Program Penunjang yang dijabarkan dalam 16 Kegiatan terdiri dari 8 kegiatan utama dan 8 kegiatan penunjang.
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran dituju adalah anggota dan pengurus koperasi dan pelaku UKM di Kota Makassar
3. Dengan pagu anggaran pokok 2024 sebesar Rp.36.550.966.246; (Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 20.393.330.378; (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
Realisasi kemajuan belanja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 17.752.914.359; (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau 87,05 persen dengan kategori Tinggi.
Adapun rincian capaian kinerja 7 program adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) Sub kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 8.329.848.384; (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.057.258.925; (Tujuh Milyar Lima Puluh Tujuh Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 84,72 persen, dengan kategori Tinggi.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dari target 90 persen, realisasi kinerja triwulan IV sebesar 97 persen, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 127 persen.
- Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dari target 100 persen, realisasi kinerja triwulan IV sebesar 32 persen, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 99,5 persen.
- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dari target 90 persen, realisasi kinerja triwulan IV sebesar 20 persen, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 90 persen.

Adapun faktor pendukung sebagai berikut :

- Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang
- Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Memadai

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Adanya keterlambatan berkas dari pihak penyedia

Adapun tindak lanjut sebagai berikut :

- Mempercepat Proses Administrasi.

B. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program pelayanan izin usaha simpan pinjam terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 229.613.200; (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran di triwulan IV sebesar Rp. 226.667.500; (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 98,72 persen dengan kategori sangat tinggi.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Persentase BPR/LKM aktif dengan target sebesar 58,62 persen, realisasi kinerja di triwulan IV sebesar 51,72 persen, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 51,72 persen.

Adapun faktor pendorong sebagai berikut :

- Seluruh kegiatan pada program pelayanan izin usaha simpan pinjam telah dilaksanakan

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Pelaku KSP/USP masih menjalankan kegiatan usahanya meskipun belum memiliki izin usaha
- Pelaku Koperasi tidak berminat untuk memiliki izin usaha

Adapun Tindak Lanjut yang Diperlukan di Triwulan Berikutnya :

- Membentuk Tim Pendataan dan pendampingan izin KSP/USP
- Melaksanakan Bimtek kemudahan perizinan berbasis risiko bagi koperasi

C. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 655.786.600; (Enam

Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 581.749.700; (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tuhuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau sebesar 88,71 persen dengan kategori Tinggi.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut : • Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa dari target 13,95 persen, realisasi kinerja triwulan IV sebesar 5 persen, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 21 persen

Adapun faktor pendorong sebagai berikut :

- Data awal 1025 koperasi aktif, setelah terbitnya SK pembubaran Koperasi menjadi 727 Koperasi Aktif.
- Keterbatasan SDM Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi dapat didukung dengan melibatkan aparatur SDM Dinas Koperasi UKM lainnya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan memberikan Bimtek pengawasan dan pemeriksaan Koperasi

Adapun faktor Penghambat sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia jabatan fungsional pengawas Koperasi yang terbatas apabila dibandingkan jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan dan pemeriksaan
- Jumlah Koperasi Aktif pada Online Data System Kementerian Koperasi, setelah dilakukan verifikasi faktual terdapat banyak Koperasi yang tidak ditemukan.

Adapun Tindak Lanjut yang Diperlukan di Triwulan Berikutnya:

- Memberikan bimbingan teknis bagi aparatur Dinas Koperasi UKM terkait pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- Menugaskan aparatur Dinas Koperasi UKM untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi.

D. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.080.748.700; (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.053.425.550; (Satu Milyar Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 97,47 persen dengan kategori sangat tinggi. Capaian kinerja program sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut

- Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dari target 76,15 persen, tida adak realisasi kinerja di triwulan IV, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 85,75 persen.

Adapun Faktor Pendorong sebagai berikut :

- Kegiatan penilaian kesehatan tetap berjalan tanpa menggunakan pagu APBD

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Anggaran pada kegiatan penilaian Kesehatan KSP/USP dilakukan recofusing sehingga kegiatan penilaian Kesehatan tidak berjalan maksimal dan berdampak terhadap pencapaian realisasi kinerja

Adapun Tindak Lanjut yang Diperlukan di Triwulan Berikutnya :

- Menambah jumlah pagu anggaran tahun 2025 untuk mengoptimalkan kegiatan penilaian Kesehatan
- Melakukan kegiatan intensif untuk meningkatkan kapasitas SDM pengurus KSP/USP dan unternal Dinas Koperasi dalam menerapkan metode penilaian Kesehatan Koperasi yang efektif

- Peraturan Pemerintah yang mewajibkan Koperasi untuk melakukan penilaian Kesehatan secara berkala akan mendorong koperasi untuk mematuhinya, serta persaingan yang semakin ketat di dunia usaha dapat mendorong koperasi untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi termasuk melalui penilaian Kesehatan koperasi.

E. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 224.354.000; (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran di triwulan IV sebesar Rp. 222.691.300; (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau sebesar 99,26 persen dengan kategori Sangat Tinggi:

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut : Persentase SDM Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan dari target 1,79 persen,tidak ada realisasi kinerja di triwulan IV, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 0,20 persen

Adapun faktor pendorong sebagai berikut:

- Seluruh Kegiatan pada Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanankan

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Data yang tersedia tidak akurat dan terperinci dari pelaku usaha Koperasi yang masih aktif di kota Makassar sehingga pelatihan belum merata bagi pelaku usaha koperasi yang membutuhkan.

Adapun Tindak Lanjut yang Diperlukan di Triwulan Berikutnya :

- Melakukan koordinasi dengan bidang kelembagaan untuk membentuk tim satgas monitoring dan evaluasi koperasi aktif yang ada dikota makassar untuk memaksimalkan kegiatan di tahun anggaran 2025.

F. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp.1.269.089.000; (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 1.221.138.586; (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 96,22 persen dengan kategori Sangat Tinggi.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya dari target 26,83 persen, realisasi kinerja triwulan IV sebesar 5 persen, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 21 persen.

Adapun faktor pendorong sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan salah satu kewajiban bagi Koperasi

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Beberapa Koperasi tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan RAT yang telah dilaksanakan

Adapun tindak lanjut sebagai berikut :

- Melakukan kunjungan ke koperasi dalam rangka monitoring, evaluasi dan konfirmasi pelaksanaan RAT.

G. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) Sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 4.376.976.594; (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.073.338.200; (Empat Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 93,06 persen dengan kategori Tinggi.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Jumlah peserta pelatihan skill training gratis sektor UMKM dengan target sebesar 520 UMKM, realisasi kinerja triwulan IV sebesar 54 UMKM, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 458 UMKM.
- Peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha dari target sebesar 90,98 persen, realisasi kinerja triwulan IV sebesar 18 persen, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 99,82 persen.

Adapun faktor pendorong sebagai berikut:

- Melaksanakan Proses Audit oleh LPPM UNHAS ke masing masing Rumah Produksi UMKM Binaan Dinas Koperasi & UKM yang diusulkan menerima Sertifikat Halal
- Seluruh Kegiatan pada Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan telah dilaksanakan

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Proses Audit terkait Sertifikasi Halal oleh LPPM UNHAS baru selesai di Bulan Desember
- Adanya Recofusing anggaran pada sub kegiatan pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Adanya refocusing anggaran di awal semester kedua menjadi penyebab pendidikan dan pelatihan terkait digitalisasi UMKM tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan tidak sesuai dengan target pada saat perencanaan

Adapun tindak lanjut sebagai berikut :

- Hasil Audit dari LPPM UNHAS di teruskan ke Lembaga Penyelenggara Jaringan Produk Halal untuk Penerbitan Sertifikat Halal Produk UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
- Memaksimalkan anggaran di tahun 2025 dengan menyusun rencana kegiatan dalam format berbeda seperti bekerjasama dengan lembaga pelatihan swasta/negeri.

H. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 4.226.913.900; (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.316.644.598; (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 78,46 persen dengan kategori Tinggi.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut:

- Jumlah wirausaha baru (Start-Up) atau wirausaha baru yang sudah berdigitalisasi dari target 10 UMKM, realisasi kinerja triwulan IV sebesar 6 UMKM, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 10 UMKM.
- Persentase usaha mikro dan kecil dari target 79 persen, realisasi kinerja triwulan IV sebesar 98,5 persen, dengan capaian kinerja sampai pada triwulan IV sebesar 99 persen.

Adapun faktor pendorong sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan UMKM tentang Program Inkubator Center melalui kegiatan sosialisasi program inkubasi pada akun media sosial

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- UMKM tidak memiliki informasi yang cukup tentang pendaftaran dan manfaat program inkubasi
- Kurangnya informasi pada tingkat RT di Kota Makassar terkait kehadiran program inkubator center

Adapun tindak lanjut sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi terkait Hadirnya Program Inkubator Center di beberapa kecamatan di Kota Makassar pada triwulan ke 4
- Melaksanakan sosialisasi program Inkubator Center pada Tingkat RT & RW se Kota Makassar untuk meningkatkan partisipasi UMKM pada program Inkubasi.

20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar dengan 5 Program Utama dan 1 Program Penunjang dengan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 pada triwulan IV dengan anggaran Perubahan sebesar Rp.27 .098.761.197,- yang kemudian menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 93,25% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.239.179.059,- atau 78,38% dari total Anggaran Perubahan.

Alokasi anggaran DPMPTSP untuk melaksanakan 5 (lima) Program Utama di mana program utama terdiri dari: (1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; (2) Program Promosi Penanaman Modal; (3) Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; (4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; (5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Layanan serta 1 urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

A. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Total alokasi anggaran pada Perubahan TA. 2024 sebesar Rp.555.355.000,-, dengan total realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 242.865.980,-. Dengan demikian, maka persentase capaian anggaran program pengembangan iklim penanaman modal pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 yaitu 53,69% dan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 100% Pad a Triwulan IV.

Adapun faktor-faktor pendorong pelaksanaan program pengembangan iklim penanaman modal sebagai berikut:

- Adanya sistem monitoring yang baik memastikan pelaksanaan program tetap terpantau dengan baik dan sesuai target, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian output yang optimal;
- Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan pihak terkait lainnya mendukung keberhasilan program dan mempercepat proses persetujuan.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan program Pengembangan Iklim penanaman modal sebagai berikut:

- Proses penganggaran, pencairan dana, dan administrasi yang memerlukan waktu bisa menghambat pelaksanaan kegiatan dalam periode yang sudah direncanakan, sehingga realisasi anggaran menjadi terhambat.

Tindak Lanjut:

- Mempercepat proses administrasi dan pencairan anggaran untuk mengurangi birokrasi yang menghambat pelaksanaan

B. Program Promosi Penanaman Modal

Total alokasi anggaran pada Perubahan tahun 2024 Rp.1.332.375.700,- dengan total realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp.673.205.257,- Dengan demikian persentase capaian anggaran program promosi penanaman modal yaitu 51,31% dan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 100% Pada Triwulan IV.

Adapun faktor-faktor pendorong pelaksanaan program promosi penanaman modal sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran penyelenggaraan promosi penanaman modal diluar daerah
2. Tersedianya anggaran penyelenggaraan promosi penanaman modal skala nasional di Kota Makassar, yaitu Makassar Investment Forum 2024
3. Tersedianya tenaga ahli Dewan Investasi dalam dukungan pencapaian realisasi investasi.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan program promosi penanaman modal sebagai Berikut:

- Proses penganggaran, pencairan dana, dan administrasi yang memerlukan waktu bisa menghambat pelaksanaan kegiatan dalam periode yang sudah direncanakan, sehingga realisasi anggaran menjadi terhambat

Tindak Lanjut :

- Mempercepat proses administrasi dan pencairan anggaran untuk mengurangi birokrasi yang menghambat pelaksanaan.

C. Program Pelayanan Penanaman Modal

Total alokasi anggaran pada Perubahan Tahun 2024 Rp.1.816.274.700,- dengan total realisasi anggaran pada Triwulan IIV Tahun 2024 sebesar Rp.1.028.683.300,- Dengan demikian persentase capaian anggaran program pelayanan penanaman modal pada perubahan tahun 2024 yaitu 56,63% dan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 98% Pada Triwulan IV.

Adapun faktor-faktor pendorong pelaksanaan program pelayanan penanaman modal sebagai berikut:

1. Telah terlaksananya kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pelayanan penanaman modal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat masih dilaksanakan 2x dalam setahun belum memenuhi rekomendasi KemenpanRB dilaksanakan 4 kali dalam setahun
2. Belum memenuhinya kapasitas sarana dan prasarana di DPMPTSP Kota Makassar untuk menempatkan Tim Teknis

Tindak Lanjut:

- Melaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat pada semester 11 dan akan dilaksanakan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan rekomendasi survey.
- Menyusun *master plan* pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sesuai dengan rekomendasi KemenpanRB dan penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Total alokasi anggaran pada Perubahan Tahun 2024 Rp. 763.476.200,-dengan total realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp.486.683.200,- Dengan demikian persentase capaian anggaran program pengendalian pelaksanaan penanaman modal pada perubahan tahun 2024 yaitu 63,74% dan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 87,5% Pada Triwulan IV.

Adapun faktor-faktor pendorong pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai berikut:

- Tersedianya data pilah perizinan dan non perizinan yang terdata
- Tersedianya data pilah jumlah perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis.
- Telah terbentuknya Satuan Tugas Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Kepala DPMPTSP bertindak sebagai Koordinator Satgas
- Telah terlaksananya kegiatan pengawasan baik terencana dan insidentil
- Telah terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan penyelesaian masalah kepada pelaku usaha di Kota Makassar

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai berikut:

- Administrasi pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal
- Banyaknya laporan pengaduan yang diterima oleh Satgas Pengawasan Perizinan terkait dengan indikasi dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha di Kota Makassar

Tindak Lanjut:

1. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan
2. Melaksanakan koordinasi secara rutin dan berkala dengan ikatan pengusaha untuk memudahkan sosialisasi dan kondolidasi terkait OSS dan pelaporan LKPM

E. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Total alokasi anggaran pada Perubahan Tahun. 2024 Rp. 707.435.700,- dengan total realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 540.067.400,- Dengan demikian persentase capaian anggaran program pengolahan data dan informasi penanaman modal pada perubahan tahun 2024 yaitu 76,34% dan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 75% Pada Triwulan IV.

Adapun faktor-faktor pendorong pelaksanaan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagai berikut:

1. Tersedianya alokasi anggaran pengembangan sistem informasi manajemen dalam dukungan pemberian layanan, pengolahan dan penyajian data perizinan
2. Tersedianya tenaga ahli yang berkompeten dalam pengelolaan danpenyajian data

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagai berikut:

1. Perubahan regulasi yang dinamis sehingga dibutuhkan waktu dalam melakukan penyesuaian terhadap sistem informasi yang digunakan

Masih kurangnya tenaga dan aparatur yang memiliki kemampuan mengolah data mentah secara *online*.

Tindak lanjut:

1. Melakukan percepatan penyesuaian sistem informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku
2. Pemberian bimbingan kepada aparatur yang berkompeten dalam pengelolaan data terkait pengelolaan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Total alokasi anggaran pada Perubahan Tahun 2024 Rp. 21.923.843.897,- dengan total realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp.18.133.642.977,- Dengan demikian persentase capaian anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah pada perubahan tahun 2024 yaitu 82,71% dan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 90,5% Pada Triwulan IV.

Adapun faktor-faktor pendorong pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Tersedianya alokasi anggaran sarana dan prasarana layanan perizinan termasuk perencanaan Mall Pelayanan Publik (MPP)
2. Tersedianya alokasi anggaran dalam dukungan pemberian informasi pelayanan perizinan melalui media cetak dan elektronik

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Melakukan Verifikasi dokumen administrasi paket belanja dengan pejabat pengadaan barang dan jasa perangkat daerah.

Proses penganggaran, pencairan dana, dan administrasi yang memerlukan waktu bisa menghambat pelaksanaan kegiatan dalam periode yang sudah direncanakan, sehingga realisasi anggaran menjadi terhambat.

Tindak Lanjut:

1. Mempercepat proses administrasi dan pencairan anggaran untuk mengurangi birokrasi yang menghambat pelaksanaan

21. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara sistematik dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Tahun 2024 berdasarkan Program adalah sebagai berikut :

A. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan tahun 2024 mencakup 2 (dua) kegiatan utama yang diimplementasikan melalui 7 (tujuh) subkegiatan. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total sebesar Rp. 13.171.787.800. Hingga akhir tahun anggaran 2024, realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 12.561.391.881 atau sebesar 95,37% dari total alokasi yang direncanakan. Tingginya persentase realisasi ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dan implementasi program, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan kapasitas kepemudaan di Kota Makassar.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan dari Pemerintah kota Makassar
2. Penyusunan program dan subkegiatan yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas kepemudaan di Kota Makassar.
3. Kolaborasi yang baik antara tim pelaksana, stakeholder, dan peserta program mendukung keberhasilan implementasi kegiatan.
4. Tingginya minat dan partisipasi pemuda dalam mengikuti program ini memberikan dampak positif terhadap pencapaian target.

Faktor Panghambat :

1. Adanya pergeseran harga pada saat negesiasi harga sehingga menghasilkan sisa anggaran.

Tindak Lanjut :

1. Lebih mengoptimalkan anggaran yang telah disiapkan.

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan tahun 2024 dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas pemuda melalui 4 (empat) kegiatan utama yang terintegrasi dalam 8 (delapan) subkegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 111.162.260.000, dengan realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp. 34.565.792.179 atau 31,09% dari total anggaran.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan pemerintah kota makassar.
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program kerja yang dilaksanakan.

Faktor Panghambat :

1. Terdapat belanja modal yang tidak dapat terlaksana (Pembangunan revitalisasi karebosi sebesar 65% dari pagu anggaran Dispora makassar.
2. Terdapat beberapa belanja pada kegiatan yang spd nya tidak terbit
3. Adanya pergeseran harga pada saat negosiasi harga sehingga menghasilkan silva anggaran

Tindak Lanjut :

1. Melakukan penyesuaian dengan harga yang telah ditentukan.
2. Kegiatan belanja mdal tersebut telah diantisipasi untuk dilaksanakan di tahun selanjutnya.

C. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Pengembangan Kepemudaan Tahun 2024 meliputi 1 (satu) kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, dengan total alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 3.000.000.000. Realisasi anggaran program ini berhasil mencapai 100%, dengan total penggunaan dana yang sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan dari Pemerintah kota Makassar

D. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 mencakup 7 (tujuh) kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Program ini didukung oleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 11.687.111.956. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi penggunaan dana tercatat sebesar Rp. 9.802.485.383 atau 83,87% dari total anggaran yang tersedia.

Faktor Pendorong :

1. Karena pada Program tersebut merupakan kegiatan rutin operasional kantor.

Faktor Penghambat :

1. Beberapa kegiatan yang SPD nya tidak terbit.
2. Adanya perubahan harga dari hasil negosiasi (harga dari hasil negosiasi Pengadaan barang dan jasa).
3. Link pengadaan tidak ada

Tindak Lanjut :

1. Kedepannya akan lebih teliti dan lebh aktif sehingga adapa menyelesaikan dengan efesien

22. DINAS KEBUDAYAAN

Dinas Kebudayaan Kota Makassar pada Tahun 2024 mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.573.340.539,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 17,098,336,729,- adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 92,06% dengan capaian kinerja 89%

Tingkat Capaian kinerja Program pengembangan kebudayaan tahun 2024 adalah 100% dan penyerapan anggaran sebesar 94,55% senilai 5.318.368.389 dan total pagu anggaran sebesar 5.624.990.400, dengan Realisasi Kinerja sebesar 100% , Capaian ini berasal dari dua kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dan Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota.Faktor pendorongnya adalah Adanya dukungan dari Dewan Kebudayaan dan Penggiat Seni.

Faktor penghambat:

1. Pada SubKegiatan Pembinaan Sumber Daya MAnusia, Lembaga, dan Pranata
2. Kebudayaan dengan target kinerja 350 orang dan realisasi hanya sebanyak 50 orang karena adanya rasionalisasi anggaran.
3. Pada SubKegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga adat tidak terlaksana karena tidak memiliki komponen belanja yang lengkap di DPA TA. 2024.
4. Minimnya ketersediaan SDM terkait pelestarian Kekayaan Budaya.

Faktor pendorong

1. Adanya Kerjasama dalam Tim
2. Adanya Koordinasi antar Lintas OPD baik tingkat Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi.
3. Adanya dukungan dari Dewan Kebudayaan dan Penggiat Seni

Tindak lanjut:

Untuk tahun anggaran berikutnya dibutuhkan ketelitian dalam proses penginputan anggaran sehingga komponen belanja dapat terakomodir dengan baik di setiap kegiatan dan subkegiatan serta perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia terkait pelestarian dan pemajuan kebudayaan.

B. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Capaian target kinerja Program Pengembangan kesenian tradisional tahun 2024 mencapai 100% dan serapan Anggaran sebesar 99,18% yang berasal dari satu (1) Kegiatanya yaitu Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota. Adapun faktor pendorongnya adalah Adanya eksistensi seniman dan budayawan local dalam mempertahankan Kebudayaan khususnya di beberapa keluran dikota Makassar. Faktor penghambatnya adalah : Kurangnya SDM Penata Tari, Music dan Sastra. Dan rencana tindak lanjutnya adalah Pengusulan SDM Penata Tari, Music dan Sastra.

Faktor penghambat:

1. Kurangnya kesadaran sanggar-sanggar kesenian tradisional untuk memberikan informasi sanggarnya ke Dinas Kebudayaan untuk dilakukan pendataan .
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang Seni Budaya (penata tari, music, sastra,dll)
3. Belum adanya sarana dan prasarana pertunjukan pentas seni budaya

Faktor Pendorong:

1.Adanya Kerjasama dalam Tim
2. Adanya Koordinasi dengan Lintas OPD
3. Banyaknya sanggar-sanggar seni sekolah yang semakin berkembang
4. Adanya Eksistensi seniman dan budayawan local dalam mempertahankan

kebudayaan khususnya dibeberapa kelurahan di kota Makassar

Tindak lanjut :

1. Perlunya Sosialisasi di Kelurahan untuk mendaftarkan sanggar-sanggar yang ada di Wilayah Kota Makassar ke Dinas Kebudayaan.
2. Membangun lebih banyak lagi kemitraan budayawan, seniman dalam berpartisipasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan
3. Membangun Koordinasi yang efektif dengan pelaku dan kelompok kesenian dengan Dinas Kebudayaan Kota Makassar.

C. Program Pembinaan Sejarah

Capaian target kinerja Program Pembinaan Sejarah tahun 2024 sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar 75,36% senilai 971.970.540, dengan realisasi kinerja sebesar 63,0% ini berasal dari Satu Kegiatan Yaitu Kegiatan Pembinaan Sejarah lokal dalam satu daerah Kabupaten/kota.Faktor pendorongnya adalah : Banyaknya Bangunan,situs dan makam bersejarah yang memerlukan pemeliharaan

Faktor penghambat:

1. Adanya Pemeliharaan Lumbung Toraja yang tidak dikerjakan karena waktu tidak memungkinkan.
2. Bangunan, Situs dan Makam Bersejarah yang ada di kota Makassar kebanyakan tidak tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Makassar

Faktor pendorong:

1. Adanya Kerjasama dalam Tim
2. Adanya Koordinasi dengan Lintas OPD
3. Banyaknya Bangunan,situs dan makam bersejarah yang memerlukan pemeliharaan

Tindak lanjut: Koordinasi ke semua pihak yang terkait mengenai Sarana dan Prasarana yang perlu untuk segera di berikan pembinaan dan pemeliharaan.

D. Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Realisasi Capaian target kinerja Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya tahun 2024 mencapai 74,0% dan serapan anggaran sebesar 94,30% dengan nilai 2.012.318.858 dengan Tingkat Capaian kinerja sebesar 125,42% , tercapainya target kinerja ini berasal dari kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota . Pada Subkegiatan Pelindungan Cagar Budaya dengan target kinerja 2 Objek sedangkan realisasinya 3 objek sehingga Realisasi kinerja meningkat sampai 150% begitu pula pada sub kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dengan target kinerja 32 Objek sedangkan realisasinya mencapai 40 objek.

Faktor penghambat:

1. Pada Subkegiatan Penetapan Cagar Budaya dengan target 15 Objek dan terealisasi hanya sebanyak 8 Objek dikarenakan sulitnya mendapatkan hak kepemilikan bangunan yang menjadi salah satu pendukung dalam kajian dan sidang penetapan yang dilaksanakan oleh tim ahli cagar budaya.
2. Adanya ketakutan masyarakat yang memiliki bangunan CAgar Budaya apabila bangunannya sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya akan diambil alih oleh Pemerintah.
3. Pada Subkegiatan penerbitan izin Membawa Cagar Budaya Ke luar Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota dengan target 6 objek dan hanya terealisasi 2 objek karena pada tahun 2024 ini pada kegiatan tersebut masih sebatas pengkajian tata cara dan petunjuk teknis.

Faktor pendorong

1. Adanya Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan stakeholder dalam hal ini Balai Pelestarian Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulsel, Kemenristek serta Pemerhati Cagar Budaya
2. Adanya apresiasi masyarakat terhadap Pendaftaran Dan Pendataan bangunan Cagar Budaya.

Tindak lanjut:

1. Koordinasi dengan semua pihak yang terkait agar proses sidang penetapan di tahun anggaran yang baru nanti dapat berjalan lebih efektif agar prosesnya jauh lebih cepat
2. Perlunya Sosialisasi ke Masyarakat atau Pemilik bangunan tentang Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya.
3. Perlunya Tim Kegiatan penerbitan izin membawa Cagar Budaya keluar Daerah lebih efektif dan Efisien waktu didalam melakukan kajian

E. Program Pengelolaan Permuseuman.

Capaian target kinerja Program Pengelolaan Permuseuman Kota Makassar hingga 2024 dengan indikator Persentase Koleksi Museum Kota Makassar yang Terawat dengan baik mencapai 100% dengan serapan anggaran sebesar 89% dan Realisasi kinerja sebesar 84,5% sedangkan indikator Persentase kenaikan jumlah pengunjung Museum Kota Makassar Capaian target kinerja sebesar 59.303 dengan serapan anggaran 89% dan Realisasi kinerja sebesar 59.303 dengan nilai realisasi anggaran sebesar 1.835.184.895 yang keseluruhan berasal dari kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota . Realisasi Kinerja yang besar karena adanya Jumlah Pengunjung Museum yang mencapai 59.303 orang dengan target 2024 pengunjung 5200 orang. Faktor pendorongnya adalah Adanya penataan pameran baru dan promosi melalui Sosial Media.

Faktor penghambat:

1. Pada SubKegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum terdapat beberapa pengadaan barang yang tidak terlaksana karena Pejabat Pengadaan tidak menyepakati harga dan jumlah kuantitas Produk.
2. Tidak mendukungnya anggaran revitalisasi di DPA Tahun Anggaran 2024 .

Faktor Pendorong:

1. Adanya Kerjasama dalam Tim
2. Adanya Koordinasi dengan Lintas OPD
3. Adanya Dana Alokasi Khusus NonFisik BOP-MTB yang diberikan oleh Kementerian Kebudayaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan di Museum
4. Adanya penataan pameran baru dan promosi melalui Sosial Media.
5. Adanya program-program Museum seperti Museum masuk sekolah dan kegiatan Museum yang di adakan di kampus sehingga pelajar dan mahasiswa tertarik untuk mengunjungi Museum.

Tindak lanjut:

1. Masih akan terus menjalin hubungan Kerjasama dan kolaborasi dalam beberapa kegiatan dengan instansi-instansi terkait akademisi, budayawan, sejarahwan, arkeolog, museology, antropolog, dan Museum-museum.
2. Perlunya Pengadaan Sarana dan Prasarana Museum yang berhubungan dengan pelayanan.
3. Perlu membuat Kerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait kegiatan outing class siswa,sehingga Museum dapat menjadi salah satu objek tetap bagi Para Siswa agar lebih memahami sejarah Kota Makassar.

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian target kinerja Program penunjang urusan pemerintahan dengan indikator Persentase Ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah 100% dengan realisasi kinerja 100%, Capaian target kinerja Program penunjang urusan pemerintahan dengan indikator Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sebesar 98,12% dengan realisasi capaian kinerja 88,31% sedangkan indikator Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas sebesar 99,98% dengan Realisasi capaian kinerja 89,96% dan serapan anggaran keseluruhan program ini sebesar 92,97% dengan nilai 6.755.382.932 .

Faktor penghambat:

1. Kurangnya Sumber daya Manusia khusus di bidang Pengadministrasian
2. Kurangnya koordinasi Antara semua belah pihak
3. Adanya kegiatan pemeliharaan kantor yang dialihkan ke anggaran perubahan dikarenakan tidak adanya jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan.

Faktor Pendorong:

1.Adanya dukungan dan Kerja sama antar instansi Mengenai administrasi perkantoran
2.Tersedianya administrasi perkantoran di Dinas kebudayaan kota makassar
3.Jalanya administrasi kantor setiap hari

Tindak lanjut :

1. Menambah sumber daya manuasia khusus di bidang pengadministrasian
2. Adanya koordinasi antar semua belah pihak.

23. DINAS PERPUSTAKAAN

Dinas Perpustakaan Kota Makassar pada Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9.601.852.415,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.727.919.575,- atau 90,89 %, Anggaran tersebut untuk digunakan pemenuhan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 2 Program Utama yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Target Capaian Kinerja yang diperoleh pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 dilihat dari Hasil Keluaran Program dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 6.970.219.415,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.254.841.100,- atau serapan Anggaran sebesar 89,74 % dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat eksistensi perpustakaan sebagai lembaga penunjang Pemerintah Kota Makassar yang mendukung pada Bidang Perpustakaan yang bertujuan dalam membangun Literasi Kebangsaan Masyarakat Kota Makassar. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa Faktor Penghambat yang perlu diatasi agar pencapaian tujuan program dapat berlangsung secara optimal. Untuk itu, Dinas Perpustakaan perlu melakukan berbagai tindak lanjut yang strategis dengan memanfaatkan Faktor Pendorong keberhasilan Program tersebut serta mempercepat pencapaian tujuan yang diharapkan.

Faktor Pendorong :

- Intensitas Aktif dari Staff Administrasi Sekretariat Dinas Perpustakaan;
- Motivasi serta Arahan dari Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan.

Faktor Penghambat :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Dinas, dengan banyaknya Aplikasi SKPD yang terkait pada Pemerintahan Kota Makassar sehingga setiap Staff Administrasi Sekretariat bertanggung jawab menjadi Operator beberapa Aplikasi beserta Pelaporannya;
- Sarana dan Prasarana yang masih kurang baik, gedung yang masih sementara proses pembangunan dan masih dalam proses hukum serta Komputer yang masih menggunakan teknologi lama;
- Adanya beberapa beberapa penggunaan Aplikasi yang baru diterapkan sehingga perlu waktu penyesuaian;
- Tidak adanya Data Center Dinas Perpustakaan sehingga dalam pengumpulan Data sebagai bahan pembuatan laporan butuh kehadiran serta penjelasan dari Bidang terkait;
- Lamanya Proses Pembentukan Surat Keputusan (SK) Kegiatan yang ingin dilaksanakan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Tindak Lanjut SKPD :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Dinas namun dengan Motivasi serta Arahan Pejabat Struktural untuk terus meningkatkan Intensitas Staff dalam percepatan menyelesaikan Berkas Pelaporan;
- Membuat Permohonan Penambahan Staff dengan mempersiapkan Anggaran pada Anggaran Perubahan dan Anggaran Pokok Tahun selanjutnya;
- Berupaya Perampungan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan serta Memohon Penambahan Komputer Teknologi terbaru;
- Mengembang Data Center Internal Dinas Perpustakaan terkhususnya Data untuk Bahan pembuatan Laporan.

B. Program Pembinaan Perpustakaan

Target Capaian Kinerja pada Program Pembinaan Perpustakaan Tahun 2024 dinilai dari Hasil Keluaran Program pada Tahun 2024 dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 2.085.369.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.947.201.675,- atau serapan Anggaran sebesar 93,37 % dengan Capaian Kinerja 144,61 %.

Program Pembinaan Perpustakaan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, berbagai Faktor Penghambat dan Pendorong turut mempengaruhi keberhasilan program ini. Selain itu, peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat vital dalam tindak lanjut pelaksanaan Program tersebut.

Faktor Pendorong :

- Intensitas Aktif dari Staff Bidang Dinas Perpustakaan;
- Intensitas Aktif dari Pustakawan Dinas Perpustakaan;
- Motivasi serta Arahan dari Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan;
- Adanya Kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan Dinas Perpustakaan.

Faktor Penghambat :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional Pustakawan Dinas Perpustakaan, dengan rasio kebutuhan dan ketersediaan tidak memadai;
- Dengan adanya SK Walikota Makassar Nomor 1187/131/KEP/VIII/2017 tertanggal 02 Agustus 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah, sehingga perpustakaan kecamatan, kelurahan, dan kepulauan tidak tersentuh langsung oleh kebijakan dinas perpustakaan menyebabkan pengumpulan Data Perpustakaan tidak terakses secara umum
- Masih kurangnya penganggaran dalam mewujudkan capaian target program;

- Lamanya proses pembentukan surat keputusan (sk) kegiatan yang ingin dilaksanakan dari bagian hukum sekretariat daerah kota makassar;
- Adanya rasionalisasi anggaran sehingga rencana capaian target program tidak maksimal.

Tindak Lanjut SKPD :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional pustakawan namun dengan adanya penambahan pustakawan PPPK pada dinas perpustakaan serta motivasi dan arahan dari pejabat struktural dan kordinator pustakawan untuk terus meningkatkan intensitas pustakawan dalam percepatan menyelesaikan pembinaan dan peningkatan perpustakaan hingga sesuai dengan standar nasional dalam lingkup Kota Makassar.

C. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Pada Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno mempunyai Indikator Kinerja sebagai parameter penilaian hasil keluaran Program atau Outcome Program yaitu menilai berdasarkan Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan. Target capaian kinerja Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dinilai dari hasil keluaran Program pada Tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 546.264.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 525.876.800,- atau serapan Anggaran sebesar 96,27 % dengan Capaian Kinerja 99,72 %.

Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno merupakan bagian penting dari upaya untuk menjaga Warisan Budaya dan Sejarah Bangsa. Naskah Kuno dan Koleksi Nasional tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga bagi generasi mendatang. Program ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama Dinas Perpustakaan Kota Makassar, yang berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut program pelestarian tersebut.

Faktor Pendorong :

- Intensitas Aktif dari Staff Bidang Dinas Perpustakaan;
- Intensitas Aktif dari Pustakawan Dinas Perpustakaan;
- Motivasi serta Arahan dari Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan;
- Adanya Kerjasama dengan Pihak Lain yang terkait dengan Dinas Perpustakaan.

Faktor Penghambat :

- Masih Kurangnya Penganggaran Pengadaan Bahan Pustaka serta Koleksi dan Pelestarian Naskah Kuno;
- Lamanya Proses Pembentukan Surat Keputusan (SK) Kegiatan yang ingin dilaksanakan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- Adanya Rasionalisasi Anggaran sehingga Rencana Capaian Target Program tidak Maksimal;
- Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Perawatan serta Digitalisasi Naskah Kuno.

Tindak Lanjut SKPD :

- Dalam Kurangnya Penganggaran Pengadaan Bahan Pustaka terbarukan, dengan melibatkan Masyarakat dalam Meningkatkan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka;
- Melakukan Sosialisasi Pentingnya Pelestarian Naskah Kuno kepada Masyarakan Kota Makassar hingga bisa diakuisisi untuk menyelamatkan Peradaban Masyarakat Kota Makassar.

24. DINAS KEARSIPAN

Pada tahun 2024, Dinas Kearsipan Kota Makassar melaksanakan 4 (Empat) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan. Dari keseluruhan total program, terdapat 3 (Tiga) program utama dan 1 (satu) program penunjang/pendukung. Besaran anggaran yang dikelola Dinas Kearsipan Kota Makassar yaitu

Rp.7,626,903,928.00 realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 6,719,211,221.00, atau 88,10%, capaian kinerja 100%.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

1. Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik dengan target 90% dan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan IV adalah 100%.
2. Persentase Ketersedian Laporan keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah target 100%, realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan IV adalah 100%.
3. Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas target 90%, realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan IV adalah 100%.

Alokasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 6,199,808,328.00 realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 5,484,577,435.00 atau 88.46% dan capaian kinerja 100%.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja sehingga sesuai target dari target yang direncanakan adalah:

1. Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar selalu melakukan rapat dan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan untuk memberikan arahan dan solusi dalam percepatan pelaksanaaan kegiatan.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja terdapat pada:

1. Untuk pemeliharaan gedung dan bangunan kantor tidak terealisasi karena gedung kantor yang ditempati bukan aset Dinas Kearsipan.

Tindak Lanjut:

1. Mengajukan gedung kantor di tahun 2025 untuk ditempati Dinas Kearsipan Kota Makassar dan aset terdaftar di Dinas Kearsipan Kota Makassar.

B. Program Pengelolaan Arsip

Indikator Kinerja Program Pengelolan Arsip adalah sebagai berikut :

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, target 250 arsip, realisasi sampai dengan triwulan ke IV adalah 252 arsip , capaian 100.8%.
2. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, target 5 SKPD, realisasi sampai dengan triwulan ke IV adalah 5 SKPD, capaian 100%.
3. Peningkatan SDM pengelola kearsipan, target 10 orang, realisasi sampai dengan triwulan IV adalah 10 orang dengan capaian 100%.

Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 656.033.600,-** Realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar **Rp. 536.087.360,-** atau **81.71**%.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja sehingga sesuai target dan ada yang melebihi dari target yang direncanakan adalah:

1. Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar selalu melakukan rapat dan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan untuk memberikan arahan dan solusi dalam percepatan pelaksanaaan kegiatan.
2. Kerjasama yang baik antar Tim Pelaksana Kegiatan
3. Sinergitas SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Faktor Penghambat:

1. SDM fungsional arsiparis di setiap SKPD kompotensinya bukan arsiparis.

Tindak Lanjut :

1. Melakukan bimbingan teknis untuk peningkatan kompotensi fungsional arsiparis di tahun 2025.

C. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip adalah Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat. Target kinerja pada tahun 2024 adalah 10 Box arsip, realisasi sampai dengan triwulan ke IV adalah 10 Box Arsip, capaian 100%.

Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 766.710.900,-**, realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar **Rp. 697.843.926**,- atau **91.02**%.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja sehingga sesuai target dan ada yang melebihi dari target yang direncanakan adalah:

1. Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar selalu melakukan rapat dan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan untuk memberikan arahan dan solusi dalam percepatan pelaksanaaan kegiatan.
2. Kerjasama yang baik antar Tim Pelaksana Kegiatan
3. Sinergitas SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja terdapat pada:

1. SDM fungsional arsiparis di setiap SKPD kompotensinya bukan arsiparis.

Tindak Lanjut:

1. Melakukan bimbingan teknis untuk peningkatan SDM fungsional arsiparis di tahun 2025.

D. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Indikator program Prosentase Perijinan Pengunan Arsip yang diterbitkan adalah Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota Makassar yang mendapat pelayanan izin, target kinerja 12 arsip, realisasi sampai dengan triwulan IV adalah 12 arsip, capaian 100%.

Alokasi angaran sebesar **Rp. 4.351.100,-** realisasi sampai triwulan IV sebesar **Rp 702.500,-** atau **16.15**%.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja terdapat pada:

1. Belum adanya kantor Dinas Kearsipan yang representatif sehingga pelayanan belum maksimal.
2. Belum ada aplikasi terkait Perizinan Penggunaan Arsip
3. Belum adanya anggaran Survey Kepuasaan Masyarakat.

Tindak Lanjut:

1. Mengajukan gedung kantor di tahun 2025 untuk ditempati Dinas Kearsipan Kota Makassar.
2. Segera dibuatkan aplikasi terkait Perizinan Penggunaan Arsip
3. Untuk dianggarkan Survey Kepuasaan Masyarakat.

25. DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Total anggaran yang mendukung program ini adalah sebesar Rp.25.605.316.435 Capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar yaitu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 90,00 %, persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah 100,00% dan persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas 90,00% dengan realisasi anggaran Rp.23.027.352.699 atau 89.93% dari jumlah total anggaran. Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 96.30% dengan kategori Sangat Tinggi.

Adapun faktor Pendorong adalah Adanya Upaya Menyelesaikan kegiatan dan tersedianaya dana/anggaran serta terjalin kerjasama serta komunikasi antara steak holder terjalin dengan baik. Faktor penghambat adalah Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja

modal hanya sebagian yang terealisasi dan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya tidak tersedia anggarannya sehingga mempengaruhi serapan realisasi anggaran dalam Proses pengadaan barang. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan steak holder terkait agar permasalahan yang terjadi untuk tahun 2024 tidak terulang kembali pada tahun berikutnya.

B. Program Perikanan Tangkap

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 3.651.025.100. Capaian kinerja sampai Triwulan IV yaitu jumlah total produksi perikanan tangkap dari target 20307 ton tercapai sebanyak 20579,7 ton, cakupan bina kelompok nelayan dari target 143 kelompok pada triwulan IV terealisasi sebanyak 143 kelompok. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada program ini sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 1.619.024.680 atau 44.34% dari jumlah total anggaran. Rata–rata capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 101.23 % dengan kategori sangat tinggi.

Adapun faktor pendukung dari program ini yakni adanya bantuan sarana dan prasarana alat tangkap serta sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yag berdampak pada capaian target program, dan didukung kerjasama antar stakeholder terkait serta komunikasi antar pihak yang terjalin dengan baik. Faktor penghambat anggaran yang tidak terealisasi sesuai dengan target karena adanya pekerjaan Rehabilitasi Pembangunan TPI Rajawali (Anggaran Perubahan) yang tidak dilaksanakan akibat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak mencukupi sehingga berdampak pada realisasi penyerapan anggaran. Tindak lanjutnya adalah dengan ditingkatkannya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama terhadap pihak terkait dalam menyelesaikan kegiatan tersebut sehingga kegiatan dapat selesai sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan.

C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini didukung oleh 3 (Tiga) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.184.245.350,-. Capaian kinerja sampai Triwulan IV Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebesar 1.519.58 Ton atau 98.93 % dari target 1.535.96 Ton dengan kategori sangat tinggi, dengan realisasi aggaran Rp. 1.978.102.872,- atau 90.56 % dari jumlah total anggaran.

Adapun faktor pendukung dari program ini yakni SDM yang mendukung, sarana, prasarana serta keuangan yang memadai, serta komunikasi dengan penyuluh dan stakeholder lainnya terjalin dengan baik, adapun faktor penghambatnya yaitu Terdapat sub kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan namun belum tersedia Surat Penyediaan Dana (SPD) sehingga mempengaruhi serapan realisasi anggaran,

Target produksi perikanan budidaya tidak maksimal karena terdapat kendala faktor alam (Tambak terdampak banjir dan lahan yang tidak mendukung produksi -lumpur tebal, pencemaran dan persiapan lahan yang tidak optimal, selain itu cuaca ekstrim mempengaruhi pertumbuhan ikan - malas makan dan mati). Sedangkan Tindak lanjutnya adalah melakukan koordinasi, komunikasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan serta melakukan pendampingan maksimal dalam kepada kelompok, dan diharapkan bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat (sarana dan prasarana pembudidayaan ikan) pemanfaatannya dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan nilai produksi perikanan budidaya.

D. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 61.300.500. dengan realisasi anggaran Triwulan IV Rp.

60.164.500,- atau 98.15 % dari jumlah total anggaran. Target kinerja Persentase Jumlah Kelompok unit usaha yang diawasi dari target 100% telah terealisasi sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi.

Adapun Faktor Pendukung dari Kegiatan ini adalah kinerja tim yang terjalin baik dan keterbukaan Kelompok Budidaya Perikanan dalam menerima dan memberikan data dan informasi, sedangkan Faktor Penghambatnya adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya pembudidaya ikan. Tindak lanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait berkenaan dengan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.

E. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.1.860.472.838. Realisasi anggaran pada Triwulan IV TA 2024 sebesar Rp. 1.576.854.000,- atau 84.76 %. Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2024 jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dari target 27,5 ton telah terealisasi 34,30 ton. Rata–rata Capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 124.73 %.

Adapun Faktor Pendukung dari Kegiatan ini adalah sumber daya manusia yang mendukung, koordinasi dengan para stakeholders terkait terjalin dengan baik, dan adanya peningkatan komunisasi dan pembinaan bidang perikanan tangkap dengan pengolah hasil perikanan tangkap dalam peningkatan produksi. Capaian realisasi kinerja sampai triwulan IV sebesar 124.73% hal ini didukung pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh kelompok pengolah dalam melakukan pemasaran hasil perikanan sehingga mempengaruhi untuk memproduksi hasil produk perikanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya kompetensi kelompok pemasar berskala kecil terhadap produksi dan pemasaran hasil perikanan dan kurangnya kerjasama kelompok pengolah dengan SKPD terkait dalam proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Tindak lanjutnya adalah pelatihan pengolah dan pemasaran hasil perikanan untuk kelompok pengolah dan pemasar, dan koordinasi serta kerjasama kelompok pengolah dan pemasar dengan SKPD terkait.

F. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 5.480.688.440 Capaian kinerja sampai triwulan IV Tahun 2024 yakni untuk Indikator kinerja produktivitas pertanian per hektar per tahun dengan target sebesar 7 ton/hektar, rata-rata saat ini tercapai 6,5 ton/hektar dengan persentase capaian 92,86%. Indikator Kelompok Tani yang tercakup dalam pembinaan telah tercapai 100% pada akhir triwulan IV, dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebanyak 228 Kelompok. Adapun indikator Persentase Kontribusi Sektor PertanianTerhadap PDRB Kota Makassar dengan target 0,1% tercapai yakni sebesar 0,1% dengan persentase realisasi sebesar 100%, untuk kontribusi PDRB dengan target Rp.211,25 M tercapai sebesar 115,24 M dengan pencapaian 54,55% namun angka ini belum final karena masih menunggu update beberapa komoditi. Pada indicator Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak telah terealisasi 321 sampel/619 ekor atau sebesar 80.25% / 206,3% dari target 400 sampel / 300 ekor dengan realisasi anggaran Rp.4.875.314.401,- atau sebesar 88.95 % dari jumlah total anggaran. Rata –rata Capaian kinerja sampai triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 108.50% dengan kategori Sangat Tinggi.

Adapun Faktor pendukung dari program ini yakni kerjasama antar stakeholder bidang pertanian yang terjalin dengan baik, baik secara vertikal maupun horisontal. Pada program

ini terdapat beberapa kegiatan seperti pada kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG), Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dimana target capaian 9 kelompok dan telah diserahkan ke masyarakat (Minifarm Ayam Ras Petelur) Sebanyak 18 Kelompok. Tingginya permintaan dari kelompok / masyarakat menjadikan kegiatan ini melebihi jumlah target yang direncanakan. Faktor penghambat secara umum adalah tahapan penerbitan SK yang mengalami hambatan pada beberapa level. Pada UPT Pembibitan adalah mobiler kantor yang tidak layak pada UPT Pembibitan. Tindaklanjut yang dilakukan yaitu melakukan monitoring pada kelompok untuk memantau perkembangan (Minifarm Ayam Ras Petelur) yang diserahkan ke masyarakat (Minifarm), serta perlunya pengadaan mobiler baru pada UPT Pembibitan.

G. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Program ini didukung oleh 1 (satu).kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 136.133.000,- dan telah terealiasi sebesar Rp.121.905.500,- atau sebesar 89.55% dari total pagu anggaran. Capaian kinerja sampai Triwulan IV sudah terealisasi 100% dengan kategori sangat tinggi. Pada program ini telah dilakukan sosialisasi terkait rencana penetapan lahan yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan menghadirkan penyuluh dan kelompok tani dan mengkomunikasikan hal-hal terkait tindak lanjut Perda LP2B, serta juga telah dilaksanakan groundchek pada beberapa lokasi.

Adapun faktor pendukungnya sumber daya manusia (SDM) yang mendukung, koordinasi dengan para stakeholder terkait terjalin dengan baik, sedangkan yang dapat menjadi faktor penghambat adalah kendala pada sistem pengadministrisian kegiatan yang membutuhkan waktu lebih lama, dalam hal ini ketentuan mengenai SK kegiatan yang harus tertanda walikota dan berproses lama pada bagian hukum. Kendala-kendala dimaksud saat ini berpengaruh terhadap capaian akhir kegiatan. Saat ini sedang disusun peta peminatan lahan yang selesai di bulan Desember 2024.

H. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.153.634.660 Capaian kinerja sampai Triwulan IV untuk Indikator kinerja Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular dari target 100% (0 kasus), cakupan Produksi Peternakan dan Hasil Turunannya yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dari target 6.000 ton telah terealisasi sebesar 6.022.2 ton atau sebesar 100.37%, realisasi anggaran sebesar Rp 1.772.010.190 atau 42.66% dari jumlah total anggaran. Rata–rata Capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 106.44% dengan kategori Sangat Tinggi.

Adapun faktor pendukung dari program ini yakni Koordinasi dan kerjasama antara instansi yang lain, pelaku usaha sektor peternakan dan komunitas pecinta hewan dengan pemerintah dengan baik sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan baik.

Sumber daya / personal tim lengkap mendukung kegiatan monitoring / pengawasan di lapangan, Tingginya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan hewan, diobati dan divaksin.

Adapun faktor penghambat masih ditemukannya beberapa pelaku usaha / konsumen yang membutuhkan edukasi dalam menghasilkan Produk Peternakan yang ASUH. Selain ini status pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) antara dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dengan Perusahaan Daerah RPH Kota Makassar belum jelas sehingga anggaran belanja modal bangunan gedung kantor di Rumah Potong Hewan sampai saat ini belum dibelanjakan mengingat adanya temuan BPK terkait tumpang tindih kewenangan pengelolaan RPH antara Dinas Perikanan dan Pertanian dengan PD RPH dan untuk

meminimalisir terjadinya penyimpangan dan potensi pelanggaran hukum. Tindak lanjut Koordinasi dengan pimpinan tetap dilaksanakan sebagai bahan masukan kegiatan. Perlunya dilakukan pengusulan/pengangkatan/penambahan tenaga medis dan paramedik kesehatan hewan. Regulasi retribusi pelayanan kesehatan hewan pada UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN). Pemberian pemahaman kepada pelaku usaha serta meningkatkan kerjasama dengan steakholder terkait untuk menghasilkan produk peternakan yang layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait evaluasi Perwali No.53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan daging . Selain itu terkait koordinasi pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) agar lebih intensif sehingga RPH dapat beroperasi lebih optimal.

I. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 43.855,900,-. Capaian kinerja sampai Triwulan IV untuk Indikator kinerja Persentase bencana pertanian yang dikendalikan dari target 5% yakni 100 hektar dari jumlah lahan pertanian adalah 100%, realisasi anggaran sebesar Rp 38.166.860,- dari jumlah total anggaran atau sebesar 87.03%. Telah dilaksanakan pengendalian OPT pada lokasi Kelompok Tani Mamminasae Kelurahan Laikang dan Kelompok Tani Leang Batu Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya.

Adapun faktor Pendukung adalah SDM yang mendukung, koordinasi dengan para Stakeholder terkait terjalin dengan baik, sedangkan faktor penghambatnya Masih kurangnya sarana yang digunakan dalam penanggulangan bencana pertanian. Tindaklanjutnya dilakukan penganggaran terkait sarana yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana pertanian.

J. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.388.100. Capaian kinerja sampai Triwulan IV untuk Indikator kinerja Persentase Perizinan Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi dari target 58 Unit Usaha telah terealisasi sebanyak 68 Unit Usaha atau sebesar 121,36% dengan realisasi anggaran Rp 3.278.000 atau 74,70 % dari jumlah total anggaran. Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 125,87 % dengan Sangat Tinggi.

Adapun faktor Pendukung : Karena adanya trend pemeliharaan hewan kesayangan memberi peluang bagi dokter hewan mandiri untuk membuat klinik/praktek dokter dimana regulasinya adalah harus memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dokter hewan selain itu pelaku usaha yang bergerak pada bidang usaha/bisnis hasil peternakan (daging ayam, daging sapi, telur, dan sebagainya) wajib memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi sedangkan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang membidangi fungsi peternakan hanya mengeluarkan rekomendasi. Sedangkan faktor penghambatnya : Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha obat hewan karena masih ditemukannya obat hewan yang kadaluarsa dan ilegal sementara Dinas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Tindaklanjutnya : Perlu dilakukannya Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan steakholder terkait, berkenaan dengan pengawasan izin usaha pertanian khususnya usaha obat hewan dan usaha produk hewan serta olahannya.

K. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (Dua) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 567.473.900 sudah terealisasi sebesar 331.073.640 atau sebesar 58,34 %. Capaian kinerja sampai Triwulan IV untuk Indikator kinerja Cakupan Bina

Kelompok Petani sudah terealisasi sebesar 390 kelompok dari target 390 kelompok atau sebesar 100 % dengan kategori sangat tinggi dan realisasi anggaran sebesar 58,34% dari jumlah total anggaran.

Adapun faktor pendukung SDM dalam hal ini penyuluh pertanian yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan yang bertugas sebagai penghubung antara SKPD dengan kelompok tani sedangkan faktor penghambatnya adalah cuaca yang tidak mendukung di lapangan dan masih kurangnya sarana dan prasarana penyuluh. Tindak lanjut yaitu Perlu kerjasama antara steakholder terkait serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan peningkatan sarana dan prasarana penyuluh agar dapat lebih maksimal sehingga dapat menerapkan segala kemampuan yang dimiliki ke masyarakat dan kelompok tani.

26. DINAS PARIWISATA

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yakni;

a. persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan kapasitas dengan target kinerja 90%,
b. Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan target Kinerja 100%, dan
c. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dengan Target Kinerja 90%,. Total anggaran yang mendukung program ini setelah perubahan adalah sebesar Rp. 13.602.719.288,- dari pagu awal sebesar Rp. 15.341.252.764,-.

Sehingga ada pengurangan anggaran sebesar (Rp. 1.738.533.476,-). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar 94.41%, 100%, dan 80% dengan realisasi anggaran Rp 11.539.572.684,- atau 84,43% . *Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 90% dengan kategori Tinggi*.

Adapun **faktor Pendorong** adalah adanya kerjasama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal serta motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, sedangkan **faktor penghambat** adalah proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi dan beberapa permintaan SPD yang ditolak oleh BUD. **Tindak lanjut** yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah semua kegiatan dan sub kegiatan harus terus dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator kinerja program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yaitu a) Tingkat Hunian Akomodasi dengan target kinerja 51%, dan b) Jumlah Destinasi yang Berstandar Nasional target kinerja 1 Destinasi. Total anggaran yang mendukung program ini setelah perubahan adalah sebesar Rp. 8.632.867.920 dari pagu awal sebesar Rp. 21.110.693.800,-. Sehingga terdapat pengurangan sebesar (Rp. 10.003.584.580,-). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar 55,48% dan 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.092.728.854,- atau 63,86%. *Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 86,43% dengan kategori Tinggi*.

Adapun **faktor Pendorong** adalah Adanya dukungan dari stakeholder kepariwisataan baik pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sedangkan **faktor penghambat** adalah akurasi data industri pariwisata yang perlu ditingkatkan serta pemahaman masyarakat tentang sadar wisata masih perlu disosialisasikan secara masif. **Tindak lanjut** yang diperlukan ialah dengan memperhatikan percepatan pencairan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Rencana Aksi

dan Anggaran Kas serta menyusun dan mengupdate data industri secara berkesinambungan.

C. Program Pemasaran Pariwisata

Indikator kinerja program Pemasaran Pariwisata yaitu a) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Makassar dengan target kinerja 8%, b) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan dengan target kinerja 4%. Total anggaran yang mendukung program ini setelah perubahan adalah sebesar Rp. 10.877.539.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 12.328.349.000,-. Sehingga ada pengurangan sebesar (Rp. 1.450.810.000,-). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar 25,13% dan 87.23% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.938.880.095,- atau 82,18%. *Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 103.33% dengan kategori Sangat Tinggi*.

Adapun **faktor Pendorong** adalah adanya digital tourism menjadi cara efektif dalam melakukan promosi dan pemasaran pariwisata, Co Branding siap membantu meningkatkan angka kunjungan wisatawan melalui kerjasama terpadu dengan pemerintah kota, dan kerjasama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal. sedangkan **faktor penghambat** adalah masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, keterbatasan kegiatan /akses dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi, dan adanya pergantian pejabat pengadaan. **Tindak lanjut** yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah kerjasama dengan brand-brand yang telah menjadi mitra Co Branding Kemenpar, memaksimalkan fungsi TIC (Tourism Information Centre) yang dimiliki, dan kegiatan dimaksimalkan terus dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas pariwisata.

D. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator kinerja program yakni a) Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi mendapatkan HAKI dengan target 125 orang dan b) PAD Sektor Ekonomi Kreatif dengan target kinerja 15,57%. Total anggaran yang mendukung program ini setelah perubahan adalah sebesar Rp. 10.993.434.100,- dari pagu awal sebesar Rp. 13.472.215.700,-. Sehingga ada pengurangan anggaran sebesar (Rp. 2.478.781.600,-). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.096.072.560,- atau 91,84%. *Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi.*

Adapun **faktor Pendorong** adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal, motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, sedangkan **faktor penghambat** adalah masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, keterbatasan kegiatan /akses dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi. **Tindak lanjut** yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah adalah semua kegiatan dan sub kegiatan harus terus dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

E. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja program yaitu, a) Jumlah peserta pelatihan skill training gratis sektor pariwista target kinerja jumlah peserta 850orang, b) Persentase SDM Pariwisata yang mendapatkan sertifikasi dengan target kinerja sebesar 6,4% dan c) Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat peningkatan kapasitas dengan target kinerja 10 %. Total anggaran yang mendukung program ini setelah perubahan adalah Rp. 4.533.467.100,-dari pagu awal sebesar Rp. 6.039.201.500,-. Sehingga ada pengurangan anggaran sebesar

(Rp. 717.065.000,-). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar 132,94%, 226%, dan 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.010.129.559,- atau 75,35%. *Rata–rata Capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 97,92% dengan kategori Sangat Tinggi*.

Adapun **faktor Pendorong** adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal, motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, dan tingginya antusias tenaga kerja untuk mengikuti sertifikasi kompetensi tenaga kerja kepariwisataan, sedangkan **faktor penghambat** adalah masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, keterbatasan kegiatan /akses dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi. **Tindak lanjut** yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah adalah semua kegiatan dan sub kegiatan harus terus dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwwa rata-rata capaian kinerja seluruh program Dinas pariwisata selama triwulan IV adalah 95,54% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan capaian kinerja keuangan seluruh program yakni sebesar 82,28% dengan kategori Tinggi.

27. DINAS PERDAGANGAN

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13,375,949,828.00 dan realisasi anggaran s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 11,461,610,998.00 (85,69 %).

Indikator kinerja dari program ini adalah: (1). Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat Daerah, dengan target kinerja sebesar 100 %. Untuk indikator ini capaian kinerjanya Sampai dengan triwulan IV sebesar 95,71 % dari target 100%. Untuk Realisasi keuangannya sebesar Rp 9.570.446.683. dari Total pagu anggaran sebesar Rp. 10.996.463.878. atau sudah mencapai 87,03 %. (2). Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik, untuk indikator capaian kinerjanya Sampai dengan triwulan IV sudah mencapai 89,05 % dari target kinerja sebesar 90 %. Sedangkan untuk Realisasi keuangannya sebesar Rp 1.797.040.115 atau sudah mencapai 81,76 % dari Total pagu anggarannya sebesar Rp. 2.197.985.950. (3). Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, untuk indikator ini capaian kinerja sampai dengan triwulan IV sudah mencapai, 60,57 % dari target 90 %. Realisasi Keuangannya sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp.94,124,200 atau sudah mencapai 51.86 % dari Total Pagu anggaran sebesar Rp.181,500,000.

Adapun Faktor Pendorong Dari Program Ini adalah :

- Adanya dukungan yang besar dari Kepala SKPD untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Adanya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanakan setiap bulan/Triwulan. Sehingga pada akhir periode akan terserap anggaran secara optimal sesuai dengan jumlah anggaran tahunan yang telah tersedia;
- Ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya pelaksanaan kegiatan rutin setiap bulannya;
- Semangat dan etos kerja pegawai yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Adapun Faktor Penghambat dari Program ini adalah :

- untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya masih menunggu pemenang pengadaan barang dan jasa atau dari pihak ketiga
- Menentukan penyedia membutuhkan waktu verifikasi yang lebih lama;
- Koordinasi dengan penyedia terkadang membutuhkan waktu yang lama sehingga menyebabkan penyelesaian dokumen pengadaan barang/jasa terlambat.
- Jumlah SDM yang tidak memadai.

Tindak Lanjut :

- Melakukan evaluasi secara menyeluruh dan percepatan pelaksanaan terhadap semua program dan kegiatan yang ada pada program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota di masa yang akan datang
- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan target yang belum tercapai;
- Melakukan identifikasi dan menentukan penyedia yang memenuhi persyaratan;
- Mengoptimalkan koordinasi dengan penyedia;
- Mengusulkan tambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan.

B. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan, dengan target kinerja sebesar 65% (dari 13.277 atau 13.277 dibagi 5 Tahun, kali 65% izin usaha atau Target kinerjanya pada Tahun 2024 sebesar 1.726 izin usaha). Adapun realisasi kinerja pada indikator ini sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 1.737 usaha atau sudah mencapai 100,6%. Sedangkan untuk realisasi Anggarannya sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp.315,882,300. atau sebesar 97,13 %. dari pagu anggaran sebesar Rp.25.232.600. Rata – rata Capaian kinerja Program ini sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 97,13 % dengan kategori Tinggi.

Adapun Faktor Pendorong pada Program ini adalah :

- Dukungan kepala SKPD berupa kebijakan terhadap fasilitasi perizinan terutama perizinan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung ditempat di berikan kemudahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Terjalinnya koordinasi yang baik Dinas perdagangan Kota Makassar dan Dinas PTSP dan Penanaman Modal Kota Makassar dalam pengelolaan perizinan.

Adapun Faktor penghambat pada Program ini adalah :

- Kondisi ekonomi secara Nasional belum membaik sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum membuka kegiatan usahanya termasuk di beberapa hotel yang ada di Kota Makassar
- Terbatasnya anggaran operasional untuk pegawai yang melakukan kegiatan pemantauan atau pengawasan di kegiatan ini

Tindak Lanjut :

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target Kinerja
- Melakukan Pendataan dan pengawasan semua jenis usaha perdagangan baik Toko swalayan, Gudang, Toko waralaba dan minuman beralkohol golongan B dan C yang lebih intensif lagi di wilayah Kota Makassar.

C. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 86.042.700. dan realisasi anggaran s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 77,679,600.00 (92,80 %). Indikator kinerja dari program ini ada 2 yaitu : (1). Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan target Kinerja sebesar 0 Pasar. Adapun Realisasi indikator kinerja Program ini sampai dengan Triwulan IV sebesar 0 pasar,- atau

sudah mencapai 0 %, Sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar Rp. 0, - atau 0 %, dari pagu anggaran sebesar Rp 0.; (2). Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang mendapat pembinaan dengan Target Kinerja Sebesar 1 Dokumen (100 orang). Adapun realisasi indikator kinerja program ini sampai dengan Triwulan IV Sebesar 1 Dokumen (100 orang). atau sudah mencapai 100 %. Sedangkan untuk realisasi anggarannya sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 77,679,600. atau 92.80 % dari pagu anggaran sebesar Rp 86.042.700.

Adapun Faktor pendorong dari program ini adalah:

- Jumlah pelaku usaha perdagangan pengelola sarana distribusi perdagangan untuk pembinaan dan pengendalian di kota Makassar sangat besar
- Dukungan Walikota Makassar Untuk mewujudkan adanya Smart pasar Tradisional yang berstandar SNI sangat besar.
- Adanya Dukungan Pemerintah Pusat untuk pembangunan pasar rakyat berstandar SNI sangat besar dengan memberikan Dana Tugas pembantuan Untuk pembangunan Pasar Sawah berstandar SNI.

Adapun Faktor penghambat dari program ini adalah:

- Alur kas anggaran untuk kegiatan dan sub kegiatan Pembinaan terhadap pengelola saran distribusi perdagangan masyarakat masuk di triwulan IV sehingga pelaksanaan di lakukan di akhir bulan Nopember

Tindak Lanjut :

- Terus berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk percepatan pembangunan Smart Pasar Tradisional

D. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2,258,787,600.00 dan realisasi anggaran s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 2,081,488,400.00 atau 92.15 % dari anggaran yang tersedia. Indikator kinerja dari program ini ada 2 yaitu (1). Persentase Barang kebutuhan pokok dengan Harga Stabil dengan Target Kinerja Sebesar 33,33 % dari 24 jenis bahan kebutuhan pokok yang terpantau harganya atau ada 9 jenis bahan kebutuhan pokok yang terpantau harganya atau 4 Laporan. Adapun realisasi indicator kinerja pada program ini sampai dengan Triwulan IV sudah mencapai 100 %. Sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar Rp. 151,893,800 atau Sudah mencapai 51,40 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 295,534,200; (2). Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil dengan Target Kinerja Sebesar 33,33 % dari 9 Jenis kebutuhan pokok yang di stabilkan harganya atau ada 4 jenis bahan kebutuhan pokok yang di stabilkan harganya atau 4 Laporan. Adapun realisasi indikator kinerja pada program ini sudah sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 %. Sedangkan untuk realisasi anggaran Program ini, sebesar Rp. 1,929,594,600.00 atau sebesar 98,29 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1,963,253,400.

Adapun Faktor pendorong :

- Tersedianya anggaran dari program dan kegiatan ini
- Adanya Kerjasama yang baik Dinas perdagangan, Bulog, PD Pasar, Dinas Ketahanan Pangan, Kepolisian, kejaksaan dan instansi terkait dalam pengendalian harga kebutuhan pokok

Adapun Faktor penghambat pada Indikator program ini adalah:

- lambatnya pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa.

Tindak Lanjut :

- Percepatan pelaksanaan pelelangan pengadaan komponen barang yang ada dalam DPA Kegiatan pasar murah bersubsidi di masa masa yang akan datang.

E. Program Pengembangan Ekspor

Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 5 (Lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 925,554,400.00 dan realisasi anggaran s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 748,099,371.00 atau sebesar 80.83% dari anggaran yang tersedia. Indikator kinerja dari program ini adalah Peningkatan Nilai ekspor dengan target Kinerja sebesar $ 579.222.225 US Dollar. Adapun capaian indikator kinerja pada program ini sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar $ 876.508.732 US Dollar atau sudah mencapai 151 %.

Adapun Faktor pendorong dari program ini adalah :

- Terjalinnya Koordinasi yang baik di antara beberapa lembaga, baik Lembaga Pemerintah maupun lembaga lainnya dalam rangka update data Ekspor dan Impor di Kota Makassar
- Tersedianya tenaga administrator yang cakap dan memahami tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas.
- Tersedianya data - data Usaha dan Pelaku Usaha Ekspor Unggulan di Kota Makassar yang berpotensi untuk di bina dan dikembangkan

Adapun Faktor penghambat dari pelaksanaan Program ini adalah :

- Masih kurangnya petugas lapangan dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pendataan pelaku ekspor di Kota Makassar.

Tindak Lanjut :

- Memaksimalkan petugas lapangan yang ada untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha eksport sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

F. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp . 1,349,122,826.00 dan realisasi anggaran s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 1,113,883,480.00- atau sebesar 82.56 % dari anggaran yang tersedia. Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase alat alat ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku. Adapun Target kinerja dari program ini adalah 70 % (70 % dari jumlah 2000 alat UTTP yang ada atau 1.400 jumlah alat UTTP yang bertanda Tera sah yang berlaku). Adapun capaian Indikator kinerja pada program ini sampai dengan Triwulan IV sebesar 1.466 alat UTTP yang sudah dilakukan tera ulang atau sudah mencapai 104,71 %.

Adapun faktor pendukung dari program ini adalah :

- Tingkat kesadaran pelaku usaha perdagangan dan perindustrian untuk menera alat UTTP yang dimiliki semakin baik.

Adapun Faktor penghambat dari pelaksanaan Program ini adalah :

- Semakin berkurangnya ASN fungsional Penera yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha perdagangan dan pelaku usaha perindustrian yang memiliki alat UTTP di karenakan beberapa tenaga fungsional penera Sudah memasuki masa Pensiun.

Tindak Lanjut :

- Mengusulkan ke BKPSDM untuk penambahan pegawai fungsional penera
- Mengusulkan anggaran bagi ASN untuk ikut Pendidikan dan pelatihan penera.

G. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 314.609.800 dan realisasi anggaran s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 102,668,894 (32.63 %). Indikator Kinerja pada program ini adalah Cakupan Bina Kelompok pedagang Usaha Informal. Target kinerjanya Tahun 2024 sebesar 500

kelompok. Adapun capaian indikator Kinerja program ini sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 0, atau masih 0 %. Sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar Rp. 0 atau 0 % dari total anggaran Sebesar Rp. 209.448.400.

Adapun faktor pendukung dari program ini adalah : Tingginya minat para pelaku usaha perdagangan untuk di ikutkan dalam pameran produknya dan kegiatan sosialisasi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun Faktor penghambat dari pelaksanaan Program ini adalah : Belum lengkapnya secara keseluruhan Data Usaha perdagangan yang ada di Kota Makassar.

Tindak Lanjut :

- Terus berkoordinasi dengan pihak pihak lain, terkait dengan data data usaha perdagangan yang ada di Kota Makassar.

H. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 1,698,773,900. dan realisasi anggaran s.d Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 183,910,692. atau 10.83% dari anggaran yang tersedia. Indikator kinerja program ini adalah yaitu: (1). Pertambahan jumlah Industri kecil dan menengah Di Kota Makassar Dengan Target Kinerja Sebesar 360 IKM. Adapun Capaian indicator Kinerja dari program ini sampai dengan Triwulan IV sebesar 360 IKM atau sudah mencapai sebesar 100 %; (2). Persentase pencapaian sasaran pembangunan Industri Dengan Target Kinerja Sebesar 40 %. Adapun capain kinerjanya sampai dengan Triwulan IV Masih sebesar 0 %; (3). Jumlah peserta pelatihan skill Training Gratis sektor Perindustrian Dengan Target Kinerja Sebesar 250 Orang. Adapun capain kinerjanya sampai dengan Triwulan IV sebesar 150 Orang atau sudah mencapai 60%..

Adapun faktor pendukung dari program ini adalah :

- Adanya dorongan dan motivasi dari kepala Dinas untuk melakukan percepatan pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan
- Tersedianya anggaran pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan

Adapun Faktor penghambat dari pelaksanaan Program ini adalah : Lambatnya informasi pelaksanaan pameran pameran dari daerah penyelenggara sehingga persiapan pelaksanaan kegiatan pameran yang diikuti kurang optimal.

Tindak Lanjut : Mengoptimalkan kegiatan pelaksanaan pameran pameran yang diikuti dan Mengoptimalkan kegiatan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha industi sehingga pencapaian target kinerja bisa lebih meningkat.

I. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 291.943.000 dan realisasi anggaran s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 232,435,307 atau sebesar 79,62 % dari anggaran yang tersedia. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten Kota dengan indikator kinerjanya adalah yaitu: (1). Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Intansi Yang Terkait Dengan Target Kinerja Sebesar 85 % (85 % dari Base Line Data 106 izin usaha industri yang Di pantau) atau sebesar 90 izin usaha Industri yang di pantau dan di awasi. Adapun Capaian target indicator kinerja program ini sampai dengan Triwulan IV sebesar 360 izin usaha yang telah dilakukan pemantauan dan pengawasan dengan nilai persentase sebesar 400 %; (2). Cakupan binaan kelompok pengrajin. Dengan target kinerja sebesar 360 kelompok IKM. Adapun capaian indikator kinerja pada program ini sampai dengan Triwulan IV adalah 360 Kelompok IKM Binaan atau 100 %. Catatan : Kegiatannya yang mendukung

adalah Penerbitan izin usaha Industri (IUI), Izin perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan Kawasan industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun faktor pendorong dari program ini adalah :

- Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan izin usaha Industri
- Tersedianya data izin usaha industri yang akan di awasi dan tersedianya SDM yang melaksanakan kegiatan pengawasan.

Adapun faktor penghambat dari program ini adalah :

- Masih banyak pelaku usaha industri yang belum mengetahui adanya aplikasi sistem SIINas

Tindak lanjut :

- Lebih memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan perizinan sektor perindustrian sehingga dapat mencapai target kinerja lebih cepat
- Perlunya dilaksanakan sosialisasi terkait dengan sistem aplikasi SINas.

J. Program Pengeloalaan Sistem Informasi Industri Nasional

Untuk realisasi anggaran dari program ini sebesar Rp. 0- atau 0% - dari pagu anggaran sebesar Rp 616.486.900.

Adapun faktor pendorong dari program ini adalah :

- Adanya motivasi dan kerjasama yang kuat dari seluruh staf yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan evaluasi Kepatuhan perusahaan Industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data Ke SIINas.
- Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di program ini.
- Adanya Dukungan yang besar dari Kepala SKPD untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Program ini.

Adapun faktor penghambat dari program ini adalah : Masih rendahnya kepatuhan perusahaan/industri dalam menyampaikan laporan data industrinya ke sistem aplikasi SIINas yang di siapkan oleh Pemerintah.

Tindak lanjut : Melakukan komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha industri dan stakeholder yang ada di Kota Makassar terkait dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

28. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Makassar mempunyai pagu perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 369.395.988.029,-; dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 325.753.034.943,- sehingga total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program sebesar 92,65% (sangat tinggi) dan keuangan sebesar 88,19% dengan predikat tinggi. Adapun realisasi per program dapat dijelaskan sebagai berikut

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program adalah : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 288.317.033.485,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 235.236.686.387,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 93,63% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 88,33% (tinggi)

B. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator kinerjanya adalah :

- Persentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Persentase PKK Aktif

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 16.627.570.140,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp 16.137.577.137,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 100% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 97,05% (sangat tinggi).

C. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerjanya adalah : Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan. Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. Rp. 70.103.212.500,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp 62.077.867.910,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 118,52% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 88,55 (tinggi).

D. Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator kinerjanya adalah : Persentase Perusahaan Daerah Yang Berkinerja Baik. Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 16.348.171.904,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp 12.300.903.509,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 77,94% (tinggi) dan capaian keuangan sebesar 75,24% (tinggi).

Faktor pendorong tercapainya target kinerja program sebagai berikut :

- koordinasi yang intensif baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.
- Kerjasama pimpinan dan staf yang efektif dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan.

Sedangkan Faktor Penghambat adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya SDM aparat pelaksanaan dalam pemahaman tugas pokok dan fungsinya dan beban tugas yang akan di kerjakan.
- Belum optimalnya koordinasi yang dilakukan dengan beberapa SKPD terkait dalam mempedomani dan realisasi sasaran yang akan dilaksanakan

Rencana tindak lanjut yang di rekomendasikan oleh sekretariat daerah adalah :

- Melakukan peningkatan kinerja organisasi dengan mengikuti bimtek kompetensi sesuai tugas dan fungsinya
- Mengoptimalkan koordinasi komitmen SKPD dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam renstra dalam merencanakan kegiatan.
- Tetap aktif berkoordinasi baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah kota Makassar maupun instansi di luar pemerintah kota Makassar.

29. SEKRETARIAT DPRD

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2024 memuat 2 (Dua) program dan 17 (Tujuh Belas) kegiatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp.200.381.624.100.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerjanya adalah :

- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, target 90% dengan realisasi 80%.
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, target 90% dengan realisasi 80%.

Sekretariat DPRD Daerah Kota Makassar mempunyai pagu perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. **211.832.538.327;** dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 178.295.184.068; Jadi** total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program sebesar 90.13% (**tinggi) dan keuangan sebesar** 84.17**% dengan predikat "tinggi"**.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator kinerjanya adalah :

- Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Makassar, target 100% dengan realisasi 90%.
- Tersusun Dan Terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda , Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), target 100% dengan realisasi 90%.
- Terintegrasinya Program- Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD, target 100% dengan realisasi 90%.

Program ini mempunyai pagu sebesar **Rp. 58.109.612.900**; dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. **43.442.900.343**; sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 90% (tinggi) dan capaian keuangan sebesar 74.76% (sedang). Adapun faktor penghambat adalah sebagai berikut: Ketersediaan Anggaran Kas yang tidak memenuhi belanja, serta keterlambatan para PPTK dalam melaksanakan belanja kegiatannya.

Rencana tindak lanjut yang disarankan oleh Sekretariat DPRD adalah: Memperbaiki belanja kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan dan memperbaiki setiap kesalahan, seperti belanja makanan dan minum rapat, pemeliharaan kantor dan lainnya. Mengecek kembali anggaran kegiatan apa yang wajib didahulukan sehingga capaian kinerja bisa membaik, termasuk kegiatan - kegiatan kedewanan dan kegiatan - kegiatan pegawai lainnya.

30. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar mempunyai pagu perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. **38.594.446.696;** dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 33.541.953.284; Jadi** total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program sebesar 99.47% (**sangat tinggi) dan keuangan sebesar** 86.91**% dengan predikat "tinggi**.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerjanya adalah :

- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, target 90% dengan realisasi 90%
- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah, target 100% dengan realisasi 100%.
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, target 90% dengan realisasi 90%

Dengan rincian capaian sebagai berikut :

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 26.003.539.073; dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 22.399.500.151; sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 100% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 86.91% (tinggi).

B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Perda, target dan realisasi “Ada”.
- Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada, target dan realisasi “Ada”.
- Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, target dan realisasi “100%”.

Dengan rincian capaian sebagai berikut :

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 4.003.724.623; dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.611.308.376; sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 100% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 90.20% (tinggi).

C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerjanya adalah :

- Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD, target 100% dengan realisasi 100%.
- Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD, target 100% dengan realisasi 100%.

Dengan rincian capaian sebagai berikut :

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 8.587.183.000; dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.531.144.757; sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 100% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 87,70% (tinggi).

Faktor pendorong tercapainya target kinerja program sebagai berikut :

- Adanya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanakan setiap bulan/ Triwulan sehingga pada akhir periode akan terserap anggaran secara optimal sesuai dengan jumlah anggaran tahunan yang telah tersedia
- Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- Dukungan Koordinasi tim pelaksanaan kegiatan, penyediaan anggaran kegiatan, serta Sarana dan Prasarana Pelaksanaan kegiatan yang cukup baik dan sangat memadai.

31. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar pada Tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp.48.917.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.40.138.234.375 atau 82% dengan kategori tinggi dan realisasi kinerja sebesar 99,74% atau termasuk kategori sangat tinggi, yang terdiri dari 3 (tiga) program antara lain.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 8 (delapan) kegiatan. Total Anggaran pada Program ini sebesar Rp.27.190.499.033 dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.24.636.437.589 atau 91% dengan kategori sangat tinggi. Adapun capaian kinerja triwulan IV dari indikator Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi dari target kinerja 90%. Capaian kinerja indikator Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi dari target kinerja 100%. Capaian kinerja persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi dari target kinerja 90%.

Faktor Pendorong Program ini:

- Adanya kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana kegiatan

Faktor Penghambat Program ini:

- Adanya keterlambatan dalam proses pembuatan dokumen administrasi pada saat pencairan

Tindak lanjut:

- Lebih memperhatikan percepatan pencairan anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan rencana aksi dan anggaran kas.

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan terdiri dari 5 (lima) kegiatan. Total anggaran pada program ini sebesar Rp.16.654.832.367 dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.11.882.775.410 atau 71% dengan kategori sedang. Capaian kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi dari target kinerja 100%. Capaian kinerja Ketepatan Waktu Penetapan APBD sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi dari target kinerja 100%. Tindak lanjutnya adalah

Faktor Pendorong Program ini:

- Adanya pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam penyusunan anggaran dan sistem pendukung seperti Siadinda dan Simakda dalam penatausahaan serta adanya regulasi yang jelas mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah..

Faktor Penghambat Program ini:

- Keterlambatan dalam proses pembuatan dokumen administrasi pada saat pencairan

Tindak lanjut:

- Lebih memperhatikan percepatan pencairan anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan rencana aksi dan anggaran kas.

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Total anggaran pada program ini sebesar Rp.5.071.668.600 dengan realisasi anggaran pada triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.619.021.376 atau 71% dengan kategori sedang. Capaian kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang diyakini Kewajarannya oleh BPK sebesar 100% atau termasuk kategori sangat rendah dari target kinerja 97%. Tindak lanjutnya adalah

Faktor Pendorong Program ini:

- Adanya pemanfaatan Sistem SIMBAKDA dalam perencanaan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah.

Faktor Penghambat Program ini:

- Keterlambatan dalam proses pembuatan dokumen administrasi pada saat pencairan.

Tindak lanjut:

- Lebih memperhatikan percepatan pencairan anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan rencana aksi dan anggaran kas.

32. BADAN PENDAPATAN DAERAH

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Total anggaran yang mendukung program ini adalah sebesar Rp. 88.263.151.130,00. Capaian kinerja sampai Triwulan IV untuk persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas sebesar 88,95%, persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah sebesar 100%, dan persentase sarana dan prasarana aparatue dalam kondisi baik sebesar 77,58% dengan realisasi anggaran Rp74,588,526,216.53 atau 84,51% dari jumlah total anggaran. Rata–rata Capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 95,01% dengan kategori Tinggi. Adapun faktor Pendorong adalah:

1. Ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya program rutin yang terlaksana setiap bulannya;

2. Adanya dukungan sarana prasarana sesuai yang memadai/sesuai kebutuhan;
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan program;
4. Koordinasi yang baik dilingkup internal dan eksternal kantor.

Faktor penghambat adalah:

1. Penundaan dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek akibat faktor teknis, seperti masalah dalam pengadaan barang dan jasa;
2. Mekanisme Tender yang panjang sehingga memerlukan waktu yang lama untuk pelaksanaan kegiatan.

Tindak lanjutnya :

1. Melakukan pelatihan rutin tentang pengelolaan keuangan daerah;
2. Memperbaiki atau menyediakan fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan;
3. Melakukan proses lelang/seleksi dini untuk kegiatan tahun berikutnya yang memerlukan waktu dan tahapan pengerjaan yang cukup Panjang;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Program Pengelolaan Pendapatan

Program ini didukung oleh satu kegiatan dan 11 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 30.824.532.033,00. Capaian kinerja sampai Triwulan IV untuk rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 88,05%, dan deviasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran PAD dalam APBD sebesar 74,43%, dengan realisasi anggaran Rp. 26,897,265,804.00 atau 87,26% dari jumlah total anggaran. Rata–rata Capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024 yakni sebesar 81,24% dengan kategori Tinggi.

Faktor Pendukung program ini:

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
- Adanya komitmen dan kerjasama yang baik antara seluruh komponen aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam menggali potensi dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
- Percepatan proses pelayanan dan penerimaan PAD berbentuk digitalisasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
- Edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat dan pemilik usaha mengenai pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- Apresiasi pemberian penghargaan yang diberikan kepada Wajib Pajak berprestasi.Pendataan dan pengawasan untuk menggali potensi pajak secara maksimal.

Faktor Penghambat Program ini :

- Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajak usahanya secara tepat waktu dan tepat jumlah;
- Masih lemahnya proses penyidikan dan penindakan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran;
- Sistem informasi yang tidak terintegrasi dengan baik antar instansi atau dengan masyarakat dapat menghambat pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah;
- Kurang akuratnya data potensi PAD yang dipergunakan sebagai dasar penentuan target penerimaan.

Tindak lanjutnya :

- Terus melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah;
- Terus melakukan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak;

- Terus membangun sinergitas dan kolaborasi OPD dan BUMN agar dapat menggali potensi untuk optimalisasi PAD;
- Penguatan Pengawasan dan Audit Pajak Daerah;
- Melakukan Pemutakhiran Database Wajib Pajak secara optimal;
- Secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.

33. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Untuk tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar melaksanakan sebanyak 3 program, 12 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 27.649.498.680,-.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 3 (tiga) antara lain : (i) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik. (ii) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah. (iii) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas. Target kinerja 100%, dan didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.882.712.964,-. Adapun capaian anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar 79,40% dengan capaian anggaran sebesar Rp. 12.928.253.375 atau 93,12%.

FAKTOR PENDORONG / PENDUKUNG :

1. Pelaksanaan rapat internal di lingkup BKPSDMD Kota Makassar
2. Tersedianya sarana dan prasarana dengan baik.
3. Monev berkala yang dilakukan oleh pimpinan.

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Adanya rasionalisasi di beberapa sub kegiatan sehingga realisasi kinerja tidak maksimal.

TINDAK LANJUT :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan target yang belum tercapai pada tahun berikutnya.

B. Program Kepegawaian Daerah

Indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ditentukan oleh 3 (tiga) indikator kinerja antara lain : (i) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), dengan target 65,22% (3.108 Pegawai ASN PTS 11.081 Pegawai SMA). (ii) Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), dengan target 7,24 %. (iii) Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan), target 7,24 %.

Target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 4.932.136.316,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 4.128.621.970,-. atau sebesar 83,71%.

FAKTOR PENDORONG / PENDUKUNG :

1. Pelaksanaan rapat internal di lingkup BKPSDMD Kota Makassar.
2. Tersedianya sarana dan prasarana dengan baik.
3. Monev berkala yang dilakukan oleh pimpinan

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Adanya rasionalisasi dibeberapa sub kegiatan sehingga realisasi kinerja tidak maksimal.
2. Dinamisasi peraturan kepegawaian.

TINDAK LANJUT :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan target yang belum tercapai pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Kementerian dan lembaga terkait peraturan kepegawaian.

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ditentukan oleh 3 (tiga) indikator kinerja antara lain : (i) Rata – rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan dengan target 20 JP. (ii) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target 2,16%. (iii) Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, dengan target 91%.

Target kinerja adalah 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 8.834.649.400,-. Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 7.998.520.706,- atau sebesar 90,54%.

FAKTOR PENDORONG / PENDUKUNG :

1. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan kapasitas SDM.
2. Koordinasi hubungan kerja yang sinergitas antar bidang.
3. Pengelolaan administrasi yang berbasis teknologi informasi.
4. Sumber Daya Manusia yang memadai.

34. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah kota Makassar mempunyai pagu perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 7.483.309.942,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.722.699.299,-. Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program sebesar 95,53% (sangat tinggi) dan keuangan sebesar 89,84% dengan predikat “tinggi”. Adapun realisasi per program dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerjanya adalah :

- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, target 100% dengan realisasi 100%
- Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, target 90% dengan realisasi 71,43%
- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, target 90% dengan realisasi 90,90%

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 5.947.667.732,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.418.405.362,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 93,46% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 91,10% (sangat tinggi).

B. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indikator kinerjanya adalah :

- Persentase implementasi rencana kelitbangan, target 85% dengan realisasi 35,72%.
- Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, target 100% dengan realisasi 100%.
- Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, target 100% dengan realisasi 100%.
- Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan, target 89% dengan realisasi 89%.

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp.1.535.642.210,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.304.293.937,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 85,43% (tinggi) dan capaian keuangan sebesar 84,93% (tinggi).

Adapun faktor pendorong tercapainya target kinerja program penunjang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- Komunikasi, koordinasi dan sinergitas yang efektif, intens dan menyeluruh antar Badan Peneltian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar dengan tim peneliti menghasilkan pencapaian target kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Penguatan tim internal perangkat daerah melalui pengoptimalan fungsi sesuai dengan jabatan, kualifikasi dan kompetensi para pegawai di Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar menghasilkan kolaborasi dan kekompakan bersama yang efektif dan utuh dalam mendukung tercapainya target kinerja dan serapan anggaran secara maksimal sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- Sumber daya yang cukup
- Adanya dukungan dari Pimpinan serta kerjasama antara tim panitia menjadikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

35. INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat kota Makassar mempunyai pagu perubahan Tahun 2024 sebesar **Rp. 30.501.313.969;** dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 26.259.845.991; atau 86,09% sehingga rata-rata capaian keuangan Inspektorat Kota Makassar sebesar 62,39% dengan predikat "rendah".** Sedangkan predikat kinerja dari seluruh program adalah 100% atau "**sangat tinggi".** Adapun realisasi per program dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerjanya adalah :

- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah, target 90% dengan realisasi 90%.
- Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik, target 90% dengan realisasi 100%.
- Persentase ASN Perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, target 90% dengan realisasi 90%.

Dengan rincian capaian sebagai berikut :

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 28.492.890.769; dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 26.259.845.991; sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 100% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 87.18% (tinggi).

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator kinerjanya adalah :

- Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), target level 3 dengan realisasi level 3 (tercapai 100%)
- Persentase Tindak lanjut temuan, target 66,63%, dengan realisasi 83.97%
- Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat, target 100% dengan realisasi 100%.

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 1.1351.205.500; dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 899.677.300; sehingga rata-rata capaian

kinerja program ini sebesar 94,66% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 67,03% (sedang).

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerjanya adalah Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), target level 3 dengan realisasi capaian level 3.

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 657.217.700; dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 412.669.141; dengan rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 100% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 66,95% (sedang).

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja keuangan program penunjang urusan pemerintahan Daerah, program penyelenggaraan pengawasan dan program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia masih memerlukan pengembangan kompetensi baik sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan maupun teknis substansi;
- Belum optimalnya implementasi dari Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Koordinasi dan sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian, Lembaga, Inspektorat Provinsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Beberapa pengendalian belum diimplementasikan sesuai dengan kebijakan;
- Belum terdapat program terkait Pendidikan antikorupsi;

Masih perlu dioptimalkan mulai dari merencanakan, mengkomunikasikan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan.

Sedangkan faktor pendorong tercapainya target kinerja program penunjang urusan pemerintahan Daerah, program penyelenggaraan pengawasan dan program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah sebagai berikut :

- Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk menyelesaikan kasus pengaduan yang diterima di Inspektorat Daerah Kota Makassar;
- Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pengaduan masyarakat;
- Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Makassar telah mencapai Level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Pelaksanaan kegiatan Kapabilitas APIP secara berkala; 3) Dukungan dari pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina APIP dalam pendampingan penilaian Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Adapun rencana tindak lanjut yang diperlukan tahun 2024, disarankan langsung oleh Inspektorat Kota Makassar sebagai berikut:

- Memperkuat Sistem Digitalisasi pengaduan masyarakat.
- Peningkatan kompetensi SDM pengawasan dengan alokasi anggaran yang memadai, terutama sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi;
- Penerapan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah berupa Pendampingan Penyusunan Register Risiko SKPD dan Evaluasi Register Risiko SKPD;
- Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko mengacu pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
- Mengupayakan langkah-langkah yang optimal dalam pencapaian tujuan organisasi di Pemerintah Kota Makassar;
- Melakukan telaah sejawat antar Irban secara berkala;

- Mendorong penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di SKPD dan menjadikan dasar dalam penilaian kinerja serta memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;
- Reviu proses pelaksanaan manajemen risiko lingkup Pemerintah Kota Makassar secara berkala;
- Melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP secara berkelanjutan;
- Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan BPK RI, KPK, Inspektorat/Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga, Inspektorat Daerah Provinsi dan BPKP dalam setiap tahapan pengawasan, mulai dari tahap merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan sampai menindaklanjuti hasil pengawasan;
- Meningkatkan pelaksanaan pendampingan dan pelayanan konsultasi bidang pengawasan kepada SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia di Inspektorat Daerah Kota Makassar untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan;
- Pemantauan secara berkala dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi bersama Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD;

Melakukan pemantauan tindak lanjut dan pemuktahiran data temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar secara berkala.

36. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Makassar mempunyai pagu anggaran perubahan Tahun 2024 sebesar Rp.18.199.960.005,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 15.678.606.671,- Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program sebesar 168,91% (sangat tinggi) dan keuangan sebesar 88,61% dengan predikat “tinggi”. Adapun realisasi per program dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerjanya adalah :

- Persentase ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah, target 100% dengan realisasi 100%.
- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, target 100% dengan realisasi 100%.
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, target 100% dengan realisasi 100%.

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 6.670.600.513,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.738.301.794,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 86,62% (tinggi) dan capaian realisasi keuangan sebesar 86,02% (tinggi).

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator kinerjanya adalah : Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 2.964.926.800,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.633.006.237,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 88,81% (tinggi) dan capaian keuangan sebesar 88,81% (tinggi).

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Indikator kinerjanya adalah: Persentase partai politik yang mendapat pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 89.036.974.180 ,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp.

88.949.844.447,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 99,90% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 99,90% (sangat tinggi).

D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerjanya adalah :

- Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan, target 100% dengan realisasi 61,97%
- Jumlah organisasi kemasyarakatan/politik mitra yang aktif, terdaftar dan terawasi keberadaannya, target 71 Ormas dengan realisasi 61 Ormas.

Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 260.176.000,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 239.975.600,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 92,24% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 92,24% (sangat tinggi).

E. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Indikator kinerjanya adalah : Persentase Kelompok Masyarakat Yang berpartisipasi dan Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 959.276.000,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp. 945.043.000,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 98,52% (sangat tinggi) dan capaian keuangan sebesar 98,52% (sangat tinggi).

F. Program Peningkatan dan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerjanya adalah : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pemahaman terhadap pencegahan konflik sosial. Program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 1.791.233.900,- dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.542.820.400,- sehingga rata-rata capaian kinerja program ini sebesar 86,13% (tinggi) dan capaian keuangan sebesar 86,13% (tinggi).

Faktor pendorong tercapainya kinerja program antara lain :

- Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar yang memperkuat peran tokoh agama melalui FKUB yang secara intens melakukan atau membangun dialog antar umat dan pendirian rumah ibadah sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pemberitaan oleh kelompok tertentu yang bisa menimbulkan konflik ditengah para pemeluk agama.
- Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dengan LSM/Ormas dan Partai Politik.
- Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Upaya penegakan sangsi hukum yang tegas terhadap oknum yang terbukti melaksanakan provokasi atau tindakan-tindakan yang memicu konflik dan mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

37. KECAMATAN BIRINGKANAYA

Untuk tahun 2024, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah melaksanakan 5 program (13 kegiatan), dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 50.725.720.766,-. Secara umum, tidak terdapat kendala yang berarti dalam pencapaian kinerja tersebut, keterlambatan pelaksanaan kegiatan disebabkan karena rata-rata target kegiatan berada pada triwulan berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan anggaran kas. Secara rinci, penjelasan capaian target kinerja untuk masing-masing program sampai triwulan IV Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas dengan target kinerja 90%;
- Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100%;
- Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja 90%.

Pencapaian target indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.250.879.946,- dengan realisasi sebesar Rp 14.398.975.000,- atau sekitar 94.41%.

Faktor Pendorong :

- Tersedianya dukungan penganggaran pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi antara atasan dengan pegawai sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik.
- Terjalinnya komunikasi antara pimpinan sehingga tidak mengakibatkan kegiatan menjadi deadlock.
- Tingginya semangat bekerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar dan baik.

Faktor Penghambat

- Terdapat beberapa kegiatan pendanaan alur KASnya pada triwulan berikutnya
- Keterlambatan penyampaian data dari Pihak kelurahan dan kecamatan.

Tindak lanjut :

- Memaksimalkan kegiatan dan pendaanaan untuk triwulan berikutnya
- Meningkatkan koordinasi terhadap kelurahan.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan target kinerja 100%.

Pencapaian target indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.749.589.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.153.974.269,- atau 96.44%.

Faktor Pendorong :

- Tersedianya dukungan anggaran dari APBD
- Tingginya semangat bekerja para satgas dalam menjalankan tugasnya sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Faktor Penghambat :

- Kurangnya armada yang tersebar di kelurahan
- Masih adanya warga yang belum ingin berlangganan retribusi sampah dan menyebabkan sampah berserakan di tempat pembuangan sementara.
- Kurangnya kesadaran oleh anggota satgas terhadap pentingnya pemeliharaan armada persampahan.
- Terdapat beberapa kegiatan pendanaan alur KASnya pada triwulan berikutnya.

Tindak lanjut :

- Melakukan permintaan pendanaan untuk penambahan armada
- Melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait masalah persampahan dan pentingnya kebersihan lingkungan.
- Melakukan cek fisik berkala terhadap armada kebersihan.
- Memaksimalkan kegiatan dan pendanaan untuk triwulan berikutnya.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan dengan target kinerja 100%. Persentase sarana dan prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja 95%. Pencapaian target indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.702.400.150,- dengan realisasi Rp 868.229.301.,- atau sekitar 18.46%.

Faktor Pendorong :

- Adanya dukungan anggaran dari APBD
- Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait Pemberdayaan Masyarakat diKecamatan.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor Penghambat :

- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemberdayaan karena kurangnya pemahaman akan manfaat kegiatan tersebut.
- Alokasi anggaran yang terbatas dari kecamatan untuk kegiatan pemberdayaan, sehingga program-program yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Tindak lanjut yang dilakukan yakni :

- Melakukan sosialisasi secara intensif tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta manfaat jangka panjang dari kegiatan pemberdayaan dan mengadakan kegiatan diskusi, lokakarya dan forum warga untuk mendengar aspirasi dan ide masyarakat dalam program pemberdayaan.
- Membentuk forum pemberdayaan yang melibatkan perangkat kelurahan, kecamatan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mensinergikan kegiatan.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Presentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang dapat diselesaikan dengan target kinerja 100%. Untuk mencapai target kinerja program didukung oleh kegiatan yaitu : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pencapaian target indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 115.000.000,- atau 87.12%

Faktor Pendorong:

- Tersedianya dukungan penganggaran pelaksanaan kegiatan;
- Koordinasi yang intens antara atasan dengan pegawai sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik
- Terjalinnya komunikasi antara pimpinan sehingga tidak mengakibatkan kegiatan menjadi deadlock;
- Tingginya semangat bekerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar.

Faktor Penghambat yaitu Minimnya fasilitas kantor, transportasi, dan infrastruktur pendukung seperti peralatan IT yang tidak memadai.

Tindaklanjut, yang dilaksanakan yakni Melakukan monitoring terkait sarana dan prasarana yang ada dikelurahan untuk segera ditindak lanjuti jika terdapat kekurangan fasilitas dalam pelaksanaan pelayanan di kelurahan.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja 100%. Pencapaian target indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.890.850.870,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.528.478.028,- atau sekitar 97.39%.

Faktor Pendorong yaitu Adanya dukungan anggaran dari APBD, dan Koordinasi yang intens antara pimpinan dan staf, serta tingginya animo pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Faktor Penghambat yaitu Terdapat beberapa kegiatan pendanaan alur KASnya pada triwulan berikutnya, dan Belum terbitnya SPD (Surat penyediaan dana).

Tindak Lanjut yaitu Memaksimalkan kegiatan dan pendanaan untuk triwulan berikutnya.

38. KECAMATAN BONTOALA

Untuk tahun 2024, Kecamatan Bontoala telah melaksanakan 5 program (13 kegiatan), dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 36.288.605.682,-. Secara rinci, penjelasan capaian target kinerja untuk masing-masing program sampai triwulan IV Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas dengan target kinerja 90%;
- Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100%;
- Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja 90%.

Pencapaian target indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.250.879.946,- dengan realisasi sebesar Rp 13.277.461.835,- atau sekitar 90.29%.

Faktor Pendorong :

- Adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan social media sehingga lebih mudah mengkoordinasikan hal-hal penting
- Tingginya semangat kerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
- Koordinasi antara pimpinan dan staf sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik.

Faktor Penghambat :

- Adanya jabatan kosong pada beberapa Kelurahan.
- Kurangnya beberapa jenis peralatan kerja di Kelurahan seperti computer, printer, mesin foto copy dan AC yang menunjang langsung pelayanan publik.

Rencana Tindak Lanjut :

- Akan berkoordinasi dengan pihak BKD untuk segera mengisi jabatan yang lowong di Kelurahan.
- Akan memasukkan dalam Rencana kebutuhan barang milik daerah terkait kekurangan peralatan penunjang kegiatan.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan target kinerja 100%. Pencapaian target indikator kinerja Program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp .852.949.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.180.082.300,- atau 93.17%.

Faktor Pendorong :

- Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan persampahan.
- Adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan di setiap kelurahan kepada petugas kebersihan yang bertugas di kelurahan masing-masing.
- Tingginya partisipasi pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan dalam Gerakan Sabtu Bersih di tiap wilayah Kelurahan masing-masing.

Faktor Penghambat :

- Masih adanya warga yang belum menaati jadwal pembuangan sampah dan masih membuang sampah di sembarang tempat.
- Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Anggaran Kas yang telah disusun oleh SKPD.

Rencana Tindak lanjut :

- Memaksimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan
- Mengalokasikan anggaran yang memadai guna pemeliharaan sarana dan prasarana Persampahan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan dengan target kinerja 100%. Persentase sarana dan prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja 95%. Pencapaian target indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.923.701.635,- dengan realisasi Rp. 768.485.900.,- atau sekitar 19.59%.

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

- Proses penentuan pelaksanaan dakel yag masih sementara dievaluasi oleh kelurahan.

Faktor pendorong :

- Komitmen Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan;
- Ketersediaan Anggaran Kas.

Rencana Tindak lanjut : Berkoordinasi dengan Lurah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan untuk tahun berikutnya serta membentuk forum pemberdayaan yang melibatkan perangkat kelurahan, kecamatan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mensinergikan kegiatan.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Presentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang dapat diselesaikan dengan target kinerja 100%. Untuk mencapai target kinerja program didukung oleh kegiatan yaitu : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pencapaian target indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 646.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 606.915.000,- atau 93.89%

Faktor pendorong :

- Tingginya semangat bekerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar dan baik;

- adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga memberikan manfaat kepada SDM utuk bekerja lebih efektif.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu :

- Membuat Surat Permintaan Dana (SPD) untuk Semua belanja sesuai dengan alur kas;
- Melaksanakan koordinasi ketingkat yang lebih tinggi agar melakukan penambahan personil keamanan pada wilayah yang rawan terjadi tindak kejahatan.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja 100%. Pencapaian target indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.159.850.160,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.527.075.514,- atau sekitar 91.16%.

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- Masih Kurangnya jumlah pegawai yang kemudian memengaruhi kinerja pelayanan;
- Kurangnya beberapa jenis peralatan kerja di Kelurahan seperti komputer, printer, mesin fotocopy, dan AC yang menunjang langsung pelayanan publik;

Faktor pendorong : Koordinasi yang intens antara pimpinan dan staf, serta tingginya animo pegawaian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu :

- Akan segera melakukan Permohonan Permintaan Pendistribusian ASN ke BKPSDM agar dapat memindahtugaskan ASN yang menumpuk di Dinas;
- Memonitoring progres pencairan dana BOP Kelurahan sesuai dengan anggaran kas

39. KECAMATAN MAKASSAR

Rencana kerja Kecamatan Makassar Tahun 2024 memuat 5 (lima) program dengan 14 (Empat belas) kegiatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 46.689.396.100.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.461.940.950,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 15.452.771.867,- atau sebesar 88.49%. Indikator programnya adalah (1) persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, capaian 100% (2) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, capaian 100%, (3) Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, capaiannya sebesar 100%.

Faktor penghambat pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota :

- Kurangnya armada yang tersebar di kelurahan,
- Masih adanya warga yang belum ingin berlangganan retribusi sampah dan menyebabkan sampah berserakan di tempat pembuangan sementara,
- Kurangnya kesadaran oleh anggota satgas terhadap pentingnya pemeliharaan armada persampahan,
- Terdapat beberapa kegiatan pendanaan alur Kasnya pada triwulan berikutnya.

Faktor pendorong pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota :

- Tersedianya dukungan anggaran dari APBD,
- Tingginya semangat bekerja para satgas dalam menjalankan tugasnya sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Tindak lanjut pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota :

- Melakukan permintaan pendanaan untuk penambahan armada,
- Melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait masalah persampahan dan pentingnya kebersihan lingkungan,
- Melakukan cek fisik berkala terhadap armada kebersihan,
- Memaksimalkan kegiatan dan pendanaan untuk triwulan berikutnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.354.280.250,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 11.310.093.900,- atau sebesar 78.79%. Indikator programnya adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan, dengan target 100 %.

Faktor penghambat pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik :

- Kurangnya armada roda tiga di kelurahan,
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap jam pembuangan sampah,
- Pengawasan belum optimal,
- Kurangnya koordinasi antara petugas kebersihan dan pengawas,
- Kinerja petugas kebersihan masih belum optimal.

Faktor pendorong pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik :

- Adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan di setiap kelurahan kepada petugas kebersihan yang bertugas di kelurahan masing-masing,
- Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan persampahan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.223.970.700,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 846.848.700,- atau sebesar (26.27%). Indikator programnya adalah (1) Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan, Target 100%, (2) Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik, capaian 95%.

Faktor penghambat program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yaitu, Kurang memadai sarana dan prasarana yang ada di kelurahan, dan Kurangnya SDM yang ada di kelurahan.

Faktor pendorong program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yaitu, Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat berbasis wilayah kecamatan.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan dan 3 (Tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 616.526.600,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 612.305.400,- atau sebesar (99.32 %). Indikator programnya adalah Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat diselesaikan, capaiannya 100 %.

Faktor penghambat koordinasi ketentraman dan ketertiban :

- Kurangnya kesadaran PK% yang ada di kecamatan
- Masih banyak tawuran antar kelompok masyarakat di kelurahan

Faktor pendorong koordinasi ketentraman dan ketertiban :

- Adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga memberikan manfaat kepada SDM untuk bekerja lebih efektif

- Koordinasi yang intens antara pimpinan (camat, kapolsek, danramil)

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.032.677.600,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 9.818.027.938,- atau sebesar (88.99%). Indikator programnya adalah Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, capaian 100 %.

Faktor penghambat program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum :

- Terdapat beberapa kegiatan pendanaan alur KASnya pada triwulan berikutnya
- Keterlambatan penyampaian data dari pihak Kelurahan ke Kecamatan

Tindak lanjut pada Program ini :

- Memaksimalkan kegiatan dan pendanaan untuk triwulan berikutnya
- Meningkatkan koordinasi terhadap Kelurahan

40. KECAMATAN MAMAJANG

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mamajang Kota Makassar Tahun 2024 memuat 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 40.380.541.354,- .

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 16.414.235.006,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 14.866.860.300,atau sebesar (90.57%). Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (1) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Keadaan Baik, capaian. (2) Persentase Ketersediaan Laporan keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah; (3) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas.

Faktor Pendorong pencapaian kinerja program ini :

- Tersedianya Anggaran APBD
- Tingginya semangat bekerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar dan baik

Faktor Penghambatnya yaitu :

- Untuk proses penayangan masih sangat lambat.
- Adanya selisih harga,
- Adanya Rasionalisasi Anggaran Keterlambatan penyampaian data dari kelurahan ke kecamatan.

Tindak lanjut pada triwulan berikutnya :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
- Peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan Kelurahan khususnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.440.512.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 9.287.831.247,- atau sebesar (98.38%). Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Kecamatan, dengan target 100% dengan Capaian 100%.

Faktor penghambat :

- Masih kurangnya kesadaran Petugas kebersihan akan pentingnya pemeliharaan kendaraan/armada pengelolaan persampahan,
- Masih adanya oknum warga yang belum menaati jadwal pembuangan sampah dan beberapa warga masih membuang sampah di sembarang tempat.

Faktor pendorong :

- Adanya dukungan anggaran dari APBD,
- Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan persampahan.
- Adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan di setiap kelurahan kepada petugas kebersihan yang bertugas di kelurahan masing-masing.

Rencana Tindak Lanjut :

- Memberikan sosialisasi kepada Warga guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar;
- Diusahakan Untuk Percepatan dalam Menggunakan Anggran yang sudah tersedia;
- Optimalisasi peran RT/RW serta tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.512.662.202,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 2.882.458.032,- (52.29%). Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (i) Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan, capaian 51% (ii) Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik, capaian 26.30%

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

- Adanya Rasionalisasi Anggaran Dana Kelurahan,
- Keterlambatan Pencairan Tahap II Dana Kelurahan,
- Adanya utang belanja dana kelurahan tahun 2020 yang di proses di tahun 2024.

Faktor pendorong :

- Adanya Dukungan Anggaran Dari APBD dan DAU,
- Tersedianya Pokmas dimasing setiap Kelurahan,
- Terjalinnya Koordinasi dengan baik antar Kecamatan, Kelurahan, LPM, RT/RW dan Masyarakat Kecamatan Mamajang.

Rencana Tindak lanjut yaitu Berkoordinasi dengan Lurah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan.

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 851.870.400,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 733.381.700,- atau sebesar (86.09%). Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah presentase gangguan trantib lingkup kecamatan yang dapat di selesaikan, capaian 100%.

Faktor penghambatnya yaitu :

- Tupoksi Kecamatan yang terbatas dan tidak terkait langsung dalam penanganan gangguan K3 yang terjadi. Dalam hal ini hanya sebatas pada administrasi, pengawasan dan koordinasi dengan pihak Tripika Kecamatan serta penyuluhan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada warga terkait,
- Masih kurangnya personil keamanan yang di BKO kan di wilayah kecamatan.
- Adanya Imam kelurahan yang meninggal di triwulan III sehingga ada keterlambatan dalam proses pencairan/Pembayaran Imam Kelurahan karena menunggu SK pergantian Imam Kelurahan yang meninggal Dunia.

Faktor pendorongnya yaitu :

- Adanya dukungan anggaran dari APBD,
- Adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga memberikan manfaat kepada SDM utuk bekerja lebih efektif,

- Koordinasi yang intens antara pimpinan instansi vertikal (Camat, Kapolsek dan Danramil) yang ada di dalamnya, sedangkan tupoksi yang terkait langsung dalam penanganan gangguan K3 tersebut yaitu Tripika Kecamatan.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu Melaksanakan koordinasi ketingkat yang lebih tinggi agar melakukan penambahan personil keamanan pada wilayah yang rawan terjadi tindak kejahatan.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.161.291.746,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 7.302.381.834,- atau sekitar (89.48%). Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan, capaian 100%.

Faktor penghambat capaian kinerjanya yaitu :

- Masih Kurangnya jumlah pegawai yang kemudian memengaruhi kinerja pelayanan;
- Adanya rasionaliasi anggaran,
- Adanya selisih harga.

Faktor pendorong yaitu :

- Koordinasi yang intens antara pimpinan dan staf, serta tingginya animo pegawaian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Pada Program ini terdapat Belanja Rutin, Listrik, air, dan belanja jasa.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu segera melakukan Permohonan Permintaan Pendistribusian ASN ke BKPSDM agar dapat memindahtugaskan ASN yang menumpuk di Dinas dan Memonitoring progres pencairan dana BOP Kelurahan sesuai dengan anggaran kas

41. KECAMATAN MANGGALA

Untuk tahun 2024, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah melaksanakan 5 program (13 kegiatan), dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 41.193.996.009,-.

Secara rinci, penjelasan capaian target kinerja untuk masing-masing program sampai triwulan IV Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas dengan target kinerja 90%;
- Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100%;
- Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja 90%.

Pencapaian target indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.068.8580.231,- dengan realisasi sebesar Rp 12.550.839.000,- atau sekitar 89.21%.

Faktor Pendorong :

- Tersedianya dukungan penganggaran pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi antara atasan dengan pegawai sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik.
- Terjalinnya komunikasi antara pimpinan sehingga tidak mengakibatkan kegiatan menjadi deadlock.
- Tingginya semangat bekerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar dan baik.

Faktor Penghambat
- Keterlambatan penyampaian data dari Pihak kelurahan dan kecamatan.

Tindak lanjut :
- Meningkatkan koordinasi terhadap kelurahan.

.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan target kinerja 100%. Pencapaian target indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.068.580.231,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.550.839.179,- atau 89.21%.

Faktor Pendorong :
- Tersedianya dukungan anggaran dari APBD
- Tingginya semangat bekerja para satgas dalam menjalankan tugasnya sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Faktor Penghambat :
- Kurangnya armada yang tersebar di kelurahan
- Masih adanya warga yang belum ingin berlangganan retribusi sampah dan menyebabkan sampah berserakan di tempat pembuangan sementara.
- Kurangnya kesadaran oleh anggota satgas terhadap pentingnya pemeliharaan armada persampahan.

Tindak lanjut :
- Melakukan permintaan pendanaan untuk penambahan armada
- Melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait masalah persampahan dan pentingnya kebersihan lingkungan.
- Melakukan cek fisik berkala terhadap armada kebersihan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan dengan target kinerja 100%. Persentase sarana dan prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja 95%. Pencapaian target indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.368.875.500,- dengan realisasi Rp. 1.620.907.968.,- atau sekitar 48.11%.

Faktor penghambat pencapaian kinerja terkait Sub Kegiatan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan),yaitu ada beberapa lokasi pekerjaan di kelurahan yang juga menjadi target pengerjaan oleh dinas PU Kota Makassar sehingga tidak dilaksanakan oleh kelurahan

Tindak lanjut : Koordinasi intens dengan dinas terkait supaya tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Indikator Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Presentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang dapat diselesaikan dengan target kinerja 100%. Untuk mencapai target kinerja program didukung oleh kegiatan yaitu : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pencapaian target indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.250.000,- atau 87.17%

Faktor pendorong :

- adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga memberikan manfaat kepada SDM utuk bekerja lebih efektif.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu :

- Melaksanakan koordinasi ketingkat yang lebih tinggi agar melakukan penambahan personil keamanan pada wilayah yang rawan terjadi tindak kejahatan.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja 100%. Pencapaian target indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.159.850.160,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.527.075.514,- atau sekitar 91.16%.

Faktor Penghambat pada program ini yaitu :

- Kurangnya sumberdaya manusia di Kelurahan sehingga beberapa tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan kurang maksimal;
- Keterlambatan penyampaian data dari kelurahan ke kecamatan.

Faktor Pendorong pada program ini yaitu :

- Adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga lebih mudah untuk mengkoordinasikan hal-hal penting;
- Koordinasi antara pimpinan dengan staf sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik;
- Terjalinnya komunikasi antara pimpinan sehingga tidak mengakibatkan kegiatan menjadi deadlock.

Tindak lanjut yaitu :

- Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.

Peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan Kelurahan khususnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

42. KECAMATAN MARISO

Untuk tahun 2024, Kecamatan Mariso Kota Makassar telah melaksanakan 5 program (11 kegiatan), dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 30.975.294.755,-

Secara rinci, penjelasan capaian target kinerja untuk masing-masing program sampai triwulan IV Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar

- Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas dengan target kinerja 90%;
- Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100%;
- Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja 90%.

Pencapaian target indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.726.332.334,- dengan realisasi sebesar Rp 10.532.357.420,- atau sekitar 89.82%.

Faktor Pendorong pencapaian kinerja program ini : Adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga lebih mudah untuk mengkoordinasikan hal-hal penting ; Koordinasi antara pimpinan dengan staf sehingga

dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik ; Tingginya semangat bekerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar dan baik.
Faktor Penghambatnya yaitu : Masih adanya kekosongan jabatan yang ada di Kelurahan Wilayah Kecamatan Mariso Kota Makassar ; dan Kurangnya beberapa jenis perlaatan kerja di Kelurahan seperti komputer, printer, mesin fotocopy, dan AC yang menunjang langsung pelayanan publik.
Tindak lanjut : Berkoordinasi dengan pihak terkait agar segera mengisi kekosongan Jabatan di Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Mariso ; dan Memasukkan dalam rencana kebutuhan barang milik daerah dan mengupayakan terakomodir dalam penganggaran terkait beberapa peralatan yang sangat urgent untuk pelayanan publik.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan target kinerja 100%. Pencapaian target indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.245.208.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.848.880.300,- atau 95.19%.
Faktor Penghambat pada Program ini adalah Masih adanya warga masyrakat yang suka membuang sampah sembarangan dan belum menaati jadwal pembuangan sampah.
Faktor pendorong pada Program ini yaitu Komunikasi yang terjalin baik antara Pimpinan dan Staf.
Rencana Tindak Lanjut yaitu akan memaksimalkan kinerja dan kegiatan pada Tahun berikutnya.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan dengan target kinerja 100%. Persentase sarana dan prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja 95%. Pencapaian target indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.704.581.909,- dengan realisasi Rp. 1.422.782.989,- atau sekitar 38.41%.
Faktor penghambat pada Program ini yaitu Masih kurangnya Armada pengangkut sampah dibanding dengan luas wilayah.
Faktor pendorong pada Program ini yaitu Kerjasama antara SATGAS dan Pengawas dalam penanganan kebersihan wilayah.
Rencana Tindak Lanjut yaitu akan mengusulkan penambahan armada yang lebih bagus untuk memenuhi SDM di Kelurahan dan Melengkapi sarana dan prasarana di Kelurahan.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Presentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang dapat diselesaikan dengan target kinerja 100%. Untuk mencapai target kinerja program didukung oleh kegiatan yaitu : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Pencapaian target indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 483.545.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.471.225.800,- atau 97.45%

Faktor Penghambat pada program ini yaitu : Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran kas yang telah disusun oleh SKPD, Masih kurangnya personil keamanan yang di BKO kan di wilayah kecamatan.
Faktor Pendorong pada program ini yaitu : Adanya dukungan anggaran dari APBD, Adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga memberikan manfaat kepada SDM untuk bekerja lebih efektif, Koordinasi yang intens antara pimpinan instansi vertikal (camat, kapolsek, dan Danramil).
Tindak lanjut yang akan dilaksanakan meningkatkan koordinasi antara pihak unsur tripika kecamatan khususnya babinsa dan babinkantibmas kelurahan dalam penanganan gannguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah kecamatan.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja 100%. Pencapaian target indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.815.627.212,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.316.058.213,- atau sekitar 92.67%.
Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah : Kurangnya beberapa jenis peralatan kerja di Kelurahan seperti komputer, printer, mesin fotocopy, dan AC yang menunjang langsung pelayanan publik; Masih adanya beberapa bendahara kelurahan yang lambat dalam penyusunan SPJ untuk pencairan kegiatan sehingga mempengaruhi realisasi pencairan anggaran; dan Kurangnya kualitas SDM Kelurahan.
Faktor pendorong : Adanya dukungan anggaran dari APBD; dan Koordinasi yang intens antara pimpinan dan staf, serta tingginya animo pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu : Akan segera melakukan Permohonan Permintaan Pendistribusian ASN ke BKPSDM agar dapat memindahtugaskan ASN yang menumpuk di Dinas; dan Memonitoring progres pencairan dana BOP Kelurahan sesuai dengan anggaran kas.

43. KECAMATAN PANAKKUKANG

Untuk tahun 2024, Kecamatan Panakkukang telah melaksanakan 5 program (12 kegiatan), dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 36.288.605.682,-. Secara rinci, penjelasan capaian target kinerja untuk masing-masing program sampai triwulan IV Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas dengan target kinerja 90%;
- Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100%;
- Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja 90%.

Pencapaian target indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.874.339.879,- dengan realisasi sebesar Rp 14.813.244.719,- atau sekitar 75.99%.
Faktor pendorong dari kinerja program ini yaitu :

- Adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga lebih mudah untuk mengkoordinasikan hal-hal penting
- Koordinasi antara pimpinan dengan staf sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik

- Terjalinnya komunikasi antara pimpinan sehingga tidak mengakibatkan kegiatan menjadi deadlock

Faktor penghambat dari kinerja program ini yaitu :

- Kurangnya sumberdaya manusia di Kelurahan sehingga beberapa tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan kurang maksimal.
- Keterlambatan penyampaian data dari kelurahan ke kecamatan.

Tindak lanjut yang dilaksanakan yaitu :

- Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
- Peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan Kelurahan khususnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah Indeks kepuasaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan dengan target 100 %. Adapun pencapaian target kinerja adalah 25 %, di dukung dengan alokasi sebesar Rp. 18.047.959.100,- dengan realisasi sebesar Rp.10.867.200.314,- atau 60,2% .

Faktor penghambat dari program ini yaitu :

- Masih adanya oknum warga yang belum menaati jadwal pembuangan sampah, beberapa warga masih membuang sampah disembarangan tempat
- Masih kurangnya armada serta petugas kebersihan yang tersebar di kelurahan
- Masih kurangnya kesadaran petugas kebersihan akan pentingnya pemeliharaan kendaraan/armada pengelolaan persampahan

Faktor Pendorong pada program ini yaitu :

- Adanya dukungan anggaran dari APBD
- Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan persampahan
- Adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan disetiap kelurahan kepada petugas kebersihan yang bertugas di kelurahan masing-masing

Tindak Lanjut dari kinerja program ini yaitu :

- Membangun infrastruktur secara bertahap dengan menampung aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
- Memberikan alokasi anggaran yang cukup serta penambahan sarana dan prasarana khususnya kendaraan roda tiga untuk pengelolaan sampah lingkup kecamatan panakkukang
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara pengelolaan persampahan dengan benar
- Penegakan Perda terhadap Pengelolaan persampahan

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan dengan target kinerja 100%. Persentase sarana dan prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja 95%. Pencapaian target indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.817.107.200,- dengan realisasi Rp. 4.292.429.499,- atau sekitar 73.79%.

Faktor Penghambat pada program ini yaitu Tidak lengkapnya struktur dan administrasi pokmas (Kelompok Masyarakat) di kelurahan sehingga tidak dapat menjadi pelaksana DAU kelurahan

Faktor Pendorong pada program ini yaitu :

- Adanya dukungan Anggaran dari APBD

- Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait Pemberdayaan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat berbasis wilayah Kecamatan

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu

- Meningkatkan koordinasi dengan lurah maupun RT/RW serta dinas terkait dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- Memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk peningkatan infrastruktur Kecamatan Panakkukang serta memberikan dorongan dan motivasi kepada Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan DAU Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan.

F. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Presentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang dapat diselesaikan dengan target kinerja 100%. Untuk mencapai target kinerja program didukung oleh kegiatan yaitu : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pencapaian target indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 596.531.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.584.267.500,- atau 97.94%

Faktor Penghambat pada program ini yaitu :

- Wilayah Kecamatan Panakkukang yang berada di tengah kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi juga menjadi faktor pendukung peningkatan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- Beberapa wilayah di kecamatan Panakkukang termasuk dalam zona yang rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban (Perkelahian Kelompok) seperti di Kelurahan Pampang dan Karuwisi
- Masih kurangnya personil Satpol PP yang di BKO kan di wilayah kecamatan

Faktor Pendorong pada program ini yaitu :

- Adanya dukungan anggaran dari APBD
- Adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga memberikan manfaat kepada SDM utuk bekerja lebih efektif
- Adanya koordinasi antara pihak Kecamatan Panakkukang dengan unsur Tripika Kecamatan khususnya Babinsa dan Babinkantibmas Kelurahan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Kecamatan

Tindak lanjut program ini yaitu :

- Pemerintah Kecamatan Panakkukang akan semakin meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban khususnya RT dan RW
- Meningkatkan sosialisasi akan gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul di masyarakat serta semakin meningkatnya koordinasi antara pihak Kecamatan Panakkukang dengan unsur Tripika Kecamatan khususnya Babinsa dan Babinkantibmas Kelurahan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban
- Pemasangan CCTV di wilayah yang rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban
- Peningkatan kapasitas petugas trantib dan Satpol PP.

G. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja 100%. Pencapaian target indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.103.703.905,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.776.053.929,- atau sekitar 97.05%.

Faktor Penghambat pada program ini yaitu :

- Kurangnya sumberdaya manusia di Kelurahan sehingga beberapa tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan kurang maksimal
- Keterlambatan penyampaian data dari kelurahan ke kecamatan

Faktor Pendorong pada program ini yaitu :

- Adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga lebih mudah untuk mengkoordinasikan hal-hal penting
- Koordinasi antara pimpinan dengan staf sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik
- Terjalinnya komunikasi antara pimpinan sehingga tidak mengakibatkan kegiatan menjadi deadlock

Tindak lanjut yaitu :

- Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.
- Peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan Kelurahan khususnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

44. KECAMATAN RAPPOCINI

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 2024 memuat 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 49.817.462.569,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.860.337.105 atau 88,04% dan realisasi kinerja sebesar 80,53% dari target Renja.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.510.238.732,- dan realiasi untuk program ini sebesar Rp. 16.076.093.961,- atau 85,45% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (1) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Keadaan Baik, dengan target 90% dan realisasi capaiannya sebesar 100%; (2) Persentase Ketersediaan Laporan keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah, dengan target 100% dan realisasi capaiannya sebesar 100%; (3) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas, dengan target 90% dan realisasi capaiannya sebesar 100%.

Adapun faktor Pendorong adalah :

Tingginya semangat kerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik.

Faktor penghambat adalah :

Adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan pekerjaan / kegiatan yang di anggap tidak prioritas.

Tindak lanjutnya untuk program ini yaitu Melaksanakan pengawasan peninjauan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan tupoksi ASN.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.863.883.500,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 14.091.589.501,- atau 94,80% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Kecamatan, dengan target 100% dan tingkat realiasasi capaian sebesar 100%.

Faktor Pendukung program ini:

Komitmen pimpinan dalam melaksanakana kegiatan terkait pengelolaan persampahan dan adanya pengawasan, evaluasi yang dilakukan di setiap kelurahan kepada petugas kebersihan diwilayah kelurahan masing - masing.
Faktor Penghambat Program ini:
Masih adanya warga masyrakat yang suka membuang sampah sembarangan dan belum menaati jadwal pembuangan sampah.
Tindak lanjutnya untuk program ini :
Mendorong partisipasi masyarakat dalam polapembuangan sampah secara mandiri dan menganjurkan mendaur ulang sampah agar dapat mengurangi produksi sampah kususnya diwilayah kecamatan dan memberiakan informasi kepada warga mengenai jadwak pembuangan dan penjemputan sampah.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.994.987.657,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 788.804.395,- atau 19,74% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (1). Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan dengan target sebesar 100% dang realisasinya sebesar 19,74%; (2). Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik, dengan target sebesar 100% dan realisasinya sebesar 19,74%.
Faktor Pendukung program ini:
Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pemberdayaan Masyarakat di kelurahan dan tersedianya dukungan anggaran dari APBD
Faktor Penghambat Program ini :
Adanya rasionalisasi anggaran pada kegiatan dan keterlambatan SK. Bendahara.
Tindak lanjutnya yaitu Melakukan perbaikan anggaran dalam dana kelurahan

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 604.136.800,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 594.077.154,- atau 98,33% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat terelesaikan dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%.
Faktor Pendukung program ini:
Adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga memberikan manfaat kepada aparatur untuk bekerja lebih efektif.
Faktor Penghambat Program ini :
Adanya keterbatasan kecamatan terkait dalam penanganan gangguan yang terjadi, dalam hal ini hanya sebatas pada Administrasi, pengawasan dan Koordinasi dengan pihak tripika kecamatan serta penyuluhan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tindak lanjutnya yaitu Meningkatkan koordinasi antara parat keamanan yang terkait serta patroli malam lebih ditingkatkan baik aparatur keamanan maupun dari pihak kelurahan dan kecamatan.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.844.215.880,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 12.309.772.094,- atau 95,84% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan, dengan target capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
Faktor Pendukung program ini:
Adanya dukungan anggaran APBD dan koordinasi yang intens antara pimpinan dan staf, serta tingginya animo pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Faktor Penghambat Program ini :
Kurangnya pengawasaan terhadap kegiatan pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical.
Tindak lanjutnya yaitu Meningkatkan capaiaan kinerja tersebut di semua pelaksanaan urusan pemerintahan baik di tingkat kelurahan dan kecamatan.

45. KECAMATAN TALLO

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tallo Kota Makassar Tahun 2024 memuat 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 47.004.426.528,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.566.128.978 atau 86,30% dan realisasi kinerja sebesar 90,35% dari target Renja.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.678.543.334,- dan realiasi untuk program ini sebesar Rp. 15.970.503.230,- atau 82,84% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (1) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Keadaan Baik, dengan target 90% dan realisasi capaiannya sebesar 100%; (2) Persentase Ketersediaan Laporan keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah, dengan target 100% dan realisasi capaiannya sebesar 100%; (3) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas, dengan target 90% dan realisasi capaiannya sebesar 100%.
Adapun faktor Pendorong adalah:
· Koordinasi antara pimpinan dengan staf sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik,
· Tingginya semangat bekerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar dan baik,
Faktor penghambat adalah Kurangnya sumberdaya manusia di Kelurahan sehingga beberapa tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan kurang maksimal
Tindak lanjutnya yaitu melakukan koordinasi ke BKPSDM Kota Makassar terkait pemenuhan kuota aparatur di Kelurahan guna meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.673.407.800,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 10.401.617.300,- atau 89,11% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Kecamatan, dengan target 100% dan tingkat realiasasi capaian sebesar 100%.
Faktor Pendukung program ini yaitu Adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan disetiap kelurahan kepada petugas kebersihan yang bertugas di kelurahan masing-masing.

Faktor Penghambat Program ini yaitu Masih kurangnya armada serta petugas kebersihan yang tersebar di kelurahan
Tindak lanjutnya yaitu Mengajukan rencana anggaran untuk pembelian armada pengangkut persampahan di Kecamatan Tallo

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.565.562.005,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 2.123.987.574,- atau 46,52% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (1). Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan dengan target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 66,66%; (2). Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik, dengan target sebesar 95% dengan realisasi sebesar 56,14%.
Faktor Pendukung program ini yaitu Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait Pemberdayaan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat berbasis wilayah Kecamatan.
Faktor Penghambat Program ini yaitu Keterlambatan SPD untuk pelaksanaan dana Kelurahan.
Tindak lanjutnya yaitu Berkoordinasi dengan BPKAD terkait ketersediaan Dana Kelurahan Kecamatan Tallo.

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 782.551.200,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 753.800.000,- atau 96,33% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat terelesaikan dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%.
Faktor Pendukung program ini yaitu Adanya koordinasi antara pihak Kecamatan Tallo dengan unsur Tripika Kecamatan khususnya Babinsa dan Babinkantibmas Kelurahan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Kecamatan.
Faktor Penghambat Program ini yaitu Beberapa wilayah di Kecamatan Tallo termasuk dalam zona yang rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban (Perkelahian Kelompok).
Tindak lanjutnya yaitu Peningkatan kapasitas petugas trantib dan Satpol PP.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.304.362.189,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 11.316.220.874,- atau 91,97% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan, dengan target capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
Faktor Pendukung program ini yaitu Koordinasi yang intens antara pimpinan dan staf, serta tingginya animo pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Faktor Penghambat Program ini yaitu Kurangnya sumberdaya manusia di Kelurahan sehingga beberapa tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan kurang maksimal

Tindak lanjutnya yaitu Melakukan koordinasi ke BKPSDM Kota Makassar terkait pemenuhan kuota aparatur di Kelurahan guna meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan.

46. KECAMATAN TAMALANREA

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Tahun 2024 memuat 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 41.685.012.007,- (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Tujuh Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.153.129.342 atau 86,73% dan realisasi kinerja sebesar 77,56% dari target Renja.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.184.058.907,- dan realiasi untuk program ini sebesar Rp. 11.894.300.007,- atau 86,47% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (1) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Keadaan Baik, dengan target 90% dan realisasi capaiannya sebesar 88,89%; (2) Persentase Ketersediaan Laporan keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah, dengan target 100% dan realisasi capaiannya sebesar 91%; (3) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas, dengan target 90% dan realisasi capaiannya sebesar 88,89%.

Adapun faktor Pendorong adalah:

- Adanya dukungan anggaran dari APBD
- Adanya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Adanya sistem penyelenggaran pemerintahan yang baik.
- Adanya nilai kinerja yang baik dari setiap Pegawai Kecamatan Tamalanrea.

Faktor penghambat adalah :

- Masih kurangnya fungsi koordinasi antara Kelurahan dan Kecamatan, Kecamatan dengan Instansi terkait dan Kecamatan dengan Pemegang kepentingan lainnya.
- Pengadaan Barang jasa harus memenuhi standar P3DN, sehingga memengaruhi proses pengadaan barang jasa di Kecamatan Tamalanrea.
- Masih kurangnya jumlah kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya.

Tindak lanjutnya :

- Meningkatkan kualitas tata Kelola Pemerintah yang professional.
- Meningkatkan kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan
- Kecamatan.
- Dilaksanakannya Rapat evaluasi setiap triwulan untuk membahas realisasi kinerja.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 15.385.981.300,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 14.284.430.265,- atau 92,84% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Kecamatan, dengan target 100% dan tingkat realiasasi capaian sebesar 93%.

Faktor Pendukung program ini:

- Adanya nilai kinerja yang baik dari setiap Pegawai Kecamatan Tamalanrea

- Adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan disetiap kelurahan kepada petugas kebersihan yang bertugas di kelurahan masing-masing.
- Adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Adanya pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga tercipta kepuasan masyarakat
- Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan persampahan

Faktor Penghambat Program ini:

- Masih kurangnya jumlah kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya.
- Dalam hal pelayanan kebersihan, Masih adanya oknum warga yang belum menaati jadwal pembuangan sampah dan beberapa warga masih membuang sampah disembarang tempat.
- Masih kurangnya armada serta petugas kebersihan yang tersebar di kelurahan sehingga pengangkutan sampah belum sepenuhnya optimal.
- Masih kurangnya kesadaran Petugas kebersihan akan pentingnya pemeliharaan kendaraan/armada pengelolaan persampahan.
- Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang memadai dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik.

Tindak lanjutnya :

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan dan Pemeliharaan lingkungan.
- Meningkatkan kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan.
- Meningkatkan kualitas tata Kelola Pemerintah yang professional.
- Dilaksanakannya Rapat evaluasi setiap triwulan untuk membahas realisasi kinerja.
- Mengadakan rapat khusus petugas kebersihan tentang pentingnya pemeliharaan rutin Armada Kebersihan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.235.703.400,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 1.434.999.600,- atau 33,88% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (1). Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan dengan target sebesar 100% dan tingkat realisasinya adalah sebesar 34%; (2). Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik, dengan target sebesar 95% dan tingkat realisasi kinerjanya sebesar 33,68%.

Faktor Pendukung program ini:

- Adanya dukungan anggaran dari APBD
- Koordinasi antara pimpinan dengan staf sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik.

Faktor Penghambat Program ini :

- Masih kurangnya fungsi koordinasi antara Kelurahan dan Kecamatan, Kecamatan dengan Instansi terkait dan Kecamatan dengan Pemegang kepentingan lainnya.
- Melakukan Penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan anggaran Kelurahan melalui Alokasi DAU Kelurahan.
- Masih kurangnya jumlah kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya.

- Belum adanya Juknis Pelaksanaan Kegiatan yang jelas dengan SKPD terkait.
- Belum adanya tindak lanjut terkait SK Bendahara Pembantu Kelurahan.·

Tindak lanjutnya :

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- Peningkatan kapasitas dan keterampilan Sumber Daya Aparatur sehingga dapat diandalkan, melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis ataupun Pendidikan dan Pelatihan yang bersertifikasi.
- Memaksimalkan monitoring pelaksanaan kegiatan agar apa yang ditargetkan dapat terealisasi maksimal

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 687.468.400,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 651.685.000,- atau 94,79% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat terelesaikan dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 94%.

Faktor Pendukung program ini:

- Adanya kerjasama yang baik antara kecamatan dengan Satpol PP, Polsek, Babinsa, dan lembaga keamanan lainnya.
- Adanya dukungan anggaran dari APBD

Faktor Penghambat Program ini :

- Adanya kerjasama yang baik antara kecamatan dengan Satpol PP, Polsek, Babinsa, dan lembaga keamanan lainnya.
- Adanya dukungan anggaran dari APBD

Tindak lanjutnya :

- Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan secara tepat dan terarah.
- Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, lembaga keamanan dan masyarakat di wilayah Kecamatan Tamalanrea.
- Mengadakan Sosialisasi tentang Penyalahgunakan fungsi sarana prasarana publik seperti badan jalan dan trotoar sebagai lokasi berjualan.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.191.800.000,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 7.887.714.470,- atau 96,29% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan, dengan target capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 96,29%.

Faktor Pendukung program ini:

- Adanya dukungan anggaran dari APBD
- Koordinasi yang intens antara pimpinan dan staf, serta tingginya animo pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah lainnya.

Faktor Penghambat Program ini :

- Jumlah aparatur yang tidak memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas
- Minimnya fasilitas kantor, transportasi, dan infrastruktur pendukung, seperti peralatan IT yang tidak memadai

Tindak lanjutnya :

- Melakukan monitoring terkait sarana dan prasarana yang ada di kelurahan untuk segera ditindak lanjuti jika terdapat kekurangan fasilitas dalam pelaksanaan pelayanan di Kelurahan.
- Peningkatan kapasitas dan keterampilan Sumber Daya Aparatur sehingga dapat diandalkan, melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis ataupun Pendidikan dan Pelatihan.

47. KECAMATAN TAMALATE

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Tahun 2024 memuat 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 52.092.378.358,- (Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.578.596.331 atau 87,50% dan realisasi kinerja sebesar 92,19% dari target Renja.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.375.009.146,- dan realiasi untuk program ini sebesar Rp. 15.472.623.350,- atau 89,05% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (1) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Keadaan Baik, dengan target 90% dan realisasi capaiannya sebesar 85%; (2) Persentase Ketersediaan Laporan keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah, dengan target 100% dan realisasi capaiannya sebesar 100%; (3) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas, dengan target 90% dan realisasi capaiannya sebesar 100%.

Adapun faktor Pendorong adalah Tingginya semangat kerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik.

Faktor penghambat adalah Adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan pekerjaan / kegiatan yang di anggap tidak prioritas.

Tindak lanjutnya adalah Melakukan monitoring dan evaluasi terahadap pelaksanaan pekerjaan dengan baik.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 15.034.069.200,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 14.279.190.972,- atau 94,98% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Kecamatan, dengan target 100% dan tingkat realiasasi capaian sebesar 94,98%.

Faktor Pendukung program ini yaitu komitmen pimpinan dalam melaksanakana kegiatan terkait pengelolaan persampahan dan adanya pengawasan, evaluasi yang dilakukan di setiap kelurahan kepada petugas kebersihan diwilayah kelurahan masing - masingkomitmen Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan persampahan.

Faktor Penghambat Program ini yaitu Masih adanya warga masyrakat yang suka membuang sampah sembarangan dan belum menaati jadwal pembuangan sampah.

Tindak lanjutnya yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam pola pembuangan sampah secara mandiri dan menganjurkan mendaur ulang sampah agar dap[at

mengurangi produksi sampah kususnya diwilayah kecamatan dan memberiakan informasi kepada warga mengenai jadwak pembuangan dan penjemputan sampah.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.274.878.940,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 1.400.858.600,- atau 32,98% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (1). Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan dengan target sebesar 100% dan tingkat realisasinya adalah sebesar 100%; (2). Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik, dengan target sebesar 95% dan tingkat realisasi kinerjanya sebesar 52,63%.

Faktor Pendukung program ini yaitu Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pemberdayaan Masyarakat di kelurahan.

Faktor Penghambat Program ini yaitu Adanya rasionalisasi anggaran pada kegiatan dan keterlambatan SK. Bendahara.

Tindak lanjutnya yaitu lebih awal memverifikasi ususlan proritas masyarakat pada kegiatan musrenbang dan pelaksanaan kegiatan dana kelurahan.

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 690.000.000,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 655.910.000,- atau 95,06% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat terelesaikan dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 95,06%.

Faktor Pendukung program ini yaitu adanya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sehingga memberikan manfaat kepada aparatur untuk bekerja lebih efektif.

Faktor Penghambat Program ini yaitu adanya keterbatasan kecamatan terkait dalam penanganan gangguan yang terjadi, dalam hal ini hanya sebatas pada Administrasi, pengawasan dan Koordinasi dengan pihak tripika kecamatan serta penyuluhan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Tindak lanjutnya yaitu Memaksimalkan data keamanan dan ketertiban wilayah dari pihak Kepolisian dan TNI terhadap peenanganan PK5 (Penegakan Perda).

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.745.421.072,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 13.770.013.409,- atau 93,39% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan, dengan target capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 93,39%.

Faktor Pendukung program ini yaitu Adanya dukungan anggaran APBD dan koordinasi yang intens antara pimpinan dan staf, serta tingginya animo pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Faktor Penghambat Program ini yaitu Kurangnya pengawasaan terhadap kegiatan pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical.

Tindak lanjutnya yaitu Meningkatkan capaiaan kinerja tersebut di semua pelaksanaan urusan pemerintahan baik di tingkat kelurahan dan kecamatan.

48. KECAMATAN UJUNG PANDANG

Untuk tahun 2024, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar telah melaksanakan 5 program, (11 kegiatan), terdiri dari 31 sub kegiatan. Secara umum, tidak terdapat kendala yang berarti dalam pencapaian kinerja tersebut, keterlambatan pelaksanaan kegiatan disebabkan karena rata-rata target kegiatan berada pada triwulan berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan anggaran kas. Secara rinci, penjelasan capaian target kinerja untuk masing-masing program sampai triwulan II diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu (1) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja sebesar 90% (2) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, (3) Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, dengan target kinerja sebesar 90%. Rencana alokasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 16.090.639.639,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.874.389.081,-

- Tahun 2022, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 80% (88,89%), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% (100%) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 75% (83,33%).
- Tahun 2023, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 100 % (111,11%), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% (100%) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 90 % (100%).
- Tahun 2024, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 72,57% (81%), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% (100%) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 100 % (111%).

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik memiliki 1 (satu) indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan, dengan target kinerja sebesar 95. Rencana alokasi anggaran program ini untuk tahun 2024 sebesar Rp. 16.321.235.500,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 15.780.982.713,-

Tahun 2022, realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar 94 (98,94%). Tahun 2023, realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar 98,95 (104,16%).

Tahun 2024, realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar 99 (104%).

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan memiliki 2 (dua) indikator, yaitu (1) Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan, dengan target kinerja sebesar 100%, dan (2) Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik, dengan target kinerja sebesar 95 %. Rencana alokasi anggaran program ini untuk tahun 2024 sebesar Rp. 5.035.908.525,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.763.876.034,-.

Tahun 2022, realisasi kinerja indikator persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan sebesar 100 % (100%), dan realisasi kinerja indikator sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik sebesar 66% (66%). Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan sebesar 100% (100%), dan realisasi kinerja indikator sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik sebesar 66 % (66 %).

Tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan sebesar 90% (90%), dan realisasi kinerja indikator sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik sebesar 85,38 % (85 %).

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum memiliki indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat diselesaikan, dengan target kinerja 95 %.Rencana alokasi anggaran program ini untuk tahun 2024 sebesar Rp. 591.197.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 560.007.000,-

Tahun 2002, realisasi kinerja indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat diselesaikan sebesar 95% (100%), Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 90,52 % (95,28%).

Tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100 % (105%).

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum memiliki indikator persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, dengan target kinerja sebesar 95 %. Rencana alokasi anggaran program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tahun 2024 sebesar Rp. 4.586.294.304,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.241.399.586,-

Tahun 2022, realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sebesar 100 % (105,3%). Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sebesar 89 % (93,68%).

Tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sebesar 100 % (105%). Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD capaian indikator ini sebesar 198,95 %.

49. KECAMATAN UJUNG TANAH

Urusan Kewilayahan diselenggarakan oleh diantaranya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dengan anggaran sebesar Rp. 28.652.828.142,- dan realisasi sebesar Rp. 24.543.039.505,- Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 5 program yaitu : 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, 5). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun realisasi tiap program adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar

Program ini memiiliki 3 indikator kinerja yaitu:

- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja 90 % terealisasi 100 %.

- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% terealisasi 100%.
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dengan target kinerja 90% terealisasi 98 %.

Rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 99,33 % yang didukung oleh anggaran sebesar Rp. 11.257.385.310,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.676.373.728,- atau 85,96%.

Faktor Pendorong :
1. Koordinasi antar pimpinan dengan staf sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik.
2. Tingginya semangat kerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
3. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kapasitas pegawai.
4. Ketersediaan anngaran pada perubahan anggaran.

Faktor Penghambat :
1. Adanya jabatan kosong pada Kelurahan Ujung Tanah sehingga penganggaran untuk gaji dan tunjangan yang dianggarakan banyak tersisa karena sampai pada akhir tahun, jabatan tersebut belum terisi.

Rencana Tindak Lanjut :
1. Akan berkoordinasi dengan pihak BKD untuk segera mengisi jabatan yang lowong di Kelurahan.
2. Akan meningkatkan koordinasi dengan pihak yang dapat meningkatkan terlaksananya kegiatan

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan dengan target 100% dan terealisasi 100%. Rata-rata tingkat capaian kinerja 100% dengan target anggaran Rp. 9.062.772.400,- dengan realisasi Rp. 8.267.397.638,- atau 91,22%.

Faktor Pendorong :
- Adanya dukungan dana APBD.
- Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan persampahan.
- Adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan di setiap Kelurahan kepada petugas kebersihan yang bertugas di Kelurahan masing-masing.
- Cukup tingginya animo masyarakat dalam pengelolaan sampah, misalnya dimanfaatkan sebagai kompos, daur ulang menjadi barang yang bernilai maupun pemilahan sampah melalui Bank Sampah unit yang tersebar di Kelurahan

Faktor Penghambat :
- Masih adanya warga yang belum menaati jadwal pembuangan sampah dan masih membuang sampah di sembarang tempat.
- Masih kurangnya armada serta petugas yang tersebar di Kelurahan.
- Masih kurangnya kesadaran petugas kebersihan akan pentingnya pemeliharaan armada pengelolaan persampahan.

Rencana Tindak lanjut :
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pola pembuangan sampah secara mandiri dan daur ulang agar dapat mengurangi produksi sampah khususnya di wilayah Kecamatan.
- Memaksimalkan koordinasi terhadap para stakeholder terkait. (Bappeda, BPKAD dan

Bagian ULP setko Makassar) terkait penambahan armada.
- Memberikan informasi kepada warga mengenai jadwal pembuangan sampah.
- Memberikan pemahaman kepada petugas persampahan pentingnya pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah.

C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum lingkup Kecamatan yang dapat diselesaikan dengan target 100% realisasi 98%. Rata-rata tingkat capaian kinerja 100% yang didukung anggaran Rp. 718.112.700,- realisasi Rp. 652.969.000,- atau 91,22%.

Faktor Pendorong :
- Adanya tim penanganan sementara dari BKO Satpol yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Tanah yang membantu menangani ketentraman dan ketertiban umum.
- Kegiatan patrol dari BKO Satpol dilakukan setiap hari.
- Koordinasi yang intens antara pimpinan instansi vertikal (Camat, Kapolsek dan Danramil).

Faktor Penghambat :
- Tupoksi Kecamatan yang terbatas dan tidak terkait langsung dalam penanganan gangguan K3 yang terjadi. Dalam hal ini hanya sebatas pada administrasi, pengawasan dan koordinasi dengan pihak Tripika Kecamatan serta penyuluhan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada warga terkait peraturan-peraturan yang berlaku maupun sanksi hukum yang ada di dalamnya, sedangkan tupoksi yang terkait langsung dalam penanganan gangguan K3 tersebut yaitu Tripika Kecamatan,yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- Masih kurangnya personal BKO Satpol yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Tanah.
- Kurangnya sosialisasi penegakan Perda kepada masyarakat tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Rencana Tindak lanjut :
- Meningkatkan koordinasi antara apparat keamanan yang terkait serta meningkatkan patrol malam baik aparatur keamanan maupun dari pihak Kelurahan dan Kecamatan Ujung Tanah.
- Melaksanakan koordinasi ke Tingkat yang lebih tinggi agar melakukan penambahan personal keamanan.
- Memberikan sosialisasi kepada masyrakat akan pentingnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah masing-masing.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dengan target 100% realisasi 100%. Rata-rata tingkat capaian kinerja adalah 100% dengan anggaran Rp. 5.037.846.747,- realisasi Rp.4.468.192.039,- atau 88,69%.

Faktor Pendorong :
- Koordinasi yang intens antara pimpinan dan staf serta tingginya animo pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung atas seluruh kegiatan yang ada di Kelurahan.

Faktor Penghambat :

Lambatnya proses pemilihan penyediasehingga ada beberapa belanj yang terealisasi di akhir tahun.

Rencana Tindak Lanjut :

- Meningkatkan koordinasi dengan lebih awal akan mencari penyedia yang dapat melaksanakan kegiatan.
- Meningkatkan koordinasi pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terhadap penigkatan pelayanan di Kelurahan.

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 2 (dua) indikator :

- Persentase masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan dengan target 100%, realisasi 33,33%.
- Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik dengan target 100% realisasi 87,33%.

Rata-rata tingkat capaian kinerja adalah 100% yang didukung oleh anggaran Rp. 2.576.710.985,- realisasi Rp. 1.478.107.100,- atau 57,36%

Faktor Pendorong :

- Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- Tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pemberdayaan di Kelurahan.

Faktor Penghambat :

- Belum tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan stunting.
- Dana Kelurahan tahap II tidak cair karena realisasi tahap 1 se Kota Makassar tidak mencapai 75%.

Rencana Tindak lanjut **:**

- Akan memberikan pemahaman kepada pelaksana kegiatan, baik itu dari pihak Kelurahan ataupun dari kelompok masyarakat akan pentingnya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan.
- Akan mendorong kepada pihak Kelurahan agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut tepat waktu sesuai penempatan anggaran kasnya.
- Secepatnya diadakan sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

50. KECAMATAN WAJO

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu (1) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja sebesar 90% (2) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, (3) Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, dengan target kinerja sebesar 90%. Rencana alokasi anggaran untuk program penunjang tahun 2024 sebesar Rp. 10.751.216.585,- dan realiasasi anggaran sebesar Rp. 9.444.459.751,-Tahun 2022, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 75% (83,33%), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 75% (75%) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 75% (83,33%).Tahun 2023, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 90 % (100 %), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 90 % (90 %) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 90 % (100 %).

Tahun 2024, realisasi kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi

Baik sebesar 73% (83,33%), Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 73% (73%) dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 73% (83,33%).

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik memiliki 1 (satu) indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan, dengan target kinerja pada akhir tahun perencanaan sebesar 95. Rencana alokasi anggaran program ini untuk tahun 2024 sebesar Rp. 8.200.736.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.927.577.000,-

Tahun 2022, realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar 93,25 (98,16%). Tahun 2023, realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar 93,15 (98,05%). Tahun 2024, realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar 104 % (109%). .

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan memiliki 2 (dua) indikator, yaitu (1) Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan, dengan target kinerja sebesar 100%, dan (2) Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik, dengan target kinerja sebesar 95 %. Rencana alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 1.820.124.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 439.431.600,-

Tahun 2022, realisasi kinerja indikator persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan sebesar 32,49 % (32,49 %), dan realisasi kinerja indikator sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik sebesar 0% (0%) karena tidak terlaksana kegiatannya.

Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan sebesar 95 % (95%), dan realisasi kinerja indikator sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik sebesar 95 % (95 %).

Tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan sebesar 10 % (10 %), dan realisasi kinerja indikator sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik sebesar 0% (0%) karena tidak terlaksana kegiatannya.

.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum memiliki indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat diselesaikan, dengan target kinerja 95 %. Rencana alokasi anggaran program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 474.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 446.400.000,-

Tahun 2002, realisasi kinerja indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat diselesaikan sebesar 74,69% (74,69%), Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 77,8 % (77,8%).

Tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat diselesaikan sebesar 97% (97%). Jika dibandingkan terhadap target pada akhir periode RPJMD, tingkat capaian indikator kinerja persentase

gangguan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat diselesaikan sebesar 160,52 %.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum memiliki indikator persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, dengan target kinerja sebesar 95 %. Rencana alokasi anggaran program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum untuk tahun 2024 sebesar RP. 4.671.877.643,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.257.551.714,-

Tahun 2022, realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sebesar 39,94% (39,94%). Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sebesar 100% (100%). Tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sebesar 106% (106%).Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD capaian indikator ini sebesar 147,31 %.

51. KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan kepulauan Sangkarrang Kota Makassar Tahun 2024 memuat 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 12.020.247.306,- (Dua Belas Milyar Dua Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.668.703.328 atau 80,44% dan realisasi kinerja sebesar 80,53% dari target Renja.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.708.544.416,- dan realiasi untuk program ini sebesar Rp. 6.621.376.932,- atau 87,62% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (1) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Keadaan Baik, dengan target 90% dan realisasi capaiannya sebesar 100%; (2) Persentase Ketersediaan Laporan keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah, dengan target 100% dan realisasi capaiannya sebesar 100%; (3) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas, dengan target 90% dan realisasi capaiannya sebesar 88,89%.

Adapun faktor Pendorong adalah:

- Adanya dukungan anggaran dari APBD
- Adanya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Adanya sistem penyelenggaran pemerintahan yang baik.
- Adanya nilai kinerja yang baik dari setiap Pegawai Kecamatan Sangkarrang

Faktor penghambat adalah :

- Masih kurangnya fungsi koordinasi antara Kelurahan dan Kecamatan, Kecamatan dengan Instansi terkait dan Kecamatan dengan Pemegang kepentingan lainnya.
- Pengadaan Barang jasa harus memenuhi standar P3DN, sehingga memengaruhi proses pengadaan barang jasa di Kecamatan Makassar
- Masih kurangnya jumlah kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya

Tindak lanjutnya :

- Meningkatkan kualitas tata Kelola Pemerintah yang professional.

- Meningkatkan kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan
- Kecamatan.
- Dilaksanakannya Rapat evaluasi setiap triwulan untuk membahas realisasi kinerja.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.573.833.942,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 1.512.192.650,- atau 96,08% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Kecamatan, dengan target 100% dan tingkat realiasasi capaian sebesar 96,08%.

Faktor Pendukung program ini:

- Adanya nilai kinerja yang baik dari setiap Pegawai Kecamatan
- Adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan disetiap kelurahan kepada petugas kebersihan yang bertugas di kelurahan masing-masing.
- Adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Adanya pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga tercipta kepuasan masyarakat.
- komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan persampahan·

Faktor Penghambat Program ini:

- Masih kurangnya jumlah kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya.
- Dalam hal pelayanan kebersihan, Masih adanya oknum warga yang belum menaati jadwal pembuangan sampah dan beberapa warga masih membuang sampah disembarang tempat.
- Masih kurangnya armada serta petugas kebersihan yang tersebar di kelurahan sehingga pengangkutan sampah belum sepenuhnya optimal.
- Masih kurangnya kesadaran Petugas kebersihan akan pentingnya pemeliharaan kendaraan/armada pengelolaan persampahan.
- Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang memadai dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik.

Tindak lanjutnya yaitu :

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan dan Pemeliharaan lingkungan.
- Meningkatkan kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan.
- Meningkatkan kualitas tata Kelola Pemerintah yang professional.
- Dilaksanakannya Rapat evaluasi setiap triwulan untuk membahas realisasi kinerja.
- Mengadakan rapat khusus petugas kebersihan tentang pentingnya pemeliharaan rutin Armada Kebersihan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.136.959.800,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 55.478.250,- atau 4,88% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah (1). Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan dengan target sebesar 100% dan tingkat realisasinya adalah sebesar 4,00 %; (2). Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik, dengan target sebesar 95% dan tingkat realisasi kinerjanya sebesar 4,21%.

Faktor Pendukung program ini:

- Adanya dukungan anggaran dari APBD
- Koordinasi antara pimpinan dengan staf sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik.

Faktor Penghambat Program ini :

- Masih kurangnya fungsi koordinasi antara Kelurahan dan Kecamatan, Kecamatan dengan Instansi terkait dan Kecamatan dengan Pemegang kepentingan lainnya.
- Melakukan Penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan anggaran Kelurahan melalui Alokasi DAU Kelurahan.
- Masih kurangnya jumlah kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya.
- Belum adanya Juknis Pelaksanaan Kegiatan yang jelas dengan SKPD terkait.
- Belum adanya tindak lanjut terkait SK Bendahara Pembantu Kelurahan.

Tindak lanjutnya :

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- Peningkatan kapasitas dan keterampilan Sumber Daya Aparatur sehingga dapat diandalkan, melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis ataupun Pendidikan dan Pelatihan yang bersertifikasi.
- Memaksimalkan monitoring pelaksanaan kegiatan agar apa yang ditargetkan dapat terealisasi maksimal

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 37.527.900,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 37.527.900,- atau 100% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan yang dapat terelesaikan dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%.

Faktor Pendukung program ini:

- Adanya kerjasama yang baik antara kecamatan dengan Satpol PP, Polsek, Babinsa, dan lembaga keamanan lainnya.
- Adanya dukungan anggaran dari APBD

Faktor Penghambat Program ini :

- Adanya kerjasama yang baik antara kecamatan dengan Satpol PP, Polsek, Babinsa, dan lembaga keamanan lainnya.
- Adanya dukungan anggaran dari APBD

Tindak lanjutnya :

- Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan secara tepat dan terarah.
- Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, lembaga keamanan dan masyarakat di wilayah Kecamatan Tamalanrea.
- Mengadakan Sosialisasi tentang Penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik seperti badan jalan dan trotoar sebagai lokasi berjualan.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.563.381.248,- dan realisasi untuk program ini sebesar Rp. 1.442.118.596,- atau 92,24% dari anggaran yang ditargetkan. Indikator, capaian dan tingkat capaian kinerja programnya adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan, dengan target capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 92,24%.

Faktor Pendukung program ini:

- Adanya dukungan anggaran dari APBD
- Koordinasi yang intens antara pimpinan dan staf, serta tingginya animo pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah lainnya.

Faktor Penghambat Program ini :

- Jumlah aparatur yang tidak memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas
- Minimnya fasilitas kantor, transportasi, dan infrastruktur pendukung, seperti peralatan IT yang tidak memadai

Tindak lanjutnya :

- Melakukan monitoring terkait sarana dan prasarana yang ada di kelurahan untuk segera ditindak lanjuti jika terdapat kekurangan fasilitas dalam pelaksanaan pelayanan di Kelurahan.
- Peningkatan kapasitas dan keterampilan Sumber Daya Aparatur sehingga dapat diandalkan, melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis ataupun Pendidikan dan Pelatihan.

II.3.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2025

Telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan I merupakan telaah realisasi indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Hasil pengendalian dan evaluasi triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja dan keuangan dari Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dari SKPD Pemerintah Kota Makassar masih berada pada kategori rendah yaitu pada angka 21,79% untuk realisasi keuangan dan 10,09% untuk realisasi kinerja. Hal ini lebih dikarenakan triwulan I merupakan tahap konsolidasi dan persiapan pelaksanaan Program dan Kegiatan, dimana SKPD masih dalam tahap persiapan administrasi kegiatan seperti penetapan PPTK, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (TOR), dokumen kelengkapan kontrak, Surat Keputusan serta kelengkapan lainnya. Adapun secara umum realisasi kinerja untuk Triwulan I, Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.363.
Realisasi Kinerja dan Keuangan Triwulan 1

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Sampai Triwulan I			Sisa Pagu
			Realisasi Keuangan	Keuangan	Fisik	
				(%)	(%)	
1	Kecamatan Panakkukang	Rp 1,372,782,076,418	Rp 204,543,391,324	14.90	12.86	Rp 1,168,238,685,094
2	Dinas Pendidikan	Rp 652,820,435,931	Rp 72,336,955,711	11.08	21.57	Rp 580,483,480,220
3	Kecamatan Tamalanrea	Rp 898,806,404,750	Rp 14,817,569,062	1.65	11.71	Rp 883,988,835,688
4	Kecamatan Ujung Pandang	Rp 28,681,214,797	Rp 2,877,729,708	10.03	16.79	Rp 25,803,485,089
5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Rp 60,767,913,655	Rp 2,663,683,956	4.38	21.14	Rp 58,104,229,699
6	Kecamatan Biringkanaya	Rp 46,982,529,144	Rp 7,500,100,787	15.96	18.74	Rp 39,482,428,357
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 54,633,097,454	Rp 8,936,046,865	16.36	14.19	Rp 45,697,050,589
8	Kecamatan Ujung Tanah	Rp 25,113,873,837	Rp 3,215,672,422	12.80	19.25	Rp 21,898,201,415
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 24,083,566,011	Rp 2,866,306,432	11.90	59.25	Rp 21,217,259,579
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Rp 25,527,164,383	Rp 2,837,529,525	11.12	14.56	Rp 22,689,634,858
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 18,776,445,227	Rp 2,535,639,419	13.50	14.91	Rp 16,240,805,808
12	Kecamatan Tallo	Rp 25,922,602,297	Rp 1,715,114,854	6.62	11.41	Rp 24,207,487,443
13	Kecamatan Rappocini	Rp 18,538,143,854	Rp 954,802,154	5.15	11.18	Rp 17,583,341,700
14	Sekretariat DPRD	Rp 232,796,957,881	Rp 9,713,523,688	4.17	24.07	Rp 223,083,434,193
15	Kecamatan Mamajang	Rp 20,812,809,868	Rp 3,518,808,758	16.91	19.74	Rp 17,294,001,110
16	Kecamatan Tamalate	Rp 27,251,037,931	Rp 2,233,767,984	8.20	34.9	Rp 25,017,269,947
17	Kecamatan Makassar	Rp 143,523,942,130	Rp 17,512,082,221	12.20	16.33	Rp 126,011,859,909
18	Kecamatan Bontoala	Rp 79,963,874,678	Rp 3,294,132,675	4.12	16.84	Rp 76,669,742,003
19	Kecamatan Mariso	Rp 19,214,443,481	Rp 2,419,613,941	12.59	20.06	Rp 16,794,829,540
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 23,041,606,335	Rp 3,040,173,813	13.19	10.54	Rp 20,001,432,522
21	Sekretariat Daerah	Rp 120,821,842,078	Rp 2,327,805,579	1.93	8.74	Rp 118,494,036,499
22	Kecamatan Manggala	Rp 21,591,163,439	Rp 1,741,669,705	8.07	4.91	Rp 19,849,493,734
23	Dinas Perpustakaan	Rp 13,244,940,038	Rp 1,654,008,224	12.49	9.48	Rp 11,590,931,814
24	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 10,900,255,038	Rp 1,274,297,377	11.69	13.04	Rp 9,625,957,661

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Sampai Triwulan I			Sisa Pagu
			Realisasi Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)	
25	Dinas Pariwisata	Rp 43,089,113,787	Rp 6,640,344,656	15.41	16.12	Rp 36,448,769,131
26	Dinas Perikanan dan Pertanian	Rp 42,369,977,106	Rp 3,842,207,298	9.07	9.48	Rp 38,527,769,808
27	Dinas Perhubungan	Rp 24,779,484,110	Rp 2,971,129,291	11.99	16.58	Rp 21,808,354,819
28	Badan Pendapatan Daerah	Rp 301,404,167,452	Rp 20,190,189,797	6.70	32.26	Rp 281,213,977,655
29	Kecamatan Wajo	Rp 224,930,722,191	Rp 21,141,158,344	9.40	17.13	Rp 203,789,563,847
30	Inspektorat Daerah	Rp 43,068,955,553	Rp 6,155,827,722	14.29	32.22	Rp 36,913,127,831
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 97,504,800,000	Rp 8,020,421,372	8.23	14.37	Rp 89,484,378,628
32	Kecamatan Kep. Sangkarrang	Rp 137,181,171,182	Rp 9,680,094,129	7.06	22.7	Rp 127,501,077,053
33	Dinas Kearsipan	Rp 31,073,884,842	Rp 5,288,776,538	17.02	80.31	Rp 25,785,108,304
34	Dinas Sosial	Rp 10,716,436,007	Rp 1,372,825,268	12.81	14.13	Rp 9,343,610,739
35	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp 56,533,966,984	Rp 5,024,276,934	8.89	35.43	Rp 51,509,690,050
36	Dinas Ketenagakerjaan	Rp 57,144,955,671	Rp 7,732,775,299	13.53	22.78	Rp 49,412,180,372
37	Dinas Pertanahan	Rp 39,929,669,835	Rp 5,847,824,449	14.65	21.51	Rp 34,081,845,386
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 57,733,235,307	Rp 8,049,521,225	13.94	20.05	Rp 49,683,714,082
39	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 46,276,565,105	Rp 7,370,027,046	15.93	25.55	Rp 38,906,538,059
40	Dinas Penataan Ruang	Rp 49,470,554,588	Rp 7,900,850,152	15.97	37.85	Rp 41,569,704,436
41	Dinas Kesehatan	Rp 36,927,063,261	Rp 5,260,669,474	14.25	37.44	Rp 31,666,393,787
42	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 57,850,073,803	Rp 9,468,076,596	16.37	21.61	Rp 48,381,997,207
43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 56,300,141,520	Rp 9,479,246,250	16.84	20.78	Rp 46,820,895,270
44	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimaan	Rp 54,686,655,230	Rp 8,096,430,120	14.81	19.55	Rp 46,590,225,110
45	Dinas Kebudayaan	Rp 46,282,643,769	Rp 6,714,350,528	14.51	16.28	Rp 39,568,293,241
46	Dinas Ketahanan Pangan	Rp 55,839,729,890	Rp 9,713,878,343	17.40	27.43	Rp 46,125,851,547
47	Dinas Perdagangan	Rp 43,586,650,652	Rp 7,689,598,209	17.64	25.14	Rp 35,897,052,443
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 32,639,079,023	Rp 5,369,099,878	16.45	23.22	Rp 27,269,979,145
49	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 31,920,917,745	Rp 5,062,662,761	15.86	17.58	Rp 26,858,254,984
50	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 14,617,140,004	Rp 1,968,125,515	13.46	25.85	Rp 12,649,014,489
51	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp 42,133,831,080	Rp 3,026,181,208	7.18	31.98	Rp 39,107,649,872
Total		**Rp 5,702,589,926,352**	**Rp 575,606,994,586**	**10.09**	**21.79**	**Rp 5,126,982,931,766**

Sumber: Laporan Monev Triwulan I, T.A 2025

Pada tabel di atas, tergambar bahwa berdasarkan kriteria penilaian capaian kinerja dan predikat kinerja, maka realisasi kinerja pemerintah Kota Makassar sampai dengan triwulan I seharusnya sudah mencapai 25% dengan asumsi dalam satu tahun anggaran dibagi empat triwulan.

Tabel II.364
Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Makassar Tahun 2025

No	Interval Nilai realisasi Kinerja	Simbol	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	18 % ≤ 25 %	T	Tinggi
2	9 % ≤ 17 %	S	Sedang
3	0 % ≤ 8 %	R	Rendah

Bila melihat tabel skala nilai peringkat kinerja diatas, maka realisasi kinerja

Pemerintah Kota Makassar secara keseluruhan masih berada pada kategori rendah. Dari 51 SKPD Pemerintah Kota Makassar, 3 SKPD yang berada pada nilai realisasi kinerja tinggi, 34 SKPD yang berada pada nilai realisasi kinerja sedang, sedangkan selebihnya 14 SKPD masih dalam kriteria penilaian rendah.

II.4. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam RKP 2026 tema yang diambil adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan maupun Kesehatan. Namun demikian sampai saat ini Makassar tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Makassar meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan aspek Fisik dan Lingkungan, Aspek Sosial Budaya, Aspek Ekonomi Keuangan. Aspek Pemerintahan.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah, yang di identifikasi untuk menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Makassar yaitu:

Pendidikan

1. Angka harapan Lama sekolah meningkat dengan capaian 95,48%, Angka Rata-rata lama Sekolah capaian 96,4%, angka tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan terhadap pastisipasi penduduk Kota makassar untuk Peningkatan Pendidikan, yang harus menjadi perhatian terhadap pencapaian angka tersebut sangat diperlukan peningkatan Kualitas pendidikan.
2. Capaian APK SD dan APM SD menurun dari 101,178% ke 86, 23% % ke dan Capaian APK SMP dan APM SMP menurun dari 85,18% ke 80,16%. hal ini disebabkan Keterbatasan Kapasitas Sekolah Negeri, Anak Putus Sekolah serta peningkatan kesejahteraan dan distribusi Guru.
3. Capaian APK PAUD dan APM PAUD menurun dari 99,69% ke 68,46 % hal ini disebabkan sebagian orang tua belum mengikutkan anaknya pada lembaga PAUD formal dikarenakan biaya yang masih tinggi, serta ketersediaan sapras PAUD masih belum memadai dan belum memenuhi standar yang dipersyaratkan menurut regulasi yang ada.
4. Perlu peningkatan sarana dan prasana Sekolah dengan Kondisi Bangunan Baik Ruang Kelas, Perpustakaan, Ruang Guru, Ruang UKS,Toilet dan Ruang LAB dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan iklim belajar mengajar yang sehat.
5. Pada capaian persentase lembaga pendidikan yang diawasi perizinannya yakni 69,33 persen karena masih adanya beberapa sekolah SD dan SMP Swasta yang masa berlaku izin operasionalnya telah berakhir tetapi belum memperpanjang izin operasional sekolah sehingga mempengaruhi proses penginputan di Dapodik.
6. Menurunnya Angka Guru yang bersertifikat Guru PAUD dari 124,43% ke 89,53%, Guru SD dari 82,66% ke 76,87% dan Guru SMP dari 90,85% ke 87,88% data tersebut perlunya peningkatan kompetensi Guru dalam proses belajar mengajar.

7. Masih terbatasnya keterlibatan penilik dan pengawas sebagai pendamping mutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam lingkup administratif sehingga belum banyak menyentuh pada aspek pengembangan manajemen persekolahan dan mutu pembelajaran

Kesehatan

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam upaya pencapaian target indikator kinerja selama tahun 2024 tentunya tidak lepas dari berbagai Permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan program terutama terkait penanggulangan penyakit menular masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit menular dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka ke fasilitas kesehatan, sehingga tidak terdeteksinya penemuan kasus baru di masyarakat serta pelaporan rutin yang tidak tepat waktu dari puskesmas dan jejaringnya.
2. Keterlambatan penambahan tenaga teknis untuk Dinas Kesehatan untuk mendukung pembangunan fisik.
3. Adanya perubahan pada spesifikasi beberapa produk Alat Kesehatan (alkes) yang akan dibelanjakan. Hal ini berefek pada waktu untuk proses belanja yang tidak memungkinkan sehingga pengadaan Alkes tidak dapat terealisasi.
4. Untuk beberapa kegiatan yang membutuhkan petujuk teknis (juknis) agak terhambat di karenakan juknisnya terlambat
5. Terkait pengadaan obat dan bahan medis habis pakai ada bebarapa yang bahan bakunya itu harus diimport sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengadaannya.

Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk masih harus ditingkatkan dimana Panjang jalan di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir tidak ada penambahan jalan atau pembangunan jalan baru secara signifikan;
2. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air masih sangat rendah;
3. Persentase rumah tinggal bersanitasi dan akses air bersih masih harus dipacu untuk mencapai target *universal acceses*;
4. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat masih rendah;
5. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun masih sangat rendah;
6. Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor masih rendah;
7. Persentase area Kawasan kumuh kota Makassar masih tinggi;
8. Kasih kurangnya ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan guna Penanganan sampah di Kota Makassar masih perlu peningkatan kapasitasnya untuk menunjang kebersihan kota.
9. Masih sangat kurangnya ketersediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas;
10. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan, masih sangat rendah;
11. Diperlukan Percepatan Peraturan Daerah terkait aspek-aspek pengendalian

ruang seperti Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, perangkat hukum (sanksi), perizinan dan insentif disinsentif yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota;

12. Perlu adanya strategi dalam pemenuhan ketersediaan RTH 30% mengingat sebagian besar status kepemilikan lahan yang masuk dalam arahan kawasan RTH sebagian besar status hak milik. Diperlukan regulasi insentif maupun disinsentif dalam pemenuhan ketersediaan RTH, serta strategi tabungan lahan (Bank Land);
13. Masih adanya tumpang tindih Tugas dan Fungsi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Masih kurangnya koordinasi pengawasan IMB pada di tingkat Kelurahan/Kecamatan serta belum tersedianya dan atai belum efektifnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (berbasis sistem);
15. Perlunya memaksimalkan pemenuhan target-target SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
16. Perlunya memaksimalkan pemakaian teknologi dalam penyediaan data dan informasi spasial tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
17. Perlunya memaksimalkan pengelolaan update data tahunan terkait Penggunaan Lahan dan Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Masih banyaknya pengembang belum menyerahkan fasum dan fasosnya;
2. Masih belum terjaminnya akses bagi semua penduduk terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh;
3. Masih rendahnya jumlah rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah penduduk sehingga rasio rumah layak huni menjadi rendah;
4. Belum tersedianya data permukiman layak huni dan pemukiman yang tertata;
5. Masih tingginya persentase lingkungan pemukiman kumuh dibandingkan dengan luas wilayah Kota Makassar;
6. Masih belum adanya data lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU;
7. Belum meratanya ketersediaan prasarana dan sarana utiitas umum pada perumahan dan Kawasan pemukiman termasuk di rusunawa;
8. Masih belum maksimalnya pemenuhan target-target SPM Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
9. Masih banyaknya *back look* rumah;
10. Meningkatnya proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Kekurangan armada dan kondisi kendaraan yang tidak layak
2. Jumlah armada pemadam kebakaran saat ini belum memenuhi kebutuhan ideal, dengan sebagian kendaraan sudah tua, rusak, dan membutuhkan regenerasi.
3. Jumlah dan kualifikasi personel belum memadai. Personel yang tersedia belum mencukupi dan sebagian besar belum memiliki kualifikasi lengkap untuk mendukung layanan pemadaman, penyelamatan, dan pemeriksaan proteksi gedung.
4. Pemberdayaan masyarakat dan relawan belum optimal. Program PK Rong, Damtor, APAR, dan REDKAR belum maksimal karena kurangnya pelatihan, pendampingan, dan insentif.

5. Rendahnya kesadaran pemilik gedung terhadap sistem proteksi kebakaran. Banyak gedung belum memiliki sistem proteksi dan manajemen kebakaran sesuai standar, meningkatkan risiko keselamatan.
6. Keterbatasan armada khusus untuk bangunan tinggi. Perkembangan bangunan bertingkat belum diimbangi dengan ketersediaan armada tangga atau sky lift yang memadai.

Badan Penanggulangan Bencana

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPBD Kota Makassar yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi belum optimal.
2. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana
4. Masih banyak anggota Tim Reaksi Cepat yang belum memperoleh pelatihan dasar Relawan
5. Tim assessment belum mempunyai pengetahuan untuk mengkaji kerusakan dan kerugian infrastruktur akibat bencana
6. Kurangnya pemahaman untuk menentukan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana/pengungsi secara tepat
7. Dukungan anggaran untuk program utama (khususnya yang masuk dalam SPM) belum optimal

Sosial

1. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti belum dapat terlaksana dengan optimal karena Kota Makassar belum memiliki tempat rehabilitasi sosial yang representatif untuk mendukung pelaksanannya. Diharapkan pada tahunmendatang, pembebasan lahan sekaligus pembangunan tempat rehabilitasi sosial dapat dilakukan.
2. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan,Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar yang belum terlaksana sehingga masyarakat Kota Makassar yang memberi uang di jalanan belum diberikan sanksi dan mengakibatkan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen semakin meningkat. Dinas Sosial akan semakin aktif mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar dan dengan dukungan Satpol PP sebagai aparat penegak perda untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang memberikan uang di jalan dan diharapkan pelaksanaan tersebut dapat menurunkan jumlahanak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
3. Pelaksanaan penanganan pasca bencana belum optimal karena sarana dan prasarana belum memadai. Sehingga pada tahun depan, Dinas Sosial akan menambah kelengkapan alat untuk penanganan bencana termasuk penyediaan tempat penampungan pengungsi yang layak.
4. Pada daerah rawan bencana, masyarakat belum memiliki kesadaran dan upaya dalam tanggapbencana sehingga belum terbentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, akan dibentuk kampung siaga bencana di daerah rawan bencana dan melatih masyarakat sekitar terkait mitigasi bencana.

Ketenagakerjaan

1. Tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Makassar akibat keterbatasan lapangan kerja baru, baik di sektor formal maupun informal, serta lemahnya daya saing tenaga kerja.
2. Masih terjadinya mismatch (kesenjangan) antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja akibat pelatihan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan pasar kerja.
3. Belum optimalnya kelembagaan pelatihan kerja, ditandai dengan:
   - Kurangnya instruktur dan sarana prasarana di Pusat Pelatihan Kerja (PPK) milik Pemerintah Kota Makassar;
   - Balai Latihan Kerja (BLK) belum maksimal dalam menghasilkan tenaga kerja kompetitif;
   - Terbatasnya akses pelatihan bagi masyarakat kurang mampu.
4. Rendahnya kualitas tata kelola pelatihan kerja, meliputi:
   - Pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi yang belum optimal;
   - Akreditasi LPK dan kurikulum pelatihan belum terpantau secara konsisten;
   - Lemahnya pemantauan terhadap efektivitas program pelatihan dan hasilnya terhadap penempatan kerja.
5. Kerja sama antara lembaga pelatihan dan dunia usaha/industri belum terintegrasi, yang menyebabkan:
   - Program kemitraan pelatihan dan penempatan kerja belum efektif;
   - Koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal;
   - Dunia usaha belum aktif melaporkan tenaga kerja baru dan berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum pelatihan.
6. Keterbatasan dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan, seperti:
   - Jumlah pejabat fungsional pelatihan kerja dan fungsional pengantar kerja yang masih terbatas;
   - Rendahnya inovasi dalam sektor informal sebagai alternatif penyerapan tenaga kerja;
   - Kurangnya kesadaran pencari kerja dalam melaporkan status kerja setelah penempatan.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pemahaman SKPD tentang pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan guna menjadikan perencanaan penganggaran responsif gender untuk semua program/kegiatan.
2. Penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak masih harus ditingkatkan; SDM penyedia layanan dan fasilitasnya.
3. Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, penanganan, dan reintegrasi kekerasan, dan korban kekerasan rumah tangga (KtP/A).
4. Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, penanganan, dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan perempuan dan anak (KTP/A).
5. Diperlukan sinergi dengan banyak pihak, khususnya OPD dalam rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
6. Penguatan kelembagaan shelter warga sebagai ujung tombak penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis di kelurahan.

Pangan

1. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk produksi pangan belum optimal, ditandai dengan:
   - Keterbatasan lahan pertanian produktif di wilayah perkotaan;
   - Pemanfaatan pekarangan dan ruang terbuka kota belum maksimal;
   - Terbatasnya sarana produksi dan modal bagi rumah tangga untuk kegiatan budidaya pangan.
2. Diversifikasi pangan belum berkembang secara luas, karena:
   - Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pangan lokal dan beragam;
   - Edukasi dan pendampingan dalam pengelolaan pangan lokal masih minim;
   - Diversifikasi pangan belum menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga.
3. Kerentanan pangan masyarakat masih tinggi, disebabkan oleh:
   - Tingginya angka kemiskinan;
   - Dampak perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian belum tertangani;
   - Ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu tanpa alternatif lokal yang cukup.
4. Distribusi dan akses pangan belum didukung infrastruktur yang memadai, seperti:
   - Keterbatasan sistem logistik dan distribusi pangan, terutama ke daerah padat penduduk dan rawan pangan;
   - Belum terbangunnya sistem cadangan atau penyangga pangan yang responsif di tingkat kota dan komunitas.
5. Program ketahanan pangan belum terstruktur dan berkelanjutan, tercermin dari:
   - Belum terintegrasinya pendekatan ketahanan pangan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga;
   - Ketiadaan sistem kelembagaan dan pendanaan jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan program pangan lokal

Pertanahan

1. Masih rendahnya asset Pemerintah Kota yang disertifikatkan.
2. Masih rendahnya asset Pemerintah Kota yang diamankan.
3. Rendahnya pemahaman SKPD terkait pemngadaan lahan.
4. Dalam proses pengadaan lahan masih ditemui permasalahan sengketa lahan dan kepemilikan.

Lingkungan Hidup

1. Pengawasan terhadap seluruh perizinan lingkungan yang telah diterbitkan di Kota Makassar masih lemah, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup sulit terdeteksi dan ditindak secara optimal.
2. Pengelolaan lingkungan oleh para pelaku usaha belum berjalan dengan baik, yang terlihat dari masih rendahnya upaya pemenuhan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL).
3. Laporan pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan masih rendah baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga data yang tersedia tidak mencerminkan kondisi lingkungan secara akurat.
4. Pelaksanaan tindakan pengawasan menghadapi keterbatasan biaya operasional, termasuk kebutuhan bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional.
5. Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kota Makassar masih minim, sehingga pengawasan belum dapat menjangkau seluruh wilayah dan kegiatan.
6. Kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Kota Makassar masih rendah, sehingga kota ini rentan terhadap dampak perubahan iklim.
7. Pencemaran air sungai di Kota Makassar masih tinggi akibat limbah dari aktivitas masyarakat dan pihak swasta yang tidak dikelola dengan baik.

8. Polusi udara meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan emisi yang dihasilkan industri atau pabrik.
9. Kerusakan ekosistem perairan terjadi akibat pencemaran air yang belum terkendali.
10. Jumlah vegetasi atau tumbuhan penyerap polusi udara di Kota Makassar masih sangat terbatas.
11. Pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran masih menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis.
12. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan masih rendah.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada belum berfungsi secara optimal untuk mengolah limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan.
14. Sarana dan prasarana persampahan belum memadai dibandingkan dengan tingginya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, terutama kapasitas lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sarana penunjangnya.
15. Desain TPA yang semula direncanakan sebagai controlled landfill berubah menjadi open dumping akibat kelebihan kapasitas.
16. Pencemaran di sekitar TPA berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari bau tidak sedap hingga pencemaran air tanah.
17. Upaya pengembangan TPA terhambat oleh sulitnya proses pembebasan lahan.
18. Ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar semakin berkurang akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.
19. Kota Makassar belum memiliki Taman Kehati sesuai standar minimum 3 hektare, Hutan Kota dengan luas minimum 0,25 hektare, dan Taman Kota.
20. Pembangunan reklame pada jalur hijau turut merusak keberadaan dan fungsi RTH.
21. Upaya rehabilitasi, refungsi, restorasi, dan revitalisasi RTH yang ada masih rendah kualitasnya, sedangkan pemanfaatannya sering tidak sesuai peruntukan.
22. Aturan tentang kewajiban penyediaan RTH privat belum sinkron dan belum sepenuhnya ditaati oleh pihak terkait.
23. Lahan pemakaman di Kota Makassar terbatas, sementara koordinasi dengan rumah sakit terkait pemakaman pasien meninggal belum optimal.
24. Kota Makassar belum memiliki bangunan khusus laboratorium lingkungan dan alat uji yang memadai, sehingga masih bergantung pada laboratorium pihak lain dan belum dapat mengajukan akreditasi laboratorium.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait kepemilikan akta pencatatan sipil terutama terkait pencatatan akta kematian,
2. Adanya ketidaksesuaian data/ identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti BPJS.
3. Faktor jaringan dan konsolidasi data yang semua masih terpusat di Adminduk (update surat pindah datang dan update data warga) sehingga akses untuk konsolidasi data masih sangat terbatas bagi Dukcapil
4. Terbatasnya SDM yang kompeten baik dari sisi kuantitas maupun kualitas guna mendukung terlaksananya pengembangan SIAK, inovasi pelayanan dan pelayanan pemanfaatan data

5. Masih kurangnya keterpaduan dan sikronisasi data kependudukan antar instansi/lembaga

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih rendahnya jumlah/persentase LPM Berprestasi

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Adanya belanja Modal yang tidak terlaksana dikarenakan tidak ber-TKDN
2. Rasio Tenaga Medis yang mendapat pelatihan khusus CTU (Contraseptive Technology Update) masih kurang
3. Kurangnya pemahaman teknis pelaksanaan BOKB dan kurangnya pemahaman penyedia pada aplikasi SPSE.
4. Kurangnya Transfer knowledge dari tenaga medis yang mengalami mutasi sehingga menghambat pelayanan dan pelaporan KB
5. Kegiatan-kegiatan yang pelaksanaanya tidak maksimal utamanya kegiatan Pelayanan KB Mobile/Bergerak yang mana pelaksanaanya mengumpulkan aseptor KB untuk di layanani, sedangkan dalam pelaksanaanya kegiatan Pelayanan KB Mobile/Bergerak tersebut dikurangi frekuensi kegiatan sehingga berpengaruh terhadap jumlah aseptor yang dicapai.
6. Kegiatan Penyuluhan kepada kelompok Kegiatan (POKTAN) dan Masyarakat yang sifatnya mengumpulkan orang banyak juga di dikurangi frekuensi kegiatanya yang mana dengan berkurangnya kegiatan penyuluhan KB mempengaruhi capaian peserta KB baru dan KB Aktif
7. Tidak terlaksananya kegiatan karena double anggaran (anggaran BKKBN Pusat dengan APBD) sehingga yang digunakan adalah anggaran BKKBN Pusat pada kegiatan pengolahan data dan informasi
8. Belum Optimalnya aplikasi SIGA dari BKKBN Pusat untuk itu di perlukan koordinasi Intensif dengan BKKBN Pusat melalui Perwakilan BKKBN provinsi terkait penyesuaian dalam Pelaksanaan SIGA
9. Masih kurangnya pemahaman kader PPKBD dan sub PPKBD tentang program bangga kencana sehingga di perlukan sosialisasi bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD
10. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana yang disebabkan bayaknya yang pesiun, untuk itu dapat dilakukan dengan menambah PLKB Non ASN (Tenaga kontrak).

Perhubungan

1. Belum adanya system transportasi yang terintegrasi.
2. Masih kurangnya transportasi massal dan berbasis listrik.
3. Belum akuratnya pendataan kendaraan umum perkotaan.
4. Belum maksimalnya penanganan parkir.
5. Tidak seimbangnya pertambahan jumlah kendaraan dan Panjang jalan.

Komunikasi dan Informatika

1. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi.
2. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan publik.

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Kualitas Produk yang dihasilkan UMKM belum semuanya mampu memenuhi standar yang dibutuhkan agar dapat bersaing dengan produk lainnya . Pemahaman dan pemanfaatan teknologi oleh pengelola Koperasi dan pelaku UMKM yang masih rendah berakibat pada kurangnya keterlibatan Koperasi dan UMKM dalam ekosistem digital, menyikapi hal tersebut perlu transformasi digital melalui peningkatan literasi digital dengan sosialisasi dan pelatihan digital bagi para pengelola Koperasi dan pelaku UMKM.
2. Mayoritas UMKM memiliki kapasitas, kualitas dan produktivitas yang masih rendah. Dalam upaya peningkatan Kapasitas, kualitas dan produktivitas perlu dilakukan pelatihan yang berkelanjutan terhadap SDM Pelaku UMKM dalam membentuk mindset wirausaha, meningkatkan kemampuan manajemen bisnis, marketing, inovasi dan peningkatan kualitas produk.
3. Akses keuangan bagi Koperasi dan UMKM yang masih terbatas, keterbatasan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari UMKM nya sendiri maupun dari sisi kebijakan Pemerintah. Untuk memperluas akses keuangan bagi Koperasi dan UMKM diperlukan kesadaran akan pentingnya legalitas dan manajemen yang baik, disamping itu perlu komitmen Pemerintah dalam kemudahan akses keuangan bagi Koperasi dan UMKM hingga ke level daerah.
4. Jangkauan pasar bagi produk UMKM yang belum luas, pemasaran produk UMKM yang masih terbatas juga masih menjadi masalah dalam pengembangan UMKM di Kota Makassar, melalui digitalisasi dan promosi produk diharapkan UMKM di Kota Makassar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
5. Usaha-usaha Koperasi dan UMKM yang masih mengandalkan cara-cara Konvensional
6. Sumber pembiayaan Koperasi masih bersifat internal, masih banyaknya koperasi yang mengandalkan sumber pembiayaan yang berasal dari anggota dan hal ini diperparah dengan rendahnya keanggotan koperasi, dalam menyikapi hal tersebut perlu kebijakan pemerintah dalam kemudahan akses permodalan bagi Koperasi.
7. Rendahnya kesadaran Masyarakat untuk berkoperasi, hal ini terlihat dari rendahnya minat Masyarakat khususnya generasi muda untuk bergabung menjadi anggopa koperasi, perlu upaya dalam memoderinasi koperasi baik dari menajemen, pemanfaatan teknologi dan pengembangan unit usaha Koperasi.

Penanaman Modal

1. Belum adanya regulasi/kebijakan terkait pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal bagi pelaku usaha sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai investasi PMA/PMDN Kota Makassar;
2. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kota Makassar;
3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan data
4. Masih perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi terkait data potensi investasi yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Makassar;
5. Ketersediaan layanan PTSP khusus bagi pelaku usaha terutama PMA/PMDN dalam pemrosesan dan penerbitan izin usaha di PTSP;
6. Masih lemahnya pengawasan perizinan dengan adanya laporan pengaduan terkait indikasi dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha.

Kepemudaan dan Olahraga

1. Seiring dengan adanya kebijakan nasional baik itu perubahan, pergeseran dan pengurangan anggaran, maka beberapa kegiatan yang sudah dirancang tidak dapat dilaksanakan. Untuk menyikapi masalah pemotongan anggaran tersebut kami berharap masukan dari dinas dan instansi terkait agar kegiatan dapat berjalan meski tidak sebanyak Tahun sebelumnya, dengan adanya pemotongan anggaran rancangan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat direalisasikan semua.
2. Solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan prestasi olahraga diperlukan kerja sama kemitraan Antara Dispora dan KONI agar program dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian pula untuk kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda Dispora meningkatkan kerja sama antar Organisasi KNPI dan Pramuka agar dapat menyamakan persepsi untuk kegiatan di Tahun mendatang

Statistik

1. Forum Satu Data Indonesia belum berjalan dengan baik. Masih sulit mendapatkan data terkini.
2. Pengelolaan Portal Satu Data belum maksimal.

Persandian

1. Sistim keamanan siber pada situs Pemerintah Kota masih rendah.
2. Masih rendahnya pemahaman Pemerintah Kota untuk mengelola resiko keamanan informasi.

Kebudayaan

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang optimal yang sangat mempengaruhi kinerja;
2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya;
4. Belum maksimalnya keterlibatan budayawan, seniman dalam berpartisipasi pelaksanaan kegiatan Dinas kebudayaan;
5. Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pemajuan kebudayaan dan warisan budaya;
6. Belum adanya sumber daya manusia yang bersetifikat di Museum Kota seperti tenaga konservator, edukator dan kurator.

Perpustakaan

1. Sarana dan Prasarana yang masih kurang, seperti belum memadai gedung yang tidak layak huni dan masih dalam proses Hukum;
2. Kurangnya sumber daya manusia staf dan fungsional yang belum berimbang dengan pekerjaan yang ada. Rasio ketersediaan tenaga belum berkesesuaian (1:2.500);
3. Belum adanya perda yang mengikat tentang perpustakaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah Kota Makassar. Adanya pelimpahan kewenangan ke KEcamatan sesuai dengan SK Walikota Makassar Nomor 1187/131/KEP/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dalam rangka Pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga perpustakaan tidak tersentuh langsung oleh kebijakan Dinas Perpustakaan oleh sebabnya data perpustakaan tidak terakses secara umum;

4. Rendahnya minat dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan Perpustakaan oleh lembaga daerah, badan pemerintahan dan swasta.
5. Rendahnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan perpustakaan.
6. Masih kurangnya anggaran dalam rangka mendukung pengembangan Perpustakaan.
7. Adapun tindak lanjut dari permaslahan tersebut adalah : Perampungan pembangunan gedung layanan perpustakaan; Pengembangan jumlah perpustakaan dengan standar nasional; menjalin kemitraan dengan universitas, sekolah dan komunitas literasi lainnya; bekerja sama dengan penerbit; toko buku dan bimbingan belajar dalam pelayanan kartu perpustakaan gratis berupa memberikn potongan harga; serta memperkuat publikasi melalui media sosial.

Kearsipan

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan Kota Makassar di hadapkan dengan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip oleh lembaga daerah, badan pemerintahan, swasta maupun perorangan akan membawa dampak buruk pada system penataan dan penyimpanan arsip daerah.
2. Masih banyak SKPD/UKPD menganggap bidang arsip tidak penting, sehingga banyak arsip SKPD/UKPD yang tidak diperhatikan penanganannya;
3. Kurangnya tenaga fungsional arsiparis dan petugas khusus pengelola arsip di Dinas Kearsipan Kota Makassar.
4. Belum dibentuk unit kearsipan yang dilengkapi pengelola arsip minmal 2 orang disetiap SKPD.
5. Belum tersedianya depo arsip yang representatif yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar dari ANRI.
6. Belum adanya Perda kearsipan.
7. Masih kurangnya anggaran dalam rangka mendukung pengembangan kearsipan.

Pariwisata

Pelaksanaan urusan Pariwisata masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Produk wisata masih perlu ditingkatkan
2. Produk ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan
3. Jumlah destinasi berdaya saing masih perlu ditambah
4. Banyaknya persaingan destinasi baru muncul dengan produk baru maupun diversivikasi produk
5. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang sadar wisata
6. Rendahnya pemahaman terhadap pentingnya pendaftaran HKI terhadap produk kreatif yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi kreatif
7. Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap HKI
8. Keterbatasan akan kurangnya kepentingan mengikuti kegiatan pelatihan secara menyeluruh
9. Kurangnya kepedulian dari owner dalam pengembangan kapasitas tenaga kerja pariwisata yang dimiliki

Pertanian

Pelaksanaan urusan Pertanian masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. keberadaan lahan sawah di Kota Makassar seluas 2035 hektar telah berkurang 600 hektar selama 10 tahun terakhir, dan terus mengalami konversi dari waktu kewaktu.
2. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) saat ini masih dalam proses pembahasan di legeslatif.
3. keterbatasan sumber-sumber air termasuk di dalamnya prasarana irigasi,
4. ketersediaan sarana produksi berupa pupuk.
5. ketersediaan alat dan mesin pertanian modern antara lain berupa hand traktor, transplanter dan combine harvester.
6. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) petani perlu ditingkatkan serta dibutuhkan regenerasi petani milenial yang lebih berpikiran maju dan produktif.

Perdagangan

1. Ketersediaan bahan baku dan bahan penolong banyak yang berasal dari luar negeri.
2. Kepengurusan Dokumen untuk Importir lebih mudah dibanduingkan Eksportir;
3. Bea masuk dapat dibebaskan apabila nilai import kurang dari FOB USD 75
4. Kondisi ekonomi secara Nasional belum membaik sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum membuka kegiatan usahanya termasuk di beberapa hotel yang ada di Kota Makassar
5. Berkurangnya ASN fungsinal Penera;
6. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen sertaBelum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa;
7. Belum Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas;

Perindustrian

1. Kualitas Sumber daya manusia yang masih rendah;
2. Jumlah sumber daya alam yang tersedia masih kurang;
3. Infrastruktur sektor industri yang ada belum sesuai dengan kebutuhan;
4. Regulasi Perencanaan dan Pembangunan Industri Kota Makassar yang belum tersedia;
5. Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan industri tidak sesuai dengan kebutuhan;
6. Meningkatnya produk impor murah yang kurang bersaing dengan produk lokal.
7. Terbatasnya akses permodalan bagi IKM;
8. Belum maksimalnya penataan kawasan sentra industri.

Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Diperlukan penambahan dan peningkatan Skill/keterampilan bagi nelayan dan pembudiaya ikan yang bisa berdampak pada peningkatan produksi dan juga dengan peningkatan skll dapat menjadi alternatif mata pencaharian lain apabila terjadi cuaca buruk.
2. Ketersediaan sarana dan Prasarana baik itu untuk perikanan tangkap maupun perikanan Budidaya belum maksimal.

3. Ketersediaan pakan, pupuk dan alih fungsi lahan berdampak pada produksi perikanan budidaya
4. Lahan/tambak yang dikelola rata-rata hanya pinjam pakai sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan oleh pemilik lahan.

Perencanaan Pembangunan

1. Belum maksimalnya perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS);
2. Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Masih rendahnya penguasaan teknologi informasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Keuangan

1. Keterlambatan pengelolaan keuangan SKPD dalam menyelesaikan LPJ tepat waktu;
2. Jadwal penyusunan anggaran yang cukup padat dan kompleks berbanding dengan SDM yang terbatas;
3. Penyedia barang/jasa pada beberapa kegiatan khususnya pengadaan masih mengalami kesulitan;
4. Adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah dalam hal pengamanan fasum/fasos;
5. Cakupan regulasi terkait retribusi belum maksimal mencakup seluruh obyek yang berpotensi untuk pemungutan pajak;
6. Adanya obyek retribusi yang telah dialihkan kewenangannya namun belum dilakukan pemungutan (retribusi jasa umum dan retribusi kebersihan)
7. Tingkat kepatuhan / kesadaran wajib pajak masih rendah;
8. Keterbatasan akses pembayaran pajak secara online;
9. Belum efektifnya pemberlakuan konfirmasi wajib pajak dalam pelayanan publik;
10. Kesadaran wajib pajak dalam mendukung optimalisasi PAD masih sangat rendah.

Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

1. Masih kurangnya tenaga widyaswara guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan jabatan fungsional
2. belum adanya sistem yang terintegrasi berkaitan dengan pemetaan formasi kebutuhan pegawai dengan SKPD,
3. belum tersedianya beberapa pengelola arsip ASN yang profesional,
4. belum maksimalnya dukungan secara normatif terhadap kegiatan fasilitasi Aparatur Sipil Negara,
5. Belum maksimalnya partisipasi aktif SKPD dalam penggunaan sistem kepegawaian dari bidang pengelola kepegawaian, serta 6.belum diterapkannya SIMPEG *offline* dalam mengantisipasi kendala terhadap ketersediaan jaringan internet.
6. Belum tersedianya sarana dan Prasarana dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis serta fungsional
7. Dalam rangka penyederhanaan birokrasi belum diikuti dengan perubahan beberapa regulasi yang bersesuaian baik kepegawaian maupun kelembagaan sehingga membingungkan pelaksanaan di daerah.

8. Dengan ditetapkannya Permenpan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta ASN maka dibutuhkan data profil kompetensi seluruh PNS melalui pemetaan terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui potensi dan kompetensi yang selanjutnya redistribusi pegawai hal ini dibutuhkan waktu dan dukungan penganggaran yang besar.
9. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya kerja terutama budaya pelayanan sebagai suatu sistem keyakinan, nilai-nilai serta norma-norma yang disepakati dan dijadikan pedoman tingkah laku, sehingga aparatur pengelola administrasi kepegawaian belum sepenuhnya mengarah kepada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang diharapkan.
10. Implementasi system merit dalam manajemen ASN diharapkan akan menjawab seluruh permasalahan seputar aspek pengelolaan kepegawaian

Pengawasan

1. Penguatan APIP
2. Rendahnya Penilaian Integritas Pemerintah Kota Makassar
3. Belum Optimalnya Pengendalian Intern Pemerintah
4. Pengawasan belum efektif menurunkan angka korupsi

Penelitian dan Pengembangan

1. Masih minimnya data pendukung terkait inovasi daerah;
2. Masih banyak Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan riset dan kajian;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset yang telah dilakukan/dihasilkan;
4. Belum optimalnya sinkronisasi dan integrasi riset dan inovasi yang terpusat di BRIDA.

Sekretariat Daerah

1. Pelaksanaan pengadaan barang melalui proses tender memerlukan waktu yang cukup lama;
2. Tidak tersedianya barang dengan spesifikasi yang diharapkan sehingga tender tidak dapat dilaksanakan;
3. Dinamika perubahan regulasi;
4. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap peraturan yang telah menjadi kewenangannya;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat khususnya warga miskin terhadap pemberian layanan bantuan hukum;
6. Kompleksitas penyusunan analisis jabatan, standarisasi jabatan, kompetensi jabatan dan beban kerja dibandingkan dengan SDM yang tersedia;
7. Adanya ketidaksinkronan regulasi yang diterbitkan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga;.
8. Publikasi penyelenggaraan kegiatan yang belum maksimal.

Sekretariat DPRD

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
2. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tugas DPRD belum optimal
3. Kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD masih rendah
4. Kualitas dan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD masih rendah
5. Seringnya perubahan regulasi dari pemerintah pusat
6. Volume kegiatan DPRD semakin besar, tetapi pendayaan sumber daya aparatur belum optimal

7. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota dan pimpinan DPRD cukup tinggi.

Kesbangpol

1. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Ormas, Parpol dan LSM di kota Makassar;
2. Adanya tumpang tindih tupoksi dan program/kegiatan dengan Perangkat Daerah lain;
3. Belum optimalnya kapasitas organisasi partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang ditandai oleh relatif kurang berperannya kelembagaan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi kepentingan masyarakat dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat;
4. Masih adanya gejala terorisme dan berbagai bentuk tindakan melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum;
5. Masih ditemukan adanya insiden-insiden kekerasan yang melanggar hukum di antara sebagian kelompok masyarakat;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari narkotika dan zat adiktif lainnya, sehingga masih sering terjadi kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kewilayahan

1. Masih rendahnya tingkat pelayanan publik di masyarakat
2. Masih kurangnya tingkat pemberdayaan masyarakat
3. Masih kurangnya kepemilikan sarana dan prasarana bangunan pemerintah

II.5. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal krusial yang harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan dampak signifikannya terhadap kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Karakteristik utama dari sebuah isu strategis adalah sifatnya yang penting, mendasar, mendesak, serta memiliki cakupan jangka menengah hingga panjang. Isu-isu ini tidak hanya memengaruhi arah pembangunan, tetapi juga menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis memerlukan analisis mendalam dan komprehensif terhadap berbagai aspek daerah.

Perumusan isu strategis Kota Makassar untuk tahun 2026 didasarkan pada tinjauan menyeluruh terhadap hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan yang terjadi sepanjang tahun 2024 dan penelaahan cermat terhadap kebijakan-kebijakan strategis di tingkat nasional. Dengan memadukan data internal dari evaluasi pembangunan dan arahan dari kebijakan nasional, Kota Makassar dapat merumuskan isu-isu strategis yang relevan, responsif, dan mampu mendorong tercapainya visi pembangunan daerah.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (SDGs)*

   Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, penentuan indikator menjadi langkah krusial untuk mengukur capaian dan efektivitas program. Berdasarkan pembagian kewenangan yang berlaku, Kota Makassar memiliki tanggung jawab terhadap 222 indikator pembangunan. Namun, tidak semua indikator tersebut relevan secara langsung dengan kondisi spesifik dan kewenangan otonomi daerah Kota Makassar. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan prioritas dan kapasitas daerah.

Berdasarkan penelaahan terhadap terungkap bahwa dari 222 indikator yang awalnya menjadi kewenangan Kota Makassar, hanya 154 indikator yang memiliki relevansi kuat dan sesuai dengan lingkup kewenangan pemerintah Kota Makassar. Pemilihan indikator yang relevan ini memastikan bahwa sumber daya dan upaya pembangunan dapat difokuskan pada area yang paling berdampak dan dapat dikelola secara efektif oleh pemerintah kota.

2. Mitigasi Perubahan Iklim

Penurunan kualitas lingkungan merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Kota Makassar. Ditambah lagi, perubahan iklim membawa dampak luas, mulai dari peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hingga gangguan pada berbagai sektor pembangunan. Situasi ini menuntut adanya upaya yang terarah dan berkelanjutan dari Kota Makassar. Langkah-langkah ini harus difokuskan pada perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan kota dalam menghadapi risiko perubahan iklim yang semakin nyata. Beberapa tantangan utama dalam isu ini adalah masih tingginya tingkat pencemaran air dan udara, yang secara langsung berdampak pada kesehatan warga. Selain itu, pengelolaan sampah yang belum optimal terus menjadi persoalan krusial, ditambah dengan keterbatasan ruang terbuka hijau yang vital untuk penyerapan polusi dan keseimbangan ekosistem kota. Tak kalah penting, peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) turut memperparah dampak perubahan iklim yang dirasakan.

a. Isu Strategis Nasional

1. Bonus Demografi

Indonesia diproyeksikan mengalami periode bonus demografi, dengan masa puncak terjadi antara tahun 2020 hingga 2030. Kondisi ini ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat dibandingkan jumlah penduduk usia anak-anak dan lansia. Dominasi penduduk usia produktif ini memberikan potensi besar sebagai tenaga kerja, pelaku ekonomi, serta konsumen yang dapat mendorong percepatan pembangunan nasional. Bonus demografi sendiri merupakan fenomena meningkatnya proporsi penduduk usia kerja (15–64 tahun) yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kelompok ini berperan penting sebagai penggerak utama dalam pemanfaatan teknologi dan sumber daya, sehingga mampu meningkatkan output dan produktivitas perekonomian.

Secara lebih spesifik Kota Makassar merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Selatan, mencapai sekitar 1,47 juta jiwa pada Juni 2024, atau sekitar 15,68% dari total penduduk Sulawesi Selatan. Proporsi usia produktif yang tinggi di Makassar menandakan potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Makassar yang mencapai 58% (lebih tinggi dari rata-rata nasional) mengindikasikan bahwa generasi muda Makassar memiliki potensi besar untuk menjadi aset strategis daerah dalam menyongsong bonus demografi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

2. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) telah mendorong dunia memasuki era digitalisasi, yang kini menjadi pedang bermata dua bagi pembangunan daerah, termasuk Kota Makassar. Di satu sisi, digitalisasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor, mengingat sebagian besar aktivitas ekonomi kini bergerak menuju

otomatisasi. Hal ini terlihat dari kemudahan dan kenyamanan dalam aktivitas konsumen, serta implementasinya di berbagai bidang pembangunan seperti *cyber security* untuk pertahanan, *fin-tech* untuk inklusi keuangan, *e-learning* di sektor pendidikan, dan *e-commerce* yang mendukung pengembangan UMKM.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berfungsi sebagai pedoman vital bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan akses dan mutu pelayanan dasar yang merata bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan urusan wajib. Dalam penyusunannya, SPM secara jelas menetapkan jenis pelayanan dasar yang harus disediakan, indikator SPM sebagai tolok ukur capaian, serta batas waktu pencapaian yang realistis. Pelayanan dasar didefinisikan sebagai layanan publik esensial yang memenuhi kebutuhan dasar warga negara, memastikan setiap individu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal.

Mutu pelayanan dasar menjadi perhatian krusial. Ini merujuk pada ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang memenuhi kebutuhan dasar warga secara minimal, sesuai dengan standar teknis yang relevan agar masyarakat dapat hidup layak. Penerapan SPM, yang berlandaskan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran, mencakup enam bidang pelayanan dasar wajib pemerintah. Ini termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sektor sosial.

b. Isu Strategis Regional

1. Sulawesi Selatan

a. Ketidakstabilan Ekonomi Makro dan Global

Ketidakstabilan ekonomi makro dan global merupakan kondisi di mana variabel-variabel ekonomi utama (Produk Domestik Bruto, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Suku Bunga, Nilai Tukar Mata Uang, Neraca Pembayaran, dan Ekspektasi/perkiraan pelaku ekonomi tentang kondisi ekonomi di masa depan) mengalami fluktuasi yang signifikan dan sulit diprediksi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang luas bagi perekonomian, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, inflasi yang tinggi, dan krisis keuangan. Tingkat stabilitas ekonomi makro Sulawesi Selatan relatif rendah, terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan gambaran rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kualitas belanja daerah masih rendah, di mana rata-rata porsi belanja pegawai masih melampaui proporsi yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

b. Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip kepemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpola di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelembagaan prinsip-prinsip tersebut sehingga penyelenggaraan pelayan publik semakin memuaskan

masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya. Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui *autonomous investment* maupun induced investment sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

2. Kota Makassar

a. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang terintegrasi dengan Transformasi Digital dalam Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan fondasi esensial untuk mendorong kemajuan suatu daerah. Di era digital tuntutan terhadap kompetensi individu tidak hanya terbatas pada keahlian konvensional, melainkan juga kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan inovasi. Investasi dalam pendidikan berkelanjutan, pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, serta pengembangan *soft skills* seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah menjadi krusial. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

   Upaya peningkatan kualitas SDM ini harus terintegrasi erat dengan transformasi digital dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelayanan publik dapat diakses lebih mudah dan cepat oleh masyarakat, birokrasi dapat dipangkas, dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih akurat. Integrasi ini berarti bahwa SDM yang berkualitas perlu dibekali dengan literasi digital yang mumpuni, sementara proses digitalisasi di sektor pemerintahan harus dirancang untuk memberdayakan dan mengoptimalkan peran SDM, bukan sekadar menggantikannya. Upaya peningkatan SDM ini harus berjalan beriringan dengan akselerasi transformasi digital dalam pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Makassar telah menunjukkan langkah signifikan menuju digitalisasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif.

b. Pengembangan Transportasi Publik yang Terintegrasi

   Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat di Kota Makassar telah menciptakan kebutuhan mendesak akan sistem transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan. Kondisi ini bukan hanya sekadar persoalan kenyamanan, melainkan juga kunci untuk mengatasi tantangan serius seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dengan adanya sistem transportasi publik yang mumpuni, mobilitas penduduk dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga aktivitas ekonomi kota dapat berjalan lebih lancar dan efektif, mendukung pertumbuhan yang lebih dinamis. Isu strategis ini berpusat pada perlunya pengembangan jaringan transportasi publik yang terintegrasi, mencakup berbagai moda transportasi, serta penyediaan

fasilitas pendukung yang memadai yang berarti setiap elemen sistem harus saling terhubung, memudahkan masyarakat dalam berpindah dari satu moda ke moda lainnya tanpa hambatan. Fasilitas pendukung seperti halte yang nyaman, *park and ride* yang aman, dan informasi perjalanan yang akurat adalah elemen krusial yang menunjang efektivitas sistem. Fokus utama dari isu strategis ini adalah peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di dalam kota, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Dengan tersedianya pilihan transportasi publik yang handal dan nyaman, masyarakat akan lebih termotivasi untuk beralih dari penggunaan mobil atau motor pribadi. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada penciptaan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga inklusif, karena menjamin aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

II.6. Inovasi Kota Makassar

Kegiatan forum inovasi daerah merupakan wadah bagi para pelaku inovasi dalam sharing pengetahuan tentang inovasi daerah. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDA) merupakan kegiatan yang mendorong lahirnya dan mempertahankan inovasi daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang melihat sejauh mana perkembangan inovasi yang telah diinisiasi oleh seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bentuk stimulan bagi tumbuh kembangnya inovasi daerah.

Tabel II.365.
Data Inovasi dan Aplikasi Makaverse Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2026

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
1	Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi (PAKINTA)	Badan Pendapatan Daerah	Inovasi PAKINTA merupakan salah satu langkah meningkatkan sistem pelayanan administrasi pajak, termasuk dengan mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak yang dapat diunduh dengan mudah melalui platform Android maupun iOS.	Tujuan utama inovasi ini adalah "Mewujudkan pelayanan pajak daerah berbasis digital dan realtime yang terintegrasi dan akuntabel mulai dari pendaftaran, pelaporan, verifikasi, pengawasan, penetapan sampai dengan pembayaran."	Wajib pajak dapat mengetahui secara real time tagihan pajak mereka secara real time; wajib pajak dapat membayar melalui pilihan kanal pembayaran online yang telah disediakan; Aplikasi PAKINTA tidak menggunakan tempat layanan fisik, namun berbentuk aplikasi di smartphone maupun perangkat mobile lainnya.
2	PAREKMA (Produk Kreatif Makassar)	Dinas Pariwisata	Sebuah program inovasi yang bernama PAREKMA (Produk Kreatif Makassar) yang artinya “buatan anak makassar” atau dapat menjadi istilah untuk menyebut semua produk- produk kreatif dari berbagai brand produk lokal asal kota makassar	Dapat menciptakan brand lokal yang membumi dan bersaing di kanca internasional sehingga membantu menstabilkan perekonomian melalui pengembangan dan pembinaan pelaku kreatif	Meningkatnya kesadaran untuk memasarkan produk mereka ke berbagai wilayah di Indonesia dengan memanfaatkan media online. Dengan ini memberi dampak pada bertambahnya kapasitas produksi yang berakibat bertambahnya tenaga kerja.
3	PARONDA (Patroli Kendaraan Roda Dua)	Satuan Polisi Pamong Praja	Patroli kendaraan roda dua lebih fleksibel dalam pelaksaan di lapangan, seperti penanganan anak jalanan, pengatur lalu lintas ilegal, badut-badut yang mengganggu pengendara. Kendaraan ini dapat dengan cepat mendekati area bahkan di daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan patroli lainnya.	Menurunkan kasus gangguan ketertiban umum terkait pelanggaran Perda serta meningkatkan pelayanan aduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya rutinitas patroli dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Makassar.	Dari data 2 tahun terakhir terjadi penurunan kasus gangguan ketertiban umum sebesar 41,9% serta peningkatan pelayanan menjadi 100%.

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
4	PERISAI DUKCAPIL (Pelayanan rentan, disabilitas dan lanjut usia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil wajib memberikan pelayanan yang sama untuk semua kalangan tanpa diskriminasi. Namun mengingat tidak semua layanan dan akses bisa dilakukan secara online/daring, maka diperlukan solusi efektif dan efisien untuk memaksimalkan layanan administrasi kependudukan ini	Memberikan hak dan perlindungan layanan publik kepada unsur masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, meskipun mereka hanya di rumah saja.	Setelah berjalannya inovasi PERISAI DUKCAPIL ini, tidak kurang dari 212 orang penerima manfaat yang berhasil direkam dan diterbitkan dokumen kependudukannya.
5	APPAKABAJIQ (Aplikasi Pembayaran Pengujian KendAraan Bermotor / UJI KIR menggunakan Qris)	Dinas Perhubungan	Pemillik kendaraan tidak lagi melakukan transaksi pembayaran secara tunai, dimana metode pembayaran dilakukan sudah bervariasi yang seifatnya non tunai baik menggunkan mobile banking ataupun E-wallet. Kemudian untuk penyetoran kas harian tidak lagi datang langsung ke bank sulselbar.	Menciptakan kemudahan dan kecepatan transaksi; Keamanan dalam transaksi; Pelacakan dan pelaporan transaksi; Pengelolaan keuangan yang lebih baik; Pemanfaatan kemajuan teknologi	Menjadi solusi dalam memberantas praktik pungli, dikarenakan transaksi atau pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat atau pemilik kendaraan langsung masuk kerekening kas pengujian kendaraan bermotor.
6	ASSIPA (Aplikasi Sistem Informasi Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan	Dengan adanya ASSIPA, masyarakat dengan mudahnya dapat mengakses informasi tentang pangan, mulai dari harga pangan, ketersediaan pangan, dan informasi tentang pangan segar asal tumbuhan (PSAT) melalui aplikasi android ataupun website dinas.	Membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi terkini harga pangan di pasar-pasar tradisional di Kota Makassar beserta harga termurah dan ketersediaan pangan.	Masyarakat bisa mendapatkan informasi harga tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun; Sudah terdapat 19 pelaku Usaha di Kota Makassar yang mendaftarkan Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
7	BINAR POKMAS (BINA ARSIP KELOMPOK MASYARAKAT)	Dinas Kearsipan	Dalam Kegiatan BINAR POKMAS menggunakan metode pembinaan klasikal dan praktek dengan menghadirkan beberapa Narasumber yang ahli dibidangnya dengan peserta dari Aparat Pemerintahan, LPM, RW,RT dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan di aula atau lorong wisata yang ada di kelurahan yang diberi pembinaan.	Meningkatkan pemahaman kelompok masyarakat dalam menerapkan sistem pengelolaan arsip yang dapat menjamin terkelolanya arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya, baik secara manual maupun elektronik.	Dengan adanya inovasi BINAR POKMAS masyarakat menjadi paham dan sadar akan pentingnya arsip bagi kehidupan mereka. Arsip tidak lagi diperlakukan seadanya tetapi di dioalah dan ditata sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. Mereka menyimpan arsipnya di tempat atau media penyimpanan arsip seperti Dos Arsip, Odner, dan Map.
8	E-ROTA (ELEKTRONIK	Sekretariat DPRD	Aplikasi E-ROTTA dapat digunakan sebagai sarana untuk penyampaian aspirasi dari Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan lebih	Tujuan Aplikasi E-Rotta adalah membantu Visi Misi walikota Makassar	Dengan adanya aplikasi E-Rotta yang berbasis android dan website kini masyarakat dapat mengetahui anggota DPRD yang mewakili dapil

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
	RESES OLEH KITA)		cepat, dan Terbuka. Hal ini berkaitan juga dengan realisasi program Parlemen Modern, dimana salah satu indikatornya adalah adanya keterbukaan informasi / Transparansi Publik.	dalam mewujudkan makassar kota pintar dalam bidang pelayanan publik untuk lebih menyeluruh dan inklusi.	mereka, serta dapat melihat profil dan sepak terjang dari setiap anggota DPRD sebelum mereka memilih dewan mana ayang akan diamanatkan untuk mengawal aspirasi masyarakat
9	GA'DE-GA'DE PUSTAKA: MINI PUSTAKA MART (MPM)	Dinas Perpustakaan	Nama Ga'de-Ga'de diambil dari bahasa Makassar yang berarti warung kecil, Ga'de Ga'de Pustaka atau Mini Pustaka Mart (MPM) dikemas dengan model gerobak yang didesain khusus dan didalamnya menyediakan 3 bagian/ area yakni Mini Perpustakaan yang diletakkan dibagian tengah, bagian kanan sebagai counter penjualan pulsa dan bagian kiri sebagai mini warung jajanan masyarakat.	Membangkitkan semangat gemar membaca sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM hingga ke lorong-lorong;.	Dampak dari Ga'de-Ga'de Pustaka, jam buka Perpustakaan yang biasanya perpustakaan hanya buka antara 6 sampai 8 jam atau dibawah itu maka dengan Ga'de-Ga'de Pustaka jam buka Perpustakaan untuk melayani masyarakat bisa sampai malam atau bahkan tengah malam mengikuti jam buka warungnya atau jam buka meningkat lebih 100 %.
10	GETAR SIRANGI RONG (GERAKAN TERUS MENANAM DI LORONG DENGAN APLIKASI SMART IRRIGATION USING INTERNET OF THINGS)	Dinas Perikanan dan Pertanian	Getar Sirangi Rong merupakan inovasi dalam teknik penyiraman tanaman budidaya di lorong dan pekarangan dengan aplikasi smart irrigation yang menggunakan internet of things. Penyiraman tanaman yang efektif dan efisien dilakukan dengan cara otomatis dan dapat dilakukan tanpa berada di lokasi dengan hanya menggunakan smartphone android.	Menyediakan kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui kegiatan budidaya tanaman di pekarangan dan lorong untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), dan pengolahan hasil pertanian.	Dengan adanya inovasi Getar Sirangi Rong kebutuhan pangan dan gizi keluarga meningkat dengan nilai pola pangan harapan menjadi 80 dari 78 dan juga terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan budidaya tanaman di pekarangan dan lorong
11	KELAS BERBINTANG	UPT SDN BAWAKARAENG 1	Inovasi Kelas Berbintang hadir sebagai solusi terhadap rendahnya standar Sarana dan Prasarana pendukung pembelajaran serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Keunikan dari Inovasi Kelas Berbintang adalah adanya indikator capaian kelas berbintang dan melibatkan berbagai pihak yang melalui semangat gotong royong	Tujuan Jangka Panjang Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Mampu meningkatkan akreditasi sekolah. Tujuan Jangka Pendek Hadirnya kelas yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak dalam belajar	Inovasi Kelas Berbintang berhasil memberikan solusi terhadap masalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan rendahnya standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam kelas. Pada tahun 2021 tingkat PSM hanya sebesar 5% meningkat 50% pada tahun 2022 dan 75% pada tahun 2023
12	LABASO KAWIN (KOLABORASI	DP3A	Inovasi ini dimulai dari pelaksanaan program dan kegiatan oleh DP3A Kota Makassar yang melibatkan organisasi/Lembaga lintas sector serta peran serta	Meningkatkan upaya pencegahan perkawinan usia dini di Kota Makassar	Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melalui program sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan yang berhasil meningkatkan

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
	STOP PERKAWINAN ANAK MAKASSAR)		masyarakat dalam mendukung program pencegahan pernikahan anak.	melalui sosialisasi bagi masyarakat tentang dampak perkawinan anak.	kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif perkawinan anak
13	MA'JAMA (Sistem Layanan Antar Kerja Kota Makassar)	Dinas Ketenagakerjaan	MA'JAMA lahir guna mengikuti perkembangan di era kini yang segala aktivitas dapat digitalisasi dan mobilitas dapat dilakukan melalui daring, diperlukan layanan mengandung prinsip cepat, tepat, mudah, dan murah kiranya sudah menjadi dambaan masyarakat khususnya masyarakat pencari kerja dan pemberi kerja	Membantu masyarakat dengan memberkan informasi lapangan pekerjaan yang layak dan meningkatkan akses terhadap peluang kerja	Menurunnya Jumlah Pengangguran; Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); Jumlah Lowongan Kerja yang Disebarluaskan
14	SIPAKATAU (Sistem Informasi Data Tindak Lanjut)	Inspektorat	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selama ini dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara manual dengan harus membuka dokumen fisik hasil temuan peme dan dilakukan di objek pemeriksaan, yang membutuhkan waktu lama dan tenaga yang banyak. Dengan Smart Auditing,	1. Menjadikan proses bisnis pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan lebih mudah dan praktis; 2. Mempercepat proses bisnis inventarisasi temuan pemeriksaan dan menampilkan informasi temuan pemeriksaan secara realtime; 3. Memudahkan proses bisnis pengajuan dan pembuatan Surat Keterangan Bebas Temuan.	Untuk menilai hasil inovasi dalam tujuannya untuk menjadikan proses bisnis pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan lebih mudah dan praktis, dilakukan dengan membandingkan kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut sebelum dan setelah implementasi inovasi. Kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan APIP sebelum implementasi inovasi yaitu pada semester I tahun 2022
15	SIPETARUNG (Sistem Penataan Ruang Kota Makassar)	Dinas Penataan Ruang	Masyarakat dapat mengakses aplikasi SiPetarung melalui link https://sipetarungmkasr.id/ melalui browser baik menggunakan laptop ataupun gadget. Setelah berada dalam website kita dapat memilih layanan yang telah disiapkan pada Sipetarung. Layanannya antara lain : Informasi Pola Ruang, IMB, SLF, KRK, dan Tracking Berkas	Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi kesesuaian lahan dan chat online untuk mendapatkan informasi seputar proses perizinan dan kesesuaian lahan hanya dengan mengakses layanan website SiPetarung	187 surat masuk permohonan terkait permohonan informasi Pola Ruang, dengan adanya SIPETARUNG hanya membutukan waktu 10 menit untuk mengakses dan menerima jawaban dari informasi tentang Pemanfaatan Ruang

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
16	TAURUNGKA: SATU DATA PEMUDA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Taurungka (Satu Data Pemuda) mengusung konsep Kerangka Kerja PPT (People/ Process/ Technology). Kerangka kerja ini berkaitan erat satu dengan yang lain sehingga dapat bersinergi dan membentuk ekosistem data kepemudaan. Terbentuknya ekosistem data dapat membangun peta jalan kepemudaan di Kota Makassar.	Melakukan monev survei timbal balik (feedback survey) setelah kegiatan program kerja; Sebagai parameter untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan peta jalan (roadmap) pembangunan kepemudaan Kota Makassar.	Dengan sistem registrasi online waktu memverifikasi peserta kegiatan jauh lebih cepat dan terdokumentasi; Feedback survey program kerja tahap awal sementara berjalan; Hasil analisa data dengan skala rating 1-5 dari sangat tidak sesuai hingga sangat sesuai kebutuhan materi pemuda terhadap program kerja
17	SIDATUMICIKO (SISTEM DATA TERPADU USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	Inovasi ini melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, pemeliharaan serta bimtek bagi tenaga enumerator. Tahap perencanaan adalah tahapan mengindentifikasi kebutuhan data yang diperlukan. Selanjutnya pelaksanaan adalah tahapan dimana aplikasi ini diciptakan, monitoring evaluasi adalah tahapan koreksi terhadap hasil uji aplikasi.	Terwujudnya Digitalisasi data keseluruhan Koperasi dan UMKM yang dapat membantu Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam pengambilan keputusan, dan berdampak kepada pemerataan kebijakan yang dapat menyentuh seluruh pelaku usaha di Kota Makassar.	berdasarkan pendataan yang dilakukan para enumerator melalui Sidatumiciko maka terdapat perubahan data update yang signifikan, dimana jumlah koperasi terjadi penurunan 1.880 menjadi 1.397 , koperasi aktif yang tadinya 937 turun menjadi 664. berbanding terbalik dengan data usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami penambahan signifikan juga dari 5.387 menjadi 15.000.
18	SIKARANNUANG (SISTEM INFORMASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KECAMATAN PANAKKUKANG)	Kecamatan Panakkukang	Inovasi SIKARANNUANG bagi warga masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Panakkukang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan terkait akses informasi dan pelayanan sehingga sistem pelayanan yang awalnya dijalankan secara manual di kantor kecamatan dan kelurahan menjadi dimana saja karena telah menggunakan sistem Online.	Meningkatknya Kualitas Pelayanan; Mempermudah Pengurusan Berkas; Menyediakan Informasi Seputar Berita dan Kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan	Kualitas Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan Mengalami Peningkatan; Pengusuran berkas jauh lebih mudah dan tidak berbelit-belit; Jumlah antrian warga di Kecamatan mulai berkurang yang biasanya warga menumpuk saat ini sudah mulai berkurang sehingga warga tidak menunggu lama.
19	Sistem Informasi Manajemen Tanah (SIMATA)	Dinas Pertanahan	SIMATA merupakan sistem yang berisi data-data yang dapat di akses aplikasi SIMATA untuk kebutuhan Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi digital. Data-data pertanahan di kumpulkan dan diidentifikasi oleh enumerator yang kemudian di validasi oleh validator, hasil dari validasi di input masuk kedalam sistem SIMATA yang akan menjadi database. Data base dari sistem SIMATA dapat	Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengelolaan tanah Milik Pemerintah Kota Makassar; Mempermudah dan mempercepat dalam mendapatkan data-data tanah aset pemerintah	Sebelum adanya SIMATA, pengelolaan data sangat membutuhkan waktu yang lama karena data berupa manual yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Dengan Adanya SIMATA, segala kebutuhan informasi tentang aset pertanahan di Kota Makassar semakin mudah diakses sehingga dapat meningkatkan persentase penyelamatan dan

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
			memberikan informasi untuk menentukan kebijakan pemerintah kota dalam hal pengamanan status dan pengamanan fisik aset tanah di Pemerintah Kota Makassar	kota Makassar; Mempermudah dalam mengklasifikasikan dan mengelompokkan aset tanah pemerintah kota Makassar	pengamanan aset. Dibuktikan dengan terbitnya legalitas aset dalam bentuk sertifikat yang meningkat.
20	SINGKAMMA (Sistem Informasi Terintegrasi Kecamatan Mamajang)	Kecamatan Mamajang	Bahwa dengan hadirnya Inovasi ini mampu meningkatkan kualitas dari semua sektor pelayanan publik , hal ini juga mengharuskan peningkatan SDM dari semua aparatur baik ASN maupun Non ASN di kecamatan Mamajang yang merupakan pengguna/user dari aplikasi ini, sehingga peningkatan SDM untuk bidang IT perlu dikembangkan dan dtitikberatkan.	Meningkatkan penyebaran informasi aktual kegiatan kecamatan ataupun kelurahan; Meningkatkan pelayanan menyeluruh kepada warga; Membantu pengambilan keputusan yang strategis dalam menangani masalah ke depannya	Informasi terkait Program dan kegiatan di tingkat kelurahan dapat diakses; Terwujudnya layanan online untuk pengurusan Melakukan penelitian serta telah melakukan Penelitian juga rekomendasi kegiatan Event di tingkat kecamatan; Tersedianya layana aduan 24 jam; Laporan terkait kejadian Bencana alam dapat terlaporkan 1 x 24 jam
21	SIPORANNU TA’ (SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU KEC. TAMALANREA)	Kecamatan Tamalanrea	Aplikasi SIPORANNU TA' memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kelurahan dan kecamatan dengan cepat dan mudah melalui perangkat mobile atau komputer. Untuk aduan terkait masalah dapat disampaikan melalui website yang terintegrasi dengan aplikasi tersebut.	Meningkatkan penyebaran informasi terkait pelayanan publik dan berita terkini di Kelurahan dan Kecamatan Tamalanrea; Menyediakan layanan informasi terkini di Kecamatan kepada publik.	Aplikasi ini memudahkan warga dalam melakukan pengurusan berkas di Kelurahan secara efektif dan efisien, karena warga dapat memperoleh pelayanan secara online dengan mengakses website dan aplikasi SIPORANNU TA’.
22	SIRANRANG (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SANGKARRANG)	Kecamatan Kepulauan Sangkarang	Inovasi SIRANRANG di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang telah membawa perubahan revolusioner bagi warga masyarakat. Dengan hadirnya aplikasi ini, akses informasi dan pelayanan bagi masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien.	Meningkatkan aksesibilitas; Mempercepat proses pengurusan; Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.	Meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui sistem online yang memungkinkan warga mengakses pelayanan secara online, mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan melacak status permohonan dengan mudah dan cepat.
23	BAWATA (Berita Wajo Terupdate)	Kecamatan Wajo	BAWATA merupakan website (inovasi) untuk dijadikan media informasi atau berita ter up date dan permasalahan pelayananan informasi aduan dapat ditangani lebih cepat.	Untuk meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan wajo terwujudnya pelayanan publik dan peran serta masyarakat.	Pelayanan publik ditangani lebih cepat; Informasi terkait pelayanan dapat dengan mudah diperoleh serta diakses oleh masyarakat; memberikan solusi untuk memecahkan masalah.

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
24	SI PELOR (Sistem Informasi Pelayanan Motor Lorong)	Kecamatan Rappocini	Sistem pelayanan ini disiagakan sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat jika ada warga di Kecamatan Rappocini butuh pelayanan namun berhalangan untuk datang ke kantor kelurahan atau kecamatan, semua tetap dapat terlayani dengan baik melalui Si Pelor	Mendukung terciptanya good governance dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; Efesien waktu dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi; Mengurangi tingkat komplain saat pelayanan berlangsung	Efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan administrasi masyarakat; Proses pembentukan produk inovasi Si Pelor akan di buatkan Peraturan Walikota agar pelayanan yang dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku di kota makassar untuk kemajuan dan efektifitas pelayanan publik
25	DOTTOROTA (Aplikasi Pengembangan Telemedicine Homecare)	Dinas Kesehatan	Aplikasi Dottoro'ta adalah merupakan pengembangan dari aplikasi pelayanan kesehatan Homecare (2015) di Kota Makassar yang dalam bentuk Konsultasi dokter dan apabila diperlukan terapi medik berupa pemberian obat maka akan mendapat pengantaran obat dari pihak Puskesmas (kurir)	Memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan langsung di rumah; Meningkatnya derajat kesehatan melalui upaya promotive, preventive, curative, dan rehabilitative; Merubah pola pikir masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang mahal dan rumit	Tidak ada lagi masyarakat kota makassar yang tidak mendapat pelayanan kesehatan; Terpenuhinya akses masyarakat dalam mendapat pelayanan kesehatan yang mudah dan nyaman; Persentase pengguna Aplikasi Dottoro'ta sebanyak 10 % dari pengguna Layanan Homecare-dottoro'ta
26	RADAR (Remaja Duta Anti Rokok)	Dinas Kesehatan	Isu perokok anak dipilih karena menjadi fokus pada RPJMN maupun RPJMD, serta terkait dengan visi misi walikota.	Meningkatkan jumlah remaja dalam sosialisasi dampak bahaya rokok bagi Kesehatan; Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di seluruh sekolah yang ada di Kota Makassar; Menjangkau siswa yang menjadi perokok pasif dan melakukan pembinaan melalui upaya berhenti merokok di Puskesmas setempat	Remaja mampu memberikan pemahanan tentang bahaya rokok baik dilingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya; Remaja menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah, rumah dan komunitas dalam mendukung pemerintah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
27	JAMPANGI (Jangkauan Maksimal Pelayanan	RSUD Kota Makassar	Keungulan/kebaharuan dari inovasi ini adalah terintegrasinya sistem kesehatan dan sistem administrasi kependudukan yang menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Dua hal mendasar	Mendekatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan kemudahan akses layanan bagi seluruh	Peningkatan kunjungan pasien dari 292 orang menjadi 418 orang; Kepuasan masyarakat meningkat dari 78.6 menjadi 80.1; Penyelesaian kasus emergency meningkat dari 85% menjadi

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
	Kesehatan Ibu dan Anak Terintegrasi)		ini perlu kolaborasi yang adekuat sehingga permasalahan ini dapat teratasi dengan efektif & efisien, dengan memanfaatkan keterlibatan keluarga, pemerintahan, unsur masyarakat dan stakeholder terkait.	lapisan masyarakat; Menekan angka kesakitan ibu dan bayi; Kemitraan perempuan dalam pemenuhan hak reproduksi; Membantu kemudahan dalam mendapatkan hak administratif sebagai warga	100%; Angka kematian ibu menurun dari 2 orang menjadi 0 orang.
28	ADAJI (Andalas Dalam Aksi Jendela Informasi)	Puskesmas Andalas	Puskesmas Andalas merupakan puskesmas yang berada didalam lorong sehingga tidak mudah untuk diketahui oleh masyarakat	Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait informasi kesehatan yang ada di Puskesmas Andalas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui usaha pencegahan penyakit menular dan tidak menular
29	BINGKISAN (BIDAN MENGURUSKAN KIS DAN AKTE KELAHIRAN ONLINE)	PKM Pattingaloang Makassar	Inovasi BINGKISAN ini merupakan salah satu inovasi puskesmas pattingalloang dibagian KIA khususnya kamar bersalin, dalam membantu masyarakat terutama pasien yang bersalin di puskesmas, langsung mendapatkan akte kelahiran dan KIS bayi baru lahir sebelum usia bayi 1 bulan. Bekerja sama dengan kader dan lintas sektor dalam mensosialisakan inovasi tersebut.	Meningkatkan capaian persalinan di Puskesmas Pattingalloang; Membantu bayi untuk mendapatkan Hak-Hak Kewarganegaraan (Akte Kelahiran), mendapatkan Jaminan Kesehatan (KIS); Memberikan Kemudahan kepada kurang mampu	Dengan ada nya inovasi ini capaian persalinan dipuskesmas Tahun 2020 sebanyak 248 orang , dan pada tahun 2021 sebanyak 314 0rang. Dengan pengguna inovasi tahun 2021 sebanyak 241 penerima manfaat.
30	BUNTING SALEWANGANG (PENGANTIN SEHAT)	PKM Cendrawasih Makassar	Dengan adanya inovasi Bunting Salewangang,Pasangan calon pengantin mendapat pelayanan kesehatan secara menyeluruh,lebih terencana dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat lahir dan batin,sehingga kelak melahirkan anak yang sehat dan berkualitas serta lebih siap dalam berumah tangga.	Cegah stunting bagi calon pengantin dengan mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari sebelum menikah, hamil, melahirkan sampai anak berusia dua tahun; Menurunkan angka kematian ibu dan bayi	Pasangan calon pengantin sudah melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah dan vaksinasi TT di puskesmas; KUA telah menjadikan persyaratan pranikah bagi calon pengantin
31	GEMPITA SERA (GERAKAN PENDAMPINGAN IBU, BAYI	PKM Sudiang Makassar	Tim GEMPITA SERA sebannyak 35 orang yang bertugas mendampingi,melaporkan dan mengantar para ibu hamil,calon pengantin dan pelayan ibu dan balita . Satgas gempita Sera mempunyai peran yang sangat penting sebagai penghubung antara	Mendampingi ibu hamil, bayi dan anak melakukan pemeriksaan secara terpadu; Memberikan konseling setiap saat	Kunjungan ibu hamil ke puskesmas sudiang meningkat dari 30% menjadi 80%; Meningkatnya Cakupan K1 dan K4 menjadi 95%; Meningkatnya cakupan Triple Eliminasi pada ibu hamil (HIV,HBSag dan Sifilis); Meningkatnya Kunjungan

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
	DAN BALITA, SEHAT SEJAHTERA)		puskesmas dengan masyarakat. Disaat bencana, tim satgas langsung turun membantu sehingga kehadiran nya sangat dirasa manfaat nya oleh masyarakat ,Puskesmas dan kelurahan	untuk mencapai kesehatan dan kesejateraan secara fisik dan psikis; Menurunkan angka kejadian Stunting dengan persiapan kehamilan sehat; Meningkatkan pencapaian SPM	Neonatus menjadi 80%; Meningkatkan Cakupan Buku KIA.
32	GIBAS (Gigi dan Gusi Balita Sehat)	PKM Pertiwi Makassar	Inovasi Gibas merupakan bagian dari kegiatan UKGM (Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat) yang selama ini sasarannya adalah masyarakat seluruh kelompok usia. Dengan adanya inovasi "Gibas" sasarannya adalah balita di masyarakat sehingga karies bias dideteksi secara dini sehingga penangannnya bisa lebih cepat. Dengan inovasi Gibas (Gigi dan Gusi Balita Sehat) dapat meningkatkan pengetahuan pengetahuan orang tua tentang kesehatan Gigi dan mulut anak balitanya.	Meningkatkan pengetahuan tentang Kesehatan gigi dan mulut pada ibu balita; Meningkatkan kebiasaan pola hidup sehat dengan kebiasaan sikat gigi secara tetatur sehingga menurunkan angka karies gigi pada anak usia dini; Terdeteksinya secara dini masalah Kesehatan gigi pada usia dini untuk jangka Panjang meningkatkan status gizi dan mencegah stunting pada anak.	Dari hasil peme4riksaan Kesehatan gigi dan mulut anak balita yang telah dilakukan baik itu di posyandu,maupun di puskesmas dapat diperoleh hasil 53 % anak balita yang berkunjung mengalami karies gigi.Untuk tahun 2022 dari 6 posyandu di kelurahan Lette dan Mariso dengan 218 sasaran yang diperiksa terdapat 126 anak yang mengalami karies. Dengan kunjungan ke puskesmas untuk tindakan penambalan gigi susu sekitar 48 kasus,hal ini berarti sudah ada pemahaman bagi orang tua mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anaknya.
33	GITA CENTIL (GERAKAN GIGI SEHAT CALON PENGANTIN DAN IBU HAMIL)	PKM Toddopuli Makassar	Inovasi Gita Centil merupakan program kolaboratif dengan bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya Camat dan kelurahan, Kader, Stikes Amanah, KUA, Program KIA serta relawan CVA dan Dompet Duafa. Inovasi ini juga berkontribusi terhadap penurunan angka kematian bayi karena dapat meminimalisir risiko yang tejadi pada janin utamanya berat badan lahir rendah dan keguguran.	Meningkatkan pengetahuan catin perempuan dan Ibu hamil akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut; Meningkatkan kepedulian catin dan ibu hamil agar hidup sehat khususnya dalam menjaga dan memelihara kesehatan gigi dan mulut; Menurunkan angka kesakitan penyakit gigi	Dengan adanya inovasi GITA CENTIL, catin dan ibu hamil pengetahuannya meningkat karena dapat memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut, serta dampaknya terhadap kondisi janin didalam kandungan, sehingga mereka memahami dan memperoleh kesadaran serta peduli untuk lebih menjaga dan memelihara kebersihan gigi dan mulutnya dan anaknya kelak.

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
				dan mulut; Mencegah terjadinya stunting.	
34	PAMMARI TB (Pampang Percepatan Eliminasi TB)	PKM Pampang Makassar	PAMMARI TB hadir dengan melakukan serangkaian kegiatan eliminasi TB dengan melibatkan kader Kesehatan dalam hal ini masyarakat sebagai kader TB dalam kegiatan investigasi kontak.	Meningkatkan capaian Jumlah pasien TB sensitif obat sembuh dan pengobatan lengkap (success rate)	Dengan adanya inovasi Pammari TB, konerja SPM terkait terduga TB meningkat dari tahun ke tahun disertai peningkatan persentase pasien dengan pengobatan lengkap dan sembuh.
35	PEKA NAKKE NEIDS (Pemberdayaan Kader Percontohan Terhadap Peningkatan Kewaspadaan New Emerging Infectious Diseases)	PKM Mamajang Makassar	Kebaharuan yang ditawarkan dari inovasi PEKA NAKKE NEIDs ini adalah proses penyampaian informasi kesehatan yang diusahakan untuk mengadopsi model dan teori yang bisa membantu untuk mendekatkan Petugas Kesehatan serta Kader selaku stimulus dengan realita yang ada di lapangan.	Mendorong partisipasi aktif kader dalam upaya kesehatan; Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di masyarakat yang melibatkan kader dalam penyediaan layanan dasar; Meningkatkan pelaporan kesehatan dari kader secara aktif; Mencegah peningkatan kasus penyakit dan penurunan angka kematian; Mendorong penguatan jaringan dan kolaborasi	Berdasarkan data persentase secara keseluruhan, pada tahun 2021 jumlah kunjungan posyandu sebanyak 85,7%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan kunjungan sebesar 90,5%; Data kasus penyakit yang terlapor secara langsung di PenanggungJawab Program dari kader/masyarakat di tahun 2021 sebanyak 10 laporan. Kemudian setelah adanya inovasi ini jumlah laporan kasus yang terlapor di PenanggungJawab Program pada tahun 2022 meningkat menjadi 17 laporan kasus
36	Pelor Ta' (Pengobatan Lorong Tradisional)	PKM Antang Perumnas Makassar	Inovasi PELOR TA' ini merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu PELOR (Pengobatan Lorong) yang dimana inovasi PELOR ini telah dipakai sejak 2018 dan sekarang dikembangkan dengan menambahkan pengobatan tradisional didalamnya.	Untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Manggala; Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Obat Tradisional; Untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengolah Tanaman menjadi obat.	Hasil yang kami dapatkan yaitu warga yang mengikuti penyuluhan ini berjumlah 218 orang dan mereka sangat antusias tentang informasi tanaman obat yang ada di sekitar rumah masyarakat setempat. RW 10 11 RW 11 24 terdapat di 12 RW
37	Penyu Dewa (Penyuluhan dengan WhatsApp)	PKM Mamajang Makassar	Kebaharuan dari Inovasi Penyu Dewa adalah Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka peningkatan capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilakukan tidak hanya secara langsung tetapi dengan pemanfaatan media WhatsApp.	Meningkatkan cakupan penerima informasi terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), persentase cakupan PHBS pada tatanan rumah tangga,persentase	Sebelum adanya inovasi, penerima informasi terkait PHBS hanya sebanyak 67 warga, setelah adanya inovasi meningkat menjadi 396 warga; Berdampak signifikan terhadap peningkatan persentasi Rumah Tangga ber-PHBS; Terjadi peningkatan capaian indikator penimbangan balita setiap bulan; Terjadi peningkatan capaian indikator

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
				capaian indikator penimbangan balita setiap bulan, persentase capaian indikator ASI Eksklusif dan persentase capaian indikator tidak merokok	pemberian ASI Eksklusif; Terjadi peningkatan capaian indikator tidak merokok di dalam rumah.
38	SEBULAN (SEHAT BUGAR LANSIA)	PKM Minasa Upa Makassar	Inovasi SEBULAN berupa senam pada lansia dan skrening kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, yang diadakan setiap seminggu sekali dan pemeriksaan gula darah setiap 3 bulan sekali.	Mewujudkan kesadaran mandiri pada lansia; Meningkatkan status kebugaran dan kesehatan bagi lansia; Meningkatnya jumlah lansia yang melaksanakan senam kebugaran lansia; Merubah prilaku dan pola pikir lansia tentang kebugaran	Meningkatnya kepedulian masyarakat, petugas kesehatan dan lintas sektor pada upaya kesehatan lansia.
39	SERBU MAKI (Sehat Bersama Bugar Bersama Masyarakat Bontomakkio)	PKM Kassi-Kassi Makassar	Inovasi ini dimulai dengan membentuk kader olahraga yang dipilih di masyarakat, kemudian kader ini nantinya akan menjadi pionir dalam mengajak masyarakat untuk melakukan aktifitas fisik/olahraga secara rutin di tempat mereka tinggal, kader ini kemudian menjadi pelopor dalam menggerakkan masyarakat untuk berolahraga secara mandiri.	Menumbukan motivasi masyarakat dalam melakukan aktifitas fisik secara rutin; Menumbuhkan kecintaan masyarakat untuk berolahraga; Menurunkan kejadian penyakit tidak menular yang muncul akibat kurangnya aktifitas fisik; Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui aktifitas fisik secara rutin	Masyarakat lebih aktif dalam melakukan aktifitas fisik yang dibuktikan dengan makin seringnya masyarakat melakukan aktifitas fisik secara berkelompok sekitar 3 kali dalam sepekan; Masyarakat lebih mandiri dalam melakukan/merencanakan kegiatan olahraga/aktifitas fisik
40	SI GADIS (SISWA DAN TENAGA PENDIDIK SEHAT)	PKM Ballaparang Makassar	Skrining Penyakit Tidak Menular dilakukan oleh semua Puskesmas di kota Makassar sekali dalam setahun tetapi Puskesmas Ballaparang melakukan secara rutin setiap bulan dengan melakukan pemeriksaan berkala kesehatan, KIE tentang keteraturan berobat bagi penyandang PTM dan yang beresiko tidak sampai berlanjut sebagai penyandang PTM.	Memudahkan siswa dan tenaga pendidik dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; Meningkatkan peran utama siswa dan tenaga pendidik dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko Penyakit Tidak	Penurunan persentase Prevalensi Perokok pemula, persentase Tenaga Pendidik penyandang Penyakit Tidak Menular (PTM) mulai terkontrol; Tenaga pendidik dan siswa yang beresiko dapat dideteksi secara dini, dari 53 % turun menjadi 47 %; Tenaga pendidik dan siswa sehat meningkat dari 29 % menjadi 35 %; Capaian SPM meningkat dari 52,01 % menjadi 67, 12 %

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
				Menular (PTM); Meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan.	
41	SIATU (Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha)	PKM Tamangapa Makassar	Aplikasi ini sangat membantu data informasi di Tata Usaha, memudahkan penulusuran data dan identifikasi ,serta perekapan laporan, dan dapat dengan mudah dipantau oleh Kepala Puskesmas, pengunjung/ masyarakat dapat dengan mudah mengakses buku tamu serta memberikan saran dan survey kepuasan guna meningkatkan pelayanan di Puskesmas Tamangapa.	Membantu dalam informasi Manajemen Tata Usaha di Puskesmas Tamangapa; Data data tersimpan dan terkelola secara online dimana dan kapanpun dapat diakses; Mempermudah pengunjung / pasien untuk mengakses Buku Tamu , Saran dan Survey kepuasan secara digital.	Menghasilkan beberapa output Manajemen Tata Usaha dengan secara sistematis yang dapat di akses secara online
42	SIKEMAS (SISTEM INFORMASI PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS TAMANGAPA)	PKM Tamangapa Makassar	Aplikasi ini bisa diakses secara online dan menghasilkan beberapa laporan yang telah menyesuaikan format dinas kesehatan makassar yang setiap bulan harus dilaporkan. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas yang terintegrasi, Menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkualitas , berkesinambungan dan mudah di akses.	Meningkatkan kualitas layanan kepada pasien; Menghilangkan duplikasi menginputan data. Mempercepat membuat laporan-laporan yang telah menyesuaikan format yang dibutuhkan dinas kesehatan makassar.	Dengan adanya sistem ini pembuatan laporan bulan yang manual sudah tinggalkan, sehingga semua laporan bulanan atau tahunan bisa dicetak secara real time, tidak membutuhkan waktu yang lama, Menghemat penggunaan ATK Meningkatkan kualitas layanan kepada pasien.
43	SiPaMase (Sistem Pelayanan Puskesmas berbasis Elektronik)	PKM Kaluku Bodoa	SiPaMase selain menghadirkan Layanan antrian online yang dapat diakses di semua media sosial Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar, serta dapat melayani tele konsultasi dengan dokter, perawat, bidan dan tenaga Kesehatan lain seputar permasalahan Kesehatan yang di hadapi oleh masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas, bahkan seluruh warga kota Makassar.	Memudahkan masyarakat mengakses informasi dan pelayanan Kesehatan; Mempersingkat waktu pendaftaran di poliklinik Puskesmas Kaluku Bodoa Makassar; Memberikan Pelayanan Informasi, pengobatan dan perawatan (telekonsultasi, telenursing) dengan lebih Cepat dan efisien	Masyarakat merasa terbantu dengan adanya Layanan pendaftaran online dan memperoleh layanan informasi dan tanya jawab seputar permasalahan Kesehatan yang dialami meskipun belum berada di Puskesmas untuk konsultasi atau mendaftar secara manual untuk berobat.

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
44	TB HUNTER (Penemuan suspek dan Pasien TB Positif dengan Kader/Petugas TB Hunter)	PKM Tamalate	Keunggulan dari inovasi ini adalah karena melibatkan kader dan lintas sektor untuk melakukan skrining dan penemuan kasus, kader akan mengantarkan dahak secara madiri ke puskesmas, skrining pun dilakukan dengan menggunakan aplikasi yaitu aplikasi SOBAT-TB, selalu ada evaluasi dan bimbingan teknis yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan kekonsitenan pelaksanaan kegiatan inovasi TB Hunter ini,dan kader juga menjadi penyampai informasi tentang TBC sehingga mampu mengurangi stigma negatif tentang TBC.	Sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat khususnya untuk melakukan deteksi dini pada pasien - pasien yang di curigai sebagai terduga TBC; Penderita TBC dapat di temukan dan di obati sesuai standar; Peningkatan capaian penemuan suspek dan dan penemuan kasus aktif TBC di wilayah kerja Puskesmas Tamalate; Optimalisasi kegiatan Investigasi Kontak serumah pasien TBC.	Peningkatan jumlah kasus yang ditemukan oleh petugas TB Hunter sehingga segera diobati sesuai standar dan tentu akan membantu memutus mata rantai penularan penyakit TBC.
45	UTARAKAN GIATMU (Ular Tangga Raksasa Gigi Dan Mulut)	PKM Mamajang Makassar	Utarakan Giatmu merupakan bentuk Inovasi penyuluhan kesehatan gigi yang dikemas dalam bentuk permainan edukatif yaitu permainan ular tangga sehingga mereka lebih tertarik dan lebih mudah memahami penyuluhan kesehatan gigi tersebut. Inovasi penyuluhan ini mempunyai keunikan dan nilai tambah karena menggabungkan modifikasi permainan dan pengetahuan bagi anak mengenai kesehatan gigi.	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan tindakan peserta didik dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut; Meningkatnya peran serta guru dan orang tua dalam upaya promotive - preventif; Terpenuhinya kebutuhan pelayanan medik gigi dan mulut bagi peserta didik yang memerlukan	Dalam hal ini dilakukan evaluasi internal dengan memetakan angka karies gigi pada siswa yang telah diberikan program inovasi ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program inovasi ini sudah masuk dalam kategori baik dalam hal pencapaian derajat kesehatan gigi anak usia sekolah tersebut. Hasil evaluasi Inovasi Utarakan Giatmu berupa output dan outcome.
46	SIAP GERAK (SIAP PEDULI GERAKAN AKTIF)	SD Inpres Banta Bantaeng 1	Inovasi SIAP GERAK adalah gerakan aktif yang dilakukan untuk membudayakan Etika Batuk di lingkungan belajar siswa (sekolah, rumah dan masyarakat). Pendampingan dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan, upaya untuk memberi penguatan dan memastikan bahwa SIAP GERAK dilakukan secara rutin, menjadi budaya saling peduli lindungi.	Tujuan utama dari program ini bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui dorongan untuk bergerak aktif secara fisik; Meningkatkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dengan menggunakan	Peningkatan Tingkat Aktivitas Fisik; Penurunan Angka Kekurangan Gerak; Meningkatkan Kesadaran Siswa.

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
				Etika Batuk yang benar di lingkungan sekolah dan masyarakat; Mengurangi Gaya Hidup Tidak Sehat.	
47	Aku Anak POPEYE (Pola Hidup yang Sehat)	UPT SPF SD INPRES BTN IKIP II	Persentase ketidakhadiran siswa yang kurang sehat/ sakit, jajanan siap saji di kantin sekolah yang mempengaruhi pertumbuhan anak, kurangnya pengawasan orang tua dalam memilih jajanan anak, kurangnya inovasi orang tua dalam mengolah makanan yang berbahan dasar sayur, dan kurangnya pemanfaatan hasil lorong garden program kerja pemkot	Mengubah persepsi dan kebiasaan anak yang awalnya kurang suka menjadi suka mengonsumsi sayuran sehingga pemenuhan gizi anak dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, orang tua peserta didik dapat memiliki tambahan penghasilan untuk menopang ekonomi keluarga	Peserta didik dapat memahami perbedaan makanan atau jajanan sehat dan tidak sehat sehingga jumlah kehadiran peserta didik dapat meningkat
48	AMAL CERIA (Anak Mama Lancar)	SD Inpres Banta-Bantaeng 1	Kesadaran orang tua, peserta didik untuk mencari buku referensi sebagai sumber belajar sangat minim dan minat baca masih rendah	Meningkatkan perhatian orang tua peserta didik (mama) terhadap anaknya; Meningkatkan komunikasi yang baik untuk pembinaan minat baca orang tua (mama) dan peserta didik (anak); Meningkatkan pemahaman orang tua (mama) terhadap pentingnya membaca buku paket dan buku referensi perpustakaan (cetak dan digital) pada anak; Meningkatkan minat baca peserta didik (anak), menambah wawasan dan prestasi literasi numerasi digital.	Terjadi peningkatan 98% kunjungan membaca di Perpustakaan CERIA; Meningkatkan karakter serta pengembangan bakat siswa kelas 4,5,6 setelah diterapkan pentingnya literasi baca buku cetak atau melalui (smart library). Program pengembangan bakat ini dapat dilihat dari antusiasnya 98% siswa mengikuti kegiatan lomba-lomba, dan pentas seni projek pelajar Pancaasila; Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Terlihat 80% pemahaman orangtua siswa terhadap pentingnya membaca buku paket, buku referensi cetak dan Ebook.

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
49	ANGKAT (RuaANG Kreasi Anak HebaT)	UPT SPF SDI Maccini Baru	Ditinjau dari status ekonomi orang tua peserta didik di UPT SPF SDI.Maccini Baru berada dilevel menengah kebawah, memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan sosial dan tingkah laku peserta didik yang mengalami penyimpangan	Membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; Menurunkan angka putus sekolah; Meningkatkan pelayanan pada peserta didik sesuai potensi ,bakat dan minatnya	Turunnya angka putus sekolah; meningkatnya pelayanan pada peserta didik sesuai potensi, bakat dan minatnya
50	Bell 6TQ	UPT SPF SD Inpres Perumnas Antang III	Inovasi bell 6TQ Layanan Pendidikan membaca 6TQ AlQur'an kepada semua peserta didik yaitu pada pukul 12.15 atau 15 menit sebelum pembelajaran usai, bell akan berbunyi semua guru wali kelas dan semua peserta didik harus berhenti selama 15 menit untuk fokus melakukan kegiatan 6TQ di kelas masing-masing. Dimana kegiatan ini sudah terjadwal dari hari Senin sampai Sabtu dengan menerapkan 6 konsep yaitu tartil, tilawah, tajwid, tahzin, tahfidz, dan tadabbur.	Menumbuhkan minat baca Al-Qur'an bagi peserta didik; Memberantas buta aksara AlQur'an di UPT SPF SD Inpres Perumnas Antang III	Setelah dilakukan proses penerapan selama 3 bulan, maka didapatkan hasil 87% atau sebanyak 458 peserta didik yang minat baca Al-Qur'annya meningkat; Peserta didik mengalami peningkatan dalam kelancaran dalam membaca Al-Qur'an, hal itu dibuktikan terdapat 80% atau 421 peserta didik sudah lancar membaca Al-Qur'an.
51	BUDAYA TABE (TERTIB DAN BERKARAKTER)	UPT SPF SDI Hartaco Indah	Dengan adanya inovasi Tabe'(tertib dan berkarakter) , kondisi di lingkungan sekolah berubah menjadi lebih teratur, harmonis, dan berkualitas. Inovasi ini membawa perubahan positif dalam mengatasi masalah ketertiban dan karakter siswa, menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, serta berintegritas, bertanggung jawab.	Membangun karakter dan budaya positif pada diri peserta didik; Dengan inovasi ini Peserta didik mampu meningkatkan sikap saling menghargai dan menghormati siapapun; Melestarikan penerapan budaya lokal secara berkelanjutan.	Pada data Siswa Bermasalah ditemukan jumlah siswa yang bermasalah sudah berkurang sekitar 70% yang tadinya mencapai 168 kasus pertahun sekarang menjadi 54 kasus pertahun 2022; 706 siswa yang telah menerapkan Budaya Tabe dan mengetahui pentingnya sikap menghargai orang lain apalagi yang lebih tua.
52	BUNDA PUSTAKA	SD Negeri Borong	Dengan inovasi ini, sangat banyak keunggulan yang dimiliki oleh bunda pustaka diantaranya adalah tidak hanya mengkampanyekan budaya baca tapi juga berkontribusi pada perpustakaan dan juga pada sekolah dan kolaborasi dengan pendidik dan tenaga kependidikan.	Bunda Pustaka diharapkan mampu mewujudkan gerakan literasi sekolah; Bunda Pustaka menjadi representasi orang tua siswa Sebagai partisipasi ibu dalam pengembangan perpustakaan Sekolah dan Sekolah; Bunda Pustaka diharapkan	Siswa-siswa lebih terpacu dalam pengembangan minat bakatnya melalui pendampingan Bunda Pustaka diantaranya mengikuti berbagai event baik yang diadakan di Swasta maupun instansi; Para siswa lebih aktif ke sekolah dan tampil di berbagai kegiatan sekolah berkat dukungan dan motivasi dari para orang tua siswa dalam hal ini pengurus bunda pustaka

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
				mampu berkembang melalui penguatan pendidikan karakter.	
53	Casper (Care Student Personality)	UPT SPF SD Negeri Bawakaraeng I	Kebaruan Inovasi Casper selain bagaimana membantu anak menyelesaikan masalah personal menjadikan menjadi lebih percaya diri dengan pendekatan semua bisa dan semua punya prestasi. Inovasi Casper juga mendukung program pemenuhan hak-hak anak yang sampai saat ini masih menjadi isu global serta mewujudkan sekolah yang ramah terhadap peserta didik menuju kota Makassar sebagai kota Ramah Anak. Tak ada anak yang bermasalah, mereka hanya butuh perhatian yang lebih dari orang-orang yang peduli dengan kondisi mereka.	Mengurangi tingkat kekerasan yang sering terjadi pada anak; Memberikan edukasi tentang pentingnya memenuhi hak-hak anak; Menemukan berbagai masalah kepribadian (personal) anak yang mengganggu proses tumbuh kembangnya; Mengawal personal setiap anak yang bermasalah sehingga mereka mampu menemukan jadi diri, bakat serta minatnya.	Inovasi Casper berhasil memberikan solusi terhadap berbagai masalah personal peserta didik. Pada tahun 2021 ditemukan ada 20 peserta didik yang kerap kali terlibat dalam perilaku kriminal dan kekerasan, 30 anak putus sekolah (APS), dan tidak terlayaninya kebutuhan belajar 10 anak berkebutuhan khusus (ABK). Pada tahun 2022 seluruh masalah tersebut telah terselesaikan dengan baik.
54	DEBUS (PENDEKAR DAN BUNDA SAMPAH)	SD Negeri Sudirman IV	Debus adalah akronim dari Pendekar dan Bunda Sampah. Pendekar Sampah merupakan sekelompok siswa yang mengkoordinir teman–teman sekelasnya dalam penanganan dan pengelolaan sampah sekolah. Sedangkan Bunda Sampah adalah guru atau orang tua siswa yang bertugas untuk menangani dan mengelola sampah di lingkungan sekolah.	Memberikan pembiasaan dan Pendidikan kepada seluruh warga sekolah untuk mengelola sampah dengan baik; Menjadi motivasi bagi siswa dalam hal mengelola sampah dengan baik dengan adanya reward yang akan diberikan pada siswa pengelola sampah terbaik; Mencetak generasi yang cinta akan lingkungan untuk mendukung program pemerintah mengenai kebersihan dan Kesehatan.	Budaya bersih warga sekolah di UPT SPF SD Negeri Sudirman IV Makassar meningkat dari 50% menjadi 90% sehingga lingkungan sekolah menjadi bersih, nyaman, dan asri; Warga sekolah dapat mengelola sampah dengan baik dan memanfaatkan sampah melalui proses daur ulang meningkat dari 60% sebesar 95%; Peningkatan motivasi siswa dalam mengelola sampah dengan baik dari 60% menjadi 90%; Terwujudnya generasi yang cinta akan lingkungan yang mendukung program pemerintah mengenai kebersihan dan Kesehatan meningkat dari 65% menjadi 95%.
55	EKO-SKUL (EKOSISTEM SEKOLAH	SD Negeri Parinring	Keunggulan dan kebaruan program Eko-Skul, yakni diyakini sebagai solusi jangka panjang yang akan menjadikan SD Parinring sebagai Green School, yang akan terintegrasi dengan kurikulum hijau	Mewujudkan warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan dengan menciptakan	Berdasarkan Laporan Pengurangan Sampah di Sekolah, terlihat ada penurunan produksi sampah. Sebagai gambaran, pada bulan Juli 2022, sebelum dilakukan pembatasan, jumlah produk sampah

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
	KELOLA DAUR ULANG)		(Greening the Curriculum). Lewat Eko-Skul akan dilakukan penanganan dan pemanfaatan sampah, melalui kegiatan-kegiatan kreatif daur ulang demi mewujudkan sekolah yang ramah dan berbudaya lingkungan. Ciri pembeda dan kekhasan program Eko-Skul adalah memadukan beberapa aspek sekaligus, yakni partisipasi, edukasi, literasi, pendidikan karakter, serta pemahaman dan pemaknaan akan pentingnya pembangunan yang berkeberlanjutan.	kondisi yang lebih baik bagi tumbuhnya pengetahuan dan kesadaran mereka dalam program-program dan kegiatan ramah lingkungan; Membentuk perilaku dan karakter ramah lingkungan, yang kreatif, inovatif, dan mandiri; Mendorong partisipasi dan tanggung jawab aktif warga sekolah untuk secara bersama-sama mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.	sebanyak 35 kg/bulan, namun kemudian berkurang menjadi 30 kg/bulan. Berikutnya pada Agustus 2022, produksi sampah sebanyak 30kg/bulan, setelah diberlakukan pembatasan, menjadi hanya 21 kg/bulan. Pada bulan November 2022, turun dari 15 kg/bulan menjadi 10 kg/bulan
56	Gerakan Siswa Anti Putus Sekolah (Gerak SAPA)	UPT SPF SMP Negeri 37	Pemerintah Kota Makassar memprogramkan “semua anak harus sekolah”. Artinya tidak ada anak yang berusia sekolah, di kota Makassar yang tidak mendapatkan pendidikan. Program tersebut untuk memastikan bahwa pendidikan yang baik dan merata pada seluruh lapisan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Seluruh komponen masyarakat harus bahu-membahu menyukseskan program ini, tak terkecuali sekolah sebagai institusi pendidikan.	Memastikan semua anak yang berusia sekolah di sekitar lingkungan sekolah dapat menempuh pendidikan; Mencegah terjadinya siswa yang putus sekolah; Memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu.	Tidak ada lagi anak yang berusia sekolah di sekitar lingkungan UPT SPF SMP Negeri 37 Makassar yang tidak bersekolah; Angka putus sekolah di SMP Negeri 37 Makassar menjadi nol persen (0%)
57	Hunter Sahabat Siswa	UPT SPF SDI Mariso II	Program ini adalah layanan pendidikan oleh sekolah terhadap siswa yang kehadirannya tidak maksimal di sekolah karena berbagai faktor baik dari keluarga, ekonomi dan kebiasaan.	Membantu dan menfasilitasi siswa yang putus sekolah dengan alasan bekerja untuk tetap bersekolah dan Memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan agar mereka punya peluang yang besar untuk hidup yang lebih baik.	Bagi Siswa, Semua siswa berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan meski dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan keluarga yang berbeda dan bagi Guru, Memberikan kesadaran kepada guru untuk memberikan perhatian besar kepada peserta didik atas keberlangsungan pendidikan peserta didik. Dan tidak mudah menyerah atas segala persoalan yang terjadi pada peserta didik yang membuat mereka putus sekolah.

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
58	JAI (JUMAT ANAK BERBAGI)	UPT SPF SMPN 22 Makassar	Sebelum adanya inovasi "JAI" ada beberapa peserta didik yang kurang fokus dalam mengikuti proses belajar mengajar dan terdapat beberapa peserta didik yang cerdas tetapi mereka kurang memiliki kepercayaan diri dan kurang dapat menampilkan serta mengaplikasikan kemampuan yang dimilikinya. Namun, dengan diterapkannya inovasi "JAI" , perlahan persoalan ini sudah mulai berkurang dan mendapatkan solusi terbaik yang berdampak pada peserta didik.	Peserta didik dapat berakhlak mulia dan peserta didik dapat meningkatkan semangat belajarnya	**Bagi peserta didik** : sangat senang karena rasa percaya diri semakin meningkat dibuktikan sekitar 80 persen.dan **bagi orang tua bisa** merasa bangga setelah anaknya dapat mengaplikasikan apa yang telah diperolehnya dari sekolah mereka dan rasa kepeduliannya juga nampak sehingga terbentuklah cerdas berkarakter dalam diri anak mereka.
59	KAREBOSI (KEGIATAN REKREATIF UNTUK MENUMBUHKAN BAKAT OLAHRAGA TRADISIONAL SISWA)	SD Inpres Bertingkat Mamajang III	Inovasi KAREBOSI (Kegiatan Rekreatif Untuk Menumbuhkan Bakat Olahraga Tradisional Siswa)dilaksanakan dengan tahapan perkenalan kepada peserta didik dengan melalui penggabungan mata pelajaran olahraga.	Peserta didik mampu mengajarkan permainan tradisional di luar sekolah dan melakukan pembinaan terhadap peserta didik sehingga mereka bisa mengenal permainan tradisional	Seperti kita ketahui bahwa penggunaan gawai yang berlebihan terhadap anak dapat mengurangi aktivitas fisik sehingga siswa siswi cenderung lebih mudah terserang penyakit. Dengan adanya Inovasi KAREBOSI siswa siswi lebih semangat dalam kegiatan olahraga yang mereka anggap sebagai permainan yang seru dan menyenangkan.
60	KE BENGKEL (KELAS BENAHI KESULITAN BELAJAR SISWA)	UPT SPF SMPN 22	Peserta didik yang ditempatkan di "Ke Bengkel" akan dibina utamanya karakternya karena jika karakter sesoerang kuat maka semua dapat dilakukan. Olehnya itu dalam "Ke Bengkel" diterapkan metode pendekatan dan pembelajaran berdiferensiasi yang dikelompokkan sesuai bakat dan minat peserta didik sehingga apa yang dimiliki dalam dirinya dan diinginkan peserta didik dapat tercapai karena senangnya mengikuti pembelajaran.	Adapun tujuan berdirinya "ke bengkel" yaitu : mewujudkan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan 18 Revolusi Pendidikan dengan menumbuhkan semangat belajar peserta didik sehingga tidak ada lagi peserta didik yang pindah sekolah atau tinggal kelas	**Bagi peserta didik** : sangat senang karena mereka telah mengetahui dan mengaplikasikan keinginan dan bakat yang mereka miliki dan menyadari bahwa sekolah itu penting (93 persen). **Bagi orang tua** : orang tua merasa bangga setelah anaknya di tempatkan ke bengkel. Karena adanya perubahan karakter yang menyebabkan semangat anak untuk belajar dan hasilnya terpancar pada nilai rapor yang melewati nilai KKM mengalami ketuntasan 93 peresen.
61	KUPONKU (Kolaborasi untuk Panen Olahan Tanaman Kebun Sekolahku)	SD Negeri DAYA 1	Dapat memberi daya tarik kepada siswa untuk rajin merawat tanaman, untuk mendapatkan kupon belanja di kantin sekolah dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi kepada sesama teman, karena kupon tersebut dapat juga diberikan kepada teman yang memiliki berat badan dibawah rata-rata diakibatkan kurangnya mendapat gizi dari makanan sehat.	Menumbuhkan rasa tanggung jawab, gotong royong bagi seluruh warga sekolah. dan meningkatkan pengetahuan kepada orang tua siswa dan seluruh masyarakat sekitar sekolah secara luas, untuk selanjutnya	Terciptanya Kolaborasi guru, orang tua dan siswa dalam membudidayakan dan memanfaatkan hasil kebun sekolah (cabai, strawberry, tomat, sawi, kacang panjang, dll). Inovasi ini juga mengajarkan siswa untuk bergotong royong, kreatif, dan inovatif salah satunya dengan mengolah buah dan sayur menjadi minuman dan makanan yang bernilai jual sebagai bentuk wirausaha sederhana dimana hasil pengolahan buah dan sayur dijadikan kupon untuk

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
				taman dan kebun sekolah juga dapat dinikmati dan bermanfaat oleh masyarakat sekitar sekolah.	mendapatkan makanan dan minuman gratis di kantin.
62	LUNRA (lingkungan Ramah Anak)	SMP 26 Makassar	Kami membuat suatu program inovasi sekolah dimana guru dan siswa serta warga sekolah yang berada di lingkungan sekolah bekerjasama untuk dapat melakukan suatu perubahan yang dapat menunjang keberhasilan siswa mengolah sampah dengan baik dan menjadikan lahan yang awalnya pembuangan sampah dibuat utuk lahan kebun untuk ditanamani jenis-jenis sayuran maupun buah.	Memberikan efek nyaman dan bahagia. Pada program inovatif ini merupakan perwujudan kerjasama yang harmonis yang melibatkan semua elemen sekolah [masyarakat sekolah] dengan harapan semua bisa berpartipasi mengambil peran dan memberikan dampak positif bagi seluruh warga sekolah sesuai namanya	Sebelum dilaksanakan inovasi LUNRA jumlah sampah menurut ukuran tong sampah yang digunakan di lingkungan sekolah sejumlah 24 tong sampah dengan volume perhari 90% per tiap tong sampah diangkut ke pembuangan sampah. Setelah dilkasanakan program LUNRA' maka sampah berkurang dari 90% pertong sampah menjadi 40% per tong sampah di setiap sudut kelas .
63	MACAPA (Mariki Cacah Sampah Ta')	UPT SPF SDI Unggulan Puri Taman Sari	Pengelolaan sampah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan mengingat dampak buruknya bagi kesehatan dan lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah yaitu dengan mengolah sampah sisa tanaman yang telah dicampur bahan pengurai dari limbah masyarakat menjadi pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.	Mempermudah pembuatan pupuk kompos dan merubah bahan organik dari limbah menjadi produk yang mudah dan aman untuk ditangan, disimpan, diaplikasikan ke lahan sekolah dengan aman tanpa menimbulkan efek negatif dan mengurangi jumlah sampah yang ada disekolah.	Kesuburan tanah di UPT SPF SDI Unggulan Puri Taman Sari meningkat sebanyak 85 % dari jumlah awal hanya 30% dan jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir berkurang menjadi 20% dari jumlah awal 80%.
64	MANGASAH (Mari Mengolah Sampah)	UPT SPF SDI Antang 1	Inovasi ini dilakukan dengan lebih awal membuat tim yang terdiri dari berbagai koordinator kemudian dilakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Setelah itu setiap wali kelas melakukan pembinaan kepada peserta didik di setiap kelas kemudian dilakukan evaluasi oleh tim inovasi.	Warga sekolah dapat memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang. dan mampu menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup	Melihat perkembangan hasil dari program Inovasi MANGASAH ini siswa sudah terbiasa memperlihatkan sikap kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
65	MARKISATA' (MARIKI' SEDEQAH SAMPAH TA')	UPT SPF SD Negeri Rappocini	Sedekah pada umumnya berupa uang, namun UPT SPF SDN Rappocini memiliki inovasi yang bernama MARKISATA' (Mariki Sedekah SampahTa'). Setiap hari Sabtu peserta didik akan membiasakan diri untuk membawa sampah yang bernilai ekonomis dari rumah untuk disedekahkan.	Menjadikan sekolah sebagai tempat praktek pengelolaan kepedulian lingkungan dan Melakukan pencegahan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup	Adanya perubahan tingkah laku peserta didik dari 485 peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berjumlah 312 Peserta didik yang belum berubah 173 peserta didik. serta perubahan rasa empati peserta didik dari 485 peserta didik yang memiliki rasa empati berjumlah 292 peserta didik yang belum berubah 193 peserta didik dan pengurangan volume sampah di lingkungan sekolah dari 25 kg menjadi 5 kg.
66	MATASA (Maju dengan Asesmen Tanpa Soal)	UPT SPF SMP Negeri 6	Setiap guru membagi dua kelas, sebagian kelas di asses menggunakan Blank-Page Technique Assessment (lembar kosong), sebagian lagi menggunakan tes uraian.	Mengembangkan kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif peserta didik dengan memberi ruang mengeksplor pegetahuan secara mandiri sesuai bakat dan minatnyadan meningkatkan kemauan peserta didik mengambil kendali atas pembelajaran, serta memahami kekuatan diri dalam pencapaian belajar.	Sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka, inovasi MATASA memfasilitasi pengalaman belajar yang diwadahi dalam kegiatan intrakurikuler dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, juga pendekatan diferensiasi peserta didik baik aspek konten, proses dan produk. Hasil inovasi MATASA.
67	Museum KARAENG CA'DI (Karya Seni Garuda Creative dan Innovative)	UPT SPF SD Negeri Garuda	Pembuatan Museum Karaeng Ca'di dengan melibatkan berbagai stakeholder yang dimulai dari bulan Mei 2022. Tahap pra Implementasi yaitu proses finalisasi pembuatan Museun dilanjutkan dengan tahap Uji coba yaitu mencoba segala aspek di museum. Tahap penerapan adalah tahap menjalankan museum serta evaluasi yaitu melihat kembali kendala, saran, dan masukan yang didapat selama berjalannya museum.	Sebagai sarana untuk menyalurkan karya siswa dan Wadah untuk menampilkan hasil kreativitas siswa.	Menambah kreativitas siswa agar siswa lebih giat berkarya serta meningkatkan hasil belajar siswa dengan penggunaan media dalam pembelajaran
68	PACARITA (Panggung Ceria Cerita Anak)	UPT SPF SD INPRES BANTA BANTAENG I	Aktivitas pembelajaran dilakukan secara kreatif, komunikatif, dan interaktif. Pembelajaran juga dilakukan melalui ekspresi diri dalam bentuk kegiatan seni budaya, yang umumnya melalui gerak dan suara.	Membentuk penguatan hak partisipasi peserta didik untuk membangun kesadaran kritis mereka.	Peningkatan kompetensi: Seni Tari 48% meningkat 72%, menyanyi 21 % meningkat 43 %, puisi 15 % meningkat 35 %. Teater 10% meningkat 24%, bercerita 16% meningkat 38% dan Peningkatan pusat minat bakat peserta didik

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
					pengembangan bakat menari, menyanyi, baca puisi, teater, bercerita pemanfaatan digital 62%.
69	SAVA (Sistem Aplikasi Virtual Ar-Rahmah)	SIT Ar Rahmah Makassar	Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis android dan web yang akan memudahkan bagi guru dalam penginputan daftar kehadiran peserta didik dan hasil pembelajaran di sekolah. Aplikasi ini juga memudahkan orang tua dan peserta didik dalam mengakses informasi tentang perkembangan peserta didik secara akurat dan real time dengan mudah dan cepat.	Tujuan jangka panjang untuk menciptakan sistem pengelolaan data yang efisien bagi guru, dengan memudahkan pengisian daftar hadir dan input data hasil belajar siswa dan tujuan jangka pendeknya adalah mengurangi penggunaan kertas dengan menggantinya dengan penginputan data berbasis internet, sehingga mendukung upaya pengurangan limbah kertas dan efisiensi penggunaan sumber daya.	Sistem pengelolaan data yang efisien telah terwujud dengan adanya kemudahan pengisian daftar hadir dan input data hasil belajar siswa bagi para guru. Proses ini telah menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya dibutuhkan dalam pengelolaan data. Sebelum adanya inovasi, membutuhkan waktu satu minggu dan mengeluarkan biaya sekitar 2 juta, setelah adanya inovasi SAVA hanya butuh waktu 1 hari untuk menginput data dan tidak ada biaya yang dikeluarkan.
70	SINGARAK (SISTEM COACHING ORTU DAN ANAK)	UPT SPF SMPN 22	Melalui metode coaching ini, ortu dan peserta didik atau anak alami akan mereka ungkapkan dan mereka sendirilah yang mencari solusi atas permasalahan mereka khususnya permasalahan anak atau peserta didik Untuk mengontrol dan memberikan buku pegangan coaching yang dijadikan sebagai dasar atau panduan mengetahui perkembangan perubahan peserta didik menjadi lebih baik lagi dengan keterlibatan peran ortunya sEndiri.	Peserta didik atau anak dapat memahami apa yang sudah dia lakukan dan peserta didik dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya berkenaan dengan peningkatan kualias dirinya dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah didampingi oleh peran orang tuanya	Peserta didik atau anak sudah menyadari apa kesalahan dan mengetahui permasalahan yang ada pada dirinya tanpa diberitahu bahkan mencari solusi atas permasalahan atau kesalahan yang telah diperbuatnya seperti bersemangat ke sekolah dan tidak akan bolos lagi. Dibuktikan dengan persentasi kehadiran peserta didik sudah mencapai 95 persen.
71	STBL (Smart Technology Based Learning)	UPT SPF SD Inpres Paccerakkang	Di UPT SPF SD Inpres Paccerakkang, mayoritas guru masih menggunakan metode ceramah sebagai metode favorit dalam pembelajaran yang tentu saja bagi peserta didik sangat membosankan. Kondisi ini tidak relevan dengan karakteristik peserta didik saat ini yang menghendaki pembelajaran yang interaktif	Meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada usia sekolah dasar dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dimana dengan teknologi	Implementasi inovasi STBL (Smart Technology Based Learning) memberi dampak signifikan terhadap pembelajaran. Dari jumlah siswa di UPT SD Inpres Paccerakkang yakni 680 orang, sebagian besar merasakan dampak positif yang signifikan terhadap penerapan inovasi ini dalam

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
			dan juga menyenangkan. Dengan demikian, di UPT SPF SD Inpres Paccerakkang dibutuhkan inovasi pembelajaran yang dapat mengundang minat siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran	memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pelajaran dari mana saja dan kapan saja.	pembelajaran di kelas. Antusias siswa dalam pembelajaran meningkat setelah implementasi inovasi ini
72	TAPPA' MI (TEMPAT SAMPAH MINI)	UPT SPF SD Inpres Malimongan Baru	Tappa' MI (Tempat Sampah Mini) adalah program yang dicanangkan sekolah dengan mengedukasi siswa mendaur fungsi dan mengkreasikan barang bekas seperti botol dan toples bekas sebagai tempat sampah mini untuk setiap murid yang penempatan Tappa'Mi diletakkan di dekat siswa khususnya di laci meja siswa, sehingga perilaku membuang sampah pada tempatnya benar-benar terbangun.	Membudayakan menjaga kebersihan dengan menghilangkan kebiasaan malas anak membuang sampah di tempat yang tidak terlihat atau yang posisinya dekat dengan mereka dan membangun karakter anak untuk memanfaatkan barang/ media sesuai fungsi dan kegunaannya.	Dampak yang dicapai dari inovasi Tappa' MI adalah menjadikan siswa lebih mandiri dan berkesadaran dalam memelihara lingkungan bersih di sekolah dan diluar lingkungan sekolah.
73	TEKAD (Tingkatkan Edukasi Kemandirian Anak Disabilitas)	SDI Maccini Baru	Kegiatan inovasi diawali dengan pertemuan warga sekolah dalam kegiatan sosialisasi, pembentukan tim dan membuat group diskusi melalui watshapp ,	Meningkatkan kemandirian AD seperti mampu memakai baju sendiri, makan / minum sendiri, toilet training, mampu berkomunikasi minimal dua arah dan meningkatkan kecakapan intelektual AD sehingga dapat membaca, menulis dan berhitung	Anak Disabilitas dapat memiliki kemampuan kemandirian melalui bimbingan khusus dari segi motoric, interaksi dan komunikasi dan Anak Disabilitas dapat berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan luar termasuk perlombaan agar dapat berkembang rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dihadapi
74	TEMAN (Tim Edukasi dan Mediasi ANak)	SDN Kompleks Sambung Jawa	Inovasi "TEMAN" ini tidak berdiri sendiri tapi menjadi bagian dari benang merah program-program lain yang dikembangkan di sekolah. Pendekatan multi-stakeholder dan dilakukan dengan melibatkan seniman, penulis, media massa, penggiat anti-korupsi, aktivis kesetaraan gender, kelompok difabel, instansi, serta perangkat daerah.	**Tujuan Inovasi "TEMAN" yaitu:** Mencegah terjadinya kekerasan dan bullying yang dilakukan oleh sesama anak di sekolah dan Mendorong anak mengambil peran dan	Berdasarkan data tersebut terjadi penurunan angka kekerasan setiap tahunnya. Kasus rata-rata pertahunnya di tahun 2019 total kasus berjumlah 3500 siswa, tahun 2020 masa terjadinya covid-19, tahun 2021 (Agustus-Desember) total kasus berjumlah 1960 siswa, tahun 2022 total kasus berjumlah 97 siswa, kemudian di tahun 2023 (Januari-Juni) total kasus berjumlah 46 siswa.

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
				tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan.	
75	Teman Aksi Belajar (Sistem Manajemen Administrasi Kearsipan dengan Menggunakan Akun belajar.id)"	UPT SPF SDI MANDAI	untuk mengefektifkan dan mengefisienkan administrasi, arsip yang ada di sekolah, kemudian mengawetkan arsip dan administrasi sehingga tidak mudah rusak, terbakar bahkan hilang. Mengurangi beban kerja guru dan tenaga pendidik dalam kegiatan adminsitrasi. Memudahkan pendidik dan tenaga pendidik dalam mengakses administrasi dan arsip dimanapun dan kapanpun.	Terciptanya drive bersama menggunakan akun belajar.id UPT SPF SDI MANDAI. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan mampu mengoprasikan drive bersama dengan menggunakan akun belajar.id. Semua file sekolah dan Administrasi tergabung dalam satu folder.	Drive bersama adalah folder khusus di Google Drive yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan, menelusuri, dan mengakses file dengan tim.
76	TETTERE (Temani Temanmu Kreatif)	SMP 26 Makassar	Keinginan untuk berinovasi dan berimprovisasi oleh peserta didik sangat rendah terutama pendidikan kewirausahaan. Salah satu cara untuk mengolah dan meningkatkan kreativitas peserta didik adalah dengan memberikan suatu kegiatan untuk melakukan aktivitas keterampilan dengan muatan pembelajaran bermakna dan dari hasil keterampilan yang telah dibuatnya akan dibekali dengan pengetahuan kewirausahaan.	Mengurangi kebiasaan memalak dan membullying antar peserta didik di lingkungan sekolah dan Mengajak peserta didik untuk bergabung pada kegiatan Tettere dengan ikut membuat suatu karya baik berupa makan, minuman dan kerajinan tangan serta meningkatkan solidaritas, percaya diri, dan tanggung jawab	Peserta didik akan lebih termotivasi untuk datang ke sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, serta mencapai potensi mereka secara penuh dan meningkatan Keterampilan Berpikir Kritis dan Problem Solving: Entrepreneurship melibatkan analisis situasi,
77	BACAI LiDiTa (Barcode Cari Informasi melalui Literasi Digital Tanaman)	UPT SPF SMPN 40	Barcode adalah sistem pengidentifikasian suatu produk atau item dengan menggunakan kode-kode bar vertikal yang dapat dipindai oleh pembaca barcode. Cara menggunakan barcode sangat mudah, yaitu Memiliki perangkat pembaca barcode, seperti scanner barcode atau smartphone yang memiliki fitur scan barcode, Mengakses informasi melalui sorotan Google Lens, Memindai atau mengarahkan scanner atau kamera smartphone ke	Memudahkan peserta didik mendapatkan informasi tanaman terkait dengan tugasnya di kelas dan memudahkan meng-update jumlah spesies tanaman yang ada di sekolah sehingga biodiversitas tetap terjaga	Peserta didik mudah mendapat informasi lengkap tanpa harus ke perpustakaan dan dengan menggunakan barcode pada media pembelajaran, seperti buku pelajaran atau poster, peserta didik dapat mengakses informasi tambahan secara interaktif, seperti gambar, video, atau teks terkait tanaman yang sedang dipelajari, sehingga dapat meningkatkan pengalaman belajar interaktif dan

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI	URAIAN SINGKAT	TUJUAN	DAMPAK
			barcode pada produk atau item yang ingin diidentifikasi. Setelah scanner atau kamera smartphone berhasil membaca barcode, kode-kode bar akan diuraikan dan muncul pada layar perangkat pembaca barcode.	serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi data. Barcode memungkinkan data diinput dengan cepat dan akurat, sehingga dapat mempercepat proses administrasi seperti absensi, peminjaman buku perpustakaan, dan pembayaran uang sekolah.	memperkaya materi pelajaran.

BAB 3

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjabarkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah Kota Makassar sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah memuat uraian mengenai arah kebijakan ekonomi secara nasional, provinsi, dan kota, indikator makro ekonomi serta kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kerangka ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan daerah, serta menjadi rujukan dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

III.1. Arah Kebijakan Ekonomi

III.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2026 menjadi pedoman utama dalam menyelaraskan rencana pembangunan daerah, termasuk dalam perumusan prioritas pembangunan, penetapan sasaran pembangunan ekonomi, serta perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan daerah. Penyusunan arah kebijakan nasional tersebut dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down, guna memastikan respons terhadap dinamika global dan tantangan struktural domestik.

Menghadapi ketidakpastian global serta kebutuhan mendesak untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2026 yang difokuskan pada upaya mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”, sebagai pilar utama menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan melalui delapan (8) strategi pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam dokumen Asta Cita, yaitu:

1. Ketahanan Pangan, melalui transformasi sektor pertanian dengan mekanisasi dan digitalisasi, pembangunan infrastruktur irigasi dan lumbung pangan, diversifikasi pangan lokal, serta penguatan cadangan dan stabilisasi harga.
2. Ketahanan Energi, melalui percepatan transisi energi baru dan terbarukan (EBT), peningkatan investasi energi bersih, penguatan jaringan listrik pedesaan, serta reformasi tata kelola subsidi energi.
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui integrasi dukungan logistik dan pengadaan bahan pangan lokal untuk sekolah, yang sekaligus menggerakkan sektor pertanian dan UMKM pangan lokal.
4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, melalui peningkatan anggaran pendidikan, reformasi kurikulum vokasi, digitalisasi pembelajaran, dan insentif investasi pendidikan teknologi.
5. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, terutama di daerah tertinggal, serta penguatan belanja kesehatan, infrastruktur layanan dasar, dan industri farmasi dalam negeri.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM, melalui peningkatan dana desa, digitalisasi dan pembiayaan usaha mikro, serta penyederhanaan regulasi untuk mendorong ekosistem wirausaha lokal.

7. Pertahanan Semesta, melalui industrialisasi pertahanan nasional, peningkatan belanja pertahanan strategis, serta riset teknologi pertahanan.
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global, melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, optimalisasi perjanjian perdagangan internasional, serta fasilitasi ekspor UMKM dan produk unggulan lokal.

Selaras dengan strategi jangka panjang tersebut, pemerintah juga menetapkan strategi jangka pendek tahun 2026 yang diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan stabilitas fiskal nasional. Strategi ini mencakup:

- Stabilisasi ekonomi, melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan kolaborasi fiskal-moneter untuk menjaga keseimbangan makroekonomi;
- Perlindungan terhadap dunia usaha dan daya beli masyarakat, dengan pemberian insentif fiskal, reformasi ekonomi, serta penguatan program perlindungan sosial;
- Menjaga kesehatan APBN, melalui efisiensi belanja, pengendalian defisit, dan penguatan cadangan fiskal untuk menjaga fleksibilitas fiskal.

Untuk memastikan keterukuran arah kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan sasaran makro ekonomi nasional tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,2% – 5,8%, yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan program strategis pemerintah;
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan menuju rentang 6,5% – 7,5%, melalui penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke rentang 4,44% – 4,96%, seiring peningkatan kesempatan kerja dan investasi;
4. Perbaikan Rasio Gini menjadi 0,377 – 0,380, sebagai upaya pengurangan kesenjangan dan mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi pembangunan yang merata.

Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2026 tidak hanya bersifat responsif terhadap tantangan global dan domestik, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi rujukan penting dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah, termasuk Kota Makassar, agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

III.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dirancang sebagai respons atas dinamika pembangunan daerah dan tantangan global, nasional, serta regional yang semakin kompleks. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menitikberatkan arah kebijakan ekonominya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak, serta penguatan infrastruktur berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan tangguh terhadap berbagai risiko.

Kebijakan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2024–2029, dan menjadi dasar penting dalam sinergi pembangunan lintas wilayah, termasuk Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama. Fokus utama dari arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 meliputi:

1. **Hilirisasi Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau dan Biru**

   Provinsi Sulawesi Selatan mendorong transformasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui pendekatan hilirisasi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah. Tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi primer, hilirisasi juga

mencakup pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran produk, guna memperkuat ketahanan pangan serta menjadikan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan (ekonomi hijau) dan ekosistem pesisir serta laut (ekonomi biru).

2. **Penguatan Ekonomi dan Fiskal Daerah yang Modern dan Kompetitif**
   Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong digitalisasi ekonomi melalui penguatan UMKM digital, e-commerce, dan sistem perpajakan berbasis teknologi. Selain itu, dilakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi layanan pajak dan retribusi, peningkatan tata kelola APBD secara efisien dan transparan, serta pemberian insentif fiskal strategis untuk menarik investasi lokal dan asing.
3. **Pengembangan Ekonomi Perdesaan dan Wilayah Terpencil**
   Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal, pengembangan usaha mikro dan koperasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi produktif di wilayah dengan akses terbatas. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan wilayah, menurunkan tingkat pengangguran, serta menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
4. **Peningkatan Infrastruktur dan Transportasi yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan**
   Pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara secara terintegrasi diupayakan untuk memperlancar arus barang dan jasa antarwilayah. Investasi diarahkan pada proyek-proyek padat karya yang mendukung pemulihan ekonomi, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di tengah pertumbuhan ekonomi.
5. **Penguatan Mitigasi Risiko dan Ketahanan terhadap Bencana**
   Dalam menghadapi berbagai risiko bencana alam maupun non-alam seperti banjir, gempa bumi, pandemi, dan krisis iklim, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif terhadap aspek ketahanan dan mitigasi risiko. Ini dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan bencana, pembangunan infrastruktur tangguh, penguatan UMKM pasca-bencana, serta diversifikasi ekonomi lokal sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dengan kebijakan ekonomi yang adaptif dan berbasis keberlanjutan ini, Provinsi Sulawesi Selatan berupaya menciptakan sinergi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota. Kota Makassar, sebagai simpul utama pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, diharapkan mampu berperan strategis dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing di tahun 2026.

III.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029. Pada tahap ini, kebijakan pembangunan ekonomi Kota Makassar diarahkan untuk mendorong percepatan penyediaan sarana dan prasarana publik serta peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ekonomi disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Makassar serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan utama pembangunan daerah. Dalam perumusannya, arah kebijakan ekonomi Kota Makassar juga mempertimbangkan dinamika ekonomi global, nasional, dan regional, dengan fokus

pada penguatan struktur ekonomi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penyediaan infrastruktur sosial ekonomi yang memadai.

Untuk menjamin kesinambungan pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kota Makassar Tahun 2026 diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD Provinsi Tahun 2026. Selain itu, arah kebijakan ini menjadi bagian integral dari kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RPJPD Kota Makassar.

Dengan mempertimbangkan seluruh konteks tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Makassar Tahun 2026 difokuskan pada **"Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing Daerah"**. Fokus ini diwujudkan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Penguatan Ketahanan Air untuk Swasembada Pangan, Energi, dan Air.**
   Didorong melalui peningkatan akses air bersih bagi masyarakat, efisiensi pengelolaan air, serta pengembangan infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
2. **Peningkatan Kinerja Ketenagakerjaan dan Produktivitas Tenaga Kerja**
   Ditetapkan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pelindungan terhadap pekerja informal dan formal, khususnya pada sektor-sektor strategis.
3. **Penguatan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok**
   Dicapai melalui pengembangan distribusi pangan yang efisien, lumbung pangan daerah, dan perlindungan petani lokal untuk menjaga inflasi serta memastikan ketersediaan pangan secara merata.
4. **Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM melalui Transformasi Digital**
   Dengan mendorong adopsi teknologi digital, pengembangan ekosistem usaha kreatif, dan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
5. **Pemenuhan Target Realisasi Penanaman Modal dan Iklim Investasi yang Kompetitif**
   Melalui kemudahan perizinan, pemberian insentif, pembangunan infrastruktur investasi, serta promosi potensi unggulan Kota Makassar di tingkat nasional dan internasional.
6. **Peningkatan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan**
   Dilakukan dengan menerapkan prinsip ekonomi biru, pelestarian ekosistem pesisir, dan dukungan terhadap kesejahteraan nelayan melalui kebijakan afirmatif dan bantuan usaha produktif.
7. **Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Baru**
   Melalui penguatan SDM kreatif, penyediaan ruang kreatif, akses pembiayaan, dan kolaborasi pelaku industri kreatif, serta penguatan destinasi wisata berbasis budaya dan digitalisasi layanan wisata.
8. **Peningkatan Produksi Pertanian dengan Teknologi dan Ekonomi Hijau**
   Difokuskan pada intensifikasi pertanian, penggunaan teknologi pertanian modern, dan pendekatan ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
9. **Integrasi Perdagangan Domestik dan Global melalui Digitalisasi dan Infrastruktur Pasar**

Diperkuat melalui pengembangan kawasan industri terpadu, modernisasi pasar tradisional, dan pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas jangkauan pasar produk lokal.

Dengan mengimplementasikan arah kebijakan tersebut secara terintegrasi, Pemerintah Kota Makassar menargetkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

III.1.4. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

III.1.4.1. Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami perlambatan dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang ketat, kondisi keuangan yang terbatas, serta lesunya perdagangan dan investasi global. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi global diprediksi tetap stabil pada kisaran 2,7%. Sejumlah risiko negatif yang perlu diwaspadai antara lain masih berlangsungnya konflik di Timur Tengah, tekanan finansial yang berkepanjangan, inflasi yang persisten, disrupsi rantai pasok dagang, suku bunga perbankan yang tinggi, fragmentasi ekonomi dan keuangan, serta bencana alam terkait perubahan iklim. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan kerja sama global dalam upaya pemberian keringanan utang, fasilitasi integrasi perdagangan, mitigasi perubahan iklim, serta pengurangan kerawanan pangan. Di kalangan negara berkembang dan pasar negara berkembang (Emerging Market and Developing Economies/EMDEs), para eksportir komoditas masih berjuang menghadapi volatilitas kebijakan fiskal yang bersifat prosiklikal. Oleh karena itu, penerapan kebijakan makroekonomi dan struktural yang tepat, serta penguatan institusi yang efektif, menjadi kunci dalam mendorong investasi dan memperbaiki prospek ekonomi jangka panjang.

Pemulihan ekonomi global yang berlangsung saat ini cenderung melambat, yang disebabkan oleh kondisi keuangan yang semakin ketat, lemahnya pertumbuhan perdagangan, serta rendahnya tingkat optimisme di kalangan dunia usaha dan konsumen. Prospek jangka pendek masih menghadapi tantangan yang signifikan, seperti eskalasi ketegangan geopolitik akibat konflik Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel, dampak kebijakan moneter yang lebih ketat dari perkiraan sebelumnya, serta fenomena cuaca ekstrem.

Tingginya ketidakpastian ekonomi global semakin diperparah oleh fragmentasi geopolitik-ekonomi yang berkembang pesat terutama dengan kebijakan *America First* yang riskan berdampak negative bagi Indonesia, Perang Rusia di Ukraina telah memperburuk keterbatasan pasokan serta mempertahankan harga energi dan pangan pada level tinggi. Selain itu, ketegangan teritorial antara Laut Cina Selatan dan Taiwan turut berdampak negatif terhadap volume perdagangan global. Konflik Israel-Palestina yang tak kunjung usai menambah tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan dunia secara umum, sehingga memperlambat pemulihan ekonomi global dan mempertahankan tekanan inflasi. Kebijakan moneter yang ketat di berbagai negara maju, terutama Amerika Serikat, dengan suku bunga yang tinggi turut memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, meningkatnya utang pemerintah di negara maju untuk mendukung ekspansi fiskal semakin mendorong kenaikan suku bunga dan menguatnya dolar AS, yang pada akhirnya memicu arus modal keluar dari negara-negara berkembang.

Sejumlah tren utama yang akan mewarnai prospek ekonomi global ke depan perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat dan sinergis. Pertama, pertumbuhan ekonomi

global diproyeksikan tidak terlalu baik dengan perbedaan laju pertumbuhan antarnegara yang melebar. Kedua, resiko resesi di AS meningkat tetapi ekonomi masih dalam kisaran *soft landing* dengan melambatnya pertumbuhan pendapatan. Ketiga, arus modal keluar dari negara-negara EMDEs menuju negara maju dan aset likuid diprediksi berlanjut karena tingginya suku bunga di negara maju. Keempat, penguatan dolar AS yang berkelanjutan akan memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang negara-negara EMDEs. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, penguatan kebijakan ekonomi domestik menjadi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi global diprediksi stabil tetapi kurang baik, dengan tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan 3,2% pada 2025 dan kembali meningkat menjadi 3,3% pada 2026 seiring meredanya ketegangan geopolitik karena gencatan senjata. Negara maju diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,7% pada 2026. Sementara itu, negara-negara EMDEs diperkirakan akan tumbuh 3,3% pada 2025 dan tetap stagnan pada 2026. Di antara negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan turun menjadi 2% pada 2026 yang sebelumnya 2,8% pada 2025. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksikan bertumbuh menjadi 4,2% pada 2025 dan 5% pada 2026 akibat stimulus kilat dari negara pesaing dagang dan ledakan ekspor walaupun masih terdapat kontraksi pada investasi properti. Sebaliknya, India menunjukkan kinerja yang kuat dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 5,8% pada 2025 dan meningkat melebihi 6,0% pada 2026. Negara-negara ASEAN yang berkembang juga mencatat pertumbuhan yang stabil dengan kisaran 4% didukung oleh kebijakan perdagangan dan investasi yang tetap terbuka di tengah kondisi geopolitik yang terjadi.

Dalam konteks domestik, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan menunjukkan prospek yang positif di tengah tantangan global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,8-5,6% pada 2025 dan meningkat ke 4,9-5,7% pada 2026. Inflasi diharapkan tetap terkendali dalam kisaran target 2,5±1% didukung oleh sinergi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Juga diperkirakan pertumbuhan kredit bakal mengalami peningkatan dengan bergerak di kisaran 11—13 % pada 2025 dan 2026. Hal itu sejalan dengan stabilitas sistem keuangan yang diyakini bakal terjaga. Di samping itu juga, ekonomi keuangan digital diprediksi meningkat pesat dengan transaksi e-commerce, digital banking, dan uang elektronik bakal tumbuh tinggi. Prospek perekonomian daerah pada tahun 2026 diperkirakan akan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, seiring dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi domestik. Upaya diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi infrastruktur, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong inovasi serta digitalisasi di berbagai sektor akan semakin memperkuat daya saing perekonomian lokal dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Perekonomian Kota Makassar yang berperan sebagai penggerak utama ekonomi Sulawesi Selatan diprediksi memiliki prospek yang cukup baik pada tahun 2025, meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan strategis. Selama tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencatat perbaikan signifikan, naik dari 5,31 persen pada tahun 2023 menjadi 5,56 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi utama dari perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta industri pengolahan. Perkembangan ini mengindikasikan proses pemulihan ekonomi yang terus membaik

menandakan adanya penguatan sektor manufaktur dan hilirisasi industri sekaligus menjadi pijakan yang solid untuk proyeksi ekonomi ke depan.
Memasuki tahun 2025, Bank Indonesia Sulsel memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di jalur positif dengan proyeksi sebesar 5,62 persen pada sektor-sektor strategis seperti perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa keuangan.

III.1.4.2 Tantangan Perekonomian

A. Tantangan Perekonomian Global

Pada tahun 2026, perekonomian global diperkirakan akan menghadapi tantangan yang kompleks dan mengalami perlambatan. Ekonomi global sendiri merupakan suatu sistem yang melibatkan ketergantungan serta interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia, di mana aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pergerakan modal antarnegara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika global.

Gejolak ekonomi global disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, khususnya konflik antara Palestina dan Israel, serta ancaman perubahan iklim. Selain itu, perlambatan inflasi global diperkirakan akan terjadi akibat gangguan pada rantai pasok perdagangan yang berpotensi memperlemah perekonomian dunia di tahun mendatang. Menurut Kementerian Keuangan, beberapa faktor risiko yang harus diwaspadai mencakup ketidakpastian arah kebijakan suku bunga US Treasury, yang diperkirakan akan meningkat tajam hingga 5% pada tahun 2026, volatilitas harga komoditas, serta tingginya tingkat utang di berbagai negara. Perkembangan di pasar keuangan global juga diyakini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia.Meskipun ketidakpastian masih menyelimuti dinamika geopolitik, seperti konflik di Palestina-Israel dan kawasan Timur Tengah secara umum, terdapat secercah harapan bagi perekonomian global, khususnya di negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan pada kuartal pertama tahun 2025, dengan angka penurunan mencapai 5%. Meskipun demikian, kondisi ini dapat menciptakan momentum bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

Dari sisi kebijakan moneter dan fiskal, ketidakseimbangan dalam proses normalisasi kebijakan di berbagai negara sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang tinggi dan upaya pengurangan defisit anggaran fiskal telah menyebabkan ketatnya likuiditas global. Beberapa bank sentral, seperti Bank Sentral Korea, Rusia, dan Selandia Baru, telah menaikkan suku bunga kebijakan mereka sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi serta munculnya indikasi risiko terhadap stabilitas keuangan.Tantangan global yang menjadi perhatian utama meliputi perubahan dinamika geopolitik, konflik di kawasan Timur Tengah (Palestina-Israel & Iran-Israel) dan ketegangan di Laut Cina Selatan-Taiwan, perang dagang antara China dan AS, pesatnya perkembangan teknologi digital, pertumbuhan sektor ritel daring, perubahan iklim, normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara-negara maju, serta ketidakpastian pasar keuangan global dampak dari peningkatan tarif ekspor impor yang belum mereda. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemimpin baru di Amerika Serikat, perluasan sistem pembayaran digital lintas negara, risiko terkait aset kripto, kebijakan tax cut, tuntutan akan ekonomi keuangan hijau, serta meningkatnya kesenjangan sosial yang membutuhkan inklusi keuangan juga menjadi faktor penting yang harus diantisipasi.
Sebagai prioritas utama, upaya untuk menghidupkan kembali perdagangan global harus terus digalakkan, mengingat peranannya yang krusial dalam mendorong kemakmuran jangka menengah hingga panjang bagi negara-negara maju maupun berkembang. Di

samping itu, peningkatan kerja sama internasional dan multilateral diperlukan untuk memastikan koordinasi yang lebih baik serta mempercepat proses pemulihan ekonomi global secara berkelanjutan.

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Tantangan perekonomian nasional diwarnai dengan eskalasi ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah, khususnya konflik antara Palestina dan Israel, serta ketegangan di Laut Cina Selatan dan Taiwan, ditambah dengan perang dagang antara China dan Amerika Serikat, menimbulkan risiko signifikan bagi Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor ekonomi. Situasi ini menuntut evaluasi ulang terhadap strategi kebijakan ekonomi dan keuangan nasional. Para pelaku usaha dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam dalam mencermati dinamika global guna mengantisipasi dampaknya terhadap dunia usaha secara umum, khususnya pada sektor energi, pangan, dan perdagangan.Tantangan ekonomi nasional memiliki peranan krusial dalam menentukan prospek pertumbuhan Indonesia pada tahun 2026 yang ditargetkan berada di 6,3%, meskipun Presiden terpilih menargetkan pertumbuhan hingga 8%. Fokus utama dalam mendukung pertumbuhan ini adalah optimalisasi faktor domestik, mengingat estimasi perlambatan permintaan global pada tahun 2025. Meskipun belanja fiskal yang tinggi selama tahun pemilu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terdapat kekhawatiran bahwa berlanjutnya kebijakan belanja fiskal yang agresif dapat memperlambat laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun berikutnya. Selanjutnya, kebijakan moneter yang kondusif menjadi perhatian penting. Stabilitas inflasi domestik dan meredanya tekanan di pasar keuangan Indonesia membuka peluang bagi penerapan kebijakan moneter yang lebih akomodatif pada tahun 2025. Namun demikian, ketidakpastian terkait fluktuasi suku bunga global tetap menjadi faktor yang mengharuskan Bank Indonesia untuk tetap waspada.

Tantangan lain terletak pada sektor perdagangan dan investasi. Meskipun Indonesia mampu mempertahankan surplus perdagangan, proyeksi harga komoditas yang tinggi, pertumbuhan permintaan domestik yang kuat, serta kinerja investasi yang solid berpotensi menyebabkan defisit transaksi berjalan sebesar 0,5% dari PDB pada tahun mendatang. Beberapa kebijakan seperti penghapusan piutang macet, program pemberian makan gratis, serta kebijakan tarif listrik diharapkan dapat merangsang investasi di sektor pangan, perdagangan, industri, properti, dan konsumsi. Dari sisi ekspor, pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2026 diproyeksikan meningkat sebesar 7,09%. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi positif di negara mitra dagang, berlanjutnya hambatan rantai pasok global, kenaikan harga komoditas, serta ketegangan geopolitik di Eropa Timur yang berpotensi mengganggu stabilitas supply-demand komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Ketergantungan terhadap pasar ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian tersendiri. Meskipun ekspor telah lama menjadi andalan, penurunan harga komoditas telah berdampak pada terms of trade Indonesia. Oleh karena itu, diversifikasi ekspor menjadi strategi yang semakin penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu. Pergeseran paradigma ini diharapkan dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional di masa depan. Namun, pada tahun 2026, ekspor beberapa komoditas Indonesia diperkirakan masih menghadapi hambatan di beberapa negara akibat isu lingkungan dan lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara tujuan. Kinerja ekspor non-komoditas juga menghadapi berbagai tantangan domestik, seperti isu produktivitas dan daya saing,

akses bahan baku domestik dan impor, inovasi, akses pembiayaan dan investasi, serta akses pasar yang belum optimal. Tantangan ekonomi nasional lainnya mencakup pemulihan ekonomi global yang tidak merata, tingkat produktivitas yang masih perlu ditingkatkan, akselerasi ekonomi dan keuangan digital, kebutuhan inklusi ekonomi dan keuangan yang semakin nyata, serta dorongan implementasi ekonomi hijau.

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja, mengingat jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Upaya penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui berbagai program yang telah dicanangkan, termasuk peningkatan kualitas kesehatan sumber daya manusia. Dalam menghadapi tantangan yang ada, penguatan ketahanan ekonomi menjadi hal yang esensial. Upaya ini mencakup diversifikasi ekonomi, penguatan sektor riil, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Selain itu, dorongan terhadap inovasi dan kewirausahaan perlu terus dilakukan guna menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Kerja sama internasional juga harus diperkuat untuk memperkokoh tata kelola ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

C. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan positif tercatat sebesar 5,78% (yoy). Pertumbuhan ini dipacu oleh PDRB dari industry pengolahan dan perdagangan besar serta eceran yang tetap tinggi. Walaupun pencapaian tahun lalu rendah karena dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem yang sangat mempengaruhi pertanian Sulawesi Selatan. Hantaman banjir di awal tahun dan *La Nina* yang berkepanjangan membuat sejumlah produksi pertanian mengalami penurunan produksi seperti produksi padi yang menurun di beberapa kabupaten hingga harga perikanan yang anjlok akibat faktor cuaca. Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) diprediksi akan menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang signifikan pada tahun 2026, yang dapat diidentifikasi berdasarkan situasi dan tren perekonomian pada tahun 2024 dan 2025. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan yang masih tinggi pada sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, fluktuasi harga komoditas global dan dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, atau cuaca ekstrem, dapat mengancam stabilitas pertumbuhan ekonomi. Tantangan lain yang mungkin dihadapi adalah rendahnya daya saing daerah dan minimnya investasi swasta maupun asing. Jika pada tahun 2024 dan 2025 iklim investasi belum membaik akibat regulasi yang rumit atau kurangnya insentif fiskal, Sulsel berisiko kehilangan peluang untuk menarik modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2026, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan pemberian insentif yang menarik bagi investor. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi era digital dan revolusi industri 5.0. Dari sisi penawaran, gejolak ekonomi Sulawesi Selatan terutama dikontribusi oleh normalisasi pertumbuhan pada lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meski melambat, kinerja ekonomi Sulawesi Selatan tetap kuat ditopang oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi, serta Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Ekonomi Sulsel pada tahun 2024 tumbuh pada sebesar 5,02%, atau masih sedikit dibawah capaian nasional, maka pada tahun 2025 ekonomi Sulawesi Selatan diperkirakan tumbuh sebesar 5,50 - 6,30%. Inflasi tahunan laporan utamanya disumbang oleh Kelompok Transportasi, khususnya pada komoditas bensin dan angkutan udara, sebagai dampak dari kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak dan mobilitas yang meningkat pada momen Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama pada komoditas telur ayam ras, beras, dan cabai. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras. Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sulsel tahun 2024 diangka 1,23% (yoy) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,69 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,86 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,28 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,95 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,66 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,39 persen. Adapun kelompok transportasi; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,28 persen. Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulsel. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui implementasi berbagai program yang mengacu pada kerangka strategi 4K (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Koordinasi TPID dan penyelenggaraan GNPIP diprakirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi dan mewaspadai deflasi di tahun berjalan.

D. Tantangan Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah tergambar dari perkembangan kondisi ekonomi daerah Kota Makassar pada beberapa aspek yang akan dianalisa yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan perkapita, tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan inflasi daerah. Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah tersebut:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan. Namun demikian yang secara rutin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penghitungan dari sisi produksi dan pengeluaran/penggunaan.

Tabel III.1
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

No	Kategori/Subkategori	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	840,92	905,36	1.007,22	998,21	985,21
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kategori/Subkategori	2020	2021	2022	2023	2024*
3	Industri Pengolahan	31.925,72	34.200,06	38.892,74	42.720,21	46.173,31
4	Pengadaan Listrik & Gas	51,90	57,15	63,19	69,81	70,61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	323,62	341,52	368,88	379,15	398,27
6	Konstruksi	33.290,65	36.131,95	38.870,36	41.301,43	42.033,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	34.983,12	37.753,71	41.997,95	45.443,61	48.680,75
8	Transportasi dan Pergudangan	3.928,66	4.323,53	5.480,41	6.565,49	7.226,86
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3.292,66	3.407,19	4.233,26	4.863,29	5.294,28
10	Informasi & komunikasi	17.944,24	19.207,64	20.159,26	22.206,26	23.881,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.592,32	10.636,61	11.514,82	12.331,65	13.711,98
12	Real Estate	6.425,25	6.628,57	7.088,39	7.527,68	8.076,84
13	Jasa Perusahaan	1.957,20	2.104,35	2.513,01	2.857,30	3.131,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6.193,19	6.516,96	6.733,07	7.333,21	7.506,25
15	Jasa Pendidikan	16.337,46	16.859,34	17.439,13	18.260,20	19.574,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.813.675,50	6.387.493,46	7.054.410,76	7.772,84	9.033,62
17	Jasa lainnya	4.432.414,20	4.856.616,65	5.519.697,75	6.272,45	7.283,59
PDRB		**178.332,99**	**190.318,07**	**208.935,79**	**226.902,79**	**243.062,72**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025

Memperhatikan Tabel III.1, merupakan penyajian PDRB (ADHB), dimana PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan. Adapun beberapa lapangan usaha yang bertumbuh positif pada tahun 2024 dari tahun 2023 yakni: lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha industry pengolahan, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, dan jasa kesehatan.

Melihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar, terdapat 3 lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar pembentukan PDRB (ADHB) Kota Makassar yakni; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha industri pengolahan, dan lapangan usaha konstruksi. Besarnya konstribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2024 yakni: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (20,03 persen) atau sebesar 48.680,75 Milyar , industri pengolahan (19 persen) atau sebesar 46.173,31 milyar, dan konstruksi (17,29 persen) atau sebesar 42.033,92 milyar. Sedangan sektor lainnya hanya menyumbang kurang dari 10 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar

Selanjutnya, jika dilihat hasil perhitungan PDRB dengan menggunakan harga konstan (PDRB-ADHK), nampak PDRB-ADHK Kota Makassar Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan ini pada tahun 2022 ke tahun 2024 mengalami peningkatan yang positif masing-masing sebesar 133.132,60 milyar, 140.197,90 milyar, dan 147.989,20 milyar.

Peningkatan nilai PDRB-ADHK selama tahun 2023 dan 2024 terindikasi disebabkan oleh peningkatan kinerja ekonomi di enam sektor yang paling dominan, yakni (1) sektor perdagangan besar, dan eceran; (2) industri pengolahan (Kawsaan Industri Makassar); (3) sektor konstruksi; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) sektor jasa pendidikan; (6) sektor jada kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel III.2
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020 – 2024

No	Kategori/Subkategori	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	508,93	518,31	532,42	537,80	564,16
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	21.767,90	22.678,92	24.726,64	25.610,98	26.839,53
4	Pengadaan Listrik & Gas	51,52	54,00	58,66	61,22	61,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	236,02	244,66	256,92	261,23	274,39
6	Konstruksi	20.232,80	21.101,29	21.371,12	22.025,08	22.256,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	23.777,63	25.119,55	26.747,84	28.032,66	29.532,42
8	Transportasi dan Pergudangan	2.476,09	2.641,16	3.138,09	3.470,42	3.687,61
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2.284,79	2.326,30	2.791,54	3.138,85	3.346,79
10	Informasi & komunikasi	16.487,16	17.525,17	18.129,79	19.770,53	21.104,45
11	Jasa Keuangan & Asuransi	6.482,79	6.282,85	6.290,56	6.535,93	7.122,77
12	Real Estate	3.838,84	3.949,18	4.100,56	4.290,01	4.516,17
13	Jasa Perusahaan	1.200,58	1.266,83	1.447,45	1.582,64	1.700,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.754,75	3.917,66	4.016,18	4.311,62	4.307,36
15	Jasa Pendidikan	11.302,84	11.695,48	11.881,44	12.224,81	13.130,23
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.680,34	3.952,68	4.323,44	4.676,24	5.321,21
17	Jasa lainnya	2.822,79	3.038,78	3.319,95	3.667,88	4.223,27
PDRB		**120.905,75**	**126.312,83**	**133.132,60**	**140.197,90**	**147.989,20**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025

PDRB Kota Makassar sebagaimana yang telah diuraikan pada gambaran PDRB-ADHB pada Tabel III.1, terlihat bahwa dari 17 jenis lapangan usaha, terdapat 3 lapangan usaha yang memberikan kontribusi cukup besar. Ketiga lapangan usaha tersebut yakni; Pertama, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kedua, Industri Pengolahan; dan Ketiga, Konstruksi. Sedangkan 14 (empat belas) lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi kurang dari 10% pada tahun 2024. Oleh karena itu prioritas kebijakan harus diarahkan pada kebijakan yang terkait dengan sektor-sektor dominan tanpa mengabaikan sektor lainnya.

Jika nilai tambah masing-masing sektor mengalami kenaikan yang signifikan, maka pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan meningkat dan akibatnya juga akan dirasakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi karena roda kegiatan ekonomi

bertumpu di Kota Makassar. Pada tahun 2024, nilai tambah lapangan usaha pembentuk PDRB-ADHK mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan pemerintah baik dari sisi fiskal maupun kebijakan lainnya yang mendorong pelaku-pelaku bisnis, startup baru termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mengoperasionalkan usahanya. Sektor-sektor ekonomi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pedagang besar dan eceran di berbagai lapangan usaha diprediksikan semakin berkembang yang selanjutnya berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 begitu pula sektor sektor tersebut tetap memberikan kontribusi yang signifikan di tahun 2026. Dilihat dari segi demanding, permintaan sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, maupun sektor luar negeri mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2024. Dengan demikian, dari sisi supply prediksi nilai PDRB-ADHK meningkat dan masih disumbangkan oleh ketiga lapangan usaha tersebut, menyusul lapangan usaha informasi dan komunikasi. Dari sisi demand, peran pemerintah dan sektor rumah tangga diprediksikan sebagai kontributor PDRB-ADHK dalam upaya memacu peningkatan makro ekonomi kea rah yang lebih baik di tahun tahun berikutnya.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar terus berkembang secara positif dan signifikan, dimana terdapat empat sektor yang dominan untuk menopang perekonomian Makassar mulai dari sektor trading, jasa, properti, hingga konstruksi. Kota Makassar menjadi salah satu kota dengan pergerakan paling dinamis di Indonesia, baik secara regional maupun nasional. Tahun 2020 menjadi titik kelam pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada pada angka -1,27 persen tetapi di akhir tahun 2021 pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan yang cukup baik bagi Kota Makassar yaitu pada angka 4,47 persen. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perekonomian Kota Makassar tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian nasional yang hanya tumbuh sebesar 3,69 persen dan lebih lambat dibandingkan perekonomian Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 4,65 persen. Capaian tersebut berlanjut pada tahun 2022, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,40 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen dan Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 5,10 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2020 – 2024, perkiraan 2025 dan target 2026 selengkapnya dapat dilihat pada Grafik III.1

Grafik III.1
Pertumbuhan Ekonomi Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024, Perkiraan 2025, Target 2026

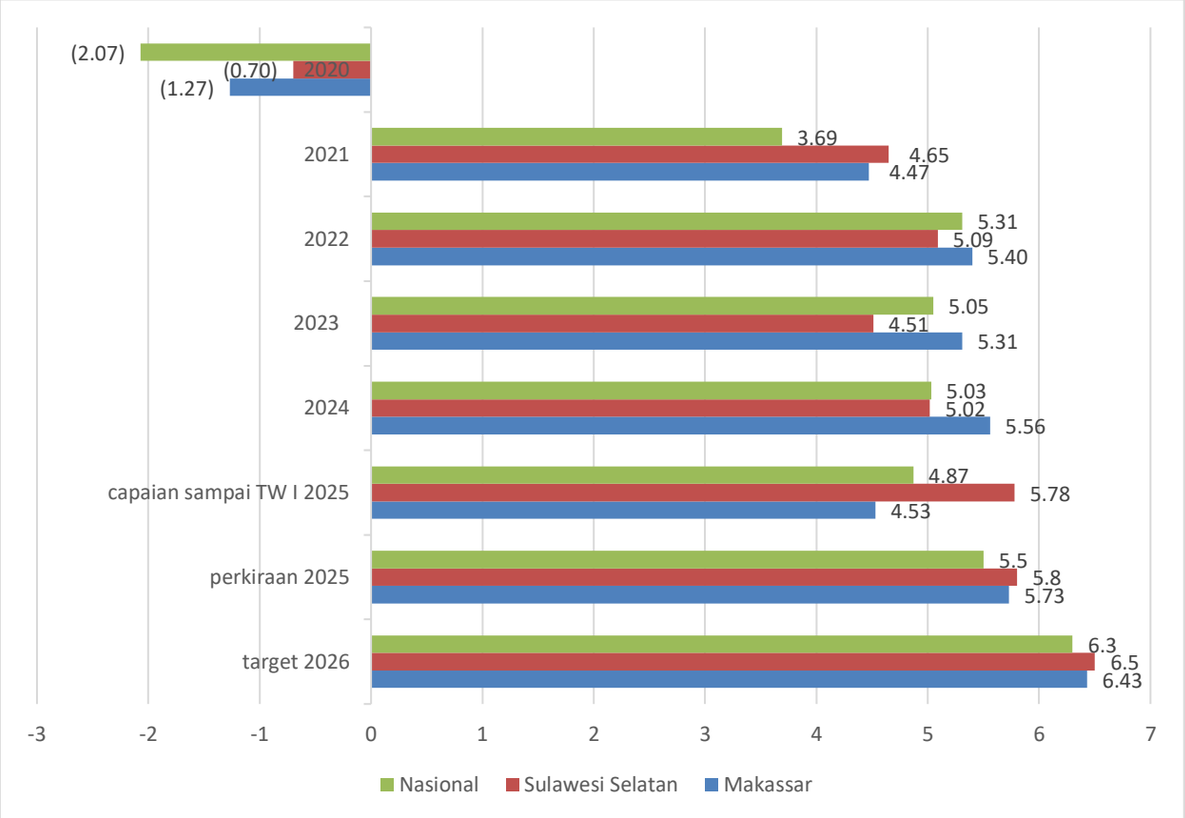

Sumber : BPS dan diolah oleh Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025

Berdasarkan data pada Grafik III.1, nampak bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selama lima tahun terakhir, secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah baik dalam bentuk fiskal maupun kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Makassar melalui program nyata yang berbasis masyarakat dalam bentuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan digitalisasi ekonomi maupun pengembangan Lorong wisata. Program pelatihan skill training gratis di berbagai sektor, seperti UMKM, koperasi, dan perindustrian, berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta mempercepat pertumbuhan usaha lokal. Selain itu, investasi di bidang infrastruktur dan konektivitas, termasuk pengembangan jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik, turut menarik minat investor dan mempercepat pertumbuhan sektor konstruksi. Beberapa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMK dan mendorong distribusi pendapatan ke kelas menengah ke bawah.

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen, tetapi lebih tinggi dibandingkan capaian Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 4,51 persen dan 5,05 persen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca yang ekstrem seperti El Nino (kemarau panjang) yang terjadi selama tahun 2023 sangat berpengaruh terhadap produksi pertanian yang berdampak pada peningkatan nilai tambah lapangan usaha Industri Pengolahan maupun lapangan usaha Perdagangan di Kota Makassar, sehingga pertumbuhan ekonomi pada kategori lapangan usaha tersebut mengalami perlambatan.

Sejalan dengan tahun 2024, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tumbuh dari 5,31% menjadi 5,56% didorong oleh berbagai faktor strategis. Salah satu pendorong utama adalah meningkatnya aktivitas sektor perdagangan dan jasa, yang menjadi tulang punggung ekonomi kota. Peningkatan daya beli masyarakat serta berkembangnya industri akomodasi dan penyediaan makanan minuman turut memperkuat sektor ini. Selain itu, sektor pariwisata dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) juga mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan semakin banyaknya event nasional dan internasional yang diselenggarakan di Makassar, yang berdampak langsung pada sektor transportasi, hotel, dan restoran. Memasuki tahun 2025 pada triwulan I pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 4,53%, diikuti dengan Provinsi Sulawesi Selatan 5,78% dan capaian Nasional sebesar 4,87%. Maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sepanjang tahun 2025 sebesar 5,73%. Begitu pula diproyeksikan optimis melesat pada tahun 2026 sebesar 6,43%. Hal ini didasarkan pada kondisi ekonomi kota Makassar melesat maju, sehingga sektor-sektor penggerak ekonomi kota Makassar juga diharapkan ikut bergerak secara impresif.

Di sisi lain, nampak (Grafik III.1) ada kecenderungan tinggi rendahnya angka pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dari tahun 2020-2024 berkorelasi positif dengan tinggi rendahnya angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia secara nasional. Hal ini memberi indikasi, bahwa perekonomian Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh perekonomian dalam skala makro, baik secara sektoral maupun secara regional. Terutama karena perekonomian Kota Makassar berbasis sektor perdagangan dan sektor jasa di mana sektor tersebut sangat tergantung pada permintaan sektor primer.

b. Pendapatan (PDRB) Per Kapita

Dalam literatur ekonomi, pendapatan per kapita digunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi produktivitas ekonomi suatu wilayah atau negara dengan cara membagi total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Metode ini memberikan gambaran tentang seberapa besar produksi ekonomi yang dihasilkan per individu dalam suatu wilayah, sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan antar wilayah atau negara dengan jumlah populasi yang berbeda. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan relatif penduduknya. Negara dengan pendapatan per kapita rendah umumnya memiliki standar hidup mayoritas penduduk yang rendah, dan sebaliknya. Perhitungan pendapatan per kapita merupakan rasio antara nilai PDRB dan jumlah penduduk, yang hasilnya menunjukkan rata-rata pendapatan setiap orang dalam perekonomian. Meskipun indikator ini digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan per orang, ia tidak mencerminkan pendapatan riil setiap individu dalam suatu perekonomian, dan yang lebih penting, tidak menggambarkan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Pendapatan per kapita atau PDRB per kapita mencerminkan seberapa besar nilai produksi ekonomi suatu daerah terkait dengan setiap penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran atau kekayaan suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin tinggi pula kemakmuran masyarakat di daerah tersebut.

Sementara itu, PDRB per kapita Kota Makassar diproyeksikan optimis mencapai Rp 175,46 juta pada tahun 2025, dengan asumsi bahwa setiap penduduk Kota Makassar secara ekonomi mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita setiap tahunnya. Sementara itu, target tahun 2026 ditetapkan pada angka Rp 186,75 juta berdsarakan hasil kesepakatan rakortek dengan provinsi Sulawesi Selatan. Namun,

berdasarkan capaian PDRB per kapita menurut harga berlaku (ADHB), pada tahun 2024 nilai PDRB per kapita telah mencapai Rp 165,95 juta. Angka ini melebihi nilai PDRB per kapita yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Makassar, yang mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Makassar telah mengalami perbaikan

Grafik III.2
Pendapatan Per Kapita Kota Makassar
Capaian 2024, Perkiraan Tahun 2025, dan Target 2026

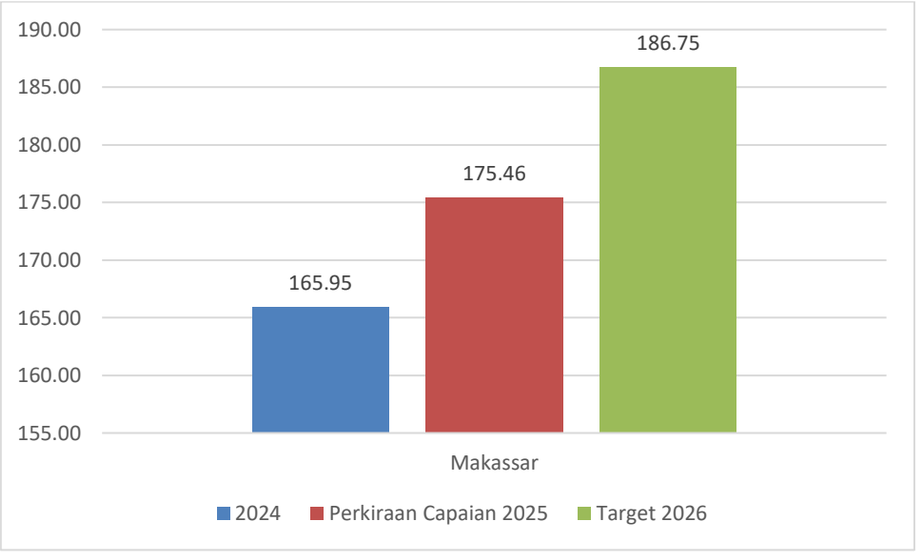

Sumber : BPS Kota Makassar dan diolah oleh Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025

c. Tingkat Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator ekonomi yang sangat krusial karena memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat. Di daerah yang mengalami kenaikan harga barang dan jasa yang tinggi, daya beli dapat tertekan, sehingga permintaan terhadap output pun menurun. Selain itu, inflasi juga berhubungan dengan tingkat kemiskinan, karena dalam menetapkan garis kemiskinan, inflasi menjadi variabel utama yang dipertimbangkan. Hal ini berarti, inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Secara umum, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu sebuah indeks yang menghitung harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Oleh karena itu, perubahan IHK dari waktu ke waktu mencerminkan pergerakan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa yang masuk dalam keranjang IHK didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar III.3
Perkembangan Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024, Realisasi TW I 2025 , Target 2026

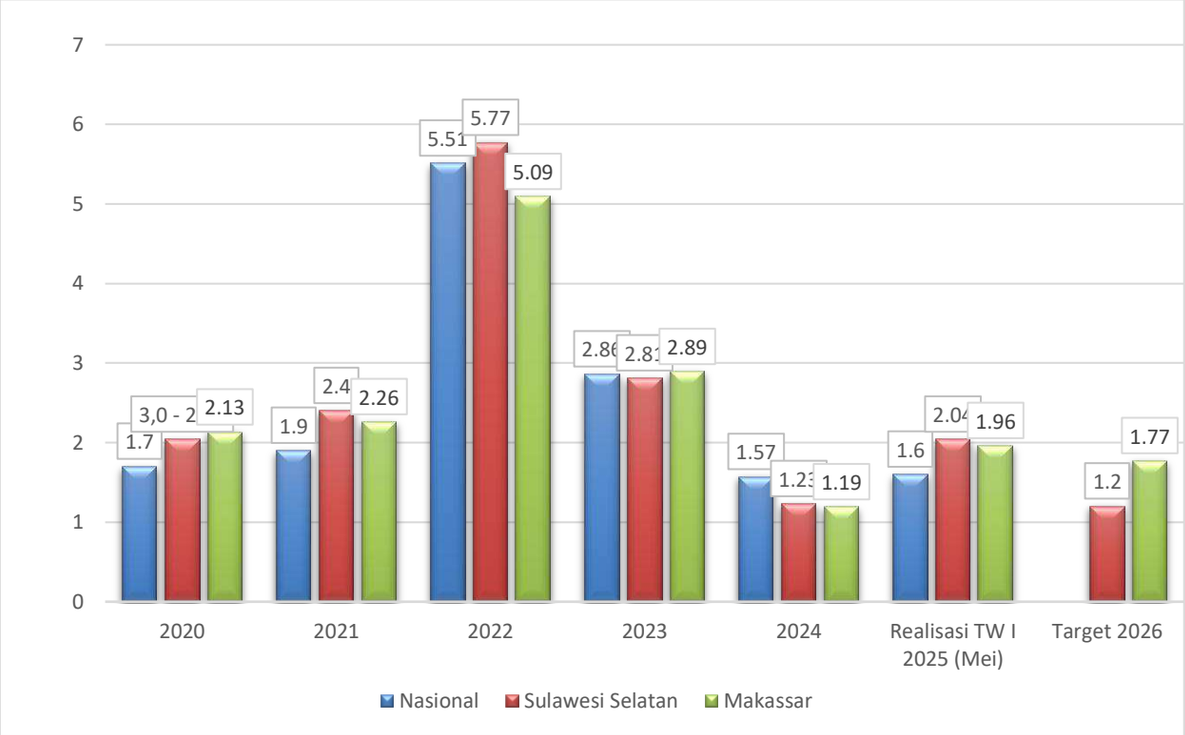

Sumber : BPS Kota Makassar dan diolah oleh Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan inflasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Nasional selama periode 2020-2024. Inflasi mengalami fluktuasi signifikan, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 5,51% secara nasional, 5,77% di Sulawesi Selatan, dan 5,09% di Kota Makassar. Setelah tahun 2022, inflasi mulai menurun secara bertahap hingga pada tahun 2024, dengan inflasi nasional 1,57%, Sulawesi Selatan 1,23%, dan Kota Makassar 1,19%. Berdasarkan perhitungan IHK pada triwulan I tahun 2025, Inflasi Kota Makassar mencapai 1,96% sampai dengan bulan Mei 2025. Dan dari data tersebut angka Inflasi diperkirakan menurun mencapai 1,52% di penutup tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai 1,77% pada tahun 2026 dimana hal tersebut didasarkan pada asumsi dari segi kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Negara dan Kepala Daerah yang baru terkait sirkulasi perekonomian. Kondisi demikian akan mendorong meningkatnya permintaan barang/jasa pada beberapa aktivitas ekonomi, seperti transportasi, akomodasi, penyediaan makan dan minum. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah harus menjaga ketersediaan stock barang/jasa yang menjadi pemicu inflasi sehingga harga tetap terkendali.

Secara teoritis, inflasi dapat terjadi karena kelebihan permintaan di atas penawaran (demand full inflation), dan atau terjadinya pembengkakan biaya produksi, sehingga mendorong peningkatan harga-harga umum (cost push inflaton). Dengan demikian Pemerintah Kota Makassar perlu menjaga kestabilan kapasitas produksi sekaligus biaya produksi dan memperhatikan kelancaran distribusi barang dari daerah penyangga, sehingga inflasi di Kota Makassar dapat dikendalikan. Berikut juga disajikan perkiraan capaian dan proyeksi Tingkat Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Nasional

Grafik III.4
Tingkat Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024, Realisasi TW I 2025, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026

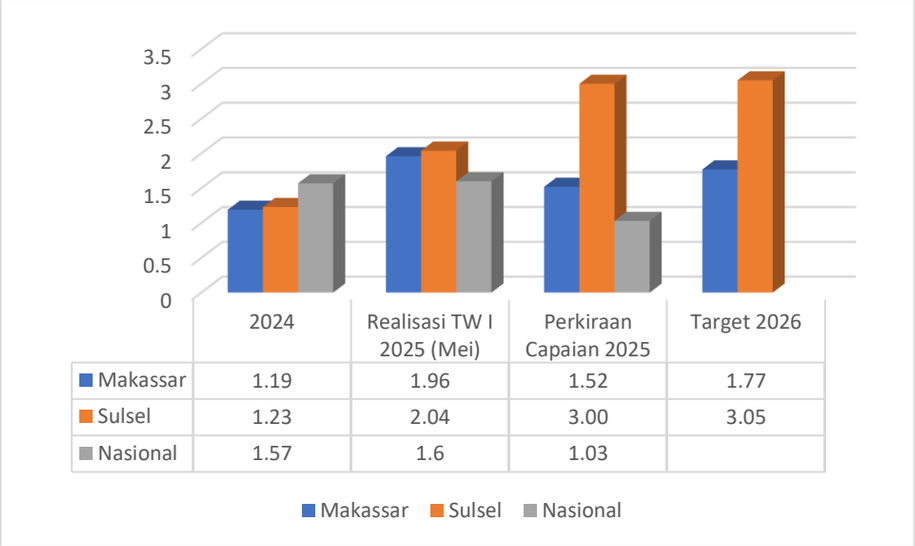

	2024	Realisasi TW I 2025 (Mei)	Perkiraan Capaian 2025	Target 2026
Makassar	1.19	1.96	1.52	1.77
Sulsel	1.23	2.04	3.00	3.05
Nasional	1.57	1.6	1.03	

Sumber : BPS Kota Makassar dan diolah oleh Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting yang menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Pengangguran terbuka mencakup mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha, individu yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Faktor ekonomi memberikan kontribusi signifikan terhadap TPT, mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi dan penciptaan lapangan kerja, kondisi upah dan produktivitas, serta tingkat inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi pasar tenaga kerja juga menjadi indikator krusial, termasuk kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, ketersediaan informasi pasar kerja, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta tingkat fleksibilitas pasar kerja.

Grafik III.5
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

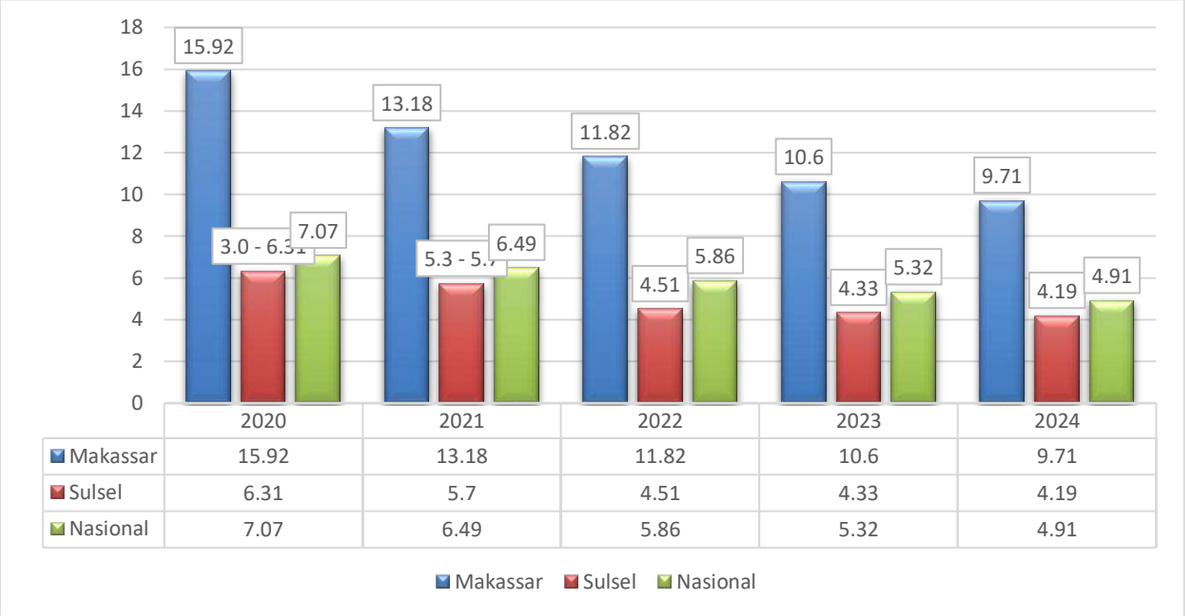

Sumber : BPS Kota Makassar dan diolah oleh BAPPEDA Kota Makassar, Tahun 2025

Dilihat pada Grafik III.5, di tengah kondisi perekonomian yang membaik dimana ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, semakin berkurangnya angka pengangguran sehingga angka TPT pada tahun 2024 mencapai 9,71%. Berdasarkan data tersebut, maka angka TPT dari tahun ke tahun diproyeksikan menurun sebesar 1 persen hingga 1,5 persen dari tahun ke tahun. Hal ini diasumsikan bahwa terjadi transformasi perbaikan perekonomian masyarakat dan penciptan lapangan kerja di tengah pergejolakan perdagangan antar negara, sehingga perekonomian juga secara perlahan kembali membaik dan membawa dampak baik bagi penurunan angka TPT di Kota Makassar.

Gambar III.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026

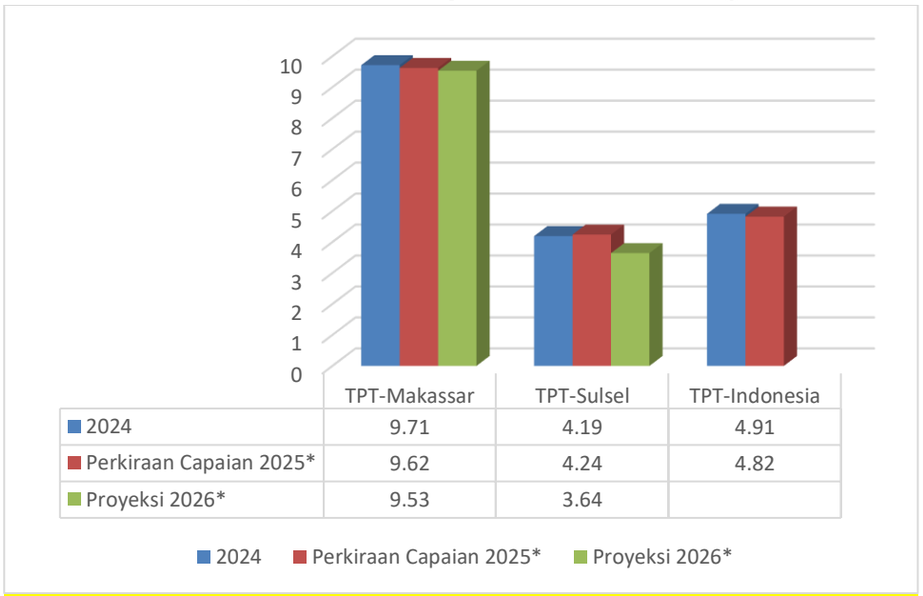

Sumber : BPS Kota Makassar dan diolah oleh BAPPEDA Kota Makassar, Tahun 2025

Memperhatikan Grafik III.5 dan III.6 perkembangan TPT dari tahun 2020-2024 di Kota Makassar, Provinsi dan secara Nasional nampak *relative* rendah dan mengalami penurunan, kecuali TPT Kota Makassar yang niliainya relatif masih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional. Di sisi lain, di tahun 2024 Kota Makassar adalah salah satu daerah tujuan migran di Kawasan Timur Indonesia, menjadikan penawaran tenaga kerja semakin meningkat, adanya penciptaan lapangan kerja baru dari UMKM dan start-up baik itu digital dan non-digital yang turut mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran sebagai implikasi dari peningkatan penyerapan tenaga kerja akibat pertumbuhan ekonomi *(derived demand theory for labor*), asumsi penawaran tenaga kerja tidak berubah. Sektor ekonomi yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi adalah sektor yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sekaligus memiliki kontribusi yang tinggi terhadap nilai PDRB-ADHK yakni di empat sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang dominan, sektor industry pengolahan, perdagangan besar dan eceran; sektor informasi dan komunikasi, dan sektor jasa.

Menilik dari kondisi ini, Pemerintah Kota Makassar di tahun 2025 memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,62 persen. Sementara untuk tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka di targetkan sebesar 9,53 sesuai dengan kesepakatan pada rakortekbang dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang juga disesuaikan dengan target indikator pada RPJMD Kota Makassar 2025 - 2029, hal ini menjadikan proyeksi tahun 2026 untuk tingkat pengangguran terbuka terindikasi lebih baik dari capaian tahun 2024.

e. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang terjadi di negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakatnya di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar Pendidikan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup: (1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan sehari-hari seperti: pangan, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar, (2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi, (3) gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Persentase penduduk miskin Kota Makassar Tahun 2023 sebesar 5,07%, nilai tersebut menunjukkan adanya kenaikan 0,49 persen poin dari Tahun 2022 yang hanya sebesar 4,58 persen. Angka kemiskinan pada tahun 2023 mengalami peningkatan karena dipicu oleh kenaikan signifikan pada garis kemiskinan dimana garis kemiskinan pada tahun 2023 adalah kenaikan tertinggi 5 tahun terakhir, dimana kenaikannya 11,58%

hingga menyentuh angka Rp. 570.286,- perkapita perbulan. Dua hal penyebab naiknya garis kemiskinan yaitu garis kemiskinan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan berkontribusi paling besar yaitu lebih dari 70% terhadap garis kemiskinan sehingga kenaikan garis kemiskinan makanan akan langsung berdampak pada garis kemiskinan secara umum. Salah satu kontribusi garis kemiskinan makanan yang paling besar di tahun 2023 adalah kenaikan harga beras lebih dari 20% dan disusul komoditas rokok di kisaran 12%. Komoditas lainnya hanya berperan tidak lebih dari 2% yang menyebabkan garis kemiskinan di Kota Makassar naik .

Adapun capaian tingkat kemiskinan 2024 di Kota Makassar mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu 4,97. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Pemerintah Kota Makassar berfokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini dilakukan dengan 3 strategi yaitu : (1) pengurangan beban pengeluaran, (2) peningkatan pendapatan masyarakat, (3) serta pengurangan kantong kemiskinan. Jika Pemerintah Kota Makassar berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin ekstrem, maka angka kemiskinan di Kota Makassar akan turun signifikan, sehingga pada tahun 2025 Kota Makassar menargetkan angka kemiskinan sebesar 4,10 Angka ini berada dibawah target Provinsi 7,10% dan target Nasional sebesar 8%.

Grafik III.7
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024, Perkiran Capaian 2025 dan Proyeksi Tahun 2026

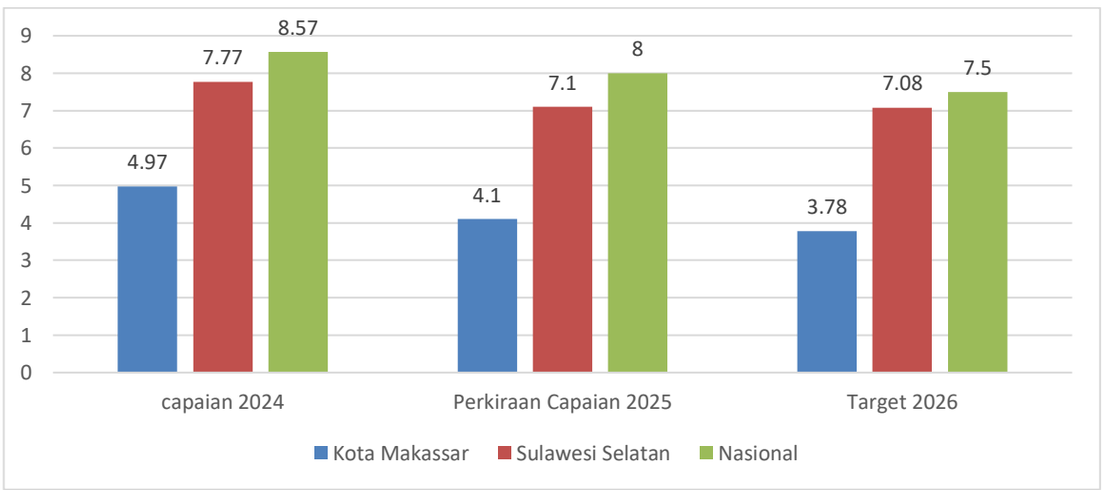

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan diolah oleh BAPPEDA Kota Makassar, Tahun 2025

f. Gini Rasio

Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi. Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Kota Makassar berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Grafik III.8
Perkembangan Gini Rasio Kota Makassar,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2024

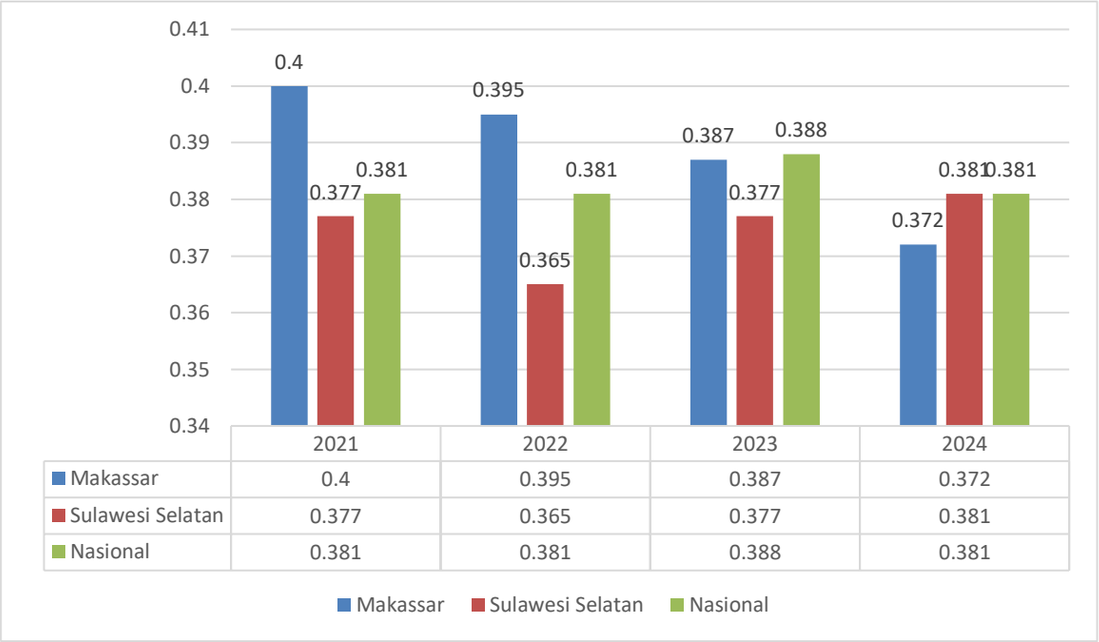

	2021	2022	2023	2024
Makassar	0.4	0.395	0.387	0.372
Sulawesi Selatan	0.377	0.365	0.377	0.381
Nasional	0.381	0.381	0.388	0.381

Sumber : BPS Kota Makassar dan diolah oleh BAPPEDA Kota Makassar, Tahun 2025

Gini Ratio Kota Makassar pada tahun 2021 mencapai sebesar 0,400, atau berada diatas capaian angka Sulawesi Selatan yaitu 0,377. Tahun 2022 Gini Rasio Makassar mengalami penurunan menjadi 0,395. Kondisi tersebut menunjukkan Gini Ratio Kota Makassar berada diatas Gini Rasio Nasional yakni 0, dan Provinsi Sulawesi Selatan 0,365 Tahun 2023 capaian Gini Rasio Kota Makassar sebesar 0,387 atau menurun dari tahun sebelumnya. Akan tetapi kondisi demikian masih lebih tinggi capaian Sulawesi Selatan 0,377 dan lebih rendah Nasional yang berada 0,388.

Dari angka gini ratio tersebut, menunjukkan bahwa angka ketimpangan di Kota Makassar masih tinggi. Hal ini menandakan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari kata baik. Isu ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, menjadi barometer bagi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan yang baik, tentu mengindikasikan angka ketimpangan yang rendah dan dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, seringkali hal tersebut justru menjadi anomali tersendiri, dalam praktik pembangunan ekonomi wilayah. Untuk itu semua daerah, mencoba untuk menangani hal ini secara serius, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih sejahtera.Berdasarkan pada perkembangan data selama tiga tahun terakhir, Untuk Tahun 2024 angka Gini Rasio Kota Makassar menurun menjadi 0,372 dan pada tahun 2025 diprediksi akan kembali menurun hingga mencapai 0,366.

Grafik III.9
Gini Rasio Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Proyeksi Tahun 2026

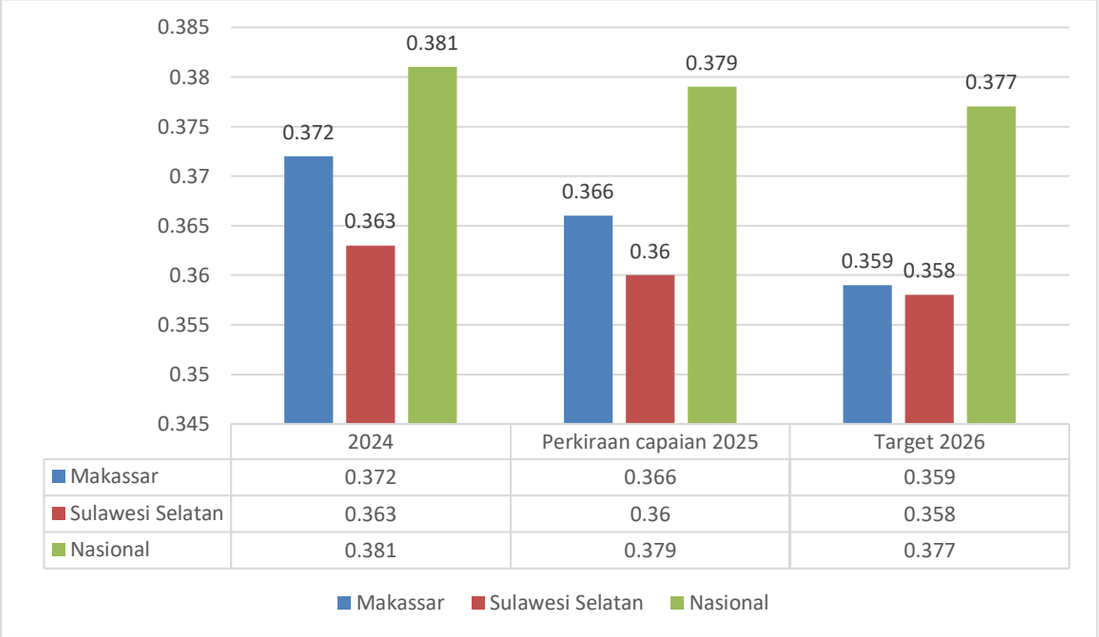

Sumber : BPS Kota Makassar dan diolah oleh Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025

Dilihat dari data di atas, target tahun 2025 untuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Nasional diharapkan mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2024. Untuk Kota Makassar, target rasio pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,366, turun dari 0,372 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Makassar semakin membaik dan ketimpangan pendapatan semakin menurun.

Jika kita hubungkan antara angka pertumbuhan ekonomi dengan indeks gini rasio, Nampak berhubungan positif di mana semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi, maka cenderung semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Fenomena empiris ini telah dijelaskan secara teoretis bahwa negara atau daerah perekonomiannya berbasis padat modal selalu lebih mengutamakan aspek pertumbuhan (*growth*) ketimbang aspek pemerataan, keadilan (*equity*), sehingga berdampak pada angka pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan angka kemiskinan, bahkan indeks kedalaman kemiskinan cenderung akan semakin tinggi.

Visi pemerataan pembangunan (pendapatan) ini merupakan suatu usaha berkelanjutan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar, untuk memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi yang eksklusif tersebut tampaknya telah menimbulkan ketimpangan pendapatan. Di mana, orang kaya semakin kaya, sementara penghidupan orang miskin tidak mengalami perbaikan yang cukup berarti. Kondisi ini muncul, disebabkan karena terdapatnya kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang selama ini hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi, yang bersifat eksklusif hingga mempertajam tingkat ketimpangan yang terjadi. Barometer kesuksesan pembangunan ekonomi pada prinsipnya adalah upaya yang ditempuh untuk mengakselerasi pendapatan masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan kata lain terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas.

Jika ingin menurunkan angka ketimpangan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi harus diturunkan. Demikian pula sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi ditingkatkan maka akan berdampak pada semakin tingginya ketimpangan pedapatan (*inequity*). Jadi

seperti "*buah simalakama*". Alternatif kebijakan ekonomi yang paling populis adalah menggunakan konsep pembangunan "*trickle down effect"*, yakni kebijakan ekonomi yang berfokus kepada pemilik modal (usaha padat modal), lalu dengan sendirinya menjatuhkan ke bawah (usaha padat karya) untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kota masih menjadi hal yang penting dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

III.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kota Makassar tahun 2026 akan menjadi pedoman strategis untuk mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan Rebacan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2025-2029.

Dari sisi pendapatan, kebijakan diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang sah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, digitalisasi sistem pemungutan, dan optimalisasi peran BUMD melalui tata kelola yang lebih profesional. Peningkatan kualitas data, kepatuhan wajib pajak, dan perluasan basis pajak menjadi fokus utama guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Dari sisi belanja, kebijakan diarahkan untuk mendukung program prioritas, pemenuhan pelayanan dasar, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Alokasi anggaran difokuskan pada belanja produktif yang berorientasi hasil dan memperhatikan kesinambungan program prioritas dalam RPJMD 2025–2029. Di sisi pembiayaan, Pemerintah Kota Makassar akan mengelola Silpa secara lebih produktif, serta mendorong pembiayaan inovatif seperti KPBU untuk mendukung infrastruktur prioritas, dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal yang sehat.

Sebagai instrumen fiskal utama, APBD tahun 2026 diarahkan tidak hanya sebagai alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai pengungkit pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 difokuskan untuk memperkuat kapabilitas fiskal daerah, memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta menjamin penggunaan sumber daya keuangan daerah yang tepat sasaran dan berdaya guna tinggi.

III.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp4,90 triliun. Proyeksi ini mencerminkan arah kebijakan fiskal yang terus diarahkan untuk memperkuat kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan transfer pemerintah pusat. Komponen PAD tetap menjadi fokus utama, terutama melalui penguatan BUMD, penyesuaian tarif retribusi, dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara lebih maksimal. Sementara itu, pendapatan transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih memiliki peran penting dalam struktur pendapatan, meskipun ruang pengaturannya terbatas di tingkat daerah. Penyusunan proyeksi pendapatan ini mengacu pada data historis, tren pertumbuhan ekonomi, serta asumsi regulasi terkini, termasuk amanat UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

Proyeksi pendapatan daerah Kota Makassar disusun berdasarkan data perencanaan dan capaian pendapatan dari perangkat daerah pengelola pendapatan.

Informasi tersebut dihimpun, dianalisis, dan diolah sebagai dasar dalam memperkirakan potensi penerimaan pada tahun perencanaan. Penyusunan proyeksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai asumsi yang relevan dengan kebijakan terkait Pendapatan Daerah Untuk Tahun 2026 diantaranya adalah :

a. Optimalisasi dan modernisasi pengelolaan pendapatan melalui digitalisasi seluruh proses binis pajak dan retribusi daerah, perluasan kanal pembayaran non tunai seperti Qris, serta simplifikasi proses pendaftaran hingga penindakan untuk meningkatkan efisiensin dan kepatuhan Masyarakat.
b. Mengintensifkan pemetaan potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap
c. Mengekstensifkan sumber pendapatan baru seperti sektor digital dan ekonomi kreatif serta memberikan insentif pajak bagi investor strategis diperkuat melalui sosialisasi Peraturan Daerah edukasi wajib pajak serta kolaborasi strategis dengan berbagai pihak
d. Restrukturisasi manajamen dan system pengelolaan, termasuk optimalisasi peran Perumda untuk meningkatkan tata Kelola dan profesionalisame

Penerapan program undian berhadiah bagi wajib pajak patuh sebagai strategi promosi dan insentif yang bersifat edukatif untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

III.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2026

Pemerintah Kota Makassar berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan implikasi pada semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kota untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar secara bertahap terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemandirian pendapatan daerah melalui optimalisasi seluruh potensi penerimaan yang dimiliki. Pendapatan daerah Kota Makassar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang seluruhnya diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berkualitas.

3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

PAD Kota Makassar pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2.206.350.556.000,00, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari komponen pajak daerah. Penyesuaian dilakukan mengikuti amanat PP Nomor 35 Tahun 2023, termasuk penempatan ulang sebagian pendapatan BLUD ke dalam kategori retribusi daerah. Langkah ini mencerminkan penataan klasifikasi pendapatan yang lebih rapi dan penguatan akuntabilitas pencatatan penerimaan:

1. Pajak Daerah

Target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp1.954.987.697.000,00, tetap menjadi tulang punggung PAD. Penerimaan ini didominasi oleh pajak dari sektor jasa dan konsumsi, seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, dan PBB-P2. Penetapan target mempertimbangkan pertumbuhan aktivitas ekonomi perkotaan dan keberlanjutan pemungutan berbasis digital.

3.2.2.2 Retribusi Daerah

Pendapatan dari retribusi daerah dirancang sebesar Rp174.847.759.000,00. Peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh

perubahan klasifikasi pendapatan BLUD menjadi bagian dari retribusi daerah, khususnya pada Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha. Penyesuaian ini sejalan dengan regulasi baru dan mencerminkan penataan ulang struktur fiskal daerah yang lebih terstandar.

3.2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target dari komponen ini sebesar Rp27.205.600.000,00, bersumber dari laba penyertaan modal daerah pada BUMD. Estimasi dilakukan secara konservatif berdasarkan proyeksi kinerja entitas BUMD, guna menjaga kehati-hatian dan kredibilitas penganggaran.

3.2.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Komponen ini ditetapkan sebesar Rp49.309.500.000,00. Penyesuaian nilai dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh adanya relokasi sebagian penerimaan ke dalam kelompok retribusi, sebagaimana diatur dalam PP 35 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan klasifikasi pendapatan dan penguatan sistem pelaporan.

3.2.2.5 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2.695.769.245.000,00, yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan antar daerah. Sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan, mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

- Dana Perimbangan terdiri dari DAU sebesar Rp1,859 triliun, DBH sebesar Rp151 miliar, dan DAK fisik maupun nonfisik.
- Transfer Antar Daerah, seperti bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, direncanakan sebesar Rp167 miliar, menandakan adanya kesinambungan kolaborasi fiskal antar level pemerintahan.

Informasi transfer ini bersifat indikatif dan akan diperbarui menyesuaikan kebijakan dan alokasi resmi dari pemerintah pusat.

3.2.2.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Alokasi untuk komponen ini adalah Rp182.405.400.000,00, terdiri atas hibah sebesar Rp36 miliar dan lain-lain pendapatan sah sebesar Rp146,4 miliar. Sumber pendanaan berasal dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan kerja sama dengan lembaga eksternal. Angka ini bersifat estimatif dan dapat berubah mengikuti perkembangan kebijakan nasional dan hasil evaluasi akhir tahun anggaran berjalan.

Adapun realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2023- 2026 dapat dilihat pada tabel III.3 sebagai berikut:

Tabel III.3
Realisasi dan Target / Proyeksi Pendapatan Kota Makassar Tahun 2023 s.d Tahun 2026

URAIAN	REALISASI		TARGET	PROYEKSI RPJMD	RENCANA RKPD	PERTUMBUHAN	PROYEKSI RPJMD
	2023	2024	APBD 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2026	(%)	TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	(7) = ((6-4)/4)*100	8
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.568.267.701.812,65**	**1.605.016.943.364,19**	**2.484.325.936.732,00**	**2.206.350.556.000,00**	**2.206.350.556.000,00**	**(0,11)**	**2.328.491.805.000,00**
Pajak daerah	1.354.471.619.336,98	1.411.880.414.028,41	2.125.300.000.000,00	1.954.987.697.000,00	1.954.987.697.000,00	(0,08)	2.064.230.799.000,00
Retribusi daerah	68.510.860.369,73	55.577.902.505,81	239.377.050.544,00	174.847.759.000,00	174.847.759.000,00	(0,27)	180.172.056.000,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	27.203.181.889,15	26.626.360.688,39	51.027.054.575,00	27.205.600.000,00	27.205.600.000,00	(0,47)	34.555.600.000,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	118.082.040.216,79	110.932.266.141,58	68.621.831.613,00	49.309.500.000,00	49.309.500.000,00	(0,28)	49.533.350.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	**2.455.360.238.383,63**	**2.572.500.148.604,00**	**2.900.281.697.000,00**	**2.695.751.271.000,00**	**2.695.751.271.000,00**	**(0,07)**	**2.794.495.647.000,00**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**2.011.977.557.333,00**	**2.278.389.114.783,00**	**2.442.281.697.000,00**	**2.528.751.271.000,00**	**2.528.751.271.000,00**	**0,04**	**2.636.895.647.000,00**
Dana Perimbangan	**2.011.977.557.333,00**	**2.278.389.114.783,00**	**2.442.281.697.000,00**	**2.528.751.271.000,00**	**2.528.751.271.000,00**	**0,04**	**2.636.895.647.000,00**
Dana Transfer Umum	**1.539.677.998.799,00**	**1.781.732.965.439,00**	**1.930.107.761.000,00**			**0,00**	**2.094.794.386.882,60**
Dana Bagi Hasil	142.486.930.402,00	145.558.834.437,00	147.995.387.000,00			0	153.974.401.000,00
Dana Alokasi Umum	1.397.191.068.397,00	1.636.174.131.002,00	1.782.112.374.000,00			0,00	1.940.819.986.000,00
Dana Transfer Khusus	**472.299.558.534,00**	**496.656.149.344,00**	**512.173.936.000,00**			**0,00**	**542.101.260.000,00**
DAK Fisik	36.340.464.421,00	31.931.027.120,00	-	-	-	0,00	7.361.754.000,00
DAK Non Fisik	435.959.094.113,00	464.725.122.224,00	512.173.936.000,00			-1,00	534.739.506.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)				**-**	**-**	**0**	**-**
Dana Otonomi Khusus				**-**	**-**	**0**	**-**
Dana Keistimewaan				**-**	**-**	**0**	**-**
Dana Desa/Dana Kelurahan				**-**	**-**	**0**	**-**

URAIAN	REALISASI		TARGET	PROYEKSI RPJMD	RENCANA RKPD	PERTUMBUHAN	PROYEKSI RPJMD
	2023	2024	APBD 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2026	(%)	TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	(7) = ((6-4)/4)*100	8
TRANSFER ANTAR-DAERAH	**443.382.681.050,63**	**294.111.033.821,00**	**458.000.000.000,00**	**167.000.000.000,00**	**167.000.000.000,00**	**0,00**	**157.600.000.000,00**
Pendapatan Bagi Hasil	436.109.593.050,63	287.337.945.821,00	444.000.000.000,00			0,00	150.100.000.000,00
Bantuan Keuangan	7.273.088.000,00	6.773.088.000,00	14.000.000.000,00			0,00	7.500.000.000,00
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH	**25.749.561.750,50**	**27.296.146.597,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	
Hibah		1.800.000.000,00	-			0,00	
Dana darurat			-			0,00	
Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	25.749.561.750,50	25.496.146.597,00	-			0,00	
TOTAL PENDAPATAN	**4.049.377.501.946,78**	**4.204.813.238.565,19**	**5.384.607.633.732,00**	**4.902.101.827.000,00**	**4.902.101.827.000,00**	**-0,09**	**5.122.987.452.000,00**

Sumber : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, tahun 2025

III.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan struktur Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman sementara dalam penyusunan arah kebijakan fiskal dan alokasi belanja daerah tahun 2026, digunakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, sambil menunggu terbitnya PMK terbaru untuk Tahun Anggaran 2026.

Belanja Daerah sendiri merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, dan diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi penunjang. Struktur Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, yang disusun secara terukur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

1. Belanja Operasional

Belanja operasi merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai aktivitas rutin pemerintah daerah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam jangka pendek. Proyeksi belanja operasi disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan estimasi kebutuhan pelayanan publik yang meningkat, dengan tetap mengacu pada batasan dan ketentuan alokasi anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja operasi terdiri atas beberapa komponen utama:

- Belanja Pegawai, yang dialokasikan untuk memberikan kompensasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Barang dan Jasa, yang mencakup pengadaan barang dan jasa dengan masa manfaat kurang dari 12 bulan, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- Belanja Bunga, yaitu pengeluaran untuk pembayaran bunga atas pinjaman daerah yang dilakukan melalui mekanisme perjanjian resmi.
- Belanja Subsidi, yang ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga jual barang dan/atau jasa dari BUMD, BUMN, atau pihak swasta bagi masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Belanja Hibah, berupa pemberian dana kepada pihak tertentu seperti pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, lembaga nonprofit, atau organisasi berbadan hukum Indonesia, yang dilaksanakan sesuai ketentuan regulasi hibah daerah.
- Belanja Bantuan Sosial, yaitu bantuan berupa uang atau barang kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang terdampak risiko sosial tertentu. Bantuan ini bersifat tidak berulang dan diberikan untuk menjaga perlindungan sosial yang bersifat sementara.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan dalam mendukung pelayanan publik serta operasional pemerintahan daerah. Proyeksi belanja modal disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan

infrastruktur dan sarana-prasarana strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan regulasi yang berlaku.

Komponen utama dalam struktur belanja modal meliputi:

- Belanja Modal Tanah, yang digunakan untuk pengadaan lahan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, atau pengembangan wilayah, serta telah siap digunakan.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang mencakup pengadaan barang-barang berwujud seperti kendaraan operasional, alat elektronik, dan inventaris lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yaitu anggaran untuk pembangunan, pengadaan, atau renovasi gedung dan bangunan pemerintah yang digunakan dalam kegiatan layanan publik dan administratif.
- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dialokasikan untuk pembangunan atau peningkatan prasarana seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan infrastruktur lain yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yaitu pengeluaran untuk perolehan aset tetap lain yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya namun diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan alokasi anggaran yang disiapkan untuk menangani kebutuhan mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang tidak tersedia dalam program dan kegiatan reguler APBD. Belanja ini bersifat fleksibel dan digunakan untuk merespons situasi darurat atau kejadian luar biasa yang memerlukan tindakan segera dari pemerintah daerah. Penggunaan belanja tidak terduga diarahkan untuk membiayai antara lain penanganan bencana alam, kejadian luar biasa, keadaan darurat, gangguan ketertiban umum, serta kondisi sosial yang membutuhkan intervensi cepat. Proyeksi belanja tidak terduga dilakukan secara proporsional berdasarkan potensi risiko yang mungkin terjadi dalam tahun anggaran berjalan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain atau perangkat daerah tertentu dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus maupun umum. Belanja ini ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, memperkuat sinergi antarwilayah, serta mendorong pemerataan kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan. Proyeksi belanja transfer disusun berdasarkan rencana pemberian atau penerimaan bantuan keuangan antar-daerah yang diperkirakan akan terjadi selama tahun anggaran berjalan. Pelaksanaan belanja transfer dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2023 s.d Tahun 2027 digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel III.4
Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2023s.d Tahun 2026

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET	PROYEKSI RPJMD	RENCANA RKPD	PERTUMBUHAN	PROYEKSI RPJMD
		2023	2024	APBD 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2026	(%)	TAHUN 2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = ((7-5)/5)	-9
	BELANJA OPERASIONAL	**3.374.420.647.297,40**	**3.528.770.369.199,25**	**4.167.493.949.284,00**	**4.116.788.735.646,88**	**4.116.788.735.646,88**	**-0.01**	**4.040.081.107.742,00**
	Belanja Pegawai	1.253.282.428.095,60	1.495.540.330.391,26	1.952.829.349.780,00	1.989.911.677.755,00	1.989.911.677.755,00	**0.02**	1.939.780.294.907,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.876.356.145.729,80	1.779.756.213.624,99	2.019.473.265.410,00	1.969.020.391.226,88	1.969.020.391.226,88	-0.02	1.982.749.520.371,00
	Belanja Bunga	-	-	0				
	Belanja Subsidi	-	-	0				
	Belanja Hibah	238.974.773.472,00	253.473.825.183,00	195.191.334.094,00	157.856.666.665,00	157.856.666.665,00	-0.19	117.551.292.464,00
	Belanja Bantuan Sosial	5.807.300.000,00	-	0				
	BELANJA MODAL	**1.130.808.481.698,00**	**739.218.123.965,00**	**1.477.113.684.448,00**	**959.672.876.353,12**	**959.672.876.353,12**	**-0.35**	**1.129.476.678.658,00**
	Belanja Modal Tanah	-	4.039.070.800,00	32.318.503.987,00	31.300.571.047,00	31.300.571.047,00	-0.03	26.504.303.987,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	385.762.710.688,00	243.016.044.630,00	332.334.137.315,00	141.972.138.033,00	141.972.138.033,00	-0.57	164.634.421.420,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.970.651.002,00	145.556.511.472,00	387.928.273.999,00	431.188.612.930,00	431.188.612.930,00	0.11	498.374.885.627,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	486.632.963.599,00	321.143.365.576,00	703.448.545.147,00	343.337.089.061,12	343.337.089.061,12	-0.51	417.701.747.744,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.473.131.370,00	15.039.119.493,00	13.144.224.000,00	9.941.498.942,00	9.941.498.942,00	-0.24	20.076.319.880,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.969.025.039,00	10.424.011.994,00	7.940.000.000,00	1.932.966.340,00	1.932.966.340,00	-0.76	2.185.000.000,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.498.442.975,00**	**811.487.833,00**	**40.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**-0.25**	**30.000.000.000,00**
	BELANJA TRANSFER							
	Belanja Bagi Hasil				-	-		
	Belanja Bantuan Keuangan				-	-		
JUMLAH BELANJA		**4.507.727.571.970,40**	**4.268.799.980.997,25**	**5.684.607.633.732,00**	**5.106.461.612.000,00**	**5.106.461.612.000,00**	**-0,10**	**5.200.037.452.000,00**

Sumber : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel III.4, alokasi Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5,106 triliun, menurun dibandingkan target APBD Tahun 2025 sebesar Rp5,685 triliun, dengan proyeksi pertumbuhan negatif sebesar -10,16%. Penurunan ini mencerminkan penyesuaian kapasitas fiskal daerah serta langkah konsolidasi anggaran, yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMD terkait prioritas belanja daerah.

Secara rinci, Belanja Operasional masih mendominasi struktur belanja dengan alokasi Rp4,116 triliun atau sekitar 80,6% dari total belanja. Belanja pegawai meningkat tipis menjadi Rp1,99 triliun (+2%), sedangkan belanja barang dan jasa mengalami penurunan (-2%), menandakan masih tingginya beban belanja rutin. Sementara itu, Belanja Modal turun tajam dari Rp1,477 triliun pada 2025 menjadi Rp959,67 miliar pada 2026. Penurunan terbesar terjadi pada belanja peralatan & mesin (-57%) serta jalan, jaringan, dan irigasi (-51%), sedangkan belanja gedung dan bangunan justru meningkat (+11%). Adapun Belanja Tidak Terduga tetap dialokasikan Rp30 miliar sebagai instrumen antisipasi risiko, sesuai dengan prinsip kehati-hatian fiskal yang diamanatkan dalam RPJMD.

Arah kebijakan belanja daerah Kota Makassar tahun 2026 mencakup hal-hal berikut:

1. Penguatan pelatihan vokasi, pendidikan vokasi adaptif, dan pelatihan *soft skills* untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan wirausaha muda.
2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
3. Dukungan terhadap UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata melalui pelatihan digital marketing, penguatan akses permodalan, pemasaran digital, dan revitalisasi pusat budaya.
4. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur logistik penunjang pertumbuhan ekonomi serta promosi investasi melalui deregulasi dan insentif fiskal.
5. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, dan integrasi moda transportasi dengan pendekatan berwawasan lingkungan dan *smart city*.
6. Reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kapasitas aparatur.
7. Penguatan ketahanan lingkungan hidup melalui peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim.
8. Penguatan sinergi dan kolaborasi multipihak dalam perlindungan sosial, pelayanan publik, dan kemitraan pembangunan antarwilayah.
9. Penguatan arah penganggaran yang adaptif dan konsisten dengan visi-misi Wali Kota Makassar 2025–2029 melalui prinsip *money follow program* untuk mendukung APBD yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.
10. Prioritas pada pemenuhan belanja pelayanan dasar dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penataan ruang, sosial, dan ketertiban umum.
11. Optimalisasi belanja daerah dengan pendekatan *spending better*, khususnya untuk program prioritas yang produktif dan afirmatif terhadap pengentasan kemiskinan, kesenjangan, dan perlindungan sosial.
12. Perluasan sumber pendanaan dan inovasi pembiayaan melalui kemitraan, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), dan skema kerjasama daerah.

13. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dari sisi pendapatan dan belanja, termasuk optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD-RI.
14. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi, terutama untuk mengawal optimalisasi serapan belanja yang bersumber dari transfer pusat.
15. Dukungan terhadap program-program nasional seperti pengurangan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan pembangunan berkelanjutan.
16. Fasilitasi proyek-proyek strategis Kota Makassar, seperti pembangunan stadion, pengadaan baju sekolah gratis, dan penyediaan infrastruktur layanan publik prioritas.

Penganggaran Belanja Daerah untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung pencapaian opsen pajak berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Adapun Alokasi APBD dan RKPD Terhadap Urusan Wajib Kota Makassar Tahun 2023 s.d Tahun 2026 digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.5
Alokasi APBD dan RKPD Kota Makassar Tahun 2023-2026 terhadap Urusan Wajib

No	Uraian Komponen Perhitungan		APBD Tahun			RKPD 2026
			2023	2024	2025	
-1	-2		-3	-4	-5	-6
1	a.	**URUSAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.074.862.945.000,00**	**1.188.775.628.485,00**	**1.372.529.076.418,00**	**1.227.015.573.000,00**
		1) BELANJA OPERASI	**919.367.393.470,00**	**1.071.202.624.885,00**	**1.161.596.084.898,00**	**1.126.593.021.216,00**
		Belanja Pegawai	675.948.337.370,00	811.737.073.524,00	929.495.280.298,00	967.728.339.538,00
		Belanja Barang dan Jasa	208.472.277.960,00	184.238.010.361,00	160.111.304.600,00	128.369.725.113,00
		Belanja Hibah	31.346.778.140,00	75.227.541.000,00	71.989.500.000,00	30.494.956.565,00
		Belanja Bantuan Sosial	3.600.000.000,00	-		0,00
		2) BELANJA MODAL	**155.495.551.530,00**	**117.573.003.600,00**	**210.932.991.520,00**	**100.422.551.784,00**
	b.	**URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**35.629.066.000,00**	**20.580.029.514,00**	**21.438.163.439,00**	**16.521.066.000,00**
		1) BELANJA OPERASI	**26.329.202.740,00**	**19.442.062.314,00**	**21.028.728.439,00**	**16.298.445.900,00**
		Belanja Pegawai	4.127.677.867,00	4.467.222.914,00	8.707.380.731,00	8.681.980.900,00
		Belanja Barang dan Jasa	22.201.524.873,00	14.974.839.400,00	12.321.347.708,00	7.616.465.000,00
		Belanja Hibah	-	-	-	
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
		2) BELANJA MODAL	**9.299.863.260,00**	**1137967200.00**	**409.435.000,00**	**222.620.100,00**
	c	**URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**10.568.516.000,00**	**8.168.816.300,00**	**13.244.940.038,00**	**13.415.122.000,00**
		1) BELANJA OPERASI	**7.956.610.000,00**	**7.551.585.800,00**	**12.930.821.038,00**	**10.173.740.700,00**

No	Uraian Komponen Perhitungan		APBD Tahun			RKPD 2026
			2023	2024	2025	
-1	-2		-3	-4	-5	-6
		Belanja Pegawai	3.701.563.200,00	4.144.158.588,00	6.114.432.182,00	6.086.250.260,00
		Belanja Barang dan Jasa	4.255.046.800,00	3.407.427.212,00	6.816.388.856,00	4.087.490.440,00
		Belanja Hibah	-	-	-	
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
		2) BELANJA MODAL	**2.611.906.000,00**	**617.230.500,00**	**314.119.000,00**	**3.241.381.300,00**
	d	**URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**298.340.619.100,00**	**533.217.878.980,00**	**120.627.842.078,00**	**111.249.278.000,00**
		1) BELANJA OPERASI	**88.785.502.884,00**	**66.363.000.380,00**	**42.592.438.419,00**	**52.422.836.250,00**
		Belanja Pegawai	6.389.959.880,00	6.348.754.680,00	7.315.427.189,00	7.287.927.840,00
		Belanja Barang dan Jasa	39.095.764.734,00	32.475.265.000,00	32.277.011.230,00	13.634.908.410,00
		Belanja Hibah	43.299.778.270,00	27.538.980.700,00	3.000.000.000,00	31.500.000.000,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
		2) BELANJA MODAL	**209.555.116.216,00**	**466.854.878.600,00**	**78.035.403.659,00**	**58.826.441.750,00**
	e.	**BELANJA DI LUAR URUSAN PENDIDIKAN URUSAN KEBUDAYAAN URUSAN PERPUSTAKAAN DAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG MENUNJANG KEBUTUHAN**				

No	Uraian Komponen Perhitungan		APBD Tahun			RKPD 2026
			2023	2024	2025	
-1	-2		-3	-4	-5	-6
		MASYARAKAT ANTARA LAIN:				
		1) Belanja Transfer	**-**	**-**		
		Belanja bantuan keuangan	-	-		
		2) Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah	**-**	**-**		
2	**ALOKASI ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN (a + b + c + d)**		**1.419.401.146.100,00**	**1.750.742.353.279,00**	**1.527.840.021.973,00**	**1.368.201.039.000,00**
3	**TOTAL BELANJA DAERAH**		**5.648.477.147.700,00**	**5.775.897.221.810,00**	**5.684.607.633.732,00**	**5.106.461.612.000,00**
4	**RASIO ALOKASI ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TERHADAP BELANJA DAERAH (2 : 3) x 100%**		**25,13**	**30,31**	**26,88**	**26,79**
5	**a.**	**BELANJA PADA DINAS KESEHATAN**	**607.387.306.000,00**	**341.916.936.105,00**	**414.133.693.488,00**	**645.400.389.000,00**
		1) BELANJA OPERASI	**491.483.076.536,00**	**341.916.936.105,00**	**383.958.085.071,00**	**575.334.935.801,00**
		Belanja Pegawai	196.650.375.839,00	167.811.343.507,00	200.572.946.951,00	209.433.778.388,00
		Belanja Barang dan Jasa	289.784.745.697,00	171.105.592.598,00	181.385.138.120,00	363.901.157.413,00
		Belanja Hibah	5.047.955.000,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-		
		2) BELANJA MODAL	**115.904.229.464,00**	**30.300.113.450,00**	**66.165.434.075,00**	**30.175.608.417,00**

No	Uraian Komponen Perhitungan		APBD Tahun			RKPD 2026
			2023	2024	2025	
-1	-2		-3	-4	-5	-6
	b.	**BELANJA DI LUAR DINAS KESEHATAN YANG MENUNJANG KESEHATAN ANTARA LAIN:**	**-**	**220.712.312.622,00**		**238.930.815.512,00**
		1) RSUD	-	106.948.703.782,00		130.343.926.516,00
		2) PUSKESMAS	-	113.763.608.840,00		108.586.888.996,00
6	**ANGGARAN KESEHATAN**		**607.387.306.000,00**	**592.929.362.177,00**	**652.820.435.931,00**	**653.064.509.000,00**
7	**TOTAL BELANJA DAERAH**		**5.648.477.147.700,00**	**5.775.897.221.810,00**	**5.684.607.633.732,00**	**5.106.461.612.000,00**
8	**GAJI ASN**		**639.082.116.416,00**	**755.006.919.697,00**	**899.518.230.280,00**	**918.387.817.827,31**
9	**TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN**		**5.009.395.031.284,00**	**5.020.890.302.113,00**	**4.785.089.403.452,00**	**4.188.073.794.172,69**
10	**RASIO ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (2 : 5) x 100%**		**12,12**	**11,81**	**13,64**	**15,59**
11	**a.**	**BELANJA MODAL (BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK)**	**1.809.867.286.993,00**	**1.715.087.356.864,00**	**1.477.113.684.448,00**	**959.672.876.353,15**
		1) Tanah	23.100.000.000,00	16.838.546.800,00	32.318.503.987,00	31.300.571.047,00
		2) Peralatan dan Mesin	407.805.406.515,00	218.972.358.411,00	332.334.137.315,00	141.972.138.033,00
		3) Bangunan dan Gedung	764.611.652.418,00	755.072.596.545,00	387.928.273.999,00	431.188.612.930,00
		4) Jalan Irigasi dan Jaringan	583.705.728.060,00	693.588.464.658,00	703.448.545.147,00	343.337.089.061,15
		5) Aset Tetap Lainnya	22.229.500.000,00	19.115.390.450,00	13.144.224.000,00	9.941.498.942,00
		6) Aset Lainnya	8.415.000.000,00	11.500.000.000,00	7.940.000.000,00	1.932.966.340,00

No	Uraian Komponen Perhitungan		APBD Tahun			RKPD 2026
			2023	2024	2025	
-1	-2		-3	-4	-5	-6
	b.	BELANJA PEMELIHARAAN	75.370.517.035,00	70.506.638.876,00	69.470.564.079,00	63.622.504.810,09
12	a.	BELANJA HIBAH	19.725.534.501,00	21.513.265.000,00	195.191.334.094,00	56.941.325.100,00
	b.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-		
	c.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	-	-		
13	JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH (11 + 12)		1.904.963.338.529,00	1.807.107.260.740,00	1.741.775.582.621,00	1.080.236.706.263,24

Sumber : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan Tabel III.5, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik Kota Makassar menunjukkan tren menurun selama periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, total alokasi belanja mencapai Rp1,90 triliun, kemudian sedikit menurun menjadi Rp1,80 triliun di 2024, dan kembali turun menjadi Rp1,74 triliun di 2025. Penurunan tersebut terutama terjadi pada belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang semula sebesar Rp703 miliar pada 2023, menjadi Rp612 miliar di 2024, lalu turun menjadi Rp493 miliar pada 2025. Belanja peralatan dan mesin juga menurun dari Rp297 miliar pada 2023 menjadi Rp235 miliar di 2025. Sebaliknya, belanja gedung dan bangunan mengalami kenaikan, dari Rp293 miliar pada 2023 menjadi Rp421 miliar di 2025. Sementara itu, belanja hibah sempat melonjak tajam pada 2025 hingga mencapai Rp582 miliar, diduga karena adanya kebutuhan khusus atau kebijakan afirmatif pada tahun tersebut.

Memasuki tahun 2026, total alokasi belanja infrastruktur turun drastis menjadi hanya Rp1,08 triliun. Hampir seluruh komponen belanja mengalami penurunan tajam, termasuk belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang turun ke angka Rp343 miliar, serta belanja peralatan dan mesin yang menyusut menjadi Rp192 miliar. Penurunan paling tajam terlihat pada belanja hibah, dari Rp582 miliar di 2025 menjadi hanya Rp85 miliar di 2026. Belanja pemeliharaan juga terus berkurang hingga tersisa Rp123 miliar. Kecuali belanja gedung dan bangunan yang tetap tinggi di angka Rp340 miliar, pola belanja tahun 2026 secara umum mencerminkan adanya pengetatan anggaran. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal atau adanya penyesuaian program yang lebih selektif menjelang akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah.

Grafik III.10
Proporsi Belanja Daerah Kota Makassar
Tahun 2023 – 2026

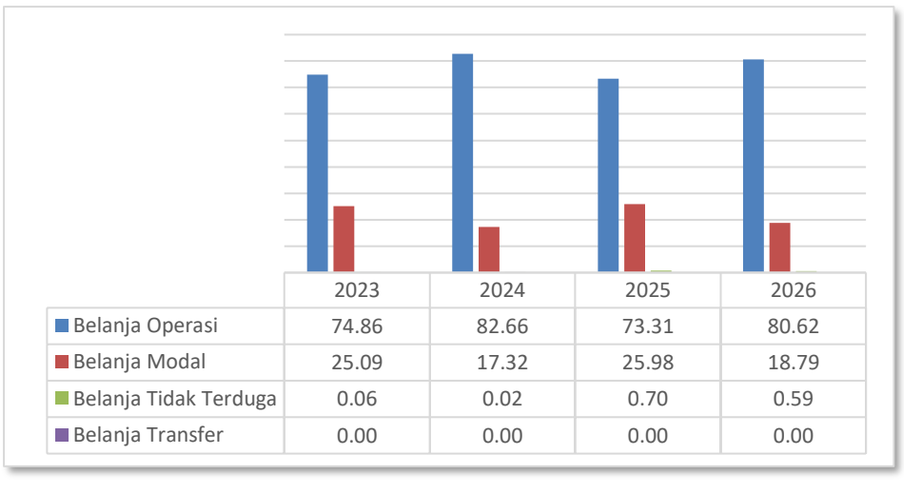

	2023	2024	2025	2026
Belanja Operasi	74.86	82.66	73.31	80.62
Belanja Modal	25.09	17.32	25.98	18.79
Belanja Tidak Terduga	0.06	0.02	0.70	0.59
Belanja Transfer	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah time Series, Tahun 2025

Pada Grafik III.10 terlihat bahwa komponen belanja operasi masih menjadi porsi terbesar dalam struktur Belanja Daerah Kota Makassar, dengan rata-rata proporsi mencapai 77,36% selama periode 2023 hingga 2026. Belanja ini didominasi oleh pengeluaran rutin, khususnya untuk membiayai kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk gaji dan tunjangan kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD. Dominasi belanja operasional ini mencerminkan orientasi fiskal yang masih kuat pada pemenuhan belanja pegawai dan operasionalisasi pelayanan pemerintahan sehari-hari.

Sementara itu, belanja modal rata-rata hanya menyumbang sekitar 21,30%, dengan tren yang fluktuatif tiap tahunnya. Porsi belanja modal mencapai titik tertinggi pada tahun 2025 sebesar 25,98%, kemudian menurun menjadi 18,79% pada tahun 2026. Penurunan ini dapat mencerminkan penyesuaian kebijakan fiskal atau keterbatasan ruang fiskal dalam membiayai pembangunan fisik dan infrastruktur strategis yang sebenarnya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Belanja tidak terduga, meskipun porsinya relatif kecil (rata-rata 0,34%), mengalami peningkatan tajam pada tahun 2025 yang mencapai 0,70%, atau sekitar Rp40 miliar, meningkat sekitar 60% dibandingkan pagu tahun 2024. Hal ini mengindikasikan kesiapsiagaan fiskal Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi kondisi darurat atau kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja transfer tidak dialokasikan selama periode 2023 hingga 2026, yang menunjukkan bahwa pemerintah kota belum mengalokasikan belanja dalam bentuk transfer ke desa atau pihak ketiga lainnya.

Secara keseluruhan, struktur belanja daerah Kota Makassar dalam periode ini masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada belanja rutin. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu adanya pergeseran bertahap dan terukur ke arah peningkatan proporsi belanja modal yang strategis dan produktif, khususnya dalam sektor infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Upaya ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel III.6
Proyeksi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2025	PAGU INDIKATIF 2026
1	Dinas Pendidikan	1,372,529,076,418.00	1.227.015.573.000,00
2	Dinas Kesehatan	647,025,306,772.00	653.064.509.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	898,215,404,750.00	735.351.098.000,00
4	Dinas Penataan Ruang	28,333,310,797.00	27.009.339.000,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	60,607,389,655.00	45.348.554.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	46,982,529,144.00	41.388.278.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	54,529,935,454.00	51.693.138.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24,940,893,837.00	23.057.875.000,00
9	Dinas Sosial	23,882,326,011.00	24.650.980.000,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	25,185,364,383.00	45.300.538.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18,721,283,227.00	21.081.710.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	25,222,054,297.00	17.002.874.000,00
13	Dinas Pertanahan	18,298,143,854.00	17.052.128.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	232,315,957,881.00	123.934.597.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,683,923,868.00	20.552.872.000,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27,022,735,931.00	27.134.951.000,00
17	Dinas Perhubungan	143,419,942,130.00	142.137.181.000,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	79,653,132,678.00	85.622.770.000,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19,013,845,961.00	19.922.929.000,00
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	22,721,782,335.00	22.548.655.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2025	PAGU INDIKATIF 2026
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	120,627,842,078.00	111.257.178.000,00
22	Dinas Kebudayaan	21,438,163,439.00	16.521.066.000,00
23	Dinas Perpustakaan	13,244,940,038.00	13.415.122.000,00
24	Dinas Kearsipan	10,693,755,038.00	12.167.392.000,00
25	Dinas Perikanan dan Pertanian	42,682,113,787.00	47.306.394.000,00
26	Dinas Pariwisata	41,375,201,106.00	32.848.622.000,00
27	Dinas Perdagangan	24,592,368,110.00	22.368.966.000,00
28	Sekretariat Daerah	301,700,773,452.00	257.732.750.000,00
29	Sekretariat DPRD	222,794,884,191.00	191.527.770.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42,069,049,553.00	38.576.590.000,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	96,078,335,159.00	92.337.242.000,00
32	Badan Pendapatan Daerah	135,979,929,182.00	131.281.504.000,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	30,704,884,842.00	25.537.771.000,00
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	10,575,936,007.00	11.954.000.000,00
35	Inspektorat Daerah	55,358,466,984.00	50.428.400.000,00
36	Kecamatan Biringkanaya	57,055,955,671.00	54.038.985.000,00
37	Kecamatan Bontoala	40,770,128,835.00	38.316.416.000,00
38	Kecamatan Makassar	57,505,235,307.00	51.216.041.000,00
39	Kecamatan Mamajang	46,186,565,105.00	45.198.217.000,00
40	Kecamatan Manggala	49,290,054,588.00	44.369.278.000,00
41	Kecamatan Mariso	36,927,063,261.00	34.301.058.000,00
42	Kecamatan Panakkukang	57,703,073,803.00	54.542.258.000,00
43	Kecamatan Rappocini	56,203,141,520.00	53.819.314.000,00
44	Kecamatan Tallo	54,497,795,230.00	52.821.435.000,00
45	Kecamatan Tamalanrea	46,127,643,769.00	44.322.948.000,00
46	Kecamatan Tamalate	57,414,944,990.00	56.678.540.000,00
47	Kecamatan Ujung Pandang	43,453,650,652.00	42.079.262.000,00
48	Kecamatan Ujung Tanah	33,676,066,823.00	32.358.163.000,00
49	Kecamatan Wajo	32,336,428,745.00	31.153.758.000,00
50	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	14,617,140,004.00	14.665.753.000,00
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41,621,763,080.00	30.448.870.000,00
TOTAL BELANJA DAERAH		5,684,607,633,732.00	5,106,461,612,000.00

Sumber : Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Tahun 2025

Pada Tabel III.5 dapat dilihat proyeksi besaran Pagu Indikatif masing-masing Perangkat Daerah Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Total alokasi belanja daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5.684.607.633.732,00, sedangkan untuk tahun 2026 direncanakan sebesar Rp5.106.461.612.000,00. Anggaran tersebut mencakup empat komponen utama belanja, yakni belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Jika dilihat dari proporsi terhadap total pagu belanja tahun 2026, terdapat tiga perangkat daerah dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu Dinas Pendidikan sebesar Rp1.227.015.573.000,00 (24,03%), Dinas

Pekerjaan Umum sebesar Rp735.351.098.000,00 (14,40%), dan Dinas Kesehatan sebesar Rp653.064.509.000,00 (12,79%). Ketiga perangkat daerah ini secara kumulatif menyerap sekitar 51,22% dari total alokasi anggaran tahun 2026. Dominasi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga kesinambungan pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang merupakan bagian integral dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung target pembangunan strategis daerah secara berkelanjutan.

III.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan. Pendanaan dipahami sebagai dana atau uang secara umum yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan, sementara pembiayaan mengacu secara spesifik pada transaksi penerimaan dan pengeluaran yang memiliki implikasi pengembalian. Dalam konteks yang lebih luas, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur juga mengatur bentuk pembiayaan melalui skema kemitraan antara pemerintah dan badan usaha. Skema ini menjadi alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

Struktur Pembiayaan daerah pada APBD Kota Makassar Tahun 2023 hingga Tahun 2026, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.7
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Makassar Tahun 2023 s.d. Tahun 2027

NO	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI RPJMD	RENCANA RKPD	PROYEKSI RPJMD
		2023	2024	TAHUN 2026	TAHUN 2026	TAHUN 2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**752.535.768.676,81**	**294.185.698.653,13**	**209.359.785.000,00**	**209.359.785.000,00**	**147.050.000.000,00**
	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)	752.535.768.676,81	294.185.698.653,13	209.359.785.000,00	209.359.785.000,00	**147.050.000.000,00**
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang udangan	-	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**70.000.000.000,00**
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan lainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH PEMBIYAAN NETTO		**752,535,768,676.81**	**294.185.698.653,13**	**204.359.785.000,00**	**204.359.785.000,00**	**77.050.000.000,00**

Sumber : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, tahun 2025

Berdasarkan Tabel III.7, penerimaan pembiayaan daerah Kota Makassar masih didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Realisasi tahun 2023 tercatat sebesar Rp752,53 miliar, namun pada tahun 2024 turun tajam menjadi Rp294,19 miliar. Tren penurunan ini diproyeksikan berlanjut pada tahun 2026 sebesar Rp209,36 miliar, hingga mencapai Rp147,05 miliar pada tahun 2027. Kondisi tersebut mencerminkan semakin berkurangnya ketergantungan Pemerintah Kota terhadap pembiayaan, seiring dengan strategi fiskal yang menekankan pada optimalisasi pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan mulai dianggarkan pada tahun 2026 sebesar Rp5 miliar dan meningkat tajam menjadi Rp70 miliar pada tahun 2027. Perubahan ini menunjukkan adanya langkah pengelolaan pembiayaan yang lebih terukur, baik dalam bentuk pembentukan cadangan maupun penyertaan modal strategis. Secara keseluruhan, jumlah pembiayaan netto yang semula sangat tinggi pada 2023 akan menurun signifikan hingga hanya Rp77,05 miliar pada 2027. Hal ini selaras dengan arah kebijakan fiskal Kota Makassar yang berfokus pada penguatan kemandirian fiskal, menjaga kesehatan APBD, serta memastikan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Kebijakan Pembiayaan Tahun 2026

Pembiayaan APBD Kota Makassar Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kebijakan pembiayaan dirancang untuk:

1. Menutup defisit anggaran yang mungkin terjadi akibat ketidakseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
2. Menyelesaikan kewajiban keuangan daerah, termasuk pembayaran pokok utang kepada Pemerintah Pusat dalam rangka menjaga integritas dan kualitas laporan keuangan daerah;
3. Mendukung program prioritas strategis, khususnya yang dapat meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD), seperti melalui penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki prospek peningkatan kontribusi terhadap PAD;
4. Mengoptimalkan penggunaan SiLPA untuk membiayai program-program pembangunan yang bersifat produktif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pembiayaan akan difungsikan sebagai alat fiskal yang mendukung stabilitas anggaran serta memperkuat efektivitas pembangunan daerah.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan akan tetap diarahkan untuk menutup defisit, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain SiLPA, sumber pembiayaan yang dapat diupayakan termasuk hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah, dan penerimaan sah lainnya. Apabila diperlukan pinjaman daerah, maka pelaksanaannya harus mengacu pada batasan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, guna menjaga prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Apabila terjadi surplus dalam APBD, maka dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembiayaan pengeluaran yang produktif, seperti penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pelunasan cicilan pokok utang, maupun pemberian

pinjaman antar pemerintah. Belanja pembiayaan juga dapat difokuskan pada kegiatan strategis jangka panjang, termasuk pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam rangka optimalisasi pembiayaan daerah, Pemerintah Kota Makassar akan memprioritaskan penggunaan SiLPA untuk membiayai belanja infrastruktur pelayanan publik yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara langsung. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing dan ketahanan fiskal Kota Makassar dalam jangka panjang

III.2.5. Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam pencapaian Program Pembangunan khususnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), Pendanaan merupakan kunci dan komponen utama dalam pelaksanaannya. Kerangka Pendanaan yang telah disusun berdasarkan pada tahun yang berkenaan memiliki keterbatasan dalam pemenuhan dan akselerasi.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana Pemerintah dalam rangka mencapai sasaran strategisnya pada tahun mendatang dengan memperhitungkan dan memperhatikan kemampuan dasar serta sumber dana yang tepat dalam membiayai seluruh belanja daerah.

Pada penentuan kebutuhan pendanaan, Pemerintah Daerah berupaya memperhitungkan dan memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tersebut, mekanisme dan instrumen Pendanaan Pembangunan dapat memberikan ruang tersendiri kepada Pemerintah Daerah dapat mengakselerasikan potensi dan peluang beberapa stakeholder.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan untuk dapat mensinergikan segala potensi yang sesuai pada peraturan perundangan-undangan bersama masyarakat dan stakeholder dalam pencapaian tujuan pembangunan baik skala Nasional maupun Daerah. Sumber-Sumber Potensi Pendanaan yang dapat bersinergitas ke dalam tujuan pembangunan Daerah sebagai suplemen pendanaan antara lain:

III.2.5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Transfer Dana transfer ke daerah adalah instrumen transfer kepada daerah yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dana transfer ke daerah mempunyai tujuan yang berbeda-beda, antara lain, mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, dan mengurangi ketimpangan kualitas dan kuantitas layanan publik di daerah.

Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut: 1).Berdasarkan Formula (By Formula); 2)Berdasarkan Daerah Penghasil (by Origin); 3).Berdasarkan Kinerja (by Performance).

Dalam Postur Transfer Dana Daerah, Pemerintah Kota Makassar didominasi oleh Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Untuk Dana Transfer Umum lebih kepada Dana Alokasi Umum yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi sedangkan Dana bagi Hasil dialokasikan ke Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

III.2.5.2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, termasuk di dalamnya penyediaan infrastruktur. Kebutuhan infrastruktur yang semakin tinggi tidak sebanding dengan kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas, sehingga memerlukan inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Kota Makassar dapat memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Skema ini memungkinkan keterlibatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, koperasi, maupun badan hukum asing dalam mendukung penyediaan infrastruktur yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dalam konteks Kota Makassar, KPBU dapat diarahkan untuk membiayai pembangunan dan penataan kabel bawah tanah, penataan lampu jalan yang lebih efisien, serta pembangunan stadion sebagai infrastruktur strategis yang mendukung pelayanan publik dan daya saing daerah.

III.2.5.3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Dalam menggali potensi daerah, Pemerintah wajib memastikan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan dan berkelanjutan (sustainable development) dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Keterlibatan stakeholder dan masyarakat menjadi utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebagai bentuk upaya kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya.Kegiatan CSR yang dilakukan berkenaan dengan berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan bahkan sosial budaya. Pada umumnya Di Indonesia kegiatan CSR ini dilaksanakan dalam berbagai pendekatan antara lain seperti pemberian amal perusahaan (corporate giving/charity), kedermawanan perusahaan (corporate philanthropy), relasi kemasyarakatan perusahaan (corporate community/public relation), dan pengembangan masyarakat (community development). Kegiatan community development atau dikenal juga dengan ComDev adalah bentuk pelaksanaan CSR yang paling sering dilakukan di Indonesia saat ini bahkan ComDev sudah diidentikkan dengan CSR.

Pada pelaksanaan program Corporate Social Responsibility di Kota Makassar, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah Kota Makassar bersama DPRD pada Tahun 2016 telah menyusun Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dimana pada Peraturan Daerah tersebut peran serta Dunia Usaha sebagai pelaksana utama dari kegiatan CSR dapat melaksanakan Program kemitraan 1). Usaha mikro kecil dan Koperasi. 2). Bina lingkungan dan Sosial berbasis pemberdayaan (community development). dan 3). Program langsung kepada masyarakat, yang tentunya dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Makassar dapat mensinkronisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sendiri dan khususnya sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar.

BAB 4

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 merupakan periodisasi tahunan pertama dari RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional dan berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa penyusunan RKPD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Makassar Tahun 2026, dirumuskan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 serta mengacu kepada permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi kinerja RKPD dan Renja SKPD Tahun 2024 serta kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015- 2034. Selain itu penentuan sasaran dan prioritas pembangunan Kota Makassar juga harus memperhatikan prioritas pembangunan Daerah Sulawesi Selatan serta menjabarkan kebijakan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Makassar tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan sebagai penjabaran pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

IV.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kota Makassar selama 5 (lima) tahun mendatang.

Pengertian tujuan dalam RPJMD ini adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Sasaran diartikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Visi dan Misi Kota Makassar dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran, adalah sebagai berikut:

IV.1.1. VISI

Visi Pembangunan Daerah Kota Makassar yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan

Visi Pembangunan Daerah Kota Makassar yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

"Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan"

Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 ini memiliki konsistensi dengan Visi Kota Makassar 2045, dimana visi jangka panjang Kota Makassar adalah "**Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan Yang *Sombere'* dan *Smart* Untuk Semua**". Penekanan pada "Makassar Kota Dunia", dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai "Makassar Unggul", serta penekanan "Inklusif" dirumuskan sebagai "*Sombere'* dan *Smart City* untuk semua". Pokok Visi Kota Makassar "Maju dan Berkelanjutan" pada visi RPJPD, dalam visi RPJMD Tahun 2025-2029 ditempatkan sebagai bagian dari substansi "Aman dan Berkelanjutan".

Rumusan Visi Pemerintah Kota Makassar merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada tahun 2029. Rumusan visi ini mengandung 4 (empat) pokok visi. Kedua penjelasan umum tersebut merupakan kalimat yang menjelaskan dengan penjelasan umum dan penjelasan masing-masing pokok visi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1.
Penjelasan Visi RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Makassar

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN dan BERKELANJUTAN	Unggul	Makassar sebagai kota yang maju dengan kualitas modal manusia yang unggul, masyarakat yang sejahtera, perekonomian yang produktif, infrastruktur yang ramah lingkungan, dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)
	Inklusif	Makassar sebagai kota dimana semua lapisan dan golongan masyarakat terlibat dan mendapat manfaat dari pembangunan kota, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status ekonomi, latar belakang budaya, atau kelompok sehingga dapat hidup, bekerja, dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Makassar yang ramah terhadap kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya, membuka panggung partisipasi dan inisiatif untuk berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kota
	Aman	Makassar sebagai kota yang bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kriminalitas dan konflik sosial, serta menjamin keselamatan publik

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Berkelanjutan	Makassar sebagai kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya secara efisien serta tangguh dalam penanganan bencana dan dampak perubahan iklim. Kondisi ini didukung oleh tata kelola yang berintegritas serta masyarakat sipil yang partisipatif

IV.1.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi, disusun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi RPJMD Kota Makassat Tahun 2025-2029 adalah:

Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan
Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga
Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian misi, serta dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Misi disusun untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Keterkaitan antara pokok-pokok visi dengan, dengan penjelasan misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Visi dan misi Pemerintah Kota Makassar dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) tujuan dengan 12 (dua belas) indikator tujuan yang diturunkan menjadi 25 (dua puluh lima) sasaran dengan 39 (tiga puluh sembila) indikator sasaran. Penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025-2029 serta Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran RKPD 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2
Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026
Kota Makassar

Visi: Makassar Unggul, Inklusif, Amanah, dan Berkelanjutan								
No	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD**	**Realisasi Kinerja 2024**	**Target RPJMD Tahun 2026**	**Kondisi Akhir RPJMD**	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran RKPD Tahun 2026**	**Target Kinerja 2026**
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja								
1.1	Tujuan: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	6,43	8,20	Tujuan: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,43
1.1.1	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,17	19,46	20,26	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,46
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%)	20,03	20,30	20,80		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%)	20,30
1.1.2	Sasaran: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,71	9,53	9,17	Sasaran: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,53
		PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	165.95	186.75	246.34		PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	186.75
1.2	Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	4,10	4,23	4,35	Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	4,23

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Realisasi Kinerja 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Kondisi Akhir RPJMD	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RKPD Tahun 2026	Target Kinerja 2026
1.2.1	Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,58	0,61	0,67	Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,61
1.2.2	Sasaran: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)	1,19	1,77	2,20	Sasaran: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)	1,77
		Indeks Ketahanan Pangan	83,86	87,95	92,58		Indeks Ketahanan Pangan	87,95
1.2.3	Sasaran: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	-35,16	3,00	5,00	Sasaran: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	3,00
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
2.1	Tujuan: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85,23	85,86	86,84	Tujuan: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85,86
2.1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	81,96	82,10	82,38	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	82,10
2.1.2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,33	75,66	76,27	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,66

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Realisasi Kinerja 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Kondisi Akhir RPJMD	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RKPD Tahun 2026	Target Kinerja 2026
2.1.3	Sasaran: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	18.386	20.543	27.097	Sasaran: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	20.543
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan.								
3.1	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur	74,25	79,46	82,54	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur	79,46
3.1.1	Sasaran: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	35,40	39,03	47,44	Sasaran: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	39,03
		Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	49,39	54,45	66,19		Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	54,45
3.1.2	Sasaran: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)%	10	25	100	Sasaran: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)%	25
Misi 4 : Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata								
4.1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	76,56	79,23	83,81	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	79,23
4.1.1	Sasaran: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi	4,46	4,56	4,75	Sasaran: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi	4,56

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Realisasi Kinerja 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Kondisi Akhir RPJMD	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RKPD Tahun 2026	Target Kinerja 2026
4.1.2	Sasaran: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)	101 Inovasi	4	10	Sasaran: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)	4
4.2	Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (%)	2,18	2,28	2,48	Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB %	2,28
4.2.1	Sasaran: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	5.619.596	5.634.009	5.665.491	Sasaran: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	5.634.009
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	1,51	1,65	1,8		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	1,65
4.2.2	Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda (%)	N.A	33.3	33.3	Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda (%)	33.3
		Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan (%)	N.A	21	44		Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan (%)	21
4.2.3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Tang Aktif (Industri)	4.220	4.831	6.310	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar (Industri)	4.831
		Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang	N/A	15,43	24,31		Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang	15,43

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Realisasi Kinerja 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Kondisi Akhir RPJMD	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RKPD Tahun 2026	Target Kinerja 2026
		Memanfaatkan Platform Digital (%)					Memanfaatkan Platform Digital (%)	
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum								
5.1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	78,64	81,31	86,65	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	81,31
5.1.1	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	69,69	70,50	81,50	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70,50
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,01	4,03	4,1		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,03
		Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK	87,00	87,98	90,00		Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK	87,98
5.2	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	77	85	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	77
5.2.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	54,03	56,02	60,01	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	56,02

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Realisasi Kinerja 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Kondisi Akhir RPJMD	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RKPD Tahun 2026	Target Kinerja 2026
5.2.2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran	4,363	4,862	5,357	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran	4,862
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan Dan Perlindungan Perempuan, Anak, Dan Penyandang Disabilitas, serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga								
6.1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	63,13	63,15	63,19	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	63,15
6.1.1	Sasaran: Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,183	0,177	0,165	Sasaran: Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,177
6.1.2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	68,30	70,60	75,44	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	70,60
6.1.3	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	57,67	61,00	69,00	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	61,00
		Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,476	0,518	0,602		Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,518
6.2	Tujuan: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan%	4,97	3,78-3,46	3,02-2,06	Tujuan: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan%	3,78-3,46
6.2.1	Sasaran:	Gini Rasio	0,372	0,381-0,359	0,334	Sasaran:	Gini Rasio	0,381-0,359

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Realisasi Kinerja 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Kondisi Akhir RPJMD	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RKPD Tahun 2026	Target Kinerja 2026
	Menurunnya Disparitas Pendapatan					Menurunnya Disparitas Pendapatan		
6.2.2	Sasaran: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	41,1	42,51	45,34	Sasaran: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	42,51
Misi 7 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana								
7.1	Tujuan: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,41	66,38	67,23	Tujuan: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,38
7.1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	58,70	74,15	74,95	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	74,15
		Indeks Kualitas Udara	81,51	75,52	76,72		Indeks Kualitas Udara	75,52
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,92	36,13	36,41		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36,13
		Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1,9%	10%	35%		Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	10%
7.2	Tujuan: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	113,71	107	100	Tujuan: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	107

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Realisasi Kinerja 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Kondisi Akhir RPJMD	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RKPD Tahun 2026	Target Kinerja 2026
7.2.1	Sasaran: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	0,48	0,52	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	0,48
		Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	NA	34,98%	44,60%		Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	34,98%

IV.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 sebagai upaya dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

IV.2.1 Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026

RKP Tahun 2026 mengangkat tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik. Kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas

Gambar IV.1
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

IV.2.2 Sasaran Pembangunan dan Prioritas Nasional RKP Tahuna 2026

IV.2.2.1. Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada gambar berikut.

Gambar IV.2
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

IV.2.2.2. Prioritas Nasional RKP Tahun 2026

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

   Sasaran Utama PN 1 adalah: “Terwujudnya Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM

   Pencapaian PN 1 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut:

   a. Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S)
   b. Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berperspektif Gender

2. Prioritas Nasional 2 adalah: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

   Sasaran Utama PN 2 adalah: Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan, Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus), Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus), Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan, Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau.

   Pencapaian PN 2 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut:

   a. Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional;
   b. Energi Bersih untuk Pertumbuhan dan Pemerataan;
   c. Pertahanan Semesta.

3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

   Sasaran Utama PN 3 adalah: Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan, Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB,

Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas, Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata, Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif

Pencapaian PN 3 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut:

a. Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital
b. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya
c. Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim
d. Pengembangan Konektivitas Jalan Pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan4.

4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas,

   Sasaran Utama PN 4: Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata, Terwujudnya Kesehatan untuk Semua, Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja, Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat

   Pencapaian PN 4 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut:

   a. Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi
   b. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
   c. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
   d. Penuntasan TBC
   e. Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
   f. Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional

5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

   Sasaran Utama PN 5: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan, Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

   Pencapaian PN 5 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut:

   a. pengembangan hilirisasi kelapa sawit;
   b. pengembangan industri kimia;
   c. pengembangan KI Weda Bay.

6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan

   Sasaran Utama PN 6: Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan, Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, ewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

   Pencapaian PN 6 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut:

   a. Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif;
   b. Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa;
   c. Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
   d. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU);
   e. Pelaksanaan Reforma Agraria.

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan,
   Sasaran Utama PN 7: Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional, Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani, Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba, Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan, Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan, Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
   Pencapaian PN 7 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut:
   a. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
   b. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
   c. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
   Sasaran Utama PN 8: Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju, Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dengan
   Pencapaian PN 8 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut:
   a. Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,
   b. Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan,
   c. Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut,
   d. Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana

IV.2.3 Kebijakan Kewilayahan Sulawesi Selatan Tahun 2026

Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional, pembangunan wilayah Pulau Sulawesi tahun 2026 diarahkan untuk (i) peningkatan produktivitas yang berbasis pada potensi lokal melalui (a) pengembangan kawasan industri terpadu dan berkelanjutan untuk hilirisasi sumber daya mineral, (b) pengembangan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang memanfaatkan teknologi modern dan sistem irigasi terpadu, serta (c) peningkatan kapasitas SDM yang didukung dengan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri; (ii) penguatan swasembada pangan dan energi melalui (a) peningkatan produksi pangan strategis dan pengembangan lumbung pangan yang didukung dengan penguatan infrastruktur pendukung produksi, pengolahan, dan distribusi pangan, serta (b) pengembangan energi terbarukan dan peningkatan akses energi listrik, khususnya di daerah kepulauan; dan (iii) percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui (a) pemberdayaan ekonomi perdesaan dan daerah afirmasi, termasuk di kawasan transmigrasi, (b) peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, (c) perluasan akses layanan dasar, (d) pengembangan pariwisata inklusif dan berkelanjutan, serta (e) pengelolaan multiancaman bencana geologi dan pengembangan mitigasi berbasis alam.

Highlight Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sulawesi Tahun 2026:

1. Hilirisasi komoditas unggulan yang berbasis teknologi dan berkelanjutan;
2. Pengembangan KEK, KI, DPP, dan sentra produksi berbasis sumber daya lokal;
3. Peningkatan akses pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk memenuhi kebutuhan industri lokal dan pariwisata;
4. Pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah untuk meningkatkan konektivitas ekonomi;
5. Penguatan swasembada pangan melalui pengembangan kawasan lumbung pangan yang didukung dengan pembangunan irigasi secara terpadu;
6. Pengembangan energi terbarukan dan peningkatan akses listrik, khususnya di daerah kepulauan;
7. Pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan;
8. Perluasan akses layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
9. Pengelolaan kawasan perkotaan, seperti WM Makassar, WM Manado, serta kawasan perkotaan sedang dan kecil, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
10. Pengelolaan multiancaman bencana geologi dan pengembangan mitigasi berbasis alam;
11. Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), serta pengendalian penyakit menular (TBC, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), dan peningkatan cakupan imunisasi;
12. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, melalui penguatan tata kelola keuangan daerah, kualitas aparatur, dan sinergi antardaerah dalam implementasi kebijakan pembangunan;
13. Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
14. Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
15. Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
16. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK);
17. Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
18. Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
19. Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir

Gambar IV.3
Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi Tahun 2026

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2026	5,9 - 6,5	86,9 -89,5	3,3	6,50 – 7,00	0,346-0,352	0,54	33,26 – 37,47	77,81	4,00 – 4,18

Tabel IV.3
Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

No	Sasaran	Target
1	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9 – 6,5
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	86,9 – 89,6
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,3
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 – 7,00
5	Rasio Gini	0,346 – 0,353
6	Indeks Modal Manusia	0,54
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	33,26 -37,47
8	IKLH Daerah	77,81
9	TPT	4,00 – 4,18

IV.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2026- 2029. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2026 yaitu "**Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berakhlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif**" dengan 8 prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi.
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal.
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing.
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan.
6. Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital.
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.

Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan /Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RKPD 2026
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 1: Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi				
Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Modal Manusia	Indeks Modal Manusia	Angka	N.A	0,53
Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,83	74,06
Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	• Rata rata lama sekolah • Harapan Lama Sekolah • Persentase siswa yang terserap di perguruan tinggi	Tahun Tahun Persen	8,86 13,55 23,04	9,59-9,60 13,87-13,88 25,71
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2: Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal				
Tujuan 1.2: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang adaptif	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,87	3,09
Sasaran 1.2.1:				

Prioritas Pembangunan /Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RKPD 2026
Meningkatnya kualitas demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	76,43	83,54
Sasaran 1.2.2: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan	• Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen Skor	79,04 55,26	79,46 56,99–57,11
Sasaran 1.2.3: Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	• Indeks Perlindungan Anak • Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Ketimpangan Gender	Angka Angka Angka	60,74 56,67 0,366	61,97-63,48 56,98 0,336-0,331
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 3: Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru				
Tujuan 2.1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	• Laju Pertumbuhan Ekonomi • Indeks Gini Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Persen Angka Skor	5,02 0,363 80,86	4,8-6,5 0,358 84,06
Sasaran 2.1.1: Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	• Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB • Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB • Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Indeks Ketahanan Pangan	Persen Persen Persen Persen	13,02 N.A 6,99 83,82	46,67-47,13 1 6,63 86,01
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 4: Peningkatan ekonomi dan fiskal				

Prioritas Pembangunan /Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RKPD 2026
daerah yang modern dan berdaya saing				
Sasaran 2.1.2: Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	9,68	10,9
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 5: Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan				
Sasaran 2.1.3: Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	• Tingkat Inflasi Inklusi Keuangan	Persen Persen	1,23 75,02	3,05-3,72 85,03
Sasaran 2.1.4: Meningkatnya pembangunan perdesaan	Persentase Desa Mandiri	Persen	32,88	34,05
Sasaran 2.1.5: Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	• Tingkat Kemiskinan (%) • Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen Persen	7,77 4,19	6,85 - 7,08 3,64 - 4,03
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 6: Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital				
Tujuan 3.1:				

Prioritas Pembangunan /Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RKPD 2026
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Nilai	54,43	55,66
Sasaran 3.1.1: Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Nilai Pilar Infrastruktur ITDN	Nilai	59,93	62,12
Sasaran 3.1.2: Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat	Nilai Pilar Keterampilan Masyarakat ITDN	Nilai	53,92	62,12
Tujuan 3.2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81,74	81,86
Sasaran 3.2.1: Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Angka	69,02	70,03
Sasaran 3.2.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,66	55,5 - 57
Sasaran 3.2.3: Meningkatnya inovasi pembangunan daerah	• Indeks SPBE • Indeks Pelayanan Publik	Poin Poin	3,94 4,12	3,3 4,44
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 7: Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan				
Tujuan 4.1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan	• Indeks Wiliamson • IKLH	Angka Angka	N.A 75,69	0,54 78,045

Prioritas Pembangunan /Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RKPD 2026
lingkungan yang berkelanjutan	• Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N.A	33,46
Sasaran 4.1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	85,64	88,83
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 8: Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.				
Sasaran 4.1.2: Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Poin	140,76	134,20-133,12

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

Dalam kerangka perwujudan prioritas provinsi, pembangunan Kota Makassar merupakan bagian Kawasan Pembangunan Makassar dan sekitarnya yang diarahkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa dan Perdagangan dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Inovasi Riset dan Teknologi. Pembangunan Kawasan Makassar diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa dan Perdagangan dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Inovasi Riset dan Teknologi, untuk itu sasaran pembangunan wilayah Kawasan Makassar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5
Sasaran Pembangunan Kawasan Makassar dan Sekitarnya Tahun 2026

No	Indikator Pembangunan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,43
2	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	186,75
3	Kontribusi PDRB	35,04
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,53
5	Tingkat Kemiskinan (%)	3,78-3,46
6	Rasio Gini	0,359
7	Indeks Pembangunan Manusia	85,75
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,98
9	IKLH	66,38

Pembangunan Sulawesi selatan akan dilakukan berdasarkan substansi transformasi dan landasan transformasi yang difokuskan pada penguatan transformasi yaitu (1) pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial; (2) hilirisasi sumber daya alam dan produktivitas tenaga kerja; (3) penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan; (4) pemantapan stabilitas ekonomi makro daerah; dan (5) perkuatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata yang diiringi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana serta mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar tercapai pendapatan yang tinggi melalui pengembangan kawasan pembangunan berdasarkan potensi wilayah, pengembangan ekonomi biru di kawasan andalan laut Teluk Bone dan Selat Makassar, penerapan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan, diiringi dengan implementasi transformasi digital, penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah dan rantai pasok global, dalam rangka memperkuat peran Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA.

Pengembangan kawasan Makassar dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengingat peran Kawasan Makassar sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Mamminasata yang merupakan kontributor utama PDRB Sulawesi Selatan. Selain itu Kawasan Makassar juga merupakan Kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata yaitu Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) DPP Baru TorajaMakassar-Selayar yang meliputi TN Bantimurung Bulusaraung, KPPN Makassar, dan Geopark Maros-Pangkajene Kepulauan.

IV.2.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah Kota Makassar tahun 2026 menggambarkan fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD. Secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam perumusan prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Makassar mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2026 yaitu: **"Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing"** yang kemudian dijabarkan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi
2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan
3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan
5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal

6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital
7. Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi
8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan
9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kota Makassar tahun 2026 difokuskan pada sasaran dan target kinerja pembangunan sebagaimana pada tabel bereikut:

Tabel IV.6.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	*Baseline* 2024	Target Kinerja 2026	Kondisi Akhir RPJMD
1	Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	**Tujuan 1.1:** Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	6,43	8,20
		Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,17	19,46	20,26
			Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%)	20,03	20,30	20,80
		Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja, dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,71	9,53	9,17
			PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	165.95	186.75	246.34
2	Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan	**Tujuan 1.2:** Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	4,10	4,23	4,35
		Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,58	0,61	0,67
		Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)	1,19	1,77	2,20
			Indeks Ketahanan Pangan	83,86	87,95	92,58

		Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	-50,26	8,85	9,5
3	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	**Tujuan 2.1:** Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia IPM)	85,23	85,86	86,84
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	81,96	82,10	82,38
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,33	75,66	76,27
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	18.386	20.543	27.097
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	**Tujuan 3.1:** Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur	74,25	79,46	82,54
		Sasaran 3.1.1: Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	35,40	84,45	91,99
			Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	49,39	27,35	34,77
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				
			Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	10	25	100
5	Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri	**Tujuan 4.1:**	Indeks Inovasi Daerah	76,56	79,23	83,81

	ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah				
		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi	4,46	4,56	4,75
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)	101 Inovasi	4	10
		Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Terhadap PDRB (%)	2,18	2,28	2,48
		Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	5.619.596	5.634.009	5.665.491
			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,51	1,65	1,8
		Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda (%)	75	33.3	33.3
			Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan (%)	N.A	100	100
		Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif	4.220	4.831	6.310
			Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital (%)	N / A	15.43	24,31

6	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital	**Tujuan 5.1:** Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	76,78	81,31	86,65
		Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	69,69	70,50	80,50
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,01	4,03	4,06
			Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK	87,00	87,98	89.50
7	Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	**Tujuan 5.2:** Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketentramandan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	77	83
		Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	54,03	56,02	59,01
		Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran	4,363	4,862	5,289
8	Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	**Tujuan 6.1:** Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	63,13	63,15	63,18
		Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,183	0,177	0,168
		Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	67,04	70,60	74,20

		Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	57,67	61,00	67,00
			Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,476	0,518	0,581
		Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan (%)	4,97	3,46	3,15
		Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio	0,372	0,359	0,341
		Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	41,1	42,51	44,63
9	Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	**Tujuan 7.1:** Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,41	66,38	67,01
		Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	58,70	74,15	74,75
			Indeks Kualitas Udara	74,92	75,52	76,42
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,92	36,13	36,34
			Timbulan Sampah Yang terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2.01	10	30
		Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	113,71	107	100
		Sasaran 7.2.1:	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	0,48	0,51

		Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	NA	34,98%	42,13%

IV.2.5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026

Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2026, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diperlukan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *assessment* komprehensif terhadap kondisi ekosistem ketenagakerjaan, Perkuatan akses pembentukan *startup* teknologi yang fokus pada solusi untuk masalah industri dan perdagangan lokal, Merancang skema pemberian modal usaha UMKM tahap awal dengan persyaratan yang terukur dan fokus pada kelompok usaha binaan di wilayah pesisir dan pulau, dengan Prioritas:
   - Belanja Makassar Berbagi Jaminan Sosial (Makassar Berjasa)/Makassar *Sosial Assistance Program* (*Social Security Sharing*).
2. Memutakhirkan penataan Sistem dan Penguatan Basis Data melalui pemetaan potensi PAD yang belum optimal atau belum tereksplorasi di berbagai sektor ekonomi daerah, dengan Prioritas:
   - Gratis Iuran Sampah Bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem
3. Melakukan pemetaan komoditas pangan unggulan di berbagai wilayah Makassar dan mengidentifikasi potensi peningkatan produksi serta produktivitas dengan konsep *urban farming*, dengan Prioritas:
   - Belanja pengembangan *Urban Farming*
   - Pengadaan Mesin Perahu
4. Membangun tata kelola investasi yang efisien dan transparan dengan mengembangkan sistem dan prosedur investasi yang sederhana, cepat, dan akuntabel, dengan Prioritas digitalisasi dan integrasi layanan
5. Mengoptimalkan pembangunan dan perbaikan sarana fisik seperti gedung sekolah ramah lingkungan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang inklusif dan aksesibilitas dengan mengutamakan pemerataan akses pendidikan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Penyediaan Teknologi pendidikan, dengan Prioritas:
   - Pembangunan dan Rehabilitasi SMP
   - Pembangunan dan Rehabilitasi SD
   - Pembangunan dan Rehabilitasi PAUD
   - Pengadaan Seragam SD
   - Pengadaan Seragam SMP
   - Pengadaan peralatan sekolah bagi siswa-siswi SD dan SMP
   - Bantuan iuran kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas. Posyandu) dan fasilitas kesehatan lanjutan dengan dukungan tenaga kesehatan yang terlatih, serta pemerataan layanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui perilaku hidup sehat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga Kesehatan, mengintegrasikan sistem surveilans untuk memantau berbagai jenis penyakit dengan satu sistem terkoordinasi, memperkuat kebijakan tentang akses kesehatan yang inklusif. terutama bagi kelompok rentan, dengan Prioritas:
   - Gratis pemasangan instalasi air bersih
   - Hibah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar, guna mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing,

sebagai bentuk kontribusi tehadap layanan gratis pemeriksaan pasien.

7. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum pendidikan dasar hingga menengah yang lebih relevan dengan kebutuhan industri 4.0 dan Society 5.0, dengan penekanan pada kreativitas, kolaborasi, komunikasi dan literasi digital, dengan Prioritas:
8. Intervensi dasar infrastruktur permukiman melalui perbaikan sanitasi, optimalisasi SPAM, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan rentan dan penyusunan rencana teknis pembangunan infrastruktur (pasar. konektivitas dan olahraga), dengan Prioritas:
    - Rehabilitasi/Pembangunan Jalan
    - Pembangunan Tanggul
    - Pengembangan Sistem Drainasi
    - Rehabilitasi Sistem Drainase
    - DED Pengendalian Banjir
    - Pengembangan pengendali banjir
    - Pengadaan *Vibrator Rolle*, Mobil Crane 8 Ton, *Excavator Amphibious*, *Wheel Excavator*
    - Perencanaan Pembangunan Kantor Pemerintah
    - Pembangunan Kantor Pemerintah
    - Pembangunan/Pembuatan Jalan Paving,
    - Pembangunan Jalan Beton
    - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Bansos)
    - Perbaikan Rumah Tidak Layak huni
    - Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
9. Percepatan legalisasi dan digitalisasi RDTR melalui penyusunan dan harmonisasi substansi teknis RDTR di wilayah strategis dan kawasan pertumbuhan dengan melibatkan partisipasi publik dan ahli dalam prosesnya, pengawas pemanfaatan ruang serta pengembangan dashboard digital untuk pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang.
10. Pengembangan layanan publik digital melalui digitalisasi proses administrasi pemerintahan dan penguatan literasi digital ASN, Dan Pengembangan sistem layanan digital terintegrasi dan berbasis data dan kebutuhan warga, Digitalisasi Pelayanan publik dan informasi publik melalui *Makassar Super Apps,* dengan Prioritas:
    - Belanja Aplikasi Makassar Super Apps
    - Pembangunan Kantor Lurah
    - Pembangunan Kantor Camat
    - Rehabilitasi Kantor Lurah
    - Rehabilitasi Kantor Camat
    - Pembangunan Gedung Storage Pangan
11. Peningkatan kapasitas SDM perencana, penguatan data, dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti dalam seluruh sektor, termasuk dalam pemantauan dan evaluasi, pengembangan riset dan inovasi, serta penerapan teknologi, termasuk bekerjasama dengan perguruan tinggi.
12. Desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan melaksanakan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi, pemberian insentif dan pencairan TPP bagi pegawai secara proporsional dan tepat waktu.

13. Mengembangkan daya tarik wisata lewat kurasi destinasi, kompetisi ide, revitalisasi kawasan, dan promosi digital yang didukung oleh pembangunan basis data terpadu untuk memperkuat daya:
    - Rehabilitasi Pelataran Losari
    - Pembangunan Dermaga Pulau
    - Pelatihan dan Pengembangan Kelompok-Kelompok Sadar Wisata (KSW)
14. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri ekonomi kreatif melalui regulasi yang adaptif, infrastruktur yang memadai, dan aksesibilitas terhadap sumber daya, dengan Prioritas:
    - Belanja *Makassar Creative Hub*, Pengembangan *Skill* dan *Co Working Space*
    - Hibah Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), untuk mendukung Prioritas Daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan Pemuda melalui pengembangan kapasita daya saing kepemudaan.
15. Penguatan Institusionalisasi Partisipasi Warga, melalui forum komunikasi kelurahan dan Kecamatan, (antara warga, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas) dan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat dalam tim keamanan lingkungan dengan pendekatan berbasis masyarakat terhadap rasa aman dan kebutuhan ruang publik, dengan Prioritas:
    - Hibah Rumah Ibadah, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama, sebagai bentuk dukungan terhadap Prioritas Daerah dalam meningkatkan kualitas toleransi dalam masyarakat, melalui pencegahan dan penanganan konflik sosial dan meningkatkan ketahanan budaya dan moderasi beragama.
    - Pengadaan CCTV, guna meningkatkan kualitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
16. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Perempuan, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Sosial, Peningkatan Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan, Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender, Advokasi dan Kesadaran Sosial, dan Penguatan Infrastruktur dan Kebijakan Gender, dengan Prioritas:
    - Hibah PKK, Hibah Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar
    - Hibah Kodim 1408/Makassar, Hibah Polrestabes Kota Makassar, Hibah Polres Pelabuhan Kota Makassar, untuk mendukung Prioritas Daerah meningkatkan kualitas keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
17. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak, dengan Prioritas: Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak, serta kualitas pendidikan yang diterima.
18. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga serta Pengembangan tempat latihan olahraga yang terjangkau dan ramah bagi pemuda di kecamatan dan Menciptakan peluang kerja yang layak dan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda, terjaminnya aspek kesehatan fisik dan mental pemuda serta keterlibatan Partisipasi Politik dan Sosial, dengan Prioritas:

- Pembangunan Stadion Sepak Bola.
- Rehabilitasi Lapangan Karebosi (Pembangunan Tahap I, dan Tahun Jamak)
- Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Hibah Pramuka, Hibah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), Hibah *National Paralympic Committee* (NPC) Kota Makassar, dalam mendukung prioritas daerah meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga.

19. Akselerasi peningkatan SDM dan perluasan akses ekonomi melalui fasilitasi pembentukan kelompok usaha mikro dan kecil serta koperasi, dengan fokus pada penyediaan informasi pasar dan peluang usaha yang menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, dengan Prioritas:
    - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil
    - Inkubator Usaha Mikro
20. Penguatan penempatan tenaga kerja Pengembangan pelatihan vokasi inklusif berbasis permintaan pasar, pelatihan *soft skills* dan literasi digital bagi penyandang disabilitas serta sertifikasi kompetensi untuk penyandang disabilitas.
21. Rehabilitasi awal dan pengurangan sampah dari lingkungan hidup melalui review dan harmonisasi kebijakan daerah terkait pengelolaan lingkungan, pemetaan rantai sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, penyusunan peta jalan pengelolaan sampah dan pengembangan RTH dan pemetaan lokasi potensial RTH baru, dengan Prioritas:
    - Belanja Sarana dan Prasarana Persampahan Motor Tiga Roda, Mobil tangki Penyiran, Mobil Dump Truck.
    - Pengadaan Lahan TPA Tamangapa
    - Pembangunan Posko Keanekaragaman Hayati Nipa-Nipa
    - TPS3R dan Pengelolaan Sampah terpadu
22. Penguatan edukasi melalui program edukasi perubahan iklim berbasis komunitas dengan kolaborasi berbagai pihak terkait perubahan iklim, dan penguatan sistem deteksi dini rawan bencana.
23. Pengelolaan Dana Kelurahan, terkait Kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana lingkup kelurahan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan, baik yang bersumber dari APBD maupun DAU.

Sebagai langkah konkret mencapai tujuan dan sasaran, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029, diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas. Kegiatan Prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian visi, misi dan Program Strategis (Janji Politik). Kegiatan Prioritas ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMD Tahun 2O25-2O29, yang disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik SKPD, BUMD Swasta dan Stakeholder lainnya. Kegiatan Prioritas RPJMD dalam pencapaian Program Strategis dan Program Unggulan (Janji Politik) Kota Makassar Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel IV.7.
Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja RPJMD Dalam Pencapaian Janji Politik Kota Makassar Tahun 2025-2029

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung-jawab
Misi 1:			

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja			
1. Membangun *Makassar Creative Hub* sebagai wadah kreatifitas, pengembangan *skill*, dan *Co-Working Space* di setiap Kecamatan	• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 500 Orang 2. Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi bagi pekerja industri Pariwisata 200 orang 3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 300 orang 4. Fasilitasi Pelatihan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas 500 orang	Dinas Pariwisata
	• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pembangunan dan Pembentukan *Makassar Creative Hub* pada 5 Lokasi	
	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi SDM siap pakai sebanyak 150 Orang 2. Makassar *Skill Competition* (1 kali) 3. Sertifikasi Kompetensi sebanyak 100 orang	
2. Pemberian modal usaha UMKM	Program Pengembangan UMKM	1. Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM (Target 100 Koperasi dan 300 UMKM) 2. Fasilitasi Akses pembiayaan KUR (Target 153 KKMP, 50 Koperasi non KKMP dan 150 UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3. Membentuk Gerai UMKM pada 153 kelurahan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik (30 kelurahan) 2. Peningkatan Kualitas Mutu produk dan Penumbuhan Kemampuan Usaha sebanyak 1000 UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pengembangan dan Pembinaan Melalui Inkubator Center sebanyak 1000 UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Penciptaan 10 titik akses PKL	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pelatihan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (2 titik akses PKL) 2. Penataan dan Pembinaan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6. Pemberdayaan ekonomi wilayah tempat pembuangan akhir	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik (280 orang yang dilatih untuk daur ulang sampah plastik)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

7. Pembangunan pusat budidaya dan wisata mangrove di wilayah pesisir dan pulau	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Penyusunan masterplan dan DED pengembangan Kawasan ekowisata Mangrove (Lantebung, Untia dan Lakkang); 2. Pelatihan tata kelola destinasi dan pelatihan manajemen kepariwisataan bagi 6 KSW	Dinas Pariwisata
8. Menggalakkan konsep *urban farming* pada masyarakat	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Pembentukan Kelompok *Urban Farming* Pada 15 Lokasi 2. Pengadaan Bibit/Peralatan *Urban Farming*	Dinas Perikanan dan Pertanian
	• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pembangunan Storage Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
9. Relaksasi PBB Bagi Pensiunan Pejabat Negara, Guru, Polri, Pensiunan BUMN/BUMD dan Veteran Pejuang	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 50% bagi WP Pensiunan Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri, Pensiunan BUMN, Pensiunan BUMD termasuk istri/suami, dan/atau janda/dudanya 2. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 75% bagi WP orang pribadi Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Veteran Pembela Kemerdekaan, dan penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya termasuk janda/dudanya 3. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi pensiunan swasta dengan penghasilan terakhir di bawah Rp. 4 jt 4. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu secara ekonomi	Badan Pendapatan Daerah
10. Relaksasi Pajak Reklame bagi UMKM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Izin penyelenggaraan reklame tidak berlaku bagi: Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m^2 (dua meter persegi) dan menempel di bangunan miliknya/ dikuasai	Badan Pendapatan Daerah
11. Relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penataan regulasi daerah dan tata Kelola Investasi daerah Kota Makassar dan investasi tumbuh serta pembentukan *command center* (fasilitasi investasi) investasi daerah untuk layanan proaktif 2. Pelatihan dan intervensi *MINDSPACE Service Excellent*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. *Updating* data PBB-P2 2. Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB 3. Koordinasi dengan SKPD pengelola retribusi untuk pembayaran retribusi secara non tunai 4. Integrasi data dengan SKPD terkait (*host to host* Makassar Super Apps) 5. Pemasangan stiker pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah

		6. Sosialisasi semua jenis Pajak Daerah 7. Mengintensifkan pengawasan, pengendalian, penindakan, dan penagihan piutang Pajak Daerah secara lebih *massif* 8. GIS pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah	
13. Perlindungan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja dan Makassar Berbagi Jaminan Sosial (Berjasa)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
	• Program Hubungan Industrial • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan • Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua) bagi 45.000 pekerja rentan 2. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi 36.466 pekerja rentan 3. Pemberian Jaminan Sosial bagi 17.217 pekerja keagamaan, Kader Kesehatan/KB, Rt/Rw	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk KB, Sekretariat Daerah, dan Seluruh Kecamatan
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
14. Gratis seragam dan Peralatan sekolah bagi siswa-siswi SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	Pemberian Seragam Gratis untuk siswa SD dan SMP di Kota Makassar	Dinas Pendidikan Dinas Koperasi, UKM
15. Penyediaan ambulance secara gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Operasional Ambulans Laut Operasional ambulans Puskesmas dan RSUD	Dinas Kesehatan
16. Penambahan Insentif Nakes pada fasilitas kesehatan pemerintah di pulau-pulau	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemberian tunjangan tenaga medis dan paramedis pulau berdasarkan zonasi wilayah	Dinas Kesehatan
17. Layanan Gratis pemeriksaan dan Pengantaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Pengadaan motor operasional pengantaran obat sebanyak 2 unit	Dinas Kesehatan

Obat Pasien Rawat Jalan dari RS ke Rumah Pasien	Upaya Kesehatan Masyarakat		
18. Penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan pulau	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeriksaan kesehatan terpadu dokter spesialis untuk masyarakat pulau (4 kali dalam setahun)	Dinas Kesehatan
19. Pembangunan gedung Dinas Pendidikan *(Education City Hall)*	Program Pengelolaan Pendidikan	1 unit Gedung Kantor Dinas Pendidikan/*Education City Hall*	Dinas Pendidikan
20. Pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi	Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan kompetensi guru melalui lanjut studi dengan pemberian beasiswa sebanyak 15 Orang untuk jenjang S2, dan 10 Orang untuk jenjang S3	Badan Kepegawaian dan Pengembang-an SDM Daerah
21. Pemberian Tunjangan bagi Wali Kelas SD dan SMP yang bertugas di pulau-pulau	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemberian tunjangan khusus sebagai bentuk kompensasi kepada tenaga Pendidik dan Kependidikan di daerah khusus (perbatasan, atau pulau-pulau)	Dinas Pendidikan
22. Pembangunan Sekolah terintegrasi PAUD/SD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan unit sekolah baru terintegrasi (PAUD/SD)	Dinas Pendidikan
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan			
23. Perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*;	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (1 unit); 2. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Perkotaan (1 unit); 3. Pembangunan SPALD skala Perkotaan dengan sambungan IPAL Losari 480 m^3/hari atau 1000 SR; 4. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Permukiman (1 unit); 5. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (1500 rumah tangga); 6. Operasi dan pemeliharaan SPALD (10 unit); 7. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPALD (210 orang); 8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara SPALD (100 Penyelenggara)Penyediaan Unit Pengolahan Setempat (1167 Rumah Tangga); 9. Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPALD (3 dokumen)	Dinas Pekerjaan Umum

	• Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Pelabuhan Baru, Kawasan Tamalanrea- Biringkanaya dan Kawasan Bantaran Kanal Jongaya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20 perumahan dilengkapi PSU	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24. Pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional	Program Penataan Bangunan Gedung	1. Dokumen Amdal dan Andal Lalin Stadion; 2. Penimbunan/pematangan lahan (6,5 Ha); 3. Konstruksi Stadion Sepak Bola (1 unit)	Dinas Pekerjaan Umum
25. Revitalisasi pasar tradisional di Barombong	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan modern di lokasi strategi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26. Penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyediaan/Pemeliharaan Bus Listrik 2 unit 2. Penyusunan Masterplan Perparkiran 3. Pengamanan Kegiatan *Car Free Day* 4. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
27. Bedah Rumah bagi KK Prasejahtera	Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan 130 unit RTLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28. Memastikan kebutuhan air bersih warga terpenuhi, gratis pemasangan instalasi air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Peningkatan SPAM, 4 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/ unit (200 SR); 2. Pembangunan pengolahan air minum dan SPAM jaringan perpipaan 8 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/ unit (400 SR). 3. Operasi dan Pemeliharaan sarana air siap minum dan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 5 unit. 4. Perluasan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 200 SR.	Dinas Pekerjaan Umum PDAM
Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, serta Pariwisata			
29. Pembuatan *blue print* pembangunan situs kota tua di Makassar	Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya	Penyusunan Regulasi Hukum terkait Zonasi kawasan Kota lama Makassar	Dinas Kebudayaan
30. Menghidupkan etnoturisme di kota makassar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pembentukan Kelompok sadar Wisata di 2 Lokasi yakni (Kampung Rama dan Kawasan Pecinan) 2. Penyusunan dokumen masterplan dan DED pengembangan Kawasanekturisme (Kampung Paropo, Kampung Rama dan Kawasan Pecinan); 3. Pelatihan tata kelola destinasi dan pelatihan manajemen kepariwisataan bagi masyarakat	Dinas Pariwisata

		di kawasan Kampung Paropo, Kampung Rama dan Kawasan Pecinan	
31. Penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah	Program Pengelolaan Persampahan	1. Membentuk 8 BSU pada kecamatan yang memiliki kanal 2. Menyediakan 12 tempat sampah pilah sepanjang kanal 3. Melakukan sosialisasi di 4 lokasi kepada masyarakat di sekitar kanal terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 4. Menerbitkan surat edaran terkait penataan kanal 4. Menjalin kemitraan dengan 5 pihak swasta untuk penyediaan sarana persampahan, edukasi, dan sosialisasi pengelolaan sampah sepanjang kanal	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Koordinasi teknis dengan BBWS dan melaksanakan pembersihan kanal setiap minggu, dan pengangkatan sedimen 2 kali sebulan (3 kanal: Jongaya, Sinrijala dan Pannampu)	Dinas Pekerjaan Umum
32. Penataan Pesisir dan Pulau sebagai sentra baru ekoturisme	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pembentukan Kelompok sadar Wisata di 2 Lokasi yakni (Pulau Barrang caddi dan Pulau Langkai) 2. Penyusunan dokumen masterplan dan DED pengembangan Kawasan ekoturisme (Pulau Lanjukang, Pulau Barrang Caddi dan Pulau Barrang Lompo); 3. Pelatihan tata kelola destinasi dan pelatihan manajemen kepariwisataan bagi masyarakat dan KSW di Pulau Lanjukang, Pulau Barrang Caddi dan Pulau Barrang Lompo	Dinas Pariwisata
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum			
33. Digitalisasi Pelayanan publik, *Mulia Super Apps*	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Integrasi Layanan Publik melalui *Super Apps*: perluasan layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, pendidikan, pajak, dan bantuan sosial.	Dinas Komunikasi dan Informatika
34. Desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan	• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyediaan sarana pelayanan administrasi berupa komputer dan jaringan internet pada 153 kelurahan	Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)
	• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Dinas Komunikasi dan Informatika
35. Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi	Program Kepegawaian Daerah	1. Peninjauan dan pemutakhiran dokumen analisis jabatan (Anjab) dan evaluasi jabatan (Evjab) 2. Penyusunan pedoman internal pelaksanaan seleksi terbuka berbasis meritokrasi	Badan Kepegawaian dan Pengembang-an SDM Daerah

		3. Penyesuaian dan digitalisasi sistem manajemen kepegawaian untuk mendukung seleksi terbuka (integrasi dengan SIASN/BKPSDM) 4. Penyusunan database rekam jejak dan kompetensi ASN	
36. Pemberian insentif dan pencairan TPP bagi pegawai secara proporsional dan tepat waktu	• Program Kepegawaian Daerah	Menerapkan sistem digital dalam pengelolaan TPP dan mengembang-kan formula perhitungan TPP yang lebih berbasis pada kinerja aktual	Badan Kepegawaian dan Pengembang-an SDM Daerah
	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan penghasilan ASN 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
37. Pemilihan langsung RT/RW	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Monitoring dan Evaluasi Ketua RT/RW 2. Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT/RW, bila diperlukan	Bagian Pemberdaya-an Masyarakat Sekretariat Daerah
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)
38. Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan Posko KAMTIBMAS di 996 RW pada 153 Kelurahan	Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)
39. Pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Monitoring dan verifikasi data penerima insentif PKA tahun 2026 2. Pemberian insentif bagi PKA 2026	Bagian Kesejahteraa n Rakyat, Sekretariat Daerah
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga			
40. Penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas	• Program Penyelenggar aan Jalan	Pembangunan dan/atau rehabilitasi 1 km pedestrian	Dinas Pekerjaan Umum
	• Program Penataan Bangunan Gedung	1. Pembangunan 15 unit Bangunan Gedung Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum

41. Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	• Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak	Penambahan honor jasa bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak korban tindak kekerasan dan disabilitas 2. Pendampingan pekerja sosial kepada anak yang berhadapan hukum (50 anak) 3. Fasilitasi anak balita terlantar untuk mendapatkan orang tua asuh (31 Anak)	Dinas Sosial
42. Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel	• Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel (100 orang)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
	• Program Rehabilitasi Sosial	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemberian pelatihan keterampilan bagi disabilitas	Dinas Sosial
43. Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
44. Menjamin siwa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dengan mengembalikan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dengan pemberian beasiswa (SD 200 Siswa dan SMP 200 Siswa)	Dinas Pendidikan
45. Makassar bebas Anak Jalanan	• Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Pemantapan dan penertiban awal dengan fokus utama penguatan dasar hukum, peningkatan kapasitas internal, dan penertiban awal yang terstruktur. 2. Intensifikasi penertiban dan sinkronisasi data meliputi peningkatan intensitas dan jangkauan penertiban, serta memperkuat koordinasi dengan dinas sosial	Satuan Polisi Pamong Praja
	• Program Rehabilitasi Sosial	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemenuhan kebutuhan dasar 20 anak jalanan dan pengemis (fasilitasi NIK, fasilitasi ke layanan pendidikan dan kesehatan) 3. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak jalanan dan pengemis 4. Pelatihan keterampilan bagi 50 anak jalanan usia 15-18 tahun dan pengemis produktif	Dinas Sosial
46. Pembangunan gelanggang remaja dan *sport center*	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 7: Meningkatkan			

Kualitas Lingkungan Hidup. Serta Mitigasi Bencana			
47.Meningkatkan persentase ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-	Dinas Lingkungan Hidup
		1. Identifikasi Potensi RTH (1 Dokumen) 2. Inventarisasi RTH (15 Kecamatan) 3. Pendampingan Penyusunan PERDA 4. Pengelolaan Mangrove melalui CSR 5. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan RTH 6. Penambahan 1 lahan pemakaman	
48.Revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif	• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Pengadaan bibit/pohon) 2. Revitalisasi Taman Kota	Dinas Lingkungan Hidup
	• Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Pemetaan kondisi eksisting taman kota (fungsi, aksesibilitas, aspek ramah anak dan ramah gender). 2. Konsultasi publik dengan anak, remaja, perempuan, kelompok difabel, masyarakat sekitar. 3. Penyusunan masterplan revitalisasi taman bermain dan kreatif (standar KLA, SNI taman bermain). 4. Penyusunan regulasi/Perwali/Surat Edaran teknis tentang taman ramah anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
49.Gratis iuran sampah bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem	• Program Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi Perwali dan monev terkait iuran sampah gratis	Dinas Lingkungan Hidup
	• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemutakhiran data rumah tangga kategori miskin sebagai calon penerima layanan gratis iuran sampah, dengan daya listrik R1-450 VA dan R1-900 VA pada 153 kelurahan	Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)
50.Penguatan Mitigasi bencana pada warga masyarakat	• Program Penanggulangan Bencana	1. Peningkatan kapasitas kawasan di kecamatan rawan bencana 2. Pelatihan Pencegahan dan mitigasi kepada masyarakat rawan bencana terutama kepada kelompok rentan 250 orang 3. Penyediaan Peralatan kebencanaan (*Early Warning System*)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	• Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (53 Kelurahan) 2. Pelatihan Relawan Kebakaran (Target 900rang) 3. Tanggap kebakaran Rumah Tangga (Target 22 Keluarga) 4. Pelatihan dan Diklat Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Peyelamatan

IV.2.5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah

disampaikan pada proses politik. Program pembangunan daerah Kota Makassar Tahun 2026, merupakan sekumpulan program prioritas yang secara spesifik langsung terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran, program untuk menjawab prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik dan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun Program Prioritas Kota Makassar Tahun 2026, tercantum pada tabel berikut:

Tabel IV.8.
Program Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
1	Peningkatan daya saing daerah melalui penciptaan kesempatan kerja pada sektor industry dan perdagangan yang didukung SDM berkualitas, pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi, pemanfaatan teknologi	**Tujuan 1.1:** Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	6,43	
		Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dan Perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,17	19,46	
			Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil. dan Sepeda Motor (%)	20,03	20,30	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	4,80%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang kota Makassar	11.95%	12.10%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		rogram Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	60%	70%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		rogram Pengembangan UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	N.A	1%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,71	9,53	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		dan Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	165.95	186.75	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	20,49%	21,21%	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60,05%	61%	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10.45%	15%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pertumbuhan Wirausaha	12.43%	14.5%	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	20.603,90 Ton	21.722 Ton	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N.A	12.92%	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	16.61%	17.75%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Trnasformasi ekonomi dan fiscal daerah melalui perbaikan iklim investasi yang kompetitif, stabilitas harga,	**Tujuan 1.2:** Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	4,10	4,23	
		Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,58%	0,61	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
	ketahanan pangan yang efisien dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	38.17%	42.17%	Badan Pendapatan Daerah
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	50.00%	50.00%	
			Persentase Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	92.41%	93.00%	
		Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)	1,19	1,77	
			Indeks Ketahanan Pangan	83,86	87,95	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	100%	100%	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	15614 Ton	15616 Ton	Dinas Perikanan dan Pertanian
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	5.4 Ton	8 Ton	
			Peningkatan Produksi Hortikultura	310,7 Ton	330,60 Ton	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan	Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan	N/A	2400	Dinas Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKG)			
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.519.58 Ton	1.568.35 Ton	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	1,31%	1,30%	Dinas Ketahanan Pangan
		Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	-35,16	3,00	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investas	Nilai Investasi Rp.3.827.931.439.043	Nilai Investasi 3.000.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80%	90%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	Sekretariat Daerah, Bagian Kerjasama
			Efektivitas Kerja Sama Daerah	100%	100%	
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	**Tujuan 2.1:** Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	85,23	85,86	
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	81.96	82.10	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi dalam PAUD	100%	100%	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%	100%	
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%	100%	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	PAUD= 100% SD= 95% SMP= 93%	PAUD= 100% SD=96% SMP= 94%	Dinas Pendidikan
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	PAUD= 34.46% SD=35.23% SMP= 41.33%	PAUD= 40% SD=70% SMP=75 %	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	84,52	84,60	Dinas Perpustakaan
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,33	75,66	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Jumlah ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu bersalin mendapatkan Pelayanan kesehatan	100%	100%	
			Jumlah bayi baru Lahir mendapatkan Pelayanan kesehatan	100%	100%	
			Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	
			Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	82.88%	100%	
			Jumlah Warga negara usia lanjut yang mendapat-kan pelayanan kesehatan	93.61%	100%	
			Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	83.56%	100%	
			Jumlah Warga Negara penderita Diabetes militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	
			Jumlah Warga negara dengan gangguan jiwa	100%	100%	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
			berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
			Jumlah Warga Negara tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	
			Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah/Per Kapita/Tahun)	18.386	20.543	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investas	Nilai Investasi Rp.3.827.931.439.043	Nilai Investasi 3.000.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10.45%	15%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pertumbuhan Wirausaha	12,43%	14,5%	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60.05	61.00	Dinas Ketenagakerjaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
4	Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah	**Tujuan 3.1:** Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur	74,25	79,46	
		Sasaran 3.1.1: Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	35.40	39.03	
			Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	49.39	54.45	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	N.A	88,74%	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum)	20 Perumahan	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh	50 unit	20%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar	N.A	54,85%	Dinas Pekerjaan Umum
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi. erosi. dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar	N.A	54,45	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		83,88%	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik		91,94%	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik		57,81%	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		49,65%	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	Dinas Pertanahan
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang (%)	100	100	
			Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	10	25%	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	0	80%	Dinas Penataan Ruang
5	Peningkatan daya saing	**Tujuan 4.1:**	Indeks Inovasi Daerah	76,56	79,23	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
	sektor pariwisata melalui penguatan dan inovasi industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah				
		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi	4,46	4,56	
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	N/A	100%	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)	101 Inovasi	4	
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	N/A	100%	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi. Makan dan Minum (%)	2,18	2,28	
		Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	5.684.295	6.943.576	
			Jumlah daya tarik pariwisata yang difasilitasi (Lokasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	24,88%	7%	Dinas Pariwisata
		Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase peningkatan karya budaya terdaftar dalam Warisan Budaya Takbenda (%)	N.A	33.3%	
			Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan	N.A	21	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100% (350 Orang)	100%	Dinas Kebudayaan
			Persentase Warisan Budaya Tak Benda Yang di Tetapkan	4 Objek WBTB	20% (2 wbtb)	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	23% (36 Objek)	20% (10 Objek)	Dinas Kebudayaan
		Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar (Industri)	4.220	4.700	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	2.20%	3.03%	Dinas Pariwisata
			Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar	4.220 Industri Ekraf	4.831 Industri Ekraf	
6	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasi serta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan	**Tujuan 5.1:** Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	78,64	81,31	
		Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B	BB	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,01	4,03	
			Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK	87,00	87.98	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan	Persentase Keselarasan	100%	100%	Badan Perencanaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		Evaluasi Pembangunan Daerah	RPJMD dengan RKPD			Pembangunan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	76,21%	78,21%	Inspektorat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	26,59	30%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	26,99	40%	
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	80,71	85%	
			Persentase Penurunan SILPA	21,74	15%	
			Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100%	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	65%	73%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	55%	71%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase SKPD yang mengimplemen-tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	NA	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama	**Tujuan 5.2:** Meningkatnya Kualitas Keamanan. Ketentraman. dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N.A	77	
		Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	54,03	56,02	
			Indeks Kota Toleran	4,4	5,1	
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kota Makassar	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	100%	100%	Seluruh Kecamatan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	85%	Badan Kesatuan Bangda dan Politik
8	Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju	**Tujuan 6.1:** Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	63,13	63,15	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
	dengan memperhatikan pelibatan pemberdayaan kelompok marjinal melalui pembangunan keluarga, Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan	**Sasaran 6.1.1:** Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,183	0.177	
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	71%	75%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1.05%	1.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
		Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	67,04	70.60	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63.65	65.55	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
		Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	57,67	61	
			Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,476	0,518	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	16.61% (baseline/2024)	17.75%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100	110	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan (%)	4,97	3,78-3,46	
		Sasaran 6.2.1:	Gini Rasio	0,372	0,381-0,359	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		Menurunnya Disparitas Pendapatan				
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	100%	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	N/A	80%	
		Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	41,1	42,51	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60.05	61.00	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	Dinas Sosial
			Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	
			Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	
			Jumlah Warga Negara	100%	100%	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
			Gelandang dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti			
9	Pelestarian lingkungan hidup melalui penguatan mitigasi dampak lingkungan serta peningkatan Kapasitas Penanganan Bencana dan Ketangguhan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	**Tujuan 7.1:** Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,41	66,38	
		Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	58,70	74,15	
			Indeks Kualitas Udara	81,51	75,52	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,92	36,13	
			Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1,9	10	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	10.12%	11.13%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100%	100%	Seluruh Kecamatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
			publik di Kecamatan			
		Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	113.71	107	
		Sasaran 7.2.1: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	0.46	0,48	
			Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	N.A	34,98	
		Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	
		Program Penanganan Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	Dinas Sosial
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		Penyelamatan Non Kebakaran	korban kebakaran			
			Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	100%	100%	
		Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	2.01%	4%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0.48	0.47	Dinas Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	57.22%	60%	

IV.2.6 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional Tahun 2026

Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Prioritas Pembangunan, tujuan dan sasaran Kota Makassar tahun 2026 telah selaras dengan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional tahun 2026, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.9.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026

No	Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar	
PN 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PD 1	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	PD 7
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD 1	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	PD 3
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD 2	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjina	Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	PD 9
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD 2	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjina	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	PD 3
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,	PD 3	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat,	PD 7

No	Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar	
	Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru			dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD 3	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan	PD 2
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PD 4	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	P Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	PD 7
				Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	PD 5
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD 5	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	PD 1
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	PD 6	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital	PD 6

No	Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar	
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal	PD 7	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	PD 4
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD 8	Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	PD 8

Dukungan terhadap Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota, dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, dilakukan terhadap sasaran indikator makro pembangunan melalui hasil kesepakatan target indikator makro pembangunan tahun 2026 pada forum Rakortekbang, sebagai berikut:

Tabel IV.10.
Kesesuaian Sasaran Indikator Makro Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 Terhadap Target Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target Provinsi Sul-Sel Terhadap Kota Makassar	Target Ranwal RKPD Kota Makassar Tahun 2026	Kesepakatan Pembahasan Rakortekbang	Target RKPD 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	6,43	-	6,43	6,43
2	PDRB Per Kapita	165,95	186,75	-	186,75	186.75
3	Kontribusi PDRB Kota Makassar (%)				Tidak dibahas	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,97	3.46 - 2.56	-	3,78 - 3,46	3,78-3,46
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,71	9,53	-	9,53	9,53
6	Gini Rasio	0,372	0,359	-	0,381-0,359	0,381-0,359
7	Indek Pembangunan Manusia	85,23	85,75	-	85,86	85,86
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	N/A	34,98	-	34,98	34,98
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				Tidak Dibahas	

Keselaranan sasaran pembangunan Kota Makassar, dengan sasaran pembangunan provinsi, dan prioritas nasional (Asta Cita) pada penyajian tabel berikut:

Tabel IV.11.
Keselarasan Sasaran Pembangunan Kota Makassar terhadap Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi-Selatan dan Prioritas Nasional/AstaCita

Sasaran dan Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Nasional
1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sasaran dan Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Nasional
2. Meningkatnya Kesempatan Kerja, dan Pendapatan Masyarakat	9. Meningkatnya pembangunan perdesaan	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	
4. Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	
5. Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	6. Meningkatnya produktivitas Ekonomi dan swasembada pangan	
6. Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
7. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
8. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	6. Meningkatnya produktivitas Ekonomi dan swasembada pangan	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
9. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	11. Meningkatnya jangkauan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 16. Meningkatnya kualitas infrastruktur	PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
10. Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	16. Meningkatnya kualitas infrastruktur	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan

Sasaran dan Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Nasional
		Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
11. Meningkatnya Penguasaan IPTEK	15. Meningkatnya inovasi Pembangunan daerah	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
12. Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	15. Meningkatnya inovasi Pembangunan daerah	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
13. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
14. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	4. Meningkatnya kualitas Kehidupan beragama dan Pemajuan kebudayaan	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
15. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif	12. Meningkatnya ketrampilan Digital masyarakat	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
16. Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	3. Meningkatnya kualitas demokrasi 13. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah daerah 14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan

Sasaran dan Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Nasional
17. Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	4. Meningkatnya kualitas Kehidupan beragama dan Pemajuan kebudayaan	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
18. Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	4. Meningkatnya kualitas Kehidupan beragama dan Pemajuan kebudayaan	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
19. Menurunnya Ketimpangan Gender	5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
20. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	
21. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
22. Menurunnya Disparitas Pendapatan	10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
23. Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
24. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran dan Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Nasional
25. Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	17. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Keselarasan Prioritas Nasional, dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, dan Prioritas Pembangunan Kota, tersaji pada tabel berikut:

Tabel IV.12.
Keselaranan Asta Cita/Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi-Selatan dan Prioritas Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Pembangunan Kota Makassar
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PD 1: Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	PD 7: Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PD 3: Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	PD 7: Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi
	PD 4: Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	PD 5: Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD 1: Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	PD 3: Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD 2: Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjina	PD 7: Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi
PN 8:	PD 2:	PD 9:

Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Pembangunan Kota Makassar
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjina	Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD 3: Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	PD 2: Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD 5: Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	PD 1: Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	PD 6: Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	PD 6: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital pemerintahan
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal	PD 7: Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	PD 4: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD 8: Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	PD 8: Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan

Sebagai dukungan terhadap Program dan Kegiatan yang menunjang Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional tahun 2026, maka

Pemerintah Kota Makassar menetapkan program pembangunan daerah yang disinkronisasi dan menjadi dukungan terhadap prioritas provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV.13.
Keselaranan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi-Selatan Dengan Sasaran dan Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
			Persentase ibu bersalin Mendapatkan pelayanan persalinan	100%
			Persentase bayi baru lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
			Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100%
			Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai setandar	100%
			Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
			Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan keshatan usia lanjut sesuai standar	100%
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
			Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
			Persentase ODGJ berat Yang mendapatkan Pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	25%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	90%
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi dalam PAUD	100%
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
5	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	PAUD= 100% SD=96% SMP= 94%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
		Tenaga Kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	77,22%
6	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	**100%**
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	84,60
8	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%
9	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	85%
10	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	85%
11	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	100%
12	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalagunaan, Narkotika, Fasilitasi	85 %

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
		Sosial, dan Budaya	Kerukunan, Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	
13	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%
			Persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/fasilitas	100%
			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100%
			Efektivitas KerjaSama Daerah	100%
14	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100%
15	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	20% (6 objek)
16	Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	65.55%
17	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	100%
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	17,75%
19	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
		Daya Saing Keolahragaan		
20	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	75%
21	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4,80%
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	15%
			Pertumbuhan Wirausaha	14.5%
23	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	1%
24	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	20,55%
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	12.92%
26	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	7%
27	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)	2400
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	1,30%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
29	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)	2.400 kkal/kapita
			Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi	2.100 kkal/kapita
30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	15.616 Ton
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	8 Ton
			Peningkatan Produksi Hortikultura	330,60 Ton
31	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	40 Ha
32	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	PersentasePenanganan Bencana Pertanian	80%
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	80%
33	Program Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Aktif	100%
34	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	
35	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	21.722 Ton
36	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.568.35 Ton
37	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumberdaya	Persentase Sumber Daya Perikanan Yang Diawasi	100%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
		Kelautan Dan Perikanan		
38	Progam pengembangan ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang kota Makassar	12.10%
39	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	48,94 kg/ kapita/ tahun
40	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Kemetrologian	90%
41	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	0.41%
42	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100%
43	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100%
44	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100%
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	100%
45	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investas	Nilai Investasi 3.000.000.000.000
46	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	90%
			Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 3
47	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	42.30%
48	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Aktif	100%
			Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lingkup Kelurahan	100%
49	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%
50	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	80%
51	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	PersentasePekerja Sosial/ Tenaga KesejahteraanSosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	50%
			Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial Yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kab/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	50%
52	Program Rehabilitasi Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas	100%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
		Program Rehabilitasi Sosial	terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	
			Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
			Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
			Jumlah Warga Negara Gelandang dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	100%
53	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%
54	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	21,21%
55	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	61%
56	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase SKPD yang mengimplemen-tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%
57	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan	75%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
		Komunikasi Publik	Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	
58	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%
59	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	100%
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%
60	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	78,21%
61	Program Penataan Organisasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100%
			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	90%
			Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 3
62	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	4%
63	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30%
			Persentase Alokasi Belanja	40%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
			Infrastruktur Pelayanan Publik	
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	85%
			Persentase Penurunan SILPA	3%
			Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%
64	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%
			Persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/fasilitas	100%
			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100%
			Efektivitas Kerja Sama Daerah	100%
65	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100%
			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	90%
			Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 3
66	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	90%
67	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	73%
			Persentase Pengembangan Karir	71%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
			ASN sesuai dengan Kompetensinya	
68	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	41%
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	12%
69	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	13,7%
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	74,3%
70	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	PersentaseAkta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	99,86%
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	55%
			Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	60%
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	64%
71	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	20%
72	Program Penelitian Dan Pengembangan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	100%
73	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	4,06%
74	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	88,74%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
75	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan			
76	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0.47
			Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	60%
77	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas Penyeberangan	0,76%
78	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
79	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%
80	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum			
81	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	49,65%
82	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) akses aman	1,98%
			Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) akses aman	1,87%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	57,81%
83	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan	Rasio luas kawasan permukiman	54,85%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
		Sumber Daya Air (SDA)	rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar	
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar	54,45
84	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	0,189%
			Persentase Rumah Tangga Yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan Perpipaan terlindungi	0,054%
85	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil			
86	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan			
87	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh < 10 Ha yang ditangani	15%
88	Program Pengelolaan Hutan			
89	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
90	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	4%
91	Program Pengendalian	Program Pengendalian Pencemaran	Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau	100%

No	Program Prioritas Provinsi Sul-Sel	Program Kota Makassar	Indikator Program (*Outcome*)	Target Tahun 2026
	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kerusakan Lingkungan Hidup	
92	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, sebagai dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional tahun 2026, tercermin pada Keselasaran Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional, sesuai tabel berikut:

Tabel IV.14.
Keselaranan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2026

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
1	1.01	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
2	1.01	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		19000	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
3	1.01	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
4	1.01	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
5	1.01	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
6	1.02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
7	1.02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	6	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
8	1.02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	10	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
9	1.02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
10	1.02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
11	1.02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	24	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
12	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
13	1.03	Urusan pemerintahan bidang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	323,00 - Meningkatnya	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0	0	Provinsi : kabkota :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
		pekerjaan umum dan penataan ruang	kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air									skpd : apip :
14	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
15	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM			Provinsi : kabkota : skpd : apip :
16	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	1.2	1,2	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
18	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung	1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	500	200	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
				pencapaian swasembada pangan, energi, dan air									
20	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
21	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
22	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
23	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
24	1.04	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau,	1.04.04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	Unit Rumah	150	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
		kawasan permukiman		dan berkelanjutan				Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				
25	1.04	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	40	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
26	1.04	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	20	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
27	1.04	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
28	1.05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	Program penanggulangan bencana	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
29	1.05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	Program penanggulangan bencana	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
30	1.05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	Program penanggulangan bencana	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
31	1.05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	Program penanggulangan bencana	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
32	1.05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	4	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
33	1.05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	4	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
34	1.05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindunga	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
				n Masyarakat , dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
35	1.05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudny a manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindunga n Masyarakat , dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.05.02.2.02.00 11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
36	1.05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudny a manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindunga n Masyarakat , dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.05.04.2.01.00 13	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
37	1.05	Urusan pemerintahan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	358,00 - Terwujudny	1.05.04	Program pencegahan,	1.05.04.2.01.00 13	Penyusunan Kajian Rencana Induk	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
		bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	a manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar		penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				skpd : apip :
38	1.06	Urusan pemerintahan bidang sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	100	200	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
39	1.06	Urusan pemerintahan bidang sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	100	200	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
40	1.06	Urusan pemerintahan bidang sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
41	1.06	Urusan pemerintahan bidang sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	342,00 - Penurunan Kemiskinan	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja	Orang	0	0	Provinsi : kabkota :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melalui Graduasi				Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				skpd : apip :
42	1.06	Urusan pemerintahan bidang sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100.00	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
43	1.06	Urusan pemerintahan bidang sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100.00	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
44	1.06	Urusan pemerintahan bidang sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1100	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
45	1.06	Urusan pemerintahan bidang sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1100	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
46	2.07	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangun	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis	Orang	608	400	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	an ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja				Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kompetensi pada Tahun n				
47	2.07	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	608	400	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
48	2.07	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	Program hubungan industrial	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	300	300	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
49	2.07	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam	2.07.05	Program hubungan industrial	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan	Perusahaan	300	300	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja					Terdaftar di WLKP Online				
50	2.07	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	Program hubungan industrial	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	34722	24.306	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
52	2.08	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	51	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
53	2.08	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	500	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
54	2.08	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	Program perlindungan khusus anak	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	5	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
55	2.08	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	Program perlindungan khusus anak	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	380	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
56	2.09	Urusan pemerintahan bidang pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	153	150	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
57	2.09	Urusan pemerintahan bidang pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	12	3	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
58	2.09	Urusan pemerintahan bidang pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
								(satu) Daerah Kabupaten/Kota					
59	2.09	Urusan pemerintahan bidang pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	2	3	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
60	2.10	Urusan pemerintahan bidang pertanahan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
61	2.10	Urusan pemerintahan bidang pertanahan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	-	-	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
62	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	15	10	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
63	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	15	10	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
64	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	20		Provinsi : kabkota : skpd : apip :
65	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	20		Provinsi : kabkota : skpd : apip :
66	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
67	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
68	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
69	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
70	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	411731	411731	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
71	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	411731	411731	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
72	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ko	Ton	275.733	275.733	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			ekonomi hijau, dan ekonomi biru					kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	ta atau TPA/TPST Regional				
73	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	275.733	275.733	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
74	2.12	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	Program pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
75	2.12	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	Program pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	1	6	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
76	2.12	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaata	2.12.03	Program pencatatan sipil	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan	Laporan	1	6	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n data kependudukan berbasis digital				Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d				
77	2.12	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	Program pencatatan sipil	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
78	2.13	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	Program penataan desa	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
79	2.13	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang	2.13.02	Program penataan desa	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
				Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa									
80	2.13	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	Program administrasi pemerintahan desa	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
81	2.13	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	Program administrasi pemerintahan desa	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
82	2.14	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	3	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
83	2.14	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	49	5	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
84	2.14	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	12	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
85	2.14	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	Kelompok	1532		Provinsi : kabkota : skpd : apip :
86	2.15	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	373,00 - Terwujudnya Peningkata	2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1000	520	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	n Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota									
87	2.15	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	2.15.02.2.02.00 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1000	0.00	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
88	2.15	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan	2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	2.15.02.2.03.00 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
				Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota									
89	2.15	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
90	2.15	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.03	Program pengelolaan pelayaran	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
91	2.15	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas	2.15.03	Program pengelolaan pelayaran	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota									
92	2.15	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.03	Program pengelolaan pelayaran	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
93	2.15	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan	2.15.03	Program pengelolaan pelayaran	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
				Kabupaten/ Kota									
94	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	40	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
95	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	40	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
96	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	40	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
97	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	40	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
98	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	200	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
99	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	200	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
100	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	200	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
101	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	200	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
102	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	3	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
103	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	3	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
104	2.16	Urusan pemerintahan bidang	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	333,00 - Terakselerasinya transformas	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung	Aplikasi	3	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
		komunikasi dan informatika	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	i pemerintah digital di daerah				rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Layanan Pemerintah Daerah				
105	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	3	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
106	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	51	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
107	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	51	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
108	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
109	2.16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
110	2.17	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	153	30	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
111	2.17	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	153	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
112	2.17	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	10.000	700	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
113	2.17	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	1870	600	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
114	2.18	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	12	12	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
115	2.18	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	200	12	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
116	2.19	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	1.000	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
117	2.19	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	200	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
118	2.19	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya	2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	150	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga									
119	2.19	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	100	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
120	2.19	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	7	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
121	2.20	Urusan pemerintahan bidang statistik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	100	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
122	2.20	Urusan pemerintahan bidang statistik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi,	2.20.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	90	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)									
123	2.21	Urusan pemerintahan bidang persandian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	51	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
124	2.21	Urusan pemerintahan bidang persandian	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	51	0.00	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
125	2.21	Urusan pemerintahan bidang persandian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
126	2.21	Urusan pemerintahan bidang persandian	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi	2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			narkoba, judi, dan penyeludupan.	lingkungan Pemerintah Daerah					Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar				
127	2.22	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	Program pengembangan kebudayaan	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	28	25	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
129	2.22	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	Program pengembangan kebudayaan	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	230	350	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
130	2.22	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	Program pengembangan kebudayaan	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	230	3.50	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
131	2.22	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	6	6	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
132	2.22	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	2.22.05.2.01.00 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	6	6	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
133	2.22	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	2.22.05.2.02.00 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	1	5	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
134	2.22	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	2.22.05.2.02.00 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	1	5	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
135	2.23	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	2.23.02.2.01.00 13	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	65	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
136	2.23	Urusan pemerintahan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	340,00 - Meningkatn	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	2.23.02.2.01.00 13	Pembinaan Perpustakaan Umum	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang	Perpustakaan	65	4	Provinsi : kabkota :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
		bidang perpustakaan	dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	ya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat				dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				skpd : apip :
137	2.23	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatn ya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	2.23.02.2.01.00 14	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	5000	5000	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
138	2.23	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatn ya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	2.23.02.2.01.00 14	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	5000	5000	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
139	2.23	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatn ya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	2.23.03.2.01.00 03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	100	700	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
140	2.23	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatn ya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	2.23.03.2.01.00 03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	100	700	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
141	2.23	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	2	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
143	2.24	Urusan pemerintahan bidang kearsipan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	Program pengelolaan arsip	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	10	5	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
144	2.24	Urusan pemerintahan bidang kearsipan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	Program pengelolaan arsip	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	20	5	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
145	3.25	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	160	150	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
146	3.25	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	27	41	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
				Berkelanjutan									
147	3.25	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	440	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
148	3.25	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	102	51	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
149	3.25	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	134	100	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
150	3.25	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
151	3.25	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola	3.25.05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota,	Pelaku Usaha	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan					yang diperiksa kepatuhannya				
152	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	0	3	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
153	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
154	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	5	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
155	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
156	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
157	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	2	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
158	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam	3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional									
159	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
160	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
161	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
162	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	344,00 - Meningkatnya Kontribusi	3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional		dan perlindungan hak kekayaan intelektual							
163	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
164	3.27	Urusan pemerintahan bidang pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	10	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
165	3.27	Urusan pemerintahan bidang pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	-	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
166	3.27	Urusan pemerintahan bidang pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan		1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
167	3.27	Urusan pemerintahan bidang pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.27.03.2.01.00 05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	0	40	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
168	3.30	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	3.30.02.2.06.00 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
169	3.30	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	3.30.02.2.07.00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
170	3.30	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	Program pengembangan ekspor	3.30.05.2.01.00 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	5	15	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
171	3.30	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar	3.30.05	Program pengembangan ekspor	3.30.05.2.01.00 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha		10.00	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
				Domestik dan Global									
172	3.31	Urusan pemerintahan bidang perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	Program perencanaan dan pembangunan industri	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
173	3.31	Urusan pemerintahan bidang perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	Program perencanaan dan pembangunan industri	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
174	3.31	Urusan pemerintahan bidang perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	Program pengendalian izin usaha industri	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen	1	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
175	3.31	Urusan pemerintahan bidang perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	Program pengendalian izin usaha industri	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,	Dokumen	1	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
176	3.32	Urusan pemerintahan bidang transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	Program pembangunan kawasan transmigrasi	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
177	3.32	Urusan pemerintahan bidang transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	Program pembangunan kawasan transmigrasi	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
178	3.32	Urusan pemerintahan bidang transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.04	Program pengembangan kawasan transmigrasi	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	0	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
179	8.01	Kesatuan bangsa dan politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Orang	500	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
								Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kepala Daerah, serta Pemantauan				
181	8.01	Kesatuan bangsa dan politik	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	500	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
182	8.01	Kesatuan bangsa dan politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
183	8.01	Kesatuan bangsa dan politik	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
184	8.01	Kesatuan bangsa dan politik	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi	8.01.04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Orang	100	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila				Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				

Tabel IV.15.
Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kota Makassar Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program pengelolaan pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program pengelolaan pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19000
3	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program pengelolaan pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program pengelolaan pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0
5	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program pengelolaan pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0
6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	0
7	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	PN 4: Investasi pelayanan kesehatan primer	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di	6

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Minuman di Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan yang disediakan	
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Investasi pelayanan kesehatan primer	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10
9	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1
10	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1
11	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0
12	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 2: Konservasi Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0
13	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PN 2: Konservasi Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0
14	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PN 2: Konservasi Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0
15	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui	PN 2: Konservasi Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
	Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru					
16	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PN 2: Pengernbangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1,2
18	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PN 2: Pengernbangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200
20	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PN 8: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	0
21	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PN 8: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	0
22	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PN 8: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0
23	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PN 8: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0
24	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0
25	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	0

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
26	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	0
27	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0
28	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program penanggulangan bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0
29	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program penanggulangan bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0
30	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program penanggulangan bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1
31	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program penanggulangan bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1
32	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	PN 7: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4
33	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 7: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4
34	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PN 7: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4
35	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 7: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
36	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0
37	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0
38	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program pemberdayaan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200
39	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program pemberdayaan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200
40	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program pemberdayaan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	0
41	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Investasi pelayanan kesehatan primer	Program pemberdayaan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	0
42	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Alirmatif	Program perlindungan dan jaminan sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100
43	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Investasi pelayanan kesehatan primer	Program perlindungan dan jaminan sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100
44	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	PN 6: Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Alirmatif	Program perlindungan dan jaminan sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	0

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
	pemberantasan kemiskinan.				Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
45	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 6: Investasi pelayanan kesehatan primer	Program perlindungan dan jaminan sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0
46	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha produktif	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	400
47	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 3: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	400
48	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha produktif	Program hubungan industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	300
49	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program hubungan industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	300
50	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha produktif	Program hubungan industrial	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	24.306
52	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	0
53	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	0
54	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	PN 4:	Program perlindungan khusus anak	Advokasi dan sosialisasi	Jumlah pengambil kebijakan dan	0

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
	(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kematian Ibu dan Anak		pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	
55	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program perlindungan khusus anak	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0
56	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150
57	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Kawasan Sentra Poduksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan lainnya	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	3
58	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Kawasan Sentra Poduksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan lainnya	Program penanganan kerawanan pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1
59	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Kawasan Sentra Poduksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan liinnya	Program penanganan kerawanan pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	3
60	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-
61	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	-
62	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Konservasi Sumber Daya Air	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	10

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
					dan Indeks Kualitas Air Laut)	
63	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10
64	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	
65	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	
66	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program pengelolaan persampahan	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	0
67	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program pengelolaan persampahan	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	0
68	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program pengelolaan persampahan	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0
69	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program pengelolaan persampahan	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0
70	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program pengelolaan persampahan	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	411731
71	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program pengelolaan persampahan	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST,	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	411731

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
	mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
72	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program pengelolaan persampahan	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten /kota atau TPA/TPST Regional	275.733
73	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	Program pengelolaan persampahan	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten /kota atau TPA/TPST Regional	275.733
74	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program pendaftaran penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0
75	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 7: Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program pendaftaran penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	6
76	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 7: Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program pencatatan sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d	6
77	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 7: Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program pencatatan sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	0
78	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program penataan desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0
79	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	PN 8: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program penataan desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
80	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0
81	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0
82	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3
83	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	5
84	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1
85	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	
86	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	520
87	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0.00

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
	sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
88	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	0
89	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3": Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	0
90	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program pengelolaan pelayaran	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	0
91	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program pengelolaan pelayaran	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	0
92	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program pengelolaan pelayaran	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	0
93	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program pengelolaan pelayaran	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	0
94	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	0
95	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PN 1: Penguatan Pere dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	0
96	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
97	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PN 1: Penguatan Pere dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0
98	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0
99	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PN 1: Penguatan Pere dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0
100	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	0
101	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PN 3: Penguatan Pere dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	0
102	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program pengelolaan aplikasi informatika	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	0
103	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PN 1: Penguatan Pere dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri	Program pengelolaan aplikasi informatika	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	0
104	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program pengelolaan aplikasi informatika	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0
105	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PN 1: Penguatan Pere dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri	Program pengelolaan aplikasi informatika	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0
106	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program pengelolaan aplikasi informatika	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	0

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
107	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PN 1: Penguatan Pere dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri	Program pengelolaan aplikasi informatika	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	0
108	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program pengelolaan aplikasi informatika	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	0
109	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PN 1: Penguatan Pere dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri	Program pengelolaan aplikasi informatika	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	0
110	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	30
111	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	0
112	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	700
113	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	600
114	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12
115	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	12

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
					Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
116	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	0
117	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	0
118	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Pengembangan Manajemen Talenta Nasionat (MTN) Olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	0
119	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Pengembangan Manajemen Talenta Nasionat (MTN) Olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	0
120	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Pengembangan Manajemen Talenta Nasionat (MTN) Olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0
121	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	0
122	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	0
123	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	0
124	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	0.00

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
	pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			dan Persandian Pemerintah Daerah	Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	
125	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Scktor Strategis lainnya	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar	0
126	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar	0
127	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program pengembangan kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	25
129	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program pengembangan kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	350
130	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program pengembangan kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3.50
131	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6
132	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
133	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5
134	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5
135	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program pembinaan perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	4
136	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program pembinaan perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	4
137	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program pembinaan perpustakaan	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	5000
138	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program pembinaan perpustakaan	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	5000
139	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PN 4: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	700
140	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	700
141	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	PN 4: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan	1

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				untuk dilestarikan dan didayagunakan	
143	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program pengelolaan arsip	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5
144	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 4: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program pengelolaan arsip	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5
145	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food)*	Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	150
146	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*	Program pengelolaan perikanan tangkap	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	41
147	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*	Program pengelolaan perikanan tangkap	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0
148	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	51
149	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	100
150	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0
151	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	0
152	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	PN 3: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
	agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
153	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1
154	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0
155	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0
156	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2
157	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1
158	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0
159	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0
160	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	PN 3: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
161	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0
162	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	0
163	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PN 3: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1
164	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Pangan Hewani	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	10
165	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	0
166	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1
167	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN 2: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	40
168	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Industri Kimia	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
169	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Industri Kimia	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	0
170	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program pengembangan ekspor	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15
171	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program pengembangan ekspor	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10.00
172	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1
173	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program perencanaan dan pembangunan industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4
174	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program pengendalian izin usaha industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	4
175	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PN 5: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program pengendalian izin usaha industri	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,	4
176	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	0
177	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0
178	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PN 6: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	0
179	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	0

No	Asta Cita	Kegiatan Proritas Utama	Dukungan Program	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2026
				Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	
181	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	0
182	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PN 7: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0
183	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PN 1: Penguatan Pere dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0
184	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PN 8: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0

Tabel IV.16.
Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan
Kota Makassar Tahun 2026

KODE	Rancangan RKP 2026		RKPD 2026				Keterangan
	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungen Pemerintah Daerah			
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui dukungan pembangunan terminal tipe A dan pengembangan terminal tipe B	Kota Makassar	Program penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Dinas Penataan Ruang
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Peningkatan dan preservasi jalan daerah serta pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat	Kota Makassar	Program penyelenggaraan jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum

KODE	Rancangan RKP 2026		RKPD 2026				Keterangan
	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungen Pemerintah Daerah			
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Dukungan penyelenggaraan kereta api lintas Makassar Parepare dan pembangunan dan pengembangan stasiun KA	Kota Makassar	Program penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Dinas Penataan Ruang
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Kota Makassar	Program peningkatan prasarana. Sarana dan utilitas umum (psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana. Saranad an Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Penanganan permukiman kumuh	Kota Makassar	Program kawasan permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan SPAM Regional Mamminasata. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional.	Kota Makassar	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	– Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan – Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan – Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R	Kota Makassar	Program pengelolaan persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas lingkungan Hidup
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Dukungan dan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM	Kota Makassar	Program pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	KPU 05 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Kota Makassar	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	– Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan – Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah. kapasitas. dan jumlah pengelola SPAM	Kota Makassar	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	– Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan – Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan – Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan – Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara SPAM	Dinas Pekerjaan Umum
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Penguatan pelayanan. sumber daya manusia. dan tata kelola kesehatan melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital	Kota Makassar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan	Kota Makassar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Kawasan Wilayah Metropolitan	Peningkatan pemanfaatan. inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.	Kota Makassar	Program pemenuhan upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan	Dinas Kesehatan

KODE	Rancangan RKP 2026		RKPD 2026				Keterangan
	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungen Pemerintah Daerah			
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Makassar dan sekitarnya			kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan	
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. eliminasi penyakit tropis terabaikan. serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak. dan	Kota Makassar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Penuntasan TBC. pengendalian penyakit HIV/AIDS. pengendalian penyakit malaria. pengendalian penyakit kusta. pengendalian penyakit rabies	Kota Makassar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Penanganan intervensi spesifik stunting	Kota Makassar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Investigasi awal Kejadian tidak Diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Promosi Lima Pilar STBM) - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
				Program pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	- Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal diSatuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur non formal dan informal	Dinas KB
				Program pembinaan keluarga Berencana (kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	- Pengendalian Program KKBPK -	Dinas KB

KODE	Rancangan RKP 2026		RKPD 2026				Keterangan
	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungen Pemerintah Daerah			
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
				Program pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dinas KB
				Program pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Dinas KB
				Program perlindungan dan Jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
				Program pemberdayaan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
				Program peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Ketahanan Pangan
				Program pengawasan Keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum

KODE	Rancangan RKP 2026		RKPD 2026				Keterangan
	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungen Pemerintah Daerah			
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				limbah	Kabupaten/Kota	- Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Program pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan.	Kota Makassar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan	Kota Makassar	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial. jaminan sosial. pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif. melalui pengembangan tata kelola registrasi Regrosek. dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran	Kota Makassar	Program perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage. pemanfaatan cagar budaya dan revitalisasi budaya bahari serta pengembangan teknologi tradisional	Kota Makassar	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	- Pelindungan Cagar Budaya - Pengembangan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional	Kota Makassar	Program pemasaran pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	1. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata

KODE	Rancangan RKP 2026		RKPD 2026				Keterangan
	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungen Pemerintah Daerah			
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Kabupaten/Kota	2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
				Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 2. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan	Kota Makassar	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	- Pelindungan Cagar Budaya - Pengembangan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan	Kota Makassar	Program pengembangan kesenian tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Pelestarian cagar budaya. nilai budaya. tradisi. dan kearifan lokal berbasis urban heritage.		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	- Pelindungan Cagar Budaya - Pengembangan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	Kota Makassar	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Parisiwata
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir di perkotaan	Kota Makassar	Program penyelenggaraan jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	- Rehabilitasi Jembatan - Pemeliharaan Rutin Jalan - Pembangunan Jalan - Rehabilitasi Jalan - Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum

KODE	Rancangan RKP 2026		RKPD 2026				Keterangan
	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungen Pemerintah Daerah			
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
				Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Rehabilitasi Pintu Air Bendung Pengendali Banjir - Peningkatan Pintu Air Bendung Pengendali Banjir - Pembangunan Pintu Air Bendung Pengendali	
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Pengelolaan kawasan konservasi di perairan. wilayah pesisir. dan pulau pulau kecil Kota Makassar	Kota Makassar	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. dan Pengaman Pantai	
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	KPU 04 Konservasi Sumber Daya Air. melalui Pengendalian daya rusak air	Kota Makassar	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Pekerjaan Umum
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Pengembangan industri produk olahan hasil laut	Kota Makassar	Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Pertanian
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai	Kota Makassar	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan. Penyebaran dan Perwilayahan Industri - Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perdagangan
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir. jaminan ketersediaan bahan baku. peningkata n adaptasi teknologi. riset inovasi. dan	Kota Makassar	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan

KODE	Rancangan RKP 2026		RKPD 2026				Keterangan
	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungen Pemerintah Daerah			
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya				- Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan. Penyebaran dan Perwilayahan Industri - Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri mediumhigh tecnology	Kota Makassar	Program perencanaan dan pembanguna n industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan. Penyebaran dan Perwilayahan Industri - Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perdaganga n
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kota Makassar	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	- Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya	Kota Makassar	Program pengelolaan perikanan budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1	Dinas Perikanan dan Pertanian

KODE	Rancangan RKP 2026		RKPD 2026				Keterangan
	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungen Pemerintah Daerah			
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Perencanaan. dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat - Perencanaan. Pengembangan. Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Penguatan logistik. pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan	Kota Makassar	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan dan Pertanian
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik. kelembagaan. usaha kelautan dan perikanan	Kota Makassar	Program pengelolaan perikanan budidaya	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Perencanaan. dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat - Perencanaan. Pengembangan. Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan dan Pertanian
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Fasilitasi kerja sama perluasan pasar. pengembangan koperasi. serta rantai pasok ekspor produk perikanan	Kota Makassar	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan dan Pertanian
	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan	Kota Makassar	Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Kawasan Wilayah Metropolitan	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung	Kota Makassar	Program pengembang an ekonomi	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan	Dinas Pariwisata

KODE	Rancangan RKP 2026		RKPD 2026				Keterangan
	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungen Pemerintah Daerah			
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Makassar dan sekitarnya	peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif; Penguatan ekosistem film. animasi. video. dan musik; Penguatan ekosistem fesyen dan kriya; Penguatan ekosistem aplikasi dan gim; Penguatan ekosisitem kuliner		kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		Intelektual	

IV.3 Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD mengamanatkan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD berdasarkan hasil reses dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD menjadi salah satu bahan dalam Penyusunan RKPD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut diintegrasikan ke dalam aplikasi SIPD Kemendagri yang terintegrasi pada penyusunan dokumen rancangan awal RKPD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diusulkan oleh 50 anggota DPRD Kota Makassar untuk perencanaan tahun, yang secara garis besar usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD berkaitan permasalahan pembangunan sebagai berikut:

a. Pembangunan Gedung Pemerintah (Kantor Camat, Kantor Lurah, Gedung Sekolah, Ruang Kelas Baru, Lapangan Sekolah);
b. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur/Sarana dan Prasarana (Drainase, Ipal Komunal, Sumur Bor, dll);
c. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur/Sarana dan Prasarana (Jembatan, Jalan Aspal, Jalan Beton, Jalan Lingkungan, dll);
d. Pembangunan/Rehabilitasi Tanggul Dermaga, Pemecah Ombak;
e. Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Tradisional, Puskesmas, Posyandu;
f. Pembangunan Sekolah, dan Ruang Kelas Baru;
g. Bantuan yang diserahkan ke masyarakat (Banutan Kain Kafan, Benih Ikan/udang dan pakan, Bibit Pohon/Tanaman Penghijauan, sarana pengolahan, peral;atan pertanian, sarana pengankutan sampah);
h. Bantuan Masjid dan Rumah Ibadah Lainnya, Majelis Taklim, Imama/Khatib dan Guru Mengaji, peralatan mandi jenazah;
i. Bantuan pelatihan (Menjahit, Pemasaran Online, desain kemasan (*packaging*), Kesenian Tradisional, Kewirausahaan Pemuda);
j. Bantuan beasiswa kepada siswa kurang mampu, perlengkapan sekolah, Penanganan Kemiskinan estrim dan Stunting;
k. Fasilitasi akses permodalan bagiu UMKM,
l. Pengadaan CCTV, Lampu Jalan, prasarana jalan dan papan nama jalan;
m. Penyuluan dan pencegahan bahaya narkoba, lem, dan obat-obatan lainya
n. Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

Pokok-pokok pikiran DPRD diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menyelaraskan pokok-pokok pikiran dengan RKPD.

Untuk perencanaan tahun tahun 2026 sebanyak 769 usulan yang disetujui dan

ditujukan kepada 17 SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar. Secara garis besar Pokok-Pokok Pikiran DPRD dapat dikelompokkan atas beberapa hal sebagai berikut:

Tabel IV.17.
Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Maakssar Tahun 2026

No	SKPD	Jumlah Usulan	Usulan Disetujui	Usulan Ditolak
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	-
2.	Dinas Kebudayaan	3	2	1
3.	Dinas Kesehatan	22	2	20
4.	Dinas Ketahanan Pangan	3	2	1
5.	Dinas Ketenagakerjaan	4	4	-
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	29	29	-
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	55	55	-
8.	Dinas Lingkungan Hidup	35	21	14
9.	Dinas Pekerjaan Umum	651	469	182
10.	Dinas Pemuda dan Olahraga	8	7	1
11.	Dinas Pendidikan	16	12	4
12.	Dinas Perdagangan	1	1	
13.	Dinas Perhubungan	113	106	7
14.	Dinas Perikanan dan Pertanian	8	6	2
15.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	35	35	-
16.	Dinas Sosial	6	1	5
17.	Sekretariat Daerah	9	8	1

Usulan ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 651 usulan. Terdiri dari usulan pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sarana air bersih, pembangunan, rehabilitasi dan pengerukan saluran drainase, rehabilitasi gedung pemerintah, pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor pemerintah. Sebanyak 469 usulan telah dilaksanakan penilaian teknis berdasarkan kondisi lapangan dan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum. Sebanyak 182 usulan tidak dapat disetujui dengan beberapa alasan yaitu karena usulan berulang diusulkan pada usulan musrenbang dan usulan pokok-pokok pikiran, lokasi yang diusulkan bukan merupakan asset atau bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Makassar, kondisi fisik yang diusulkan masih dalam kondisi baik atau baru dikerjakan, tidak memenuhi kriteria teknis, alamat lokasi yang diusulkan tidak sesuai, bukan merupakan tupoksi, dan usulan telah dianggarkan di tahun anggaran 2025.

Usulan ditujukan ke Dinas Perhubungan sebanyak 113 usulan. Terdiri dari usulan pengadaan sarana dan papan nama jalan, pengadaan dan perbaikan lampu jalan, dan pembangunan/rehabilitasi dermaga. Sebanyak 106 usulan telah sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan, dan sebanyak 7 usulan tidak dapat disetujui karena bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.

Usulan ditujukan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 35 usulan. Terdiri dari usulan perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan, pembangunan dan rehabilitasi drainase dalam kawasan perumahan; pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan; dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Sebanyak 15 usulan telah sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan dan KAwasan Permukiman, dan sebanyak 20 usulan tidak dapat disetujui karena lokasi yang diusulkan bukan merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu tidak masuk dalam deliniasi kawasan kumuh, kawasan perumahan

yang belum diserahkan PSU kepada Pemerintah Kota Makassar, usulan telah diakomodir pada tahun anggaran 2025.

Usulan ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 35 usulan. Terdiri dari usulan bantuan tempat sampah pilah, sarana pengangkutan sampah, pemangkasan pohon, dan bantuan pohon penghijauan. Sebanyak 21 usulan telah sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup, dan sebanyak 14 usulan tidak dapat disetujui karena bukan menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup seperti lokasi usulan tempat sampah bukan merupakan ruang publik, penentuan titik yang menjadi kewenangan kecamatan, pengangkutan sampah yang merupakan kewenangan kecamatan, dan pengerukan sampah pada saluran drainase yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.

Usulan ditujukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 29 usulan dan seluruhnya diakomodir, yaitu usulan pengadaan CCTV.

Usulan ditujukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 55 (lima puluh lima) usulan, Dinas Ketenagakerjaan 4 (empat) Usulan, Dinas Perdagangan 4 (empat) Usulan, Dinas Perikanan dan Pertanian 6 (enam) usulan dan seluruhnya diakomodir.

Usulan ditujukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 4 usulan dan seluruhnya diakomodir. Sedangkan untuk usulan yang ditujukan ke Sekretariat Daerah sebanyak 9 usulan, dengan 8 usulan diakomodir dan 1 usulan ditolak.

BAB 5

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V.1. Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2026

Rencana pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran Pemerintah Kota Makassar untuk tahun 2026. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan kemampuan keuangan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program. Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III disajikan bahwa total Pendapatan Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar **Rp 4.902.101.827.000,00** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp. 2.206.350.556.000,00** dan Pendapatan Transfer sebesar **Rp. 2.695.751.271.000,00.** Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rencana Belanja Daerah tahun 2026 dengan jumlah sebesar **Rp. 5.106.461.612.000,00.**

Belanja daerah tahun 2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2026, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja Daerah Tahun 2026 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kota Makassar Tahun 2026.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel V.1.
Rincian Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2026

No	URAIAN	Target Tahun 2026
2.1	**BELANJA OPERASI**	**4.116.788.735.646,88**
2.1.1	**Belanja Pegawai**	**1.989.911.677.755,00**
2.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.969.020.391.226,88**
2.1.3	**Belanja Bunga**	**-**
2.1.4	**Belanja Subsidi**	**-**
2.1.5	**Belanja Hibah**	**157.856.666.665,00**
2.1.6	**Belanja Bantuan Sosial**	**-**
2.2	**BELANJA MODAL**	**959.672.876.353,12**
2.2.1	**Belanja Modal Tanah**	**31.300.571.047,00**
2.2.2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**141.972.138.033,00**
2.2.3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**431.188.612.930,00**
2.2.4	**Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**343.337.089.061,12**
2.2.5	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**9.941.498.942,00**

2.2.6	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**1.932.966.340,00**
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**30.000.000.000,00**
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**-**
2.4.1	**Belanja Bagi Hasil**	**-**
2.4.2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**-**
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2+2.3+2.4)	**5.106.461.612.000,00**

Sumber: Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, tahun 2025

V.2. Program Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026

Proses penyusunan dan penetapan program prioritas melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang ditetapkan untuk menjadi acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2025.

Untuk menggambarkan capaian 2024 serta menjadi acuan dalam penetapan target indikator kinerja sasaran pada Program Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026, disajikan Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha 2020-2024, sebagaimana table berikut.

Tabel V.2.
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Point	Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanuan, Kehutanan, dan Perikanan	0,47	0,48	0,48	0,44	0,41
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan	17,90	17,97	18,61	18,83	19,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16
F	Konstruksi	18,67	18,99	18,60	18,20	17,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,62	19,84	20,10	20,03	20,03
H	Transportasi dan Pergudangan	2,20	2,27	2,62	2,89	2,97
I	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	1,85	1,79	1,03	2,14	2,18
J	Informasi dan Komunikasi	10,06	10,09	9,65	9,79	9,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,94	5,59	5,51	5,43	5,64
L	Real Estate	3,60	3,48	3,39	3,31	3,32
M,N	Jasa Perusahaan	1,10	1,11	1,20	1,26	1,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	3,47	3,42	3,22	3,24	3,09
P	Jasa Pendidikan	9,16	8,86	8,35	8,05	8,05

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,26	3,36	3,38	3,43	3,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,49	2,55	2,64	2,76	3,00
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber, Kota Makassar dalam Angka 2025

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Program pembangunan daerah atau yang biasa disebut sebagai program prioritas merupakan sekumpulan program yang secara spesifik berhubungan dengan capaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam RPJMD. Berdasarkan Prioritas Pembangunan, Tujuan dan Sasaran pembangunan, serta keterkaitan program untuk mendukung Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional, yang dibahas dalam Bab IV, hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dan memperhatikan Sasaran Pokok dalam RPJPD, sehingga diperoleh Program Pembangunan Kota Makassar (Program Prioritas) tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel V.3.
Program Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program (Outcome)	Baseline Tahun 2024	Tahun 2026		Prakiraan Maju (Tahun 2027)		SKPD Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp (000)	
1	Peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, dan lapangan berusaha melalui pemberdayaan masyarakat dan mendorong penerapan ekonomi hijau dan biru	Tujuan 1.1: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	6,43		7,43		
		Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dan Perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19	19,46		19,64		
			Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil. dan Sepeda Motor (%)	20,03	20,30		20,40		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	4,80%	1.975.441.820	4,80%	2.336.014.440	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang kota Makassar	11.95%	12.10%	1.606.565.580	13%	1.714.565.840	Dinas Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	60%	70%	293.944.800	75%	652.085.456	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	N.A	1%	3.635.364.020	1%	3.186.024.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

		Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja. dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,71	9,53		9,44		
			PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	165.95	186.75		200.62		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	20,49%	21,21%	1.725.506.000	22,22%	1.923.893.980	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60,05%	61%	1.620.504.300	62%	1.688.259.780	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10.45%	15%	2.539.227.300	20%	5.340.956.200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pertumbuhan Wirausaha	12.43%	14.5%		16.5%		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	20.603,90 Ton	21.722 Ton	2.467.155.780	22.048 Ton	2.440.218.980	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N.A	12.92%	2.750.611.850	16.16%	2.874.585.000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan	Rasio Wirausaha Pemuda	16.61%	17.75%	7.028.413.000	18.32%	6.940.245.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

		Kapasitas Daya Saing Kepemudaan							
2	Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan kemandirian fiskal daerah	Tujuan 1.2: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	4,10	4,23		4,28		
		Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,58%	0,61		0,62		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	38.17%	42.17%	30.652.857.226	45.51%	35.055.995.528	Badan Pendapatan Daerah
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	50.00%	50.00%		56.00%		
			Persentase Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	92.41%	93.00%		94.00%		
		Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)	1,19	1,77		1,92		
			Indeks Ketahanan Pangan	83,86	87,95		89,11		
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100%	100%	748.728.080	100%	686.777.640	Dinas Perdagangan
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	100%	100%		100%		

		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100%	100%	54.362.000	100%	55.356.200	Dinas Perdagangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	15614 Ton	15616 Ton	5.156.772.960	15618 Ton	5.124.072.424	Dinas Perikanan dan Pertanian
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	5.4 Ton	8 Ton		9 Ton		
			Peningkatan Produksi Hortikultura	310,7 Ton	330,6 Ton		340,60 Ton		
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)	N/A	2400	4.295.230.500	2400	4.531.632.783	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.519.58 Ton	1.568.35 Ton	1.337.593.720	1.577.76 Ton	1.275.299.980	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	1,31%	1,30%	544.825.300	1,29%	618.576.200	Dinas Ketahanan Pangan
		Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	-35,16	3,00		3,50		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investas	Nilai Investasi Rp.3.827.931.439.043	Nilai Investasi Rp.3.000.000.000.000	805.948.240	Nilai Investasi Rp.3.262.500.000.000	945.850.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80%	90%	1.227.850.640	100%	1.320.858.350	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	43.439.409.440	100%	40.004.387.096	Sekretariat Daerah, Bagian Kerjasama
			Efektivitas Kerja Sama Daerah	100%	100%		100%		
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Tujuan 2.1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	85,23	85,86		86,03		
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	81.96	82.10		82.17		
		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi dalam PAUD	100%	100%	280.112.708.127	100%	301.438.453.678	Dinas Pendidikan
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%		100%		
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	100%	100%		100%		

			pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%	100%		100%		
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%	100%		100%		
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	PAUD= 100% SD= 95% SMP= 93%	PAUD= 100% SD=96% SMP= 94%	123.015.000	PAUD= 100% SD=98% SMP= 95%	10.915.000	Dinas Pendidikan
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	PAUD= 34.46% SD=35.23%SMP =41.3%	PAUD= 40% SD=70% SMP=75 %				
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	84,52	84,60	4.567.555.200	84,63	4.583.571.424	Dinas Perpustakaan
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,33	75,66		75,81		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Jumlah ibu hamil	100%	100%	192.872.820.257	100%	337.410.104.182	Dinas Kesehatan

		Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mendapatkan pelayanan Kesehatan						
			Jumlah ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%		100%		
			Jumlah bayi baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%		100%		
			Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	100%		100%		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	100%		100%		
			Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	82.88%	100%		100%		
			Jumlah Warga negara usia lanjut yang mendapat-kan pelayanan kesehatan	93.61%	100%		100%		
			Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang	83.56%	100%		100%		

			mendapatkan pelayanan kesehatan						
			Jumlah Warga Negara penderita Diabetes militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	100%		100%		
			Jumlah Warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	100%		100%		
			Jumlah Warga Negara tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	100%		100%		
			Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	100%		100%		
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	18.386	20.543		22.068		

			(Juta Rupiah/Per Kapita/Tahun)						
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investas	Nilai Investasi Rp.3.827.931.439.043	Nilai Investasi Rp.3.000.000.000.000	805.948.240	Nilai Investasi Rp.3.262.500.000.000	945.850.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10.45%	15%	2.539.227.300	20%	5.340.956.200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pertumbuhan Wirausaha	12,43%	14,5%		16,5%		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60.05	61.00	1.620.504.300	62.00	1.688.259.780	Dinas Ketenagakerjaan
4	Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dan	Tujuan 3.1: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur	74,25	79,46		80,23		
		Sasaran 3.1.1: Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	35.40	39.03		40.98		
			Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	49.39	54.45		57.18		

	kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	N.A	88,74%	204.380.997.746	90,51%	192.951.171.085	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum)	20 Perumahan	100%	7.817.813.400	100%	7.898.663.630	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh	50 unit	20%	3.055.410.500	40%	3.100.480.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar	N.A	54,85%	16.755.034.000	57,22%	25.492.337.437	Dinas Pekerjaan Umum
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi. erosi. dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar	N.A	54,45		54,54		

		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		83,88%	29.938.498.440	84,10%	24.224.749.800	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik		91,94%	46.076.421.651	92,40%	33.911.208.019	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik		57,81%	80.545.042.788	60,16%	81.419.136.294	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		49,65%	293.222.389.350	52,13%	333.325.047.000	Dinas Pekerjaan Umum
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang (%)	100	100		100		
			Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	10	25%		50%		
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	0	80%	4.865.001.680	85%	7.028.291.400	Dinas Penataan Ruang
5	Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui	Tujuan 4.1: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	76,56	79,23		80,87		

	penguatan dan inovasi industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi	4,46	4,56		4,6		
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	N/A	100%	3.162.045.800	100%	3.170.052.010	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)	101 Inovasi	4		6		
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	N/A	100%	3.162.045.800	100%	3.170.052.010	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi. Makan dan Minum (%)	2,18	2,28		2,33		
		Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	5.684.295	6.943.576		7.738.842		
			Jumlah daya tarik pariwisata yang difasilitasi (Lokasi)	1 Lokasi	1 Lokasi		1 Lokasi		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	24,88%	7%	4.735.612.600	10%	4.735.611.214	Dinas Pariwisata
		Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase peningkatan karya budaya terdaftar dalam Warisan	N.A	33.3%		33.3%		

			Budaya Takbenda (%)						
			Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan	N.A	21		28		
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100% (350 Orang)	100%	1.641.976.780	100%	1.715.813.700	Dinas Kebudayaan
			Persentase Warisan Budaya Tak Benda Yang di Tetapkan	4 Objek WBTB	20% (2 WBTB)		20% (2 WBTB)		
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	23 % 36 Objek	20 % (10 Objek)	1.655.232.220	20 % (10 Objek)	1.655.232.400	Dinas Kebudayaan
		Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar (Industri)	4.220	4.700		5.050		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	2.20%	3.03%	5.673.751.003	3.63%	5.300.888.100	Dinas Pariwisata
			Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar	4.220 Industri Ekraf	4.831 Industri Ekraf		5.170 Industri Ekraf		
6	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Tujuan 5.1: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang	Indeks Reformasi Birokrasi	78,64	81,31		82,64		

	Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasi serta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan	Berintegritas Dan Adaptif							
		Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B	BB		BB		
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,01	4,03		4,04		
			Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	87,00	87.98		88.49		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	3.060.051.644	100%	3.011.065.744	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	76,21%	78,21%	2.960.628.020	79,21%	2.987.722.976	Inspektorat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	43.439.409.440	100%	40.004.387.096	Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	26,59	30%	47.017.935.500	30%	49.877.511.460	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	26,99	40%		40%		

			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	80,71	85%		90%		
			Persentase Penurunan SILPA	21,74	15%		15%		
			Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100%		100%		
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	65%	73%	4.287.343.800	74%	4.359.260.960	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	55%	71%		72%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase SKPD yang mengimplemen-tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	NA	100%	50.183.004.486	100%	49.353.247.382	Dinas Komunikasi dan Informatika

7	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama	Tujuan 5.2: Meningkatnya Kualitas Keamanan. Ketentraman. dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N.A	77		79		
		Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	54,03	56,02		57,02		
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kota Makassar	100%	100%	25.235.900.200	100%	26.269.544.280	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	100%	100%	8.322.929.920	100%	9.037.728.660	Seluruh Kecamatan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	85%	12.663.725.020	90%	12.092.495.400	Badan Kesatuan Bangda dan Politik
8	Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju dengan memperhatikan pelibatan	Tujuan 6.1: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	63,13	63,15		63,16		
		Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,183	0.177		0.174		

	pemberdayaan kelompok marjinal melalui pembangunan keluarga, Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	71%	75%	5.521.945.100	80%	3.672.856.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1.05%	1.00%	2.186.910.844	0.90%	1.654.686.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
		Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	67,04	70.60		71.78		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63.65	65.55	396.841.200	67.05	392.725.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	100	100	1.243.952.048	100	1.751.628.652	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
		Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	57,67	61		63		
			Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,476	0,518		0,539		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	16.61% (baseline /2024)	17.75%	7.028.413.000	18.32%	6.940.245.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100	110	92.925.737.300	120	99.564.679.899	Dinas Pemuda dan Olahraga

		Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan (%)	4,97	3,78-3,46		3,4-2,63		
		Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio	0,372	0,381-0,359		0,353		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	100%	2.382.505.700	100%	2.350.489.500	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	N/A	80%		80%		
		Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	41,1	42,51		43,22		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60.05	61.00	1.620.504.300	62%	1.688.259.780	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	4.474.269.706	100%	4.693.381.856	Dinas Sosial

			Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%		100%		
			Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%		100%		
			Jumlah Warga Negara Gelandang dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	100%	100%		100%		
9	Pelestarian lingkungan hidup melalui penguatan mitigasi dampak lingkungan serta peningkatan Kapasitas Penanganan Bencana dan Ketangguhan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Tujuan 7.1: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,41	66,38		66,59		
		Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	58,70	74,15		74,35		
			Indeks Kualitas Udara	81,51	75,52		75,82		
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,92	36,13		36,20		
			Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	3,18	38		42		

		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	2.676.955.080	100%	3.392.562.720	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	100%	100%	26.057.559.260	100%	28.643.014.120	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	10.12%	11.13%	59.427.736.219	11.64%	58.494.474.189	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	100%	100%	182.713.494.133	100%	178.985.584.382	Seluruh Kecamatan
		Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	113.71	107		105		
		Sasaran 7.2.1: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	0.46	0,48		0,49		
			Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	N.A	34,98		37,36		
		Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	7.815.171.960	100%	8.360.300.640	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%		100%		
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%		100%		
		Program Penanganan Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	2.353.160.480	100%	2.895.807.800	Dinas Sosial
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	18.675.608.240	100%	22.324.180.217	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100%	100%		100%		

		Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	2.01%	4%	59.427.736.219	6%	58.494.474.189	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0.48	0.47	92.803.401.091	0.46	94.468.167.500	Dinas Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	57.22%	60%		63%		
Total PAGU					2.070.138.194.648		2.274.992.981.942		

V.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Berdasarkan Sasaran, Program prioritas dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 yang dibahas pada Bab IV, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2024, tujuan dan sasaran, Program Prioritas daerah dalam RPJPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Standar Pelayanan Minimal serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2026. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2026.

Pemerintah Kota Makassar dalam menyelenggarakan pemerintahan melaksanakan Urusan Konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari :

1. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari 6 bidang urusan yaitu :
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
   f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari 18 bidang urusan yaitu :
   a. Tenaga kerja;
   b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   c. Pangan;
   d. Pertanahan;
   e. Lingkungan Hidup;
   f. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
   g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   i. Perhubungan;
   j. Komunikasi Dan Informatika;
   k. Koperasi, usaha kecil, dan Menengah;
   l. Penanaman Modal;
   m. Kepemudaan Dan Olahraga;
   n. Statistik;
   o. Persandian;
   p. Kebudayaan;
   q. Perpustakaan;
   r. Kearsipan.
3. Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu :
   a. kelautan dan perikanan;
   b. pariwisata;

c. pertanian;
d. perdagangan.
e. Perindustrian

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar:
   a. Unsur Sekretariat Daerah
   b. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   c. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan
   d. Fungsi Penelitian dan Pengembangan
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar:
   a Unsur Perencanaan
   b Unsur Keuangan
   c Unsur Kepegawaian
   d Unsur Pendidikan dan Pelatihan
   e Unsur Penelitian dan Pengembangan
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
   a. Inspektorat Daerah
7. Unsur Kewilayahan
8. Unsur Pemerintahan Umum
9. Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Makassar melaksanakan urusan konkuren yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada setiap Perangkat Daerah. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, sedangkan untuk Program setiap bidang urusan dan unsur pendukung, berbeda-beda sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar dapat diuraikan sebagai dalam tabel yang menjadi lampiran RKPD tahun 2026.

BAB 6

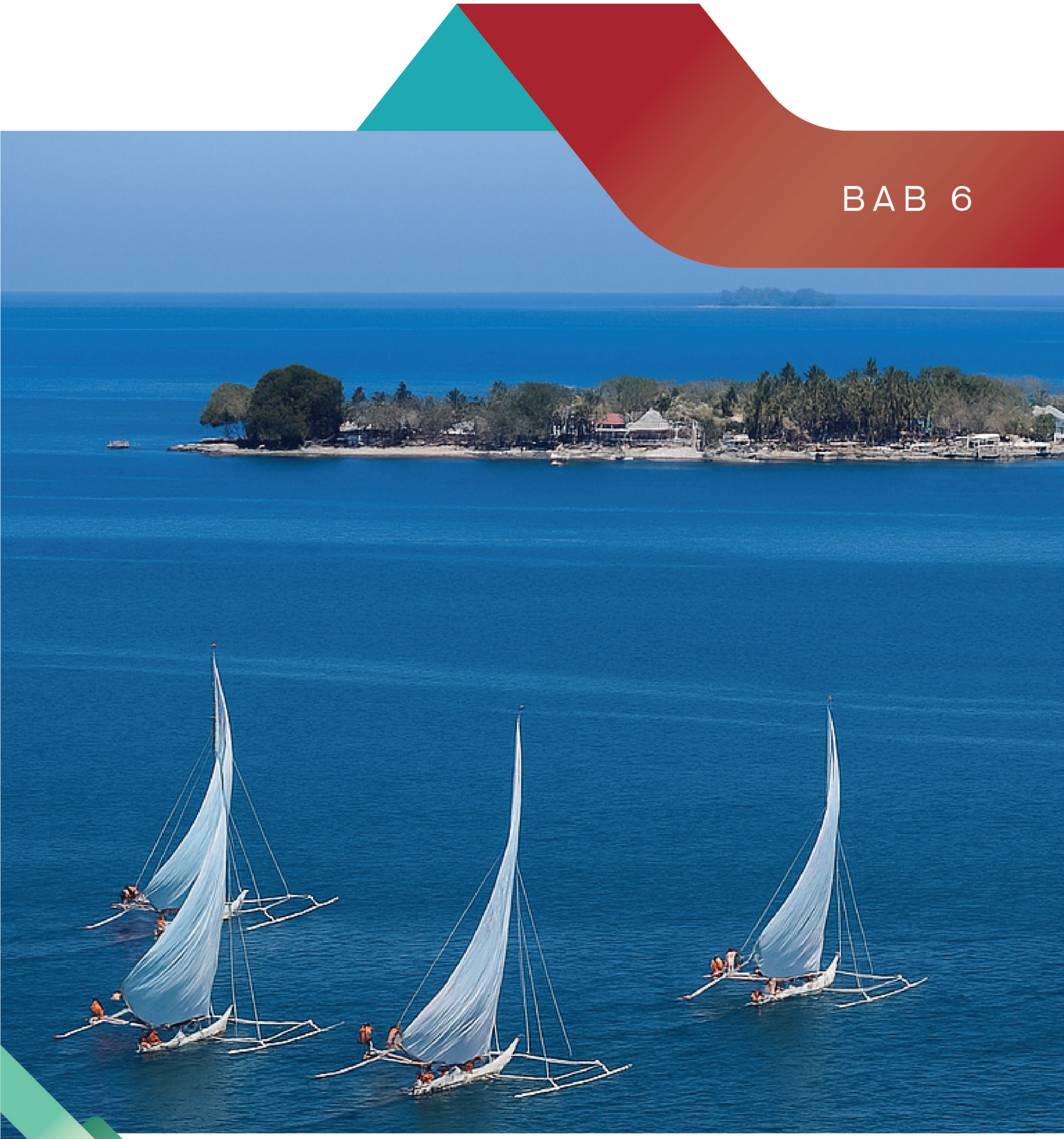

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja dapat didefinisikan sebagai keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan/program/sasaran yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana pencapaian kinerja yang telah direncanakan, keberhasilan maupun kegagalannya, dalam periode waktu tertentu perlu ditetapkan suatu indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Indikator kinerja Kota Makassar terdiri dari Indikator Kinerja Utama (termasuk indikator kinerja makro daerah), Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

VI.1 Indikator Makro

Indikator kinerja makro merupakan salah satu dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat indikator ekonomi dan indikator sosial budaya yang diantarnya meliputi indeks laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gini, penurunan intensitas emisi GRK, PDRB per kapita, kontribusi PDRB Kota, indeks pembangunan manusia, dan indeks kualitas lingkungan hidup. Indikator ini sangat penting untuk analisis ekonomi, perencanaan kebijakan pemerintah, maupun keputusan investasi. Adapun target indikator makro Kota Makassar Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel VI.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kota makassar Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Baseline Tahun 2024	Hasil Kesepakatan Rakortek	Target Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	(%)	5,56	6,43	6,43
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	9,71	9,53	9,53
3	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,97	3,78-3,46	3,78-3,46
4	Rasio Gini	Rasio	0,372	0,381-0,359	0,381-0,359
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK	(%)	32,46	34,98	34,98
6	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	165,95	186,75	186,75
7	Kontribusi PDRB Kota	(%)	34,91	Tidak dibahas	35,14
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	85,23	85,86	85,86
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,41	Tidak dibahas	66,38

VI.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target IKU pembangunan Kota Makassar merupakan ukuran pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Makassar tahun 2022-2026. Target IKU Kota Makassar tahun 2025 dan 2026 tercantum pada tabel berikut:

Tabel VI.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kota Makassar Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	5,73	6,43
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,17	19,29	19,46
3	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%)	20,03	20,10	20,30
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,71	9,62	9,53
5	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	165,95	175,46	186,75
6	Indeks Daya Saing Daerah	4,10	4,17	4,23
7	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,58	0,59	0,61
8	Tingkat Inflasi (%)	1,19	1,52	1,77
9	Indeks Ketahanan Pangan	83,86	89,28	87,95
10	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	-50,26	2,5	3,00
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85,23	85,46	85,86
12	Indeks Pendidikan	81,96	82,03	82,10
13	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,33	75,51	75,66
14	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah/Per Kapita/Tahun)	18.386	19.301	20.543
15	Indeks Layanan Infrastruktur	74,25	78,69	79,46
16	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	35,40	37,17	39,03
17	Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	49,39	51,86	54,45
18	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang (%)	100	100	100
19	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	10	10%	25%
20	Indeks Inovasi Daerah	76,56	77,59	79,23
21	Indeks Kapabilitas Inovasi	4,46	4,51	4,56
22	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)	101 Inovasi	2	4
23	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,18	2,23	2,28
24	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	5.684.295	6.247.812	6.943.576
25	Jumlah Daya Tarik Pariwisata Yang Difasilitasi (Lokasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
26	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda (%)	N/A	33.3%	33.3%
27	Persentase Cagar Budaya Yang Dilindungi Dan Dimanfaatkan (%)	N/A	12	21
28	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar (Industri)	4.220	4.350	4.700
29	Indeks Reformasi Birokrasi	78,64	79,97	81,31
30	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B	B	BB
31	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,01	4,02	4,03

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target 2026
32	Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK	87,00	87.48	87.98
33	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	75	77
34	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	54,03	55,03	56,02
35	Indeks Kota Toleran	4,4	5,0	5,1
36	Indeks Pembangunan Keluarga	63,13	63,14	63,15
37	Indeks Ketimpangan Gender	0,183	0,179	0,177
38	Indeks Perlindungan Anak	68,30	69,44	70,60
39	Indeks Pembangunan Pemuda	57,67	59,00	61,00
40	Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	0,476	6,20	15,42
41	Tingkat Kemiskinan (%)	4,97	3,62-3,03	3,78-3,46
42	Gini Rasio	0,372	0,366	0,381-0,359
43	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	41,1	41,81	42,51
44	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,41	66,17	66,38
45	Indeks Kualitas Air	58,70	73,95	74,15
46	Indeks Kualitas Udara	74,92	75,22	75,52
47	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,92	36,06	36,13
48	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	3,18	35	38
49	Indeks Risiko Bencana	113,71	110	107
50	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	0,47	0,48
51	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	NA	32,46	34,98

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 (data diolah)

VI.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga

negara secara minimal. Pemenuhan pelayanan dasar merupakan prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021). Target SPM Kota Makassar untuk tahun 2026, tercantum pada tabel berikut:

Tabel VI.3.
Penetapan Target Indikator SPM Kota Makassar Tahun 2026

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
I	**Bidang Pendidikan**										
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan	100 %	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
		Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	setiap tahun					100%	100%	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi	setiap tahun		100%	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan	Meningkat dari hasil	setiap tahun					100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
		numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	dua tahun sebelu mnya								
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	setiap tahun		100%	100%	100%
II	**Bidang Kesehatan**										
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara	100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)		pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)			100%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang			100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
					tata cara pemenuhan	akan dipenuhi)					
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	setiap tahun		100%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan	Jumlah warga negara usia	100%	setiap tahun	Jumlah barang	100% (sesuai	setiap tahun		100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
	pada usia lanjut	lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan			dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)					
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	setiap tahaun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita	setiap tahun		100%	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan	100%	setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita	setiap tahun		100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
		pelayanan kesehatan			tata cara pemenuhan	hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)					
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	setiap tahun		100%	100%	100%
11	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	setiap tahun		100,%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
					tata cara pemenuhan						
12	pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan	jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang akan dipenuhi	setiap tahun		100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
III	**Bidang Pekerjaan Umum**										
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	setiap tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	setaip tahun	berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	100%	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	setiap tahun	berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM bidang pekerjaan umum dan	73,75%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
						domestik yang akan dipenuhi)		perumahan rakyat			
IV	**Bidang Perumahan Rakyat**										
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	setiap tahun	jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah kayak huni yang akan dipenuhi)	setiap tahun	indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	setiap tahun	jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	setiap tahun	indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	100%	100%	100%
V	**Bidang Trantibumlinmas**										

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
1	Pelayanan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%	setiap tahun	jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	setiap tahun	indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota	100%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	setiap tahun	jumlah barang dan jasa sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			8100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
						yang akan dipenuhi)					
3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	setiap tahun	jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaa n terhadap bencana yang akan di penuhi)			100%	100%	100%
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	setiap tahun	jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan	setaip tahun		100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
						penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)					
5	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	setiap tahun	jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)			100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
VI	**Bidang Sosial**										
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	setiap tahun	jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)		indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara anak terlantar yang akan dipenuhi)			100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang	100%	setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100% (sesuai dengan jumlah warga	setiap tahun		100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
	terlantar di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			daya manusia	negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)					
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	setiap tahun		100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah	100%	setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana kabupaten/ko	setiap tahun		100%	100%	100%

No	Bidang urusan / jenis pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian 2025	Target Tahun 2026
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan			
		tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				ta yang akan dipenuhi)					

VI.4 Indikator Kinerja Daerah

Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). IKD membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Makassar. Target Kota Makassar pada tahun 2025 dan 2026, tercantum pada tabel berikut:

Tabel VI.4.
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kota Makassar Tahun 2026

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
1.	**Aspek Geografi dan Demografi**					
1.1	**Bertahanan Energi Air dan Kemandirian Pangan**					
1	Konsumsi Listrik Per Kapita	KwH	1.565	1.627	1.668	1.782
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	3,97	3,96	3,95	3,91
3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87,9	88	88,1	88,5
4	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,73	89,74	89,75	89,79
5	Kapasitas Air Baku	m^3/detik	3.36	4.04	4.07	4.07
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	9.15	30	32	43
1.2	**Lingkungan Hidup Berkualitas**					
7	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia	Persen	8.98	13.66	16.85	29.61
8	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1519.58	1559	1568.35	1606.33
9	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	48,55	48,74	48,94	49,73
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.41	66.17	66.38	67.23
11	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	5.7	43	43.5	45
12	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	1.9	6	10	35
13	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	3.18	35	38	50
14	Indeks Risiko Bencana	Indeks	113.71	110	107	100
15	Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	NA			3.70
16	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	32.46	34.98	44.60
2.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**					
2.1	**Kesejahteraan Ekonomi**					

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,56	5,73	6,43	8,20
17	PDRB Per Kapita	Rp Juta	165,95	175,46	186,75	246,34
18	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Rp Triliun	243.06	265.79	289.14	420.75
19	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta	18.386	19.301	20.543	27.097
2.2	**Kesehatan Untuk Semua**					
20	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.33	75.51	75.66	76.27
21	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		71.53	69.09	66.65	56.89
22	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	100	100	100	100
23	Prevalensi *Stunting* Pada Balita	%	21.6	20.88	20.16	17.28
24	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	%	100	100	100	100
25	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	82	82.5	83	85
26	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99.10	100	100	100
2.3	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**					
27	Literasi	%	SD= 62.86 SMP=71.66	SD= 65.86 SMP=72.66	SD= 67.86 SMP= 73.86	SD= 77.86 SMP= 78.26
28	Numerasi	%	SD= 54.38 SMP= 62.85	SD= 55.38 SMP= 63.85	SD= 60.18 SMP= 65.85	SD= 71.78 SMP= 71.85
29	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	11.57	11.58	11.59	11.63
30	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.62	15.63	15.64	15.68
31	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	21.91	22.91	23.91	27.91
32	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	%	15,03	29,63	30,27	32,81
33	Angka Putus Sekolah	%	1,54	1,29	1,04	0
2.4	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**					
34	Tingkat Kemiskinan	%	4,97	3,62-3,03	3,78-3,46	3,02-2,06
35	Indeks Gini	Indeks	0.372	0,366	0,381-0,359	0,334
36	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	41,1	41,81	42,51	45,34
37	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	%	56.19	61.81	67.99	100

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
	Ketenagakerjaan					
2.5	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**					
38	Indeks Kota Toleran	Indeks	4,9	5,0	5,1	5,5
39	Persentase Benda Bangunan Struktur dan situs cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	23	14,51	20	20
40	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Mendapat Dukungan/ Fasilitasi	%	0.50	1.15	1.19	1.36
2.6	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**					
41	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	63.13	63.14	63.15	63.19
42	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	67.04	69.44	70.60	75.44
43	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94.92	95.18	95.43	96.33
44	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	78.64	79.14	79.63	81.49
45	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,183	0.179	0.177	0.165
46	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57.67	59	61	69
3.	**Aspek Daya Saing Daerah**					
3.1	**Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)**					
47	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	85,23	85,46	85,86	86,84
48	Angka Ketergantungan	%	42,52	42,49	42,72	44,81
3.2	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**					
49	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18,17	19,29	19,46	20,26
50	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	%	2,18	2,23	2,28	2,48
51	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik	Orang	5.524.000	5.531.025	5.538.157	5.568.371
52	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	95.596	95.632	95.852	97.120
53	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	Industri	4.220	4.350	4.700	6.310
54	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Kota Makassar	Industri	24.815	24.915	25.015	25.415
55	Persentase Koperasi Sehat Kota Makassar (%)	%	26.96	27.24	27.51	28.61
56	Return on Assets (ROA) BUMD		1,41	1,60	1,90	3,00
57	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	Ton/Ha	6.48	6.77	6.87	7.23
58	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	1.2	1.25	1.25	1.3

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
59	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9.71	9,62	9,53	9,17
60	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	62.04	62.27	62.51	63.47
61	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	47.06	47.23	47.41	48.14
62	Indeks Kapabilitas inovasi	Indeks	4.46	4.51	4.56	4.75
3.3	**Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**					
63	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	55.1	51.4	55.2	70.4
64	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	78	101.4	113.1	159.9
3.4	**Transformasi Digital**					
65	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	49	49.25	49.50	52
3.5	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**					
66	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	%	90	90	90	90
67	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	44,97	45,11	45,86	49,22
68	Net Ekspor Barang dan Jasa	US $	34.700.607,67	47.488.263,30	60.310.094,39	169.591.599,43
3.6	**Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**					
69	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional	%	1,10	1,12	1,14	1,26
70	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan	%	34,91	35,04	35,14	34,97
71	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	%	74.25	78.69	79.46	82.54
72	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	74,25	78,69	79,46	82,54
3.7	**Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**					
73	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	%	0,58	0,59	0,61	0,67
74	Tingkat Inflasi Gabungan	%	1,19	1,52	1,77	2,20
75	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	%	-50,26	8,75%	8,85	9,5
76	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	B	B	A
4.	**Aspek Pelayanan Umum**					
4.1	**Tata Kelola Yang Berintegritas Adaptif dan Inovatif**					
77	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97.72	98.02	98.42	99.70

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
78	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4.01	4.02	4.03	4.1
79	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78.64	79.97	81.31	86.65
80	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.21	4.28	4.37	4.73
81	Indeks Survey Penilaian Integritas	Indeks	62.33	75.55	76.78	81.67
82	Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK	Nilai	86.97	87.48	87.98	90.00
83	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3.10	3.42	3.50	3.82
4.2	**Ketaatan Hukum. Ketertiban dan Keamanan Tangguh Seta Demokrasi Substansial**					
84	Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100	100
85	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100
86	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	%	54.03	55.03	56.02	60.00
87	Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD	%	16.00	16.00	16.00	20.00
88	Proporsi Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (Perda)	%	9	9	9	10
89	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	%	31,1	31,6	32,0	33,9
4.3	**Daya Saing Daerah Tinggi**					
90	Jumlah Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah Lainnya (Sister City) (PKS)	Kerjasama	1	1	2	4
91	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,10	4,17	4,23	4,35
92	Indek Inovasi Daerah	Indeks	76,56	77,59	79,23	83,81

Sumber : Bappeda Kota Makassar Tahun 2025 (data diolah)

VI.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peratu

ran perundang-undangan. IKK meliputi 36 urusan dengan target Kota Makassar pada tahun 2025, 2026 dan Akhir Periode RPJMD, tercantum pada tabel berikut:

Tabel VI.5.

Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci Kota Makassar Tahun 2026

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
5.	**Indikator Kinerja Kunci**					
5.1	**Pendidikan**					
	Tingkat partisipasi warga	%	61,10	100	100	100

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
	negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,93	100	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	44,50	100	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang ber-partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	44,50	100	100	100
2.	**Kesehatan**					
	Rasio daya tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1 : 207	1 : 207	1 : 220	1 : 220
	Persentase RS Rujukan Kota Makassar yang terakreditasi	%	100	100	100	100
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	82,88	100	100	100
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	93,61	100	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	83,56	100	100	100
	Persentase penderita Hipertensi yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
	Persentase ODGJ berat Yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar	%	89,15	52,47	54,85	64,35
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar	%	54,45	54,45	54,45	54,45
	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota Makassar	%	82,96	83,66	83,88	84,76
	Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	89,63	91,48	91,94	93,33
	Rasio kepatuhan IMB Kota Makassar	%	100	100	100	100
	Tingkat Kemantapan Jalan kota Makassar	%	98,00	98,25	98,49	99,15
	Rasio Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	%	100	100	100	100
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa	%	100	100	100	100

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
	kecelakaan konstruksi					
4.	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**					
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kota Makassar	%	100	100	100	100
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota Makassar	%	100	100	100	100
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota Makassar yang ditangani	%	10	10	10	10
	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	Unit	0	150	150	150
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah	20	20	20	20
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada Yang ditegakkan	%	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15
6.	**Sosial**					
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang terpenuhi dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100
	Persentase Korban bencana alam dansosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100
7.	**Tenaga Kerja**					
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	96,67	97,50	98,33	100,00
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,40	1,45	1,49	1,75
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	23,52	24,05	24,80	28,18
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	40,26	40,50	41,00	43,00
	Persentase Tenaga kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar	%	60,05	60,50	61,00	65,00
8.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	71	75	75	95
	Persentase anak korban kekerasan Yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100
	Rasio Kekerasan terhadap perempuan,termasuk TPPO (per 100,000 Penduduk perempuan)	%	1,05	1,04	1,00	0,6

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
9.	**Pangan**					
	Persentase ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	90	90	90	90
10.	**Pertanahan**					
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	90	90	90	90
11.	**Lingkungan Hidup**					
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar	Indeks	61,41	66,17	66,38	67,23
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Makassar	%	2,01	3	4	12
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar	%	24,59	69,20	61,5	30,77
12.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
	Perekaman KTP Elektronik	%	96,05	96,2	96,5	98,5
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Kepemilikan akta kelahiran	%	72	74,3	76,6	83,5
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	20	20	20	20
13.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	2 ,01	2,010	2,008	2
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern *(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*	%	59,80	59,80	61,60	68
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	12	12	11	7
14.	**Perhubungan**					

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
	Rasio Konektivitas Kota Makassar	-	63,2	64	64	68
	Kinerja lalu lintas Kota Makassar	-	0,48	0,47	0,46	0,42
15.	**Komunikasi dan Informatika**					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100
	Persentase Layanan Publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	49	49,25	49,50	52
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Makassar	%	82,50	85,00	85,00	85
16.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
	Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas	%	10,02	10,97	12,03	17,41
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	3,10	3,37	3,70	5,40
17.	**Penanaman Modal**					
	Persentase peningkatan investasi di Kota Makassar	%	-50,26	8,75	8,85	9,5
18.	**Kepemudaan dan Olahraga**					
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	17,07	17,44	18,01	20,25
	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	11,69	12,69	13,69	17,69
	Peningkatan prestasi olahraga	%	5,82	6,20	15,42	16,35
19.	**Statistik**					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang menggunakan data statistik dalam	%	76	100	100	100

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
	menyusun perencanaan pembangunan daerah					
	Persentase OPD yang menggunakan Data statistic dalam melakukan Evaluasi pembangunan daerah	%	76	100	100	100
20.	**Persandian**					
	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	%	41	46	49	62
21	**Kebudayaan**					
	Terlestarikannya Cagar Budaya	Unit	23	20	20	20
22	**Perpustakaan**					
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	84,52	84,60	84,63	84,75
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	78,99	80	80,05	80,25
23	**Kearsipan**					
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	99,24	99,24	99,24	99,24
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	**%**	100	100	100	100
24	**Kelautan dan Perikanan**					
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota Makassar	Ton	22123,48	22960	23290,35	24661,33
25	**Pariwisata**					
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	25,13	5	6	10
	Tingkat hunian Akomodasi	Hari	1,6	1,62	1,65	1,8
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,14	2,15	2,16	2,20
	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	25,53	25,55	25,60	26

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
26	**Pertanian**					
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	12,14	12,47	12,67	13,43
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	35,40	65	70	90
29	**Perdagangan**					
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	75	80	100	100
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	N,A	100	100	100
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	80	90	90	90
30	**Perindustrian**					
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Makassar	Industri	24,815	24,915	25,015	25,415
	Persentase pencapaian Sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	N,A	40	60	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	2,42	1,05	1,05	1,05
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah	%	100	100	100	100

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
	Kota Makassar					
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100
32.	**Perencanaan dan Keuangan**					
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	11,7	9,51	11,19	12,28
	Rasio PAD	%	38,17	42,30	45,17	47,34
	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,10	3,42	3,50	3,82
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indeks	3,04	3,084	3,156	3,632
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	76,73	69,88	72,27	69,62
33.	**Pengadaan**					
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Proyek	N,A	2	2	2
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	53,51	55,24	57,56	70,05
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	59,01	61,91	63,15	69,95
34	**Kepegawaian**					
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	64,69	80	81	85
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	8,24	73,5	74	76
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	8,24	26,5	27	29
35	**Manajemen dan Keuangan**					

No	Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	26	23	20	10
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset	%	26,01	25,00	24,00	20,00
	Manajemen Aset	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6,53	4,75	4,496	2,35
36	**Transparansi dan Partisipasi Publik**					
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100
	Akses publik terhadap informasi Keuangan daerah	%	100	100	100	100

VI.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan amanah dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana sebagai salah satu negara anggota PBB yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, maka dalam pelaksanaanya perlu ada keselarasan dengan Rencana Pembangunan di daerah. Target TPB Kota Makassar untuk tahun 2026, tercantum pada tabel berikut:

6.4.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 dari TPB menekankan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga tidak ada lagi penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Pencapaian tujuan 1 TPB dilakukan melalui arah kebijakan berikut:

1. Memperluas jangkauan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin dan rentan
2. Meningkatkan akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan akses rumah tangga miskin dan rentan terhadap layanan jasa keuangan
4. Memperkuat kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap bencana, serta memberikan perlindungan dan penanganan yang cepat dan tanggap pasca terjadinya bencana

Untuk menjalankan upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan 5 target, yang diturunkan ke dalam 14 indikator sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel VI.6. Target Pencapaian Indikator TPB Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun Kota Makassar

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2024
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	
Target 1.2 : mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional									
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	5,07	4,24	4,20	4,24	4.20	4,97
1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	%	100, 11	100	100	100	100	99,1
1.3.1(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	KK	21188	24000	24000	24000	24000	31596
1.4 : Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi bau, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	100	99	100	99	100	100
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin.	DP2KB	%	68.46	68,45	68,45	68,45	68.45	31,23
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Dinas PU	%	83,49	100	100	100	100	82,96
1.4.1.(e)	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas PU	%	94,24	56,70	57,78	65.7	57.78	89,63

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2024
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	98,06	99,70	99,80	99,70	99.80	85,36
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	79,51	91,29	93,57	91,29	93.57	73,99
1.4.1.(j)	persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil	%	98,55	100	100	100	100	98,68
1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Damkar	Kejadian	150 Kejadian	150 Kejadian	150 kejadian	150 Kejadian	150 kejadian	150 kejadian
		BPBD	%	90,66	100	100	100	100	96,94
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas Sosial	%	100	100	100	100	100	100
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial	Jiwa	200	100	100	100	100	137
1.a : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.									
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Ketahanan Pangan	Klp	619	500	500	500	500	283

6.4.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 dari TPB menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang sesuai standar gizi, serta mengupayakan perbaikan sisi *supply* pangan melalui pengembangan sektor pertanian secara produktif dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan 2 TPB ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan dalam jumlah memadai di pasar
2. Memperluas cakupan bantuan pangan kepada masyarakat, khususnya pada kelompok miskin dan rentan
3. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, terutama melalui adopsi teknologi, bantuan permodalan, serta pembenahan kelembagaan di sektor pertanian.

Untuk menjalankan upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan dua target yang diturunkan ke dalam sembilan indikator sebagaimana pada Tabel di bawah ini:

Tabel VI.7. Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2024
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	
2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi , terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%	1,83	4,98	4,71	4,98	4,71	100
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	%	17,64	11,76	5,88	11,76	5,88	11,76
2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang telah disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita	Dinas Ketahanan Pangan	Lorong	619	500	500	500	500	283
		DP2KB	%	25,06	71,09	71.79	71,09	71.79	6,12
2.2.2	Prevalensi malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	Dinas Kesehatan	%	0,29	4,98	4,71	4,98	4,71	12,07
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	%	70,02	60	65	60	65	78,81
2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai ; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	85	88	90	88	90	89,73

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2024
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	
2.c : Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.									
2.c.1	indikator anomali harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Energi	Energi:2.700 Protein:127	Energi:2.700 Protein:128	Energi:2.700 Protein:129	Energi:2.700 Protein:128	Energi:2.700 Protein:129	Energi:2.812 Protein:88,21
2.3 : Padatahun2030,menggandakanproduktivitas pertanian danpendapatanprodusenmakanan skala kecil, khususnya perempuan,masyarakatpendudukasli,keluargapetani, penggembala dan nelayan,termasuk melalui akses yang amandan sama terhadap lahan, sumberdaya produktif, dan input lainnya,pengetahuan,jasakeuangan,pasar,dan peluang nilai tambah, danpekerjaannonpertanian.									
2.3.1*	NilaiTambah Pertanian di bagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah pertenaga kerja).	Dinas Perikanan dan Pertanian	Ton	6,47 Ton Per Hektar Pertahun	7,1 Ton Per Hektar Pertahun	7,1 Ton Per Hektar Pertahun	7,1 Ton Per Hektar Pertahun	7,1 Ton Per Hektar Pertahun	6,5 Ton Per Hektar Pertahun
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	Dinas Perikanan dan Pertanian	Ton	6,47 Ton Per Hektar Pertahun	7,1 Ton Per Hektar Pertahun	7,1 Ton Per Hektar Pertahun	7,1 Ton Per Hektar Pertahun	7,1 Ton Per Hektar Pertahun	6,5 Ton Per Hektar Pertahun

6.4.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB menekankan pada perwujudan masyarakat yang sehat. Pencapaian tujuan 3 TPB dilakukan melalui arah kebijakan berikut:

1. Memperluas jangkauan layanan kesehatan yang murah dan berkualitas kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat miskin dan rentan.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat.
3. Memperluas cakupan perlindungan sosial bidang kesehatan.

Untuk menjalankan upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan sembilan target, yang diturunkan ke dalam 17 indikator sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel VI.8. Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGS 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2024
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	
3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup									
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	%	76,67	21.87	19,21	21.87	19,21	76,43
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000									
3.2.1	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	%	7,95	0,88	0,86	0,88	0,86	0,08
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	%	3,43	0,88	0,86	0,88	0,86	5,18
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	%	0,73	0,88	0,86	0,88	0,86	0,80
S									
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinas Kesehatan	%	0,70	0,032	0,029	0,032	0,029	0,06
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	%	0,450	0,032	0,029	0,032	0,029	0,06

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2024
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	
3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan									
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Dinas Kesehatan	%	data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin	1,0	1,0	1,0	1,0	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	15,3	2,4	2,4	2,4	2,4	18,6
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan		1	1	1	1	1	
3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DP2KB	%	27,75	68,45	68,45	68,45	68,45	31,23
3.8 : mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan askes terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	100,11	100	100	100	100	99,1
3.a : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat									

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2024
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Kesehatan	%	16,67	19,59	19,36	19,59	19,36	0,36
3.b : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua									
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
3.c : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil									
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan		5,55	1,51	1,51	1,51	1,51	0,07

6.4.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 fokus pada penciptaan pendidikan yang berkualitas dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan merupakan pondasi untuk menciptakan kehidupan manusia yang sejahtera. Melalui pendidikan, transformasi kehidupan bisa terjadi, tidak hanya pada individu itu semata, tapi juga pada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Mengingat strategisnya peran pendidikan, pemerintah berkewajiban untuk memastikan seluruh warganya dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat tertentu. Pencapaian tujuan 4 TPB ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses layanan pendidikan formal kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Untuk menjalankan upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan tujuh target, yang diturunkan menjadi 13 indikator sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel VI.9. Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2024
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	
4.1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	79,93	85,00	89,50	85,00	89,50	86,47
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	%	65,33	77,50	80	77,50	80	72,5
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Dinas Pendidikan	%	105,51	100	100	100	100	93,09
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Dinas Pendidikan	%	90,85	100	100	100	100	86,32
4.1.1.(f)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan		11,55	12,2	12,4	12,2	12,4	11,57
4.2 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini,pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar									

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2024
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan	%	39,49	65.52	80,42	65.52	80,42	34,29
4.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dispora		520	150	150	150	150	520
4.5 : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan									
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan	%	SD/MI = 99,57 SMP/MTs = 105,30	100	100	100	100	SD/MI = 100,49 SMP/MTs = 105,50
4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi									

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2024
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin	Dinas Perpustakaan	%	74,14	65	70	65	70	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan	%	98,93	100	100	100	100	98,84
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Dinas Pendidikan	%	15-24 = 100	100	100	100	100	15-24=100
4.a : Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dangender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f)	Dinas Pendidikan	%	(a) listrik=100% (b) internet untuk tujuan pengajaran=98,14 %, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 73,93%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa	(a) listrik=97% (b) internet untuk tujuan pengajaran=92%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 35%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa	(a) listrik=97,5% (b) internet untuk tujuan pengajaran=92,5%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 40%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=4,5, (e) air minum	(a) listrik=97% (b) internet untuk tujuan pengajaran=92%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 35%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=4, (e) air minum layak=83%, (f) fasilitas sanitasi	(a) listrik=97,5% (b) internet untuk tujuan pengajaran=92,5%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 40%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=4,5, (e) air minum layak=83,5%, (f) fasilitas sanitasi	(a) listrik=100% (b) internet untuk tujuan pengajaran=98,14%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 73,93%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=8,6%, (e) air minum

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2024
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	
	fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)			disabilitas=8,6%, (e) air minum layak=100%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=93,27%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=100%	disabilitas=4, (e) air minum layak=83%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=70%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=25%	layak=83,5%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=75%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=30%	dasar per jenis kelamin=70%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=25%	dasar per jenis kelamin=75%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=30%	layak=100%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=93,27%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=100%
4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil									
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan	%	PAUD= 46,65% SD= 36,23% SMP= 42%	PAUD= 40.5% SD= 50% SMP= 48.73%	PAUD= 40.5% SD= 50% SMP= 48.73%	PAUD= 40.5% SD= 50% SMP= 48.73%	PAUD= 40.5% SD= 50% SMP= 48.73%	PAUD= 34,46% SD= 35,23% SMP= 41,33%

6.4.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender satu dari sekian banyak masalah pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Hasil pembangunan dan produk kebijakan dianggap oleh para aktivitas perempuan sebagai produk kaum laki-laki sehingga lebih banyak menguntungkan lak-laki dan mengabaikan hak-hak perempuan. Oleh karena itu mewujudkan tujuan SDGS kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan merupakan menjadi relevan dan penting bagi Kota Makassar. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan secara bertahap melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memberikan akses yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk menjangkau pendidikan formal atau non formal.
2. Meningkatkan keahlian/*skill* kelompok perempuan dalam memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mengambil peranan lebih luas dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
3. Memperluas edukasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama pada lingkup keluarga dengan menargetkan pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan (pra nikah) dan penduduk usia muda.
4. Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi sebagai pusat pengaduan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah Kota Makassar menetapkan 3 target pencapaian arah kebijakan, yang diturunkan menjadi 5 indikator sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel VI.10. Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
5.1 : mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun									
5.1.1	Jumlah Kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan	DP3A	%	98	95%	100%	95%	100%	100%
5.2 : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya									
5.2.1.a	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DP3A	%	98	100%	100%	100	100%	100%
5.2.2	Proporsi Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DP3A	%	98	100%	100%	100	100%	100%
5.2.2.a	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP3A	%	98	100%	100%	100	100%	100%
5.6 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.									

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
5.6.1	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DP2KB		9,06	68,45	68,45	68,45	68,45	5,25

6.4.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Sebagai kota metropolitan, Kota Makassar masih diperhadapkan dengan berbagai permasalah berkaitan dengan air bersih dan sanitasi layak. Sebagian penduduk, khususnya wilayah pinggiran kota masih kesulitan mengakses air bersih dan hidup di tengah kondisi sanitasi buruk. Agar semua penduduk dapat mengakses air bersih dan kondisi sanitasi layak, maka pemerintah Kota Makassar menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan yang merupakan tujuan ke enam SDGS. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pemerintah kota akan diarahkan;

1. Memperluas cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih (termasuk air minum).
2. Meningkatkan penyertaan modal kepada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM).
3. Membangun infrastruktur sanitasi yang memadai, terutama di kawasan yang masih berada dalam kategori kumuh.

Untuk menjalankan upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan Tiga target diturunkan menjadi 11 indikator sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel VI.11. Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
6.1 : Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
6.1.1 (a)	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak**	**Dinas PU**	**%**	83,49	**100**	**100**	**100**	**100**	**82,96**
		Dinas Kesehatan	**%**	77,07	**100**	**100**	**100**	**100**	**83,49**
6.1.1 (b)	**Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau**	**Dinas PU**	**%**	83,49	**100**	**100**	**100**	**100**	**82,96**
6.1.1 (c)	**Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan**	**Dinas PU**	**%**	83,49	**100**	**100**	**100**	**100**	**82,96**
6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1.(a)	**Proporsi Populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air**	**Dinas Kesehatan**	**%**	92,87	**100**	**100**	**100**	**100**	**81,62**
6.2.1 (b)	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak**	**Dinas PU**	**%**	94,24	**56,7**	**57,78**	**56,7**	**57,78**	**89,63**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
6.2.1.(c)	**Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**	**Dinas Kesehatan**	**%**	97,27	**100**	**100**	**100**	**100**	**92,24**
6.2.1 (e)	**Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal**	**Dinas PU**	**%**	94,24	**56,7**	**57,78**	**56,7**	**57,78**	**89,63**
6.2.1 (f)	**Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat**	**Dinas PU**	**%**	94,24	**56,7**	**57,78**	**56,7**	**57,78**	**89,63**
6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.1 (a)	**Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)**	**Dinas PU**	**%**	-	**56,7**	**57,78**	**56,7**	**57,78**	**-**
6.3.1 (b)	**Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja**	**Dinas PU**	**%**	66,25	**56,7**	**57,78**	**56,7**	**57,78**	**60,7**
6.3.2 (b)	**Kualitas air sungai sebagai sumber air baku**	**DLH**		51,74	**-**	**-**	**-**	**-**	**58,7**

6.4.7. Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya cenderung eksklusif karena hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok terkaya, sementara kelompok miskin. Eksklusifitas pertumbuhan Indonesia ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi impresif tapi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan juga semakin parah. Umumnya kondisi semacam ini terjadi di daerah yang aktivitas ekonomi lebih beragam seperti Kota Makassar. Di Kota Makassar sebagian masyarakat bekerja di jenis pekerjaan bergaji tinggi, sementara sebagian lagi bekerja di sektor informal yang upahnya bahkan jauh dibawah UMR. Dikotomi sektor ekonomi (bergaji tinggi dan bergaji rendah) semakin mempertajam kesenjangan pendapatan antara masyarakat, sehingga penting bagi pemerintah kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan tersebut diupayakan dengan arah kebijakan yaitu;

1. Membangun iklim investasi yang kondusif bagi investor yang berfokus pada tiga pilar utama yaitu Kondisi ekonomi makro (stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik), Kepemerintahan dan kelembagaan (kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil), dan Infrastruktur (sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air).
2. Mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
3. Meningkatkan daya saing UMKM dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, terutama pada aspek produksi dan pemasaran.
4. Mendorong kemitraan antara UMKM dengan usaha besar untuk menciptakan rantai nilai yang saling menguntungkan.
5. Membangun konektivitas antara keahlian yang diperoleh dari dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
6. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
7. Membantu usaha bidang pariwisata yang terdampak pandemi agar pulih dan menjalankan kembali kegiatan bisnis.
8. Memperluas akses pasar pariwisata dengan melakukan promosi dengan jangkauan pasar yang lebih luas (mancanegara).
9. Melakukan investasi untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia/tenaga kerja sektor pariwisata.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua diharapkan bisa mencapai sasaran yang ditentukan yang dijabarkan kedalam target tahunan selama tahun 2021 hingga 2016 yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel VI.12. Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGS 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	PTSP	%	330,24	100%	100%	100%	100%	68,81
8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif,penciptaan lapangan kerja layak,kewirausahaan,kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro,kecil dan menengah,termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan									
8.3.1	Persentase tenaga kerja formal	Disnaker	%	67,18	70,5	71	70,5	71	59,7
8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan	Dinas Koperasi &UKM	%	42	28.17%	30,41%	28.17%	30,41%	21
8.5 : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Disnaker	%	10,60	8,31	7,81	8,31	7,81	9,71
8.9 : Pada Tahun 2030, meyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal									
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata	%	2,14	1,36	1,41	1,36	1,41	2,16
8.9.1.(a)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	85,614	34.694	36.429	34.694	36.429	160.295
8.9.1.(b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata	Orang	4.414.466	2.069.040	2.275.944	2.069.040	2.275.944	5.684.295
		Dinas Kebudayaan	%	1800	100	100	100	100	1.1

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Pariwisata	Orang	6,165	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165

6.4.8. Tujuan 9, Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Sektor industri merupakan satu dari empat sektor yang menjadi kontributor tertinggi terhadap perekonomian Kota Makassar. Namun dua tahun terakhir, peranan industri tergantikan oleh sektor perdagangan, salah satu sebabnya karena inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha lebih lambat dibandingkan sektor perdagangan, sehingga nilai tambah perdagangan naik lebih tinggi dibandingkan industri. Untuk memastikan industrialisasi di Kota Makassar berjalan efektif dan menyerap tenaga kerja lebih besar maka dibutuhkan pembangunan Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Tujuan tersebut berupaya dicapai dengan arah kebijakan;

1. Meningkatkan nilai tambah industri pengolahan, terutama pada industri yang dianggap berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
2. Mendorong terciptanya diversifikasi industri.
3. Meningkatkan daya saing sektor industri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0.
4. Membangun industri hulu dan hilir beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang berbasis di Kota Makassar.
5. Mendorong sektor industri menerapkan standar industri hijau.
6. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor industri.

Diharapkan arah kebijakan yang sudah ditentukan bisa mencapai sasaran dengan target selama tahun 2021 hingga 2026 yang dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut;

Tabel VI.13. Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dishub		2	10	10	10	10	2
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.									
9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Balitbangda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.5.2.	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.	Balitbangda	%	100%	90%	90%	90%	90%	100%
9.b : Mendukung pengembangan teknologi domestic, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industry dan peningkatan nilai tambah komoditas									
9.b.1.	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah	Balitbangda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6.4.9. Tujuan 11, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 dari TPB fokus pada menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan 11 TPB dilakukan melalui arah kebijakan berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyediaan rumah layak huni serta kawasan permukiman.
2. Mewujudkan sistem transportasi yang terpadu dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat tangguh bencana, serta penguatan koordinasi lintas. sektor dalam pengurangan risiko dan penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penanganan sampah di wilayah perkotaan
5. Menyiapkan ruang publik dan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang aman dan terjangkau.

Untuk menjalankan upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan enam target, dimana tersebut kemudian diturunkan ke beberapa indikator-indikator sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel VI.14. Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 11, Membangun Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan	%	95	100	100	100	100	95
		Kec. Panakukkang	%	68	72	75	72	75	74,97
		Kec. Manggala	%	64	70	75	70	75	70
		Kec. Tallo	%	68	72	75	72	75	
		Kec. Biringkanaya	%	68	72	75	72	75	70
		Kec. Tamalanrea	%	65	72	75	72	75	
		Kec. Ujung Tanah	%	78	100	100	100	100	60
		Kec. Wajo	%	-	72	75	72	75	17,8
		Kec. Mariso	%	80	72	75	72	75	80
		Kec. Mamajang	%	-	72	75	72	75	
		Kec. Ujung Pandang	%	68	72	75	72	75	70
		Kec. Makassar	%	25	72	75	72	75	
		Kec. Bontoala	%	68	72	75	72	75	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
		Kec. Rappocini	%	65	72	75	72	75	65
		Kec. Tamalate	%	-	72	75	72	75	
		Kec. Sangkarrang	%	68	72	75	72	75	70
11.1.1.(b)	jumlah Kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	Dinas Pertanahan		85	75	75	75	75	
11.2 : Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.									
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dishub	%	4,3%	5%	5%	5%	5%	4,7
11.4 : Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia									
11.4.1 (a)	Jumlah Kota Pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	dinas kebudayaan	%	100	100	100	100	100	55
11.5 : Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak , dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB Global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	%	90,66	100	100	100	100	96,94
11.6 : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1 .(a)		Kec. Panakukkang	%	83	90	95	90	95	83

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Kec. Manggala	%	79	98	98	98	98	84
		Kec. Tallo	%	83	90	95	90	95	
		Kec. Biringkanaya	%	83	90	95	90	95	85
		Kec. Tamalanrea	%	80	90	95	90	95	
		Kec. Ujung Tanah	%	96	100	100	100	100	98
		Kec. Wajo	%	-	90	95	90	95	96,67
		Kec. Mariso	%	95	90	95	90	95	
		Kec. Mamajang	%	-	90	95	90	95	
		Kec. Ujung Pandang	%	83	90	95	90	95	85
		Kec. Makassar	%	77	90	95	90	95	
		Kec. Bontoala	%	83	90	95	90	95	
		Kec. Rappocini	%	92	90	95	90	95	
		Kec. Sangkarrang	%	83	90	95	90	95	
		Kec. Tamalate	%	95	99	100	99	100	95
		DLH	%	87,44	70	70	70	70	
11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
11.7.1 (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DLH	-	-	-	-	-	-	
11.7.1 (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas Tata ruang	%	13,85	15,926	16,618	15,926	16,618	13,92

6.4.10. Tujuan 12, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Konsumsi dan produksi merupakan kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan. Namun seringkali karena dorongan motif ekonomi yang terlalu ambisius, aspek lingkungan menjadi terabaikan. Untuk itu, TPB 12 fokus pada upaya untuk mengarahkan kegiatan konsumsi dan produksi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pencapaian TPB 12 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong pola hidup masyarakat yang peduli kelestarian lingkungan.
2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengolahan limbah.

Untuk menjalankan upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan tiga target, yang diturunkan menjadi tiga indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel VI.15. Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 12 Memastikan Pola Konsumsi dan Produksi Yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	DLH	ton	7.333,78 Ton	Limbah B3 = 9.690,62 Ton B3 = 1.690.624,0 0 Ton	Limbah B3 = 11.628,75 Ton B3 = 1.702.925,4 9 Ton	Limbah B3 = 9.690,62 Ton B3 = 1.690.624, 0 0 Ton	Limbah B3 = 11.628,75 Ton B3 = 1.702.925,4 9 Ton	
12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	ton	14.629,22	65.549	65.549	65.549	65.549	
12.b : Mengembangan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal									
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang telah disepakati	Dinas Pariwisata		1	1	1	1	1	1

6.4.11. Tujuan 13, Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 dari TPB terkait dengan perubahan iklim menekankan pada pengambilan tidak yang cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Pencapaian tersebut ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perubahan iklim
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kelembagaan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Untuk menjalankan upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan target yakni mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. Adapun target tersebut diturunkan ke dalam satu indikator sebagaimana pada tabel di bawah:

Tabel VI.16. Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 13 Mengambil Aksi Segera Untuk Memerangi Perubahan Iklim Dan Dampaknya

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
13.2 : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.									
13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	**DLH**		1	1	1	1	1	1

6.4.12. Tujuan 15, Ekosistem Daratan

Tujuan 15 dari TPB yaitu melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan. TPB ke 15 juga bertujuan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan penggurunan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan 1 target yang diturunkan kedalam 1 indikator sebagaimana pada tabel di bawah :

Tabel VI.17. Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 15 Memastikan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		TargetPencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline* Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
15.9 : Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.									
15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	**DLH**		2	2	2	2	2	2

6.4.13. Tujuan 16, Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Tujuan 16 dari TPB terkait dengan pembangunan hukum dan tata kelola yang menekankan pada penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Pencapaian tersebut ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengendalikan prevalensi kekerasan di masyarakat.
2. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan, perlakuan kejam, perdagangan, maupun penyiksaan.
3. Menjamin akses yang sama bagi seluruh masyarakat terhadap keadilan.
4. Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan publik terutama layanan yang bersifat dasar.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan.
6. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sistem.
7. Mewujudkan penegakan UU dan kebijakan yang tidak diskriminatif.

Untuk menjalankan upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan 8 target yang diturunkan ke dalam 12 indikator sebagaimana pada tabel di bawah:

Tabel VI. 18 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 16 Mendukung Masyarakat yang Damai dan Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Terhadap Keadilan Bagi Semua dan Membangun Institusi-Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Level

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baselin* Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									
16.2.3.a	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DP3A	%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
16.2.1.b	Prevalensi kekerasan terhadap anak lakilaki dan anak perempuan.	DP3A	%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua									
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	HUKUM & HAM	Perkara	5 Perkara	12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara	6 perkara
16.5 : Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat	Laporan	8 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	
16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1.(A)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baselin* Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
16.6.1. (D)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BKPSDMD	%	77,3	63	65	63	65	
16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Kesbangpol	%	-	-	-	-	-	-
16.9 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	Dukcapil	%	98,55	100	100	100	100	98,68
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Dukcapil	%	98,55	100	100	100	100	98,68
16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dukcapil	%	98,55	100	100	100	100	98,68
16.10 : Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	DISKOMINFO		800	800	800	800	800	
16.b : Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.									
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Satpol PP	%	100%	100%	100%	100%	100%	

6.4.14. Tujuan 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Fokus dari tujuan TPB 17 yakni menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Pencapaian tersebut ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Mendorong pemanfaatan teknologi dan informasi di sektor-sektor ekonomi.
3. Memperkuat kerjasama antara pemerintah dengan swasta, akademisi, badan usaha, organisasi masyarakat sosial dan filantropi dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Mewujudkan sistem pendataan/statistik yang terpadu dan terjangkau.

Untuk menjalankan upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan 2 target yang diturunkan kedalam 3 indikator sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel VI.19. Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 17, Menguatkan Ukuran Implementasi dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target
				(*Baseline*) Tahun 2023	2025	2026	2025	2026	2024
17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BAPENDA	Rp.	Rp4.049.344.772.471,05	Rp 4.905.416.386.289,00	Rp 5.361.403.327.326,00	Rp.4.905.416.386.289,00	Rp.5.361.403.327.326,00	Rp4.205.629.621.340,50
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BAPENDA	Rp.	Rp1.355.698.501.582,00	Rp 2.183.442.262.423,00	Rp 2.576.461.869.660,00	Rp 2.183.442.262.423,00	Rp 2.576.461.869.660,00	Rp1.401.378.637.369,17
17.5 : Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang									
17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang	PTSP		295 Investor PMA & 1568 Investor PMDN, US$ 44.110,69 Investasi PMA & Rp. 5.238.910.614.347 Investasi PMDN	870 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000	1020 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000	870 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000	1020 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000	90 Investor PMA & 280 Investor PMDN,Rp.1,8 Triliun dan US$ 28,4 Juta

BAB 7

Penutup

BAB VII
PENUTUP

VII.1.Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat didalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Makassar pada Tahun 2026. RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Dalam rangka penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2026, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Makassar untuk memfasilitasi dan mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Kota Makassar pada tahun 2026 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kota Makassar Tahun 2026 diimplementasikan dengan :

1. Memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025 – 2029;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan Kota Makassar dengan pendekatan berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026;
3. Mensinergikan sumber pendanaan yang dapat di kolaborasikan oleh Pemerintah Kota Makassar, antara lain, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Corporate Social Responbility (CSR), dana pinjaman dan hibah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Kota Makassar
4. Melibatkan para stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Kota Makassar dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan Kota Makassar.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2026 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kewenangan provinsi.

Penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-12317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan kondisi tersebut penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 memperhatikan:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 –2029.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029.

RKPD Kota Makassar Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2026, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2026 yang mengacu pada isu-isu strategis, program prioritas pembangunan nasional dan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya RKPD Kota Makassar Tahun 2026, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab yang wajib dilaksanakan Pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

VII.2.Kesimpulan

1. RKPD Kota Makassar Tahun 2026 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat yang dimulai dari tingkat kelurahan, Kecamatan dan Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran anggota DPRD serta pemangku pembangunan lainnya.
2. Dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Makassar Tahun 2026, RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
3. Untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2026 yaitu : ***"Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing"*** maka seluruh program dan kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk mengawal pencapaian tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan maka evaluasi dan analisis harus dilakukan sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. Mengingat sangat terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam rangka sinergitas RKPD Kota Makassar Tahun 2026 dengan prioritas-prioritas pembangunan nasional dan daerah maka pembiayaannya dapat ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Untuk mencapai Program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), beberapa sumber pendanaan berpotensi untuk disinergikan oleh pemerintah Kota Makassar sesuai pada peraturan perundangan-undangan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR) & Program Kemitraaan, Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
6. Dalam mendukung kelancaran pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah diperlukan kerja keras, komitmen, semangat, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku kepentingan pembangunan sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

LAMPIRAN

BAB 2

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
	1			URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR																		
	1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.335.954.001.416		1.853.026.272.772		1.305.072.854.819		1.054.564.201.042		80,81		2.907.590.473.814		87,16		
	1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	2.131.431.893.526	92,25	1.236.533.913.518	90	810.666.856.221	79,63	750.122.801.042	88,48	92,53	79,63	1.986.656.714.560	88,48	93,21	Dinas Pendidikan	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100		95,61		100		92,68		92,68		92,68		92,68			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		85,23		90		87,16		96,84		87,16		96,84			
	1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"	Orang	1200	1.203.747.563.190	2200	616.134.292.754	400	494.204.571.398	400	304.258.100.000	100,00	61,57	2600	920.392.392.754	216,67	76,46		
					Angka harapan lama sekolah	%	16,36		15,61		16,36		15,62		95,48		15,62		95,48			
					Angka rata-rata lama sekolah	%	12		11,56		12		11,57		96,42		11,57		96,42			
					Angka partisipasi murni (PAUD, SD dan SMP)	%	46,33		37,70%		46,33		32,23		69,57		32,23		69,57			
						%	100		98,06%		100		85,36		85,36		85,36		85,36			
						%	100		79,51%		100		73,99		73,99		73,99		73,99			
					Angka partisipasi kasar (PAUD, SD dan SMP	%	50,91		39,49%		50,91		34,29		67,35		34,29		67,35			
						%	100		105,51%		100		93,09		93,09		93,09		93,09			
						%	100		90,85%		100		86,32		86,32		86,32		86,32			
					Persentase sarana dan prasarana pendidikan (PAUD, SD, SMP) Dalam kondisi baik	%	76		75,03%		76		76,07		100,09		76,07		100,09			
						%	76		75,97%		76		77,14		101,50		77,14		101,50			
						%	91		92,28%		91		92,48		101,63		92,48		101,63			
					Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan (A,B,C)	%	92,26		96,99%		92,26		95,85		103,89		95,85		103,89			
	1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kebutuhan Kurikulum Yang Dikembangkan	%	75	323.905.400	50	129.082.000	75	90.698.400	66,67	86.500.000	88,89	95,37	66,67	215.582.000	88,89	66,56		
	1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru-Murid (PAUD,SD,SMP)	Guru/Murid	1:19	282.110.000	01:15	164.784.500	1:19	92.704.000	1:15	84.000.000	126,67	90,61	1:15	248.784.500	126,67	88,19		
						Guru/Murid	1:33		01:19		1:33		1:19		173,68		1:19		173,68			
						Guru/Murid	1:33		01:18		1:33		1:18		183,33		1:18		183,33			
					Persentase Guru yang Bersertifikasi (PAUD, SD, SMP)	%	38,49		46,65%		38,49		34,46		89,53		34,46		89,53			
						%	45,83		36,23%		45,83		35,23		76,87		35,23		76,87			
						%	47,03		42%		47,03		41,33		87,88		41,33		87,88			
	1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan yang diawasi Perizinannya	%	30,31	168.529.300	36,38	64.200.000	30,31	18.024.800	36,38	12.800.000	120,03	71,01	36,38	77.000.000	120,03	45,69		
	1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp 1.016.771.116.398		Rp 527.559.921.589		Rp 635.216.964.354		Rp 538.765.875.854		84,82		Rp 1.066.325.797.443		104,87		
	1	02	01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	Rp 323.999.815.225	87,09	Rp 158.960.886.842	90	Rp 174.347.202.276	90	Rp 162.788.293.312	100	93,37017812	88,545	Rp 321.749.180.154	98,38	99,31		
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		99,99		99,99		99,995		100,00			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		100		90		100		111,111		100		111,11			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
					Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100		100		100		100		100		100		100			
					Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		100			
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100		100		100		100		100		100		100			
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		100			
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		101,57		101,57		100,785		100,785			
					Persentase orang usia 15-29 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		100			
1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Rp 641.988.003.578	100	Rp 356.492.232.538,00	100	Rp 445.911.714.878,00	82,88	Rp 364.111.954.248,00	82,88	81,66	91,44	Rp 720.604.186.786	91,44	112,25		
					Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		93,61		93,61		96,805		96,81		Dinas Kesehatan	
					Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		83,56		83,56		91,78		91,78			
					Persentase Orang Dengan Ganguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		100		100		122,03		122,03		111,015		111,02			
					Persentase orang dengan resiko Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	%	100		100		100		126,14		126,14		113,07		113,07			
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		100			
					Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	95		100,11		96		99,10		103,23		99,605		104,85			
1	02	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Mendapat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	%	100	Rp 2.777.540.700	100	Rp 1.764.993.710	95	Rp 2.464.376.100	100	Rp 1.078.234.690	105,2631579	43,75	100	Rp 2.843.228.400	100	102,36		
1	02	04		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Farmasi Pada RSUD Dan Puskesmas	%	100	Rp 6.934.216.695	93,76	Rp 1.273.678.472	100	Rp 397.582.300	93,14	Rp 295.784.240	93,14	74,40	93,45	Rp 1.569.462.712	93,45	22,63		
					Persentase Ketersediaan Kebutuhan Alat Kesehatan Pada RSUD	%	68		55,43		64		78,095		122,02		66,7625		98,18			
1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Bayi Mendapat Asi Eksklusif	%	65	Rp 41.071.540.200	70,02	Rp 9.068.130.027	65	Rp 12.096.088.800	78,81	Rp 10.491.609.364	121,2461538	86,74	74,415	Rp 19.559.739.391	114,48	47,62		
					Persentase Posyandu Aktif	%	100		100		100		78,81		78,81		89,405		89,405			
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				4.900.372.080.000		685.573.283.053		733.453.694.773		527.839.066.998		71,97		1.213.412.350.051		24,76		
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90		86,85		90		90		100,00		176,85		196,50			
1	3	1		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100	314.784.834.000	100	50.346.000.413	100	69.485.577.851	100	54.594.110.595	100	78,57	200	104.940.111.008	200,00	33,34		
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		82,8		90		90,00		100		172,8		192,00			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
3	1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota	%	100	79.532.495.000	49,41	1.956.043.472	83,29	2.505.386.199	89,15	2.289.949.728	107,04	91,40	138,56	4.245.993.200	138,56	5,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi Erosi Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota	%	98,87		0		97,37		54,45		55,9207148		54,45		55,07231718			
	1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota	%	100	124.711.782.000	50,64	13.141.594.732	100	20.371.402.900	74,56	18.736.250.159	74,56	91,97	125,2	31.877.844.891	125,2	25,56		
	1	3	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100	93.120.920.000	87,73	8.089.818.684	100	19.285.026.700	89,63	15.179.976.908	89,63	78,71	177,36	23.269.795.592	177,36	24,99		
	1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	97	496.160.545.000	175,26	98.800.547.345	89,45	74.387.910.242	69,08	68.003.463.968	77,23	91,42	244,34	166.804.011.313	251,90	33,62		
					Persentase Titik Genangan Yang Dikurangi	%	100		46,66		84,12		37,73		44,85		84,39		84,39			
	1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Kebutuhan Gedung Pemerintah Yang Terbangun	%	89	1.575.324.158.000	75,88	152.397.632.254	58,37	167.285.051.839	45,03	126.420.055.177	77,15	75,57	120,91	278.817.687.431	135,85	17,70		
				Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan lingkungannya yang tertata	%	4,06	496.160.545.000	0,15	86.159.500	1,02	192.634.500	0,15	86.159.500	14,71	44,73	0,3	172.319.000	7,39	0,03		
	1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota		96,01	1.712.446.930.000	133,2	359.068.834.627	92,01	378.506.635.642	64,82	241.675.970.196	70,45	63,85	198,02	600.744.804.823	206,25	35,08		
					Persentase Panjang Trotoar terhadap Panjang Jalan	%	7		0		4,57		2,52		55,14223195		2,52		36,00			
	1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		37,44	8.129.871.000	71,23	1.686.652.026	25,44	1.434.068.900	71,23	853.130.767	279,99	59,49	142,46	2.539.782.793	380,50	31,24		
	1	**4**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**78.699.977.000**		**75.860.360.938**		**31.447.264.987**		**29.297.309.035**		**93,16**		**105.157.669.973**		**133,62**		
5	1	4	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	61.255.078.000	90	11.633.378.500	90	13.797.054.942	90	12.870.343.611	100	93	180	24.503.722.111	200	40	Dinas Perumahan dan Kawasan pertanahan	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		200		200			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		90		100		180		200			
	1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	11.267.750.000	100	16.783.235.600	100	2.947.532.180	71,93	2.639.143.991	71,93	90	172	19.422.379.591	172	172		
					Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	%	100		100		100		71,93		71,93		172		172			
	1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Permukiman Yang Tertata	%	100	1.404.204.000	40	39.454.394.500	60,00	11.335.564.645	91,78	11.044.650.824	153	97	132	50.499.045.324	132	3596		
	1	4	4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kota Makassar Yang Ditangani	%	100	1.206.345.000	100	2.040.099.900	60,00	614.384.300	86,78	555.604.642	144,63	90	187	2.595.704.542	187	215		
	1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	%	46,09	3.566.600.000	100	5.949.252.438	43,53	2.752.728.920	34,65	2.187.565.967	80	79	135	8.136.818.405	292	228		

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
	1	05		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**44.001.628.706**		**18.015.970.601**		**18.929.563.510**		**16.914.813.459**		**89,36**		**34.930.784.060**		**79,39**		
1	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100	43.957.850.899	100	8.082.325.551	100	9.601.384.810	100	8.019.419.159	100	83,52	200	16.101.744.710	200	36,63	BPBD	
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	100		100		100		100		100		200		200			
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100		200		200			
2	1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100		94,00		100		100		100		194,00		194			
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100		100,00		100		100		100		200,00		200			
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		90		100		100		100		190		190			
	1	**5**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**224.398.990.000**		**45.102.053.173**		**43.931.874.000**		**65.522.832.500**		**149,15**		**110.624.885.673**		**49,30**		
8	1	5	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	120.699.164.000	90	16.462.672.308	90	23.629.966.000	90	18.660.289.644	100	78,97	100	35.122.961.952	111,11	29,09959008	Dinas Pemadam Kebakaran	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		100		100			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		90		100		100		111,11			
	1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	103.699.826.000	100	28.639.380.865	100	20.301.908.000	100	46.862.542.856	100	230,82827	100	75.501.923.721	100	72,8081489		
					Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15		15		15		15		15		15		15			
	1	**5**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**203.676.885.000**		**34.220.923.954**		**41.087.471.428**		**37.555.602.947**		**91,40%**		**71.776.526.901**		**35,24%**		
6	1	5	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90%	65.765.841.000	100%	9.430.702.482	90%	10.442.217.328	98,32%	9.011.731.249	109%	86,30%	198%	18.442.433.731	220%	28%	Satuan Polisi Pamong Praja	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100%		100%		100%		96,15%		96%		196%		196%			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90%		96%		90%		100%		111%		196%		218%			
	1	5	2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100%	137.911.044.000	100%	24.790.221.472	100%	30.645.254.100	100%	28.543.871.698	100%	93,14%	200%	53.334.093.170	200%	39%		
					Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	%	100%		100%		100%		90%		90%		190%		190%			
					Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	%	100%		100%		100%		100%		100%		200%		200%			
	1	**6**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**98.660.110.000**		**18.287.779.143**		**20.153.557.228**		**17.306.071.008**		**85,87%**		**35.593.850.151**		**3607,72%**		
	1	6	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	54.125.031.000	66,48	8.334.643.180	90	10.442.217.328	86,67	9.011.731.249	96%	86,30%	153,15	17.346.374.429	1,70	32%		
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		90,46		100		92,5		93%		182,96		1,83			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		68,15		90		87,5		97%		155,65		1,73			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
9	1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	%	75	7.631.504.000	93,27	668.859.446	70	2.365.005.650	99,84	2.051.314.180	143%	86,74%	193,11	2.720.173.626	2,57	36%	Dinas Sosial	
	1	6	3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	18.692.491.000	100	4.635.356.401	100	3.457.364.150	100	3.146.915.910	100%	91,02%	200	7.782.272.311	2,00	41,63%		
					Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100		100		100		100		100%		200		2,00			
					Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100		100		100		100		100%		200		2,00			
					Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	%	100		100		100		100		100%		200		2,00			
	1	6	5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Perentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	%	100	9.408.745.000	79,19	2.363.293.275	100	2.134.149.900	97,72	1.727.941.594	98%	80,97%	176,91	4.091.234.869	1,77	43%		
	1	6	6	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	%	100	6.229.267.000	100	1.628.768.991	100	1.256.927.000	100	915.898.675	100%	72,87%	200	2.544.667.666	2,00	41%		
	1	6	7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	%	100	2.573.072.000	100	656.857.850	100	497.893.200	100	452.269.400	100%	90,84%	200	1.109.127.250	2,00	43%		
	2			**URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR**																			
	2	**8**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**100**	**67.877.495.000**	**100**	**13.526.125.079**	**100**	**13.287.224.268**	**95**	**12.563.315.249**	**95%**	**94,55**	**100,95**	**26.089.440.328**	**100,95%**	**38,44**		
11	2	8	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	37.565.451.000	90	4.777.287.128	90	6.226.664.648	90	5.783.360.020	100%	93	97	10.560.647.148	97%	28	DP3A	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100%		100		100%			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		90		100%		100		100%			
	2	8	2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	85	17.438.049.000	50	911.703.000	70	1.038.740.400	66	978.748.900	94,29	94,22	116	1.890.451.900	110,92%	10,84%		
	2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan-termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan		77,79	6.564.476.000	81,44	2.198.989.972	81,18	1.740.631.200	81,18	1.690.109.000	100,00%	97,10	162,62	3.889.098.972	1,29%	59,24		
	2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	%	100	3.718.017.000	44,29	631.724.606	64,16	551.520.400	63,15	523.612.800	98,43	94,94	67,62%	1.155.337.406	67,62%	31,07%		
	2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data indikator Pengarusutamaan Gender yang tersedia	%	91.57	1.377.490.000	85,57	167.293.800	87,57	131.604.800	87,57	128.750.000	100	98%	100	296.043.800	100	21,49%		
					Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia	%	95		94,51		94,53		94,53		100		100		100,00			
					Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia	%	83.96		79,02		83,02		83,02		100		100		100			
	2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kelurahan Ramah Anak	%	100	607.006.000	39,87	1.472.017.290	69,93	992.606.900	69,93	985.104.000	100,00	97,83	91,99	2.457.121.290	91,99	404,79%		
	2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	98,05	607.006.000	97,84	3.367.109.283	97,84	2.605.455.920	97,84	2.473.630.529	100,00%	94,94%	99,48	5.840.739.812	100,00%	962,22%		
	2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**63.192.626.000**		**23.683.150.071**		**11.653.504.767**		**8.426.049.061**		**72,30**		**32.109.199.132**		**50,81**		
	2	10	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	34.320.272.000	85	15.873.942.660	90	8.624.877.417	90	6.653.368.879	100	70,77	100	22.527.311.539	100	65,64		
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		80		100		100		100		100		100			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		85		90		90		100		100		100			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
13	2	10	2	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan	%	100	108.006.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanahan	
	2	10	4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	100	554.554.000	100	106.162.000	100	118.218.150	60	65.245.000	60	55,19	100	171.407.000	100	31		
	2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	%	100	1.221.990.000	100	452.033.000	25	155.911.700	20	95.960.500	80	61,55	100	547.993.500	100	45		
	2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Aset Tanah Pemerintah Kota Yang Disertifikatkan	%	72	26.987.804.000	40	7.251.012.411	56	2.754.497.500	35	1.611.474.682	62,5	58,50	75	8.862.487.093	104,17	33		
					Persentase Tanah Pemerintah Kota Yang Diamankan	%	82		40		64		35		54,69		75		91,46			
	2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**638.174.483.000**		**286.422.529.680**		**124.939.070.999**		**67.956.228.627**				**354.378.758.307**		**55,53**		
14	2	11	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	141.289.137.000	90	18.920.400.743	90	27.660.983.000	90	19.931.670.346	100	72,06	180	38.852.071.089	200	27,50	Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		200		200			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		90		100		180		200			
	2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen RPPLH Kota Makassar		ADA	2.237.501.000	0	701.194.642	ada	438.048.000	0	887.904.594	18	202,70	0	1.589.099.236	ada	71,02		
					Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota Makassar		ADA		0		ada		0		ada		0		ada			
	2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Dan Indeks Kualitas Udara		60,1	9.848.100.000	51,74	1.658.433.518	59,1	1.928.019.000	58,7	3.027.579.953	99,32318105	157,03	110,44	4.686.013.471	183,7603993	47,58		
							80,22		79,44		79,22		81,51		102,8906842		160,95		200,6357517			
	2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan		22,79	286.060.122.000	26,97	21.743.474.844	21,79	56.003.627.999	26,97	18.541.315.159	123,7723726	33,11	53,94	40.284.790.003	236,6827556	14		
	2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Yang Ditangani	%	0,68	4.087.646.000	0,045	610.871.470	0,49	800.262.000	0,045	532.007.880	9,183673469	66,48	0,09	1.142.879.350	13,23529412	28		
	2	11	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Makassar		23	6.424.054.000	45,28	649.757.847	21,5	1.257.674.000	45,28	358.229.309	210,6046512	28,48	90,56	1.007.987.156	393,7391304	16		
	2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat		33	2.492.016.000	6 kali	830.424.000	6 kali	487.876.000	6 kali	596.805.255	ada	122,33	#VALUE!	1.427.229.255	ada	57		
					Terlaksananya pemberian penghargaan kepada masyarakat		ADA		1 kali		ada		1 kali		ada		#VALUE!		ada			
	2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Makassar, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Kota Makassar		100	1.993.972.000	100	215.653.986.308	100	390.371.000	100	3.029.734.175	100	776,12	200	218.683.720.483	200	10.967		

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
	2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Makassar		100	183.741.935.000	87,44	25.653.986.308	99	35.972.210.000	76,7	21.050.981.956	77,47474747	58,52	164,14	46.704.968.264	164,14	25		
					Persentase Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R	%	30		3,89		28		2,09		7,464285714		5,98		19,93333333			
				URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**98.085.775.000**		**49.201.608.584**		**18.939.882.483**										
1	2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	90	70.527.139.000	46	32.353.447.168	90	14.364.702.233	72	13.626.417.088	80	94,86	118	45.979.864.256	131	65,19	DUKCAPIL	
					Persentase kesediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	Persen	100		60		100		80		80		140		140			
					Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Persen	90		46		90		72		80		118		131			
2	2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Mewmiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	100	22.697.943.000	60,00	10.793.056.685	75	3.549.176.150	80	3.326.574.600	107	93,73	140	14.119.631.285	140	62,21		
					Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	100		60,00		100,0		80		80		140		140			
3	2	12	3	Program pencatatan sipil	Cakupan penerbitan akte kelahiran		100	3.165.338.000	60,00	4.936.546.803	100,0	751.117.300	80	676.509.100	80,00		140	5.613.055.903	140	177,33		
					Rasio pasangan berakte nikah		60		20,00		50,0		45		90,00		65		108			
4	2	12	4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		100	1.591.810.000	60,00	965.267.428	50,0	185.664.900	30	161.864.500	60,00		90	1.127.131.928	90	71		
5	2	12	5	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase profil kependudukan yang dikelola		100	103.545.000	60,00	153.290.500	100,0	89.221.900	80	88.148.600	80,00		140	241.439.100	140	233		
				URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA				**121.406.810.000**		**0**		**37.288.580.625**		**33.252.089.147**		**89,17**		**33.252.089.147**		**27,39**		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	60.869.730.000	100		100	12.521.206.875	95	11.361.728.937	95	90,74	95	11.361.728.937	95	18,67	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Persen	90		90		90		90		100		100		111,11			
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	90		90		90		90		100		100		111,11			
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase SKPD yang menyusun dan memanfaatkan rancang induk pengendalian penduduk	Persen	50,98	2.242.452.000	66,67		45,09	1.559.157.200	66,64	1.439.663.900	147,7933023	92,34	133,31	1.439.663.900	261,49	64,20		
					Jumlah rata-rata anak perkleluarga	Persen	2		2,00		2,0		1,41		141,84		3,41		170,50			
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Rasio Akseptor KB	Persen	68,45	53.096.017.000	68,46		68,35	16.855.235.550	70,2	14.225.873.810	103	84,40	20	14.225.873.810	29,22	26,79		
					Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	51,48		32,59		68,35		70,2									
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	Persen	78,54	5.198.611.000	40,54		77,14	6.352.981.000	59,57	6.224.822.500	77	97,98	100,11	6.224.822.500	127,46	119,74		
					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB	Persen	74,60		22,74		73,4		34,01		46		56,75		76,07			
					Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB	Persen	65,27		10,61		64,07		14		22		24,61		37,70			
					Cakupan pasangan usia subur (PUS) peserta KB anggota usaha peningkatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	38,49		22,7		38,41		37,22		97		59,92		155,68			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
				URUSAN PERHUBUNGAN				**657.942.808.000**		**172.278.151.907**		**128.057.157.129**		**113.627.099.006**				**285.905.250.913**		**43,45**		
			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	118.036.662.000	90	33.406.853.398	90	16.516.947.129	90	14.235.585.141	100	86,19	90	47.642.438.539	100,00	40,36	DINAS PERHUBUNGAN	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100,00			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		90		100		90		100,00			
			2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	%	100	533.819.304.000	75	131.755.433.879	40	104.508.860.000	35	93.222.434.366	0,88	89,20	35	224.977.868.245	35,00	42,14		
					Kinerja Lalu Lintas Kota	%	0,3-0,2		0,44		0.45-0,35		0,40		0,89		0,40		0,40			
			3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Orang yang melalui Dermaga Pertahun	Orang	285	6.086.842.000	144.852	7.115.864.630	55.000	7.031.350.000	68.726	6.169.079.499	124,96	87,74	213.578	13.284.944.129	74939,65	218,26		
					Jumlah Barang Yang Melalui Dermaga Pertahun	Ton	23.679.510		7.500.000		4.735.902		3.102.940		65,52		10.602.940		44,78			
				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**248.188.008.000**		**108.183.936.948**		**148.284.559.839**		**136.428.581.365**		**92,00**		**244.612.518.313**		**98,56**		
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	73.170.390.000	95,11%	17.259.605.960	90%	12.125.258.234	100	8.859.236.821	111	73	100	26.118.842.781	111,11	35,70	DISKOMINFO	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100		100%		100%		100		100		100		100,00			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		98,81%		90%		90		100		90		100,00			
				Program Informasi dan Komunikasi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. Mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Kota Makassar	%	85,5	49.255.556.000	100%	57.307.758.993	80%	35.507.652.050	100%	34.241.025.833	125	96	100	91.548.784.826	116,96	185,86		
					Persentase Peningkatan pengunjung per tahun pada website Pemerintah Kota Makassar	%	100		100%		70%		100%		142,86		100		100,00			
					Persentase Peningkatan data per tahun yang terupdate pada open data Pemerintah Kota Makassar	%	100		-		40%		-		0,00		0		0,00			
				Program Aplikasi Informatika	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	120.971.180.000	100%	31.593.740.976	100%	99.042.130.015	100%	91.940.096.711	100	92,83	100	123.533.837.687	100,00	102,12		
					Persentase layanan publik yang disenggalarakan secara online dan terintegrasi	%	100		32%		49,31%		41%		83,15		41		41			
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan	%	100	2.593.453.000	94,92	940.353.840	78,43	1.005.657.300	76,00	950.944.400	96,90	94,56	76,00	1.891.298.240	76	72,93		
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100		98,55		78,43		76,00		96,90		76,00		76			
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	%	57,95	2.197.429.000	30	1.082.477.179	46,59	603.862.240	80%	437.277.600	171,71	72	80	1.519.754.779	138,05	69,16		
					Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	100		100		100%		100%		100		100		100			
	2	18		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**Rp80.359.854.000,00**		**Rp15.216.100.090,00**		**Rp26.931.482.347,00**										
	2	18	01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90%	Rp68.540.512.000,00	90%	Rp9.967.289.876,00	90%	Rp21.923.843.897,00	92%	Rp20.235.482.034,00	102,56	92,30	182,30%	Rp30.202.771.910,00	202,56	44,07		
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100%		100%		100%		92%		92,00		192,00%		192,00			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90%		90%		90%		92%		102,22		182,00%		202,22			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
	2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi Di Kota Makassar	%	100%	Rp989.121.000,00	90%	Rp359.269.650,00	100%	Rp555.355.000,00	90,00%	Rp456.397.925,00	90,00	82,18	180,00%	Rp815.667.575,00	180,00	82,46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor PMDN	340	Rp2.119.517.000,00	1568	Rp1.345.981.135,00	280	Rp1.332.375.750,00	11337	Rp916.755.762,00	4048,93	68,81	12905,00	Rp2.262.736.897,00	3795,59	106,76		
						investor PMA	120		295		90		1103,00		1225,56		1398,00		1165,00			
					Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp	2.600.000.000.000		Rp5.238.910.600.000		Rp2.100.000.000.000		Rp3.286.368.281.251		156,49		8.525.278.881.251,00		327,90			
						US$	$99.000.000,00		$44.110.690,00		$82.000.000,00		$36.104.195,00		44,03		80.214.885,00		81,03			
	2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan	100	100%	Rp3.761.466.000,00	93%	Rp2.255.998.325,00	100%	Rp1.816.274.700,00	77,40%	Rp1.498.753.100,00	77,40	82,52	170,47%	Rp3.754.751.425,00	170,47	99,82		
	2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/Penurunan Nilai Relaisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Triliun	2.600.000.000.000	Rp4.222.770.000,00	1.947.548.911.387,00	Rp761.827.850,00	Rp2.100.000.000.000,00	Rp763.476.200,00	2.327.505.571.251,00	Rp725.215.350,00	110,83	94,99	4.275.054.482.638,00	Rp1.487.043.200,00	164,43	35,21		
	2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	Rp726.468.000,00	97%	Rp525.733.254,00	100%	Rp540.156.800,00	97%	Rp525.733.254,00	97,33	97,33	194,66%	Rp1.051.466.508,00	194,66	144,74		
	URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN							**22.779.377.155**		**17.586.832.830**		**18.573.340.539**		**15.086.017.871**		**81,22404174**		**32.672.850.701**		**143,4317123**		
	2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	100	13.527.745.153	85	6.789.988.819	90	7.266.471.454	89,98	6.755.382.932	99.98	7266471454,00	**174,98**	13.545.371.751	**174,98**	122,64		
					persentase ketersediaan Laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100,00		200,00		200,00			
					persentase saran dan prasaran aparatur dalam kondisi baik	%	100		85		90		88.31		98.12		173,31		173,31			
	2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang di lestarikan	%	100	3.983.960.899	45.8	**10.126.979.655**	51.11	**5.624.990.400**	100	**5.318.368.389**	94,55	**5.624.990.400**	100,00	15.445.348.044	145.34	518.31		
	2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah penyelenggaraan festival budaya	%	10	502.029.641	100	**2.483.018.873,00**	100	**206.817.300**	100	**205.111.115**	100,00	**206.817.300**	3.00	2.688.129.988	100.00	384,08		
	2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	100	1.020.036.994	86.38	**3.227.108.363**	63	1.289.822.000	63.0	971.970.540	100,00	1.289.822.000	102.0	4.199.078.903	161.90	497.82		
	2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	1.090.594.840	100	**3.621.199.639**	59	2.134.017.940	74.0	2.012.318.858	125.42	2.134.017.940	74.0	5.633.518.497	125.21	690.60		
	2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Koleksi Museum Kota Makassar yang terawat dengan baik	%	100	2.655.009.628	1.837	3.948.536.009	5.200	2.051.221.445	59.303	1.835.184.895	59303,00	2051221445,00	1921.5	5.783.720.904	2.273.96	291.2392821		
					Persentase Kenaikan Jumlah Pengunjung Museum Kota makassar	%	20.000		20.97		84.5		84.5		100,00		59319,00		1.140.75			
	URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN							**14.409.851.050**		**5.970.704.634**		**10.893.427.050**		**8.727.919.575**		**80,12**		**14.698.624.209**		**102,00**		
	2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90	6.202.494.550	85,42	4.949.069.274	90	6.504.494.550	90	6.254.841.100	100	96,16	175	11.203.910.374	175	180,6		
					Persentase ketersediaan Laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		200		200			
					Persentase saran dan prasaran aparatur dalam kondisi baik	%	90		96,67		90		90		100		187		187			
	2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Angka Budaya Baca Kota Makassar	%	70	3.919.696.500	74,14	607.009.360	60	3.769.696.500	78,99	1.947.201.675	132	51,65	134	2.554.211.035	74,14	65,2	DINAS PERPUSTAKAAN	
					Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	Orang/Tahun	580.000		645.900		540.000		660.994		122		1.185.900		645.990			
					Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	Judul	33.712		26.975		29.212		116.111		397		56.187		114.881			
					Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	Pustakawan	32		17		22		20		91		39		9			
					Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	Tenaga Teknis	50		17		144		0		0		161		9			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
1	2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan	Judul	707	4.287.660.000	704	414.626.000	706	619.236.000	704	525.876.800	705	84,92	705	3.031.278.765	705	70,7		
				URUSAN BIDANG KEARSIPAN				**47.748.269.600**		**5.795.706.400**		**7.626.903.928**		**6.235.762.019**		**81,76**		**12.031.468.419**		**25,20**		
1	2	24	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	41.639.565.800	100	4.671.832.467	100	6.199.808.328	100	5.001.128.233	100	80,67	100	9.672.960.700	100	23,23	DINAS KEARSIPAN	
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Persen	90		14.29		90		90		100		100		111,11			
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	90		88,89		90		90		100		100		111,11			
2	2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	100	2.267.174.000	70,59	424.449.428	80,39	656.033.600	80,39	536.087.360	100	81,72	150,98	960.536.788	150,98	42,37		
					Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	94		79,20		84,3		91,79		108,88		170,99		181,90			
					Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	71		10		10		10		100		20		28,17			
3	2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Box	1191	2.875.483.800	1170	617.711.745	1171	766.710.900	1171	697.843.926	100	91,02	20	1.315.555.671	1,68	45,75		
4	2	24	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Persen	100	966.046.000	100	81.712.760	100	4.351.100	100	702.500	100	16,15	200	82.415.260	200,00	8,53		
	2			**URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR**																			
	3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**152.978.776.495,00**		**66.153.642.174,00**		**50.169.231.344,00**		**40.197.086.495,00**		**80,12**		**106.350.728.669,00**		**69,52**		
	3	26	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	63.584.676.000,00	90	11.356.112.579,00	90	15.762.688.594,00	89,41	12.746.270.056,00	99,34	80,86	179,41	24.102.382.635,00	199,34	37,91	Dinas Pariwisata	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		200		200,00			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		80		88,89		170		188,89			
	3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat Hunian Akomodasi	%	60	46.327.963.000,00	55,59	20.211.798.862,00	51	9.223.253.000,00	56,64	9.396.292.493	111,06	101,88	112,23	29.608.091.355,00	187,05	63,91		
					Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional	Destinasi	5		1		1		1		100		2		40,00			
	3	26	3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	%	10	26.646.495,00	27,4	13.550.211.020,00	8	9.542.483.900,00	25,13	10.482.454.095,00	314,13	109,85	52,53	24.032.665.115,00	525,30	901,91		
					Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	%	5		19,93		4		11,66		291,5		31,59		631,80			
	3	26	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PAD Sektor Ekonomi Kreatif	%	18,78	29.458.957.000,00	15,21	15.191.213.970,00	15,57	10.609.782.700,00	16,44	2.671.140.600,00	105,59	25,18	31,65	17.862.354.570,00	168,53	60,63		
	3	26	5		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI	Orang	200		78		125		113		90,4		191		95,50			
	3	26	6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Palatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata	Orang	950	13.580.534.000,00	1398	5.844.305.743,00	850	5.031.023.150,00	1745	4.900.929.251,00	205,29	97,41	3143	10.745.234.994,00	330,84	79,12		
					Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi	%	6,4		91,36		10		22,27		222,70		113,63		1775,47			
					Persentase Sdm Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	%	10		10,15		6,4		4,95		77,34		15,1		151,00			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
	4			URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
	4	1		URUSAN SEKRETARIAT DAERAH				916.262.987.000		430.538.672.500		304.159.441.186		309.615.457.806		101,79		740.154.130.306		80,78		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan pelayanan yang difasilitasi dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah		100	703.051.890.000	100	332.970.658.900	100	204.738.607.332	84,62	235.236.686.387	84,62	114,8961056	184,62	568.207.345.287	184,62	80,8201149	SEKRETARIAT DAERAH	
					Persentase Pengelolaan BMD dan Aset Lainnya yang mendukung Produktivitas Sekretariat Daerah.	%	100		100		100		98,61		98,61		198,61		198,61			
					Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		100		85,18		85,18		185,18		185,18			
					Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	%	70		70		70		89,59		127,9857143		159,59		227,9857143			
					Persentase penataan organisasi dan ketatalaksanaan	%	100		100		100		100		100		200		200			
					Cakupan pelayanan kedinasan Pimpinan		100		100		100		95,35		95,35		195,35		195,35			
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan		100	158.144.104.000	100	84.002.609.500	100	80.089.996.900	100	62.077.867.910	100	77,51013898	200	146.080.477.410	200	92,37175065		
					Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		100		100		100		100			
					Cakupan Produk Hukum Daerah		100		100		100		48		48		148		148			
					Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Direalisasikan	%	100		100		100		214,77		214,77		314,77		314,77			
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama	%	20	55.066.993.000	20	13.565.404.100	20	19.330.836.954	15	12.300.903.509	75	63,63357954	35	25.866.307.609	175	46,97243521		
					Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	100		100		100		100		100		200		200			
					Persentase Perusahaan Daerah Yang Berkinerja Baik	%	100		100		100		50		50		150		150			
					Persentase Penyerapan realisasi anggaran melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA)	%	100		100		100		61,75		61,75		161,75		161,75			
	4	1		SEKRETARIAT DPRD				508.768.579.126		175.506.381.878		211.832.538.327		178.295.184.068		84,17		353.801.565.946		75,46		
	4	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	378.295.868.087	90	129.115.280.891	95	153.722.925.427	87,72	134.852.283.725	92,34	87,72	177,72	263.967.564.616	177,72	69,78	SEKRETARIAT DPRD	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		90		95		87,72		92,34		177,72		177,72			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	100		90		95		87,72		92,34		177,72		177,72			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
					Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat - ALat Kelengkapan DPRD Kota Makassar	%	100		72		100		74,76		74,76		146,76		1,47			
	4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, dan fungsi Anggaran dalam dokumen rencana 5 tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	%	100	130.472.711.039	72	46.391.100.987	100	58.109.612.900	74,76	43.442.900.343	74,76	74,76	146,76	89.834.001.330	1,47	68,85	SEKRETARIAT DPRD	
					Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan amggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	%	100		72		100		74,76		74,76		146,76		1,47			
	5	1		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**98.856.599.375**		**28.768.478.955**		**42.568.882.888**		**33.541.953.284**		**78,79%**		**62.310.432.239**		**63**		
	5	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90		90		100		90		90		180		200			
					Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	68.979.167.544	100	19.518.529.152	100	26.382.507.388	100	22.399.500.151	100	84,90%	200	41.918.029.303	200	61	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		90		100		180		200			
	5	1	2	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Perda		Ada		ADA		ADA		ADA		ADA		ADA		ADA			
					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada		Ada	9.961.435.225	ADA	2.738.148.221	ADA	5.082.580.700	ADA	3.611.308.376	ADA	71,05%	ADA	6.349.456.597	ADA	64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	%	100		100		100		99,6		100		200		200			
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	%	100	19.915.996.606	100	6.511.801.582	100	11.103.794.800	100	7.531.144.757	100	67,82%	200		200	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	1	3		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	%	100		100		100		100		100		200		200			
	5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																			
	5	2		**UNSUR KEUANGAN**				**677.003.090.000,00**		**98.527.843.092,00**		**119.087.983.163,00**		**101.485.792.020,53**		**85,22**		**200.013.635.112,53**		**29,54**		
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90,00		86,09		90,00		77,58		86,20		176,09		195,66			
	5	2	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100,00	502.248.765.000,00	100,00	71.235.663.745,00	100,00	88.263.151.130,00	100,00	74.588.526.216,53	100,00	84,51	200,00	145.824.189.961,53	200,00	29,03		
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90,00		89,78		90,00		88,95		98,83		179,78		199,76		Badan Pendapatan Daerah	

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
	5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	56,69	174.754.325.000,00	38,73	27.292.179.347,00	43,60	30.824.832.033,00	38,17	26.897.265.804,00	87,55	87,26	82,33	54.189.445.151,00	145,23	31,01		
					Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	100,00		79,78		100,00		73,99		73,99		179,78		179,78			
	5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
	5	**2**		**UNSUR KEUANGAN**				**817.696.152.000**		**36.907.159.625**		**43.845.331.400**		**36.332.206.499**		**82,86**		**73.239.366.124**		**8,96**		
5	5	2	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	132.563.736.000	81,7	20.265.397.256	90	27.190.499.033	91	24.636.437.589	101	91	173	44.901.834.845	191,89	33,87	BPKAD	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		200		200,00			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		98,03		90		88		98		186		206,70			
	5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	% / WTP	100	685.132.416.000	100	16.641.762.369	100	16.654.832.367	100	11.695.768.910	100	70	200	28.337.531.279	200,00	4,14		
	5	**3**		**UNSUR KEPEGAWAIAN**				**96.502.031.463**		**15.852.815.500**		**20.348.058.980**		**17.056.875.345**		**83,83%**		**32.909.690.845**		**34,10%**		
	5	05.03	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90	96.480.604.000	90	11.713.680.570	90	13.882.712.964	88	12.928.253.375	98	93	178	24.641.933.945	198	42%	BKPSDMD	angka lebih dari 100% dikarenakan angka pada target lebih kecil dibandingkan angka pada realisasi
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		200		200			
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90		90		90		50		56		140		156			
	5	05.03	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	%	9,08	21.427.463	100	4.139.134.930	8	6.465.346.016	26	4.128.621.970	325	64	126	8.267.756.900	1388	1377%		
					Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	%	9,08		77		65		73		112		150		1652			
					Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	%	64,21		377		8		79		988		456		710			
	5	05.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	5	7.044.512.200	3	7.022.972.140	3,55	7.792.918.300	9,05	7.998.520.706	255	100	12,05	15.021.492.846	241	2503%		
					Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	100		90		97		128		132		218		218			
					Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	JP	20		15		20		20		100		35		175			
	5	**5**		**UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**48.632.089.000**		**52.336.617.917**		**7.483.306.942**		**6.722.699.299**		**89,84**		**59.059.317.216**		**121,44**		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	38.226.493.000	96,67%	6.439.347.160,50	90%	5.947.667.732	101%	5.418.405.362	112,22%	91%	98,84%	11.366.073.094	102,24%	29,73%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100		100%		100%		100%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		99,54%		90%		79,37%		88,19%		89,46%		89,87%			
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	10.405.596.000	80%	42.808.553.333,50	85%	631.536.692	42,02%	562.518.324	49,44%	89,07%	61,01%	1.194.055.016	76,26%	27,29%		
					Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100		100%	1.680.221.417,75	100%	477.702.330	100%	383.546.900	100,00%	80,29%	100,00%	861.249.230	100,00%			
					Persentase SKPD Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100		100%	685.828.205,00	100%	201.858.900	100%	171.606.479	100,00%	85,01%	100,00%	373.465.379	100,00%			
					Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Kota Makassar	%	100		100%	722.667.800,35	89,29%	224.541.288	99,68%	186.622.234	111,64%	83,11%	99,84%	411.163.522	99,84%			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
	6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																		
	6	01		**INSPEKTORAT DAERAH**				**67.367.440.922**		**21.212.108.065**		**30.501.313.969**		**26.259.845.991**	**98,22%**	**8609,41%**		**47.471.954.056**		**70,47**		
	6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	%	90	62.982.064.473	90%	20.142.124.491	90%	28.492.890.769	100%	24.947.499.550	100%	87,56%	190%	45.089.624.041	100%	71,59%	INSPEKTORAT DAERAH	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	90		90%		90%		100%		100%		190%		100%			
					Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100%		100%		100%		100%		200%		100%			
	6	01	02	Program Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	3	Level	1.521.033.378	Level 3	488.554.186	Level 3	820.169.100	Level 3	522.765.000	Level 3	63,74%	Level 3	1.011.319.186	Level 3	66,49%	INSPEKTORAT DAERAH	
					Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	69,6	881.861.660	60,77%	280.882.768	72,60%	447.513.200	89,17%	317.189.300	64,74%	70,88%	149,94%	598.072.068	64,74%	67,82%	INSPEKTORAT DAERAH	
					Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	100	279.078.166	100%	62.903.500	100%	83.523.200	100%	59.723.000	100%	71,50%	200%	122.626.500	100%	43,94%	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level	3	1.703.403.245	Level 3	237.643.120	Level 3	657.217.700	Level 3	412.669.141	Level 3	62,79%	Level 3	650.312.261	Level 3	38,18%	INSPEKTORAT DAERAH	
	7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																		
	7	1		**KECAMATAN UJUNG TANAH**				**162.817.367.000**		**45.770.836.781**		**30.934.702.267**		**26.207.157.930**		**84,72**		**71.977.994.711**		**44,21**		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	66.880.624.000	90	17.546.449.878	90	11.257.385.310	90	9.676.373.728	100	85,96	100	27.222.823.606	100	40,70	Kecamatan Ujung Tanah	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	100		100		90		90		100		100		100			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan		95	44.491.221.000	100	17.440.790.172	100	9.062.772.400	100	8.267.397.638	100	91,2	100	25.708.187.810	100	57,78		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	%	95	25.149.642.000	100	1.148.804.573	100	4.858.585.110	50	3.142.225.525	50,0	83,76	50	17.440.790.172	50	39,20		
					Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	%	100		100		100		50		50,0		50		50			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	95	4.016.332.000	83	1.329.631.134	100	718.112.700	98	652.969.000	98,0	90,9	83	1.982.600.134	87,37	49,36		
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	%	95	22.279.548.000	100	8.305.161.024	100	5.037.846.747	100	4.468.192.039	100	88,7	100	12.773.353.063	100	57,33		
	7	1		**KECAMATAN MAMAJANG**				**232.190.051.385**		**35.049.197.247**		**41.582.840.000**		**35.072.913.247**		**84,34**		**70.122.110.494**		**30,20**		
				Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	134.936.723.881	90	13.534.655.350	90	17.395.717.000	75,55	14.866.860.300	83,94	85,46	90	28.401.515.650	100,00	38,19793795	KECAMATAN MAMAJANG	
	7	1	1		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		100		100,00			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		90		100,00		91,00		101,11			
	7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Peyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	%	95	73.113.771.733	95	9.916.982.472	95	9.480.899.000	100	9.287.831.247	105,26	97,96	95	19.204.813.719	100,00	26,27		
	7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	%	95	2.225.624.235	56,66	3.868.752.050	95	6.936.085.000	25	2.882.458.032	26,31578947	41,56	53,83	6.751.210.082	56,66	38,19793795		
					Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	%	95		91,89		100		51		51		87,3		91,89			
	7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	100	7.435.984.305	95,06	819.459.888	100	1.092.231.000	100	733.381.834	100	67,15	95,06	1.552.841.722	95,06	20,88		
	7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	%	90	14.477.947.231	94,73	6.909.347.487	90	6.677.908.000	100	7.302.381.834	111,11	109,35	94,725	14.211.729.321	105,25	98,16		

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
	7	1		KECAMATAN UJUNG PANDANG				351.377.769.138		33.050.690.820		38.816.565.000		37.220.654.414		96		70.271.345.234		20,00		
	7	1	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	134.496.230.035	100	10.446.890.004	90	14.880.138.000	72,57	13.874.389.081	80,63	93,24	86,285	Rp24.321.279.085	95,87	18,08	KECAMATAN UJUNG PANDANG	
					Indek Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)	%	95																
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		100		100,00				
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		100		111,11		95		105,56				
	7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Peyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	%	95	129.041.648.896	98,95	13.907.831.478	95	13.967.164.000	99	15.780.982.713	104,21	112,99	99	Rp29.688.814.191	104,21	23,01		
	7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	%	95	48.461.624.091	66	3.718.719.401	100	5.347.825.000	85,38	2.763.876.034	85,38	51,68	75,69	Rp6.482.595.435	79,67	13,38		
					Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	%	95		100		100		90		90,00		95		100,00				
	7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	100	3.956.892.000	90,52	571.756.000	95	722.213.000	100	560.007.000	105,26	77,54	95,26	Rp1.131.763.000	95,26	28,60		
	7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	%	100	35.421.374.116	89	4.405.493.937	95	3.899.225.000	100	4.241.399.586	105,26	108,78	94,5	Rp8.646.893.523	94,50	24,41		
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN TAMALANREA				248.524.126.000		34.777.456.510		42.361.470.000		36.153.129.342		85,34		70.930.585.852		28,54		
	7	07.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	90	77.238.247.000	90	9.353.820.236	90	15.121.373.000,00	80,00	11.894.300.007	88,89	78,66	96	21.248.120.243	106,1	106,1	KECAMATAN TAMALANREA	
					Presentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100		100		100		91,00		91,00		96		95,5				
					Presentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Persen	90		90		90		80,00		88,89		85		94,4				
			2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecematan	Persen	95	74.098.274.000	95	14.198.278.926	95	14.506.643.000	93,00	14.284.430.265	98	98,47	94	28.482.709.191	98,95	38,44		
			3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan	Persen	100	32.186.654.000	95	3.382.155.581	95	4.283.616.000	32,00	1.434.999.600	34	33,50	64	4.817.155.181	63,50	34,18		
					Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	Persen	95		95		100		34,00		34		65		67,89				
			4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	Persen	95	818.926.000	95	659.640.000	100	718.962.000	94,00	651.685.000	94	90,64	95	1.311.325.000	99,47	160,13		
			5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persen	95	64.182.025.000	95	7.183.561.767	100	7.730.876.000	97,00	7.887.714.470	97	102,03	96	15.071.276.237	101,05	23,48		
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN MANGGALA				204.484.011.000		40.226.483.450		40.036.529.000		36.611.429.574		91,45		76.837.913.024		37,58		
	7	07.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	%	90	68.479.656.000,00	100	12.223.247.500,00	90	13.410.178.000,00	88,78	12.550.839.179,00	99	93,59	94,39		104,88				
					PERSENTASE KETERSEDIAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100		90		100		97,87		98		93,94		93,94				
					PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	%	90		100		90		100,00		111		100,00		111,11				

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
			2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	95	72.632.080.000	95	12.948.500.000	95	14.219.598.000	84,27	12.428.841.399	89	87,41	89,64	25.377.341.399	94,35	34,94	KECAMATAN MANGGALA	
			3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan	%	100	22.154.030.000	100	4.457.365.594	100	4.337.221.000	78.64	1.620.907.968	#VALUE!	37,37	#VALUE!	6.078.273.562	#VALUE!	27,44		
					Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	95		95		95		62.5		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			
			4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	95	537.001.000	100	142.800.000	95	105.132.000	69,97	119.250.000	74	113,43	84,99	262.050.000	89,46	48,80		
			5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	95	40.681.244.000	100	10.454.570.356	95	7.964.400.000	95	9.891.591.028	100	124,20	97,50	20.346.161.384	102,63	50,01		
	7	1		KECAMATAN				**148.793.808.000**		**21.600.838.633**		**29.130.200.000**		**22.515.420.065**		**77,29**		**44.116.258.698**		**29,65**		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	65.599.530.000	90	8.147.743.233	90	12.842.780.000	73	9.444.459.751	81,11111111	73,53906048	81,5	17.592.202.984	90,56	26,82	Kecamatan Wajo	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100		90		100		73		73		81,5		81,50			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		73		81,11111111		81,5		90,56			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan		95	38.621.856.000	93,15	7.692.100.700	95	7.561.222.000	104	7.927.577.000	109,4736842	104,8451824	98,575	15.619.677.700	103,76	40,44		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	%	95	21.868.258.000	95	1.300.900.700	100	4.281.274.000	0	439.431.600	0	10,26403823	47,5	1.740.332.300	50,00	7,96		
					Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	%	100		95		100		10		10		52,5		52,50			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	95	2.339.525.000	77,8	367.400.000	100	458.022.000	97	446.400.000	97,4625673	97,4625673	87,4	813.800.000	92,00	34,78		
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	%	95	20.364.639.000	100	4.092.694.000	100	3.986.902.000	105	4.257.551.714	105	106,7884717	102,5	8.350.245.714	107,89	41,00		
	7	**1**		**KECAMATAN**				**351.377.769.138**		**33.050.690.820**		**38.816.565.000**		**37.220.654.414**		**95,89**		**70.271.345.234**		**20,00**		
	7	1	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	134.496.230.035	100	10.446.890.004	90	14.880.138.000	72,57	13.874.389.081	80,63	93,24	86,285	Rp24.321.279.085	95,87	18,08	KECAMATAN UJUNG PANDANG	
					Indek Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)	%	95																
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		100		100,00			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		100		111,11		95		105,56			
	7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Peyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	%	95	129.041.648.896	98,95	13.907.831.478	95	13.967.164.000	99	15.780.982.713	104,21	112,99	99	Rp29.688.814.191	104,21	23,01		
	7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	%	95	48.461.624.091	66	3.718.719.401	100	5.347.825.000	85,38	2.763.876.034	85,38	51,68	75,69	Rp6.482.595.435	79,67	13,38		
					Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	%	95		100		100		90		90,00		95		100,00			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
	7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	100	3.956.892.000	90,52	571.756.000	95	722.213.000	100	560.007.000	105,26	77,54	95,26	Rp1.131.763.000	95,26	28,60		
	7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	%	100	35.421.374.116	89	4.405.493.937	95	3.899.225.000	100	4.241.399.586	105,26	108,78	94,5	Rp8.646.893.523	94,50	24,41		
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN PANAKUKANG				**279.407.957.000**		**58.250.793.665**		**50.781.084.184**		**47.770.235.961**		**94,07**		**106.021.029.626**		**37,94**		
	7	07.01	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN,PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN)	%		95.157.725.000		27.909.626.221		15.874.339.879		14.813.244.719		93,32		42.722.870.940		44,90	KECAMATAN PANAKUKANG	
					PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	%	90		85,84		90		49,84		55,38		67,84		75,38			
					PERSENTASE KETERSEDIAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100		100,00		100		100,00		100,00		100,00		100,00			
					PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	%	90		100,00		90		90,00		100,00		95,00		105,56			
			2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecematan	%	100	97.365.331.000	85,74	17.477.821.702	100	17.389.401.500	100	17.304.240.314	100,00	99,51	92,87	34.782.062.016	92,87	35,72		
			3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan	%	100	30.492.792.000	94,46	2.594.341.970	100	5.817.107.200	13,64	4.292.429.499	#VALUE!	73,79	#VALUE!	6.886.771.469	#VALUE!	22,58		
					Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	100		43,33		95		100		105,26		#VALUE!		#VALUE!			
			4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	80	4.902.772.000	42,74	626.494.600	100	596.531.700	75	584.267.500	75,00	97,94	58,87	1.210.762.100	73,59	24,70		
			5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	51.489.337.000	100	9.642.509.172	100	11.103.703.905	100	10.776.053.929	100,00	97,05	100,00	20.418.563.101	100,00	39,66		
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN MAKASSAR				**249.168.128.000**		**37.231.058.382**		**46.689.396.100**		**38.040.047.805**		**81,47**		**75.271.106.187**		**30,20896243**		
	7	07.01	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN,PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN)	%	90	101.414.393.000		14.080.711.874		17.461.940.950		15.452.771.867		88,49		29.533.483.741		29,12	KECAMATAN MAKASSAR	
					PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	%	90		90,00		90		90		100,00		60,00		66,67			
					PERSENTASE KETERSEDIAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100		100,00		100		100		100,00		66,67		66,67			
					PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	%	90		90,00		90		90		100,00		60,00		66,67			
			2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecematan	%	98	65.526.725.000	95	11.346.551.200	100	14.354.280.250	100	11.310.093.900	100,00	78,79	65,00	22.656.645.100	66,33	34,58		
			3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan	%	95	34.892.607.000	94	1.662.796.990	94	3.223.970.700	100	846.848.700	106,38	26,27	64,67	2.509.645.690	68,07	7,19		
					Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	98		95		95		95		100,00		63,33		64,63			

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
			4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	92	3.664.020.000	92	554.290.300	86	616.526.600	100	612.305.400	116,28	99,32	64,00	1.166.595.700	69,57	31,84		
			5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	43.670.383.000	95	9.586.708.018	95	11.032.677.600	100	9.818.027.938	105,26	88,99	65,00	19.404.735.956	65,00	44,43		
	7	1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN MARISO**				**170.928.307.000**		**27.517.464.687**		**30.975.294.755**		**26.591.304.722**		**85,85**		**54.108.769.409**		**31,66**		
	7	1	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	71.026.361.000	95	9.662.121.478	90	11.726.332.334	77,5	10.532.357.420	86,11	89,82	86,25	20.194.478.898	95,83	28,43	KECAMATAN MARISO	
					Indek Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)	%											0,00					
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		98,24		98,24		99,12		99,12			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		95		90		100		111,11		97,50		108,33			
	7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Peyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	%	95	43.805.258.000	95	8.146.702.915	95	8.245.208.100	95,88	7.848.880.300	100,93	95,19	95,44	15.995.583.215	100,46	36,52		
	7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	%	95	24.498.495.000	100	3.163.470.910	95	3.704.581.909	32,73	1.422.782.989	34,45	38,41	66,37	4.586.253.899	69,86	18,72		
					Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	%	100		95		100		34,46		34,46		64,73		64,73			
	7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	95	3.537.490.000	95	570.900.000	95	483.545.200	100	471.225.800	105,26	97,45	97,50	1.042.125.800	102,63	29,46		
	7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	%	95	28.060.703.000	95	5.974.269.384	95	6.815.627.212	100	6.316.058.213	105,26	92,67	97,50	12.290.327.597	102,63	43,80		
	7	**1**		**URUSAN PEMERINTAHANKECAMATAN TAMALATE**				**267.322.651.000**		**46.425.877.194**		**52.092.378.358**		**45.578.596.331**		**87,50**		**92.004.473.525**		**34,42**		
	7	1	1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	97.121.675.000	90	12.807.599.814	90	17.375.009.146	85	15.472.623.350	94,44	89,05	87,50	28.280.223.164	97,22	29,12	KECAMATAN TAMALATE	
					Indek Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)	%	90										0,00					
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		100		100,00		100,00		100,00			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		90		90		90		100,00		90,00		100,00			
	7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Peyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	%	95	73.013.371.000	95	15.715.081.361	100	15.034.069.200	100	14.279.190.972	100,00	94,98	97,50	29.994.272.333	102,63	41,08		
	7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	%	95	32.186.654.000	95	4.556.464.662	95	4.247.878.940	50	1.400.858.600	52,63	32,98	72,50	5.957.323.262	76,32	18,51		
					Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	%	100		75		100		100		100,00		87,50		87,50			
	7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	95	818.926.000	100	881.953.436	100	690.000.000	100	655.910.000	100,00	95,06	100,00	1.537.863.436	105,26	187,79		
	7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	%	95	64.182.025.000	95	12.464.777.921	100	14.745.421.072	100	13.770.013.409	100,00	93,39	97,50	26.234.791.330	102,63	40,88		

Formulir TC-19

NO	KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2		3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN TALLO				**93.797.222.400**		**34.870.751.725**		**49.536.704.000**		**40.566.128.978**		**81,89**		**75.436.880.703**		**80,43**		
	7	07.01	1 **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN,PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN)	%	90	37.983.861.516		12.689.985.268		20.043.048.000,00		15.970.503.230	#DIV/0!	79,68	0	28.660.488.498	0,00	75,45	KECAMATAN TALLO	
				PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	%	90		90		90		90,00		100		180		200,00			
				PERSENTASE KETERSEDIAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100		100		100		100,00		100		200		200,00			
				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	%	90		90		90		90,00		100		180		200,00			
			2 **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	95	20.677.076.582	100	9.426.638.000	95	10.935.423.000	100	10.401.617.300	105	95,12	200	19.828.255.300	210,53	95,89		
			3 **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan	%	100	15.339.057.869	100	2.695.969.295	100	8.102.814.000	53	2.123.987.574	53	26,21	153	4.819.956.869	153,00	31,42		
				Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	95		100		90		53		59		153		161,05			
			4 **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	100	1.311.344.640	100	505.200.000	100	692.554.000	67	753.800.000	67	108,84	167	1.259.000.000	167,00	96,01		
			5 **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	18.485.881.793	100	9.552.959.162	100	9.762.865.000	100	11.316.220.874	100	115,91	200	20.869.180.036	200,00	112,89		
	7	**1**	**KECAMATAN RAPPOCINI**				**246.684.499.000**		**62.235.641.920**		**48.294.834.000**		**43.860.337.105**		**90,82**		**106.095.979.025**		**43,01**		
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	87.226.959.000	80	15.072.472.274	90	17.076.921.000	90	16.076.093.961	100	94,14	85	31.148.566.235	94	35,71	Kecamatan Rappocini	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90		95		90		90		100		93		103			
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan		95	68.850.409.000	100	27.724.457.421	95	13.479.238.000	10	14.091.589.501	11	95,65	55	41.816.046.922	58	60,73		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	%	95	29.820.089.000	100	6.999.274.390	95	5.838.049.000	95	788.804.395	100	740,11	98	7.788.078.785	103	35,71		
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	%	100		90		95		100		105		95		95			
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	95	3.455.763.000	100	1.220.393.400	95	676.554.000	100	594.077.154	105	113,88	100	1.814.470.554	105	52,51		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	%	95	57.331.279.000	90	11.219.044.435	100	11.224.072.000	100	12.309.772.094	100	91,18	95	23.528.816.529	100	41,04		

Formulir TC-19

NO	KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2		3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN BIRINGKANAYA				**66.217.989.355**		**49.239.529.792**		**50.880.417.000**		**45.065.409.098**		**88,57**		**94.304.938.890**		**142,42**		
7	07.01		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	%	80	26.491.729.505		16.002.189.259		18.867.632.000		14.398.975.000		76,32		30.401.164.259		114,76	KECAMATAN BIRINGKANAYA	
				Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	80		90		90,00		83,32		92,58		173,32		216,65			
				Presentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100,00		100		100,00		200		200,00			
				Presentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	%	75		90		90,00		83,33		92,59		173,33		231,11			
			2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecematan	%	100	14.101.025.450	93	15.202.722.463	100	13.566.569.000	98,18	16.153.974.269	98,18	119,07	191	31.356.696.732	191,18	222,37		
			3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan	%	85	5.483.929.000	95	4.617.499.120	95	5.893.451.000	100	868.981.801	105,26	14,74	195	5.486.480.921	114,76	100,05		
			4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	100	132.000.000	95	132.000.000	100	144.556.000	100	115.000.000	100,00	79,55	195	247.000.000	187,12	187,12		
			5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	20.009.305.400	100	13.285.118.950	100	12.408.209.000	100	13.528.478.028	100,00	109,03	200	26.813.596.978	200,00	134,01		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG				**62.767.504.000**		**12.005.924.048**		**12.288.354.000**		**9.668.703.328**		**78,68**		**21.674.627.376**		**34,53**		
7	07.01		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekrtariatan (Kepegawaian,Perlengkapan dan Keuangan)	%	90	42.191.750.000		6.172.339.258		8.260.122.000		6.621.376.932	#DIV/0!	80,16	0,00	12.793.716.190	0,00	30,32	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG	
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	90		100		90		90,00		100		190,00		211,11			
				Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangngkat Daerah	%	100		100		100		100,00		111		200,00		200,00			
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	%	90		90		90		90,00		90		180,00		200,00			
			2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecematan	%	95	4.406.758.000	100		100	862.736.000	96	1.512.192.650	107	175,28	196,00	1.512.192.650	206,32	34,32		
			3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan	%	95	7.010.501.000	100	362.643.000	100	1.372.486.000	4	55.487.250	4	4,04	104,00	418.130.250	109,47	5,96		
				Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	100		100		100		4		4		104,00		104,00			
			4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	%	95	201.378.000	100	3.600.000.000	100	39.424.000	100	37.527.900	100	95,19	200,00	3.637.527.900	210,53	1806,32		
			5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	95	8.957.117.000	100	1.870.941.790	100	1.753.586.000	92	1.442.118.596	92	82,24	192,00	3.313.060.386	202,11	36,99		

Formulir TC-19

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10= 9/8 X 100%		11 = 7+9		12 = 11 /6 x 100%		11	12
	8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																		
	8	1		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**208.745.089.126**		**57.459.660.516**		**102.482.856.696**		**100.048.991.478**		**97,63%**	195,00%	**157.508.651.994**		**75,46**		
	0	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	31.401.859.983	95	5.776.496.796	100	6.955.153.716	100	5.738.301.794	100%	82,50%	195	11.514.798.590	176,00%	36,67%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		86		90		90		100%		176		180,00%			
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	100		90		90		90		100%		180		53,30%			
	8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat yang yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	200	6.616.219.576	48	2.149.697.000	48	3.182.365.900	58,59	2.633.006.237	122%	82,74%	106,59	4.782.703.237	197,00%	72,29%		
	8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100	140.680.909.967	100	45.471.598.920	100	89.224.754.180	97	88.949.844.447	97%	99,69%	197	134.421.443.367	200,00%	95,55%		
	8	1	4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan	%	100	6.871.595.700	100	409.583.900	100	332.336.000	100	239.975.600	100%	72,21%	200	649.559.500	100,00%	9,45%		
	8	1	5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi dan Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	%	200	4.774.981.800	100	1.250.147.000	100	1.090.311.000	100	945.043.000	100%	86,68%	200	2.195.190.000	100,00%	45,97%		
	8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pemahaman Terhadap Pencegahan Konflik Sosial	%	200	18.399.522.100	100	2.402.136.900	100	1.697.935.900	100	1.542.820.400	100%	90,86%	200	3.944.957.300		21,44%		

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

LAMPIRAN

BAB 5

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2026

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pendidikan						**1.227.015.573.000,00**							**1.252.013.238.000,00**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.227.015.573.000,00**							**1.252.013.238.000,00**	
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.227.015.573.000,00**							**1.252.013.238.000,00**	
	1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**946.570.341.473,00**						**100 %**	**946.568.006.815,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**71.034.900,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.699.600,00**	**Dinas Pendidikan**
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	42.335.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.965.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.965.800,00	Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.910.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.910.700,00	Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.982.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.982.400,00	Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.938.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.938.300,00	Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12.902.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	12.902.400,00	Dinas Pendidikan
	1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**939.300.006.138,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**939.300.006.780,00**	**Dinas Pendidikan**
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41450 Orang/bulan	6146 Orang/bulan	0 Orang/bulan	8290 Orang/bulan	931.940.539.538,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	8290 Orang/bulan	931.940.540.180,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.673.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	6.673.800.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	682.672.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	682.672.200,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.994.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	2.994.400,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Pendidikan**
	1 01 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**318.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**318.000.000,00**	**Dinas Pendidikan**
	1 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1400 Paket	280 Paket	0 Paket	280 Paket	210.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	280 Paket	210.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	14 Orang	0 Orang	14 Orang	108.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	16 Orang	108.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**687.513.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**687.513.700,00**	**Dinas Pendidikan**
	1 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.561.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	3.561.500,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1 Paket	3 Paket	3 Paket	173.806.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	173.806.700,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	72.489.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	72.489.600,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	9.915.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	9.915.900,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	262.740.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	262.740.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	165.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	165.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.787.287.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.787.287.600,00**	**Dinas Pendidikan**
	1 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	172 Unit	Unit	0 Unit	92 Unit	497.970.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Unit	497.970.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	129 Unit	Unit	0 Unit	94 Unit	1.289.317.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Unit	1.289.317.600,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.571.785.135,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.571.785.135,00**	**Dinas Pendidikan**
	1 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.016.472.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Laporan	1.016.472.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.555.313.135,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	2.555.313.135,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**498.714.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**498.714.000,00**	**Dinas Pendidikan**
	1 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	155 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit	269.690.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	31 Unit	269.690.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	Unit	0 Unit	42 Unit	29.220.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	42 Unit	29.220.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 01 2.09 0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	199.804.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	199.804.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan***	**Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)**	**84.27 %**	**65.82%**	**72.19 %**	**72.19 %**	**280.112.708.127,00**			**(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**(PD 3) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan**		**75.23 %**	**305.112.707.785,00**	
			Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun)	**100 %**	**98.72%**	**99.80 %**	**99.80 %**							**100 %**		
			Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	**16.03 %**	**11.45%**	**12.98 %**	**12.98 %**							**13.74 %**		
			Skor Kemampuan Literasi SD	**77.86 %**	**62.86%**	**65.36 %**	**67.86 %**							**70.36 %**		
			Skor Kemampuan Literasi SMP	**78.26 %**	**71.66%**	**72.76 %**	**73.86 %**							**74.96 %**		
			Skor Kamampuan Numerasi SD	**71.78 %**	**54.38%**	**57.28 %**	**60.18 %**							**63.08 %**		
			Skor Kamampuan Numerasi SMP	**71.85 %**	**62.85%**	**64.35 %**	**65.85 %**							**67.35 %**		
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	**91,82 %**	**77.81%**	**81.45 %**	**81.45 %**							**83.42 %**		
			Iklim Inklusivitas SD	**75.15**	**60.15**	**65.15**	**65.15**							**67.65**		
			Iklim Inklusivitas SMP	**73.02**	**58.62**	**63.42**	**63.42**							**65.82**		
			Iklim Keamanan SD	**80.63**	**75.23**	**77.03**	**77.03**							**77.93**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Iklim Keamanan SMP	**79.02**	**70.02**	**73.02**	**73.02**							**74.52**		
			Iklim Kebinekaan SD	**79.50**	**73.50**	**75.50**	**75.50**							**76.50**		
			Iklim Kebinekaan SMP	**76.62**	**70.62**	**72.62**	**72.62**							**73.62**		
	1 01 02 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**91.773.337.567,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**111.773.338.425,00**	**Dinas Pendidikan**
	1 01 02 2.01 0003	Pembangunan Ruang GuruKepala SekolahTU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	1 Ruang	0 Ruang	2 Ruang	575.383.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Ruang	575.383.500,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	11 Ruang	3 Ruang	0 Ruang	3 Ruang	384.625.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Ruang	384.625.500,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	2 Ruang	0 Ruang	2 Ruang	574.493.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Ruang	574.493.300,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	125 Unit	42 Unit	0 Unit	25 Unit	2.646.309.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	25 Unit	2.646.309.300,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0009	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang GuruKepala SekolahTU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	Ruang	0 Ruang	4 Ruang	967.455.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Ruang	967.455.700,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0011	Rehabilitasi SedangBerat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	3 Ruang	0 Ruang	2 Ruang	488.351.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Ruang	488.351.600,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	20 Paket	5 Paket	4 Paket	4 Paket	5.248.925.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Paket	5.248.925.900,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0025	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4750 Peserta Didik	990 Peserta Didik	0 Peserta Didik	950 Peserta Didik	500.298.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	950 Peserta Didik	500.298.100,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2405 Orang	435 Orang	481 Orang	481 Orang	6.627.381.660,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	481 Orang	6.627.381.660,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	15300 Orang	3982 Orang	0 Orang	3060 Orang	1.259.361.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3060 Orang	1.259.361.500,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	2400 Satuan Pendidikan	450 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	480 Satuan Pendidikan	361.209.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	480 Satuan Pendidikan	361.209.200,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	2400 Satuan Pendidikan	454 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	480 Satuan Pendidikan	45.639.833.107,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	480 Satuan Pendidikan	45.639.833.965,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2000 Orang	454 Orang	0 Orang	400 Orang	157.229.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	400 Orang	157.229.500,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01 0038	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	463.981.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Dokumen	463.981.500,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1.629.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	1.629.800,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	Paket	0 Paket	1 Paket	6.551.705.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Paket	6.551.705.100,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	156 Ruang	6 Ruang	0 Ruang	26 Ruang	8.428.425.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	28 Ruang	8.428.425.900,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0048	Rehabilitasi SedangBerat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	150 Unit	6 Unit	0 Unit	30 Unit	1.873.190.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Unit	1.873.190.300,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2000 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	400 Satuan Pendidikan	133.036.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	400 Satuan Pendidikan	133.036.700,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0051	Rehabilitasi SedangBerat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	200 Ruang	42 Ruang	0 Ruang	40 Ruang	5.712.682.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	40 Ruang	5.712.682.400,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	94400 Peserta Didik	15000 Peserta Didik	0 Peserta Didik	18880 Peserta Didik	715.764.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	18880 Peserta Didik	715.764.200,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.01 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	7 Paket	0 Paket	2 Paket	2.462.063.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Paket	2.462.063.800,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**147.702.077.080,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**147.702.077.080,00**	**Dinas Pendidikan**
	1 01 02 2.02 0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru USB	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	8 Unit	Unit	0 Unit	1 Unit	25.503.973.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	25.503.973.700,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0003	Pembangunan Ruang GuruKepala SekolahTU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	Ruang	0 Ruang	2 Ruang	1.151.983.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Ruang	1.151.983.300,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	Ruang	0 Ruang	2 Ruang	565.838.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Ruang	565.838.500,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	1.009.970.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Ruang	1.009.970.800,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	16 Ruang	Ruang	0 Ruang	4 Ruang	2.146.304.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Ruang	2.146.304.700,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	125 Unit	9 Unit	0 Unit	25 Unit	3.865.162.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	25 Unit	3.865.162.600,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0014	Rehabilitasi SedangBerat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	200 Ruang	16 Ruang	0 Ruang	40 Ruang	7.630.044.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	40 Ruang	7.630.044.400,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0018	Rehabilitasi SedangBerat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	1 Ruang	0 Ruang	2 Ruang	1.282.552.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Ruang	1.282.552.300,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.02 0024	Rehabilitasi SedangBerat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	150 Unit	2 Unit	0 Unit	30 Unit	2.336.886.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Unit	2.336.886.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20 Paket	5 Paket	0 Paket	4 Paket	5.260.128.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Paket	5.260.128.300,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	96600 Peserta Didik	10942 Peserta Didik	0 Peserta Didik	19000 Peserta Didik	721.283.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	19200 Peserta Didik	721.283.200,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	43200 Peserta Didik	1193 Peserta Didik	8500 Peserta Didik	8500 Peserta Didik	896.713.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8600 Peserta Didik	896.713.200,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1560 Orang	319 Orang	340 Orang	340 Orang	3.952.012.680,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Orang	3.952.012.680,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	17110 Orang	3400 Orang	0 Orang	3400 Orang	1.284.322.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3410 Orang	1.284.322.500,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1320 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	190 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	324.484.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	260 Satuan Pendidikan	324.484.100,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1280 Satuan Pendidikan	211 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	65.555.507.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	250 Satuan Pendidikan	65.555.507.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1280 Orang	211 Orang	0 Orang	250 Orang	119.711.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	250 Orang	119.711.800,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0051	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	9 Dokumen	463.569.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Dokumen	463.569.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1118 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	213 Satuan Pendidikan	172.880.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	220 Satuan Pendidikan	172.880.500,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	140 Ruang	6 Ruang	0 Ruang	24 Ruang	14.103.019.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	26 Ruang	14.103.019.100,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3750 Orang	Orang	0 Orang	750 Orang	320.822.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	750 Orang	320.822.500,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	Paket	0 Paket	1 Paket	5.003.976.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Paket	5.003.976.200,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.02 0064	Rehabilitasi SedangBerat Ruang GuruKepala SekolahTU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	Ruang	0 Ruang	4 Ruang	1.539.047.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Ruang	1.539.047.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	5 Paket	0 Paket	2 Paket	2.491.883.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Paket	2.491.883.700,00	Dinas Pendidikan
	1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD**	**Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**32.605.207.980,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**37.605.206.780,00**	**Dinas Pendidikan**
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	45 Paket	5 Paket	0 Paket	5 Paket	187.992.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	7 Paket	187.992.000,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	80 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	299.394.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	16 Orang	299.394.900,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12000 Orang	3060 Orang	0 Orang	2380 Orang	8.344.305.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2390 Orang	8.344.305.000,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3122 Satuan Pendidikan	672 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	572 Satuan Pendidikan	571.295.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	600 Satuan Pendidikan	571.295.400,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2927 Satuan Pendidikan	543 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	572 Satuan Pendidikan	12.588.829.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	580 Satuan Pendidikan	12.588.829.500,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	2927 Orang	543 Orang	0 Orang	572 Orang	177.575.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	580 Orang	177.575.000,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	410 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	50 Dokumen	210.534.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	60 Dokumen	210.534.800,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0032	Penataan RuangSudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	345 Ruang	Ruang	0 Ruang	30 Ruang	63.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Ruang	63.800.000,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2000 Peserta didik	Peserta didik	0 Peserta didik	300 Peserta didik	169.692.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	350 Peserta didik	169.692.200,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	16 Kegiatan	Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	86.787.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Kegiatan	86.787.800,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	Unit	0 Unit	1 Unit	7.361.954.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	7.361.954.500,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	Paket	0 Paket	1 Paket	6.460.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Paket	6.460.000,00	Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	Paket	0 Paket	2 Paket	465.834.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Paket	465.833.500,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.03 0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	3360 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	668 Satuan Pendidikan	2.070.752.180,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	670 Satuan Pendidikan	7.070.752.180,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.04	**Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan**	**Persentase Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.032.085.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**8.032.085.500,00**	**Dinas Pendidikan**
	1 01 02 2.04 0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	28500 Peserta Didik	Peserta Didik	0 Peserta Didik	5700 Peserta Didik	698.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5700 Peserta Didik	698.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.04 0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonformalKesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160 Satuan Pendidikan	44 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	174.439.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	32 Satuan Pendidikan	174.439.900,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonformalKesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	160 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	7.414.609.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	32 Satuan Pendidikan	7.414.609.800,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.04 0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonformalKesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	600 Orang	120 Orang	0 Orang	120 Orang	69.763.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	120 Orang	69.763.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.04 0027	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500 Dokumen	44 Dokumen	0 Dokumen	100 Dokumen	153.074.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Dokumen	153.074.000,00	Dinas Pendidikan
	1 01 02 2.04 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	28500 Peserta Didik	7500 Peserta Didik	0 Peserta Didik	5700 Peserta Didik	219.500.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5700 Peserta Didik	219.500.800,00	Dinas Pendidikan
	1 01 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** ***Outcome :Meningkatnya Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Seluruh Satuan Pendidikan SD/SMP***	**Persentase satuan pendidikan yang Mengembangkan kurikulum muatan lokal**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**111.195.400,00**						**100 %**	**111.195.400,00**	
	1 01 03 2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Yang Ditetapkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**111.195.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**111.195.400,00**	**Dinas Pendidikan**
	1 01 03 2.02 0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	10 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	111.195.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	111.195.400,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik**	**100 %**	**N.A**	**100 %**	**100 %**	**123.015.000,00**			**(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**(PD 3) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan**		**100 %**	**123.015.000,00**	
						Outcome :Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	**Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4**	**79.22 %**	**52.82**	**77.22 %**	**77.22 %**							**77.72 %**		
	1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan NonformalKesetaraan**	**Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan NonformalKesetaraan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**123.015.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**123.015.000,00**	**Dinas Pendidikan**
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan NonformalKesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	51.010.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	51.010.000,00	Dinas Pendidikan
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan NonformalKesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.005.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	72.005.000,00	Dinas Pendidikan
	1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat***	**Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui**	**46.38 %**	**36.38%**	**38.38 %**	**38.38 %**	**98.313.000,00**						**40.38 %**	**98.313.000,00**	
	1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**98.313.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**98.313.000,00**	**Dinas Pendidikan**
	1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	500 Dokumen	100 Dokumen	0 Dokumen	100 Dokumen	98.313.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Dokumen	98.313.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Kesehatan						**653.064.509.000,00**							**653.601.389.000,00**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**653.064.509.000,00**							**653.601.389.000,00**	
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**653.064.509.000,00**							**653.601.389.000,00**	
	1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**448.056.814.983,00**						**100 %**	**448.593.694.983,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**54.020.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	3 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	25.002.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.005.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.005.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.001.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.003.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	13.001.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	13.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**202.899.211.751,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**202.899.211.951,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11935 Orang/bulan	2387 Orang/bulan	2387 Orang/bulan	2387 Orang/bulan	200.532.146.951,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	2387 Orang/bulan	200.532.147.151,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.959.958.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.959.958.200,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	407.106.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	407.106.600,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	336.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**571.800.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**571.800.000,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1710 Paket	190 Paket	190 Paket	190 Paket	133.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	190 Paket	133.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	468 Orang	52 Orang	52 Orang	52 Orang	438.300.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	52 Orang	438.300.000,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**918.825.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**918.825.400,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	35.431.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	35.431.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	74.251.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	74.251.500,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	477.384.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	477.384.700,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	126 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	250.878.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	14 Paket	250.878.200,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20.880.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.880.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	945 Laporan	105 Laporan	105 Laporan	105 Laporan	60.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	105 Laporan	60.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.099.925.120,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.099.925.120,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	18.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	729.680.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	729.680.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	134.424.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Laporan	134.424.100,00	Dinas Kesehatan
	1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.217.821.020,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	2.217.821.020,00	Dinas Kesehatan
	1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.246.217.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.268.117.000,00**	**Dinas Kesehatan**
	1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	42.650.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	42.650.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1430 Unit	286 Unit	286 Unit	286 Unit	1.002.710.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	286 Unit	1.002.710.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 01 2.09 0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	200.857.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	200.857.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**238.930.815.512,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**238.930.815.512,00**	**Dinas Kesehatan**
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	235 Unit Kerja	47 Unit Kerja	47 Unit Kerja	47 Unit Kerja	238.930.815.512,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	47 Unit Kerja	238.930.815.512,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** ***Outcome :Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat***	**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**192.872.820.257,00**			**(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**(PD 3) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan**		**100 %**	**192.872.820.257,00**	
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100 %**	**82.88%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	**100 %**	**93.61%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100 %**	**83.56%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
	1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah KabupatenKota**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**47.001.795.277,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**47.001.795.277,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	8 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	15.739.875.267,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	15.739.875.267,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Unit	Unit	0 Unit	3 Unit	647.569.150,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Unit	647.569.150,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat KesehatanAlat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	25 Unit	5 Unit	5 Unit	2.932.083.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Unit	2.932.083.800,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat KesehatanAlat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	135 Unit	Unit	0 Unit	27 Unit	732.775.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	27 Unit	732.775.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	7 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	10.417.662.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	10.417.662.600,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	30 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	16.351.941.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Paket	16.351.941.100,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 02 2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	235 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket	179.888.360,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	47 Paket	179.888.360,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**145.442.990.680,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**145.442.990.680,00**	**Dinas Kesehatan**
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251714 Orang	27254 Orang	27684 Orang	27776 Orang	2.856.508.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	27934 Orang	2.856.508.800,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240274 Orang	25145 Orang	26428 Orang	26514 Orang	1.916.912.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	26664 Orang	1.916.912.600,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	228832 Orang	25166 Orang	25168 Orang	25251 Orang	528.623.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	25394 Orang	528.623.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1014129 Orang	94804 Orang	112481 Orang	112481 Orang	97.947.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	112581 Orang	97.947.800,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1780308 Orang	194719 Orang	197812 Orang	197812 Orang	470.138.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	197812 Orang	470.138.100,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8743284 Orang	969234 Orang	971476 Orang	971476 Orang	1.293.007.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	971476 Orang	1.293.007.200,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1412149 Orang	130113 Orang	152427 Orang	153951 Orang	18.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	155506 Orang	18.600.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3022945 Orang	327234 Orang	330427 Orang	333663 Orang	33.618.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	335662 Orang	33.618.400,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246772 Orang	26710 Orang	26974 Orang	27238 Orang	30.443.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	27401 Orang	30.443.400,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34144 Orang	3374 Orang	3397 Orang	3567 Orang	88.987.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3745 Orang	88.987.800,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	257138 Orang	43119 Orang	38736 Orang	33122 Orang	29.943.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	28438 Orang	29.943.500,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	224335 Orang	42475 Orang	42487 Orang	43287 Orang	359.096.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	44087 Orang	359.096.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa KLB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	427 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	53 Dokumen	20.126.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	53 Dokumen	20.126.800,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	54 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2.409.043.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Dokumen	2.409.043.500,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	63 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	345.299.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	7 Dokumen	345.299.300,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	54 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	240.964.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Dokumen	240.964.300,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.170.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	28.170.600,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	18 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	88.455.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	88.455.900,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	54 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	51.031.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Dokumen	51.031.200,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa ODMK	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2160 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang	42.155.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	240 Orang	42.155.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	175 Orang	Orang	29 Orang	31 Orang	52.293.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	33 Orang	52.293.600,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	27 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	21.053.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	21.053.200,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	90 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	2.612.741.960,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Dokumen	2.612.741.960,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	118.863.128.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	118.863.128.800,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	550 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang	16.843.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	110 Orang	16.843.800,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium RujukanNasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	250 Paket	Paket	50 Paket	50 Paket	8.702.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Paket	8.702.400,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan KabupatenKota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	75 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	543.348.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Dokumen	543.348.700,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	235 Unit	47 Unit	47 Unit	47 Unit	2.473.984.220,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	47 Unit	2.473.984.220,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	235 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	7.099.932.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	47 Dokumen	7.099.932.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.002.040.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	2.002.040.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di KabupatenKota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	235 Unit	47 Unit	47 Unit	47 Unit	203.831.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	47 Unit	203.831.900,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.476.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	22.476.800,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	260 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	21.140.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	52 Dokumen	21.140.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39925 Orang	Orang	7985 Orang	7985 Orang	35.040.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	7985 Orang	35.040.200,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV ODHIV	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4625 Orang	1015 Orang	925 Orang	925 Orang	231.136.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	925 Orang	231.136.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1480 Orang	199 Orang	296 Orang	296 Orang	39.236.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	296 Orang	39.236.400,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	15 Tatanan	3 Tatanan	3 Tatanan	3 Tatanan	154.828.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Tatanan	154.828.700,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan KabupatenKota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9.268.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	9.268.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	36.208.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	36.208.000,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	22.102.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	22.102.600,00	Dinas Kesehatan
	1 02 02 2.02 0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	235 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	24.580.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	47 Dokumen	24.580.200,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**428.034.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**428.034.300,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	140 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	15.695.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	28 Unit	15.695.500,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah KabupatenKota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	140 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	32.492.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	28 Unit	32.492.800,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	140 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	309.795.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	28 Unit	309.795.900,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.050.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	70.050.100,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** ***Outcome :Meningkatnya mutu dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan***	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**	**100 %**	**100%**	**90 %**	**90 %**	**344.365.500,00**						**95 %**	**344.365.500,00**	
	1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah KabupatenKota**	**Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**139.259.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**139.259.900,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	20 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	139.259.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	139.259.900,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah KabupatenKota**	**Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**113.661.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**113.661.600,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	113.661.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	113.661.600,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**91.444.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**91.444.000,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah KabupatenKota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1095 Orang	162 Orang	162 Orang	219 Orang	91.444.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	219 Orang	91.444.000,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minum***	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**100 %**	**85.61%**	**100 %**	**100 %**	**517.110.080,00**						**100 %**	**517.110.080,00**	
	1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT**	**Persentase Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**133.687.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**133.687.700,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	133.687.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Dokumen	133.687.700,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**04**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**86.862.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**86.862.000,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas Tertentu dan PKRT Kelas Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	86.862.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	86.862.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**187.594.580,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**187.594.580,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	187.594.580,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	187.594.580,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan TPM antara lain Jasa Boga Rumah MakanRestoran dan Depot Air Minum DAM**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan TPM antara lain Jasa Boga Rumah MakanRestoran dan Depot Air Minum DAM Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**56.024.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**56.024.900,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan TPM antara lain Jasa Boga Rumah MakanRestoran dan Depot Air Minum DAM	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	56.024.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	56.024.900,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**35.250.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**35.250.000,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.250.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	35.250.000,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**17.690.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**17.690.900,00**	**Dinas Kesehatan**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	17.690.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Unit	17.690.900,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** ***Outcome :Meningkatnya dukungan, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap semua objek kesehatan***	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**100 %**	**10%**	**25 %**	**25 %**	**11.273.398.180,00**						**57 %**	**11.273.398.180,00**	
	1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**10.975.348.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**10.975.348.500,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	10.975.348.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Dokumen	10.975.348.500,00	Dinas Kesehatan
	1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terselenggara**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**298.049.680,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**298.049.680,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	298.049.680,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	298.049.680,00	Dinas Kesehatan
						Dinas Pekerjaan Umum						**735.351.098.000,00**							**815.607.799.000,00**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**735.351.098.000,00**							**815.607.799.000,00**	
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**735.351.098.000,00**							**815.607.799.000,00**	
	1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**57.457.252.345,20**						**100 %**	**57.348.364.045,20**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**177.888.900,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	69.534.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.601.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.517.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.188.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.671.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	52 Laporan	32.375.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	52 Laporan	13.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**29.010.375.961,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**29.010.376.561,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1300 Orang/bulan	160 Orang/bulan	176 Orang/bulan	220 Orang/bulan	26.068.725.361,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	240 Orang/bulan	26.068.725.961,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.092.299.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.092.299.100,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	755.667.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	755.667.600,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	20.902.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	20.902.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	22.986.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.986.200,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	49.795.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	49.795.700,00	Dinas Pekerjaan Umum

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**15.449.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**15.449.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1	03	01	2.03	0004	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	N/A Laporan	0 Laporan	2 Laporan	15.449.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	15.449.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**96 %**	**100 %**	**100 %**	**768.243.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**768.243.200,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2900 Paket	0 Paket	0 Paket	580 Paket	375.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	580 Paket	375.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	N/A Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	60.341.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	60.341.200,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	500 Orang	N/A Orang	0 Orang	100 Orang	262.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	100 Orang	262.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	N/A Orang	0 Orang	100 Orang	70.402.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	100 Orang	70.402.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**98,30 %**	**100 %**	**100 %**	**759.988.000,20**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**759.988.000,20**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250 Paket	344 Paket	448 Paket	50 Paket	66.516.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Paket	66.516.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	225 Paket	N/A Paket	0 Paket	45 Paket	120.304.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	45 Paket	120.304.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	250 Paket	1116 Paket	1219 Paket	50 Paket	127.363.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Paket	127.363.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	175 Paket	N/A Paket	0 Paket	35 Paket	254.805.000,20	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	35 Paket	254.805.000,20	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	12 Dokumen	19 Dokumen	5 Dokumen	9.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	11 Laporan	160 Laporan	12 Laporan	182.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	182.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**67,00 %**	**100 %**	**100 %**	**670.237.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**670.237.400,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	325 Unit	1 Unit	102 Unit	65 Unit	670.237.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	65 Unit	670.237.400,00	Dinas Pekerjaan Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.564.317.544,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**7.564.317.544,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	33.467.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	33.467.300,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.865.717.724,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	3.865.717.724,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	N/A Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.249.721.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	2.249.721.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.415.411.520,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	1.415.411.520,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**53,46 %**	**100 %**	**100 %**	**18.490.752.340,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**18.490.752.340,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	28.764.250,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	28.764.250,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3815 Unit	602 Unit	700 Unit	725 Unit	14.998.398.090,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	750 Unit	14.998.398.090,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	450 Unit	39 Unit	80 Unit	80 Unit	3.088.204.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	85 Unit	3.088.204.800,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.09 0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100 Unit	N/A Unit	8 Unit	10 Unit	22.465.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Unit	22.465.200,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2220 Unit	389 Unit	1400 Unit	350 Unit	332.920.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	400 Unit	332.920.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 01 2.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	N/A Unit	0 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Unit	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kota Makassar**	**64.35 %**	**89.15%**	**54.85 %**	**54.85 %**	**16.755.034.000,00**			**(PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal**	**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan**		**57.22 %**	**64.685.862.900,00**	
		Outcome :Meningkatnya perlindungan masyarakat dari banjir, dan genangan	**Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kota Makassar**	**55.64 %**	**54.45%**	**55.64 %**	**55.64 %**				**(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**			**55.64 %**		
	1 03 02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai WS dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai WS dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**16.755.034.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**64.685.862.900,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1 03 02 2.01 0026	Rehabilitasi Pintu AirBendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	15 Unit	N/A Unit	0 Unit	3 Unit	924.340.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Unit	924.340.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 02 2.01 0100	Peningkatan Pintu AirBendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	15 Unit	3 Unit	5 Unit	3 Unit	1.131.231.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Unit	1.131.231.600,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 02 2.01 0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	5.300000000000001 KM	N/A KM	0 KM	1.06 KM	2.548.149.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1.06 KM	2.548.149.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 02 2.01 0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	150 Titik	22 Titik	22 Titik	30 Titik	1.901.498.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Titik	1.901.498.700,00	Dinas Pekerjaan Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 02 2.01 0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir Lahar dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.263.240.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	1.263.240.400,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 02 2.01 0124	Pembangunan PolderKolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	5 Unit	N/A Unit	0 Unit	1 Unit	6.428.501.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	6.259.330.700,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 02 2.01 0125	Pembangunan Pintu AirBendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	5 Unit	N/A Unit	0 Unit	1 Unit	1.727.243.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	1.727.243.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 02 2.01 0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	10 Dokumen	N/A Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	830.829.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	830.829.500,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan**	**4.77 %**	**3.75%**	**4.12 %**	**4.12 %**	**29.938.498.440,00**			**(PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal**	**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan**		**4.28 %**	**29.938.498.440,00**	
		Outcome :Meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan air minum	**Persentase Rumah Tangga Yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi**	**0.40 %**	**0.08%**	**0.19 %**	**0.19 %**				**(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**			**0.24 %**		
	1 03 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**29.938.498.440,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**29.938.498.440,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.072.024.140,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	1.072.024.140,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	24 Liter/Detik	1.2 Liter/Detik	7.2 Liter/Detik	4.8 Liter/Detik	5.277.434.720,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4.8 Liter/Detik	5.277.434.720,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	60 Liter/Detik	1.2 Liter/Detik	9.6 Liter/Detik	12 Liter/Detik	17.438.237.670,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Liter/Detik	17.438.237.670,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	25 Unit	8 Unit	5 Unit	5 Unit	1.960.685.360,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Unit	1.960.685.360,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000 SR	396 SR	200 SR	200 SR	3.983.332.250,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 SR	3.983.332.250,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	03	2.01	0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	115 Lembaga	17 Lembaga	24 Lembaga	23 Lembaga	206.784.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	23 Lembaga	206.784.300,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) akses aman**	**17.38 %**	**8.45%**	**10.28 %**	**10.28 %**	**46.076.421.650,80**			**(PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal**	**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan**		**12.12 %**	**46.076.421.650,80**	
						Outcome :Meningkatnya akses rumah tinggal terhadap akses sanitasi aman	**Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) akses aman**	**12.68 %**	**0.68%**	**4.15 %**	**4.15 %**				**(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**			**6.10 %**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 05 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**99,86 %**	**100 %**	**100 %**	**46.076.421.650,80**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**46.076.421.650,80**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1 03 05 2.01 0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	5 Unit	N/A Unit	1 Unit	1 Unit	398.883.833,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	398.883.833,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 05 2.01 0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	122.417.368,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	122.417.368,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 05 2.01 0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2400 MÃ‚Â³/Hari	183.36 MÃ‚Â³/Hari	1000 MÃ‚Â³/Hari	480 MÃ‚Â³/Hari	23.457.509.496,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	480 MÃ‚Â³/Hari	23.457.509.496,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 05 2.01 0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD di Daerah KabupatenKota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	50 Unit	N/A Unit	120 Unit	10 Unit	41.435.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Unit	41.435.300,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 05 2.01 0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.150.379.308,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	1.150.379.308,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 05 2.01 0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	7500 Rumah Tangga	1214 Rumah Tangga	2000 Rumah Tangga	1500 Rumah Tangga	1.557.277.480,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1500 Rumah Tangga	1.557.277.480,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 05 2.01 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	50 Unit	N/A Unit	50 Unit	10 Unit	1.144.999.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Unit	1.144.999.200,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 05 2.01 0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1050 Orang	420 Orang	540 Orang	210 Orang	89.881.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	210 Orang	89.881.400,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 05 2.01 0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500 Penyelenggara	12 Penyelenggara	12 Penyelenggara	100 Penyelenggara	91.863.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Penyelenggara	91.863.800,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 05 2.01 0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	7167 Rumah Tangga	696 Rumah Tangga	1640 Rumah Tangga	1167 Rumah Tangga	16.138.238.629,80	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1500 Rumah Tangga	16.138.238.629,80	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 05 2.01 0045	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	15 Dokumen	N/A Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.883.535.836,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	1.883.535.836,00	Dinas Pekerjaan Umum

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** ***Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem drainase perkotaan***	**Persentase Persentase drainase dalam kondisi baik**	**67.19 %**	**69.08%**	**57.81 %**	**57.81 %**	**80.545.042.788,00**			**(PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal** **(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan**		**60.16 %**	**80.545.042.788,00**	
	1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**66,67 %**	**100 %**	**100 %**	**80.545.042.788,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**80.545.042.788,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	165 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	21 Sistem Drainase Perkotaan	33 Sistem Drainase Perkotaan	25.246.799.825,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	33 Sistem Drainase Perkotaan	25.246.799.825,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	25 Sistem Drainase Perkotaan	35 Sistem Drainase Perkotaan	75 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	10.143.013.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Sistem Drainase Perkotaan	10.143.013.900,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	100 Sistem Drainase Perkotaan	28 Sistem Drainase Perkotaan	75 Sistem Drainase Perkotaan	20 Sistem Drainase Perkotaan	19.044.598.003,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Sistem Drainase Perkotaan	19.044.598.003,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	10 Dokumen	14 Dokumen	16 Dokumen	2 Dokumen	1.350.032.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	1.350.032.300,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	200 Sistem Drainase Perkotaan	40 Sistem Drainase Perkotaan	100 Sistem Drainase Perkotaan	40 Sistem Drainase Perkotaan	24.760.598.760,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	40 Sistem Drainase Perkotaan	24.760.598.760,00	Dinas Pekerjaan Umum

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** ***Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintah***	**Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik**	**60.34 %**	**N/A**	**49.65 %**	**49.65 %**	**293.222.389.350,00**			**(PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal** **(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan**		**52.13 %**	**328.002.193.050,00**	
	1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah KabupatenKota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**293.222.389.350,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**328.002.193.050,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1	03	08	2.01	0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor HDNo Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	50 Bangunan Gedung Negara	N/A Bangunan Gedung Negara	0 Bangunan Gedung Negara	10 Bangunan Gedung Negara	71.130.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Bangunan Gedung Negara	71.130.100,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	80 Bangunan Gedung	11 Bangunan Gedung	20 Bangunan Gedung	16 Bangunan Gedung	13.708.788.747,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	16 Bangunan Gedung	10.396.314.747,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	50 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung	25 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	1.728.828.503,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Bangunan Gedung	1.728.828.503,00	Dinas Pekerjaan Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 08 2.01 0021	Pembangunan Pemanfaatan Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	75 Dokumen	7 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	277.713.642.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Dokumen	315.805.919.700,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** ***Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan bangunan dan lingkungannya***	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**5.94 %**	**N/A**	**4.06 %**	**4.06 %**	**1.290.769.500,00**						**4.47 %**	**1.290.769.500,00**	
	1 03 09 2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Yang Terselenggara**	**100 %**	**N/A %**	**100 %**	**100 %**	**1.290.769.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.290.769.500,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1 03 09 2.01 0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	N/A Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	14.957.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	14.957.300,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 09 2.01 0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah KabupatenKota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	5 Kawasan	N/A Kawasan	0 Kawasan	1 Kawasan	764.162.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Kawasan	764.162.200,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 09 2.01 0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	50 Orang	N/A Orang	0 Orang	10 Orang	511.650.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Orang	511.650.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan dalam Kondisi Baik**	**97.05 %**	**98.00%**	**88.74 %**	**88.74 %**	**204.380.997.746,00**			**(PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal**	**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan**		**90.52 %**	**202.035.954.446,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan perkotaan									**(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**					
	1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan KabupatenKota**	**Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**72,02 %**	**100 %**	**100 %**	**204.380.997.746,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**202.035.954.446,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	5 Dokumen	N/A Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1.023.551.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	1.023.551.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	29 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	44.956.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	44.956.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi JalanJembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	9290.449999999999 KM	468.19 KM	1500 KM	1858.09 KM	635.476.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1858.09 KM	619.506.300,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	157.33 KM	17.71 KM	20 KM	28.75 KM	29.276.245.760,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	28.75 KM	29.276.245.760,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	10	2.01	0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	9290.449999999999 KM	N/A KM	0 KM	1858.09 KM	422.426.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1858.09 KM	421.106.900,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	182.78 KM	90.86 KM	50 KM	33.67 KM	85.305.402.730,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	34.25 KM	82.977.649.930,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	122.47 KM	46,48 KM	25 KM	22.69 KM	44.851.204.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	23.02 KM	44.851.204.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	90 Meter	N/A Meter	0 Meter	18 Meter	3.881.859.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	18 Meter	3.881.859.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	82.91 KM	N/A KM	0 KM	38.84 KM	33.187.774.756,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10.41 KM	33.187.774.756,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	90 Meter	37.82 Meter	18 Meter	18 Meter	5.752.100.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	18 Meter	5.752.100.800,00	Dinas Pekerjaan Umum

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** ***Outcome :Meningkatnya kompetensi tenaga operator/teknisi/analis konstruksi***	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**53.44 %**	**17.66%**	**37.44 %**	**37.44 %**	**5.684.692.180,00**						**41.44 %**	**5.684.692.180,00**	
	1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Yang Terlaksana**	**100 %**	**66,67 %**	**100 %**	**100 %**	**4.567.565.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.567.565.700,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1500 Orang	150 Orang	200 Orang	300 Orang	605.582.920,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	300 Orang	605.582.920,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	750 Lembaga	0 Lembaga	150 Lembaga	150 Lembaga	2.471.401.360,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Lembaga	2.471.401.360,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	750 Orang	0 Orang	150 Orang	150 Orang	1.490.581.420,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Orang	1.490.581.420,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.012.370.990,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.012.370.990,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	5 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	1.012.370.990,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Layanan Informasi	1.012.370.990,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**104.755.490,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**104.755.490,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi KabupatenKota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	5 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	104.755.490,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Paket Pekerjaan	104.755.490,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Dinas Penataan Ruang						**27.009.339.000,00**							**26.368.075.000,00**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**27.009.339.000,00**							**26.368.075.000,00**	
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**27.009.339.000,00**							**26.368.075.000,00**	
	1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**20.367.049.700,00**						**100 %**	**20.065.785.700,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**53.774.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**56.112.300,00**	**Dinas Penataan Ruang**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4.972.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.154.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.154.500,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.591.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.591.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.895.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.288.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.288.300,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.078.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	4.078.500,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.794.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Berita Acara	-	Dinas Penataan Ruang
	1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.549.123.040,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**12.545.520.940,00**	**Dinas Penataan Ruang**
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	365 Orang/bulan	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	11.976.156.740,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	73 Orang/bulan	11.976.158.540,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	355.560.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	355.560.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	192.938.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	192.938.500,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	9.386.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	9.386.200,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.477.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	11.477.700,00	Dinas Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	3.603.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**563.851.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**563.851.200,00**	**Dinas Penataan Ruang**
	1 03 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	227.851.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	227.851.200,00	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**204.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**204.000.000,00**	**Dinas Penataan Ruang**
	1 03 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	770 Paket	Paket	154 Paket	154 Paket	132.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	154 Paket	132.000.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Orang	6 Orang	6 Orang	72.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Orang	72.000.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.225.488.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**925.488.700,00**	**Dinas Penataan Ruang**
	1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	Paket	12 Paket	12 Paket	15.580.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	15.580.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	Paket	12 Paket	12 Paket	40.997.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	40.997.900,00	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	157.248.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	157.248.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	6.108.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Paket	6.108.200,00	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	23.760.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	23.760.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	61.794.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	61.794.600,00	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310 Laporan	73 Laporan	92 Laporan	62 Laporan	920.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	62 Laporan	620.000.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1 03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.202.882.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.202.882.000,00**	**Dinas Penataan Ruang**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	900.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	900.000.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	1.300.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Unit	1.300.000.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Unit	10 Unit	10 Unit	2.882.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Unit	2.882.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.801.980.560,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.801.980.560,00**	**Dinas Penataan Ruang**
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.235.481.920,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	2.235.481.920,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	210.808.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	210.808.800,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	355.689.840,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	355.689.840,00	Dinas Penataan Ruang
	1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**765.950.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**765.950.000,00**	**Dinas Penataan Ruang**
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	44.380.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	325 Unit	65 Unit	65 Unit	65 Unit	450.970.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	65 Unit	450.970.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	350 Unit	110 Unit	110 Unit	110 Unit	72.050.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	110 Unit	72.050.000,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	198.550.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	198.550.000,00	Dinas Penataan Ruang

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan bangunan***	**Persentase pengendalian penyelenggaraan perizinan bangunan gedung**	**100 %**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**1.777.287.620,00**			**(PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal** **(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan**		**100 %**	**1.777.287.620,00**	
	1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah KabupatenKota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.777.287.620,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.777.287.620,00**	**Dinas Penataan Ruang**
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG Sertifikat Laik Fungsi SLF Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB Tim Profesi Ahli TPA Tim Penilai Teknis TPT Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.777.287.620,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	1.777.287.620,00	Dinas Penataan Ruang

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang***	**Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang**	**100 %**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**4.865.001.680,00**			**(PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal**	**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan**		**100 %**	**4.525.001.680,00**	
	1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang RRTR KabupatenKota**	**Persentase Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang RRTR Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.573.093.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.233.093.300,00**	**Dinas Penataan Ruang**
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	241.050.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	241.050.700,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR KabupatenKota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.185.528.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	845.528.400,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	30 Laporan	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	146.514.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Laporan	146.514.200,00	Dinas Penataan Ruang
	1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah KabupatenKota**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**789.639.040,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**789.639.040,00**	**Dinas Penataan Ruang**
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	2250 Layanan	300 Layanan	300 Layanan	350 Layanan	565.075.140,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	400 Layanan	565.075.140,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	109.592.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	109.592.200,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	114.971.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Sistem Informasi	114.971.700,00	Dinas Penataan Ruang
	1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah KabupatenKota**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.502.269.340,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.502.269.340,00**	**Dinas Penataan Ruang**
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	138 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	26 Dokumen	116.986.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	26 Dokumen	116.986.600,00	Dinas Penataan Ruang

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	12	2.04	0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.928.037.540,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	1.928.037.540,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	254.959.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	254.959.600,00	Dinas Penataan Ruang
	1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif danatau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	50 Berita Acara	10 Berita Acara	10 Berita Acara	10 Berita Acara	202.285.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Berita Acara	202.285.600,00	Dinas Penataan Ruang
						Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman						**45.348.554.000,00**							**45.009.306.000,00**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**45.348.554.000,00**							**45.009.306.000,00**	
	1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**45.348.554.000,00**							**45.009.306.000,00**	
	1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**19.790.132.385,00**						**100 %**	**19.486.076.885,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**112.055.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.517.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.572.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.004.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.040.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.086.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.786.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	-	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	13.048.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	13.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**16.108.147.565,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**16.108.147.865,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	455 Orang/bulan	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	75 Orang/bulan	15.589.620.265,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	80 Orang/bulan	15.589.620.565,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	398.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	398.400.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	89.696.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	89.696.400,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.975.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	11.975.400,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	15 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.808.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	11 Dokumen	3.808.900,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	14.646.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	14.646.600,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**745.500.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**454.500.000,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 04 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	623 Paket	0 Paket	110 Paket	115 Paket	112.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	120 Paket	112.500.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang	112 Orang	40 Orang	40 Orang	633.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	40 Orang	342.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**834.946.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**834.946.700,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1 04 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	49 Paket	5 Paket	7 Paket	7 Paket	13.122.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	9 Paket	13.122.600,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	195.649.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	195.649.500,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	Paket	5 Paket	5 Paket	10.240.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	10.240.200,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	59.159.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	59.159.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	36.898.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	36.898.600,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	312.060.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	312.060.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	34.286.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	34.286.400,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	147.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Laporan	147.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	26.530.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	26.530.400,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**38.393.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.393.400,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	Unit	12 Unit	12 Unit	31.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Unit	31.400.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	931.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	931.100,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1.329.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	1.329.600,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.732.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	4.732.700,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.110.788.920,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.110.788.920,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	411.776.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	411.776.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	218.760.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	218.760.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	480.252.920,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	480.252.920,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**504.300.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**504.300.000,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	44.380.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	199.850.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Unit	199.850.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	175 Unit	Unit	0 Unit	35 Unit	8.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	35 Unit	8.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	52.570.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	52.570.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Unit	2 Unit	2 Unit	199.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Unit	199.500.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**3.905.394.100,00**						**100 %**	**3.905.394.100,00**	
						Outcome :Meningkatnya jumlah rumah layak huni	**Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
	1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota**	**Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**720.940.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**720.940.700,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi LahanLahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	114.629.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	114.629.200,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	90.919.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	90.919.200,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	57.212.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	57.212.200,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program KabupatenKota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	123.292.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	123.292.800,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program KabupatenKota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	123.360.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	123.360.300,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana KabupatenKota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	120.669.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	120.669.600,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana KabupatenKota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	90.857.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	90.857.400,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota**	**Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**103.761.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**103.761.200,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada MasyarakatSukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	Orang	10 Orang	10 Orang	15.447.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Orang	15.447.800,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	50 Orang	Orang	10 Orang	10 Orang	44.431.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Orang	44.431.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana KabupatenKota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	Orang	10 Orang	10 Orang	12.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Orang	12.500.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	150 Orang	Orang	30 Orang	30 Orang	17.405.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Orang	17.405.400,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah danatau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	250 Orang	Orang	50 Orang	50 Orang	13.977.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Orang	13.977.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**779.778.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**779.778.500,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	50 Unit Rumah	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	14.114.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Unit Rumah	14.114.400,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	50 Unit Rumah	Unit Rumah	0 Unit Rumah	10 Unit Rumah	21.781.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Unit Rumah	21.781.400,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana KabupatenKota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	100 Rumah Tangga	Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	168.177.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Rumah Tangga	168.177.700,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah KabupatenKota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	100 Rumah Tangga	Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	476.480.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Rumah Tangga	476.480.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program KabupatenKota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	250 Unit Rumah	Unit Rumah	50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	99.225.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Unit Rumah	99.225.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum danatau Rumah Khusus**	**Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum danatau Rumah Khusus Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.226.461.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.226.461.600,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan PemilikPenghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.040.410.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	2.040.410.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum danatau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	37.005.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	37.005.200,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.05	0003	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	149.046.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	149.046.400,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Yang Diterbitkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**49.760.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**49.760.300,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	26.374.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Dokumen	26.374.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.06	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha KPDBU Perumahan UmumRumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.386.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	23.386.300,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**02**	**2.07**		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung SKGB**	**Persentase Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung SKGB Yang Diterbitkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**24.691.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**24.691.800,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung SKBG	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.691.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	24.691.800,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** ***Outcome :Menurunnya luas kawasan kumuh***	**Persentase luas kawasan kumuh < 10 Ha yang ditangani**	**15 %**	**N/A**	**10 %**	**15 %**	**10.779.803.615,00**						**15 %**	**10.779.803.615,00**	
	1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Yang Diterbitkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**56.061.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**56.061.200,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.758.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	23.758.700,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	32.302.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	32.302.500,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Sepuluh Ha**	**Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Sepuluh Ha Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**183.745.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**183.745.300,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	03	2.02	0008	PenyusunanReviewLegalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	115.386.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	115.386.700,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.02	0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah Sepuluh Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.192.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	20.192.100,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.02	0012	PembentukanPembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	5 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	19.224.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Kelompok Masyarakat	19.224.300,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.02	0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program PemugaranPeremajaanPemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.238.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	20.238.700,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.703.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	8.703.500,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Sepuluh Ha**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Sepuluh Ha Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**10.539.997.115,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**10.539.997.115,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	500 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	100 Unit Rumah	1.656.258.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Unit Rumah	1.656.258.500,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	15 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	610.238.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	610.238.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	109.860.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	109.860.300,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	10 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	3.639.253.715,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Ha	3.639.253.715,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Sepuluh Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	350 Unit	0 Unit	0 Unit	50 Unit	1.041.906.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	60 Unit	1.041.906.300,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 Ha	0 Ha	2 Ha	2 Ha	3.482.480.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Ha	3.482.480.300,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** ***Outcome :Meningkatnya jumlah rumah layak huni pada wilayah pencegahan kumuh***	**Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh**	**4.18 %**	**N/A**	**3.69 %**	**3.69 %**	**3.055.410.500,00**			**(PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal**	**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan**		**3.81 %**	**3.055.410.500,00**	
	1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.055.410.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**3.055.410.500,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Sepuluh Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	750 Unit Rumah	Unit Rumah	150 Unit Rumah	150 Unit Rumah	1.479.480.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Unit Rumah	1.479.480.300,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	250 Unit	Unit	0 Unit	50 Unit	796.123.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Unit	796.123.200,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	25 Laporan	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	665.317.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Laporan	665.317.600,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2000 Orang	Orang	400 Orang	400 Orang	58.145.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	400 Orang	58.145.600,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	04	04	2.01	0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1000 Orang	Orang	200 Orang	200 Orang	56.343.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Orang	56.343.800,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** ***Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU perumahan***	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum**	**100 %**	**20 Perumahan**	**100 %**	**100 %**	**7.817.813.400,00**			**(PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal** **(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan**		**100 %**	**7.782.620.900,00**	
	1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.817.813.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**7.782.620.900,00**	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 04 05 2.01 0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	217.213.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	217.213.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 05 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	696.470.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	696.470.900,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 05 2.01 0006	Sosialisasi standar prosedur dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	5 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	102.193.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Kelompok	102.193.300,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 05 2.01 0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	50 Lokasi	1 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	647.027.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Lokasi	647.027.100,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 05 2.01 0009	Kerja Sama PenyediaanPengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	64.587.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	64.587.100,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 05 2.01 0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	100 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	414.268.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Laporan	379.076.400,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 05 2.01 0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	33 Lokasi	Lokasi	0 Lokasi	13 Lokasi	4.856.008.850,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Lokasi	4.856.008.850,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1 04 05 2.01 0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	15 Lokasi	Lokasi	0 Lokasi	3 Lokasi	820.044.250,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Lokasi	820.044.250,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Satuan Polisi Pamong Praja						**41.388.278.000,00**							**41.408.936.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**41.388.278.000,00**							**41.408.936.000,00**	
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**41.388.278.000,00**							**41.408.936.000,00**	
	1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**16.152.377.800,00**						**100 %**	**16.173.035.800,00**	
		Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	1 05 01 2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**78.321.300,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.979.100,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	48.145.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 05 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.419.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 05 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.099.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 05 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.278.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 05 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.398.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12.979.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Laporan	12.979.100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**13.479.568.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**13.479.568.200,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	755 Orang/bulan	Orang/bulan	151 Orang/bulan	151 Orang/bulan	12.828.500.800,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	151 Orang/bulan	12.828.501.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 05 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	381.059.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	381.059.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 05 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	184.959.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	184.959.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 05 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17.734.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	17.734.100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 05 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20.155.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.155.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 05 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	47.158.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	47.158.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**339.218.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**339.218.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1	05	01	2.03	0004	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	339.218.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	339.218.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**394.889.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**394.889.400,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	Paket	0 Paket	1 Paket	180.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	180.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	Orang	5 Orang	20 Orang	165.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Orang	165.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	Orang	50 Orang	100 Orang	49.889.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	100 Orang	49.889.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**594.591.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**594.591.100,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	3.298.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	3.298.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Paket	1 Paket	10 Paket	373.280.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Paket	373.280.900,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Paket	0 Paket	1 Paket	14.123.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	14.123.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Paket	0 Paket	1 Paket	15.026.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	15.026.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Paket	3 Paket	2 Paket	22.720.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	22.720.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	14.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	18.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Laporan	28 Laporan	10 Laporan	101.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Laporan	101.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	32.742.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	32.742.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**184.460.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**184.460.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	84.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	84.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	99.860.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	99.860.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.081.330.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.081.330.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	45.130.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	45.130.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	315 Unit	Unit	63 Unit	63 Unit	1.012.060.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	63 Unit	1.012.060.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	Unit	25 Unit	34 Unit	24.140.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	34 Unit	24.140.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dalam upaya menegakkan ketentraman dan ketertiban***	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**25.235.900.200,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**100 %**	**25.235.900.200,00**	
	1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**24.250.527.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**24.250.527.500,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat KabupatenKota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	313.629.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	313.629.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.018.846.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	4.018.846.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	300 Orang	Orang	0 Orang	60 Orang	272.650.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	60 Orang	272.650.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	20 laporan	laporan	300 laporan	4 laporan	9.068.552.140,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 laporan	9.068.552.140,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	125 Laporan	Laporan	25 Laporan	25 Laporan	9.938.459.360,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	25 Laporan	9.938.459.360,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.674.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	13.674.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	395 Unit	Unit	0 Unit	79 Unit	119.889.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	79 Unit	119.889.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	1505 Orang	Orang	301 Orang	301 Orang	454.825.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	301 Orang	454.825.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah KabupatenKota dan Peraturan BupatiWali Kota**	**Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan BupatiWali Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**705.978.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**705.978.200,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 laporan	laporan	0 laporan	12 laporan	32.846.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 laporan	32.846.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 dokumen	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 dokumen	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah Ruang Pemeriksanaan Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	19 unit	unit	0 unit	7 unit	1.254.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 unit	1.254.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30 Laporan	Laporan	0 Laporan	6 Laporan	16.645.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Laporan	16.645.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75 Laporan	Laporan	2 Laporan	15 Laporan	231.399.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Laporan	231.399.900,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	20 Laporan	Laporan	12 Laporan	4 Laporan	238.883.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	238.883.100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	Laporan	12 Laporan	4 Laporan	134.948.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	134.948.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS KabupatenKota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**279.394.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**279.394.500,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	27.904.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	27.904.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	15 Laporan	Laporan	1 Laporan	3 Laporan	125.745.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	125.745.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	15 Laporan	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	125.745.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	125.745.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						**51.693.138.000,00**							**51.357.553.000,00**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**51.693.138.000,00**							**51.357.553.000,00**	
	1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**51.693.138.000,00**							**51.357.553.000,00**	
	1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**33.017.529.760,00**						**100 %**	**32.681.944.760,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**54.929.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.885.200,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	23.846.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.349.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.111.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.334.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.885.200,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.402.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	13.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**24.703.989.344,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**24.703.989.344,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1934 Orang/bulan	122 Orang/bulan	197 Orang/bulan	250 Orang/bulan	24.117.669.344,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	299 Orang/bulan	24.117.669.344,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	579.360.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	579.360.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.494.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.494.300,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.233.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	2.233.800,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.231.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	2.231.900,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	1 05 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**433.106.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**433.106.500,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	221.128.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	221.128.900,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1.977.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.977.600,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	Orang	25 Orang	30 Orang	210.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	30 Orang	210.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.969.460.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.419.947.800,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.032.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	20.032.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	4 Paket	4 Paket	3 Paket	937.220.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	387.707.900,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	Paket	2 Paket	6 Paket	36.106.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Paket	36.106.200,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	49 Paket	6 Paket	9 Paket	10 Paket	679.957.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	9 Paket	679.957.200,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	36.944.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	36.944.500,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	2 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	16.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	9 Dokumen	16.200.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 05 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	12.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	231.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	25 Laporan	231.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**110.392.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**310.364.600,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	1 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	49 Unit	Unit	10 Unit	2 Unit	29.845.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Unit	29.845.600,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Unit	7 Unit	4 Unit	41.922.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	41.922.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	Unit	8 Unit	13 Unit	38.625.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	13 Unit	38.625.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100% %**	**100 %**	**100 %**	**1.163.412.116,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.163.412.116,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	766.943.536,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Laporan	766.943.536,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	396.468.580,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	396.468.580,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.246.239.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**4.246.239.200,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	44.630.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	44.630.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	359 Unit	76 Unit	71 Unit	71 Unit	3.812.414.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	72 Unit	3.812.414.500,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240 Unit	106 Unit	10 Unit	48 Unit	36.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	48 Unit	36.800.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	3 Unit	10 Unit	2 Unit	200.222.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Unit	200.222.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.09	0010	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	110 Unit	Unit	6 Unit	22 Unit	139.972.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	22 Unit	139.972.700,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	01	2.09	0011	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	140 Unit	Unit	4 Unit	28 Unit	12.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	28 Unit	12.200.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**18.675.608.240,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**100 %**	**18.675.608.240,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	**Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (Response Time 15 Menit)**	**100 %**	**100% response time 15 menit (kebakaran**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**17.933.371.860,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**17.933.371.860,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.003.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	5.003.700,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah KabupatenKota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.737.576.340,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	14.737.576.340,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	776.704.920,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	776.704.920,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.142.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	12.142.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	12.442.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	12.442.800,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2459 Orang	385 Orang	459 Orang	459 Orang	702.779.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	500 Orang	702.779.800,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	04	2.01	0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42.158.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	42.158.900,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	572 Unit	1176 Unit	161 Unit	113 Unit	1.625.818.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	113 Unit	1.625.818.600,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.797.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	10.797.900,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	110 Keluarga	Keluarga	0 Keluarga	22 Keluarga	7.946.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	22 Keluarga	7.946.900,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**9.512.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**9.512.500,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.661.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	4.661.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.851.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	4.851.500,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**187.699.080,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**187.699.080,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	450 Orang	300 Orang	90 Orang	90 Orang	176.828.180,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	90 Orang	176.828.180,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	265 Desa/Kelurahan	100 Desa/Kelurahan	53 Desa/Kelurahan	53 Desa/Kelurahan	3.343.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	53 Desa/Kelurahan	3.343.400,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan MasyarakatRelawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	7.527.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	7.527.500,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Yang Terselenggara**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**545.024.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**545.024.800,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa Membahayakan danatau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.638.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	22.638.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan ManusiaPenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.081.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	23.081.800,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan ManusiaPenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	98.770.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	98.770.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan ManusiaPenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	230 Unit	153 Unit	2 Unit	46 Unit	400.535.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	46 Unit	400.535.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**23.057.875.000,00**							**28.646.189.000,00**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**23.057.875.000,00**							**28.646.189.000,00**	
	1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**23.057.875.000,00**							**28.646.189.000,00**	
	1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** ***Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah***	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**15.242.703.040,00**						**100 %**	**20.831.017.040,00**	
							Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**167.176.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	32.635.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.832.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.951.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.803.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.746.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.475.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	111.732.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	13.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**9.465.740.760,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**9.465.741.260,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan	27/12 Orang/bulan	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	8.979.500.760,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	90 Orang/bulan	8.979.501.260,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	396.240.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	396.240.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	90.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**465.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**465.000.000,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	225.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	225.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	240.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	25 Orang	240.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**459.074.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**387.074.600,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	8.974.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	8.974.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	58.423.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	58.423.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket	14.305.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	14.305.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.190.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	4.190.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	8.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	203.182.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	203.182.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	152.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.847.755.180,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.847.755.180,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.982.311.180,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	1.982.311.180,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	499.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	499.380.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	366.064.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	366.064.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.501.956.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.510.446.000,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	42.880.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	42.880.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	260 Unit	52 Unit	52 Unit	52 Unit	1.153.540.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	52 Unit	1.153.540.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	263 Unit	25 Unit	25 Unit	63 Unit	43.450.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Unit	43.450.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	262.086.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Unit	2.270.576.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**7.815.171.960,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**100 %**	**7.815.171.960,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan bencana	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
	1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana KabupatenKota**	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**82.563.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**82.563.000,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana KabupatenKota Per Jenis Ancaman Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	750 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	32.563.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Orang	32.563.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana KabupatenKota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.241.237.280,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**3.241.237.280,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana KabupatenKota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	10 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	31.823.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Kegiatan	31.823.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupatenkota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	2000 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	34.248.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	400 Orang	34.248.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	75 Kawasan	15 Kawasan	15 Kawasan	15 Kawasan	137.222.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Kawasan	137.222.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC Bencana KabupatenKota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	1470 Orang	150 Orang	294 Orang	294 Orang	60.963.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	294 Orang	60.963.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana KabupatenKota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.944.496.180,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 laporan	2.944.496.180,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana KabupatenKota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	35 Kawasan	15 Kawasan	15 Kawasan	7 Kawasan	32.482.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	7 Kawasan	32.482.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.713.034.140,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.713.034.140,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa PenyakitWabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.613.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	13.613.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana KabupatenKota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	561.937.540,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	561.937.540,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana KabupatenKota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	80 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	35.163.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Orang	35.163.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat KabupatenKota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	250 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	41.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Orang	41.400.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 05 03 2.03 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KabupatenKota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	994.567.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1000 Orang	994.567.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.03 0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	66.351.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	66.351.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.778.337.540,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.778.337.540,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1 05 03 2.04 0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana KabupatenKota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.04 0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana KabupatenKota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	36.019.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	36.019.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.04 0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.04 0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana KabupatenKota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	275 Orang	50 Orang	0 Orang	55 Orang	22.455.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	55 Orang	22.455.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.04 0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana KabupatenKota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	400 Orang	0 Orang	0 Orang	100 Orang	20.884.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	20.884.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana KabupatenKota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	16 Kegiatan	0 Kegiatan	7 Kegiatan	4 Kegiatan	2.261.919.340,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Kegiatan	2.261.919.340,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 05 03 2.04 0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana KabupatenKota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	7 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	41.848.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Lembaga	41.848.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.04 0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas KabKota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	45.210.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	45.210.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.04 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana JITUPASNA dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana RP KabKota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Sosial						**24.650.980.000,00**							**24.665.653.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**24.650.980.000,00**							**24.665.653.000,00**	
	1 06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**24.650.980.000,00**							**24.665.653.000,00**	
	1 06 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**14.027.739.714,00**						**100 %**	**14.042.412.714,00**	
		Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	1 06 01 2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**54.262.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.935.000,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	24.988.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.997.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.997.500,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 06 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.124.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.109.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.105.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	12.937.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Laporan	12.937.500,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**11.542.626.936,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**11.542.627.436,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	475 Orang/bulan	50 Orang/bulan	95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	11.068.386.936,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	95 Orang/bulan	11.068.387.436,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	294.240.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	294.240.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	180.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	180.000.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**157.882.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**157.882.200,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	730 Paket	0 Paket	0 Paket	146 Paket	97.882.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	146 Paket	97.882.200,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	13 Orang	5 Orang	10 Orang	60.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Orang	60.000.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**234.240.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**234.240.500,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	10.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 06 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	98.944.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	98.944.600,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket	12.489.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	12.489.800,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.933.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	9.933.500,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.012.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	10.012.200,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	14.400.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.460.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	16.460.400,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	24 Laporan	17 Laporan	30 Laporan	62.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	30 Laporan	62.000.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**228.274.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**228.274.600,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	60.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	60.400.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	12 Unit	1 Unit	6 Unit	167.874.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	37 Unit	167.874.600,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**616.002.978,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**616.002.978,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	183.482.198,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	183.482.198,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	432.520.780,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	432.520.780,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**858.450.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**858.450.000,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	42.130.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	42.130.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit	17 Unit	13 Unit	38 Unit	556.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	38 Unit	556.380.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 06 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	345 Unit	84 Unit	60 Unit	69 Unit	44.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	69 Unit	44.100.000,00	Dinas Sosial
	1 06 01 2.09 0010	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	215.840.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Unit	215.840.000,00	Dinas Sosial
	1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial**	**70 %**	**N/A**	**50 %**	**50 %**	**1.281.764.400,00**						**50 %**	**1.281.764.400,00**	
		Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan kesejahteraan sosial di luar panti	**Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial Yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kab/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar**	**70 %**	**N/A**	**50 %**	**50 %**							**50 %**		
	1 06 02 2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah KabupatenKota**	**Jumlah pelaksanaan pengawasan pengumpulan sumbangan di Kota Makassar**	**100 Kegiatan**	**30 Kegiatan**	**36 Kegiatan**	**36 Kegiatan**	**51.602.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**36 Kegiatan**	**51.602.400,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 02 2.02 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	180 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	36 Dokumen	51.602.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	36 Dokumen	51.602.400,00	Dinas Sosial
	1 06 02 2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kompetensi**	**100 Orang**	**200 Orang**	**300 Orang**	**300 Orang**	**1.230.162.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**300 Orang**	**1.230.162.000,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 02 2.03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga	200 Lembaga	352.668.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Lembaga	352.668.200,00	Dinas Sosial
	1 06 02 2.03 0011	Pengenalan Penanaman dan Penghayatan NilaiNilai Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1155 Orang	231 Orang	231 Orang	231 Orang	478.808.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	231 Orang	478.808.200,00	Dinas Sosial
	1 06 02 2.03 0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	1000 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	398.685.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Orang	398.685.600,00	Dinas Sosial
	1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**4.474.269.706,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan**	**(PD 8) Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender,**		**100 %**	**4.474.269.706,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Outcome :Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di luar panti	**Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**				**Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan**		**100 %**		
							Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
	1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti**	**100 Orang**	**614 Orang**	**170 Orang**	**170 Orang**	**3.092.531.516,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**170 Orang**	**3.092.531.516,00**	**Dinas Sosial**
							Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	**170 Orang**	**140 Orang**	**170 Orang**	**170 Orang**							**170 Orang**		
							Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	**85 orang**	**39 orang**	**85 orang**	**85 orang**							**85 orang**		
							Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	**85 Orang**	**80 Orang**	**85 Orang**	**85 Orang**							**85 Orang**		
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	870 Orang	898 Orang	120 Orang	150 Orang	240.513.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	160 Orang	240.513.000,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	250 Orang	250 Orang	300 Orang	91.997.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	300 Orang	91.997.100,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	23 Orang	25 Orang	50 Orang	92.329.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Orang	92.329.000,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	225 Orang	20 Orang	30 Orang	57.592.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Orang	57.592.000,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1410 Orang	268 Orang	250 Orang	250 Orang	1.062.956.416,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	260 Orang	1.062.956.416,00	Dinas Sosial

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1420 Orang	225 Orang	250 Orang	260 Orang	201.278.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	260 Orang	201.278.300,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	41 Orang	10 Orang	30 Orang	4.174.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Orang	4.174.000,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	399 Orang	250 Orang	300 Orang	112.666.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	300 Orang	112.666.500,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	399 Orang	250 Orang	300 Orang	1.189.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	300 Orang	1.189.500.000,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	399 Orang	10 Orang	15 Orang	17.268.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Orang	17.268.000,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	120 Orang	8 Orang	15 Orang	19.570.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Orang	19.570.000,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	273 Orang	48 Orang	20 Orang	2.687.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Orang	2.687.200,00	Dinas Sosial
	1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100 Orang**	**100 Orang**	**100 Orang**	**100 Orang**	**1.381.738.190,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 Orang**	**1.381.738.190,00**	**Dinas Sosial**
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	96 Orang	100 Orang	100 Orang	100.798.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	100.798.300,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	96 Orang	100 Orang	100 Orang	106.766.250,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	106.766.250,00	Dinas Sosial
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang	50 Orang	650 Orang	600 Orang	405.854.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	600 Orang	405.854.600,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 06 04 2.02 0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	920 Orang	38 Orang	50 Orang	160 Orang	11.439.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	160 Orang	11.439.600,00	Dinas Sosial
	1 06 04 2.02 0007	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	36 Orang	50 Orang	100 Orang	671.579.040,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	671.579.040,00	Dinas Sosial
	1 06 04 2.02 0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20 Orang	10 Orang	10 Orang	2.106.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Orang	2.106.000,00	Dinas Sosial
	1 06 04 2.02 0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5 Orang	5 Orang	10 Orang	18.718.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Orang	18.718.400,00	Dinas Sosial
	1 06 04 2.02 0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	11 Orang	10 Orang	15 Orang	64.476.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Orang	64.476.000,00	Dinas Sosial
	1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**2.382.505.700,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 8) Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan**		**100 %**	**2.382.505.700,00**	
		Outcome :Meningkatnya kualtias perlindungan dan jamninan sosial bagi masyarakat rentan	**Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi**	**100 %**	**N/A**	**80 %**	**80 %**							**80 %**		
	1 06 05 2.01	**Pemeliharaan AnakAnak Terlantar**	**Jumlah anak terlantar yang keluar dari keterlantaran**	**10 Orang**	**12 Orang**	**10 Orang**	**10 Orang**	**77.049.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**10 Orang**	**77.049.900,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 05 2.01 0001	Penjangkauan AnakAnak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	3 Orang	1 Orang	1 Orang	60.750.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Orang	60.750.000,00	Dinas Sosial
	1 06 05 2.01 0002	Rujukan AnakAnak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	3 Orang	1 Orang	1 Orang	2.700.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Orang	2.700.000,00	Dinas Sosial
	1 06 05 2.01 0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	3 Orang	1 Orang	1 Orang	3.018.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Orang	3.018.900,00	Dinas Sosial
	1 06 05 2.01 0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	50 Orang	12 Orang	10 Orang	10 Orang	10.581.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Orang	10.581.000,00	Dinas Sosial
	1 06 05 2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah KabupatenKota**	**Persentase Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial**	**50 %**	**50 %**	**50 %**	**50 %**	**2.305.455.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**50 %**	**2.305.455.800,00**	**Dinas Sosial**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 06 05 2.02 0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah KabupatenKota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50000 Orang	22366 Orang	10000 Orang	10000 Orang	706.194.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10000 Orang	706.194.900,00	Dinas Sosial
	1 06 05 2.02 0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	361.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	361.500.000,00	Dinas Sosial
	1 06 05 2.02 0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1.123.710.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1000 Orang	1.123.710.000,00	Dinas Sosial
	1 06 05 2.02 0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	20000 Usulan	4000 Usulan	4000 Usulan	4000 Usulan	114.050.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4000 Usulan	114.050.900,00	Dinas Sosial
	1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA** ***Outcome :Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana***	**Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**2.353.160.480,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**100 %**	**2.353.160.480,00**	
	1 06 06 2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial KabupatenKota**	**Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**5000 Orang**	**4890 Orang**	**5000 Orang**	**5000 Orang**	**2.049.780.480,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**5000 Orang**	**2.049.780.480,00**	**Dinas Sosial**
	1 06 06 2.01 0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25000 Orang	4890 Orang	7000 Orang	5000 Orang	1.192.870.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5000 Orang	1.192.870.200,00	Dinas Sosial
	1 06 06 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25000 Orang	4890 Orang	7000 Orang	5000 Orang	319.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5000 Orang	319.500.000,00	Dinas Sosial
	1 06 06 2.01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	552 Orang	500 Orang	500 Orang	258.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	500 Orang	258.000.000,00	Dinas Sosial
	1 06 06 2.01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	37 Orang	300 Orang	300 Orang	65.150.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	300 Orang	65.150.200,00	Dinas Sosial

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	20000 Orang	4493 Orang	6000 Orang	4000 Orang	214.260.080,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4000 Orang	214.260.080,00	Dinas Sosial
	1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana KabupatenKota**	**Jumlah Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan becana**	**60 Orang**	**60 Orang**	**60 Orang**	**60 Orang**	**303.380.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**60 Orang**	**303.380.000,00**	**Dinas Sosial**
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	303.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	60 Orang	303.380.000,00	Dinas Sosial
	1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** ***Outcome :Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kota***	**Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**131.540.000,00**						**100 %**	**131.540.000,00**	
	1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional KabupatenKota**	**Jumlah taman makam pahlawan nasional yang mendapatkan pemeliharaan di Kota Makassar**	**1 Makam**	**1 Makam**	**1 Makam**	**1 Makam**	**131.540.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**1 Makam**	**131.540.000,00**	**Dinas Sosial**
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional KabupatenKota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	5 Makam	1 Makam	1 Makam	1 Makam	107.540.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Makam	107.540.000,00	Dinas Sosial
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional KabupatenKota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	24.000.000,00	Dinas Sosial
						Dinas Ketenagakerjaan						**45.300.538.000,00**							**45.249.434.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**45.300.538.000,00**							**45.249.434.000,00**	
	2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**45.300.538.000,00**							**45.249.434.000,00**	
	2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**13.447.520.520,00**						**100 %**	**13.396.416.520,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**57.213.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**58.241.200,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	38.972.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Ketenagakerjaan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.528.300,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.528.300,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.528.300,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.528.300,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8.128.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	8.128.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**10.994.885.972,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**10.994.885.972,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	72 Orang/bulan	79 Orang/bulan	72 Orang/bulan	10.553.957.972,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	72 Orang/bulan	10.553.957.972,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	275.904.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	275.904.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	165.024.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	165.024.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	**07**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2	07	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**154.991.040,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**154.991.040,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	10.000.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	81.991.040,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	81.991.040,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	73 Orang	72 Orang	14 Orang	63.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	14 Orang	63.000.000,00	Dinas Ketenagakerjaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 07 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**561.880.300,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**561.880.300,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2 07 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.434.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	11.434.800,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	53.867.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	53.867.200,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	36.431.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	36.431.500,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.030.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	15.030.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	26.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	26.100.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Laporan	12 Laporan	20 Laporan	43 Laporan	350.300.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	43 Laporan	350.300.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	68.716.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	68.716.800,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**269.331.300,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**217.199.300,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2 07 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	86 Unit	36 Unit	6 Unit	69.096.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Unit	16.964.500,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	113 Unit	0 Unit	15 Unit	200.234.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Unit	200.234.800,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**605.818.708,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**605.818.708,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2 07 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	161.306.480,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	161.306.480,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	346.701.648,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	346.701.648,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	97.810.580,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	97.810.580,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**467.400.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**467.400.000,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 07 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	44.380.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	279.760.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	18 Unit	279.760.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	490 Unit	98 Unit	54 Unit	98 Unit	42.940.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	98 Unit	42.940.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 01 2.09 0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.320.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	100.320.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** ***Outcome :Terkelolanya informasi tenaga kerja***	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**100 %**	**96.67%**	**97.50 %**	**97.50 %**	**121.615.100,00**						**98.33 %**	**121.615.100,00**	
	2 07 02 2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja RTK**	**Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun**	**1 Dokumen**	**Dokumen**	**0 Dokumen**	**1 Dokumen**	**121.615.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**1 Dokumen**	**121.615.100,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2 07 02 2.01 0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.913.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	30.913.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 02 2.01 0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	250 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	90.702.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Orang	90.702.100,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** ***Outcome :Meningkatnya produktivitas dan kompetensi tenaga kerja***	**Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitas-nya**	**25.4 %**	**20.49%**	**21.21 %**	**21.21 %**	**1.725.506.000,00**			**(PN 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**22.22 %**	**1.725.506.000,00**	
	2 07 03 2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**100 %**	**%**	**0 %**	**100 %**	**854.535.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**854.535.800,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2 07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang	240 Orang	176 Orang	32 Orang	202.476.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	32 Orang	202.476.700,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 03 2.01 0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	50 Lembaga	50 Lembaga	20 Lembaga	10 Lembaga	8.013.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Lembaga	8.013.700,00	Dinas Ketenagakerjaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 07 03 2.01 0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	640 Orang	0 Orang	0 Orang	128 Orang	644.045.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	128 Orang	644.045.400,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 03 2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**100 Lembaga**	**Lembaga**	**0 Lembaga**	**100 Lembaga**	**60.330.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 Lembaga**	**60.330.900,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2 07 03 2.02 0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	500 Lembaga	0 Lembaga	50 Lembaga	100 Lembaga	60.330.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Lembaga	60.330.900,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 03 2.03	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi**	**2 Perizinan**	**Perizinan**	**0 Perizinan**	**2 Perizinan**	**101.377.180,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**2 Perizinan**	**101.377.180,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2 07 03 2.03 0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	1 Perizinan	12 Perizinan	1 Perizinan	101.377.180,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Perizinan	101.377.180,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 03 2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas**	**150 Perusahaan**	**Perusahaan**	**0 Perusahaan**	**150 Perusahaan**	**322.457.420,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**150 Perusahaan**	**322.457.420,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2 07 03 2.04 0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	750 Perusahaan	90 Perusahaan	100 Perusahaan	150 Perusahaan	322.457.420,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Perusahaan	322.457.420,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 03 2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Dokumen Hasil Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di TIngkat Daerah**	**1 Dokumen**	**Dokumen**	**0 Dokumen**	**1 Dokumen**	**386.804.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**1 Dokumen**	**386.804.700,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2 07 03 2.05 0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	386.804.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	386.804.700,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar**	**65 %**	**60.05%**	**61 %**	**61 %**	**1.620.504.300,00**			**(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**62 %**	**1.620.504.300,00**	
		Outcome :Meningkatnya layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja									**(PN 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**(PD 3) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan**				

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	(PD 8) Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan				
	2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan, diberdayakan dan mendapatkan fasilitasi layanan**	**2290 Orang**	**Orang**	**0 Orang**	**2290 Orang**	**966.629.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**2290 Orang**	**966.629.900,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	100 Orang	0 Orang	0 Orang	20 Orang	52.947.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Orang	52.947.200,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	12500 Orang	2368 Orang	2500 Orang	2500 Orang	122.427.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2500 Orang	122.427.400,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	400 Orang	0 Orang	100 Orang	80 Orang	37.559.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	80 Orang	37.559.200,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	500 Orang	50 Orang	100 Orang	100 Orang	390.375.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	390.375.200,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	700 Orang	183 Orang	140 Orang	140 Orang	363.320.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	140 Orang	363.320.900,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	**07**	**04**	**2.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta LPTKS dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Jumlah LPTKS yang diterbitkan perizinannya, dilakukan pengawasan dan pengendalian**	**10 Lembaga**	**Lembaga**	**0 Lembaga**	**10 Lembaga**	**141.912.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**10 Lembaga**	**141.912.900,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2	07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	25 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	5 Lembaga	60.818.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Lembaga	60.818.400,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	25 Lembaga	5 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	81.094.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Lembaga	81.094.500,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**100 %**	**%**	**0 %**	**100 %**	**426.302.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**426.302.500,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	40.478.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	40.478.400,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	30000 Orang	3836 Orang	6000 Orang	6000 Orang	65.646.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6000 Orang	65.646.400,00	Dinas Ketenagakerjaan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	04	2.03	0003	Job FairBursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2500 Orang	0 Orang	0 Orang	500 Orang	320.177.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	500 Orang	320.177.700,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan di Daerah KabupatenKota**	**Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan**	**130 Orang**	**Orang**	**0 Orang**	**130 Orang**	**85.659.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**130 Orang**	**85.659.000,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia PMIPekerja Migran Indonesia PMI	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	500 Orang	0 Orang	150 Orang	100 Orang	33.790.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	33.790.600,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	100 Orang	40 Orang	40 Orang	20 Orang	51.868.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Orang	51.868.400,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** ***Outcome :Meningkatnya kualitas hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja***	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerja-an)**	**43 %**	**40.26%**	**41 %**	**41 %**	**28.385.392.080,00**						**41.50 %**	**28.385.392.080,00**	
	2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	**105 Perusahaan**	**Perusahaan**	**0 Perusahaan**	**105 Perusahaan**	**171.476.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**105 Perusahaan**	**171.476.400,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	500 Perusahaan	184 Perusahaan	0 Perusahaan	100 Perusahaan	55.130.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Perusahaan	55.130.400,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	100 Perusahaan	17 Perusahaan	0 Perusahaan	20 Perusahaan	46.178.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Perusahaan	46.178.400,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.167.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	70.167.600,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**250 Perkara**	**Perkara**	**0 Perkara**	**250 Perkara**	**28.213.915.680,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**250 Perkara**	**28.213.915.680,00**	**Dinas Ketenagakerjaan**
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang BerakibatBerdampak pada Kepentingan di Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	300 Perkara	47 Perkara	60 Perkara	60 Perkara	350.419.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	60 Perkara	350.419.000,00	Dinas Ketenagakerjaan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang BerakibatBerdampak pada Kepentingan di satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1000 Perkara	264 Perkara	200 Perkara	200 Perkara	93.801.280,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Perkara	93.801.280,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat PekerjaSerikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	60 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	14.057.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	14.057.700,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah KabupatenKota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	5 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga	1 Lembaga	272.976.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Lembaga	272.976.400,00	Dinas Ketenagakerjaan
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	407330 Orang	34782 Orang	34722 Orang	81466 Orang	27.482.661.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	81466 Orang	27.482.661.300,00	Dinas Ketenagakerjaan
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						**21.081.710.000,00**							**16.071.453.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.081.710.000,00**							**16.071.453.000,00**	
	2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**21.081.710.000,00**							**16.071.453.000,00**	
	2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**11.172.517.808,00**						**100 %**	**11.162.260.808,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**78.672.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.415.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	46.702.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.557.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.415.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.415.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.478.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.519.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	13.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**9.382.328.348,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**9.382.328.348,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	347 Orang/bulan	33 Orang/bulan	66 Orang/bulan	68 Orang/bulan	8.991.626.248,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	69 Orang/bulan	8.991.626.248,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	380.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	380.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.733.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	5.733.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.569.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	4.569.100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**146.831.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**146.831.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	375 Paket	0 Paket	0 Paket	75 Paket	56.831.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	75 Paket	56.831.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	17 Orang	52 Orang	16 Orang	90.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	16 Orang	90.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**401.555.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**401.555.800,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12 Paket	10 Paket	1 Paket	59.043.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	59.043.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	5 Dokumen	18 Dokumen	12 Dokumen	21.512.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	21.512.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	11.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	20 Laporan	8 Laporan	30 Laporan	310.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	30 Laporan	310.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**32.819.900,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**32.819.900,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	0 Unit	0 Unit	7 Unit	32.819.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Unit	32.819.900,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**393.810.760,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**393.810.760,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	323.573.760,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	323.573.760,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	21.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	49.237.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	49.237.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**400.500.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**400.500.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	8 Unit	13 Unit	13 Unit	378.820.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	13 Unit	378.820.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155 Unit	15 Unit	31 Unit	31 Unit	21.680.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	31 Unit	21.680.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan***	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**95 %**	**71%**	**75 %**	**75 %**	**5.521.945.100,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 8) Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan**		**80 %**	**521.945.100,00**	
	2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan KabupatenKota**	**Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**267.259.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**267.259.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	93.177.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Dokumen	93.177.700,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	20 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	109.064.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	109.064.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	2.01	0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	10 Kebijakan	0 Kebijakan	0 Kebijakan	2 Kebijakan	39.888.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Kebijakan	39.888.100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	2.01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah	250 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	50 Lembaga	25.128.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Lembaga	25.128.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan KabupatenKota**	**Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.205.660.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**205.660.800,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	95 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	10 Lembaga	5.146.281.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Lembaga	146.281.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	2.02	0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	215 Lembaga	0 Lembaga	25 Lembaga	35 Lembaga	29.946.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	40 Lembaga	29.946.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	500 Orang	100 Orang	0 Orang	100 Orang	29.432.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	29.432.200,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan KabupatenKota**	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**49.025.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**49.025.300,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	02	2.03	0007	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	190 Lembaga	Lembaga	0 Lembaga	25 Lembaga	24.532.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Lembaga	24.532.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	2.03	0008	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	24.493.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	24.493.300,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** ***Outcome :Meningkatanya kualitas dan kuantitas penanganan kekerasan terhadap perempuan***	**Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**	**0.60 %**	**1.05%**	**1 %**	**1 %**	**2.186.910.844,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 8) Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan**		**0.90 %**	**2.186.910.844,00**	
	2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**117.121.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**117.121.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	03	2.01	0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	72.121.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Dokumen	72.121.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	15 Lembaga	Lembaga	0 Lembaga	3 Lembaga	45.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Lembaga	45.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan KabupatenKota**	**Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**579.076.244,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**579.076.244,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	03	2.02	0004	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota	15 Orang	Orang	0 Orang	3 Orang	6.750.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Orang	6.750.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	03	2.02	0005	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	1000 Orang	Orang	0 Orang	200 Orang	306.432.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Orang	306.432.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	03	2.02	0006	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	250 Orang	Orang	0 Orang	50 Orang	179.076.544,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Orang	179.076.544,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	1000 Orang	Orang	0 Orang	200 Orang	15.417.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Orang	15.417.700,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	03	2.02	0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	20 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	71.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	71.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.490.713.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.490.713.600,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	03	2.03	0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	20 Lembaga	Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga	39.283.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Lembaga	39.283.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	03	2.03	0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	510 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	102 Laporan	1.375.525.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	102 Laporan	1.375.525.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	825 Orang	0 Orang	0 Orang	165 Orang	75.904.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	165 Orang	75.904.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** ***Outcome :Meningkatnya kuantitas keluarga yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan HAK anak***	**Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar**	**Utama 313**	**Utama (285)**	**Utama 293**	**Utama 293**	**470.002.300,00**						**Utama 303**	**470.002.300,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**133.261.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**133.261.800,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	04	2.02	0005	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	20 Lembaga	Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga	51.907.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Lembaga	51.907.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	04	2.02	0007	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	75 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	5 Lembaga	81.354.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Lembaga	81.354.200,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.740.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**336.740.500,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	04	2.03	0004	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	1500 Orang	104 Orang	150 Orang	200 Orang	336.740.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	250 Orang	336.740.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** ***Outcome :Meningkatnya kualitas ketersediaan data gender dan anak***	**Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan**	**85 %**	**60%**	**65 %**	**65 %**	**89.540.700,00**						**70 %**	**89.540.700,00**	
	2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**89.540.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**89.540.700,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	89.540.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	89.540.700,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** ***Outcome :Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif***	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**71.55 %**	**61.65%**	**65.55 %**	**65.55 %**	**396.841.200,00**				**(PD 8) Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan**		**67.05 %**	**396.841.200,00**	
	2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan KabupatenKota**	**Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**121.611.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**121.611.600,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	11 Lembaga	58.333.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Lembaga	58.333.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	2.01	0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	63.277.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	63.277.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan KabupatenKota**	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**275.229.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**275.229.600,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	06	2.02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	1750 Orang	0 Orang	0 Orang	350 Orang	100.373.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	350 Orang	100.373.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	2.02	0006	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	10.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	06	2.02	0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	55 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	11 Lembaga	10.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Lembaga	10.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	2.02	0009	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	55 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	11 Lembaga	154.056.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Lembaga	154.056.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** ***Outcome :Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi terhadap anak***	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**1.243.952.048,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 8) Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan**		**100 %**	**1.243.952.048,00**	
	2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**143.871.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**143.871.200,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	30 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	66.955.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Dokumen	66.955.200,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	20 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	76.916.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Kegiatan	76.916.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**996.534.048,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**996.534.048,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2500 Orang	0 Orang	0 Orang	500 Orang	455.128.704,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	500 Orang	455.128.704,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.02	0009	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2500 Orang	0 Orang	0 Orang	500 Orang	342.196.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	500 Orang	342.196.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.02	0011	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	30 Orang	0 Orang	0 Orang	6 Orang	13.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Orang	13.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.02	0012	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	350 Orang	0 Orang	0 Orang	70 Orang	179.076.544,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	70 Orang	179.076.544,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.02	0015	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	100 Orang	Orang	0 Orang	20 Orang	6.632.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Orang	6.632.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**103.546.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**103.546.800,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	20 Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	15.280.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	15.280.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	2.03	0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	35 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	88.266.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	7 Dokumen	88.266.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Ketahanan Pangan						**17.002.874.000,00**							**17.017.875.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.002.874.000,00**							**17.017.875.000,00**	
	2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**17.002.874.000,00**							**17.017.875.000,00**	
	2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**11.149.980.200,00**						**100 %**	**11.164.981.200,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**53.999.900,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	24.999.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	18 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	18 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	13.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.606.473.191,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**8.606.474.091,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	447 Orang/bulan	42 Orang/bulan	72 Orang/bulan	85 Orang/bulan	8.257.603.491,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	88 Orang/bulan	8.257.604.391,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	292.320.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	292.320.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	56.549.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	56.549.700,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	**09**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**145.500.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**145.500.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	n/a Paket	1 Paket	1 Paket	67.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	67.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	87 Orang	15 Orang	10 Orang	78.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Orang	78.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**977.545.649,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**977.545.649,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100.694.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Paket	100.694.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	598.443.149,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	598.443.149,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.822.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	7.822.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	162.966.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	19 Laporan	162.966.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	107.620.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	107.620.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**53.760.300,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**53.760.300,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	n/a Unit	1 Unit	3 Unit	53.760.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	53.760.300,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**709.751.160,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**709.751.160,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	n/a Laporan	2 Laporan	2 Laporan	27.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	27.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	55.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	55.800.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	626.951.160,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	626.951.160,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**266.950.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**266.950.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.630.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	43.630.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	9 Unit	10 Unit	11 Unit	167.350.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	11 Unit	167.350.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	355 Unit	68 Unit	57 Unit	71 Unit	55.970.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	71 Unit	55.970.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Tingkat ketersediaan energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)**	**3050 kkal/kapita**	**2812 kkal/kapita**	**2825 kkal/kapita**	**2850 kkal/kapita**	**4.295.230.500,00**				**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**2875 kkal/kapita**	**4.295.230.500,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas penganekara-gaman pangan di masyarakat	**Tingkat konsumsi energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi**	**2047 kkal/kapita**	**2041 kkal/kapita**	**2042 kkal/kapita**	**2043 kkal/kapita**							**2044 kkal/kapita**		
	2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah KabupatenKota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah KabupatenKota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Yang Terlaksana**	**100 %**	**90,4 %**	**100 %**	**100 %**	**1.129.842.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.129.842.800,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	15 Laporan	n/a Laporan	2 Laporan	3 Laporan	914.773.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	914.773.600,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	750 Keluarga	0 Keluarga	150 Keluarga	150 Keluarga	33.872.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Keluarga	33.872.600,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di KabupatenKota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	15 laporan	n/a laporan	3 laporan	3 laporan	115.603.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 laporan	115.603.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	5 Dokumen	n/a Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65.593.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	65.593.600,00	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan PerkapitaTahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan PerkapitaTahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.165.387.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**3.165.387.700,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	56.393.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	56.393.200,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	10 Laporan	n/a Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.236.702.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	2.236.702.300,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	119.019.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	119.019.700,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	03	2.04	0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	753.272.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	753.272.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** ***Outcome :Meningkatnya jumlah wilayah tahan pangan sesuai kewenangan kota***	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**1.26 %**	**1.31%**	**1.30 %**	**1.30 %**	**544.825.300,00**				**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**1.29 %**	**544.825.300,00**	
	2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**121.614.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**121.614.700,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	121.614.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	121.614.700,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan KabupatenKota**	**Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan KabupatenKota Yang Terlaksana**	**100 %**	**92,5 %**	**100 %**	**100 %**	**423.210.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**423.210.600,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	178.249.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	178.249.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi KabupatenKota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	15 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	213.010.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	213.010.700,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi KabupatenKota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	5 Dokumen	N/A Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	31.950.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	31.950.900,00	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** *Outcome :Meningkatnya keamanan dan mutu pangan*	**Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar**	**80 %**	**100%**	**80 %**	**80 %**	**1.012.838.000,00**						**80 %**	**1.012.838.000,00**	
	2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah KabupatenKota Yang Terlaksana**	**80 %**	**75,6 %**	**80 %**	**80 %**	**1.012.838.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**80 %**	**1.012.838.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah KabupatenKota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	172.420.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	172.420.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah KabupatenKota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	665.913.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	665.913.600,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	174.504.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	174.504.400,00	Dinas Ketahanan Pangan
						Dinas Pertanahan						**17.052.128.000,00**							**16.370.378.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.052.128.000,00**							**16.370.378.000,00**	
	2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**17.052.128.000,00**							**16.370.378.000,00**	
	2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**7.611.725.168,00**						**100 %**	**6.929.975.168,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**10**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**57.931.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.975.800,00**	**Dinas Pertanahan**
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	24.999.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.998.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.998.700,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.995.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.995.600,00	Dinas Pertanahan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	10	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.995.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.995.800,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.986.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.986.100,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.956.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	-	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.999.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	12.999.600,00	Dinas Pertanahan
	2	**10**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.406.980.508,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**5.368.423.808,00**	**Dinas Pertanahan**
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	5.005.687.008,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	12 Orang/bulan	5.005.687.208,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	256.334.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	256.334.300,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	72.907.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	72.907.600,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	38.556.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	-	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.014.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	6.014.600,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	27.480.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	27.480.100,00	Dinas Pertanahan
	2	**10**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Pertanahan**
	2	10	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Pertanahan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**10**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.039.813.740,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**428.776.240,00**	**Dinas Pertanahan**
	2	10	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	286.276.240,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	286.276.240,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	692.037.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	-	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	10 Orang	5 Orang	5 Orang	61.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Orang	61.500.000,00	Dinas Pertanahan
	2	**10**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**363.086.520,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**289.886.520,00**	**Dinas Pertanahan**
	2	10	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	10 Paket	5 Paket	5 Paket	112.550.020,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	87.350.020,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	29.733.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Paket	29.733.500,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	32.483.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Paket	32.483.000,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	17.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	17.400.000,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	72.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	13 Laporan	72.000.000,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98.920.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.920.000,00	Dinas Pertanahan
	2	**10**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**42.742.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**42.742.800,00**	**Dinas Pertanahan**
	2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	42.742.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	42.742.800,00	Dinas Pertanahan
	2	**10**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**365.170.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**365.170.000,00**	**Dinas Pertanahan**
	2	10	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	53.130.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	53.130.000,00	Dinas Pertanahan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	127.350.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	11 Unit	127.350.000,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	34.690.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	22 Unit	34.690.000,00	Dinas Pertanahan
	2	10	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Unit	150.000.000,00	Dinas Pertanahan
	2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** ***Outcome :Meningkatnya penanganan sengketa tanah***	**Persentase penanganan sengketa tanah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**190.693.040,00**						**100 %**	**190.693.040,00**	
	2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Diselesaikan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**190.693.040,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**190.693.040,00**	**Dinas Pertanahan**
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 Berita Acara	12 Berita Acara	12 Berita Acara	12 Berita Acara	69.592.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Berita Acara	69.592.000,00	Dinas Pertanahan
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	121.101.040,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	121.101.040,00	Dinas Pertanahan
	2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah***	**Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunann**	**100 %**	**20%**	**100 %**	**100 %**	**5.689.697.192,00**						**100 %**	**5.689.697.192,00**	
	2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota**	**Persentase Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Diselesaikan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.689.697.192,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**5.689.697.192,00**	**Dinas Pertanahan**
	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	15 Dokumen	20% Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	37.642.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	37.642.000,00	Dinas Pertanahan
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.652.055.192,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	5.652.055.192,00	Dinas Pertanahan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota yang disertifikatkan**	**72 %**	**30.6%**	**40.20 %**	**40.20 %**	**3.560.012.600,00**						**48 %**	**3.560.012.600,00**	
						Outcome :Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum atas tanah	**Persentase tanah aset pemerintah kota yang diamankan melalui pengamanan fisik**	**83 %**	**41%**	**46 %**	**46 %**							**55 %**		
	2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.560.012.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**3.560.012.600,00**	**Dinas Pertanahan**
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20 Laporan	12 Laporan Laporan	4 Laporan	4 Laporan	800.847.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	800.847.200,00	Dinas Pertanahan
	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	375 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	840.219.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	75 Dokumen	840.219.000,00	Dinas Pertanahan
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	425 Dokumen	85 Dokumen	85 Dokumen	85 Dokumen	1.918.946.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	85 Dokumen	1.918.946.400,00	Dinas Pertanahan
						Dinas Lingkungan Hidup						**123.934.597.000,00**							**102.201.067.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**123.934.597.000,00**							**102.201.067.000,00**	
	2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**123.934.597.000,00**							**102.201.067.000,00**	
	2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**32.763.472.181,00**						**100 %**	**31.481.164.331,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**156.308.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	126.997.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.174.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 11 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.135.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.000.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	13.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**26.058.379.581,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**26.058.379.931,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2 11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	825 Orang/bulan	165 Orang/bulan	165 Orang/bulan	165 Orang/bulan	25.252.359.181,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	165 Orang/bulan	25.252.359.531,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	475.440.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	475.440.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	228.538.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	228.538.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	75.028.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	75.028.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	27.014.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	27.014.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.094.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**924.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2 11 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1300 Paket	0 Paket	0 Paket	260 Paket	151.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	260 Paket	151.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1375 Orang	110 Orang	110 Orang	275 Orang	1.942.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	275 Orang	772.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**760.054.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**760.054.100,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 11 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	3 Paket	3 Paket	6 Paket	15.450.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Paket	15.450.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	170 Paket	3 Paket	3 Paket	34 Paket	102.477.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	34 Paket	102.477.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	70 Paket	0 Paket	0 Paket	14 Paket	37.264.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	14 Paket	37.264.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	3 Paket	3 Paket	6 Paket	305.642.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Paket	305.642.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.220.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.220.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	294.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	294.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**721.981.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**721.981.500,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2 11 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	105 Unit	0 Unit	0 Unit	21 Unit	6.040.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	21 Unit	6.040.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	835 Unit	0 Unit	0 Unit	167 Unit	715.941.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	167 Unit	715.941.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.994.600.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.969.600.800,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2 11 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.052.384.220,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	1.052.384.220,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	942.216.580,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	892.216.580,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**978.148.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**978.148.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2 11 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	27.040.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	27.040.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	320.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Unit	320.100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	275 Unit	55 Unit	55 Unit	55 Unit	47.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	55 Unit	47.100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	583.908.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	583.908.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** ***Outcome :Terpenuhinya dokumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup***	**Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**0 %**	**1 Dokumen**	**0 %**	**0 %**	**-**						**100 %**	**100.000.000,00**	
	2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** ***Outcome :Meningkatnya kualitas pemenuhan baku mutu lingkungan***	**Persentase penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**2.676.955.080,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**100 %**	**2.676.955.080,00**	
	2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup KabupatenKota**	**Persentase Pencegahan Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.353.478.380,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.353.478.380,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	233.649.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	233.649.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	50 Lokasi	15 Lokasi	0 Lokasi	10 Lokasi	113.466.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Lokasi	113.466.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	149.161.880,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	149.161.880,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	100 Paket	0 Paket	0 Paket	20 Paket	194.902.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Paket	194.902.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupatenkota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.662.297.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	1.662.297.700,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemulihan Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**323.476.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**323.476.700,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	181.110.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Kegiatan	181.110.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupatenkota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	142.366.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Kegiatan	142.366.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** ***Outcome :Meningkatnya pengelolaan RTH Publik***	**Persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik**	**7.36 %**	**5.66%**	**6.23 %**	**6.23 %**	**26.057.559.260,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**6.51 %**	**27.157.559.260,00**	
	2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**26.057.559.260,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**27.157.559.260,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	8 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	331.463.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	331.463.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Ha	100 Ha	100 Ha	110 Ha	10.734.954.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	115 Ha	10.464.954.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	130 Orang	27 Orang	38 Orang	35 Orang	3.394.023.660,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	35 Orang	3.394.023.660,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	321 Unit	58 Unit	57 Unit	58 Unit	11.597.118.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	60 Unit	12.767.118.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** ***Outcome :Meningkatnya pengendalian pengelolaan limbah yang ramah lingkungan***	**Persentase limbah B3 yang terkelola**	**100 %**	**97%**	**100 %**	**100 %**	**601.597.500,00**						**100 %**	**601.597.500,00**	
	2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Persentase Penyimpanan sementara Limbah B3 Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**93.359.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**93.359.800,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	315 Dokumen	41 Dokumen	0 Dokumen	60 Dokumen	34.654.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	60 Dokumen	34.654.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	05	2.01	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	310 Usaha	54 Usaha	0 Usaha	60 Usaha	58.705.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	60 Usaha	58.705.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**508.237.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**508.237.700,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan Pemanfaatan Pengolahan danatau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	442.899.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	442.899.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	05	2.02	0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupatenkota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	330 Usaha	0 Usaha	0 Usaha	60 Usaha	65.337.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	60 Usaha	65.337.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** ***Outcome :Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap regulasi Lingkungan HIdup***	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**	**30.77 %**	**24.59%**	**61.50 %**	**61.50 %**	**605.570.400,00**						**53.80 %**	**605.570.400,00**	
	2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha danatau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota**	**Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diawasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**605.570.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**605.570.400,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 11 06 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan danatau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	300 Dokumen	60 Dokumen	1 Dokumen	60 Dokumen	372.113.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	60 Dokumen	372.113.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 06 2.01 0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	325 Badan Usaha	60 Badan Usaha	65 Badan Usaha	65 Badan Usaha	233.457.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	65 Badan Usaha	233.457.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** ***Outcome :Peningkatnya kuantitas dan kuantitas penggerak peduli Lingkungan Hidup Kota***	**Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang diselenggarakan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**1.413.344.100,00**						**100 %**	**1.413.344.100,00**	
	2 11 08 2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terselenggara**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.413.344.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.413.344.100,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2 11 08 2.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	391.687.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	391.687.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 08 2.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1500 Orang	240 Orang	100 Orang	260 Orang	895.326.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	280 Orang	895.326.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 08 2.01 0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	300 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	51.815.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	40 Keluarga	51.815.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 08 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formallembaga masyarakatkomunitaskelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1250 Lembaga	100 Lembaga	30 Lembaga	150 Lembaga	74.515.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Lembaga	74.515.600,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** ***Outcome :Meningkatnya penyelesaian pengaduan/sengketa/tindak pidana lingkungan hidup***	**Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**388.362.260,00**						**100 %**	**433.362.260,00**	
	2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH KabupatenKota**	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**388.362.260,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**433.362.260,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupatenkota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	15 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	3 Perkara	28.662.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Perkara	28.662.200,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	50 Pengaduan	12 Pengaduan	12 Pengaduan	10 Pengaduan	338.654.260,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Pengaduan	338.654.260,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	10	2.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Sanksi	1 Sanksi	0 Sanksi	1 Sanksi	21.045.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Sanksi	21.045.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** ***Outcome :Meningkatnya pengelolaan persampahan***	**Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah**	**35 %**	**2.01%**	**6 %**	**10 %**	**59.427.736.219,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**18 %**	**37.731.514.069,00**	
	2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pengelolaan Sampah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**58.815.322.219,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**37.119.100.069,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	20 Kelompok	6.223.014.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Kelompok	6.223.014.300,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	56.725.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	56.725.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPATPSTSPA KabupatenKota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	60 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	35.872.133.747,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Unit	14.175.911.597,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupatenkota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.652.995.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	1.652.995.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan pembinaan verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupatenkota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	150 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	30 Dokumen	59.608.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Dokumen	59.608.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPSR PDU TPST TPS SPA PSELPLTSa RDF pusat pengomposan biodigester Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2175399 Ton	388.382 Ton	0 Ton	411731 Ton	55.218.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	423405 Ton	55.218.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	15 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	2.035.171.040,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	2.035.171.040,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPATPST kabupatenkota atau TPATPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1247522.05 Ton	290.245,55 Ton	282247.01 Ton	275733.01 Ton	9.875.969.380,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	261947.01 Ton	9.875.969.380,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	80.949.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	80.949.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0026	Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi	50 Unit	0 Unit	0 Unit	10 Unit	303.884.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Unit	303.884.300,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3000 Ton	466.61 Ton	450 Ton	500 Ton	2.599.651.552,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	550 Ton	2.599.651.552,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**11**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**Persentase Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Yang Dibina dan Diawasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**612.414.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**612.414.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	11	11	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	150 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	20 Laporan	75.514.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	25 Laporan	75.514.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	450 Unit	70 Unit	70 Unit	80 Unit	458.766.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	85 Unit	458.766.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	78.133.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	78.133.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**20.552.872.000,00**							**20.558.179.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.552.872.000,00**							**20.558.179.000,00**	
	2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**20.552.872.000,00**							**20.558.179.000,00**	
	2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**15.978.077.020,00**						**100 %**	**15.983.384.020,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**63.693.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	33.723.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.291.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.291.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.136.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.136.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.112.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	13.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.066.725.052,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**12.066.725.152,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	855 Orang/bulan	50 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100 Orang/bulan	11.642.962.652,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	100 Orang/bulan	11.642.962.752,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	268.336.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	268.336.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	148.007.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	148.007.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.419.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	7.419.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**303.650.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**303.650.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	870 Paket	Paket	0 Paket	160 Paket	114.750.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	170 Paket	114.750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Orang	10 Orang	10 Orang	97.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Orang	97.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	430 Orang	Orang	0 Orang	75 Orang	91.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	80 Orang	91.400.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**664.627.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**664.627.700,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	88 Paket	Paket	0 Paket	10 Paket	9.210.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Paket	9.210.800,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	Paket	0 Paket	20 Paket	43.915.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	25 Paket	43.915.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75 Paket	Paket	0 Paket	10 Paket	22.093.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	22.093.200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	Paket	10 Paket	10 Paket	35.246.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Paket	35.246.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	Paket	0 Paket	15 Paket	14.427.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	18 Paket	14.427.100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	13.920.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.920.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.280.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	5.280.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	301.646.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Laporan	301.646.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11450 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	2200 Dokumen	218.888.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2200 Dokumen	218.888.300,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**549.483.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**549.483.800,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Unit	Unit	0 Unit	10 Unit	16.821.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Unit	16.821.800,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	83 Unit	Unit	0 Unit	15 Unit	432.662.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Unit	432.662.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	10 Unit	Unit	0 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Unit	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.200.087.368,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.200.087.368,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	33.363.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	33.363.600,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	568.930.368,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	568.930.368,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	597.793.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	597.793.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**793.810.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**793.810.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Unit	0 Unit	1 Unit	43.630.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	43.630.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit	Unit	0 Unit	38 Unit	328.630.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	38 Unit	328.630.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	192 Unit	Unit	0 Unit	30 Unit	231.550.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	35 Unit	231.550.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	190.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital**	**22.9 %**	**11.48% (121765/ 1060549**	**13.7 %**	**13.7 %**	**3.632.709.460,00**						**16 %**	**3.632.709.460,00**	
						Outcome :Meningkatnya cakupan layanan pendaftaran penduduk	**Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**83.5 %**	**72% (303959/ 421775**	**74.3 %**	**74.3 %**							**76.6 %**		
	2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**863.844.960,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**863.844.960,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	60 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12.225.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	12.225.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	60 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	221.001.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	221.001.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	79.462.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	79.462.300,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	60 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	551.155.360,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	551.155.360,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.744.964.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.744.964.500,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTPEl Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2.744.964.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	2.744.964.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**23.900.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**23.900.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	10 Laporan	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	23.900.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	23.900.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**100 %**	**99.84% 34156/ 34210**	**100 %**	**100 %**	**530.296.780,00**						**100 %**	**530.296.780,00**	
						Outcome :Meningkatnya cakupan pelayanan layanan pencatatan sipil	**Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**100 %**	**52.23% (774.241/ 1.482354**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	**100 %**	**59.03% (381.125/ 645.607)**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	**100 %**	**63.62% (14215/ 23343**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
	2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**406.543.680,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**406.543.680,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	60 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	388.428.280,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	388.428.280,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	90 Layanan	Layanan	0 Layanan	18 Layanan	18.115.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	18 Layanan	18.115.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**123.753.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**123.753.100,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama KabupatenKota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah Talak Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	30 Laporan	Laporan	0 Laporan	6 Laporan	4.274.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Laporan	4.274.600,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	50 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	95.578.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	95.578.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	10 Laporan	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	23.900.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	23.900.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas pemenuhan dan pemanfaatan data kependudukan***	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**100 %**	**4/20=20 (4 dr 20 skpd)**	**20 %**	**20 %**	**257.693.380,00**						**40 %**	**257.693.380,00**	
	2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**77.559.280,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**77.559.280,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	60 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	77.559.280,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	77.559.280,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**180.134.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**180.134.100,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 12 04 2.03 0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	98.141.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	98.141.300,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2 12 04 2.03 0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10 Laporan	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	45.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	45.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2 12 04 2.03 0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	60 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	36.792.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	36.792.800,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyajian profil kependudukan***	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudkan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**154.095.360,00**						**100 %**	**154.095.360,00**	
	2 12 05 2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase Profil Kependudukan Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**154.095.360,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**154.095.360,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2 12 05 2.01 0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	425 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	70 Dokumen	154.095.360,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	80 Dokumen	154.095.360,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**27.134.951.000,00**							**27.088.439.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**27.134.951.000,00**							**27.088.439.000,00**	
	2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**27.134.951.000,00**							**27.088.439.000,00**	
	2 14 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**17.067.975.140,00**						**100 %**	**17.021.463.140,00**	
		Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2 14 01 2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**72.344.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.809.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	31.124.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.590.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.606.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.606.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.606.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.809.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	12.809.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**13.388.395.300,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**13.388.397.200,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	12 Bulan Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12.842.657.300,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	12 Orang/bulan	12.842.659.200,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	230.760.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	230.760.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	289.309.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	289.309.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17.084.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	17.084.200,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.584.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	8.584.300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**378.978.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42.978.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	Laporan	0 Laporan	4 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	336.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**159.325.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**159.325.600,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350 Paket	Paket	0 Paket	70 Paket	22.437.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	70 Paket	22.437.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	37.888.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	37.888.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	110 Orang	110 Orang	6 Orang	99.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Orang	99.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**864.670.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**864.670.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	390 Paket	55 Paket	55 Paket	60 Paket	27.291.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	70 Paket	27.291.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	8.139.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	8.139.700,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	8 Paket	8 Paket	5 Paket	15.238.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	15.238.700,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	72.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	72.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	10 Laporan	310.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Laporan	310.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	432.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	432.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**136.845.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**136.845.200,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	Unit	0 Unit	5 Unit	16.657.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Unit	16.657.700,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Unit	0 Unit	5 Unit	120.187.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Unit	120.187.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**905.273.280,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**905.273.280,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	319.354.560,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	319.354.560,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	359.118.720,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	359.118.720,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	226.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	226.800.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.162.142.860,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.162.142.860,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	64.540.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	64.540.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1005 Unit	201 Unit	201 Unit	201 Unit	309.450.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	201 Unit	309.450.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	215 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	67.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	43 Unit	67.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.09	0010	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	671.152.860,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Unit	671.152.860,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)**	**2 %**	**2.01%**	**2.008 %**	**2.008 %**	**662.742.740,00**						**2.006 %**	**662.742.740,00**	
						Outcome :Terkendalinya pertambahan penduduk	**Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)**	**16 %**	**18%**	**17.6 %**	**17.6 %**							**17.2 %**		
	2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah KabupatenKota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**394.620.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**394.620.900,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	50 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	10 Kegiatan	46.709.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Kegiatan	46.709.200,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	60 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	12 Kegiatan	26.761.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Kegiatan	26.761.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	95.011.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	95.011.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	285 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	136.575.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	57 Satuan Pendidikan	136.575.200,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.01	0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	255 Laporan	Laporan	51 Laporan	51 Laporan	89.563.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 Laporan	89.563.900,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**268.121.840,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**268.121.840,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	76.319.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	76.319.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	139.659.040,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	139.659.040,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.02	0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	31.877.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	31.877.300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.02	0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.145.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	10.145.400,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.02	0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.120.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	10.120.300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)**	**68 %**	**59.8 %**	**61.6 %**	**61.6 %**	**8.946.335.780,00**						**63.2 %**	**8.946.335.780,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas layanan KB	**Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)**	**7 %**	**12%**	**11 %**	**11 %**							**10 %**		
	2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**840.145.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**840.145.300,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	153 Unit	8 Unit	10 Unit	30 Unit	135.629.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Unit	135.629.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	69 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	299.993.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	299.993.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam Rapat Koordinasi Desa Rakordes dan Mini Lokakarya Minilok	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	75 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	15 Laporan	72.838.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Laporan	72.838.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	75 Dokumen	15 Dokumen	0 Dokumen	15 Dokumen	156.157.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Dokumen	156.157.300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	260 Organisasi	52 Organisasi	54 Organisasi	52 Organisasi	175.526.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	52 Organisasi	175.526.300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KBPetugas Lapangan KB PKBPLKB**	**Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KBPetugas Lapangan KB PKBPLKB Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.746.879.580,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**6.746.879.580,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5792 Orang	1153 Orang	1155 Orang	1155 Orang	5.654.227.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1155 Orang	5.654.227.700,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKBPLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organisasi	2 Organisasi	0 Organisasi	2 Organisasi	531.159.780,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Organisasi	531.159.780,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	75 Laporan	Laporan	15 Laporan	15 Laporan	561.492.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Laporan	561.492.100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.044.215.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.044.215.500,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.590.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	23.590.700,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10074 Orang	1500 Orang	6203 Orang	1650 Orang	537.336.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1815 Orang	537.336.700,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	31 Unit	1 Unit	3 Unit	5.649.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Unit	5.649.200,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	2175 Orang	0 Orang	375 Orang	375 Orang	27.465.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	450 Orang	27.465.300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	20.152.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	20.152.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	250 Orang	50 Orang	0 Orang	50 Orang	170.446.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Orang	170.446.400,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	60 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	153.565.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	153.565.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	2175 Orang	200 Orang	100 Orang	375 Orang	27.503.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	450 Orang	27.503.700,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	1500 Orang	0 Orang	120 Orang	300 Orang	50.788.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	300 Orang	50.788.300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	2175 Orang	0 Orang	300 Orang	375 Orang	27.717.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	450 Orang	27.717.400,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB**	**Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**315.095.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**315.095.400,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	765 Kampung	15 Kampung	153 Kampung	153 Kampung	315.095.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	153 Kampung	315.095.400,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** ***Outcome :Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera***	**Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**	**80 %**	**75%**	**76 %**	**76 %**	**457.897.340,00**					**77 %**	**457.897.340,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**457.897.340,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**457.897.340,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPKS PIKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	199.707.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	199.707.100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPKS PIKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	66 Unit	0 Unit	0 Unit	10 Unit	54.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Unit	54.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga Indeks Pembangunan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	980 Orang	100 Orang	0 Orang	150 Orang	39.792.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	170 Orang	39.792.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPKS PIKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	54 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	54.852.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Laporan	54.852.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga BKB BKR BKL PPKS PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	3770 Orang	684 Orang	684 Orang	700 Orang	109.545.440,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	720 Orang	109.545.440,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Dinas Perhubungan						**142.137.181.000,00**							**159.720.236.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**142.137.181.000,00**							**159.720.236.000,00**	
	2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**142.137.181.000,00**							**159.720.236.000,00**	
	2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**45.617.403.929,00**						**100 %**	**38.031.039.029,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**57.918.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.996.400,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	25.549.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.508.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.998.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.998.200,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.477.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.998.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.998.200,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	14.387.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Laporan	13.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**16.879.318.107,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**16.879.318.441,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	668 Orang/bulan	92 Orang/bulan	100 Orang/bulan	133 Orang/bulan	16.130.888.907,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	133 Orang/bulan	16.130.889.241,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	476.640.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	476.640.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	256.590.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	256.590.300,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.379.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	8.379.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.819.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	6.819.900,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**15**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.421.878.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.560.072.500,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1.515.878.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	654.072.500,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	830 Orang	14 Orang	14 Orang	166 Orang	906.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	166 Orang	906.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**493.848.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**493.848.500,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4 Paket	4 Paket	3 Paket	36.313.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	36.313.500,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket	72.584.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	72.584.800,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	1 Paket	2 Paket	4 Paket	100.908.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Paket	100.908.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	34.042.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	34.042.200,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	54.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Dokumen	54.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17 Laporan	196.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	17 Laporan	196.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.925.597.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.515.248.800,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	168.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	168.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	Unit	0 Unit	2 Unit	5.433.664.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	720.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	558 Unit	16 Unit	0 Unit	168 Unit	648.541.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Unit	56.932.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	421 Unit	7 Unit	0 Unit	85 Unit	675.391.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	81 Unit	570.316.800,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**15.470.499.488,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**15.470.499.488,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.613.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	20.613.400,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.995.289.248,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	1.995.289.248,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.454.596.840,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	13.454.596.840,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.032.344.234,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.707.054.900,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	42.130.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	42.130.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	360 Unit	59 Unit	0 Unit	72 Unit	1.100.020.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	72 Unit	1.100.020.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	630 Unit	106 Unit	114 Unit	126 Unit	85.510.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	126 Unit	85.510.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1.804.684.234,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	479.394.900,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota**	**0.42**	**0.48**	**0.47**	**0.46**	**92.803.401.091,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**0.45**	**89.475.758.991,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	**Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal**	**100 %**	**57.22%**	**60 %**	**60 %**							**63 %**		
	2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan KabupatenKota**	**Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**77.118.551.151,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**74.845.146.351,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan KabupatenKota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1075 Unit	490 Unit	151 Unit	215 Unit	4.564.067.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	215 Unit	4.564.067.700,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan KabupatenKota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3120 Unit	457 Unit	520 Unit	520 Unit	10.389.985.050,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	520 Unit	8.384.469.250,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	150000 Unit	26139 Unit	18600 Unit	30000 Unit	2.820.859.701,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30000 Unit	2.811.723.701,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	150000 Unit	26105 Unit	30000 Unit	30000 Unit	59.343.638.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30000 Unit	59.084.885.700,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**96.648.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**96.648.200,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	96.648.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	96.648.200,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.874.824.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.551.170.500,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.874.824.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	1.551.170.500,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.202.186.340,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.145.605.040,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 Unit	9 Unit	1 Unit	2 Unit	11.891.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Unit	11.891.300,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	348.223.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	341.641.800,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	78 Unit	9 Unit	10 Unit	12 Unit	392.443.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	14 Unit	342.443.500,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.449.628.440,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	1.449.628.440,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan KabupatenKota**	**Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.266.379.980,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**8.192.378.380,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan KabupatenKota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	435.620.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	435.620.400,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan KabupatenKota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	18 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	112.580.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	112.580.800,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan KabupatenKota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	60 Laporan	12 Laporan	15 Laporan	12 Laporan	7.718.178.780,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	7.644.177.180,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin untuk Jalan KabupatenKota**	**Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**123.677.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**123.677.100,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	3.532.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	3.532.400,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	25 Orang	0 Orang	0 Orang	5 Orang	67.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Orang	67.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	20 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	28.373.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	28.373.200,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.07	0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	250 Dokumen	32 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	24.271.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Dokumen	24.271.500,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**249.899.120,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**249.899.120,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	31.581.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	31.581.900,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	218.317.220,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	218.317.220,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang danatau Barang Antar Kota dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana Yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.118.341.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.518.341.300,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang danatau Barang Antar Kota dalam Satu KabupatenKota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	34 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	70.853.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	70.853.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang danatau Barang Antar Kota dalam Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2.047.488.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	1.447.488.300,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**02**	**2.10**		**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas Satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**161.075.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**161.075.300,00**	**Dinas Perhubungan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 15 02 2.10 0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.988.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	5.988.800,00	Dinas Perhubungan
	2 15 02 2.10 0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	155.086.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	155.086.500,00	Dinas Perhubungan
	2 15 02 2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**135.567.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**135.567.900,00**	**Dinas Perhubungan**
	2 15 02 2.11 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.371.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	4.371.500,00	Dinas Perhubungan
	2 15 02 2.11 0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	56.447.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	56.447.200,00	Dinas Perhubungan
	2 15 02 2.11 0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	74.749.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	74.749.200,00	Dinas Perhubungan
	2 15 02 2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah KabupatenKota dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**127.763.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**127.763.400,00**	**Dinas Perhubungan**
	2 15 02 2.14 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	72.576.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	72.576.200,00	Dinas Perhubungan
	2 15 02 2.14 0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan KabupatenKota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	55.187.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Unit	55.187.200,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**15**	**02**	**2.16**		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**328.486.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**328.486.400,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	02	2.16	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	52.725.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	52.725.600,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	95.444.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	95.444.400,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	180.316.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	180.316.400,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** ***Outcome :Meningkatnya layanan penyeberangan pulau***	**Rasio Konektivitas Penyeberangan**	**0.8 %**	**0.74%**	**0.76 %**	**0.76 %**	**3.716.375.980,00**						**0.77 %**	**32.213.437.980,00**	
	2	**15**	**03**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**25.908.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**25.908.800,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	03	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan KabupatenKota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	25.908.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	25.908.800,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**03**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**	**Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Yang Diterbitkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**35.090.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**35.090.800,00**	**Dinas Perhubungan**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	03	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan KabupatenKota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.090.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	35.090.800,00	Dinas Perhubungan
	2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.655.376.380,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**32.152.438.380,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	5 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	3.079.714.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	31.603.026.200,00	Dinas Perhubungan
	2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	10 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	173.827.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	147.577.400,00	Dinas Perhubungan
	2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	401.834.780,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	401.834.780,00	Dinas Perhubungan
						Dinas Komunikasi dan Informatika						**85.622.770.000,00**							**85.636.172.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**85.622.770.000,00**							**85.636.172.000,00**	
	2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**80.583.666.000,00**							**80.597.068.000,00**	
	2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**14.149.796.134,00**						**100 %**	**14.163.198.134,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**65.070.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**56.571.700,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	38.153.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.857.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.857.300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.857.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.857.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.168.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.176.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.856.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	2.856.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**10.266.476.714,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**10.266.477.214,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	410 Orang/bulan	45 Orang/bulan	54 Orang/bulan	78 Orang/bulan	9.665.295.914,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	80 Orang/bulan	9.665.296.414,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	372.720.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	372.720.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	208.828.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	208.828.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	4.188.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	4.188.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.443.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	15.443.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**266.250.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**266.250.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	675 Paket	Paket	0 Paket	135 Paket	101.250.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	135 Paket	101.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	10 Orang	15 Orang	14 Orang	165.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	14 Orang	165.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.483.850.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.483.850.400,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Paket	0 Paket	6 Paket	11.986.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Paket	11.986.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	315 Paket	67 Paket	61 Paket	63 Paket	132.659.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	63 Paket	132.659.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	6 Paket	11 Paket	12 Paket	94.755.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	94.755.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	4.655.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	4.655.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	4 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	44.940.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	60 Dokumen	44.940.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 Laporan	Laporan	0 Laporan	50 Laporan	5.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Laporan	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	545 Laporan	177 Laporan	35 Laporan	109 Laporan	1.178.486.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	109 Laporan	1.178.486.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	11.368.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	11.368.100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**460.097.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**460.097.200,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	155 Unit	Unit	0 Unit	31 Unit	144.525.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	31 Unit	144.525.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	140 Unit	Unit	0 Unit	28 Unit	315.572.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	28 Unit	315.572.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.125.711.620,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.125.711.620,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	12 Laporan	22 Laporan	2 Laporan	31.374.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	31.374.900,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	960 Laporan	192 Laporan	180 Laporan	192 Laporan	108.442.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	192 Laporan	108.442.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	610 Laporan	86 Laporan	101 Laporan	122 Laporan	985.894.220,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	122 Laporan	985.894.220,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**482.340.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**504.240.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	44.380.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	346.740.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Unit	346.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.09	0011	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	750 Unit	90 Unit	147 Unit	150 Unit	91.220.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	150 Unit	91.220.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kualitas layanan informasi publik***	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah**	**83 %**	**N/A**	**75 %**	**75 %**	**16.250.865.380,00**						**77 %**	**16.250.865.380,00**	
	2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**16.250.865.380,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**16.250.865.380,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	60 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	189.462.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	189.462.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	150 Permohonan	Permohonan	20 Permohonan	30 Permohonan	287.458.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Permohonan	287.458.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	60 Rekomendasi	Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	1.010.031.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Rekomendasi	1.010.031.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	890 Media	Media	125 Media	178 Media	14.763.912.880,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	178 Media	14.763.912.880,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** ***Outcome :Meningkatnya integrasi aplikasi pemerintah daerah***	**Persentase SKPD yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**	**100 %**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**50.183.004.486,00**			**(PN 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan**	**(PD 6) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital**		**100 %**	**50.183.004.486,00**	
	2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50.183.004.486,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**50.183.004.486,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	622.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	622.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah KabKota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	255 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	1.149.109.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 Perangkat Daerah	1.149.109.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	20 Layanan	Layanan	0 Layanan	4 Layanan	1.656.560.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Layanan	1.656.560.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan danatau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	50 Aplikasi	Aplikasi	0 Aplikasi	10 Aplikasi	829.619.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Aplikasi	829.619.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	60 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	4.998.599.070,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	4.998.599.070,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	15 Aplikasi	Aplikasi	0 Aplikasi	3 Aplikasi	80.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Aplikasi	80.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE danatau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	10 Laporan	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	116.448.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	116.448.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	255 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	31.533.249.016,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 Perangkat Daerah	31.533.249.016,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	100 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	20 Dokumen	9.197.219.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Dokumen	9.197.219.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**15.744.615.014,00**							**15.758.017.014,00**	
	2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD Yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**93 %**	**76%**	**88.23 %**	**89 %**	**1.594.818.880,00**						**90 %**	**1.594.818.880,00**	
						Outcome :Meningkatnya ketersediaan data statitik kewenangan Kota	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah**	**93 %**	**76%**	**88.23 %**	**89 %**							**90 %**		
	2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah KabupatenKota**	**Persentase Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Yang Terselenggara**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.594.818.880,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.594.818.880,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	442 %	%	0 %	85 %	117.670.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	87 %	117.670.700,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	442 %	%	0 %	85 %	679.874.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	87 %	679.874.100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	442 %	%	0 %	85 %	268.855.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	87 %	268.855.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	500 Orang	Orang	0 Orang	100 Orang	120.274.180,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	120.274.180,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	442 %	%	0 %	85 %	408.144.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	87 %	408.144.900,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**17.594.081.254,00**							**17.607.483.254,00**	
	2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** ***Outcome :Meningkatnya kualitas keamanan siber dan sandi lingkup Pemerintah Kota***	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**62 %**	**41%**	**46 %**	**49 %**	**3.444.285.120,00**						**52 %**	**3.444.285.120,00**	
	2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah KabupatenKota**	**Persentase Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Terselenggara**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.182.165.220,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**3.182.165.220,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	115 Laporan	Laporan	0 Laporan	23 Laporan	971.019.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	23 Laporan	971.019.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	20 Laporan	Laporan	0 Laporan	4 Laporan	194.650.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	194.650.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	255 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	1.805.079.020,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 Perangkat Daerah	1.805.079.020,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	10 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	211.416.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	211.416.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**262.119.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**262.119.900,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	5 Kegiatan	Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	262.119.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Kegiatan	262.119.900,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						**19.922.929.000,00**							**19.759.268.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.922.929.000,00**							**19.759.268.000,00**	
	2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**19.922.929.000,00**							**19.759.268.000,00**	
	2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**9.935.963.120,00**						**100 %**	**9.772.302.120,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**79.724.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**61.827.000,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	39.225.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.975.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.037.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.969.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.156.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 17 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	11.532.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.827.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	5.827.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.899.848.180,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**7.889.498.660,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2 17 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	7.346.310.580,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	42 Orang/bulan	7.346.311.060,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	345.929.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	345.929.800,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	181.151.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	181.151.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.990.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6.132.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Laporan	6.132.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.625.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.625.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.349.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	4.349.300,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6.360.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**501.414.480,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2	17	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	165.414.480,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**333.030.560,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**333.030.560,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	485 Paket	Paket	0 Paket	97 Paket	59.250.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	97 Paket	59.250.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	129.780.560,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	129.780.560,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	196 Orang	95 Orang	12 Orang	144.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Orang	144.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**546.981.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**546.981.100,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	6 Paket	4 Paket	4 Paket	89.036.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Paket	89.036.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	54.414.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	54.414.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 17 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.710.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	25.710.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	115 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	36.420.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	23 Dokumen	36.420.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	80 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	323.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	21 Laporan	323.400.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	18.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**208.215.820,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**208.215.820,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2 17 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	142.871.820,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	142.871.820,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	55.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	55.800.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	9.544.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	9.544.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**366.748.980,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**366.748.980,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2 17 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.130.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	43.130.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	10 Unit	12 Unit	12 Unit	224.370.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Unit	224.370.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	285 Unit	62 Unit	57 Unit	57 Unit	39.370.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	57 Unit	39.370.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.09	0010	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	59.878.980,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	59.878.980,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam***	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**16 %**	**4.45%**	**15.63 %**	**15.63 %**	**552.073.800,00**						**16.0 %**	**552.073.800,00**	
	2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Yang Terfasilitasi**	**33 Unit Usaha**	**727 Unit Usaha**	**30 Unit Usaha**	**30 Unit Usaha**	**318.795.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**30 Unit Usaha**	**318.795.900,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah KabupatenKota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1050 Unit Usaha	727 Unit Usaha	210 Unit Usaha	210 Unit Usaha	318.795.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	210 Unit Usaha	318.795.900,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	**17**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Yang Terfasilitasi**	**4 Unit Usaha**	**20 Unit Usaha**	**4 Unit Usaha**	**4 Unit Usaha**	**233.277.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**4 Unit Usaha**	**233.277.900,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah KabupatenKota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1050 Unit Usaha	200 Unit Usaha	210 Unit Usaha	210 Unit Usaha	233.277.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	210 Unit Usaha	233.277.900,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** ***Outcome :Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi***	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**28 %**	**26.40%**	**27 %**	**27 %**	**994.391.980,00**						**25 %**	**994.391.980,00**	
	2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan PinjamUnit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Terlaksana**	**653 Unit Usaha**	**432 Unit Usaha**	**585 Unit Usaha**	**653 Unit Usaha**	**994.391.980,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**653 Unit Usaha**	**994.391.980,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	3265 Unit Usaha	432 Unit Usaha	585 Unit Usaha	653 Unit Usaha	737.660.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	653 Unit Usaha	737.660.700,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah KabupatenKota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	3265 Unit Usaha	432 Unit Usaha	585 Unit Usaha	653 Unit Usaha	256.731.280,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	653 Unit Usaha	256.731.280,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi***	**Persentase koperasi aktif**	**46.00 %**	**44.43%**	**44.50 %**	**44.50 %**	**563.932.480,00**						**44.50 %**	**563.932.480,00**	
	2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan PinjamUnit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya**	**25 %**	**10 %**	**15 %**	**15 %**	**563.932.480,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**20 %**	**563.932.480,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPUSP Koperasi Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	900 Unit Usaha	200 Unit Usaha	180 Unit Usaha	180 Unit Usaha	325.834.480,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	180 Unit Usaha	325.834.480,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola Profil Risiko Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	900 Unit Usaha	200 Unit Usaha	480 Unit Usaha	180 Unit Usaha	238.098.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	180 Unit Usaha	238.098.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas SDM Koperasi***	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	**21.92 %**	**26.94%**	**20.55 %**	**20.55 %**	**437.358.100,00**						**14 %**	**437.358.100,00**	
	2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Pengurus Koperasi yang diberikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**400 Orang**	**440 Orang**	**100 Orang**	**400 Orang**	**437.358.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**400 Orang**	**437.358.100,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2000 Orang	440 Orang	100 Orang	400 Orang	437.358.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	400 Orang	437.358.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** ***Outcome :Meningkatnya produktivitas koperasi***	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**29 %**	**27.23%**	**27.50 %**	**27.50 %**	**1.264.618.200,00**						**27.50 %**	**1.264.618.200,00**	
	2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Koperasi yang diberikan Pembinaan**	**80 %**	**50 %**	**55 %**	**60 %**	**1.264.618.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**65 %**	**1.264.618.200,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 17 06 2.01 0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	120 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	24 Kelompok Masyarakat	24 Kelompok Masyarakat	218.838.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	24 Kelompok Masyarakat	218.838.800,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 06 2.01 0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah KabupatenKota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	1265 Unit Usaha	0 Unit Usaha	153 Unit Usaha	253 Unit Usaha	277.655.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	253 Unit Usaha	277.655.600,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 06 2.01 0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah KabupatenKota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	1265 Unit Usaha	0 Unit Usaha	253 Unit Usaha	253 Unit Usaha	415.504.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	253 Unit Usaha	415.504.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 06 2.01 0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah KabupatenKota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	250 Unit Usaha	Unit Usaha	40 Unit Usaha	50 Unit Usaha	352.619.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Unit Usaha	352.619.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal**	**40 %**	**10.45%**	**15 %**	**15 %**	**2.539.227.300,00**			**(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**20 %**	**2.539.227.300,00**	
		Outcome :Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri	**Pertumbuhan Wirausaha**	**20 %**	**12.43%**	**14.5 %**	**14.5 %**				**(PN 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**(PD 3) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan**		**16.5 %**		
	2 17 07 2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan melalui Pendataan dengan para Pemangku Kepentingan**	**2500 Unit Usaha**	**4000 Unit Usaha**	**2000 Unit Usaha**	**2000 Unit Usaha**	**2.539.227.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**2500 Unit Usaha**	**2.539.227.300,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 17 07 2.01 0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2950 Unit Usaha	474 Unit Usaha	374 Unit Usaha	590 Unit Usaha	163.232.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	590 Unit Usaha	163.232.600,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 07 2.01 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	3500 Unit Usaha	550 Unit Usaha	500 Unit Usaha	700 Unit Usaha	419.982.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	700 Unit Usaha	419.982.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 07 2.01 0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	Unit Usaha	0 Unit Usaha	30 Unit Usaha	369.987.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Unit Usaha	369.987.800,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 07 2.01 0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	215 Unit Usaha	Unit Usaha	0 Unit Usaha	15 Unit Usaha	487.407.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Unit Usaha	487.407.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 07 2.01 0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30000 Unit Usaha	Unit Usaha	0 Unit Usaha	6000 Unit Usaha	672.662.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6000 Unit Usaha	672.662.800,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 07 2.01 0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	3000 Orang	440 Orang	600 Orang	600 Orang	425.954.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	600 Orang	425.954.300,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 17 08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** ***Outcome :Meningkatnya daya saing UMKM***	**Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor**	**0.75 %**	**N/A**	**1 %**	**1 %**	**3.635.364.020,00**			**(PN 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**(PD 1) Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi**		**1 %**	**3.635.364.020,00**	
	2 17 08 2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang Berorientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Yang berkembang**	**2500 Unit Usaha**	**3000 Unit Usaha**	**4000 Unit Usaha**	**2000 Unit Usaha**	**3.635.364.020,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**2500 Unit Usaha**	**3.635.364.020,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	2 17 08 2.01 0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25000 Unit Usaha	2500 Unit Usaha	5000 Unit Usaha	5000 Unit Usaha	1.434.480.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5000 Unit Usaha	1.434.480.300,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5000 Unit Usaha	350 Unit Usaha	1340 Unit Usaha	1000 Unit Usaha	2.200.883.720,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1000 Unit Usaha	2.200.883.720,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**22.548.655.000,00**							**22.436.903.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.548.655.000,00**							**22.436.903.000,00**	
	2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**22.548.655.000,00**							**22.436.903.000,00**	
	2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**17.122.462.700,00**						**100 %**	**17.010.710.700,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**112.630.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.998.200,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9.057.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.750.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.688.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.632.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.854.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12.998.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	12.998.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Berita Acara	Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	55.341.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Berita Acara	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	5.308.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**11.473.930.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**11.463.538.700,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	51 Orang/bulan	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	10.955.222.500,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	58 Orang/bulan	10.955.222.700,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	326.270.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	326.270.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	182.046.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	182.046.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	10.392.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	336.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**504.619.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**585.619.800,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	9.619.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	9.619.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	500 Orang	98 Orang	98 Orang	100 Orang	495.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	100 Orang	495.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**764.155.160,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**625.427.360,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	16.431.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	9 Paket	16.431.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	63.637.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	63.637.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	40.768.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Paket	40.768.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	4 Paket	4 Paket	5 Paket	145.509.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	145.509.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	51.730.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Paket	51.730.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	25.440.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.440.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	3000 Laporan	3000 Laporan	12 Laporan	30.373.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	30.373.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	12 Laporan	197.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	197.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	188.899.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	50.172.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.365.360,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	4.365.360,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**965.886.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**965.886.600,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	600 Unit	Unit	0 Unit	120 Unit	254.195.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	120 Unit	254.195.400,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	400 Unit	Unit	0 Unit	80 Unit	711.691.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	80 Unit	711.691.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.399.170.040,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.399.170.040,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	368.332.180,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	368.332.180,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	114.042.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	114.042.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	1.916.795.860,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	1.916.795.860,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**566.070.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**566.070.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.630.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	43.630.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	341.180.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Unit	341.180.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 Unit	43 Unit	41 Unit	90 Unit	181.260.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	90 Unit	181.260.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** ***Outcome :Meningkatnya realisasi investasi***	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**Rp 4226959532250**	**Rp.3.827.931.439.043**	**Rp 3000000000000**	**Rp 3000000000000**	**805.948.240,00**			**(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan** **(PD 3) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan**		**Rp 3262500000000**	**805.948.240,00**	
	2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian FasilitasInsentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota**	**Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang diterbitkan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**444.032.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**2 Kegiatan**	**444.032.600,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian FasilitasInsentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	186.726.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	186.726.400,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	257.306.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	257.306.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi KabupatenKota**	**Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersusun**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**361.915.640,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**1 Dokumen**	**361.915.640,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi KabupatenKota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	361.915.640,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	361.915.640,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** ***Outcome :Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal***	**Persentase pemenuhan kebutuhan promosi penanaman modal**	**100 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**1.974.583.700,00**						**100 %**	**1.974.583.700,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**1.974.583.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**3 Kegiatan**	**1.974.583.700,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.473.571.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Dokumen	1.473.571.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan KabupatenKota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	501.012.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	501.012.700,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** ***Outcome :Meningkatnya kualitas pelayaanan perizinan***	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**80%**	**90 %**	**90 %**	**1.227.850.640,00**				**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**100 %**	**1.227.850.640,00**	
	2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizininan bidang Penanaman Modal yang diselenggarakan**	**11 Jenis**	**12 Jenis**	**11 Jenis**	**11 Jenis**	**1.227.850.640,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**11 Jenis**	**1.227.850.640,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian FasilitasInsentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	292.603.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	292.603.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	187000 Pelaku Usaha	21000 Pelaku Usaha	21000 Pelaku Usaha	30000 Pelaku Usaha	682.903.740,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	35000 Pelaku Usaha	682.903.740,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1650 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	275 Pelaku Usaha	146.903.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	300 Pelaku Usaha	146.903.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5000 Kegiatan Usaha	1000 Kegiatan Usaha	1000 Kegiatan Usaha	1000 Kegiatan Usaha	105.440.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1000 Kegiatan Usaha	105.440.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** ***Outcome :Meningkatnya kuantitas penyelesaian permasalahan penanaman modal***	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**100 %**	**80%**	**90 %**	**90 %**	**302.456.200,00**						**100 %**	**302.456.200,00**	
	2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**302.456.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**302.456.200,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 Kegiatan Usaha.	12 Kegiatan Usaha.	12 Kegiatan Usaha.	12 Kegiatan Usaha.	98.254.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Kegiatan Usaha.	98.254.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1000 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	116.676.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Pelaku Usaha	116.676.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	87.525.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Kegiatan Usaha	87.525.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** ***Outcome :Meningkatnya kualitas data dan informasi penanaman modal***	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**100 %**	**80%**	**90 %**	**90 %**	**1.115.353.520,00**						**100 %**	**1.115.353.520,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**1.115.353.520,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**12 Dokumen**	**1.115.353.520,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.115.353.520,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	1.115.353.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Dinas Pemuda dan Olahraga						**111.257.178.000,00**							**99.970.434.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**111.257.178.000,00**							**99.970.434.000,00**	
	2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**111.257.178.000,00**							**99.970.434.000,00**	
	2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**11.303.027.700,00**						**100 %**	**10.587.156.950,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**54.460.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	24.590.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.225.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.245.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.245.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.134.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	13.019.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	13.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.032.007.840,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**8.032.008.790,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	7.287.927.840,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	12 Orang/bulan	7.287.928.790,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	528.080.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	528.080.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	216.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	01	2.03	0004	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**205.390.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**205.390.400,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	48.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	48.380.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.010.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	17.010.400,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	140.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Orang	140.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**460.183.900,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**460.183.900,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.255.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	14.255.500,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	63.958.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	63.958.600,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.075.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	7.075.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	11.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.260.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	3.260.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.120.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.120.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	320.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	320.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.514.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.514.800,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**938.537.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**208.126.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	445.653.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Unit	35.451.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	492.884.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Unit	172.675.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**929.637.860,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**929.637.860,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.180.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	19.180.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	44.460.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	44.460.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	865.997.860,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	865.997.860,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**346.810.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**346.810.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	28.160.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	28.160.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	304.780.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Unit	304.780.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	13.870.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Unit	13.870.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** ***Outcome :Meningkatnya daya saing kepemudaan***	**Rasio Wirausaha Pemuda**	**19.46 %**	**16.61%**	**17.75 %**	**17.75 %**	**7.028.413.000,00**			**(PN 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**17.75 %**	**6.028.413.000,00**	
															(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	**(PD 8) Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan**				
	2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor KabupatenKota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader KabupatenKota**	**Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.162.370.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.162.370.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupatenkota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi DaerahRAD Tingkat kabupatenkota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	46.868.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	46.868.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupatenkota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	5000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	887.443.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1000 Orang	887.443.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi danatau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	75 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	194.156.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Orang	194.156.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupatenkota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	139.664.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Kegiatan	139.664.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupatenkota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	23750 Orang	4000 Orang	4000 Orang	4250 Orang	2.701.120.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4500 Orang	2.701.120.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupatenkota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	750 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	193.119.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Orang	193.119.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.866.043.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.866.043.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupatenkota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	2.386.512.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Organisasi	1.386.512.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat KabupatenKota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	479.531.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Orang	479.531.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** ***Outcome :Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga***	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**92.925.737.300,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 8) Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan**		**100 %**	**82.354.864.050,00**	
	2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**58.349.968.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**52.779.095.550,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan pengadaan pemanfaatan pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupatenkota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	58.349.968.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Unit	52.779.095.550,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.806.508.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.806.508.900,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat KabupatenKota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	55 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.666.738.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Kegiatan	1.666.738.900,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupatenkota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	139.770.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Orang	139.770.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**193.193.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**193.193.600,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupatenkota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	180.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	180.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupatenkota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.193.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	13.193.600,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**29.575.130.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**24.575.130.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan KabupatenKota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	29.575.130.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	24.575.130.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.000.936.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**3.000.936.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	20 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1.314.734.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	1.314.734.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	15 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	557.526.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	557.526.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah nasional dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	35 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	1.128.676.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	7 Lembaga	1.128.676.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas kepramukaan***	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**	**2.40 %**	**2.15%**	**2.20 %**	**2.20 %**	**-**						**2.25 %**	**1.000.000.000,00**	
						Dinas Kebudayaan						**16.521.066.000,00**							**16.586.444.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.521.066.000,00**							**16.586.444.000,00**	
	2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**16.521.066.000,00**							**16.586.444.000,00**	
	2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**11.257.571.880,00**						**100 %**	**11.404.405.880,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**22**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**55.066.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.066.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	13.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	13.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**9.559.180.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**9.559.181.000,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	465 Orang/bulan	35 Orang/bulan	0 Orang/bulan	80 Orang/bulan	8.681.980.900,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	85 Orang/bulan	8.681.981.700,00	Dinas Kebudayaan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	394.680.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	394.680.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4750 Dokumen	800 Dokumen	14 Dokumen	850 Dokumen	300.515.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	900 Dokumen	300.515.500,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	62.859.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	62.859.900,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	60 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	49.507.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	49.507.900,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	69.636.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	69.636.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Laporan	10 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Laporan	336.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**69.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**150.000.000,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	7 Orang	7 Orang	14 Orang	69.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	14 Orang	69.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**563.183.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**563.183.600,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	1 Paket	8.256.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	8.256.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	90.372.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	90.372.300,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	400 Paket	1 Paket	1 Paket	29.021.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	29.021.300,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	0 Paket	1 Paket	10.010.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	10.010.000,00	Dinas Kebudayaan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	14.400.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	115 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21 Laporan	15.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	22 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 Laporan	52 Laporan	52 Laporan	33 Laporan	396.124.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	33 Laporan	396.124.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**343.351.280,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**343.351.280,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	88.095.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	88.095.200,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	81.656.080,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	81.656.080,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	173.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	173.600.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**331.790.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**353.690.000,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	44.380.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	177.360.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Unit	177.360.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	115 Unit	20 Unit	20 Unit	21 Unit	14.250.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	22 Unit	14.250.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	95.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	95.800.000,00	Dinas Kebudayaan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** ***Outcome :Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan***	**Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**	**100 %**	**100% (350 Orang)**	**100 %**	**100 %**	**1.641.976.780,00**			**(PN 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru**	**(PD 5) Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal**		**100 %**	**1.641.976.780,00**	
	2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.473.662.380,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.473.662.380,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	125 Objek	75 Objek	25 Objek	25 Objek	1.181.261.380,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	25 Objek	1.181.261.380,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1750 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	219.309.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	350 Orang	219.309.400,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	02	2.01	0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	73.091.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	73.091.600,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**102.276.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**102.276.800,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9 Objek	10 Objek	5 Objek	1 Objek	102.276.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Objek	102.276.800,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**66.037.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**66.037.600,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	0 Objek	0 Objek	1 Objek	66.037.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Objek	66.037.600,00	Dinas Kebudayaan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** ***Outcome :Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional***	**Persentase kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan**	**20 %**	**N/A**	**20 %**	**20 %**	**1.655.232.220,00**			**(PN 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru**	**(PD 5) Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal**		**20 %**	**1.655.232.220,00**	
	2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.655.232.220,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.655.232.220,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1575 Orang	275 Orang	275 Orang	315 Orang	112.617.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	315 Orang	112.617.000,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	5 Lembaga	30 Lembaga	10 Lembaga	1.542.615.220,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Lembaga	1.542.615.220,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** ***Outcome :Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah***	**Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal**	**100 %**	**87%**	**100 %**	**100 %**	**579.450.460,00**						**100 %**	**497.994.460,00**	
	2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**579.450.460,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**497.994.460,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal KabupatenKota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	85 Orang	17 Orang	17 Orang	17 Orang	274.678.060,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	17 Orang	274.678.060,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	183.448.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Unit	183.448.100,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	25 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	121.324.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Dokumen	39.868.300,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** ***Outcome :Meningkatnya kuantitas cagar budaya yang dilestarikan***	**Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan**	**20 %**	**23% (36 Objek)**	**20 %**	**20 %**	**733.285.560,00**						**20 %**	**733.285.560,00**	
	2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat KabupatenKota**	**Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**259.852.060,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**259.852.060,00**	**Dinas Kebudayaan**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	60 Objek	204 Objek	32 Objek	12 Objek	149.796.260,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Objek	149.796.260,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	30 Objek	28 Objek	15 Objek	6 Objek	110.055.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Objek	110.055.800,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**430.917.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**430.917.600,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	15 Objek	15 Objek	3 Objek	3 Objek	267.932.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Objek	267.932.800,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	25 Objek	0 Objek	0 Objek	5 Objek	162.984.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Objek	162.984.800,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**05**	**2.03**		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah KabupatenKota dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**42.515.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**42.515.900,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	05	2.03	0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah KabupatenKota dalam Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	15 Objek	6 Objek	6 Objek	3 Objek	42.515.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Objek	42.515.900,00	Dinas Kebudayaan
	2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas pengelolaan museum***	**Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum**	**5.58 %**	**59.303 Orang**	**1.08 %**	**1.08 %**	**653.549.100,00**						**1.01 %**	**653.549.100,00**	
	2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**653.549.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**653.549.100,00**	**Dinas Kebudayaan**
	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan Pengembangan dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	125 Unit	56 Unit	56 Unit	25 Unit	97.760.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	25 Unit	97.760.300,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	145 Orang	17 Orang	17 Orang	29 Orang	209.656.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	29 Orang	209.656.800,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	311515 Unit	59303 Unit	5800 Unit	60303 Unit	177.673.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	61303 Unit	177.673.700,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	95.075.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Unit	95.075.800,00	Dinas Kebudayaan
	2	22	06	2.01	0016	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	5 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	73.382.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	73.382.500,00	Dinas Kebudayaan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Perpustakaan						**13.415.122.000,00**							**12.147.449.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.415.122.000,00**							**12.147.449.000,00**	
	2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**13.415.122.000,00**							**12.147.449.000,00**	
	2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**8.545.940.100,00**						**100 %**	**10.136.395.100,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**49.250.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan**
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20.250.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	13.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.457.429.460,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**6.457.429.460,00**	**Dinas Perpustakaan**
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220 Orang/bulan	28 Orang/bulan	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	6.086.250.260,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	44 Orang/bulan	6.086.250.260,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	240.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	14 Dokumen	240.600.000,00	Dinas Perpustakaan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	127.162.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	127.162.200,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.417.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	3.417.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	**23**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan**
	2	23	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**72.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**153.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan**
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	170 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	72.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	34 Orang	72.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**356.957.020,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**356.957.020,00**	**Dinas Perpustakaan**
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	5.830.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Paket	5.830.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	280 Paket	56 Paket	56 Paket	56 Paket	88.632.220,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	56 Paket	88.632.220,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	10.000.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Paket	10.000.800,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	82 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	14.040.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	16 Dokumen	14.040.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	208.454.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	38 Laporan	208.454.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**253.901.620,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.743.606.620,00**	**Dinas Perpustakaan**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0 Unit	0 Unit	11 Unit	253.901.620,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Unit	143.606.620,00	Dinas Perpustakaan
	2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**698.412.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**698.412.000,00**	**Dinas Perpustakaan**
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.636.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	6.636.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	135.792.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	135.792.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	555.984.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	555.984.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**321.990.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**321.990.000,00**	**Dinas Perpustakaan**
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.880.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	40.880.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	243.860.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	13 Unit	243.860.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	230 Unit	46 Unit	46 Unit	46 Unit	37.250.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	46 Unit	37.250.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan Kota***	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**	**84.72 %**	**84.52%**	**84.60 %**	**84.60 %**	**4.567.555.200,00**			**(PN 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**(PD 3) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan**		**84.63 %**	**1.765.428.200,00**	
	2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.004.499.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**902.372.200,00**	**Dinas Perpustakaan**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah KabupatenKota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	500 Perpustakaan	100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	53.134.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Perpustakaan	53.134.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah KabupatenKota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	3.150.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Perpustakaan	151.200.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat KabupatenKota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	25 Layanan	0 Layanan	0 Layanan	5 Layanan	4.244.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Layanan	4.244.100,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat KabupatenKota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	325 Perpustakaan	65 Perpustakaan	65 Perpustakaan	65 Perpustakaan	77.302.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	65 Perpustakaan	77.302.200,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan CetakDigital oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	25000 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	5000 Eksemplar	312.038.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5000 Eksemplar	312.038.400,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.01	0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	25 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	3.716.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Dokumen	3.716.800,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah KabupatenKota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	60 Orang	100 Orang	100 Orang	49.643.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	49.643.100,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	53.668.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	53.668.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	25000 Eksemplar	5000 Eksemplar	5000 Eksemplar	5000 Eksemplar	195.583.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5000 Eksemplar	92.256.900,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat KabupatenKota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1000 Eksemplar	4 Eksemplar	0 Eksemplar	200 Eksemplar	95.165.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Eksemplar	95.165.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	500 Perpustakaan	100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	10.003.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Perpustakaan	10.003.700,00	Dinas Perpustakaan
	2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**563.056.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**863.056.000,00**	**Dinas Perpustakaan**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta BacaBunda BacaBunda Literasi Tingkat Daerah KabupatenKota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	45 Orang	0 Orang	0 Orang	9 Orang	43.932.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	9 Orang	43.932.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	15 Perpustakaan	2 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	12.706.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Perpustakaan	12.706.400,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	25 Lokus	5 Lokus	5 Lokus	5 Lokus	506.417.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Lokus	506.417.600,00	Dinas Perpustakaan
	2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** ***Outcome :Meningkatnya pelestarian naskah kuno***	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**	**0.14 %**	**704 Judul**	**0.14 %**	**0.14 %**	**301.626.700,00**						**0.14 %**	**245.625.700,00**	
	2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**179.725.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**179.725.600,00**	**Dinas Perpustakaan**
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	149.229.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	149.229.600,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	5 Eksemplar	1 Eksemplar	1 Eksemplar	1 Eksemplar	30.496.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Eksemplar	30.496.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**121.901.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**65.900.100,00**	**Dinas Perpustakaan**
	2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	1025 Eksemplar	500 Eksemplar	0 Eksemplar	250 Eksemplar	115.230.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	250 Eksemplar	59.229.000,00	Dinas Perpustakaan
	2	23	03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	1250 Eksemplar	250 Eksemplar	250 Eksemplar	250 Eksemplar	6.671.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	250 Eksemplar	6.671.100,00	Dinas Perpustakaan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Kearsipan						**12.167.392.000,00**							**9.674.135.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.167.392.000,00**							**9.674.135.000,00**	
	2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**12.167.392.000,00**							**9.674.135.000,00**	
	2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**11.104.106.460,00**						**100 %**	**8.610.849.460,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	2	**24**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**49.172.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**61.242.100,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	27.930.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.885.900,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.885.900,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.885.900,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.885.900,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	5.698.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	5.698.500,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.164.832.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**7.164.834.000,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	38 Orang/bulan	42 Orang/bulan	56 Orang/bulan	6.882.298.700,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	56 Orang/bulan	6.882.300.200,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	205.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	205.800.000,00	Dinas Kearsipan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	24	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	72.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	72.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.733.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	4.733.800,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**135.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	97 Orang	Orang	42 Orang	21 Orang	135.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	18 Orang	135.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**137.389.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**137.389.500,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33 Paket	Paket	5 Paket	5 Paket	4.989.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Paket	4.989.500,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	Laporan	120 Laporan	8 Laporan	2.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Laporan	2.400.000,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	Laporan	41 Laporan	44 Laporan	130.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	44 Laporan	130.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.765.446.900,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**179.119.000,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	210 Unit	Unit	107 Unit	42 Unit	559.717.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	42 Unit	173.390.000,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	2.205.729.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	5.729.000,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**260.324.860,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**260.324.860,00**	**Dinas Kearsipan**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	24	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	38.056.860,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	38.056.860,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	4 Laporan	12 Laporan	50.868.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	50.868.000,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	3 Laporan	12 Laporan	171.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	171.400.000,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**255.940.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**255.940.000,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.730.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	43.730.000,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	Unit	24 Unit	18 Unit	157.580.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	18 Unit	157.580.000,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	Unit	39 Unit	26 Unit	26.130.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	26 Unit	26.130.000,00	Dinas Kearsipan
	2	24	01	2.09	0010	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	28.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	28.500.000,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** ***Outcome :Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis dan statis***	**Persentase Ketersediaan Arsip**	**100 %**	**6.89% (5.570 Arsip)**	**25.76 %**	**25.76 %**	**478.011.500,00**						**44.32 %**	**478.011.500,00**	
	2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**61.956.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**61.956.700,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	Berkas	100 Berkas	200 Berkas	9.171.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Berkas	9.171.800,00	Dinas Kearsipan
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas	Berkas	100 Berkas	200 Berkas	6.819.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Berkas	6.819.800,00	Dinas Kearsipan
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Laporan	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	45.965.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Laporan	45.965.100,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**344.889.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**344.889.800,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	10 Arsip	Arsip	2 Arsip	2 Arsip	5.524.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Arsip	5.524.200,00	Dinas Kearsipan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5000 Arsip	Arsip	150 Arsip	1000 Arsip	339.365.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1000 Arsip	339.365.600,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat KabupatenKota**	**Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**71.165.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**71.165.000,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah KabupatenKota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25 Pengguna	Pengguna	20 Pengguna	5 Pengguna	6.036.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Pengguna	6.036.600,00	Dinas Kearsipan
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah KabupatenKota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	Laporan	2 Laporan	4 Laporan	65.128.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	65.128.400,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** ***Outcome :Meningkatnya kuantitas arsip yang diamankan dan dilestarikan***	**Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**100 %**	**9.42% (1.171 arsip)**	**27.60 %**	**27.60 %**	**529.221.340,00**						**45.70 %**	**529.221.340,00**	
	2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah KabupatenKota yang Memiliki Retensi di Bawah Sepuluh Tahun**	**Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah Sepuluh Tahun Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**9.625.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**9.625.400,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1750 Berkas	Berkas	500 Berkas	350 Berkas	5.635.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	350 Berkas	5.635.300,00	Dinas Kearsipan
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah Sepuluh Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10000 Arsip	Arsip	500 Arsip	2000 Arsip	3.990.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2000 Arsip	3.990.100,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**03**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala KabupatenKota**	**Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**11.462.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**11.462.400,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	Arsip	5 Arsip	100 Arsip	5.597.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Arsip	5.597.300,00	Dinas Kearsipan
	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	Arsip	5 Arsip	100 Arsip	5.865.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Arsip	5.865.100,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media KabupatenKota**	**Persentase Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Yang Terkelola**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**434.991.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**434.991.300,00**	**Dinas Kearsipan**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	5000 Arsip	Arsip	150 Arsip	1000 Arsip	430.330.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1000 Arsip	430.330.100,00	Dinas Kearsipan
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5000 Arsip	Arsip	150 Arsip	1000 Arsip	4.661.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1000 Arsip	4.661.200,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**03**	**2.05**		**Pencarian Arsip Statis KabupatenKota yang Dinyatakan Hilang**	**Persentase Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**73.142.240,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**73.142.240,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	750 Arsip	Arsip	150 Arsip	150 Arsip	40.575.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Arsip	40.575.900,00	Dinas Kearsipan
	2	24	03	2.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	750 Arsip	Arsip	150 Arsip	150 Arsip	28.872.540,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Arsip	28.872.540,00	Dinas Kearsipan
	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip DPA	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	750 Arsip	Arsip	30 Arsip	150 Arsip	3.693.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Arsip	3.693.800,00	Dinas Kearsipan
	2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** ***Outcome :Meningkatnya pengelolaan pemberian izin penggunaan arsip***	**Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**56.052.700,00**						**100 %**	**56.052.700,00**	
	2	**24**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di KabupatenKota**	**Persentase Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**56.052.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**56.052.700,00**	**Dinas Kearsipan**
	2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	SOP	0 SOP	1 SOP	50.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 SOP	50.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	60 Arsip	Arsip	12 Arsip	12 Arsip	6.052.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Arsip	6.052.700,00	Dinas Kearsipan
						Dinas Perikanan dan Pertanian						**47.306.394.000,00**							**41.803.163.000,00**	
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**47.306.394.000,00**							**41.803.163.000,00**	
	3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**40.648.075.900,00**							**35.222.873.700,00**	
	3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**36.283.411.800,00**						**100 %**	**30.858.209.600,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**66.863.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**63.425.700,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	37.734.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.423.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.310.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.406.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.562.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	7.425.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	7.425.700,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**28.030.237.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**28.030.238.500,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	920 Orang/bulan	184 Orang/bulan	184 Orang/bulan	184 Orang/bulan	27.469.837.200,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	184 Orang/bulan	27.469.838.500,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	434.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	434.400.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	126.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	126.000.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**371.250.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**371.250.000,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	835 Paket	250 Paket	250 Paket	167 Paket	191.250.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	167 Paket	191.250.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	745 Orang	212 Orang	212 Orang	149 Orang	180.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	149 Orang	180.000.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**874.287.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**786.507.400,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	6 Paket	1 Paket	3.510.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	3.510.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	44.061.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Paket	44.061.200,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	46.060.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	46.060.800,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12 Paket	12 Paket	1 Paket	176.455.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	176.455.400,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	17.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	17.400.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	398.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	398.000.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	188.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	101.020.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.541.727.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**207.741.400,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	3 Unit	0 Unit	8 Unit	207.741.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Unit	207.741.400,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	5.333.986.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Unit	-	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**495.996.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**495.996.600,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	119.757.960,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	119.757.960,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	329.278.980,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	329.278.980,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	46.959.660,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	46.959.660,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**567.050.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**567.050.000,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.430.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	43.430.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	34 Unit	15 Unit	15 Unit	507.580.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Unit	507.580.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	16.040.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	24 Unit	16.040.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** ***Outcome :Meningkatnya produksi perikanan tangkap***	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**23355 Ton**	**20603.90 Ton**	**21401 Ton**	**21722 Ton**	**2.467.155.780,00**			**(PN 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**22048 Ton**	**2.467.155.780,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Satu Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya**	**23 Persen**	**Persen**	**18 Persen**	**19 Persen**	**262.830.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**20 Persen**	**262.830.800,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	262.830.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	262.830.800,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah KabupatenKota**	**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**	**48 Kelompok**	**207 Kelompok**	**35 Kelompok**	**40 Kelompok**	**1.565.442.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**42 Kelompok**	**1.565.442.900,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	750 Orang	125 Orang	150 Orang	150 Orang	72.192.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Orang	72.192.400,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	205 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	41 Kelompok	167.728.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	41 Kelompok	167.728.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3705 Unit	0 Unit	0 Unit	741 Unit	1.325.522.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	741 Unit	1.325.522.500,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI**	**Persentase Layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**638.882.080,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**638.882.080,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	10 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	638.882.080,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Layanan	638.882.080,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** ***Outcome :Meningkatnya produksi perikanan budidaya***	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**1606.33 Ton**	**1519.58 Ton**	**1559 Ton**	**1568.35 Ton**	**1.337.593.720,00**				**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**1577.76 Ton**	**1.337.593.720,00**	
	3	**25**	**04**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam Satu Daerah KabupatenKota**	**Persentase dokumen rekomendasi izin usaha pembudidayaan ikan yang diterbitkan**	**100 %**	**%**	**100 %**	**100 %**	**1.309.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.309.000,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lokasi danatau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam Satu Daerah KabupatenKota yang Menggunakan Teknologi Sederhana Semi Intensif dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing danatau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.309.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Rekomendasi	1.309.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase kelompok pembudidaya yang didampingi, di fasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya**	**100 %**	**%**	**100 %**	**100 %**	**194.742.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**194.742.100,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	430 Kelompok	70 Kelompok	80 Kelompok	82 Kelompok	61.513.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	84 Kelompok	61.513.900,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	430 Kelompok	70 Kelompok	80 Kelompok	82 Kelompok	62.007.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	84 Kelompok	62.007.800,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	430 Kelompok	70 Kelompok	80 Kelompok	82 Kelompok	71.220.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	84 Kelompok	71.220.400,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dimanfaatkan**	**100 %**	**%**	**100 %**	**100 %**	**1.141.542.620,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.141.542.620,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	149.513.160,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Dokumen	149.513.160,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit	1 Unit	1 Unit	16 Unit	433.556.860,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	18 Unit	433.556.860,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam Satu Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.215.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	4.215.700,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit	30 Unit	14 Unit	16 Unit	400.695.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	18 Unit	400.695.500,00	Dinas Perikanan dan Pertanian

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	04	2.04	0011	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	50 Unit	60 Unit	7 Unit	8 Unit	130.588.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	9 Unit	130.588.500,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	04	2.04	0012	Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.922.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	9.922.200,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	04	2.04	0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	225 Unit	0 Unit	0 Unit	45 Unit	13.050.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	45 Unit	13.050.700,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** ***Outcome :Meningkatnya cakupan pengawasan perikanan***	**Persentase Sumber Daya Perikanan Yang Diawasi**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**29.918.700,00**						**100 %**	**29.918.700,00**	
	3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam KabupatenKota**	**Persentase tingkat Kepatuhan Perikanan yang diperiksa**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**29.918.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**29.918.700,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupatenkota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	255 Pelaku Usaha	49 Pelaku Usaha	51 Pelaku Usaha	51 Pelaku Usaha	18.179.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 Pelaku Usaha	18.179.300,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan danatau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupatenkota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	500 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	11.739.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Pelaku Usaha	11.739.400,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** ***Outcome :Meningkatnya produksi dan nilai pengolahan hasil perikanan***	**Angka Konsumsi Ikan**	**49.73 Kg/ Kapita/ Tahun**	**48.55 Kg/ Kapita/ Tahun**	**48.74 Kg/ Kapita/ Tahun**	**48.94 Kg/ Kapita/ Tahun**	**529.995.900,00**						**49.13 Kg/ Kapita/ Tahun**	**529.995.900,00**	
	3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang ditargetkan**	**100 %**	**%**	**100 %**	**100 %**	**11.296.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**11.296.000,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Satu Daerah KabupatenKota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	11.296.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	11.296.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan**	**1 %**	**1 %**	**1 %**	**1 %**	**518.699.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**1 %**	**518.699.900,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	144.5 Ton	34.3 Ton	27.4 Ton	27.9 Ton	518.699.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	28.4 Ton	518.699.900,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**42.941.729.900,00**							**37.438.498.900,00**	
	3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** ***Outcome :Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian (urban farming)***	**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**	**15620 Ton**	**15614 Ton**	**15615 Ton**	**15616 Ton**	**5.008.335.760,00**				**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**15617 Ton**	**5.008.335.760,00**	
							Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	**12 Ton**	**5.4 Ton**	**7 Ton**	**8 Ton**							**9 Ton**		
							Peningkatan Produksi Hortikultura	**370 Ton**	**310.1 Ton**	**320.10 Ton**	**330.60 Ton**							**340.60 Ton**		
	3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase Pemanfaatan Bantuan Sarana Pertanian**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.568.652.780,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.568.652.780,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	53.908.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	53.908.700,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	110 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	4.514.744.080,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	22 Laporan	4.514.744.080,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan KabupatenKota**	**Persentase Bantuan SDG hewan yang termanfaatkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**431.097.080,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**431.097.080,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG HewanTanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	431.097.080,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	431.097.080,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran BenihBibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase pengawasan mutu pakan yang ditargetkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.258.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.258.800,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu BenihBibit Ternak Bahan PakanPakanTanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.258.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	4.258.800,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran BenihBibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengawasan bibit ternak yang ditargetkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.327.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.327.100,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi BenihBibit Ternak dan HPT Bahan PakanPakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.327.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	4.327.100,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** ***Outcome :Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian (urban farming)***	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**	**40 Ha**	**N/A**	**40 Ha**	**40 Ha**	**148.437.200,00**						**40 Ha**	**148.437.200,00**	
	3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan dan di manfaatkan**	**100 %**	**%**	**100 %**	**100 %**	**148.437.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**148.437.200,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	51.782.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	51.782.400,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	200 Ha	0 Ha	0 Ha	40 Ha	14.882.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	40 Ha	14.882.100,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanLPB Kawasan Pertanian Pangan BerkelanjutanKPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan BerkelanjutanLCPB di KabupatenKota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	81.772.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	81.772.700,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** ***Outcome :Meningkatnya pengendalian dan penanganan penyakit hewan***	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**90 %**	**70%**	**77.5 %**	**80 %**	**1.163.627.640,00**						**82.50 %**	**1.163.627.640,00**	
							Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	**20 %**	**12%**	**13.3 %**	**14.60 %**							**16 %**		
	3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah KabupatenKota**	**Persentase Hewan /Ternak yang tertangani kesehatannya**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.082.020,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**216.082.020,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	45 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	5 Kasus	5.833.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	7 Kasus	5.833.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam satu Daerah KabupatenKota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	210.249.020,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	210.249.020,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengawasan peredaran Produk Hewan dan hasil turunannya yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**481.380.540,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**481.380.540,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan danatau Pengeluaran Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	20 laporan	6 laporan	4 laporan	4 laporan	19.299.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 laporan	19.299.500,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	20 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	291.104.040,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	291.104.040,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	10 Laporan	16 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	170.977.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	170.977.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase variabel pengujian jasa laboratorium dan jasa medik Veteriner yang dilaksanakan dalam daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**297.450.680,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**297.450.680,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	20 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	29.091.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	29.091.900,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	60 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	12 Laporan	268.358.780,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	268.358.780,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase Dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterbitkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**168.714.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**168.714.400,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	167.337.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	167.337.400,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	27	04	2.04	0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Sertifikat Veteriner dan SKKHSKPH Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	1000 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	200 Dokumen	1.377.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Dokumen	1.377.000,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian**	**80 %**	**100%**	**80 %**	**80 %**	**98.733.300,00**						**80 %**	**98.733.300,00**	
						Outcome :Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	**Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian**	**80 %**	**100%**	**80 %**	**80 %**							**80 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian KabupatenKota**	**Rasio Luas Serangan OPT yang dikendalikan terhadap Total Luas lahan Pertanian kota Makassar**	**4.02 %**	**%**	**4.02 %**	**4.02 %**	**98.733.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**4.02 %**	**98.733.300,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	98.733.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Ha	98.733.300,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian***	**Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan**	**100 %**	**80%**	**100 %**	**100 %**	**7.241.600,00**						**100 %**	**7.241.600,00**	
	3	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pertimbangan Teknis**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.159.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**5.159.700,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.159.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	5.159.700,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**06**	**2.03**		**Izin Usaha Pengecer Toko Retail Sub Distributor Obat Hewan**	**Persentase Ketaatan izin Usaha pengecer obat hewan yang dilakukan pengawasan**	**100 %**	**91,89 %**	**100 %**	**100 %**	**2.081.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.081.900,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.081.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	2.081.900,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas binaan penyuluh pertanian***	**Persentase kelompok tani yang aktif**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**231.942.600,00**						**100 %**	**153.913.800,00**	
	3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan Kapasitasnya**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**231.942.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**153.913.800,00**	**Dinas Perikanan dan Pertanian**
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	205.772.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Unit	127.743.700,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	26.170.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Unit	26.170.100,00	Dinas Perikanan dan Pertanian

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pariwisata						**32.848.622.000,00**							**32.356.680.000,00**	
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**32.848.622.000,00**							**32.356.680.000,00**	
	3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**32.848.622.000,00**							**32.356.680.000,00**	
	3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**15.793.372.147,00**						**100 %**	**15.602.964.547,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**54.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	13.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.197.706.737,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**12.197.706.937,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	575 Orang/bulan	Orang/bulan	115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	11.629.462.537,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	115 Orang/bulan	11.629.462.737,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	382.320.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	382.320.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	185.924.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	185.924.200,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**26**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**396.432.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**396.432.800,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	Paket	0 Paket	3 Paket	216.432.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	216.432.800,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	Orang	24 Orang	24 Orang	180.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	24 Orang	180.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**829.343.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**829.343.100,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	23.755.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	23.755.900,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Paket	6 Paket	6 Paket	165.866.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Paket	165.866.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	76.650.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	76.650.600,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Paket	2 Paket	2 Paket	149.918.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	149.918.800,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	32.499.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	32.499.800,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.600.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	63.052.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	63.052.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	302.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	302.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**324.039.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**118.632.000,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	53 Unit	Unit	0 Unit	21 Unit	324.039.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Unit	118.632.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.069.708.460,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.069.708.460,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	873.364.460,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	873.364.460,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	196.344.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Laporan	196.344.000,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**586.141.250,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**586.141.250,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	41.630.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	41.630.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	Unit	24 Unit	24 Unit	408.851.250,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	24 Unit	408.851.250,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 Unit	Unit	0 Unit	300 Unit	24.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	300 Unit	24.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	405 Unit	Unit	81 Unit	81 Unit	55.610.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	81 Unit	55.610.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Unit	0 Unit	1 Unit	56.050.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	56.050.000,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** ***Outcome :Meningkatnya kuantitas daya tarik pariwisata***	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**18 %**	**24.88%**	**5 %**	**7 %**	**4.735.612.600,00**			**(PN 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru**	**(PD 5) Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal**		**10 %**	**4.434.078.200,00**	
	3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata KabupatenKota**	**Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola**	**3 DTW**	**1 DTW**	**3 DTW**	**3 DTW**	**1.017.533.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**3 DTW**	**715.998.700,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan KabupatenKota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	7 Lokasi	Lokasi	0 Lokasi	3 Lokasi	501.534.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Lokasi	200.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan KabupatenKota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	515.998.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	515.998.700,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata KabupatenKota**	**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dikelola**	**1 Kawasan**	**1 Kawasan**	**1 Kawasan**	**1 Kawasan**	**2.088.636.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**1 Kawasan**	**2.088.636.100,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	02	2.02	0004	PengadaanPemeliharaanRehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata KabupatenKota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	20 Unit	Unit	4 Unit	4 Unit	2.073.000.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Unit	2.073.000.900,00	Dinas Pariwisata
	3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata KabupatenKota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Orang	Orang	0 Orang	2 Orang	15.635.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Orang	15.635.200,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata KabupatenKota**	**Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikelola**	**1 Destinasi**	**1 Destinasi**	**1 Destinasi**	**1 Destinasi**	**1.562.126.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**1 Destinasi**	**1.562.126.900,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata KabupatenKota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Lokasi	Lokasi	0 Lokasi	1 Lokasi	183.070.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Lokasi	183.070.800,00	Dinas Pariwisata
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata KabupatenKota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	91.474.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	91.474.800,00	Dinas Pariwisata
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata KabupatenKota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1.135.430.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Lokasi	1.135.430.900,00	Dinas Pariwisata
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata KabupatenKota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	Laporan	12 Laporan	1 Laporan	116.959.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	116.959.300,00	Dinas Pariwisata
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata KabupatenKota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.191.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	35.191.100,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Laporan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Yang Tersusun**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**67.316.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**12 Laporan**	**67.316.500,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat KabKota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	67.316.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	67.316.500,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** ***Outcome :Meningkatnya kualtias pemasaran pariwisata***	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**19.23 %**	**N/A**	**4 %**	**5.88 %**	**3.895.274.400,00**						**11.11 %**	**3.895.274.400,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata KabupatenKota**	**Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Tersusun**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**3.895.274.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**12 Laporan**	**3.895.274.400,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata KabupatenKota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	471.193.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	471.193.400,00	Dinas Pariwisata
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata KabupatenKota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	50 Kegiatan	Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	2.709.995.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Kegiatan	2.709.995.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	60 Promosi	Promosi	12 Promosi	12 Promosi	714.086.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Promosi	714.086.000,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** ***Outcome :Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif***	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual**	**6.11 %**	**2.20 %**	**2.75 %**	**3.03 %**	**5.673.751.003,00**			**(PN 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru**	**(PD 5) Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal**		**3.63 %**	**5.673.751.003,00**	
	3	**26**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Prasarana Zona KreatifRuang KreatifKota Kreatif sebagai Ruang Berekspresi Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Prasarana Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif sebagai Ruang Berekspresi Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif yang Disediakan**	**1 Unit**	**N/A Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**200.000.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**1 Unit**	**200.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	5 Unit	Unit	0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Yang Tersusun**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**5.473.751.003,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**4 Dokumen**	**5.473.751.003,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	81.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	81.600.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	04	2.02	0004	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	409.374.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	409.374.700,00	Dinas Pariwisata
	3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.722.276.503,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	4.722.276.503,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	49.999.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	49.999.800,00	Dinas Pariwisata
	3	26	04	2.02	0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	15 Lembaga	Lembaga	0 Lembaga	3 Lembaga	24.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Lembaga	24.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	04	2.02	0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	91.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	91.500.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Produk	Produk	1 Produk	1 Produk	95.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Produk	95.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** ***Outcome :Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif***	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**	**25.85 %**	**N/A**	**10 %**	**12.92 %**	**2.750.611.850,00**			**(PN 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**16.16 %**	**2.750.611.850,00**	
	3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM Pariwisata yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas**	**477 Orang**	**500 Orang**	**528 Orang**	**477 Orang**	**1.593.272.350,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**477 Orang**	**1.593.272.350,00**	**Dinas Pariwisata**
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	434.887.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	434.887.600,00	Dinas Pariwisata
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	1500 Orang	Orang	320 Orang	300 Orang	801.179.790,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	300 Orang	801.179.790,00	Dinas Pariwisata
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	885 Orang	Orang	208 Orang	177 Orang	265.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	177 Orang	265.500.000,00	Dinas Pariwisata
	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	91.704.960,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	91.704.960,00	Dinas Pariwisata
	3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas**	**463 Orang**	**300 Orang**	**558 Orang**	**463 Orang**	**1.157.339.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**463 Orang**	**1.157.339.500,00**	**Dinas Pariwisata**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1750 Orang	Orang	350 Orang	350 Orang	818.339.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	350 Orang	818.339.500,00	Dinas Pariwisata
	3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	565 Orang	Orang	208 Orang	113 Orang	339.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	113 Orang	339.000.000,00	Dinas Pariwisata
						Dinas Perdagangan dan Perindustrian						**22.368.966.000,00**							**25.920.364.000,00**	
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**22.368.966.000,00**							**25.920.364.000,00**	
	3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**20.237.177.580,00**							**19.788.575.580,00**	
	3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**16.023.563.940,00**						**100 %**	**15.663.933.540,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**157.718.580,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.983.500,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	128.735.080,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.999.600,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.999.800,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.998.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.998.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.996.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.996.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	12.990.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	14 Laporan	12.990.100,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.087.894.760,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**12.087.895.240,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	415 Orang/bulan	70 Orang/bulan	83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	11.321.699.040,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	83 Orang/bulan	11.321.699.520,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	475 Dokumen	95 Dokumen	95 Dokumen	95 Dokumen	332.560.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	95 Dokumen	332.560.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	186.194.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	60 Dokumen	186.194.600,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	180 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	247.441.120,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	36 Laporan	247.441.120,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	Laporan	0 Laporan	4 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	336.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**139.500.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**139.500.000,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	Paket	0 Paket	1 Paket	79.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	79.500.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	4 Orang	5 Orang	5 Orang	60.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Orang	60.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**517.837.980,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**401.109.980,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.757.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	6.757.500,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	250.000.280,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	133.272.280,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	11.063.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	11.063.700,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	26.616.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	26.616.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	31.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	31.200.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	21 Laporan	185.816.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	21 Laporan	185.816.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6.384.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.384.500,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**474.326.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**320.159.000,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Unit	0 Unit	1 Unit	47.970.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	47.970.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Unit	0 Unit	10 Unit	154.173.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Unit	154.173.200,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	Unit	0 Unit	15 Unit	272.183.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Unit	118.015.800,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**956.730.820,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**956.730.820,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.959.660,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	19.959.660,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	364.811.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	364.811.800,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	571.959.360,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	571.959.360,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.353.555.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.353.555.000,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	44.380.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	510.270.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	24 Unit	510.270.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	235 Unit	Unit	35 Unit	47 Unit	45.090.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	47 Unit	45.090.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Unit	55.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	698.815.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	698.815.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** ***Outcome :Meningkatnya kemudahan peroses perizinan dan pendaftaran berusaha***	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**	**100 %**	**90%**	**100 %**	**100 %**	**199.320.860,00**						**100 %**	**199.320.860,00**	
	3	**30**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang terbit**	**360 unit**	**340 unit**	**340 unit**	**345 unit**	**14.102.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**350 unit**	**14.102.100,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	14.102.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	14.102.100,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Jumlah Gudang yang Memiliki TDG**	**480 unit**	**440 unit**	**440 unit**	**450 unit**	**74.475.680,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**460 unit**	**74.475.680,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	74.475.680,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	74.475.680,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**30**	**02**	**2.03**		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba STPW untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	**Jumlah Tanda Pendaftaran Waralaba STPW Untuk Penerima Waralaba Dalam Negeri Yang Terbit**	**485 unit**	**460 unit**	**460 unit**	**465 unit**	**17.894.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**470 unit**	**17.894.900,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	02	2.03	0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	17.894.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	17.894.900,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**Jumlah SIUP Minol Golongan B dan C Yang Diterbitkan**	**140 unit**	**110 unit**	**110 unit**	**120 unit**	**76.888.280,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**125 unit**	**76.888.280,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	76.888.280,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	76.888.280,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**02**	**2.06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Berbahaya**	**4 Laporan**	**Laporan**	**0 Laporan**	**4 Laporan**	**15.959.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**4 Laporan**	**15.959.900,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	15.959.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	15.959.900,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** ***Outcome :Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana perdagangan dan distribusi barang***	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**54.362.000,00**				**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**100 %**	**54.362.000,00**	
	3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun dan Dalam Kondisi Baik**	**0 unit**	**0 unit**	**0 unit**	**0 unit**	**4.364.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**1 unit**	**4.364.900,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	4.364.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Unit	4.364.900,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina**	**200 Orang**	**100 Orang**	**100 Orang**	**100 Orang**	**49.997.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**200 Orang**	**49.997.100,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.997.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	49.997.100,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**748.728.080,00**				**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**100 %**	**748.728.080,00**	
						Outcome :Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
	3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar KabupatenKota**	**Jumlah Harga dan Stok Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terkendali**	**31 Jenis**	**31 Jenis**	**31 Jenis**	**31 Jenis**	**733.903.080,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**31 Jenis**	**733.903.080,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	128.023.180,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	128.023.180,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam Satu KabupatenKota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	605.879.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	605.879.900,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Yang Disusun**	**4**		**0**	**4**	**14.825.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**4**	**14.825.000,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	20 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	14.825.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	14.825.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar**	**14.95 %**	**11.95%**	**12.10 %**	**12.10 %**	**1.606.565.580,00**			**(PN 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**(PD 1) Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi**		**13 %**	**1.606.565.580,00**	
						Outcome :Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor														
	3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Satu Daerah KabupatenKota**	**Jumlah Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Yang Difasilitasi**	**20 Pelaku Usaha**	**10 Pelaku Usaha**	**10 Pelaku Usaha**	**15 Pelaku Usaha**	**1.606.565.580,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**15 Pelaku Usaha**	**1.606.565.580,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	102 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	366.819.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	17 Pelaku Usaha	366.819.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	120 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	541.967.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Pelaku Usaha	541.967.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	98 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	368.842.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	17 Pelaku Usaha	368.842.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	117 Produk	15 Produk	18 Produk	18 Produk	328.937.580,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	21 Produk	328.937.580,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas tertib niaga dan mutu produk***	**Persentase Penanganan Pengaduan Kemetrologian**	**90 %**	**70%**	**90 %**	**90 %**	**1.310.692.320,00**						**90 %**	**1.221.720.720,00**	
	3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan**	**Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Yang Ditera Ulang**	**2000 Pelaku Usaha**	**1400 Pelaku Usaha**	**1600 Pelaku Usaha**	**1700 Pelaku Usaha**	**1.310.692.320,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**1800 Pelaku Usaha**	**1.221.720.720,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	12550 Unit	1400 Unit	1800 Unit	2000 Unit	1.205.083.760,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2250 Unit	1.116.112.160,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	06	2.01	0002	PengawasanPenyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000 Orang	100 Orang	200 Orang	200 Orang	105.608.560,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Orang	105.608.560,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** ***Outcome :Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri***	**Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan**	**90 %**	**60%**	**70 %**	**70 %**	**293.944.800,00**			**(PN 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**(PD 1) Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi**		**75 %**	**293.944.800,00**	
	3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Pada Pameran Promosi Produk Dalam Negeri**	**20 UMKM**	**15 UMKM**	**15 UMKM**	**20 UMKM**	**293.944.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**20 UMKM**	**293.944.800,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat KabupatenKota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	75 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	107.547.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 UMKM	107.547.600,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat KabupatenKota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	500 UMKM	0 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	186.397.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 UMKM	186.397.200,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**18.155.352.360,00**							**21.795.721.960,00**	
	3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** ***Outcome :Meningkatnya realisasi pembangunan industri***	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**4.8 %**	**N/A**	**4.8 %**	**4.8 %**	**1.975.441.820,00**			**(PN 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**(PD 1) Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi**		**4.8 %**	**5.975.441.820,00**	
	3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri KabupatenKota**	**Jumlah Dokumen Perencana dan Evaluasi pembangunan industri yang tersusun**	**1 Dokumen**	**0 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1.975.441.820,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**1 Dokumen**	**5.975.441.820,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri KabupatenKota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	45.905.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	45.905.400,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	65.405.880,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	65.405.880,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	381.077.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	381.077.300,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	317.453.040,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	317.453.040,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.150.932.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	5.150.932.300,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal JPH di level KabupatenKota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	14.667.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	14.667.900,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** ***Outcome :Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian***	**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**	**0.41 %**	**67.03%**	**0.41 %**	**0.41 %**	**39.410.400,00**						**0.41 %**	**39.410.400,00**	
	3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan KabupatenKota**	**Jumlah Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Yang Diterbitkan**	**385 unit**	**360 unit**	**360 unit**	**365 unit**	**39.410.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**370 unit**	**39.410.400,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan KabupatenKota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	30.303.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	30.303.600,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratanstandar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach OSS RBA	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9.106.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	9.106.800,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** *Outcome :Meningkatnya pemanfaatan informasi industri*	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**116.936.200,00**						**100 %**	**116.936.200,00**	
	3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan KabupatenKota**	**Jumlah Laporan Data dan Informasi Industri Yang Tersusun**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**116.936.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**4 Laporan**	**116.936.200,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup KabupatenKota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	88.860.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	88.860.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri KabupatenKota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	13.751.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	13.751.600,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup KabupatenKota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	14.324.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	14.324.600,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						Sekretariat Daerah						**257.732.750.000,00**							**254.937.910.000,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**208.694.380.556,00**							**205.899.540.556,00**	
	2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**208.694.380.556,00**							**205.899.540.556,00**	
	2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase PKK aktif**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**13.053.148.700,00**						**100 %**	**13.053.148.700,00**	
						Outcome :Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan	**Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lingkup Kelurahan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah KabupatenKota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**13.053.148.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**13.053.148.700,00**	**Sekretariat Daerah**
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Lembaga	153 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	8.681.745.460,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Lembaga	8.681.745.460,00	Sekretariat Daerah
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15 Unit	153 Unit	153 Unit	3 Unit	4.086.163.620,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Unit	4.086.163.620,00	Sekretariat Daerah
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	153 Laporan	153 Laporan	1 Laporan	285.239.620,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	285.239.620,00	Sekretariat Daerah
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**244.679.601.300,00**							**241.884.761.300,00**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**244.679.601.300,00**							**241.884.761.300,00**	
	4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**195.641.231.856,00**						**100 %**	**192.846.391.856,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
							Persentase ketersediaan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di Fasilitas	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Indeks Kematangan Organisasi	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**141.914.420,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**141.914.420,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						107.414.420,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah		107.414.420,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.500.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	16.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**52.268.829.428,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**52.268.829.828,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1255 Orang/bulan	251 Orang/bulan	251 Orang/bulan	251 Orang/bulan	49.652.894.758,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	251 Orang/bulan	49.652.895.158,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.905.974.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.905.974.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	451.805.510,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	451.805.510,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	9.410.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Laporan	9.410.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	238.745.160,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	238.745.160,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.803.337.560,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**6.803.337.560,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.859.337.560,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.859.337.560,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.944.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	4.944.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.382.008.300,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.382.008.300,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10960 Paket	2192 Paket	2192 Paket	2192 Paket	908.008.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2192 Paket	908.008.300,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	205 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	474.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	21 Orang	474.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**20.914.452.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**20.914.452.700,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	180 Paket	36 Paket	36 Paket	36 Paket	697.999.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	36 Paket	697.999.200,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1.480.003.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Paket	1.480.003.500,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	10800 Dokumen	2160 Dokumen	2160 Dokumen	2160 Dokumen	198.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2160 Dokumen	198.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	16.849.900.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	200 Laporan	16.849.900.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	770 Laporan	154 Laporan	154 Laporan	154 Laporan	1.688.550.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	154 Laporan	1.688.550.000,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**20.738.043.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**17.943.203.000,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	994.917.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	994.917.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.012.040.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Unit	7.346.026.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17.731.086.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	17 Unit	9.602.260.000,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**40.079.663.760,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**40.079.663.760,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52500 Laporan	10500 Laporan	10500 Laporan	10500 Laporan	3.843.389.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10500 Laporan	3.843.389.100,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.823.669.120,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	8.823.669.120,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	23.412.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Laporan	23.412.600.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1500 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	4.000.005.540,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	300 Laporan	4.000.005.540,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**13.285.659.708,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**13.285.659.708,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.274.830.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Unit	1.274.830.400,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2195 Unit	439 Unit	439 Unit	439 Unit	7.015.092.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	439 Unit	7.015.092.900,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	58.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	58.800.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.850.111.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Unit	1.850.111.200,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	3.086.825.208,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Unit	3.086.825.208,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.978.940.620,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.978.940.620,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	326.373.920,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Orang/Bulan	326.373.920,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	80.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Orang	80.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	3.572.566.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Orang/Bulan	3.572.566.700,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**20.027.735.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**20.027.735.500,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.494.690.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	6.494.690.000,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 01 01 2.12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.079.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	4.079.500.000,00	Sekretariat Daerah
	4 01 01 2.12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.453.545.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	9.453.545.500,00	Sekretariat Daerah
	4 01 01 2.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**923.695.760,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**923.695.760,00**	**Sekretariat Daerah**
	4 01 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	176.736.540,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Dokumen	176.736.540,00	Sekretariat Daerah
	4 01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	429.636.580,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Laporan	429.636.580,00	Sekretariat Daerah
	4 01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	317.322.640,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	317.322.640,00	Sekretariat Daerah
	4 01 01 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**15.096.950.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**15.096.950.700,00**	**Sekretariat Daerah**
	4 01 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3900 Laporan	780 Laporan	780 Laporan	780 Laporan	12.397.521.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	780 Laporan	12.397.521.000,00	Sekretariat Daerah
	4 01 01 2.14 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1600 Laporan	320 Laporan	320 Laporan	320 Laporan	456.662.360,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	320 Laporan	456.662.360,00	Sekretariat Daerah
	4 01 01 2.14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	500 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	2.242.767.340,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	100 Laporan	2.242.767.340,00	Sekretariat Daerah
	4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** ***Outcome :Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**Kinerja penyelenggaraan pemerintahan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**43.439.409.440,00**			**(PN 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan**	**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**100 %**	**43.439.409.440,00**	
			Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/ fasilitas	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase produk hukum yang dihasilkan	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Efektivitas kerja sama daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
	4 01 02 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Administrasi Tata Pemerintahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.280.153.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.280.153.000,00**	**Sekretariat Daerah**
	4 01 02 2.01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	280.530.220,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	280.530.220,00	Sekretariat Daerah
	4 01 02 2.01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	318.019.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	318.019.500,00	Sekretariat Daerah
	4 01 02 2.01 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	681.603.280,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	681.603.280,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**34.775.787.820,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**34.775.787.820,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	110 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	32.815.951.220,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	22 Dokumen	32.815.951.220,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	860.997.620,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Dokumen	860.997.620,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.098.838.980,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Dokumen	1.098.838.980,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.186.380.440,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**3.186.380.440,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	849.769.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Dokumen	849.769.800,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	60 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	1.941.328.440,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Kasus	1.941.328.440,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	395.282.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Dokumen	395.282.200,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.197.088.180,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.197.088.180,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	150 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	2.198.665.640,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Dokumen	2.198.665.640,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.407.186.220,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	1.407.186.220,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	591.236.320,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	591.236.320,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**5.598.960.004,00**						**100 %**	**5.598.960.004,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	**Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
							Tingkat kematangan UKPBJ	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**							**Level 3**		
	4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.943.507.540,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.943.507.540,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	255 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	1.257.366.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 Dokumen	1.257.366.100,00	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	349.335.480,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	349.335.480,00	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	286.805.960,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	286.805.960,00	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Administrasi Pembangunan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**727.691.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**727.691.900,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	454.727.980,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	454.727.980,00	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	129.048.380,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	129.048.380,00	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	143.915.540,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	143.915.540,00	Sekretariat Daerah
	4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.927.760.564,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.927.760.564,00**	**Sekretariat Daerah**
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	345.032.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	345.032.700,00	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.158.762.764,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Dokumen	1.158.762.764,00	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	1.423.965.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	250 Orang	1.423.965.100,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Sekretariat DPRD						**191.527.770.000,00**							**200.028.777.000,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**191.527.770.000,00**							**200.028.777.000,00**	
	4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**						**191.527.770.000,00**							**200.028.777.000,00**	
	4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**107.009.817.520,00**						**100 %**	**115.510.824.520,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan layanan administrasi anggota DPRD	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
	4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**53.957.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.972.500,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	24.984.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.998.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.998.500,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.981.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.981.200,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.994.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.994.900,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	12.997.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Laporan	12.997.900,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**15.559.221.450,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**15.559.222.050,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	415 Orang/bulan	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	70 Orang/bulan	13.462.802.490,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	75 Orang/bulan	13.462.803.090,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.112.280.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.112.280.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	751.703.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	751.703.300,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.409.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Laporan	4.409.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	228.026.660,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	228.026.660,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.155.500.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**5.236.500.000,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	770 Orang	100 Orang	100 Orang	150 Orang	5.155.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	155 Orang	5.155.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.660.680.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**4.660.680.200,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	95 Paket	10 Paket	10 Paket	15 Paket	193.774.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Paket	193.774.100,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500 Paket	100 Paket	100 Paket	100 Paket	1.358.335.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	100 Paket	1.358.335.600,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	1.171.578.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Paket	1.171.578.300,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket	100 Paket	100 Paket	10 Paket	568.148.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Paket	568.148.400,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	350 Paket	100 Paket	100 Paket	50 Paket	414.608.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	60 Paket	414.608.800,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	635.534.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	635.534.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	318.701.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	318.701.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.630.802.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**10.035.793.700,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	270 Unit	63 Unit	63 Unit	60 Unit	1.630.802.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Unit	6.947.870.700,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.541.305.740,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**4.541.305.740,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.197.579.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	1.197.579.600,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.036.411.920,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	2.036.411.920,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.307.314.220,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	1.307.314.220,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.326.015.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**4.326.015.000,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	230 Unit	50 Unit	50 Unit	40 Unit	346.010.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	40 Unit	346.010.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	1.064.320.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Unit	1.064.320.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	750 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	16.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	150 Unit	16.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	462.020.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	60 Unit	462.020.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.337.665.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Unit	2.337.665.000,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**37.636.893.626,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**37.636.893.626,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	250 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	36.503.760.526,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Orang/Bulan	36.503.760.526,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	250 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	325.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Paket	325.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	250 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	808.133.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Orang	808.133.100,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD Yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**33.109.441.704,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**33.109.441.704,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1000 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	18.851.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	200 Laporan	18.851.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	14.258.441.704,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Paket	14.258.441.704,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**84.517.952.480,00**						**100 %**	**84.517.952.480,00**	
						Outcome :Meningkatnya fasilitasi kinerja DPRD	**Persentase penetapan Ranperda tahun N**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
	4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**26.621.474.980,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**26.621.474.980,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	738.522.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	738.522.600,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	370 Dokumen	74 Dokumen	74 Dokumen	74 Dokumen	6.122.657.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	74 Dokumen	6.122.657.500,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	492.194.880,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	492.194.880,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan PenjelasanKeterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.227.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Dokumen	1.227.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	18.041.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Dokumen	18.041.100.000,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.717.788.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.717.788.300,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	115.671.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	115.671.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	116.129.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	116.129.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	493.232.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	493.232.200,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	510.925.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	510.925.200,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	481.830.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	481.830.900,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.898.296.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**6.898.296.400,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.540.634.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Laporan	1.540.634.600,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.480.725.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Laporan	1.480.725.900,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.713.988.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Laporan	1.713.988.100,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.600.557.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Laporan	1.600.557.400,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	562.390.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	562.390.400,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Tesedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**9.738.336.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**9.738.336.800,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	150 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	1.385.417.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Orang	1.385.417.600,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	90 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	476.085.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	18 Orang	476.085.600,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	250 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	2.817.157.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Dokumen	2.817.157.600,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.676.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	9.676.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.050.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	5.050.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**32.375.736.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**32.375.736.800,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.471.640.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.471.640.000,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	500 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	4.471.640.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Laporan	4.471.640.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan PokokPokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.781.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	2.781.800,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	750 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	30.037.635.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	150 Dokumen	30.037.635.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	375 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	2.335.320.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	75 Orang	2.335.320.000,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Pengawasan Kode Etik DPRD Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**636.944.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**636.944.500,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	636.944.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	636.944.500,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase Kerja Sama Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**66.352.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**66.352.800,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	66.352.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Dokumen	66.352.800,00	Sekretariat DPRD
	4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD Yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.991.381.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.991.381.900,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	250 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	84.702.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Dokumen	84.702.000,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	250 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	1.865.613.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 Dokumen	1.865.613.300,00	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	41.066.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	41.066.600,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						**38.576.590.000,00**							**38.728.111.000,00**	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**38.576.590.000,00**							**38.728.111.000,00**	
	5	**01**				**PERENCANAAN**						**38.576.590.000,00**							**38.728.111.000,00**	
	5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**27.812.750.476,00**						**100 %**	**27.832.171.476,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**49.316.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**72.077.200,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	16.437.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.801.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.933.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.933.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.034.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.034.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.997.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.997.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	11.111.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Laporan	11.111.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**20.511.788.356,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**20.508.448.156,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/bulan	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	90 Orang/bulan	19.629.530.276,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	93 Orang/bulan	19.629.824.676,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	342.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	342.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	150.712.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	150.712.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.634.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.415.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	4.415.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	5.126.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.126.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	376.370.480,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	376.370.480,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.101.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.101.000.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	585 Paket	100 Paket	0 Paket	113 Paket	81.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	115 Paket	81.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	585 Orang	72 Orang	72 Orang	113 Orang	1.020.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	115 Orang	1.020.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.869.321.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.869.321.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	7.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	115.710.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	115.710.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	163.659.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	163.659.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	90.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	168.984.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	168.984.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	372.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	372.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	135.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	135.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	901.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	901.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	464.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	464.600.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	450.968.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	450.968.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**719.511.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**719.511.200,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	172 Unit	29 Unit	82 Unit	32 Unit	562.149.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	35 Unit	562.149.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	33 Unit	37 Unit	12 Unit	157.361.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Unit	157.361.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.113.280.320,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.113.280.320,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	245.680.320,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	245.680.320,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	76.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	76.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	5 Laporan	790.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Laporan	790.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.112.533.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.112.533.600,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	31.290.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	31.290.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit	65 Unit	60 Unit	60 Unit	673.843.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	60 Unit	673.843.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1481 Unit	155 Unit	289 Unit	281 Unit	107.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	300 Unit	107.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	15 Unit	6 Unit	6 Unit	3 Unit	300.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** ***Outcome :Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah***	**Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**3.060.051.644,00**			**(PN 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan**	**(PD 6) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital**		**100 %**	**3.192.151.644,00**	
	5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Perencanaan dan Pendanaan Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.269.640.844,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.271.740.844,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	1 Berita Acara	120.418.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Berita Acara	120.418.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat DaerahLintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	1 Berita Acara	122.010.024,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Berita Acara	122.010.024,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang KabupatenKota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	1 Berita Acara	621.794.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Berita Acara	623.894.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	14 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	1.405.417.920,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	1.405.417.920,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**36.663.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**36.663.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	36.663.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	36.663.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**404.269.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**534.269.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di KabupatenKota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	118.407.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	118.407.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	285.862.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	415.862.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**349.478.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**349.478.800,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	349.478.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	349.478.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** ***Outcome :Meningkatnya keselarasan perencanaan Perangkat Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Kota***	**Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**7.703.787.880,00**						**100 %**	**7.703.787.880,00**	
							Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
	5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.475.674.560,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.475.674.560,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	437.315.860,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	437.315.860,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	101.178.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	101.178.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	205.850.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	205.850.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	490.736.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	490.736.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	325.340.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	325.340.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	7 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	83.155.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	83.155.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	198.866.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	198.866.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	633.231.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	633.231.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.469.821.540,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.469.821.540,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	745.158.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	745.158.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	2 Laporan	85.681.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	85.681.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	207.382.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	207.382.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	683.944.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	683.944.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	357.741.320,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	357.741.320,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	64.982.640,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	64.982.640,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	154.711.180,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	154.711.180,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	170.220.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	170.220.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.758.291.780,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.758.291.780,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	271.673.580,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	271.673.580,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	130.210.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	130.210.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	249.465.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	249.465.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	489.125.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	489.125.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan RPJPD RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	205.541.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	205.541.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	2 Laporan	36.481.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	36.481.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	4 Laporan	109.060.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	109.060.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.266.733.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	1.266.733.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						**92.337.242.000,00**							**92.288.704.000,00**	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**92.337.242.000,00**							**92.288.704.000,00**	
	5	**02**				**KEUANGAN**						**92.337.242.000,00**							**92.288.704.000,00**	
	5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**37.863.929.780,00**						**100 %**	**36.815.391.780,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**117.537.120,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.998.400,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	88.538.720,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.999.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.999.900,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.999.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	12.999.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	12.999.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**26.021.191.626,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**26.021.192.346,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	470 Orang/bulan	63 Orang/bulan	94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	23.245.933.486,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	94 Orang/bulan	23.245.934.206,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.332.711.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.332.711.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8500 Dokumen	2 Dokumen	1700 Dokumen	1700 Dokumen	1.289.252.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1700 Dokumen	1.289.252.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	9.122.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	9.122.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.198.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.198.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98.973.440,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	98.973.440,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**38.625.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**38.625.800,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.03	0004	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	38.625.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	38.625.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**658.036.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**658.036.000,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	Paket	0 Paket	4 Paket	154.423.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Paket	154.423.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	275 Orang	46 Orang	55 Orang	55 Orang	472.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	55 Orang	472.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 Orang	Orang	0 Orang	120 Orang	31.113.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	120 Orang	31.113.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.274.670.704,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**5.274.670.704,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	25.860.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	25.860.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	4 Paket	6 Paket	5 Paket	470.567.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	470.567.900,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket	28.900.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	28.900.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	300.381.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	300.381.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	161.875.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	161.875.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.280.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	35.280.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	69.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	69.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850 Laporan	123 Laporan	225 Laporan	170 Laporan	1.522.310.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	170 Laporan	1.522.310.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	305.910.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	305.910.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.354.585.704,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.354.585.704,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.093.438.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.093.438.400,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	41 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	800.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Unit	800.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit	180 Unit	109 Unit	17 Unit	293.438.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	17 Unit	293.438.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Unit	0 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.495.046.180,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.495.046.180,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	7.800.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	612.152.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	612.152.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	875.093.580,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	875.093.580,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.165.383.950,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.165.383.950,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	45.286.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	45.286.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	375 Unit	43 Unit	112 Unit	75 Unit	662.499.950,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	75 Unit	662.499.950,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	590 Unit	102 Unit	135 Unit	118 Unit	117.700.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	118 Unit	117.700.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	339.897.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	339.897.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** ***Outcome :Meningkatnya tata kelola keuangan daerah***	**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**	**30 %**	**26.59%**	**29.69 %**	**30 %**	**47.017.935.500,00**			**(PN 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan**	**(PD 6) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital**		**30 %**	**47.017.935.500,00**	
							Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	**40 %**	**26.99%**	**40.58 %**	**40 %**							**40 %**		
							Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**90 %**	**80.71%**	**85 %**	**85 %**							**90 %**		
							Persentase Penurunan SILPA	**2.92 %**	**5.59%**	**4.35 %**	**3 %**							**2.98 %**		
							Persentase laporan keuangan tepat waktu	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
	5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.215.609.640,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**8.215.609.640,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	371.559.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	371.559.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5 02 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	388.168.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	388.168.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5 02 02 2.01 0003	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	255 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	71.423.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 Dokumen	71.423.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5 02 02 2.01 0004	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	255 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	67.744.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 Dokumen	67.744.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5 02 02 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	255 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	77.253.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 Dokumen	77.253.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5 02 02 2.01 0006	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	255 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	77.796.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 Dokumen	77.796.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5 02 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	734.669.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	734.669.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5 02 02 2.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	648.220.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	648.220.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5 02 02 2.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.232.814.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Dokumen	1.232.814.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5 02 02 2.01 0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	438.265.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	438.265.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.436.244.740,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	2.436.244.740,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	538.214.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	538.214.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah KabupatenKota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5500 Orang	1025 Orang	1000 Orang	1100 Orang	1.133.238.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1100 Orang	1.133.238.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaaan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.886.006.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**3.886.006.400,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.075.249.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	1.075.249.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4000 Dokumen	12 Dokumen	800 Dokumen	800 Dokumen	89.925.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	800 Dokumen	89.925.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.034.185.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	1.034.185.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	236.155.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	236.155.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	11.158.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	11.158.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SPD dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	179.268.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	179.268.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	16.036.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	16.036.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah KabupatenKota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7180 Orang	453 Orang	1436 Orang	1436 Orang	1.244.029.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1436 Orang	1.244.029.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.759.756.460,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.759.756.460,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	112.163.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	112.163.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan PendapatanLO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	15 Dokumen	51 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	61.227.360,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	61.227.360,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	85 Laporan	51 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	55.764.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	17 Laporan	55.764.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	173.690.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	173.690.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KabupatenKota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KabupatenKota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	425.286.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	425.286.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	326.379.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	326.379.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	109.250.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	109.250.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah KabupatenKota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	3750 Orang	3900 Orang	1950 Orang	750 Orang	495.996.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	750 Orang	495.996.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase capaian penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**878.954.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**878.954.000,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase capaian penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**30.000.000.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**30.000.000.000,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	8 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	358.845.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	358.845.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	183.939.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	183.939.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.170.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	336.170.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	30.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.277.609.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.277.609.000,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.737.418.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	1.737.418.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah KabupatenKota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1000 Orang	2 Orang	200 Orang	200 Orang	540.191.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	200 Orang	540.191.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** ***Outcome :Meningkatnya tata kelola aset daerah***	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**4 %**	**4%**	**4 %**	**4 %**	**7.455.376.720,00**						**4 %**	**8.455.376.720,00**	
	5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase capaian pengelolaan barang milik daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.455.376.720,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**8.455.376.720,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	217.628.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	217.628.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	89.257.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	89.257.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	122.379.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	122.379.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.446.865.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	1.446.865.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	92.630.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	92.630.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	114.499.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	114.499.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.924.006.020,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	2.924.006.020,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	679.627.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	679.627.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.006.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	100.006.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	112.906.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	112.906.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah KabupatenKota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	11750 Orang	1482 Orang	1500 Orang	2350 Orang	1.555.570.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2350 Orang	1.555.570.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Badan Pendapatan Daerah						**131.281.504.000,00**							**131.264.076.000,00**	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**131.281.504.000,00**							**131.264.076.000,00**	
	5	**02**				**KEUANGAN**						**131.281.504.000,00**							**131.264.076.000,00**	
	5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100.628.646.774,00**						**100 %**	**100.611.218.774,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**86.428.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**69.000.000,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	48.719.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.010.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.061.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.103.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.056.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.477.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	13.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**81.027.295.840,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**81.027.296.340,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1270 Orang/bulan	188 Orang/bulan	228 Orang/bulan	250 Orang/bulan	79.828.777.240,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	240 Orang/bulan	79.828.777.740,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	710.520.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	710.520.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	394.281.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	394.281.900,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85 Laporan	15 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	93.716.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	17 Laporan	93.716.700,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.374.900.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.374.900.000,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	1 Paket	0 Paket	2 Paket	321.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	321.400.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2125 Orang	447 Orang	480 Orang	165 Orang	1.053.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	490 Orang	1.053.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.186.796.080,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.186.796.080,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	89.599.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	89.599.500,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2 Paket	5 Paket	3 Paket	359.816.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	359.816.500,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	145.580.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	145.580.300,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	304.208.180,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	304.208.180,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.219.801.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	1.219.801.800,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	54 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	162.810.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Dokumen	162.810.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	820 Laporan	500 Laporan	100 Laporan	150 Laporan	59.818.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	155 Laporan	59.818.200,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	741 Laporan	204 Laporan	157 Laporan	101 Laporan	836.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	160 Laporan	836.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.161.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.161.600,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.763.232.970,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.763.232.970,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1152 Unit	167 Unit	167 Unit	484 Unit	3.763.232.970,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	167 Unit	3.763.232.970,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.561.091.684,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.561.091.684,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.431.391.484,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	2.431.391.484,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	235.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	235.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	894.700.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	894.700.200,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.292.901.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**7.292.901.700,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	45.130.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	45.130.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1040 Unit	213 Unit	206 Unit	200 Unit	2.411.050.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	210 Unit	2.411.050.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3000 Unit	166 Unit	566 Unit	600 Unit	957.069.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	600 Unit	957.069.200,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.09 0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	3.529.078.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	3.529.078.700,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 2.09 0010	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	350.573.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	350.573.800,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** ***Outcome :Meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak daerah***	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**47.06 %**	**38.17%**	**44.46 %**	**45.01 %**	**30.652.857.226,00**				**(PD 2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan**		**45.46 %**	**30.652.857.226,00**	
	5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Realisasi Pajak Daerah**	**100 %**	**81.61 %**	**100 %**	**100 %**	**30.652.857.226,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**30.652.857.226,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	**74 %**	**50 %**	**50 %**	**50 %**							**56 %**		
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	**97 %**	**92.41 %**	**92.5 %**	**93 %**							**94 %**		
	5 02 04 2.01 0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.075.299.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	1.075.299.400,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	15 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	906.701.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Dokumen	906.701.500,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	40 Laporan	3 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	19.766.601.326,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Laporan	19.766.601.326,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.144.849.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	1.144.849.400,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 04 2.01 0006	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60 Laporan	14 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.279.617.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	1.279.617.900,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 04 2.01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBBP serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	265000 Obyek Pajak	50300 Obyek Pajak	51000 Obyek Pajak	51000 Obyek Pajak	3.362.800.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	52000 Obyek Pajak	3.362.800.300,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 04 2.01 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	118000 Layanan	21600 Layanan	22000 Layanan	22500 Layanan	790.097.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	23000 Layanan	790.097.400,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 04 2.01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60 Dokumen	1620 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	81.582.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	81.582.400,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 04 2.01 0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	60 Dokumen	50 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	486.372.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	486.372.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 04 2.01 0013	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	60 Dokumen	6 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.672.590.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	1.672.590.900,00	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 04 2.01 0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	60 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	86.344.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	86.344.700,00	Badan Pendapatan Daerah
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah						**25.537.771.000,00**							**25.552.296.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.537.771.000,00**							**25.552.296.000,00**	
	5 03	**KEPEGAWAIAN**						**20.654.078.900,00**							**20.668.603.900,00**	
	5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**16.366.735.100,00**						**100 %**	**16.381.260.100,00**	
		Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	5 03 01 2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**52.897.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**67.422.000,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	24.696.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.872.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.872.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.056.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.722.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.941.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.941.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	11.607.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Laporan	11.607.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**13.973.552.530,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**13.973.553.330,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	570 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	114 Orang/bulan	13.526.108.830,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	114 Orang/bulan	13.526.109.630,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	18 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	295.440.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	295.440.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	152.003.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Dokumen	152.003.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**642.618.250,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**642.618.250,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket	0 Paket	120 Paket	120 Paket	101.587.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	120 Paket	101.587.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2000 Orang	558 Orang	400 Orang	400 Orang	45.942.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	400 Orang	45.942.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	75 Laporan	20 Laporan	7 Laporan	15 Laporan	432.088.750,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Laporan	432.088.750,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	63.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Orang	63.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**273.655.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**273.655.100,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	0 Paket	5 Paket	5 Paket	10.538.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	10.538.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	36.048.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	36.048.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	0 Paket	12 Paket	12 Paket	3.949.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	3.949.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	0 Paket	12 Paket	12 Paket	22.306.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	22.306.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.452.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	20.452.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	18 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	17.280.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	17.280.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17.489.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	17.489.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	28 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	126.158.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	126.158.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.461.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.461.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	17.971.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	17.971.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**159.025.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**159.025.700,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	0 Unit	0 Unit	8 Unit	159.025.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Unit	159.025.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**912.105.720,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**912.105.720,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	820.305.720,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	820.305.720,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	55.800.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	36.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**352.880.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**352.880.000,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	44.380.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	280 Unit	70 Unit	56 Unit	56 Unit	224.760.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	56 Unit	224.760.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	590 Unit	12 Unit	48 Unit	118 Unit	83.740.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	118 Unit	83.740.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya**	**77 %**	**65%**	**73 %**	**73 %**	**4.287.343.800,00**			**(PN 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan**	**(PD 6) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital**		**74 %**	**4.287.343.800,00**	
		Outcome :Meningkatnya pemenuhan kebutuhan layanan kepegawaian	**Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya**	**75 %**	**55%**	**71 %**	**71 %**							**72 %**		
	5 03 02 2.01	**Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.477.621.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.477.621.200,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**
	5 03 02 2.01 0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20 Dokumen	778 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	250.897.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	250.897.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5 03 02 2.01 0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10 Lembaga	500 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	151.547.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Lembaga	151.547.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5 03 02 2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	960.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	960.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5 Dokumen	100 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105.192.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	105.192.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	90 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.984.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	9.984.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Mutasi dan Promosi ASN Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**331.204.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**331.204.200,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25 Dokumen	1250 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	205.987.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Dokumen	205.987.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	60 Dokumen	3500 Dokumen	6 Dokumen	12 Dokumen	125.216.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	125.216.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.785.500.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.785.500.300,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**
	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	263.000.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	263.000.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 03 02 2.03 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	3 Orang	8 Orang	20 Orang	1.500.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	20 Orang	1.500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5 03 02 2.03 0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	22.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5 03 02 2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**693.018.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**693.018.100,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**
	5 03 02 2.04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	25 Dokumen	9 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	351.749.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Dokumen	351.749.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5 03 02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2500 Orang	500 Orang	300 Orang	500 Orang	131.784.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	500 Orang	131.784.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5 03 02 2.04 0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1500 Orang	0 Orang	0 Orang	300 Orang	42.762.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	300 Orang	42.762.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5 03 02 2.04 0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	44076 Orang	10 Orang	10 Orang	166.722.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Orang	166.722.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	04				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**21.250.427.200,00**							**21.264.952.200,00**	
	5	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN Yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional**	**43 %**	**40.72%**	**41 %**	**41 %**	**4.883.692.100,00**						**41.5 %**	**4.883.692.100,00**	
						Outcome :Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN	**Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan**	**14 %**	**11.20%**	**12 %**	**12 %**							**12.5 %**		
	5	04	02	2.02		**Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.883.692.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.883.692.100,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.535.445.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Laporan	2.535.445.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5	04	02	2.02	0008	Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.348.247.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Dokumen	2.348.247.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Badan Riset dan Inovasi Daerah						**11.954.000.000,00**							**11.768.772.000,00**	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.954.000.000,00**							**11.768.772.000,00**	
	5	05				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**11.954.000.000,00**							**11.768.772.000,00**	
	5	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**8.791.954.200,00**						**100 %**	**8.806.719.300,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**54.234.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.999.700,00**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	21.234.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12.999.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	12.999.700,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.619.685.720,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**7.619.685.720,00**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	53 Orang/bulan	7.265.323.820,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	53 Orang/bulan	7.265.323.820,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	253.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	253.800.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	87.429.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	87.429.200,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.481.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	4.481.900,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	8.650.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Laporan	8.650.800,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**105.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**105.000.000,00**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Paket	33.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	33.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	49 Orang	8 Orang	6 Orang	72.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Orang	72.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**277.652.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**277.652.000,00**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Paket	2.073.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	2.073.800,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	10.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.178.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	11.178.200,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	14.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Dokumen	14.400.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167 Laporan	35 Laporan	11 Laporan	47 Laporan	240.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	30 Laporan	240.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**56.158.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**56.158.600,00**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	0 Unit	0 Unit	4 Unit	56.158.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Unit	56.158.600,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**101.013.280,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**101.013.280,00**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	39.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.134.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	2.134.300,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59.878.980,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	59.878.980,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**242.210.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**242.210.000,00**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	44.380.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	159.930.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Unit	159.930.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	18 Unit	10 Unit	10 Unit	7.300.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	9 Unit	7.300.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.09	0010	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	30.600.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**03**			**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** ***Outcome :Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah***	**Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan**	**100 %**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**3.162.045.800,00**				**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan** **(PD 5) Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal**		**100 %**	**2.962.052.700,00**	
	5	**05**	**03**	**2.01**		**Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan**	**Persentase Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.932.685.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.932.685.800,00**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	03	2.01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	11 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	245.853.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	245.853.300,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	7 Naskah	0 Naskah	0 Naskah	3 Naskah	576.654.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Naskah	576.654.100,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	50 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	10 Laporan	893.825.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Laporan	893.825.900,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	36.090.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	36.090.300,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	10 Pelatihan	0 Pelatihan	0 Pelatihan	2 Pelatihan	180.262.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Pelatihan	180.262.200,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**03**	**2.02**		**Invensi dan Inovasi**	**Persentase Invensi dan Inovasi Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.229.360.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.029.366.900,00**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	153.894.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	153.894.100,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	75.621.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	75.621.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	49.995.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	49.995.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.02	0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	58.285.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	58.285.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 05 03 2.02 0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembagapusatorganisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	15 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	384.701.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Kegiatan	384.701.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5 05 03 2.02 0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	128.242.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	128.242.400,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5 05 03 2.02 0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	5 Naskah	0 Naskah	0 Naskah	1 Naskah	143.769.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Naskah	143.769.600,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5 05 03 2.02 0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	199.993.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	0 Laporan	-	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5 05 03 2.02 0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	34.858.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	34.858.800,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Inspektorat Daerah						**50.428.400.000,00**							**51.095.581.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**50.428.400.000,00**							**51.095.581.000,00**	
	6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**50.428.400.000,00**							**51.095.581.000,00**	
	6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**46.613.620.580,00**						**100 %**	**46.509.201.580,00**	
		Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	6 01 01 2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**159.068.520,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**54.648.700,00**	**Inspektorat Daerah**
	6 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	130.732.120,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	13 Dokumen	40.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.919.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.768.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.389.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.389.900,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.258.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.258.800,00	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**25.622.901.340,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**25.622.902.160,00**	**Inspektorat Daerah**
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	625 Orang/bulan	87 Orang/bulan	87 Orang/bulan	119 Orang/bulan	25.165.766.540,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	122 Orang/bulan	25.165.767.360,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	262.080.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	262.080.000,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.365.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	4.365.700,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	190.689.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	190.689.100,00	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.918.545.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**12.918.545.400,00**	**Inspektorat Daerah**
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	625 Paket	218 Paket	0 Paket	119 Paket	139.365.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	122 Paket	139.365.000,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	540 Orang	87 Orang	87 Orang	102 Orang	12.735.192.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	105 Orang	12.735.192.000,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	374 Orang	61 Orang	61 Orang	64 Orang	43.988.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	70 Orang	43.988.400,00	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.501.715.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.501.715.100,00**	**Inspektorat Daerah**
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	6 Paket	8 Paket	8 Paket	7.909.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Paket	7.909.500,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	0 Paket	0 Paket	30 Paket	324.088.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	30 Paket	324.088.500,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	2 Paket	20 Paket	50 Paket	293.639.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Paket	293.639.800,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	7 Paket	8 Paket	9 Paket	46.395.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	9 Paket	46.395.300,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	5.160.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	36 Dokumen	5.160.000,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.900.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	50.900.000,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 Laporan	49 Laporan	74 Laporan	75 Laporan	1.533.198.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	75 Laporan	1.533.198.000,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	240.424.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	240.424.000,00	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.728.387.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.728.387.500,00**	**Inspektorat Daerah**
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	346 Unit	51 Unit	92 Unit	45 Unit	50.720.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	93 Unit	50.720.000,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	386 Unit	68 Unit	176 Unit	129 Unit	1.677.667.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	42 Unit	1.677.667.500,00	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.247.791.720,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.247.791.720,00**	**Inspektorat Daerah**
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	204.373.760,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	204.373.760,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	417.883.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	417.883.200,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.092.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	1.092.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	533.534.760,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	533.534.760,00	Inspektorat Daerah
	6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.435.211.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.435.211.000,00**	**Inspektorat Daerah**
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	44.380.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	417.130.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	30 Unit	417.130.000,00	Inspektorat Daerah
	6 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	850 Unit	60 Unit	125 Unit	170 Unit	156.010.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	170 Unit	156.010.000,00	Inspektorat Daerah
	6 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	817.691.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	817.691.000,00	Inspektorat Daerah
	6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah***	**Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1**	**82.21 %**	**76.21**	**78.21 %**	**78.21 %**	**2.960.628.020,00**			**(PN 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan**	**(PD 6) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital**		**79.21 %**	**3.103.241.800,00**	
	6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.745.876.720,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.888.490.500,00**	**Inspektorat Daerah**
	6 01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	86.103.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	4 Laporan	86.103.100,00	Inspektorat Daerah
	6 01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	440 Laporan	140 Laporan	88 Laporan	88 Laporan	541.359.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	88 Laporan	683.973.280,00	Inspektorat Daerah
	6 01 02 2.01 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1040 Laporan	209 Laporan	208 Laporan	208 Laporan	274.241.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	208 Laporan	274.241.800,00	Inspektorat Daerah
	6 01 02 2.01 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	130 Laporan	28 Laporan	9 Laporan	26 Laporan	74.925.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	26 Laporan	74.925.000,00	Inspektorat Daerah
	6 01 02 2.01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	120 Kesepakatan	2 Kesepakatan	3 Kesepakatan	24 Kesepakatan	704.530.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	24 Kesepakatan	704.530.800,00	Inspektorat Daerah
	6 01 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.064.716.520,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	6 Dokumen	1.064.716.520,00	Inspektorat Daerah
	6 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**214.751.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**214.751.300,00**	**Inspektorat Daerah**
	6 01 02 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian NegaraDaerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	60 Laporan	15 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.156.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	20.156.600,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	120 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	24 Laporan	194.594.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	24 Laporan	194.594.700,00	Inspektorat Daerah
	6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** ***Outcome :Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi***	**Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**854.151.400,00**						**Level 3**	**1.483.137.620,00**	
	6 01 03 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**309.659.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**938.645.220,00**	**Inspektorat Daerah**
	6 01 03 2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	260 Rekomendasi	52 Rekomendasi	52 Rekomendasi	52 Rekomendasi	134.902.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	52 Rekomendasi	134.902.000,00	Inspektorat Daerah
	6 01 03 2.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	174.757.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Rekomendasi	803.743.220,00	Inspektorat Daerah
	6 01 03 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**544.492.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**544.492.400,00**	**Inspektorat Daerah**
	6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	250 perangkat daerah	51 perangkat daerah	50 perangkat daerah	50 perangkat daerah	29.070.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	50 perangkat daerah	29.070.000,00	Inspektorat Daerah
	6 01 03 2.02 0002	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	255 perangkat daerah	36 perangkat daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	292.077.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 perangkat daerah	292.077.000,00	Inspektorat Daerah
	6 01 03 2.02 0003	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	20 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	125.352.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Kegiatan	125.352.500,00	Inspektorat Daerah
	6 01 03 2.02 0004	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	255 perangkat daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	97.992.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	51 perangkat daerah	97.992.900,00	Inspektorat Daerah
		Kecamatan Biringkanaya						**54.038.985.000,00**							**54.016.717.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**54.038.985.000,00**							**54.016.717.000,00**	
	7 01	**KECAMATAN**						**54.038.985.000,00**							**54.016.717.000,00**	
	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**18.692.856.488,00**						**100 %**	**18.704.783.488,00**	
		Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**34.841.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**31.867.700,00**	**Kecamatan Biringkanaya**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6.731.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.731.300,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.828.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.828.400,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.828.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.828.400,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.828.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.828.400,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.894.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.894.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2.973.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.757.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	9.757.200,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**16.417.422.396,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**16.417.423.096,00**	**Kecamatan Biringkanaya**
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	535 Orang/bulan	Orang/bulan	107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	13.539.843.396,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	107 Orang/bulan	13.539.844.096,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	750.960.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	750.960.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	91.783.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	91.783.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.034.836.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	2.034.836.000,00	Kecamatan Biringkanaya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Biringkanaya**
	7 01 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**411.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**300.000.000,00**	**Kecamatan Biringkanaya**
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1440 Paket	Paket	288 Paket	288 Paket	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	288 Paket	216.000.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	Orang	14 Orang	30 Orang	195.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	30 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**152.806.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**226.806.000,00**	**Kecamatan Biringkanaya**
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Paket	7 Paket	10 Paket	176.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Paket	176.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Paket	2 Paket	2 Paket	9.990.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	9.990.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	108.640.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	108.640.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Laporan	8 Laporan	8 Laporan	34.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**508.888.692,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**508.888.692,00**	**Kecamatan Biringkanaya**
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	231.420.192,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	231.420.192,00	Kecamatan Biringkanaya
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Laporan	Laporan	8 Laporan	8 Laporan	93.658.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Laporan	93.658.500,00	Kecamatan Biringkanaya
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	Laporan	10 Laporan	10 Laporan	183.810.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Laporan	183.810.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**951.898.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**973.798.000,00**	**Kecamatan Biringkanaya**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Unit	3 Unit	3 Unit	39.770.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	39.770.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	825 Unit	Unit	165 Unit	165 Unit	352.308.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	165 Unit	352.308.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	Unit	7 Unit	7 Unit	300.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Unit	300.200.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	01	2.09	0010	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit	Unit	11 Unit	11 Unit	259.620.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	11 Unit	259.620.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**18.807.906.600,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**18.807.906.600,00**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**17.233.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**17.233.200,00**	**Kecamatan Biringkanaya**
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	17.233.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	17.233.200,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**18.790.673.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**18.790.673.400,00**	**Kecamatan Biringkanaya**
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75 Laporan	Laporan	15 Laporan	15 Laporan	18.790.673.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Laporan	18.790.673.400,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**5.682.777.000,00**						**90 %**	**5.648.582.000,00**	
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.682.777.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**5.648.582.000,00**	**Kecamatan Biringkanaya**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55 Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	182.777.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Lembaga Kemasyarakatan	182.777.200,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	275 Unit	Unit	55 Unit	55 Unit	4.370.933.675,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	55 Unit	4.370.933.675,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	55 Pokmas / Ormas	Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	1.129.066.125,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Pokmas / Ormas	1.094.871.125,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan***	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**580.414.000,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**580.414.000,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**580.414.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**580.414.000,00**	**Kecamatan Biringkanaya**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	448.414.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	448.414.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	132.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	132.000.000,00	Kecamatan Biringkanaya
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**10.275.030.912,00**						**100 %**	**10.275.030.912,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**10.275.030.912,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**10.275.030.912,00**	**Kecamatan Biringkanaya**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 05 2.01 0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	55 Dokumen	Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	10.275.030.912,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Dokumen	10.275.030.912,00	Kecamatan Biringkanaya
		Kecamatan Bontoala						**38.316.416.000,00**							**38.353.950.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**38.316.416.000,00**							**38.353.950.000,00**	
	7 01	**KECAMATAN**						**38.316.416.000,00**							**38.353.950.000,00**	
	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**16.755.598.320,00**						**100 %**	**16.793.132.320,00**	
		Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7 01 01 2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**43.182.900,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**35.716.000,00**	**Kecamatan Bontoala**
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	19.716.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Dokumen	19.716.000,00	Kecamatan Bontoala
	7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.457.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Bontoala
	7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.003.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Bontoala
	7 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.003.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Bontoala
	7 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.003.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Bontoala
	7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**14.469.954.876,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**14.469.955.776,00**	**Kecamatan Bontoala**
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	400 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	13.533.954.876,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	80 Orang/bulan	13.533.955.776,00	Kecamatan Bontoala
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	720.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	720.000.000,00	Kecamatan Bontoala

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	216.000.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Bontoala**
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**120.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**165.000.000,00**	**Kecamatan Bontoala**
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	825 Orang	165 Orang	165 Orang	165 Orang	120.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	165 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**339.104.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**339.104.100,00**	**Kecamatan Bontoala**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	24.945.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	24.945.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	90.578.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Paket	90.578.700,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	74.719.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	74.719.800,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	33.960.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	33.960.600,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.220.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	2.220.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.680.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.680.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	108.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	16 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.314.300,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**12.314.300,00**	**Kecamatan Bontoala**
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	350 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit	12.314.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	70 Unit	12.314.300,00	Kecamatan Bontoala
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.107.562.144,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.107.562.144,00**	**Kecamatan Bontoala**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	189.565.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	189.565.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	917.997.144,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	917.997.144,00	Kecamatan Bontoala
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**447.480.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**447.480.000,00**	**Kecamatan Bontoala**
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.880.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	37.880.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	425 Unit	85 Unit	85 Unit	85 Unit	191.660.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	85 Unit	191.660.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	900 Unit	180 Unit	180 Unit	180 Unit	121.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	180 Unit	121.800.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	96.140.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	96.140.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**7.992.524.600,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**8.105.262.100,00**	
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.992.524.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**7.992.524.600,00**	**Kecamatan Bontoala**
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.992.524.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	7.992.524.600,00	Kecamatan Bontoala
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**6.279.564.700,00**						**90 %**	**6.166.827.200,00**	
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**112.737.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**-**	**Kecamatan Bontoala**
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	112.737.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	0 Laporan	-	Kecamatan Bontoala
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.166.827.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**6.166.827.200,00**	**Kecamatan Bontoala**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	166.827.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Lembaga Kemasyarakatan	166.827.200,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	3.836.518.050,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Unit	3.836.518.050,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	2.163.481.950,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Pokmas / Ormas	2.163.481.950,00	Kecamatan Bontoala
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan***	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**612.800.000,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**612.800.000,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**612.800.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**612.800.000,00**	**Kecamatan Bontoala**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	468.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	468.800.000,00	Kecamatan Bontoala
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	144.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	144.000.000,00	Kecamatan Bontoala

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**6.675.928.380,00**						**100 %**	**6.675.928.380,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.675.928.380,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**6.675.928.380,00**	**Kecamatan Bontoala**
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.675.928.380,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	6.675.928.380,00	Kecamatan Bontoala
						Kecamatan Makassar						**51.216.041.000,00**							**50.804.523.000,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**51.216.041.000,00**							**50.804.523.000,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**						**51.216.041.000,00**							**50.804.523.000,00**	
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** ***Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah***	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**20.372.772.621,00**						**100 %**	**19.961.254.621,00**	
							Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**59.462.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**50.006.900,00**	**Kecamatan Makassar**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	29.289.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Makassar
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.292.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Makassar
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.292.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Makassar
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.735.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Makassar

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.692.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Makassar
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.152.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	-	Kecamatan Makassar
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.006.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	9.006.900,00	Kecamatan Makassar
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**16.449.029.321,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**16.449.029.621,00**	**Kecamatan Makassar**
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	15.522.498.201,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	100 Orang/bulan	15.522.498.501,00	Kecamatan Makassar
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	596.943.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	596.943.200,00	Kecamatan Makassar
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	126.063.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	126.063.200,00	Kecamatan Makassar
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	203.524.720,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	203.524.720,00	Kecamatan Makassar
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**240.063.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Makassar**
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	24.063.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	-	Kecamatan Makassar
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Makassar
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**645.750.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**267.750.000,00**	**Kecamatan Makassar**
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1250 Paket	250 Paket	0 Paket	250 Paket	183.750.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	250 Paket	183.750.000,00	Kecamatan Makassar
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1000 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	462.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	200 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Makassar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**232.193.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**232.193.800,00**	**Kecamatan Makassar**
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7.070.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Paket	7.070.000,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	7.927.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Paket	7.927.800,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	38.436.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Paket	38.436.000,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	70.760.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	70.760.000,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**190.344.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**190.344.400,00**	**Kecamatan Makassar**
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	190.344.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Unit	190.344.400,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.346.407.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.346.407.000,00**	**Kecamatan Makassar**
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	246.139.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	246.139.000,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	193.447.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	193.447.200,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	906.820.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	906.820.800,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.209.522.900,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.209.522.900,00**	**Kecamatan Makassar**
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.770.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	36.770.000,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1045 Unit	209 Unit	209 Unit	209 Unit	274.210.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	209 Unit	274.210.000,00	Kecamatan Makassar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	39.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	33 Unit	39.500.000,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.09 0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	846.842.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Unit	846.842.900,00	Kecamatan Makassar
	7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	12.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Unit	12.200.000,00	Kecamatan Makassar
	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**12.927.398.459,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**12.927.398.459,00**	
	7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**155.275.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**155.275.200,00**	**Kecamatan Makassar**
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	155.275.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	155.275.200,00	Kecamatan Makassar
	7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.772.123.259,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**12.772.123.259,00**	**Kecamatan Makassar**
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.772.123.259,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	12.772.123.259,00	Kecamatan Makassar
	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**7.148.675.800,00**						**90 %**	**7.148.675.800,00**	
		Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.148.675.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**7.148.675.800,00**	**Kecamatan Makassar**
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	149.560.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Lembaga Kemasyarakatan	149.560.800,00	Kecamatan Makassar

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	4.954.561.981,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	14 Unit	4.954.561.981,00	Kecamatan Makassar
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.044.553.019,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	14 Pokmas / Ormas	2.044.553.019,00	Kecamatan Makassar
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan***	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**398.598.800,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**398.598.800,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**392.526.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**392.526.400,00**	**Kecamatan Makassar**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	392.463.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	392.463.200,00	Kecamatan Makassar
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	63.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	63.200,00	Kecamatan Makassar
	7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.072.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**6.072.400,00**	**Kecamatan Makassar**
	7	01	04	2.02	0001	KoordinasiSinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan danatau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.072.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	6.072.400,00	Kecamatan Makassar
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**10.368.595.320,00**						**100 %**	**10.368.595.320,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**10.368.595.320,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**10.368.595.320,00**	**Kecamatan Makassar**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 05 2.01 0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.368.595.320,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	10.368.595.320,00	Kecamatan Makassar
		Kecamatan Mamajang						**45.198.217.000,00**							**45.799.497.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**45.198.217.000,00**							**45.799.497.000,00**	
	7 01	**KECAMATAN**						**45.198.217.000,00**							**45.799.497.000,00**	
	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**20.256.357.414,00**						**100 %**	**20.857.637.414,00**	
		Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7 01 01 2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**37.627.300,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**30.020.600,00**	**Kecamatan Mamajang**
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	11.480.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.480.200,00	Kecamatan Mamajang
	7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35 Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	6.671.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Mamajang
	7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35 Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3.585.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.585.000,00	Kecamatan Mamajang
	7 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	35 Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	4.983.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Mamajang
	7 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	35 Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3.230.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.230.600,00	Kecamatan Mamajang
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.951.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	-	Kecamatan Mamajang
	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.724.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	3.724.800,00	Kecamatan Mamajang
	7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**17.576.125.702,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**17.576.127.002,00**	**Kecamatan Mamajang**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/bulan	Orang/bulan	102 Orang/bulan	104 Orang/bulan	16.397.724.382,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	106 Orang/bulan	16.397.725.682,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	659.520.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	659.520.000,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	232.320.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	232.320.000,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	286.561.320,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	286.561.320,00	Kecamatan Mamajang
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Mamajang**
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Mamajang
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**497.750.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**239.750.000,00**	**Kecamatan Mamajang**
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	985 Paket	Paket	197 Paket	197 Paket	155.750.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	197 Paket	155.750.000,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	550 Orang	Orang	110 Orang	110 Orang	342.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	110 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Mamajang
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**169.149.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**169.149.800,00**	**Kecamatan Mamajang**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Paket	6 Paket	6 Paket	880.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Paket	880.000,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Paket	5 Paket	5 Paket	20.946.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	20.946.100,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	Paket	3 Paket	3 Paket	23.663.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Paket	23.663.700,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.660.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	15.660.000,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Mamajang

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.419.194.612,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.256.080.012,00**	**Kecamatan Mamajang**
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	413.273.880,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	413.273.880,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	241.248.112,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	241.248.112,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	764.672.620,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	601.558.020,00	Kecamatan Mamajang
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**340.510.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**340.510.000,00**	**Kecamatan Mamajang**
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	38.170.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	38.170.000,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	235 Unit	Unit	47 Unit	47 Unit	256.630.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	47 Unit	256.630.000,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	335 Unit	Unit	67 Unit	67 Unit	45.710.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	67 Unit	45.710.000,00	Kecamatan Mamajang
	7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**100%**	**90 %**	**90 %**	**10.054.890.000,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**10.054.890.000,00**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**34.712.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**34.712.700,00**	**Kecamatan Mamajang**
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65 Dokumen	Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	34.712.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	13 Dokumen	34.712.700,00	Kecamatan Mamajang
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**10.020.177.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**10.020.177.300,00**	**Kecamatan Mamajang**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	65 Laporan	Laporan	13 Laporan	13 Laporan	10.020.177.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	13 Laporan	10.020.177.300,00	Kecamatan Mamajang
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**25%**	**90 %**	**90 %**	**6.673.635.000,00**						**90 %**	**6.673.635.000,00**	
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**51%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.673.635.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**6.673.635.000,00**	**Kecamatan Mamajang**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	173.635.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Lembaga Kemasyarakatan	173.635.000,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Unit	Unit	12 Unit	12 Unit	4.582.800.719,50	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Unit	4.582.800.719,50	Kecamatan Mamajang
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas / Ormas	Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.917.199.280,50	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Pokmas / Ormas	1.917.199.280,50	Kecamatan Mamajang
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**866.104.500,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**866.104.500,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan														
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**866.104.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**866.104.500,00**	**Kecamatan Mamajang**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	705.386.880,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	705.386.880,00	Kecamatan Mamajang
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	160.717.620,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	160.717.620,00	Kecamatan Mamajang

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**7.347.230.086,00**						**100 %**	**7.347.230.086,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.347.230.086,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**7.347.230.086,00**	**Kecamatan Mamajang**
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.347.230.086,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	7.347.230.086,00	Kecamatan Mamajang
						Kecamatan Manggala						**44.369.278.000,00**							**46.298.878.000,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**44.369.278.000,00**							**46.298.878.000,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**						**44.369.278.000,00**							**46.298.878.000,00**	
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** ***Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah***	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**16.816.625.040,00**						**100 %**	**18.746.225.040,00**	
							Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50.283.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**42.026.200,00**	**Kecamatan Manggala**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	14.447.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.447.600,00	Kecamatan Manggala
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.257.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Manggala
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.894.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.894.000,00	Kecamatan Manggala
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.885.900,00	Kecamatan Manggala
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.885.900,00	Kecamatan Manggala

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	11.912.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	11.912.800,00	Kecamatan Manggala
	7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**13.170.075.934,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**13.170.076.234,00**	**Kecamatan Manggala**
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	505 Orang/bulan	83 Orang/bulan	88 Orang/bulan	92 Orang/bulan	12.371.835.934,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	97 Orang/bulan	12.371.836.234,00	Kecamatan Manggala
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	582.240.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	582.240.000,00	Kecamatan Manggala
	7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	216.000.000,00	Kecamatan Manggala
	7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Manggala**
	7 01 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Manggala
	7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**72.207.300,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**84.207.300,00**	**Kecamatan Manggala**
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1620 Paket	0 Paket	180 Paket	180 Paket	207.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	180 Paket	207.300,00	Kecamatan Manggala
	7 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	10 Orang	118 Orang	30 Orang	72.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	30 Orang	-	Kecamatan Manggala
	7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**251.406.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**251.406.600,00**	**Kecamatan Manggala**
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.056.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	7.056.000,00	Kecamatan Manggala
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	54.088.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	13 Paket	54.088.300,00	Kecamatan Manggala
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	18.872.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	18.872.300,00	Kecamatan Manggala
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	44.250.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	44.250.000,00	Kecamatan Manggala
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	3 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	19.140.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	36 Dokumen	19.140.000,00	Kecamatan Manggala

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	108.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	24 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Manggala
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**235.050.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.160.907.400,00**	**Kecamatan Manggala**
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	0 Unit	0 Unit	4 Unit	138.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Unit	138.200,00	Kecamatan Manggala
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	234.912.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Unit	160.769.200,00	Kecamatan Manggala
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.435.577.860,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.435.577.860,00**	**Kecamatan Manggala**
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	5 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	301.113.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	301.113.600,00	Kecamatan Manggala
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	5 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.134.464.260,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	2.134.464.260,00	Kecamatan Manggala
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**386.023.446,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**386.023.446,00**	**Kecamatan Manggala**
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	36.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Unit	36.380.000,00	Kecamatan Manggala
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	850 Unit	170 Unit	170 Unit	170 Unit	201.110.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	170 Unit	201.110.000,00	Kecamatan Manggala
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	420 Unit	84 Unit	84 Unit	84 Unit	36.450.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	84 Unit	36.450.000,00	Kecamatan Manggala
	7	01	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	112.083.446,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Unit	112.083.446,00	Kecamatan Manggala

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**13.125.407.860,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**13.125.407.860,00**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**437.798.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**437.798.400,00**	**Kecamatan Manggala**
	7	01	02	2.01	0001	KoordinasiSinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	437.798.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Dokumen	437.798.400,00	Kecamatan Manggala
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**28.376.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**28.376.500,00**	**Kecamatan Manggala**
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	28.376.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Laporan	28.376.500,00	Kecamatan Manggala
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.659.232.960,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**12.659.232.960,00**	**Kecamatan Manggala**
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.659.232.960,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	12.659.232.960,00	Kecamatan Manggala
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**62.5%**	**90 %**	**90 %**	**4.193.675.900,00**						**90 %**	**4.193.675.900,00**	
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**78.64%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.193.675.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.193.675.900,00**	**Kecamatan Manggala**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	193.675.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Lembaga Kemasyarakatan	193.675.900,00	Kecamatan Manggala

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125 Unit	24 Unit	25 Unit	25 Unit	3.079.372.933,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	25 Unit	3.079.372.933,00	Kecamatan Manggala
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	920.627.067,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Pokmas / Ormas	920.627.067,00	Kecamatan Manggala
	7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan***	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**69.97%**	**90 %**	**90 %**	**96.000.000,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**96.000.000,00**	
	7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**96.000.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**96.000.000,00**	**Kecamatan Manggala**
	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	96.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	96.000.000,00	Kecamatan Manggala
	7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**10.137.569.200,00**						**100 %**	**10.137.569.200,00**	
	7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**10.137.569.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**10.137.569.200,00**	**Kecamatan Manggala**
	7 01 05 2.01 0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	10.137.569.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Dokumen	10.137.569.200,00	Kecamatan Manggala
		Kecamatan Mariso						**34.301.058.000,00**							**34.401.314.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**34.301.058.000,00**							**34.401.314.000,00**	
	7 01	**KECAMATAN**						**34.301.058.000,00**							**34.401.314.000,00**	
	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** ***Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah***	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**14.802.766.648,00**						**100 %**	**14.903.022.648,00**	
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**53.210.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**30.466.300,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	11.066.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.066.800,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.035.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.955.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.028.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.148.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.577.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	-	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.399.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	3.399.500,00	Kecamatan Mariso
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**13.113.621.128,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**13.113.621.228,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	425 Orang/bulan	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	12.058.781.568,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	85 Orang/bulan	12.058.781.668,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	689.980.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	689.980.000,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	109.036.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	109.036.500,00	Kecamatan Mariso

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	255.823.060,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	255.823.060,00	Kecamatan Mariso
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Mariso
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**209.498.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**302.498.500,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	137.498.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	137.498.500,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	865 Orang	173 Orang	173 Orang	173 Orang	72.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	173 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Mariso
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**150.920.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**150.920.400,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.827.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	11.827.900,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	25.992.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Paket	25.992.500,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	5.100.000,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	108.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Mariso
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**746.516.220,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**746.516.220,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	187.457.280,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	187.457.280,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	201.479.160,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	201.479.160,00	Kecamatan Mariso

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	357.579.780,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	357.579.780,00	Kecamatan Mariso
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**313.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**313.000.000,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	41.770.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	41.770.000,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	485 Unit	97 Unit	97 Unit	97 Unit	144.370.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	97 Unit	144.370.000,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	28.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	40 Unit	28.400.000,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	86.260.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Unit	86.260.000,00	Kecamatan Mariso
	7	01	01	2.09	0011	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	12.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Unit	12.200.000,00	Kecamatan Mariso
	7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**8.380.802.700,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**8.380.802.700,00**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**41.465.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**41.465.000,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	41.465.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	9 Dokumen	41.465.000,00	Kecamatan Mariso

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.339.337.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**8.339.337.700,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.339.337.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	8.339.337.700,00	Kecamatan Mariso
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**4.651.594.020,00**						**90 %**	**4.651.594.020,00**	
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.651.594.020,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.651.594.020,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	151.693.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	9 Lembaga Kemasyarakatan	151.693.700,00	Kecamatan Mariso
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	3.287.700.525,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	9 Unit	3.287.700.525,00	Kecamatan Mariso
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	45 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	1.212.199.795,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	9 Pokmas / Ormas	1.212.199.795,00	Kecamatan Mariso
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**483.309.000,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**483.309.000,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan														
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**483.309.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**483.309.000,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	375.309.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	375.309.000,00	Kecamatan Mariso

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	45 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	108.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	9 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Mariso
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**5.982.585.632,00**						**100 %**	**5.982.585.632,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.982.585.632,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**5.982.585.632,00**	**Kecamatan Mariso**
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	45 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	5.982.585.632,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	9 Dokumen	5.982.585.632,00	Kecamatan Mariso
						Kecamatan Panakkukang						**54.542.258.000,00**							**54.621.444.000,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**54.542.258.000,00**							**54.621.444.000,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**						**54.542.258.000,00**							**54.621.444.000,00**	
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** ***Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah***	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**18.803.509.659,00**						**100 %**	**18.942.010.059,00**	
							Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**39.655.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**39.655.000,00**	**Kecamatan Panakkukang**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.655.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.655.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Panakkukang

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	13.000.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**15.658.221.859,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**15.658.222.259,00**	**Kecamatan Panakkukang**
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14.581.220.659,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	14 Orang/bulan	14.581.221.059,00	Kecamatan Panakkukang
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	853.441.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	853.441.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	219.638.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	219.638.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.922.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	3.922.200,00	Kecamatan Panakkukang
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Panakkukang**
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**184.500.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**219.000.000,00**	**Kecamatan Panakkukang**
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1250 Paket	250 Paket	250 Paket	250 Paket	135.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	250 Paket	135.000.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1230 Orang	246 Orang	246 Orang	246 Orang	49.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	246 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**86.633.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**160.633.000,00**	**Kecamatan Panakkukang**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	7 Paket	7 Paket	8 Paket	4.947.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	9 Paket	4.947.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	4 Paket	4 Paket	6 Paket	7.826.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Paket	7.826.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	7 Paket	7 Paket	8 Paket	17.060.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Paket	17.060.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	34 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	22.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Dokumen	22.800.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	15 Laporan	34.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**41.490.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**71.490.000,00**	**Kecamatan Panakkukang**
	7 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	Unit	0 Unit	1 Unit	18.560.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	18.560.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	303 Unit	0 Unit	0 Unit	50 Unit	22.930.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	55 Unit	22.930.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.610.579.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.610.579.800,00**	**Kecamatan Panakkukang**
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	397.222.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	397.222.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.188.357.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	1.188.357.800,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**966.430.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**966.430.000,00**	**Kecamatan Panakkukang**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	2.500.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1165 Unit	174 Unit	174 Unit	191 Unit	344.230.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	210 Unit	344.230.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	746 Unit	112 Unit	112 Unit	123 Unit	92.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	135 Unit	92.100.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 01 2.09 0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	6 Unit	6 Unit	7 Unit	527.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Unit	527.600.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**17.901.040.280,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**17.901.040.280,00**	
	7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**139.604.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**139.604.800,00**	**Kecamatan Panakkukang**
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	139.604.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	139.604.800,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**17.761.435.480,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**17.761.435.480,00**	**Kecamatan Panakkukang**
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	17.761.435.480,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Laporan	17.761.435.480,00	Kecamatan Panakkukang
	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**5.684.766.019,00**						**90 %**	**5.684.766.019,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.684.766.019,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**5.684.766.019,00**	**Kecamatan Panakkukang**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	184.766.019,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Lembaga Kemasyarakatan	184.766.019,00	Kecamatan Panakkukang
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	275 Unit	55 Unit	55 Unit	55 Unit	4.240.550.645,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	55 Unit	4.240.550.645,00	Kecamatan Panakkukang
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	55 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	1.259.449.355,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Pokmas / Ormas	1.259.449.355,00	Kecamatan Panakkukang
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan***	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**583.968.000,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**583.968.000,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**583.968.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**583.968.000,00**	**Kecamatan Panakkukang**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	450.507.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	450.507.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	133.461.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	133.461.000,00	Kecamatan Panakkukang
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**11.568.974.042,00**						**100 %**	**11.509.659.642,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**11.568.974.042,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**11.509.659.642,00**	**Kecamatan Panakkukang**
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	55 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11.568.974.042,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Dokumen	11.509.659.642,00	Kecamatan Panakkukang
						Kecamatan Rappocini						**53.819.314.000,00**							**53.753.657.000,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**53.819.314.000,00**							**53.753.657.000,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**						**53.819.314.000,00**							**53.753.657.000,00**	
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**20.250.955.560,00**						**100 %**	**20.185.298.560,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**41.483.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**41.483.100,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	13.174.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.174.400,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.999.700,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.999.800,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.654.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.654.500,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.654.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.654.900,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	12.999.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Laporan	12.999.800,00	Kecamatan Rappocini
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**17.595.632.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**17.595.632.600,00**	**Kecamatan Rappocini**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	525 Orang/bulan	105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	16.598.411.740,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	105 Orang/bulan	16.598.411.940,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	750.985.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	750.985.000,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	170.517.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	170.517.500,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	75.718.160,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	18 Laporan	75.718.160,00	Kecamatan Rappocini
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Rappocini
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**281.921.760,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**281.921.760,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	525 Paket	105 Paket	105 Paket	105 Paket	145.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	105 Paket	145.500.000,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	52.421.760,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	52.421.760,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	84.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Rappocini
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**280.206.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**244.206.200,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	21.108.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Paket	21.108.400,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	67.748.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Paket	67.748.500,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	22.788.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	22.788.600,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	17.280.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.280.000,00	Kecamatan Rappocini

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	7.280.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Laporan	7.280.700,00	Kecamatan Rappocini
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	144.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Rappocini
	7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**123.082.700,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**93.425.500,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	31.001.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	18 Unit	31.001.200,00	Kecamatan Rappocini
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	92.081.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Unit	62.424.300,00	Kecamatan Rappocini
	7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.309.666.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.309.666.600,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	121.926.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	121.926.600,00	Kecamatan Rappocini
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	317.257.440,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	317.257.440,00	Kecamatan Rappocini
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	870.482.560,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	870.482.560,00	Kecamatan Rappocini
	7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**402.962.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**402.962.800,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	78.040.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Unit	78.040.000,00	Kecamatan Rappocini
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	810 Unit	162 Unit	162 Unit	162 Unit	220.500.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	162 Unit	220.500.800,00	Kecamatan Rappocini
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	35.750.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Unit	35.750.000,00	Kecamatan Rappocini
	7 01 01 2.09 0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	68.672.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	68.672.000,00	Kecamatan Rappocini

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**14.622.640.400,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**14.622.640.400,00**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**62.558.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**62.558.700,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	62.558.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	62.558.700,00	Kecamatan Rappocini
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**14.560.081.700,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**14.560.081.700,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.560.081.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	14.560.081.700,00	Kecamatan Rappocini
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** ***Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat***	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**5.637.059.000,00**						**90 %**	**5.637.059.000,00**	
							Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.637.059.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**5.637.059.000,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	188.839.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Lembaga Kemasyarakatan	188.839.900,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	165 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	3.981.666.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	33 Unit	3.981.666.500,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	55 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	1.466.552.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Pokmas / Ormas	1.466.552.600,00	Kecamatan Rappocini

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan***	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**584.378.260,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**584.378.260,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**584.378.260,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**584.378.260,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	452.378.260,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	452.378.260,00	Kecamatan Rappocini
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	55 Laporan	Laporan	0 Laporan	11 Laporan	132.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Laporan	132.000.000,00	Kecamatan Rappocini
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**12.724.280.780,00**						**100 %**	**12.724.280.780,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.724.280.780,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**12.724.280.780,00**	**Kecamatan Rappocini**
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.724.280.780,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	12.724.280.780,00	Kecamatan Rappocini
						Kecamatan Tallo						**52.821.435.000,00**							**52.299.435.000,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**52.821.435.000,00**							**52.299.435.000,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**						**52.821.435.000,00**							**52.299.435.000,00**	
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** ***Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah***	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**20.065.590.029,00**						**100 %**	**19.543.590.029,00**	
							Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**34.422.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**34.422.000,00**	**Kecamatan Tallo**
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	5.422.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.422.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	13.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	13.000.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**16.193.844.263,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**16.193.844.263,00**	**Kecamatan Tallo**
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	495 Orang/bulan	99 Orang/bulan	99 Orang/bulan	99 Orang/bulan	15.030.325.863,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	99 Orang/bulan	15.030.325.863,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	904.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	904.200.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	193.012.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	193.012.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan	17 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	66.306.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	18 Laporan	66.306.400,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Tallo**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Tallo
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**696.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**165.000.000,00**	**Kecamatan Tallo**
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	25 Orang	25 Orang	30 Orang	696.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	30 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Tallo
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**531.102.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**495.102.400,00**	**Kecamatan Tallo**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	10 Paket	8 Paket	8 Paket	45.899.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Paket	45.899.000,00	Kecamatan Tallo
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	280 Paket	59 Paket	56 Paket	56 Paket	120.975.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	56 Paket	120.975.000,00	Kecamatan Tallo
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	7 Paket	12 Paket	12 Paket	71.438.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	71.438.400,00	Kecamatan Tallo
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	7 Paket	5 Paket	5 Paket	75.750.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	75.750.000,00	Kecamatan Tallo
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	5 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	73.040.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	73.040.000,00	Kecamatan Tallo
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	144.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Tallo
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**29.460.366,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**74.460.366,00**	**Kecamatan Tallo**
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	450 Unit	0 Unit	0 Unit	90 Unit	29.460.366,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	90 Unit	29.460.366,00	Kecamatan Tallo
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.627.591.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.627.591.000,00**	**Kecamatan Tallo**
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	189.955.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	189.955.800,00	Kecamatan Tallo
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	407.232.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	407.232.000,00	Kecamatan Tallo
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	207.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	207.500.000,00	Kecamatan Tallo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	822.903.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	822.903.200,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**737.170.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**737.170.000,00**	**Kecamatan Tallo**
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.880.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	37.880.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	700 Unit	16 Unit	137 Unit	140 Unit	442.990.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	140 Unit	442.990.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	500 Unit	40 Unit	100 Unit	100 Unit	68.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	100 Unit	68.200.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	188.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	188.100.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**100%**	**90 %**	**90 %**	**11.938.041.332,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**11.938.041.332,00**	
	7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**134.100.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**134.100.000,00**	**Kecamatan Tallo**
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	134.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	134.100.000,00	Kecamatan Tallo
	7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**11.803.941.332,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**11.803.941.332,00**	**Kecamatan Tallo**
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.803.941.332,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	11.803.941.332,00	Kecamatan Tallo

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**53.33%**	**90 %**	**90 %**	**7.754.070.200,00**						**90 %**	**7.754.070.200,00**	
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**66.66%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.754.070.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**7.754.070.200,00**	**Kecamatan Tallo**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	254.070.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Lembaga Kemasyarakatan	254.070.200,00	Kecamatan Tallo
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	4.755.303.931,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	30 Unit	4.755.303.931,00	Kecamatan Tallo
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	2.744.696.069,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	15 Pokmas / Ormas	2.744.696.069,00	Kecamatan Tallo
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**852.080.400,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**852.080.400,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan														
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**852.080.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**852.080.400,00**	**Kecamatan Tallo**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	545.497.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	545.497.200,00	Kecamatan Tallo
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	306.583.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	306.583.200,00	Kecamatan Tallo
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**12.211.653.039,00**						**100 %**	**12.211.653.039,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan														

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.211.653.039,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**12.211.653.039,00**	**Kecamatan Tallo**
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.211.653.039,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	12.211.653.039,00	Kecamatan Tallo
						Kecamatan Tamalanrea						**44.322.948.000,00**							**46.298.020.000,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**44.322.948.000,00**							**46.298.020.000,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**						**44.322.948.000,00**							**46.298.020.000,00**	
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**15.236.534.094,00**						**100 %**	**17.211.606.094,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**39.082.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**39.082.000,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	10.082.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.082.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Laporan	0 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	13.000.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**11.518.870.974,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**11.518.870.974,00**	**Kecamatan Tamalanrea**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	460 Orang/bulan	Orang/bulan	75 Orang/bulan	80 Orang/bulan	10.655.944.974,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	85 Orang/bulan	10.655.944.974,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	594.770.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	594.770.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	250.427.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	250.427.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.405.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	5.405.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.324.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	12.324.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**190.330.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**224.830.000,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1100 Paket	Paket	0 Paket	200 Paket	140.830.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	210 Paket	140.830.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	Orang	245 Orang	5 Orang	49.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**110.838.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**188.838.000,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.758.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	10.758.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	21.030.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Paket	21.030.000,00	Kecamatan Tamalanrea

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	26.730.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Paket	26.730.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	22.320.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Dokumen	22.320.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	20 Laporan	30.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	30 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**251.718.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.092.390.000,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Unit	Unit	0 Unit	40 Unit	62.390.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Unit	62.390.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 Unit	Unit	0 Unit	10 Unit	189.328.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.045.352.120,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.045.352.120,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	231.828.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	231.828.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.813.524.120,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	1.813.524.120,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**864.343.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**886.243.000,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	36.380.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	73.490.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Unit	73.490.000,00	Kecamatan Tamalanrea

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.09 0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	676.293.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Unit	676.293.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7 01 01 2.09 0010	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 Unit	34 Unit	34 Unit	36 Unit	34.160.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	38 Unit	34.160.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7 01 01 2.09 0011	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	330 Unit	60 Unit	60 Unit	62 Unit	44.020.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	64 Unit	44.020.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**93%**	**90 %**	**90 %**	**15.394.438.642,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**15.444.106.802,00**	
	7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**34.884.242,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**84.552.402,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	34.884.242,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	84.552.402,00	Kecamatan Tamalanrea
	7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**15.359.554.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**15.359.554.400,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.359.554.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	15.359.554.400,00	Kecamatan Tamalanrea
	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**4.215.677.160,00**						**90 %**	**4.166.009.000,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**49.668.160,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**-**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	49.668.160,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	0 Laporan	-	Kecamatan Tamalanrea
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.166.009.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.166.009.000,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	166.009.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Lembaga Kemasyarakatan	166.009.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	240 Unit	48 Unit	48 Unit	48 Unit	3.200.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	48 Unit	3.200.000.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	800.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Pokmas / Ormas	800.000.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan***	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**94%**	**90 %**	**90 %**	**688.703.000,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**688.703.000,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**688.703.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**688.703.000,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	591.985.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	591.985.000,00	Kecamatan Tamalanrea
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	96.718.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	96.718.000,00	Kecamatan Tamalanrea

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**97%**	**100 %**	**100 %**	**8.787.595.104,00**						**100 %**	**8.787.595.104,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.787.595.104,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**8.787.595.104,00**	**Kecamatan Tamalanrea**
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8.787.595.104,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Dokumen	8.787.595.104,00	Kecamatan Tamalanrea
						Kecamatan Tamalate						**56.678.540.000,00**							**56.353.833.000,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**56.678.540.000,00**							**56.353.833.000,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**						**56.678.540.000,00**							**56.353.833.000,00**	
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** ***Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah***	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**19.972.442.137,00**						**100 %**	**19.647.735.137,00**	
							Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**13.066.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**12.558.300,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3.619.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.619.300,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.107.800,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.107.800,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.107.800,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.107.800,00	Kecamatan Tamalate

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	507.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	507.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	507.800,00	Kecamatan Tamalate
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**16.719.713.659,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**16.719.714.459,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/bulan	108 Orang/bulan	108 Orang/bulan	108 Orang/bulan	15.605.084.859,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	108 Orang/bulan	15.605.085.659,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	710.770.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	710.770.400,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	197.025.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	197.025.600,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.755.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	1.755.000,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	205.077.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	205.077.800,00	Kecamatan Tamalate
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Tamalate
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**573.200.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**249.000.000,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1325 Paket	0 Paket	265 Paket	265 Paket	165.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	265 Paket	165.000.000,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	19 Orang	15 Orang	15 Orang	408.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Tamalate
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**451.252.300,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**451.252.300,00**	**Kecamatan Tamalate**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	52.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	52.500.000,00	Kecamatan Tamalate
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	0 Paket	10 Paket	10 Paket	217.627.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Paket	217.627.800,00	Kecamatan Tamalate
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10 Paket	1 Paket	1 Paket	43.184.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	43.184.500,00	Kecamatan Tamalate
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	100 Paket	4 Paket	4 Paket	19.980.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Paket	19.980.000,00	Kecamatan Tamalate
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.960.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	9.960.000,00	Kecamatan Tamalate
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	10 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	108.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Tamalate
	7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**119.144.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**119.144.800,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	14 Unit	0 Unit	10 Unit	119.144.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Unit	119.144.800,00	Kecamatan Tamalate
	7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.349.952.528,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.349.952.528,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	101.324.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	101.324.000,00	Kecamatan Tamalate
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	235.103.388,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	235.103.388,00	Kecamatan Tamalate
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.575.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	129.575.000,00	Kecamatan Tamalate
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	883.950.140,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	883.950.140,00	Kecamatan Tamalate
	7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**530.112.750,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**530.112.750,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.770.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	39.770.000,00	Kecamatan Tamalate

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	850 Unit	161 Unit	170 Unit	170 Unit	202.360.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	170 Unit	202.360.000,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	50 Unit	0 Unit	50 Unit	52.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	50 Unit	52.800.000,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	235.182.750,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	235.182.750,00	Kecamatan Tamalate
	7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**16.698.807.700,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**16.698.807.700,00**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**93.062.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**93.062.600,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	93.062.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	93.062.600,00	Kecamatan Tamalate
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**16.605.745.100,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**16.605.745.100,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.605.745.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	16.605.745.100,00	Kecamatan Tamalate
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**5.688.436.055,00**						**90 %**	**5.688.436.055,00**	
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.688.436.055,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**5.688.436.055,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	188.436.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Lembaga Kemasyarakatan	188.436.100,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	110 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	4.326.106.831,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	22 Unit	4.326.106.831,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	55 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	1.173.893.124,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	11 Pokmas / Ormas	1.173.893.124,00	Kecamatan Tamalate
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan***	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**687.871.200,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**687.871.200,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**147.380.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**147.380.800,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.890.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	14.890.400,00	Kecamatan Tamalate
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	132.490.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	132.490.400,00	Kecamatan Tamalate
	7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**540.490.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**540.490.400,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7	01	04	2.02	0001	KoordinasiSinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan danatau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	540.490.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	540.490.400,00	Kecamatan Tamalate

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**13.630.982.908,00**						**100 %**	**13.630.982.908,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**13.630.982.908,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**13.630.982.908,00**	**Kecamatan Tamalate**
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13.630.982.908,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	13.630.982.908,00	Kecamatan Tamalate
						Kecamatan Ujung Pandang						**42.079.262.000,00**							**43.095.437.000,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**42.079.262.000,00**							**43.095.437.000,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**						**42.079.262.000,00**							**43.095.437.000,00**	
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** ***Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah***	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**15.463.395.516,00**						**100 %**	**16.479.570.516,00**	
							Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**44.930.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**37.104.700,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	11.994.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.994.700,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.344.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.875.100,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.388.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.217.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Pandang

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.110.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	9.110.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.635.233.412,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**12.635.234.112,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	725 Orang/bulan	135 Orang/bulan	145 Orang/bulan	145 Orang/bulan	11.543.411.612,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	145 Orang/bulan	11.543.412.312,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	637.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	637.800.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	307.002.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	307.002.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.354.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	4.354.400,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	142.665.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	142.665.400,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**257.662.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**236.662.500,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	0 Paket	6 Paket	6 Paket	152.662.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Paket	152.662.500,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	725 Orang	135 Orang	134 Orang	145 Orang	105.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	145 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**439.536.804,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**439.536.804,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.965.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	10.965.000,00	Kecamatan Ujung Pandang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	276.411.804,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	7 Paket	276.411.804,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	38.940.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	38.940.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	5.220.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	36 Dokumen	5.220.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	108.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	18 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.095.000.000,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**
	7 01 01 2.07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	9 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**980.364.900,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**980.364.900,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	61.358.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	61.358.400,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	161.320.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	161.320.900,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.100.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	6.100.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	751.585.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	751.585.600,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**839.667.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**839.667.500,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	42.020.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	42.020.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	171.240.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Unit	171.240.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	390 Unit	78 Unit	78 Unit	78 Unit	55.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	78 Unit	55.380.000,00	Kecamatan Ujung Pandang

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	538.087.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	538.087.500,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	01	2.09	0011	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	270 Unit	54 Unit	54 Unit	54 Unit	32.940.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	54 Unit	32.940.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**99%**	**90 %**	**90 %**	**16.190.709.700,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**16.190.709.700,00**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**57.941.800,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**57.941.800,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	57.941.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	57.941.800,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**16.132.767.900,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**16.132.767.900,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.132.767.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	16.132.767.900,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**85.38%**	**90 %**	**90 %**	**5.164.058.404,00**						**90 %**	**5.164.058.404,00**	
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.164.058.404,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**5.164.058.404,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	164.060.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Lembaga Kemasyarakatan	164.060.200,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	500 Unit	75 Unit	44 Unit	100 Unit	2.449.657.874,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Unit	2.449.657.874,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2.550.340.330,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Pokmas / Ormas	2.550.340.330,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan***	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**655.205.000,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**655.205.000,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**655.205.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**655.205.000,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	535.205.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	535.205.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	120.000.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**4.605.893.380,00**						**100 %**	**4.605.893.380,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.605.893.380,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.605.893.380,00**	**Kecamatan Ujung Pandang**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.605.893.380,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	4.605.893.380,00	Kecamatan Ujung Pandang
						Kecamatan Ujung Tanah						**32.358.163.000,00**							**32.151.095.000,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**32.358.163.000,00**							**32.151.095.000,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**						**32.358.163.000,00**							**32.151.095.000,00**	
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**13.092.504.124,00**						**100 %**	**12.916.757.924,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**56.538.900,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**41.629.600,00**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	14.354.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.354.200,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.345.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.458.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.354.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.503.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.246.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	-	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.275.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	11.275.400,00	Kecamatan Ujung Tanah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**10.846.837.788,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**10.846.839.188,00**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	245 Orang/bulan	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	9.532.809.448,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	49 Orang/bulan	9.532.810.848,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	652.848.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	652.848.700,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	329.579.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	329.579.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	331.600.640,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	331.600.640,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	**01**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**0 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**11.838.300,00**					**Perangkat Daerah**	**0 %**	**-**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7	01	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	45 Dokumen	9 Dokumen	0 Dokumen	9 Dokumen	11.838.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	9 Dokumen	-	Kecamatan Ujung Tanah
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**297.750.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**165.750.000,00**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	810 Paket	0 Paket	0 Paket	162 Paket	81.750.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	162 Paket	81.750.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	488 Orang	20 Orang	45 Orang	74 Orang	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	86 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**317.788.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**255.788.500,00**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	54.815.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	54.815.300,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.695.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	7.695.500,00	Kecamatan Ujung Tanah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	68.117.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Paket	68.117.700,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	17.160.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	17.160.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158 Laporan	20 Laporan	5 Laporan	24 Laporan	170.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	28 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**833.088.036,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**833.088.036,00**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	351.784.096,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	351.784.096,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	481.303.940,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	481.303.940,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**512.662.600,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**512.662.600,00**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	39.380.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	905 Unit	181 Unit	181 Unit	181 Unit	303.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	181 Unit	303.600.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	350 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit	63.410.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	70 Unit	63.410.000,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7 01 01 2.09 0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	2 Unit	1 Unit	106.272.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	106.272.600,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**98%**	**90 %**	**90 %**	**8.974.107.460,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**9.182.228.260,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.974.107.460,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**8.942.785.660,00**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.974.107.460,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	8.942.785.660,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**4.905.406.200,00**						**90 %**	**4.665.963.600,00**	
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**33%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**239.442.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**-**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	239.442.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	0 Laporan	-	Kecamatan Ujung Tanah
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.665.963.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.665.963.600,00**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	165.963.600,30	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	9 Lembaga Kemasyarakatan	165.963.600,30	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	160 Unit	63 Unit	32 Unit	32 Unit	2.427.724.618,40	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	32 Unit	2.427.724.618,40	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	45 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	2.072.275.381,30	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	9 Pokmas / Ormas	2.072.275.381,30	Kecamatan Ujung Tanah
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**89%**	**90 %**	**90 %**	**723.577.660,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**723.577.660,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan														
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**723.577.660,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**723.577.660,00**	**Kecamatan Ujung Tanah**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	517.781.120,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	517.781.120,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	205.796.540,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	205.796.540,00	Kecamatan Ujung Tanah
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**4.662.567.556,00**						**100 %**	**4.662.567.556,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.662.567.556,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.662.567.556,00**	**Kecamatan Ujung Tanah**
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.662.567.556,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	4.662.567.556,00	Kecamatan Ujung Tanah
						Kecamatan Wajo						**31.153.758.000,00**							**30.829.721.000,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**31.153.758.000,00**							**30.829.721.000,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**						**31.153.758.000,00**							**30.829.721.000,00**	
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** ***Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah***	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**13.721.716.364,00**						**100 %**	**13.397.679.364,00**	
							Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**43.490.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**39.490.000,00**	**Kecamatan Wajo**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	10.490.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.490.000,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Wajo

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	13.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**11.152.606.104,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**11.152.606.804,00**	**Kecamatan Wajo**
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385 Orang/bulan	Orang/bulan	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	10.442.211.704,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	77 Orang/bulan	10.442.212.404,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	522.600.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	522.600.000,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	164.794.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	164.794.400,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	8.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Wajo**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	Laporan	0 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	**01**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**0 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**82.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**0 %**	**-**	**Kecamatan Wajo**
	7	01	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	82.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	Kecamatan Wajo
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**372.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**165.000.000,00**	**Kecamatan Wajo**
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang	Orang	8 Orang	15 Orang	372.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	20 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**422.349.800,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**400.349.800,00**	**Kecamatan Wajo**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	16.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	16.200.000,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	53.469.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	53.469.800,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	12.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	210.680.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	210.680.000,00	Kecamatan Wajo
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Laporan	2 Laporan	8 Laporan	130.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**54.101.300,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**45.063.600,00**	**Kecamatan Wajo**
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Unit	0 Unit	10 Unit	54.101.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	10 Unit	45.063.600,00	Kecamatan Wajo
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**903.156.960,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**903.156.960,00**	**Kecamatan Wajo**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	367.354.560,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	367.354.560,00	Kecamatan Wajo
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.422.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	75.422.400,00	Kecamatan Wajo
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	460.380.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	460.380.000,00	Kecamatan Wajo
	7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**476.012.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**476.012.200,00**	**Kecamatan Wajo**
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	39.520.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	39.520.000,00	Kecamatan Wajo
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	Unit	24 Unit	24 Unit	297.831.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	24 Unit	297.831.200,00	Kecamatan Wajo
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	425 Unit	Unit	85 Unit	85 Unit	38.550.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	85 Unit	38.550.000,00	Kecamatan Wajo
	7 01 01 2.09 0009	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Unit	1 Unit	3 Unit	100.111.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	100.111.000,00	Kecamatan Wajo
	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ***Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan***	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**8.195.200.000,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**8.195.200.000,00**	
	7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**35.200.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**35.200.000,00**	**Kecamatan Wajo**
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45 Dokumen	Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	35.200.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	9 Dokumen	35.200.000,00	Kecamatan Wajo

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.160.000.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**8.160.000.000,00**	**Kecamatan Wajo**
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.160.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	8.160.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**0%**	**90 %**	**90 %**	**4.188.800.000,00**						**90 %**	**4.188.800.000,00**	
						Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**10%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.188.800.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.188.800.000,00**	**Kecamatan Wajo**
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	188.800.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Lembaga Kemasyarakatan	188.800.000,00	Kecamatan Wajo
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	235 Unit	Unit	24 Unit	30 Unit	2.164.362.183,10	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	38 Unit	2.164.362.183,10	Kecamatan Wajo
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40 Pokmas / Ormas	Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.835.637.816,90	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Pokmas / Ormas	1.835.637.816,90	Kecamatan Wajo
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**97%**	**90 %**	**90 %**	**472.342.600,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**472.342.600,00**	
						Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan														
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**472.342.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**472.342.600,00**	**Kecamatan Wajo**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	376.342.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	376.342.600,00	Kecamatan Wajo

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	96.000.000,00	Kecamatan Wajo
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**4.575.699.036,00**						**100 %**	**4.575.699.036,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.575.699.036,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**4.575.699.036,00**	**Kecamatan Wajo**
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	40 Dokumen	Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	4.575.699.036,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	8 Dokumen	4.575.699.036,00	Kecamatan Wajo
						Kecamatan Kepulauan Sangkarrang						**14.665.753.000,00**							**14.762.452.000,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**14.665.753.000,00**							**14.762.452.000,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**						**14.665.753.000,00**							**14.762.452.000,00**	
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** ***Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah***	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**9.509.707.232,00**						**100 %**	**9.606.406.232,00**	
							Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.407.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**7.206.000,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.201.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.201.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.201.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.201.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.201.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.201.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.201.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.201.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.201.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.201.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1.201.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1.201.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	1.201.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.729.891.912,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**6.729.891.912,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	Orang/bulan	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	6.097.281.312,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	22 Orang/bulan	6.097.281.312,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	449.280.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	449.280.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	180.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	180.000.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.304.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	1.304.400,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.026.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	2.026.200,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**216.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**216.000.000,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	216.000.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**150.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**138.000.000,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350 Paket	Paket	70 Paket	70 Paket	54.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	70 Paket	54.000.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Orang	8 Orang	8 Orang	96.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	8 Orang	84.000.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**84.061.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**142.061.200,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1.050.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	1.050.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	8.261.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	8.261.200,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	14.750.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	14.750.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Paket	0 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	2.000.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.000.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	108.000.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.374.103.920,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.374.103.920,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.383.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	49.383.600,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.324.720.320,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	1.324.720.320,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**947.243.200,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**969.143.200,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	40.770.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	40.770.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	Unit	24 Unit	24 Unit	883.901.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	24 Unit	883.901.200,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	22.572.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	22.572.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**90 %**	**96%**	**90 %**	**90 %**	**1.509.578.400,00**			**(PN 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**(PD 9) Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim**		**90 %**	**1.509.578.400,00**	
		Outcome :Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan														
	7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**184.991.400,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**184.991.400,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	184.991.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	184.991.400,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.324.587.000,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.324.587.000,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.324.587.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	1.324.587.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**90 %**	**4%**	**90 %**	**90 %**	**1.605.204.300,00**						**90 %**	**1.605.204.300,00**	
		Outcome :Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**90 %**	**4%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.605.204.300,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.605.204.300,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	105.204.300,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Lembaga Kemasyarakatan	105.204.300,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	Unit	5 Unit	5 Unit	883.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	5 Unit	883.500.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	616.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Pokmas / Ormas	616.500.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan***	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**	**37.577.500,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**37.577.500,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**37.577.500,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**37.577.500,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	37.577.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Laporan	37.577.500,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ***Outcome :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahahumum lingkup Kecamatan***	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**92%**	**100 %**	**100 %**	**2.003.685.568,00**						**100 %**	**2.003.685.568,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.003.685.568,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**2.003.685.568,00**	**Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.989.285.568,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	1.989.285.568,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	12 Dokumen	14.400.000,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**30.448.870.000,00**							**31.287.041.000,00**	
	8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**30.448.870.000,00**							**31.287.041.000,00**	
	8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**30.448.870.000,00**							**31.287.041.000,00**	
	8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**9.276.888.760,00**						**100 %**	**9.375.059.760,00**	
						Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50.239.500,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**67.410.100,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	21.434.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Dokumen	40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.571.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.250.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.175.500,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.175.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.984.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.984.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	13.823.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	13.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.792.486.760,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**7.792.487.160,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205 Orang/bulan	24 Orang/bulan	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	7.314.807.360,00	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	41 Orang/bulan	7.314.807.760,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	311.520.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	311.520.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	166.159.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	166.159.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336.000.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**88.500.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**169.500.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	17 Orang	21 Orang	6 Orang	88.500.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Orang	88.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**259.572.100,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**259.572.100,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.844.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	2.844.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	44.738.900,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	44.738.900,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.060.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	11.060.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	16.117.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	16.117.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	54.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	130.812.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	130.812.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**94.269.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**94.269.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	2 Unit	2 Unit	8 Unit	94.269.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	9 Unit	94.269.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**402.971.400,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**402.971.400,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	12.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	390.971.400,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	390.971.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**252.850.000,00**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**252.850.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	42.880.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	42.880.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	187.250.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Unit	187.250.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	40 Unit	35 Unit	32 Unit	22.720.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	32 Unit	22.720.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** ***Outcome :Meningkatnya kualitas pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan***	**Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**95 %**	**64%**	**80 %**	**80 %**	**3.004.829.360,00**						**90 %**	**3.504.829.360,00**	
	8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.004.829.360,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**3.504.829.360,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	245.629.960,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	245.629.960,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	177.484.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	80 Orang	177.484.700,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	630 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	2.581.714.700,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	70 Orang	3.081.714.700,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** ***Outcome :Meningkatnya etika dan budaya politik***	**Persentase pendidikan politik pada kader partai politik**	**95 %**	**100%**	**85 %**	**85 %**	**3.790.853.200,00**						**90 %**	**3.790.853.200,00**	
	8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.790.853.200,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**3.790.853.200,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	3.790.853.200,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	3.790.853.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** ***Outcome :Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan***	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**95 %**	**100%**	**85 %**	**85 %**	**210.231.060,00**						**90 %**	**210.231.060,00**	
	8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**210.231.060,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**210.231.060,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	210.231.060,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	210.231.060,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** ***Outcome :Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat***	**Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan**	**95 %**	**100%**	**85 %**	**85 %**	**1.502.342.600,00**				**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**1.502.342.600,00**	
	8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.502.342.600,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1.502.342.600,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	1.502.342.600,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	100 Orang	1.502.342.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** ***Outcome :Menurunnya jumlah konflik sosial***	**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**	**95 %**	**100%**	**85 %**	**85 %**	**12.663.725.020,00**			**(PN 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**	**(PD 7) Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi**		**90 %**	**12.903.725.020,00**	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.663.725.020,00**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**12.903.725.020,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	11.302.368.000,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	11.302.368.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	497.605.220,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Dokumen	497.605.220,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	863.751.800,00	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Dokumen	1.103.751.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH												**5.106.461.612.000,00**							**5.200.037.452.000,00**	

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

BAPPEDA
KOTA MAKASSAR

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

—Kota Makassar

Gedung Balaikota, Jalan Ahmad Yani No. 2
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111, Indonesia.

[0411]—3616940

makassarkota.go.id